SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rencana kerja pemerintah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 mengacu pada visi, misi, dan program Gubernur Jawa Barat periode 2025-2029 yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah daerah teknokratik dan mengacu pada rencana kerja pemerintah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 untuk periode tahun 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:
   a. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026; dan
   b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.

BAB II
ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

a. BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen dan sistematika;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program tujuan RKPD sampai tahun 2026, permasalahan pembangunan daerah, dan inovasi;
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, dan alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
d. BAB IV Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2026, memuat tujuan dan sasaran Pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026;
e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, memuat arah kebijakan indikator makro Daerah Kabupaten/Kota, arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota, dan sinergitas pembangunan daerah;
f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026, memuat rencana pendukungan alternatif pendanaan pembangunan tahun 2026, sinkronisasi dan keterkaitan antaran program prioritas pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan nasional tahun 2026 serta dukungan pendanaan pada RKPD Tahun 2026, dan rencana program dan kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat penetapan indikator dan target kinerja utama tahun 2026 dan indikator kinerja tahun 2025; dan
h. BAB VIII Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

RKPD 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 memiliki arti strategis karena menjadi salah satu dokumen awal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045. Penyusunan dokumen ini juga menjadi lebih bermakna karena bertepatan dengan periode awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih hasil Pilkada Tahun 2024 untuk masa jabatan 2025–2029, yang akan menjadi penggerak utama arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD Tahun 2026 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-6
1.3 Hubungan Antara Dokumen RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.5 Sistematika I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-29
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-92
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-182
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai Tahun 2025 ..... II-224
2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026 ..... II-224
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2024 ..... II-239
2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*) II-240
2.2.4 Realisasi Sasaran RPJMD/RPD II-284
2.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) II-288
2.2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-300
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-302
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-302
2.3.2 Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-307

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Global III-1

3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional III-3

3.1.3 Kondisi dan Prospek Perekonomian Daerah III-7

3.1.4 Kondisi dan Prospek Komponen PDRB III-9

3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat III-16

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-21

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-25

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-33

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-40

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah III-42

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-42

3.3.2 APBD Kabupaten/Kota III-43

3.3.3 Dana Masyarakat/Umat III-44

3.3.4 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) III-45

3.3.5 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP). III-47

3.3.6 Hibah III-50

3.3.7 Pendanaan Obligasi Daerah dan Sukuk III-52

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-3

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya IV-3

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat IV-15

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat IV-21

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-48

4.2.1 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-48

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

4.2.3 Program Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-138
4.2.4 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan..... IV-218
4.2.5 Kebijakan Kerjasama Perbatasan..... IV-232
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota V-1
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota V-3
5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Pengembangan Wilayah V-3
5.2.2 Arah Kebijakan Kawasan Strategis di Provinsi Jawa Barat V-33
5.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi V-37
5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah V-72
5.3.1 Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Asta Cita V-73
5.3.2 Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Sasaran Pembangunan Provinsi..... V-77
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026 ..... VI-1
6.1 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2026 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2026 ..... VI-2
6.2 Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan P embangunan Tahun 2026..... VI-11
6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2026 ..... VI-11
6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) VI-16
6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026..... VI-20
6.3.1 Pendanaan dari Obligasi Daerah/Sukuk Daerah .. VI-30
6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VI-31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VII-1
7.1 Penetapan Indikator Utama Pembangunan VII-1
7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... VII-2
7.2.1 Indikator Kinerja Makro..... VII-2
7.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VII-3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

7.2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VII-4

BAB VIII PENUTUP VIII-1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan II-2
Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Topografi II-4
Tabel 2.3 Jumlah Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.4 Luasan Curah Hujan Tahunan Provinsi Jawa Barat .. II-6
Tabel 2.5 Batuan Geologi di Provinsi Jawa Barat II-7
Tabel 2.6 Nama DAS Lintas Provinsi Berdasarkan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat II-8
Tabel 2.7 Nama dan Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-9
Tabel 2.8 Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat II-16
Tabel 2.9 Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat II-17
Tabel 2.10 Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat . II-18
Tabel 2.11 Data Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-18
Tabel 2.12 Sandingan Tutupan Lahan dan Rencana Pola Ruang. II-22
Tabel 2.13 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-24
Tabel 2.14 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-24
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB berdasarkan Triwulanan Tahun 2023-2024 (dalam persen, yoy) II-31
Tabel 2.16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (persen)..... II-33
Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (persen)..... II-34
Tabel 2.18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (persen)..... II-35
Tabel 2.19 PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2024 ..... II-36
Tabel 2.20 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2024 (Ribu Rupiah)..... II-37
Tabel 2.21 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (ribu rupiah) II-39
Tabel 2.22 Nilai Tukar Petani menurut Subsektor Tahun 2022-2024 (Persen)..... II-41

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.23 Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 ..... II-41
Tabel 2.24 *Gini Ratio* Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 .. II-46
Tabel 2.25 *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-47
Tabel 2.26 Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-51
Tabel 2.28 Usia Harapan Hidup Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (tahun)..... II-54
Tabel 2.29 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) II-54
Tabel 2.30 Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Tahun)..... II-57
Tabel 2.31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (Tahun)..... II-58
Tabel 2.32 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Tahun)..... II-60
Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024 (Tahun)..... II-61
Tabel 2.34 Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun)..... II-64
Tabel 2.35 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun) II-64
Tabel 2.36 Kondisi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-66
Tabel 2.37 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-67
Tabel 2.38 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-67
Tabel 2.39 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024..... II-71
Tabel 2.40 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024..... II-74
Tabel 2.41 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023..... II-75
Tabel 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen) II-81
Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-81
Tabel 2.44 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024..... II-86
Tabel 2.45 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024..... II-87
Tabel 2.46 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024..... II-89
Tabel 2.47 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2024 ..... II-93
Tabel 2.48 Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Barat..... II-97
Tabel 2.49 Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat II-99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 2.50 Daftar Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMA Negeri dan Swasta II-100
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-101
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-102
Tabel 2.53 Tingkat Kemantapan Rata-Rata Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat II-106
Tabel 2.54 Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 ..... II-109
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-112
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 . II-114
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-114
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-116
Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-117
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-119
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-123
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-124
Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-124
Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-133
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-135
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-136
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-137
Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ... II-140
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-141
Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-143
Tabel 2.71 Realisasi Investasi 2022-2024 ..... II-144

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.72 Tren Lokasi PMDN Tahun 2022-2024 ..... II-144
Tabel 2.73 Tren Lokasi PMA Tahun 2022-2024 ..... II-144
Tabel 2.74 Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2022-2024 ..... II-145
Tabel 2.75 Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2022-2024 ..... II-146
Tabel 2.76 Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-146
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-147
Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-148
Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-149
Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-150
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-152
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-153
Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 .... II-154
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-155
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-157
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-158
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-161
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-163
Tabel 2.89 Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-165
Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat II-166
Tabel 2.91 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024 ..... II-167
Tabel 2.92 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-170
Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024 ..... II-172
Tabel 2.94 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-178
Tabel 2.95 Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-178
Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-180

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 2.97 Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2024 ..... II-181
Tabel 2.98 Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-182
Tabel 2.99 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024 ..... II-197
Tabel 2.100 Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-198
Tabel 2.101 Data Sebaran Industri Besar dan IKM di Provinsi Jawa Barat II-199
Tabel 2.102 Kondisi Eksisting Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . II-199
Tabel 2.103 Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) Tahun 2024 ..... II-204
Tabel 2.104 Panjang Ruas Jalan berdasarkan Kewenangan Pengelolaan II-206
Tabel 2.105 Kondisi Jalan Nasional..... II-206
Tabel 2.106 Kondisi Jalan Tol yang Beroperasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-207
Tabel 2.107 Kondisi Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota II-208
Tabel 2.108 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota II-209
Tabel 2.109 Kondisi Jalan Desa berdasarkan Kabupaten/Kota II-210
Tabel 2.110 Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-215
Tabel 2. 111 Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 ..... II-223
Tabel 2.112 Persandingan Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024 ..... II-227
Tabel 2.113 Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2024 ..... II-229
Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-232
Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... II-235
Tabel 2.116 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome)*..... II-239
Tabel 2.117 Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*)..... II-242
Tabel 2.118 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat hingga Triwulan IV Tahun 2024 ..... II-266
Tabel 2.119 Ringkasan Realisasi Sasaran RPJMD/RPD Menurut Misi II-284
Tabel 2.120 Realisasi Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-286
Tabel 2.121 Target dan capaian Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat ahun 2024 ..... II-300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 3.1 Proyek Strategis Nasional Infrastruktur di Jawa Barat III-6
Tabel 3.2 Program Strategis Nasional di Jawa Barat III-7
Tabel 3.3 Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026 III-8
Tabel 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen) III-12
Tabel 3.5 Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 ..... III-13
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024, APBD Tahun 2025 dan Target Tahun 2026-2027 ..... III-22
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 - 2027 .... III-26
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 s.d. Tahun 2027 ..... III-38
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d 2027 ..... III-41
Tabel 3.10 Alokasi APBN Jawa Barat Tahun 2022-2025 ..... III-42
Tabel 3.11 Data APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023-2025 ..... III-43
Tabel 3.12 Realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024 ..... III-47
Tabel 4.1 Indikasi Intervensi/ProP per Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Barat IV-6
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-17
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-21
Tabel 4.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-54
Tabel 4.5 Program Direktif Presiden pada RKP Tahun 2026 ..... IV-58
Tabel 4.6 *Highlight* Intevensi Provinsi Jawa Barat IV-67
Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis Jawa Barat Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, serta Isu Strategi/Tanggapan dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026 ..... IV-77
Tabel 4.8 Sandingan Program Prioritas dan 9 Langkap Membangun Jawa Barat IV-105
Tabel 4.9 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-107
Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembanguan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-110
Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2026 ..... IV-122
Tabel 4.12 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 ..... IV-130
Tabel 4.13 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 kedalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah IV-138

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.14 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul..... IV-150
Tabel 4.15 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif..... IV-158
Tabel 4.16 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya IV-168
Tabel 4.17 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*..... IV-192
Tabel 4.18 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-204
Tabel 4.19 Keterkaitan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarustamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-214
Tabel 4.20 Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat IV-230
Tabel 5.1 Target Indikator Makro dan Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-1
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2026..... V-38
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Bidang Urusan dalam Mendukung Asta Cita..... V-73
Tabel 5.4 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan..... V-78
Tabel 5.5 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan..... V-79
Tabel 5.6 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum V-80
Tabel 5.7 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penataan Ruang V-81
Tabel 5.8 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat..... V-82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.9 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial V-82
Tabel 5.10 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja V-83
Tabel 5.11 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-84
Tabel 5.12 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan V-84
Tabel 5.13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan V-85
Tabel 5.14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup V-85
Tabel 5.15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-86
Tabel 5.16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-86
Tabel 5.17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan V-87
Tabel 5.18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika V-88
Tabel 5.19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah V-88
Tabel 5.20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal V-89
Tabel 5.21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olahraga V-89
Tabel 5.22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan V-90
Tabel 5.23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik V-91
Tabel 5.24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian V-91
Tabel 5.25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan V-92
Tabel 5.26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan V-92
Tabel 5.27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan V-92
Tabel 5.28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata V-93
Tabel 5.29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian dan Pangan V-94
Tabel 5.30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan V-95
Tabel 5.31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral V-95
Tabel 5.32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan V-96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian V-96
Tabel 5.34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi V-97
Tabel 5.35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik V-97
Tabel 5.36 Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota V-98
Tabel 5.37 Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota V-98
Tabel 6.1 Rencana Program dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... VI-4
Tabel 6.2 Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VI-12
Tabel 6.3 Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2026 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... VI-16
Tabel 6.4 Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2026 ... VI-18
Tabel 6.5 Prospek Proyek KPBU VI-19
Tabel 6.6 Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 ..... VI-22
Tabel 6.7 Rencana Program/Kegiatan untuk Mendungkung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-30
Tabel 6.8 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang bersumber APBD Tahun 2026 ..... VI-31
Tabel 6.9 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026..... VI-32
Tabel 6.10 Proyek Strategis/Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VI-34
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Barat..... VII-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... VII-3
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 VII-6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rencana Jadwal Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 .....I-3
Gambar 1.2 Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.....I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-11
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat II-4
Gambar 2.2 Peta Kekritisan Daerah Aliran Sungai Jawa Barat II-15
Gambar 2.3 Peta Indeks Risiko Bencana Jawa Barat Tahun 2024 .II-19
Gambar 2.4 Peta Wilayah Ruang Laut Provinsi Jawa Barat.....II-20
Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....II-21
Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.....II-21
Gambar 2.7 Perbandingan Jumlah Luas Lahan Pertanian dan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....II-23
Gambar 2.8 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....II-25
Gambar 2.9 Kampung Adat Yang Direkomendasikan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat (KMHA) Di Jawa Barat II-28
Gambar 2.10 Grafik Nilai Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 .....II-28
Gambar 2.11 Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen) II-30
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 (Persen) II-30
Gambar 2.13 Nilai PDRB Per Kapita Nasional dan Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-36
Gambar 2.14 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah) II-38
Gambar 2.15 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2022-2024.....II-40
Gambar 2.16 Perkembangan Inflasi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (*y-to-y)* persen.....II-42
Gambar 2.17 Perbandingan Inflasi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (m-to-m) persen) II-42
Gambar 2.18 Realisasi *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 .....II-44
Gambar 2.19 Perkembangan *Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024.....II-45
Gambar 2.20 Peta Capaian *Gini Ratio* Tahun 2023.....II-48
Gambar 2.21 Perbandingan IPM Jawa Barat dan Nasional.....II-49
Gambar 2.22 Perbandingan IPM di Pulau Jawa (dalam poin) II-49

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.23 Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....II-50
Gambar 2.24 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 .....II-51
Gambar 2.25 Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun).....II-53
Gambar 2.26 Pola Spasial Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun).....II-56
Gambar 2.27 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun).....II-57
Gambar 2.28 Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun).....II-59
Gambar 2.29 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun).....II-60
Gambar 2.30 Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun).....II-62
Gambar 2.31 Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Tahun 2020-2024 (Rp.000).....II-63
Gambar 2.32 Pola Spasial Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Rp.000/kapita/tahun) II-65
Gambar 2.33 Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Persen).....II-69
Gambar 2.34 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024.....II-70
Gambar 2.35 Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Maret 2024 .....II-72
Gambar 2.36 Pola Spasial Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota.....II-74
Gambar 2.37 Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Juta Jiwa dan Persen) II-77
Gambar 2.38 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2024.....II-77
Gambar 2.39 Proporsi Pekerja Formal dan Informal (dalam persen) .II-78
Gambar 2.40 Proporsi Pekerja Formal dan Informal berdasarkan Jenis Kelamin (dalam persen) II-78
Gambar 2.41 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen) II-78
Gambar 2.42 Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa (dalam Rp. Juta per Jiwa).....II-79
Gambar 2.43 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (dalam rupiah) .II-79
Gambar 2.44 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022-2024 .....II-80
Gambar 2.45 Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen).....II-82
Gambar 2.46 Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023.II-83
Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024.....II-84
Gambar 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Jawa-Bali Tahun 2024 .....II-85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.49 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2024 ..... II-87
Gambar 2.50 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024 ..... II-88
Gambar 2.51 Capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... II-90
Gambar 2.52 Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... II-93
Gambar 2.53 Perkembangan IRB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020- 2023 ..... II-94
Gambar 2.54 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 ..... II-95
Gambar 2.55 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Per Aspek Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 ..... II-96
Gambar 2.56 Peta Jaringan Jalan Eksisting di Provinsi Jawa Barat II-105
Gambar 2.57 Rata-rata tingkat kemantapan jalan per Kabupaten/Kota II-107
Gambar 2.58 Capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-109
Gambar 2.59 Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-111
Gambar 2.60 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-126
Gambar 2.61 Capaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-130
Gambar 2.62 IDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-134
Gambar 2.63 Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P Jawa Barat Tahun 2025-2050 ..... II-161
Gambar 2.64 Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... II-168
Gambar 2.65 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023-2024 ..... II-168
Gambar 2.66 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024 ..... II-183
Gambar 2.67 Kelompok Usia Penduduk II-184
Gambar 2.68 Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2030 ..... II-186
Gambar 2.69 Perbandingan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat dan Pulau Jawa Tahun 2024 ..... II-186
Gambar 2.70 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-188
Gambar 2.71 TPAK Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... II-189
Gambar 2.72 Perbandingan TPAK Jawa Barat dengan Provinsi Lain II-189
Gambar 2.73 Capaian Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat Tahun 2015-2023 ..... II-191
Gambar 2.74 Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2023 II-192
Gambar 2.75 Analisis Kuadran IBEI Tahun 2023 ..... II-192
Gambar 2.76 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 ..... II-194
Gambar 2.77 Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... II-194
Gambar 2.78 Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat II-198

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.79 Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024 .....II-201
Gambar 2.80 Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024 .....II-202
Gambar 2.81 Sebaran Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Tingkat Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2024 .....II-203
Gambar 2.82 Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) Tahun 2021-2024.....II-204
Gambar 2.83 Peta Jaringan Jalan Eksisting Provinsi Jawa Barat.....II-212
Gambar 2.84 Capaian Persentase Rumah Tangga Hunian Layak Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....II-213
Gambar 2.85 Jumlah Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....II-217
Gambar 2.86 Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 .....II-218
Gambar 2.87 Perbandingan IDM Pulau Jawa dan Bali Tahun 2024 .II-218
Gambar 2.88 Tren Inflasi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024 (*y-o-y*, %) II-220
Gambar 2.89 Nilai dan *Share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2020-2023.....II-222
Gambar 2.90 Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2018-2020 .....II-223
Gambar 2.91 Status Ketercapaian Target Indikator SDGs Jawa Barat Per Pilar II-289
Gambar 2.92 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2010-2024.....II-303
Gambar 2.93 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Tahun 2010-2024.....II-304
Gambar 3.1 Trayektori Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....III-5
Gambar 3.2 Kolaborasi Pendanaan Pembangunan III-20
Gambar 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan SMART TAX III-30
Gambar 3.4 Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa BaratIII-46
Gambar 3.5 Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat III-46
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....IV-2
Gambar 4.2 8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional.....IV-3
Gambar 4.3 Target sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2029 .....IV-4
Gambar 4.4 Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen....IV-5
Gambar 4.5 Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas IV-5
Gambar 4.6 *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Jawa Barat IV-11
Gambar 4.7 Pengarusutamaan SDGs Provinsi Jawa Barat.....IV-13
Gambar 4.8 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 .....IV-57
Gambar 4.9 Sasaran Pembangunan Jawa Barat IV-67
Gambar 4.10 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Nasional IV-202
Gambar 4.11 Dukungan 9 (Sembilan) Langkah Membangun Jawa Barat Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat.....IV-203

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 4.12 Peta Rencana Struktur Ruang IV-225
Gambar 4.13 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi Jawa Barat.....IV-228
Gambar 4.14 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat.....IV-229
Gambar 4.15 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat IV-232
Gambar 4.16 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah IV-234
Gambar 4.17 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Daerah Khusus Jakarta.....IV-235
Gambar 4.18 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten....IV-236
Gambar 5.1 Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur V-4
Gambar 5.2 Wilayah Pengembangan Purwasuka.....V-11
Gambar 5.3 Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning.....V-15
Gambar 5.4 Wilayah Pengembangan Priangan Timur – Pangandaran V-21
Gambar 5.5 Wilayah Pengembangan Sukabumi dan Sekitarnya V-24
Gambar 5.6 Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung V-28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85



BAB I
PENDAHULUAN

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran visi misi Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029. Visi Gubernur Provinsi Jawa Barat adalah ”Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata” yang diterjemahkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance;*

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan memadukan beberapa metodologi diantaranya:

1. Pendekatan *pentahelix*-ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*) merupakan pendekatan yang menggabungkan atau mengkolaborasikan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan Jawa Barat.
2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, Pinjaman Daerah, obligasi daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

(PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;

3. Pendekatan *dynamic government* sebagai pendekatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan inovasi serta mampu menghadapi tantangan lingkungan yang berubah-ubah secara efektif;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial untuk pembangunan yang inklusif di 6 (enam) wilayah pengembangan pembangunan Jawa Barat;
5. Pendekatan sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi pembangunan daerah sebagai penyelarasan berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
   a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   b. Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Proses perencanaan dan penganggaran TA 2026 dimulai pada akhir Tahun 2024 pada Bulan November dan Desember dengan pembahasan kamus usulan dengan perangkat daerah sebagai bahan dalam mengklasifikasikan perencanaan pembangunan daerah, dan *Kick Off Meeting* perencanaan untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan tujuan, dan menetapkan ekspektasi di antara semua pihak yang terlibat dan hasil Rakortekrenbang dari kesepakatan perencanaan pemerintah daerah dalam pencapaian target nasional di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKPD 2026. Pada awal tahun 2025, untuk mencapai kesempurnaan dari Rancangan Awal RKPD 2026 ini dilakukan penjaringan masukan dan penyelarasan

1D17AF9E85

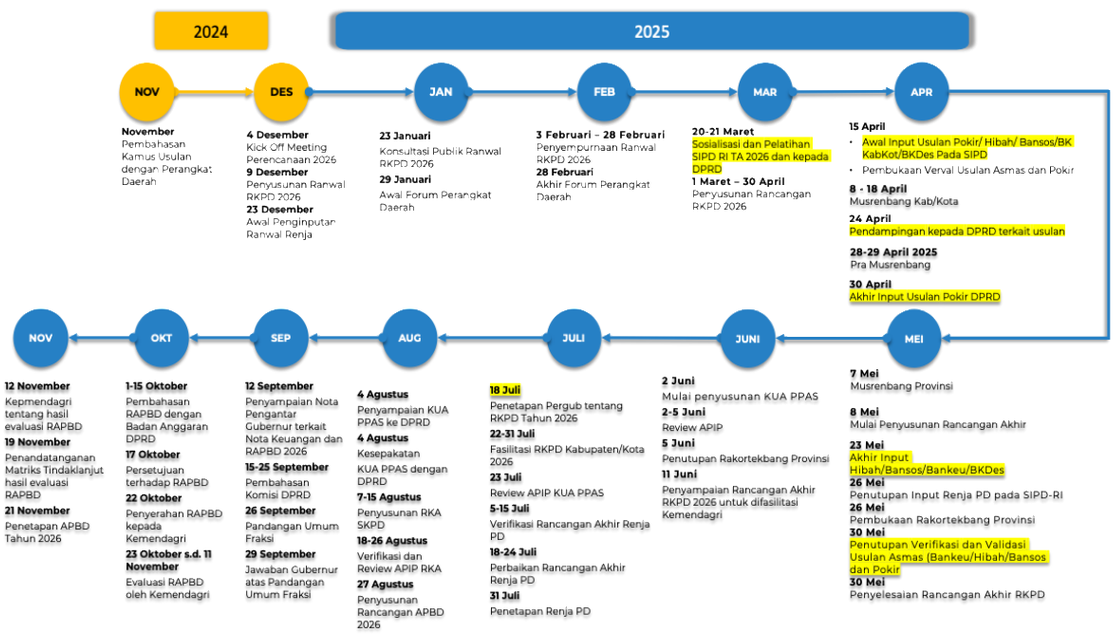
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

perencanaan program, kegiatan dan penganggaran dilaksanakan Forum Konsultasi Publik.

Selanjutnya, dalam kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota, Pra-Musrenbang Provinsi, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi sebagai forum pertemuan antara pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Tahun 2026. Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional, dilakukan penajaman dan penetapan daftar rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Jawa Barat untuk rancangan akhir RKPD Tahun 2026. Selanjutnya, RKPD Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur pada minggu ketiga bulan Juli Tahun 2025.

Adapun jadwal penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Rencana Jadwal Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara umum, dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; acuan dalam

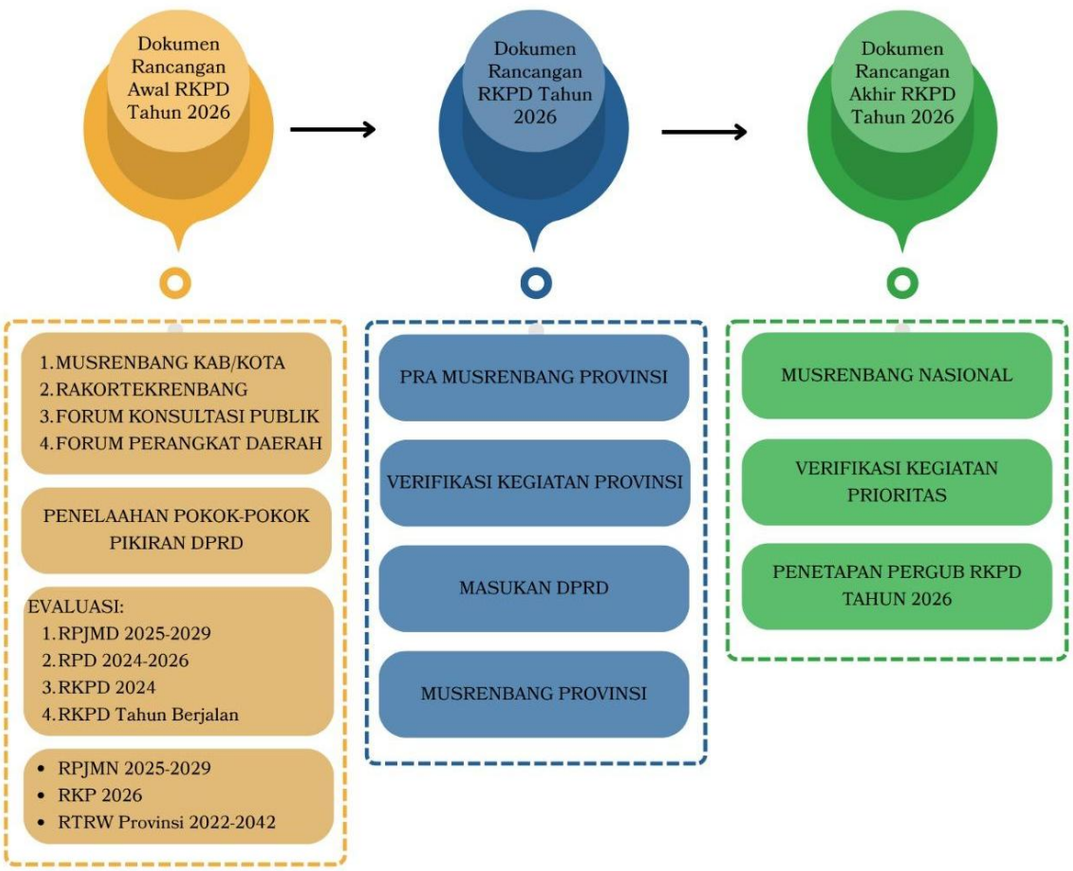
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 melalui beberapa alur proses penyusunan substansi sebagaimana pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain itu, Alur proses penyusunan substansi pada proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

1. Proses Teknokratik

   a. Diawali dengan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dan informasi pembangunan daerah dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
   b. Pelaksanaan evaluasi atas capaian pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.
   c. Penelaahan terhadap kebijakan nasional yang mencakup program strategis dan *mandatory* harus dilaksanakan oleh daerah.

   Seluruh hasil dari kegiatan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan permasalahan, isu strategis, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus perencanaan yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses teknokratik ini melibatkan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, DPRD, serta pihak-pihak yang kompeten.

2. Proses *bottom up*

   a. Pelaksanaan konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan musrenbang yang melibatkan unsur *pentahelix* meliputi akademisi, pebisnis/pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, serta media.
   b. Verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota yang diakomodir dalam bentuk hibah/bantuan sosial.
   c. Verifikasi usulan dari komunitas/lembaga/individu yang berasal dari masyarakat melalui SIPD.

3. Proses politik

   Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari hasil reses dengan konstituen.

4. Proses *top-down*

   Dokumen RKPD diselaraskan dengan RKP dan RPJMN untuk mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan melibatkan kementerian/lembaga (K/L).

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

31. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045; dan
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

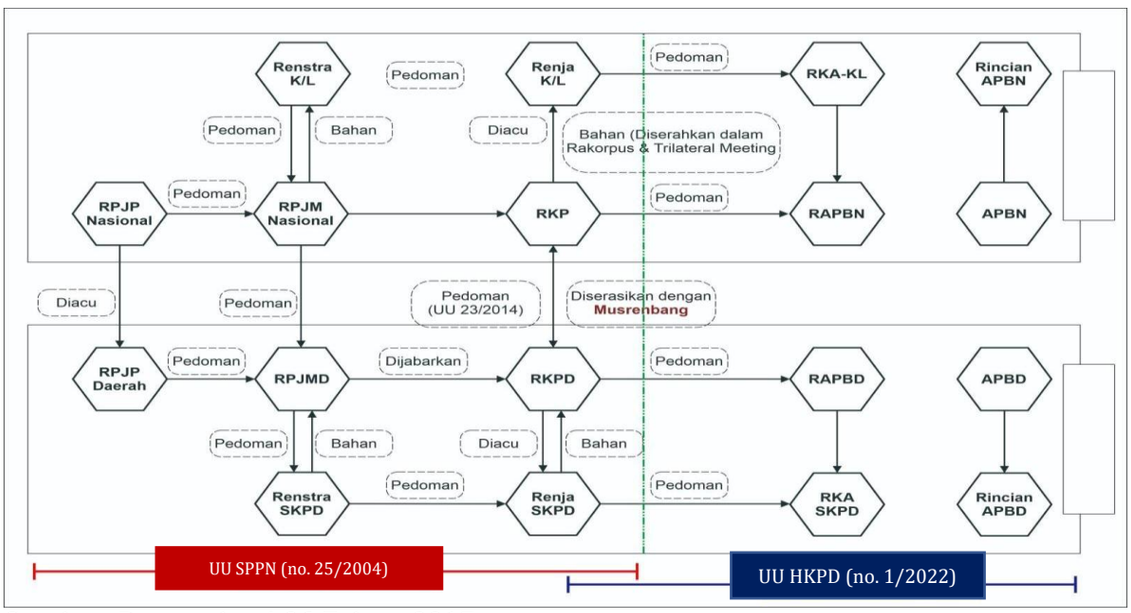
1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

pembangunan, dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Renja tersebut menjadi acuan penyusunan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah sistematika RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat rumusan latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2026, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pembangunan, Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai Tahun 2025, serta uraian permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dan Alternatif Pembiayaan Pembangunan.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 , Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2026.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini menjabarkan arah kebijakan indikator makro Kabupaten/Kota Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan target sasaran makro, menjelaskan kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan berbasis prioritas pembangunan daerah, menjelaskan sinergitas pembangunan daerah keterpaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah Kabupaten /Kota.

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjabarkan Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan menjelaskan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN tahun 2026, Sinkronisasi dan keterkaitan antara program prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional Tahun 2026 serta dukungan pendanaan RKPD Tahun 2026, Rencana pendanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026, dan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2026 program dan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan kinerja makro dan kinerja utama indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi indikator utama (IKU), Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjelaskan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dicapai pada tahun 2026.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB VIII : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang menjadi catatan dan harapan pemanfaatan dokumen RKPD ini.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Dalam Pembangunan Nasional Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan. Selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk Jawa Barat mengalami peningkatan, menurut Sensus penduduk (SP2020) Badan Pusat Statistik di Tahun 2025 diperkirakan penduduk Jawa Barat sebanyak 50,35 juta jiwa (17,82% dari total nasional) dan menjadi provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia.

Di Tahun 2024 struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha industri mencapai 40,62% diikuti oleh perdagangan sebesar 14,67%, dan untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, lapangan usaha industri Jawa Barat memberi kontribusi terbesar terhadap nasional.

Jawa Barat berkontribusi 12,75% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencakup 27,80% terhadap pembentukan PDB industri pengolahan, 71,19% terhadap pembentukan PDB industri angkutan, serta 34,84% terhadap total ekspor nasional. Capaian ini menunjukkan posisi strategis Jawa Barat dalam konstelasi ekonomi nasional.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal mengenai capaian pembangunan serta aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan ke depan. Uraian lengkap mengenai kondisi Provinsi Jawa Barat disajikan pada bagian selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi, dan persebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi geografis Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Pulau Jawa. Terletak di antara 106° 22' 13" BT-108° 50' 1,4" Bujur Timur, dan 5° 54' 49,58" LS–7° 49' 15,52" Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota (18 kabupaten dan 9 kota), 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.311 desa. Luas wilayahnya mencapai 5.349.484 hektar, dengan daratan seluas 3.704.067 hektar termasuk 19 pulau kecil. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas, sedangkan Kota Cirebon yang tersempit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bogor	2.991,78	40	19	416
2	Kabupaten Sukabumi	4.164,15	47	5	381
3	Kabupaten Cianjur	3.631,92	32	6	354
4	Kabupaten Bandung	1.740,84	31	10	270
5	Kabupaten Garut	3.101,24	42	21	421
6	Kabupaten Tasikmalaya	2.705,86	39	-	351
7	Kabupaten Ciamis	1.595,94	27	7	258

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
8	Kabupaten Kuningan	1.192,90	32	15	361
9	Kabupaten Cirebon	1.071,95	40	12	412
10	Kabupaten Majalengka	1.330,17	26	13	330
11	Kabupaten Sumedang	1.566,20	26	7	270
12	Kabupaten Indramayu	2.076,06	31	8	309
13	Kabupaten Subang	2.165,55	30	8	245
14	Kabupaten Purwakarta	993,09	17	9	183
15	Kabupaten Karawang	1.913,71	30	12	297
16	Kabupaten Bekasi	1.251,02	23	7	180
17	Kabupaten Bandung Barat	1.283,44	16	-	165
18	Kabupaten Pangandaran	1.128,18	10	-	93
19	Kota Bogor	111,37	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,31	7	33	-
21	Kota Bandung	166,59	30	151	-
22	Kota Cirebon	39,44	5	22	-
23	Kota Bekasi	213,04	12	56	-
24	Kota Depok	199,91	11	63	-
25	Kota Cimahi	42,43	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	183,94	10	69	-
27	Kota Banjar	131,01	4	9	16
Jawa Barat		**37.040,04**	**627**	**645**	**5.311**

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042

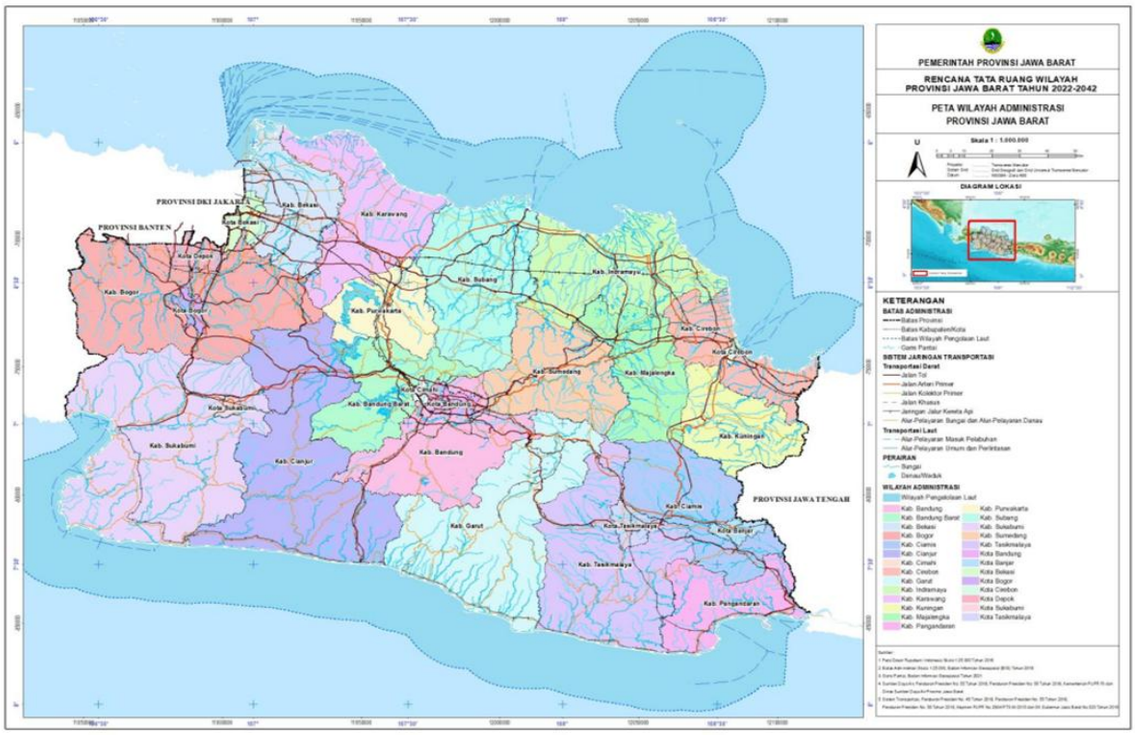
Selain wilayah daratan, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah perairan laut berdasarkan kewenangan (sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan), yaitu seluas 1.645.417 hektar. Wilayah laut Provinsi Jawa Barat meliputi perairan Pantai Utara di Laut Jawa dan Pantai Selatan di Samudera Hindia.

Secara administratif, wilayah pantai selatan Jawa Barat meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran, sedangkan pantai utara mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, dan Sukabumi.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

b. Topografi

Untuk topografi Jawa Barat memiliki 3 karakteristik yakni 1) Dataran rendah terletak di bagian Utara dengan luas sebesar 2.735.246,75 Ha; 2) dataran berbukit terletak di bagian Utara dan Selatan sebesar 729.032,77 Ha; dan 3) Wilayah dataran tinggi berbukit terletak di bagian Tengah sebesar 335.876,47 Ha, Seperti tabel di bawah 2.2 ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Topografi

No	Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)	Rasio terhadap Luas Wilayah (%)	Karakteristik
1	<200	2.006.213,98	54,01	Dataran rendah terletak di bagian Utara
2	200 – 500	729.032,77	19,63	
3	500 – 1500	643.162,00	17,32	Wilayah dataran berbukit terletak di bagian Utara dan Selatan
4	1500 – 3000	316.731,76	8,53	Wilayah dataran tinggi berbukit terletak di bagian Tengah
5	>3000	19.144,71	0,52	

Sumber: diolah dari Peta Kontur BIG dalam Album Peta Tematik Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Selain topografi daratan Jawa Barat yang berbeda-beda, topografi lautan Jawa Barat pun memiliki karakter yang berbeda-beda, antara pantai utara dan pantai selatan.

Berdasarkan Peta Laut Pushidrosal (2015), kedalaman perairan pantai utara mencapai maksimal 60 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai, sedangkan pantai selatan mencapai kedalaman hingga 1.800 meter pada jarak yang sama. Topografi pantai selatan cenderung curam dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, sehingga memiliki arus dan gelombang yang lebih besar. Sebaliknya, pantai utara yang berhadapan dengan Laut Jawa memiliki topografi yang lebih landai.

c. Klimatologi

Provinsi Jawa Barat termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°-34° Celcius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 1.000-4.000 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm, sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 150 mm.

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Jawa Barat termasuk wilayah beriklim basah (Tipe A dan B), dengan curah hujan tahunan antara 1.000 hingga 6.000 mm. Sebagian besar wilayahnya selalu basah, kecuali daerah pesisir yang cenderung kering saat musim kemarau. Intensitas hujan lebih tinggi di wilayah selatan dan tengah dibandingkan dengan wilayah utara. Pada tahun 2022, curah hujan rata-rata bulanan di Jawa Barat adalah 184-292 mm dengan jumlah hari hujan yakni 19-27 hari, seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)				Jumlah Curah Hujan (mm)			
	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Kertajati	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Kertajati
Januari	24	25	26	28	335	394	551	309
Februari	24	25	26	25	264	228	586	439
Maret	27	27	28	23	272	723	529	250
April	25	23	24	20	215	620	390	344
Mei	10	21	18	4	71	551	187	8
Juni	15	20	19	3	156	224	163	53
Juli	7	13	8	6	30	140	62	156
Agustus	4	14	7	1	53	123	55	1
September	13	16	18	10	136	402	268	126
Oktober	11	14	9	3	81	494	60	35
November	26	24	26	23	512	730	452	337

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)				Jumlah Curah Hujan (mm)			
	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Kertajati	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Kertajati
Desember	26	26	28	27	90	231	444	155
Rata-Rata	**18**	**21**	**20**	**14**	**185**	**405**	**312**	**184**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Curah hujan terendah tersebar di wilayah utara (Pantura, dari Bekasi hingga Cirebon dan Kuningan) serta sebagian wilayah tengah (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut). Sementara curah hujan tinggi meliputi wilayah barat-selatan (Bogor dan Sukabumi), wilayah tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang), dan timur-selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran). Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan tertinggi sebesar 2.000–3.500 mm. Total luas wilayah yang mempunyai curah hujan tersebut mencapai 54,41 persen dari luas Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Luasan Curah Hujan Tahunan Provinsi Jawa Barat

No	Curah Hujan (Ha)	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Provinsi (%)
1	1000 – 1500 mm	188.069,32	5,07%
2	1500 – 2000 mm	405.607,88	10,94%
3	2000 – 2500 mm	445.236,86	12,01%
4	2500 – 3000 mm	796.788,80	21,49%
5	3000 – 3500 mm	775.370,82	20,91%
6	3500 – 4000 mm	630.921,08	17,02%
7	4000 – 4500 mm	354.290,58	9,56%
8	4500 – 5000 mm	71.196,02	1,92%
9	5000 – 5500 mm	18.410,66	0,50%
10	5500 – 6000 mm	2.243,33	0,06%

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Peta Dasar Album Peta Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

d. Geologi

Kondisi geologi suatu wilayah penting diketahui karena kondisi struktur lapisan tanah dapat menentukan tingkat kerawanan wilayah terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam secara geologis. Geologi Provinsi Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri. Aktivitas geologi yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun menghasilkan berbagai jenis batuan mulai dari batuan sedimen, batuan beku (*ekstrusif dan intrusif*) dan batuan metamorfik dengan umur yang beragam. Akibat proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

tektonik yang terus berlangsung hingga saat ini, seluruh batuan tersebut telah mengalami pengangkatan, pelipatan, dan penyesaran. Lebih jelasnya kondisi geologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Batuan Geologi di Provinsi Jawa Barat

No	Geologi	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)
1	Aluvial dan Endapan Kuarter	641.953,93	17,31
2	Batu Gamping Kuarter	8.729,89	0,24
3	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	94.250,86	2,54
4	Batu Gamping Oligo - Miosen	99.967,90	2,69
5	Batu Gamping Plio - Plistosen	9.100,52	0,25
6	Batuan Gunungapi Kuarter	531.588,76	14,33
7	Batuan Gunungapi Neogen (Mio - Plio)	134.023,12	3,61
8	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	137.479,99	3,71
9	Batuan Gunungapi Plio - Plistosen	726.842,68	19,59
10	Batuan Pra - Tersier (Malihan, Gunungapi, Ultramafik	2.282,91	0,06
11	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	633.281,62	17,07
12	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	162.660,65	4,38
13	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	470.180,06	12,67
14	Batuan Terobosan Neogen	25.320,03	0,68
15	Danau/Waduk/Situ	18.703,82	0,5
16	Sedimen Paleogen	13.161,69	0,35

Sumber: Badan Geologi dan BIG, 2016

e. Hidrologi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) merupakan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil yang terdiri atas WS lintas negara, WS lintas provinsi, WS strategis nasional, WS lintas kabupaten/kota, dan WS dalam kabupaten/kota. Mengacu pada ketentuan tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa WS dan DAS yang merupakan Lintas Provinsi dan WS strategis nasional sebagai berikut:

- WS Cidanau – Ciujung - Cidurian yang melintasi Provinsi Banten – Jawa Barat;
- WS Ciliwung – Cisadane yang melintasi Provinsi DKI Jakarta - Banten – Jawa Barat;

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- WS Cimanuk – Cisanggarung yang melintasi Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah;
- WS Citanduy yang melintasi Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah;
- WS Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat adalah WS Citarum.

Provinsi Jawa Barat memiliki 7 (Tujuh) {WS yang terdiri atas WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, WS Ciwulan-Cilaki, dan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian. Provinsi Jawa Barat memiliki 41 DAS, terdiri atas 21 DAS bermuara ke Laut Jawa dan 20 (dua puluh) DAS bermuara ke Samudera Hindia. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Utara diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Selatan diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy.

Tabel 2.6
Nama DAS Lintas Provinsi Berdasarkan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat

WILAYAH SUNGAI	PROVINSI	NAMA DAS	LUAS (KM²)
CILIWUNG-CISADANE	Banten	Cimanceuri	216,3
	Jawa Barat	Cimanceuri	254,6
	Banten	Cisadane	256,7
	Jawa Barat	Cisadane	1.126
	Dki Jakarta	Angke	346,9
	Jawa Barat	Angke	154,4
	Dki Jakarta	Cakung	84,05
	Jawa Barat	Cakung	59,37
	Dki Jakarta	Ciliwung	141,4
	Jawa Barat	Ciliwung	298,7
	Dki Jakarta	Krukut	131,3
	Jawa Barat	Krukut	40,74
	Dki Jakarta	Sunter	130,7
	Jawa Barat	Sunter	48,32
CIMANUK - CISANGGARUNG	Jawa Barat	Cisanggarung	955,9
	Jawa Tengah	Cisanggarung	44,29
CISADEA - CIBARENO	Banten	Cibareno	135,8
	Jawa Barat	Cibareno	87,41
CITANDUY	Jawa Barat	Citanduy	2693

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

WILAYAH SUNGAI	PROVINSI	NAMA DAS	LUAS (KM²)
	Jawa Tengah	Citanduy	970,3

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah DAS Citarum yang mencapai luas 18,40 persen dari luas Provinsi Jawa Barat. Sampai tahun 2018 di Jawa Barat terdapat DAS dengan kondisi kritis dan sangat kritis. Ada sebanyak 215 DAS dari 324 DAS di Provinsi Jawa Barat yang diketahui termasuk dalam kategori kritis dan sangat kritis. DAS dengan luas tingkat kekritisan sangat besar adalah DAS Citarum, yang mencapai 199.176,70 ha. Untuk lebih jelas mengenai kondisi DAS di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Nama dan Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
1	DAS Citarum	681.609,70	18,40%	64.885,70	134.291,00	199.176,70
2	DAS Cimanuk	363.479,04	9,81%	1.463,34	49.853,70	51.317,04
3	DAS Citanduy	268.662,09	7,25%	8.737,19	35.485,90	44.223,09
4	DAS Cimandiri	181.404,60	4,90%	31.957,50	67.363,70	99.321,20
5	DAS Kali Bekasi	145.951,92	3,94%	5.330,42	10.998,50	16.328,92
6	DAS Cibuni	142.892,20	3,86%	16.886,30	61.517,90	78.404,20
7	DAS Cipunagara	129.090,50	3,49%	14.952,40	10.387,10	25.339,50
8	DAS Ciwulan	115.971,63	3,13%	4.152,03	20.596,50	24.748,53
9	DAS Cisadane	112.052,09	3,03%	8.337,29	26.400,60	34.737,89
10	DAS Cikaso	90.016,75	2,43%	13.271,10	47.196,98	60.468,08
11	DAS Cisanggarung	84.091,52	2,27%	1.790,43	7.731,69	9.522,12
12	DAS Ciasem	74.612,50	2,01%	2.126,17	2.930,33	5.056,50
13	DAS Cimedang	66.144,67	1,79%	1.693,27	13.775,30	15.468,57
14	DAS Cilamaya	60.922,29	1,65%	8.858,69	781,20	9.639,89
15	DAS Cikandang	46.170,07	1,25%	2.800,57	10.004,40	12.804,97
16	DAS Cipanas (Kalicilet)	43.274,71	1,17%	154,65	107,16	261,81
17	DAS Cilaki	42.147,62	1,14%	635,82	14.436,50	15.072,32
18	DAS Cilangla	40.001,90	1,08%	7.000,31	5.371,79	12.372,10
19	DAS Cisadea	36.342,97	0,98%	332,97	18.241,50	18.574,47
20	DAS Cibulan-Bulan	34.794,33	0,94%	51,93		51,93
21	DAS Cipanas II/Kali Pangkalan	32.230,31	0,87%	10,11		10,11
22	DAS Cijulang	32.092,78	0,87%	1.133,81	2.855,67	3.989,48
23	DAS Cidurian	31.406,62	0,85%	6.603,12	5.729,70	12.332,82
24	DAS Ciliwung	30.700,17	0,83%	519,16	4.792,01	5.311,17
25	DAS Cipager/ Karanganyar/ Jatiroke	29.710,21	0,80%	90,88	822,73	913,61
26	DAS Cilalanang	27.882,80	0,75%	30,34	23,36	53,70
27	DAS Cikaengan	27.108,85	0,73%	4.984,90	3.934,35	8.919,25
28	DAS Cilalanang/Kali Menir	25.824,70	0,70%			-
29	DAS Cimanceuri	25.418,08	0,69%	2.197,54	2.418,34	4.615,88
30	DAS Cidamar	24.574,37	0,66%	22,67	10.242,70	10.265,37
31	DAS Cisokan	23.363,92	0,63%	507,86	14.380,50	14.888,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
32	DAS Cikarang (Sukabumi/ Surade)	23.191,44	0,63%	4.093,86	8.975,48	13.069,34
33	DAS Kali Bangkaderes	23.122,65	0,62%	175,93	544,02	719,95
34	DAS Ciwadas	19.690,40	0,53%			-
35	DAS Ciletuh	19.625,01	0,53%	888,80	13.416,10	14.304,90
36	DAS Ciwaringin	18.687,37	0,50%	109,56	1.361,41	1.470,97
37	DAS Cipandak	18.043,38	0,49%	926,71	5.045,67	5.972,38
38	DAS Ciberes	15.548,15	0,42%	50,25	31,30	81,55
39	DAS Cisangiri	15.375,80	0,42%	1.306,85	2.285,85	3.592,70
40	DAS Cipatujah	15.228,55	0,41%	3.927,18	2.396,80	6.323,98
41	DAS Kali Angke Pesanggrahan	14.571,30	0,39%			-
42	DAS Ciderewak	13.860,40	0,37%			-
43	DAS Kali Kumpulkusta/Kaliwedi	13.609,80	0,37%			-
44	DAS Ciujung Cianjur	13.502,47	0,36%	11,22	6.719,18	6.730,40
45	DAS Cipalebuh	12.290,38	0,33%	1.839,44	964,61	2.804,05
46	DAS Cilayu	11.916,09	0,32%	942,60	1.046,02	1.988,62
47	DAS Kalikamal	11.581,40	0,31%			-
48	DAS Ciselang	11.217,58	0,30%	9,38	4.046,84	4.056,22
49	DAS Ciputrapinggan	10.819,63	0,29%	1.188,44	1.387,18	2.575,62
50	DAS Kali Anyar	10.753,98	0,29%	0,08	169,69	169,78
51	DAS Cikembulan	10.435,65	0,28%	695,50	183,45	878,95
52	DAS Kali Sewo	9.759,81	0,26%			-
53	DAS Kali Prawirakepolo	9.702,87	0,26%			-
54	DAS Ciujung	8.985,56	0,24%	79,30	4.035,99	4.115,29
55	DAS Cibareo	8.573,39	0,23%	45,59	2.837,76	2.883,35
56	DAS Cisoga	8.316,64	0,22%			-
57	DAS Kali Blanakan	8.242,02	0,22%			-
58	DAS Kali Batangleutik	8.036,26	0,22%			-
59	DAS Cibaluk	7.964,21	0,22%	532,77	2.590,55	3.123,32
60	DAS Kali Mangsetan	7.665,37	0,21%			-
61	DAS Kali Gabus	7.183,80	0,19%			-
62	DAS Kali Dutamati/Kali Kamal	7.144,84	0,19%			-
63	DAS Kali Kesunean/Grenjeng	6.735,10	0,18%	93,73	39,14	132,87
64	DAS Cimaja	6.562,15	0,18%	13,71	972,72	986,42
65	DAS Cimanis	6.432,16	0,17%			-
66	DAS Cipangukusan	6.409,66	0,17%	876,55	1.893,73	2.770,28
67	DAS Kali Dulangrejo/Kali Ender	6.301,25	0,17%	0,04	0,07	0,12
68	DAS Cibeuning	6.213,91	0,17%	2,45	179,11	181,56
69	DAS Betokan/Pasirangin	6.075,23	0,16%			-
70	DAS Cikanci	5.915,21	0,16%		21,46	21,46
71	DAS Cipasarangan	5.330,85	0,14%	1.311,80	614,64	1.926,44
72	DAS Kali Jaga	4.891,72	0,13%	2,35	20,63	22,98
73	DAS Kali Bobos/Kali Wedi	4.889,83	0,13%			-
74	DAS Citepus	4.717,30	0,13%	171,32	1.102,14	1.273,46
75	DAS Kali Cakung	4.475,51	0,12%			-
76	DAS Cipanyerang	4.375,14	0,12%	25,07	1.048,20	1.073,27
77	DAS Cimarinjung	4.283,02	0,12%	1.610,82	2.259,49	3.870,31
78	DAS Kali Sunter	4.272,78	0,12%			-
79	DAS Cisolok	4.242,18	0,11%	77,71	2.503,04	2.580,75
80	DAS Cimangke	4.211,25	0,11%	840,98	305,27	1.146,26
81	DAS Kali Krukut	4.153,10	0,11%			-
82	DAS Cisukawayana	3.934,52	0,11%	92,19	1.031,62	1.123,81
83	DAS Cilauteureun	3.644,48	0,10%	733,93	93,05	826,98
84	DAS Broco	3.573,77	0,10%			-
85	DAS Cipanarikan	3.402,39	0,09%	2.411,65		2.411,65
86	DAS Ciawi II	3.300,12	0,09%	24,84		24,84
87	DAS Cipamarangan	3.253,67	0,09%	827,07		827,07

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
88	DAS Cipancong	3.126,47	0,08%	1.000,14	511,65	1.511,79
89	DAS Ciawi	3.082,57	0,08%	1.101,73	548,34	1.650,07
90	DAS Cimerak	2.960,97	0,08%	394,37	1.109,78	1.504,15
91	DAS Ciseureuh	2.733,56	0,07%	765,75	682,14	1.447,89
92	DAS Kali Katapangragas	2.727,62	0,07%			-
93	DAS Ciwidig	2.726,25	0,07%	321,02	741,45	1.062,47
94	DAS Cibera	2.555,27	0,07%	1.035,61	188,02	1.223,63
95	DAS Cimari	2.533,92	0,07%	155,93	726,46	882,39
96	DAS Cipepetan	2.526,05	0,07%			-
97	DAS Kali Bugel	2.507,99	0,07%			-
98	DAS Cibuntu	2.343,15	0,06%		17,29	17,29
99	DAS Kali Buaran	2.278,05	0,06%			-
100	DAS Kali Rawaurip/Kali Bangka	2.238,72	0,06%			-
101	DAS Citirem	2.183,71	0,06%	1.018,13	17,11	1.035,24
102	DAS Cianda	2.180,02	0,06%	783,96	306,13	1.090,09
103	DAS Cikalapu	2.106,00	0,06%			-
104	DAS Cipeuteuy	2.005,08	0,05%	7,09	12,05	19,14
105	DAS Cikarangbolong	1.965,90	0,05%	328,17		328,17
106	DAS Kali Baru	1.932,20	0,05%	25,81	3,77	29,59
107	DAS Ciodeng	1.875,22	0,05%	11,99	29,97	41,96
108	DAS Cihideung	1.823,36	0,05%	906,93	213,80	1.120,72
109	DAS Ciwaru	1.787,64	0,05%	304,04	637,41	941,45
110	DAS Citanggeuleuk	1.693,01	0,05%	600,09	127,11	727,20
111	DAS Cicadas	1.352,60	0,04%	81,48	38,83	120,30
112	DAS Cisaar	1.347,86	0,04%	1,32	1.338,05	1.339,37
113	DAS Cibungur (Sukabumi)	1.325,98	0,04%	19,67		19,67
114	DAS Kali Parean	1.277,24	0,03%			-
115	DAS Kali Tumaritis	1.268,67	0,03%			-
116	DAS Pasirgebang/Candra	1.263,09	0,03%	4,06	101,35	105,41
117	DAS Citapan	1.224,51	0,03%	37,08		37,08
118	DAS Cisela	1.194,05	0,03%		754,28	754,28
119	DAS Ciletuh Hilir	1.178,00	0,03%	70,40	82,50	152,90
120	DAS Cipelabuhan	1.176,57	0,03%	54,27	231,34	285,61
121	DAS Cikalapa (Cianjur)	1.047,05	0,03%			-
122	DAS Cikodehel	1.017,08	0,03%	166,59		166,59
123	DAS Cihurang	1.000,47	0,03%	7,30		7,30
124	DAS Cibera II	976,64	0,03%	510,46	44,85	555,31
125	DAS Cibulakan	941,30	0,03%	3,79	7,14	10,93
126	DAS Kali Selopanganten	938,60	0,03%		15,28	15,28
127	DAS Cibuaya	935,71	0,03%	305,21		305,21
128	DAS Cikarang	907,40	0,02%	273,84	29,96	303,80
129	DAS Cicalengka	899,53	0,02%			-
130	DAS Cikawung	872,38	0,02%	460,90	161,48	622,37
131	DAS Kali Prawiradarung	869,35	0,02%			-
132	DAS Sebrotan Madasari	866,51	0,02%	23,85	519,95	543,80
133	DAS Cipateraman	866,06	0,02%			-
134	DAS Cibuhung	856,90	0,02%	243,60	59,04	302,64
135	DAS Ciperning	833,00	0,02%			-
136	DAS Cilampeni	824,13	0,02%			-
137	DAS Cimandiri 3	820,74	0,02%	0,83	726,33	727,16
138	DAS Cihaur	816,34	0,02%	16,01	494,22	510,23
139	DAS Cidadap	799,85	0,02%			-
140	DAS Cijeruk	777,31	0,02%	50,44	50,02	100,46
141	DAS Kali Ujungwaru	765,67	0,02%			-
142	DAS Cibulakan 1	751,24	0,02%	6,93	51,60	58,53
143	DAS Cikawung (Cianjur)	733,62	0,02%		439,27	439,27
144	DAS Cipeuti	707,10	0,02%			-
145	DAS Cipamenang	687,89	0,02%	118,71	194,51	313,22
146	DAS Cipambokongan	680,27	0,02%	80,62		80,62
147	DAS Cipunage	659,82	0,02%	0,27	175,85	176,13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
148	DAS Cisingkil	659,26	0,02%	34,47	16,54	51,01
149	DAS Cikalapa (Sukabumi/ Surade)	652,50	0,02%			-
150	DAS Cikolomberan	612,90	0,02%			-
151	DAS Cisepot	604,23	0,02%			-
152	DAS Cipanerekean	592,56	0,02%	9,33	5,58	14,91
153	DAS Cigedang	574,87	0,02%			-
154	DAS Ciparat	527,45	0,01%	1,34	109,92	111,26
155	DAS Cimargatah	511,56	0,01%			-
156	DAS Cikuyahirup	509,58	0,01%		1,83	1,83
157	DAS Cipatuburan	507,35	0,01%	6,29	133,55	139,84
158	DAS Cibangban	506,45	0,01%		450,85	450,85
159	DAS Cipalawah	494,75	0,01%			-
160	DAS Ciletuh 1	490,61	0,01%	224,62		224,62
161	DAS Ciwaduk	490,15	0,01%			-
162	DAS Cigebang	480,41	0,01%			-
163	DAS Cijoho	446,63	0,01%	36,64	26,81	63,45
164	DAS Kali Dendeng	440,18	0,01%			-
165	DAS Cipadabumi	434,36	0,01%			-
166	DAS Cimarinjung 1	432,76	0,01%		432,76	432,76
167	DAS Citihuk	424,10	0,01%		29,40	29,40
168	DAS Cibako	415,60	0,01%	10,71		10,71
169	DAS Cipatreman	414,74	0,01%	8,40		8,40
170	DAS Ciroyom	404,96	0,01%	77,35	34,09	111,44
171	DAS Ciseundeuhan	388,44	0,01%	115,20		115,20
172	DAS Cimanuk Kecil	357,51	0,01%		2,14	2,14
173	DAS Cidahon 1	342,82	0,01%		4,79	4,79
174	DAS Pasir Cigaleong	335,76	0,01%	14,34	129,47	143,81
175	DAS Karangsari	327,67	0,01%			-
176	DAS Cisokan 1	320,09	0,01%	121,72		121,72
177	DAS Cimarinjung 2	312,63	0,01%		312,63	312,63
178	DAS Teluk Penyu	310,12	0,01%			-
179	DAS Cicukangjambe	301,73	0,01%	5,08		5,08
180	DAS Citihul	293,59	0,01%	5,25	12,36	17,62
181	DAS Cipasung Burung	286,04	0,01%	0,09		0,09
182	DAS Cigebang (Cianjur)	274,73	0,01%	2,24	92,26	94,50
183	DAS Cibanteng	263,58	0,01%			-
184	DAS Cicula	248,70	0,01%	28,94	0,15	29,09
185	DAS Tumaritis	241,75	0,01%	8,92		8,92
186	DAS Cikabuyutan	238,08	0,01%	70,07	153,18	223,25
187	DAS Cicalobak	237,07	0,01%	1,61	9,40	11,01
188	DAS Purbayani	235,70	0,01%	145,92		145,92
189	DAS Ranca Era	228,24	0,01%	12,89	29,62	42,51
190	DAS Cipadarum	224,51	0,01%	15,19	11,81	27,00
191	DAS Cibongkok	216,99	0,01%		171,79	171,79
192	DAS Cipaleburan	216,95	0,01%			-
193	DAS Babakanpari	214,30	0,01%			-
194	DAS Cidahon 2	211,39	0,01%	82,61		82,61
195	DAS Cisolok 1	210,54	0,01%	18,67	113,14	131,81
196	DAS Cicadasngampar	207,34	0,01%	4,61	1,82	6,44
197	DAS Cibaling	203,36	0,01%	1,39		1,39
198	DAS Ciraya	202,61	0,01%			-
199	DAS Ci Dahon	193,92	0,01%	1,46	0,32	1,78
200	DAS Citirem 1	192,49	0,01%	192,49		192,49
201	DAS Ciparanjewetan 1	191,66	0,01%	8,38	6,90	15,27
202	DAS Karangwangi	183,79	0,00%		1,46	1,46
203	DAS Cimandiri 1	177,03	0,00%	29,35	114,07	143,42
204	DAS Hanjatan	176,47	0,00%	1,44		1,44
205	DAS Pasir Randu	175,30	0,00%		168,76	168,76
206	DAS Ciletuh Hilir 1	174,09	0,00%		18,39	18,39
207	DAS Cimarinjung 3	173,94	0,00%		173,92	173,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
208	DAS Cipanas	171,16	0,00%			-
209	DAS Cipunaga (Sukabumi)	166,36	0,00%		156,12	156,12
210	DAS Cisaar 1	164,37	0,00%		164,37	164,37
211	DAS Ciparanjewetan	159,66	0,00%	19,80	16,65	36,45
212	DAS Cikalapa (Sukabumi/ Ciracap)	156,22	0,00%			-
213	DAS Cigentong	155,28	0,00%	6,66	20,55	27,22
214	DAS Cigoong	153,81	0,00%	8,12	76,00	84,11
215	DAS Cinaringgul	145,90	0,00%	9,64		9,64
216	DAS Datarhuni	143,18	0,00%	102,37		102,37
217	DAS Ciletuh Hilir 2	143,03	0,00%			-
218	DAS Cipasung	134,53	0,00%			-
219	DAS Ciparayangan	129,49	0,00%	14,80		14,80
220	DAS Ciletuh Hilir 3	123,21	0,00%			-
221	DAS Cikakap 1	122,13	0,00%	106,81		106,81
222	DAS Cigebang 1	120,75	0,00%			-
223	DAS Pantai Loji	118,61	0,00%		117,82	117,82
224	DAS Ciletuh Hilir 4	117,28	0,00%			-
225	DAS Ciletuh 2	115,30	0,00%			-
226	DAS Cimandiri 2	114,93	0,00%		99,13	99,13
227	DAS Cigempol	113,44	0,00%		6,47	6,47
228	DAS Sukamanah	109,52	0,00%			-
229	DAS Cipetir	106,03	0,00%		98,09	98,09
230	DAS Cisaar 2	105,51	0,00%		105,51	105,51
231	DAS Cisaar 3	102,20	0,00%		102,20	102,20
232	DAS Cisaar 4	99,68	0,00%		99,67	99,67
233	DAS Purbayani 2	98,52	0,00%			-
234	DAS Cimarinjung 4	96,41	0,00%		96,41	96,41
235	DAS Ciseureuh 1	94,45	0,00%		91,75	91,75
236	DAS Cijolang	93,45	0,00%	48,21		48,21
237	DAS Cisaar 5	92,51	0,00%		92,43	92,43
238	DAS Cisaar 6	90,19	0,00%		90,19	90,19
239	DAS Teluk Penyu 1	87,95	0,00%			-
240	DAS Cipaku	86,51	0,00%	22,58		22,58
241	DAS Cijambe	85,61	0,00%	1,43		1,43
242	DAS Cisaar 7	85,52	0,00%		85,52	85,52
243	DAS Cimarinjung 6	83,82	0,00%		83,82	83,82
244	DAS Cimarinjung 5	82,28	0,00%		82,27	82,27
245	DAS Ciletuh Hilir 5	81,46	0,00%			-
246	DAS Pantai Loji 1	79,78	0,00%		79,78	79,78
247	DAS Talanca Cipangukusan	78,48	0,00%	31,33	28,53	59,85
248	DAS (Blank)	78,08	0,00%	6,77	71,31	78,08
249	DAS Ciguha	75,58	0,00%			-
250	DAS Cibarengkok	74,57	0,00%			-
251	DAS Bojong	74,30	0,00%	0,99		0,99
252	DAS Cipandan	74,28	0,00%			-
253	DAS Ciwaru (Sukabumi/ Cibitung)	73,73	0,00%	32,38		32,38
254	DAS Teluk Penyu 2	72,59	0,00%			-
255	DAS Cikakap	71,45	0,00%	28,14		28,14
256	DAS Ciwarung Waru	70,93	0,00%			-
257	DAS Cimarinjung 7	70,53	0,00%		70,53	70,53
258	DAS Soloktimun	69,92	0,00%	14,93		14,93
259	DAS Ciletuh Hilir 6	68,75	0,00%			-
260	DAS Cinangorak	68,42	0,00%			-
261	DAS Ciletuh Hilir 7	67,70	0,00%			-
262	DAS Cisaar 8	67,54	0,00%		67,54	67,54
263	DAS Cibulakan 2	66,96	0,00%			-
264	DAS Cibulakan 3	65,80	0,00%			-
265	DAS Pantai Loji 2	65,53	0,00%		65,35	65,35
266	DAS Cipaku 1	63,12	0,00%	2,09		2,09
267	DAS Cikawung (Sukabumi)	59,57	0,00%	9,02		9,02

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
268	DAS Cikatapang	55,89	0,00%		41,51	41,51
269	DAS Ciletuh Hilir 8	54,58	0,00%			-
270	DAS Ciwaru (Sukabumi/ Cisolok)	54,58	0,00%		40,03	40,03
271	DAS Cipaku 2	53,16	0,00%	4,17		4,17
272	DAS Cibuaya 1	52,88	0,00%	5,53		5,53
273	DAS Cimareme	52,79	0,00%			-
274	DAS Pasirasih	50,65	0,00%			-
275	DAS Ciwarung Waru 1	50,36	0,00%			-
276	DAS Cisaar 9	45,55	0,00%		45,53	45,53
277	DAS Cimarinjung 9	44,83	0,00%		44,82	44,82
278	DAS Cimarinjung 10	44,29	0,00%		44,29	44,29
279	DAS Ujung Legonwaru	42,90	0,00%		42,86	42,86
280	DAS Cimarinjung 11	41,48	0,00%		41,48	41,48
281	DAS Ciwaru 1	40,92	0,00%		40,92	40,92
282	DAS Ciwaru 2	38,11	0,00%		38,11	38,11
283	DAS Ciwaru 3	37,99	0,00%		37,99	37,99
284	DAS Cimarinjung 8	37,16	0,00%		37,16	37,16
285	DAS Cikaret	36,09	0,00%			-
286	DAS Cisaar 10	35,57	0,00%		35,57	35,57
287	DAS Panyeredan	33,09	0,00%			-
288	DAS Ciwarung Waru 2	31,49	0,00%			-
289	DAS Cikarang 1 (Sukabumi/ Surade)	29,77	0,00%			-
290	DAS Cisaar 11	29,11	0,00%		29,11	29,11
291	DAS Cimarinjung 12	26,04	0,00%		26,04	26,04
292	DAS Ciwaru 4	23,85	0,00%		23,85	23,85
293	DAS Ciwaru 1 (Sukabumi/ Cibitung)	22,23	0,00%	22,14		22,14
294	DAS Cisaar 12	19,67	0,00%		19,67	19,67
295	DAS Cijambe 1	18,50	0,00%	5,15		5,15
296	DAS Cimarinjung 13	17,94	0,00%		17,94	17,94
297	DAS Ciwaru 5	15,72	0,00%		15,71	15,71
298	DAS Cimarinjung 14	12,35	0,00%		12,35	12,35
299	DAS Cisaar 13	9,99	0,00%		9,99	9,99
300	DAS Babakanpari 2	8,40	0,00%			-
301	DAS Cikawungading	7,77	0,00%			-
302	DAS Muara Cipalawah	3,88	0,00%			-
303	DAS Batu Nusamanuk	0,67	0,00%			-
304	DAS Pulau Ciwaru Ujung	0,62	0,00%			-
305	DAS Hanjatan 2	0,54	0,00%			-
306	DAS Hanjatan 4	0,47	0,00%			-
307	DAS Hanjatan 3	0,46	0,00%			-
308	DAS Pulau Ciletuh Ujung	0,45	0,00%			-
309	DAS Batu Nunggal	0,37	0,00%			-
310	DAS Pulau Cibulakan 1 Ujung	0,37	0,00%			-
311	DAS Ranca Era 2	0,33	0,00%			-
312	DAS Pulau Ciletuh 1 Ujung	0,27	0,00%			-
313	DAS Pulau Batu Batik Ujung	0,23	0,00%			-
314	DAS Muara Cipaleburan	0,18	0,00%			-
315	DAS Hanjatan 5	0,15	0,00%			-
316	DAS Muara Cipaleburan 2	0,15	0,00%			-
317	DAS Pasir Cigaleong 2	0,14	0,00%			-
318	DAS Muara Sebrotan Madasari	0,10	0,00%			-
319	DAS Pulau Ciletuh 2 Ujung	0,10	0,00%			-
320	DAS Pulau Cikarang Ujung	0,09	0,00%			-
321	DAS Muara Cikabuyutan	0,07	0,00%			-
322	DAS Pulau Cikarang Ujung 1	0,07	0,00%			-

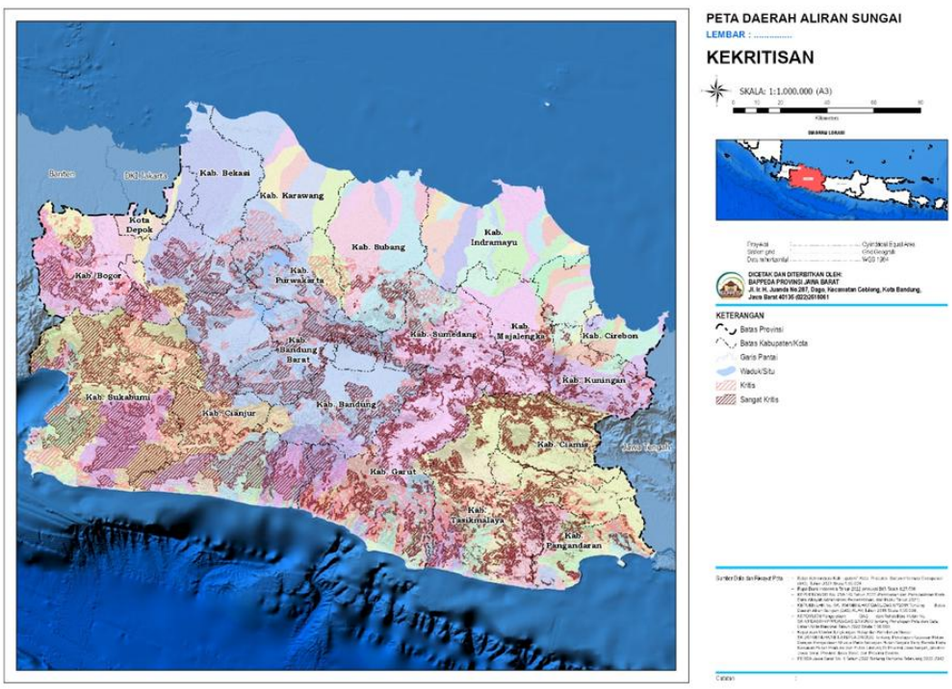
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
323	DAS Pulau Ciletuh Hilir 3	0,07	0,00%			-
324	DAS Pulau Cikarang Ujung 2	0,06	0,00%			-
	Total	**3.703.453,88**	**100%**	**250.556,60**	**669.664,29**	**920.220,89**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

Gambar 2.2
Peta Kekritisan Daerah Aliran Sungai Jawa Barat



2.1.1.2 Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana yang tinggi. Struktur geologi yang kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Secara geologis, Jawa Barat terletak di sebelah utara jalur pertemuan dua lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eropa Asia, yang saling bertumbukan. bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai meliputi 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di wilayah selatan.

Provinsi Jawa Barat berada di jalur *Circum Pacific* dan Mediteran sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil. Hal ini ditandai dengan banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja sehingga memiliki risiko gempa bumi. Bahaya lingkungan beraspek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

geologi yang sering terjadi di Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunung api dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta banjir di wilayah Utara Jawa Barat dan Cekungan Bandung. Selain itu, wilayah Selatan Jawa Barat secara geologis memiliki kerentanan terhadap bencana Tsunami.

Kawasan rawan bencana banjir di Jawa Barat terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy).

Potensi rawan bencana terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah rawan bencana gempa bumi. Hampir 34,19% dari seluruh daratan di Provinsi Jawa Barat mempunyai resiko rawan bencana gempa bumi. Untuk lebih jelas daerah rawan bencana secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel-tabel dan gambar berikut di bawah ini.

Tabel 2.8
Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat

No	Kawasan Rawan Bencana	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)
1	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi	1.268.432,99	34,19
2	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah	2.421.668,88	65,28
3	Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi	272.724,80	7,35
4	Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	60.159,77	1,62
5	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	120.796,44	3,26

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat 2024-2028

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan bencana di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.9
Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi
1	Gunung Api	Gn Patuha. Gn Talaga Bodas. Gn Wayang Windu. Gn Ciremai. Gn Galunggung. Gn Gede. Gn Guntur. Gn Papandayan. Gn Salak. Gn Takuban Perahu
2	Gerakan Tanah	Kab Bogor. Kota Bogor. Kab Sukabumi. Kota Sukabumi. Kab Bekasi. Kab Karawang. Kab Purwakarta. Kab Subang. Kab Indramayu. Kab Cianjur. Kab Garut. Kota Bandung. Kab Bandung Barat. Kab Bandung. Kab Sumedang. Kab Tasikmalaya. Kab Pangandaran. Kab Ciamis. Kota Tasikmalaya. Kota Banjar. Kab Kuningan. Kab Majalengka. Kota Cirebon. Kab Cirebon
3	Tsunami	Kab Sukabumi. Kab Cianjur. Kab Garut. Kab Tasikmalaya. Kab Pangandaran
4	Longsor	Kab Bandung. Kab Bogor. Kota Bogor. Kab Ciamis. Kab Cianjur. Kab Cirebon. Kab Garut. Kab Kuningan. Kab Majalengka. Kab Purwakarta. Kab Subang. Kab Sukabumi. Kab Sumedang. Kab Tasikmalaya
5	Gempa Bumi	Rawan Bencana Tinggi: Kab Sukabumi. Kota Sukabumi. Kab Bogor. Kab Cianjur. Kab Bandung Barat. Kota Cimahi. Kota Bandung. Kab Purwakarta. Kab Bandung. Kab Sumedang. Kab Garut. Kab Subang. Kab Karawang. Kab Bekasi. Kota Bekasi. Kab Indramayu. Kab Majalengka. Kab Cirebon. Kota Cirebon. Kota Banjar. Kab Ciamis. Kab Pangandaran. Kab Tasikmalaya Rawan Bencana Menengah: Kota bogor. Kab Bogor. Kota Depok. Kota Bekasi. Kab Bekasi. Kab Karawang. Kab Purwakarta. Kab Cianjur. Kab Sukabumi. Kab Bandung Barat. Kab Subang. Kab Indramayu. Kab Cirebon. Kota Cirebon. Kab Kuningan. Kab Majalengka. Kab Sumedang. Kab Bandung. Kab Garut. Kab Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Kota Banjar. Kab Ciamis. Kab Pangandaran

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat 2024-2028

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis potensi ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan angin topan. IRBI digunakan untuk memahami besarnya risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap bencana dan untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang efektif. IRBI diperoleh dengan melakukan perhitungan pada komponen indeks bahaya *(hazard)*, kerentanan *(vulnerability)* dan kapasitas *(capacity)*. Perhitungan IRBI dilakukan dengan metode analisis geospasial terhadap peta indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

bahaya *(hazard)*, peta kerentanan *(vulnerability)* dan kapasitas *(capacity)* dengan rumus *(Risk = Hazard x Vulnerability / Capacity)*.

Tabel 2.10
Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	145,81	134,94	131,62	123,16	114,15

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan, artinya terjadi penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada tahun 2024, IRBI Jawa Barat memperoleh nilai 114,15 yang berada pada kategori Sedang, sehingga masih perlu untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana agar memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat nilai IRBI Jawa Barat masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Khusus Jakarta.

Tabel 2.11
Data Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sukabumi	190,75	192,40	186,61	178,12	168,97	Tinggi
2	Cianjur	215,08	197,08	207,62	185,14	165,17	Tinggi
3	Tasikmalaya	203,01	186,51	174,11	159,14	145,50	Tinggi
4	Karawang	174,43	165,58	157,81	152,32	142,06	Sedang
5	Kuningan	131,13	131,13	113,58	125,80	141,55	Sedang
6	Garut	205,52	185,00	164,91	147,39	134,75	Sedang
7	Subang	171,91	168,78	157,25	143,43	133,56	Sedang
8	Pangandaran	145,44	129,21	137,36	147,85	133,13	Sedang
9	Cirebon	160,63	147,51	156,58	144,56	133,04	Sedang
10	Sumedang	142,15	124,39	129,87	135,05	127,24	Sedang
11	Bandung	174,00	161,89	145,94	132,00	117,13	Sedang
12	Kota Banjar	152,80	152,80	145,04	129,60	116,26	Sedang
13	Kota Cirebon	172,76	157,19	141,07	127,28	112,32	Sedang
14	Kota Bekasi	131,60	123,18	124,95	111,58	111,58	Sedang
15	Majalengka	143,43	124,74	136,35	120,84	108,99	Sedang
16	Bandung Barat	110,22	108,18	108,89	108,64	108,28	Sedang
17	Purwakarta	137,31	124,53	128,98	117,89	107,01	Sedang
18	Bekasi	132,89	130,11	124,10	116,85	106,39	Sedang
19	Ciamis	141,57	122,22	133,52	117,12	105,56	Sedang
20	Bogor	136,88	125,31	116,54	107,93	101,72	Sedang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

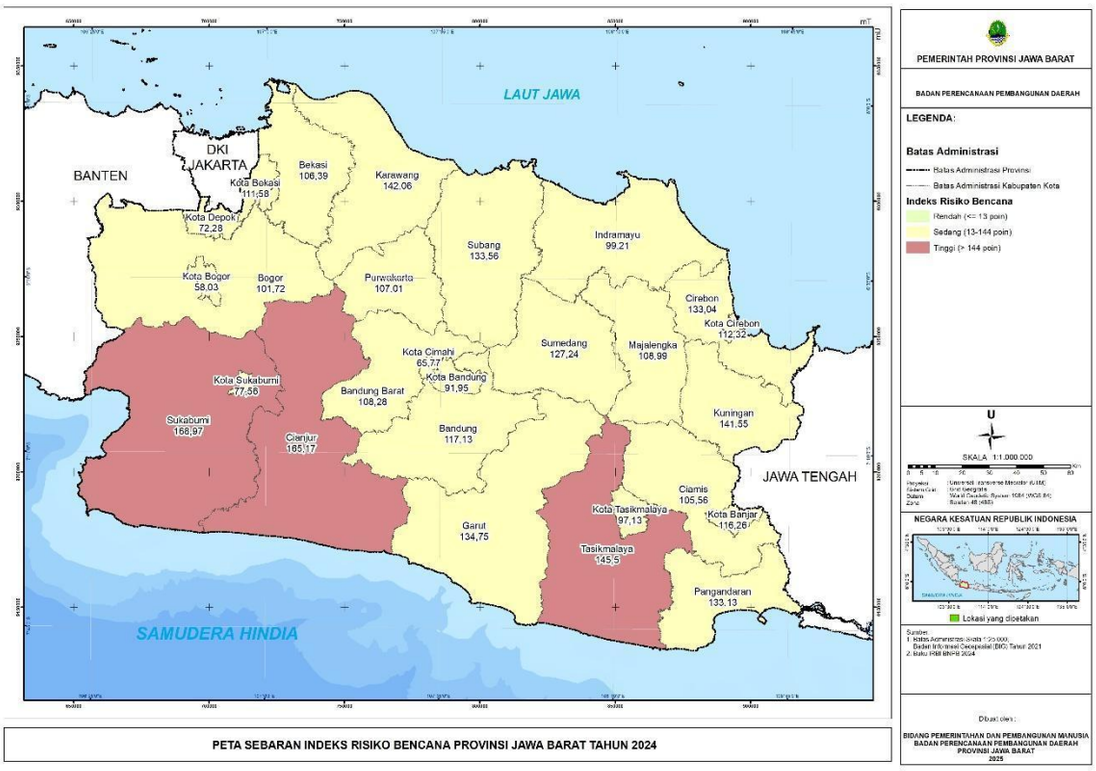
1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
21	Indramayu	136,79	114,59	122,49	111,60	99,21	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	119,20	117,37	114,69	106,93	97,13	Sedang
23	Kota Bandung	122,32	111,32	103,05	97,15	91,95	Sedang
24	Kota Sukabumi	114,40	102,67	92,91	84,55	77,56	Sedang
25	Kota Depok	89,63	82,56	76,53	80,44	72,28	Sedang
26	Kota Cimahi	105,41	91,71	82,01	72,63	65,77	Sedang
27	Kota Bogor	75,75	65,38	71,01	63,49	58,03	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2025, BNPB
**Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan*

Sebaran Indeks Risiko Bencana 2024 di Kabupaten/Kota juga menunjukkan tren penurunan tahun 2023 ke 2024 untuk sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki nilai IRBI kategori tinggi dan sebanyak 24 kabupaten/kota memiliki nilai IRBI kategori sedang.

Gambar 2.3
Peta Indeks Risiko Bencana Jawa Barat Tahun 2024



PETA SEBARAN INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

2.1.1.3 Potensi Wilayah Perairan 12 Mil Laut

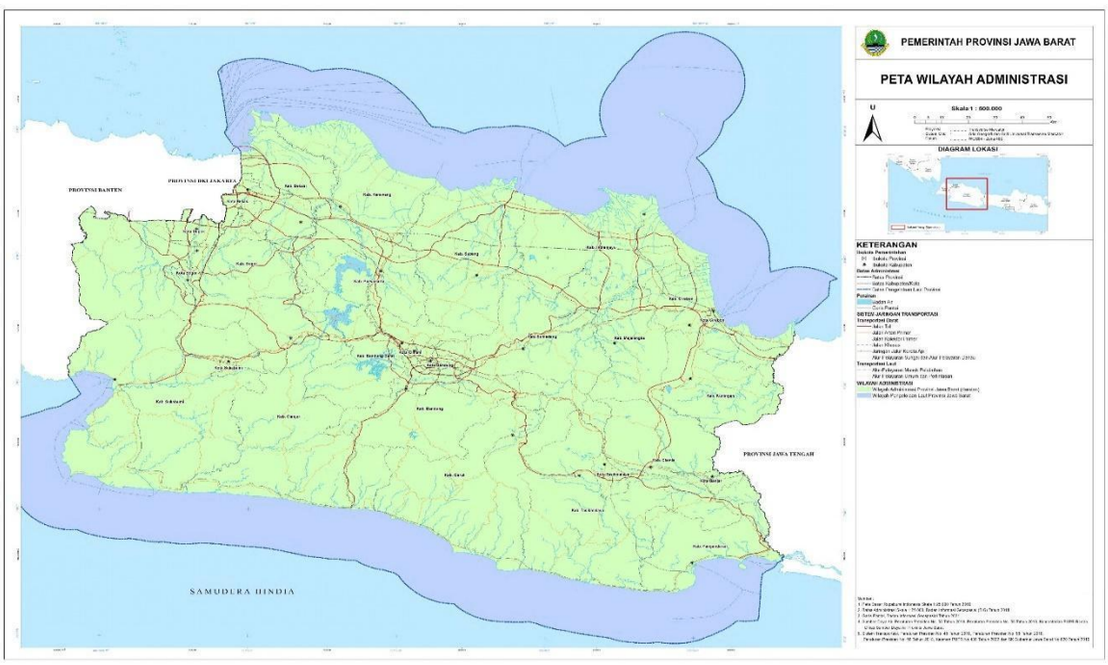
Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut seluas 1.645.417 hektar, diukur dengan jarak 12 (dua belas)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, wilayah perairan laut Provinsi Jawa Barat berada di wilayah perairan Pantai Utara yang berada di Laut Jawa dan perairan Pantai Selatan yang berada di Laut Samudera Hindia dengan total garis pantai sepanjang 832,69 km dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 30 (tiga puluh) pulau.

Secara administrasi, kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah pantai selatan terdiri atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, wilayah pantai utara terdiri atas Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Pantura dan Pansela tersebut terdapat Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun Pulau-Pulau Kecil di Jawa Barat terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu.

Gambar 2.4
Peta Wilayah Ruang Laut Provinsi Jawa Barat



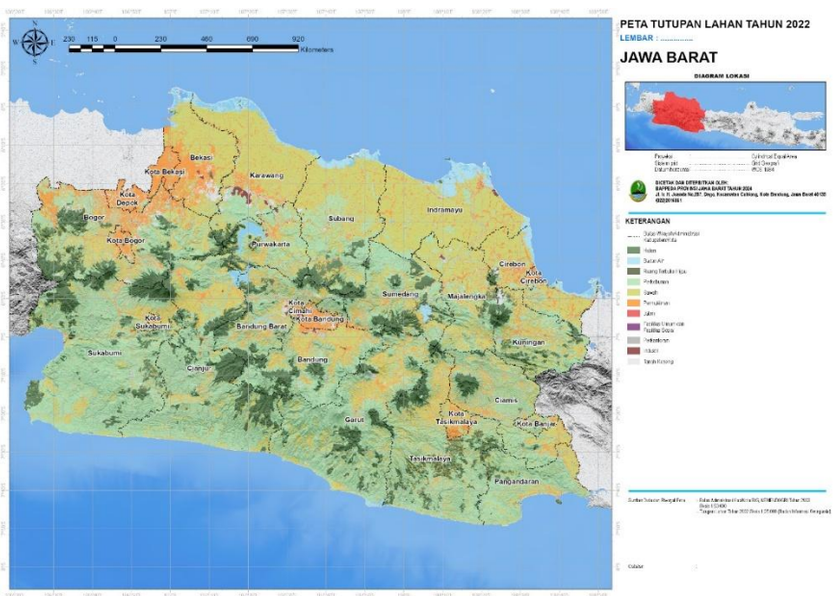
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

2.1.1.4 Kondisi Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

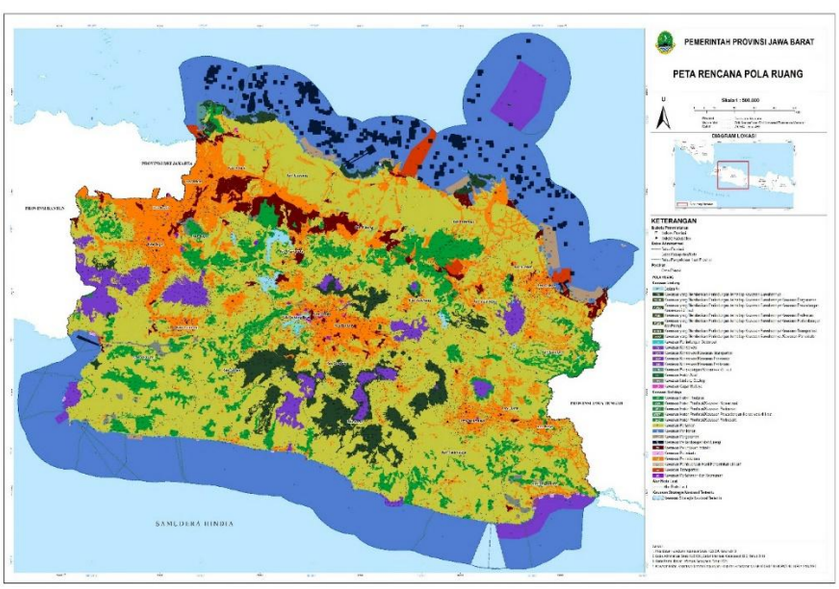
RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 melalui peta rencana pola ruang berupaya untuk mengarahkan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, serta untuk mendukung rencana pengembangan kewilayahan serta membentuk struktur ruang pusat-pusat permukiman sesuai dengan yang direncanakan.

Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2023

Gambar 2.6
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Berdasarkan hasil sandingan antara tutupan lahan eksisting yang diperoleh dari peta tutupan lahan tahun 2022 dengan rencana pola ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, teridentifikasi bahwa masih terdapat sejumlah luasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kawasan terbangun terutama kebutuhan hunian, Kawasan pertanian, hutan, industri dan badan air.

Untuk badan air, terdapat sebanyak 5.266 Ha lahan yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Hal ini dapat mendukung upaya penanganan persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Begitu pun dengan Kawasan hutan, dimana teridentifikasi terdapat 539.227 Ha lahan yang secara pola ruang dapat disesuaikan peruntukan lahannya menjadi Kawasan hutan. Hal ini, dapat mendukung upaya pencapaian Kawasan lindung 45 persen yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Potensi yang cukup besar lainnya yaitu dari sektor pertanian, teridentifikasi seluas 1.293.534 Ha yang dapat disesuaikan pemanfaatannya menjadi lahan pertanian terutama untuk lahan sawah. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya Jawa Barat untuk mempertahankan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), menjadi lumbung pangan nasional dan mendukung program ketahanan pangan. Dari sisi penggunaan lahan budidaya, masih terdapat seluas 336.628 Ha lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, hal ini dapat mengakomodir kebutuhan hunian yang senantiasa bertambah di wilayah Jawa Barat. Dari sisi industri, terdapat potensi lahan seluas 106.073 dalam rencana pola ruang yang masih dapat dikembangkan untuk menjadi Kawasan peruntukan industri.

Tabel 2.12
Sandingan Tutupan Lahan dan Rencana Pola Ruang

No	Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Pola Ruang (Ha)	Potensi Kesesuaian (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Badan Air	35.784	41.050	5.266	Badan Air: Sungai, Waduk, Tambak, Situ, dan Saluran Irigasi
2	Hutan	355.278	894.505	539.227	Hutan yang dimaksud pada rencana meliputi Hutan Konservasi, Hutan Adat, Hutan Lindung serta Hutan Produksi

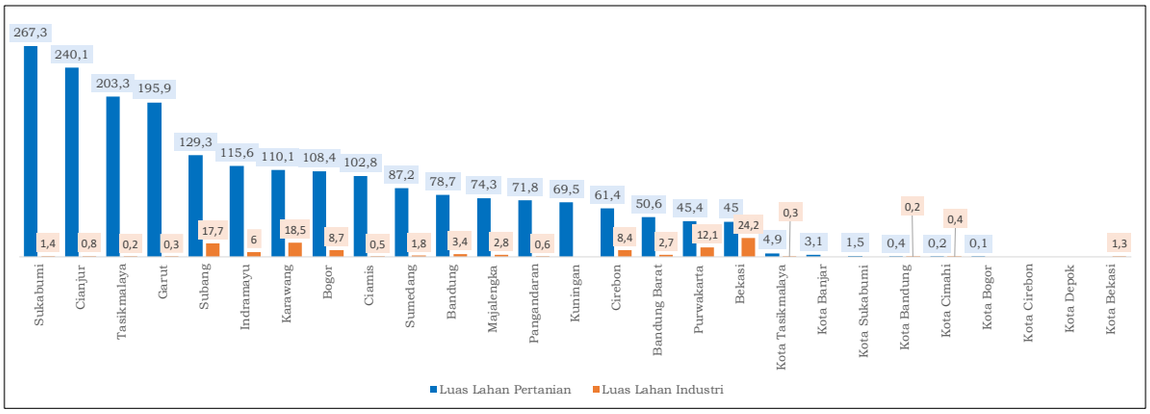
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Pola Ruang (Ha)	Potensi Kesesuaian (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					yang ada di pola ruang RTRW Provinsi Jawa Barat
3	Sawah	773.404	2.066.938	1.293.534	Sawah di Tutupan Lahan termasuk menghitung sawah eksisting yang berada di Kawasan Permukiman, di Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Industri termasuk sawah yang berada di Kawasan konservasi dan hutan lindung Kawasan Pertanian di Pola Ruang meliputi: Kawasan Tanaman Pangan untuk KP2B, Holtikultura, dan Kawasan Perkebunan;
4	Permukiman	288.157	624.785	336.628	Kawasan Permukiman
5	Industri	6.073	112.146	106.073	Industri yang dimaksud dalam rencana yaitu Kawasan Peruntukan Industri yang tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Barat

Sumber :Peta Tutupan Lahan Skala 1:25.000 Tahun 2022, BIG; Perda Nomor 12 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Luas wilayah darat dan laut Jawa Barat mencapai 3,7 juta ha, dengan proporsi lahan pertanian seluas 2,1 juta ha dan luas lahan industri 112 ribu ha. Lahan pertanian terluas di Jawa Barat berada di Kabupaten Sukabumi (267 ribu ha), Cianjur (240 ribu ha), Tasikmalaya (203 ribu ha), dan Garut (195 ribu ha). Sementara itu wilayah industri terluas berada di Kabupaten Bekasi (24,2 ribu ha), Karawang (18,5 ribu ha), dan Subang (17,7 ribu ha). Sebagai daerah industri, Kabupaten Karawang dan Subang masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas, yaitu sekitar 129 ribu ha dan 110 ribu ha.

Gambar 2.7
Perbandingan Jumlah Luas Lahan Pertanian dan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.1.1.5 Kondisi Demografi

2.1.1.5.1 Kondisi Penduduk

Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 50,35 juta dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,13%. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat mengalami perlambatan yang diiringi dengan menurunnya rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.13
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Penduduk (L+P)	Rasio (poin)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk per km
	Laki-laki	Perempuan				
2021	24.768.980	24.023.422	48.782.402	103,10	1,41	1.379
2022	25.067.226	24.338.582	49.405.808	103,00	1,33	1.334
2023	25.264.916	24.595.414	49.860.330	102,72	1,18	1.346
2024	25.492.200	24.852.990	50.345.190	100,75	1,13	1.359,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan data statistik BPS, sebaran penduduk Jawa Barat tahun 2024 paling besar terdapat di wilayah Kabupaten Bogor dan paling kecil di wilayah Kota Banjar. Sedangkan kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kota Bandung Kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km
Bogor	5.682.300	1,23	1.899,31
Sukabumi	2.828.020	0,99	679,14
Cianjur	2.584.990	1,14	711,71
Bandung	3.753.120	0,94	2.155,92
Garut	2.716.950	1,33	876,09
Tasikmalaya	1.920.920	0,79	709,91
Ciamis	1.259.230	0,65	789,02
Kuningan	1.213.930	1,04	1.017,63
Cirebon	2.387.960	1,35	2.227,68
Majalengka	1.352.540	0,95	1.016,82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

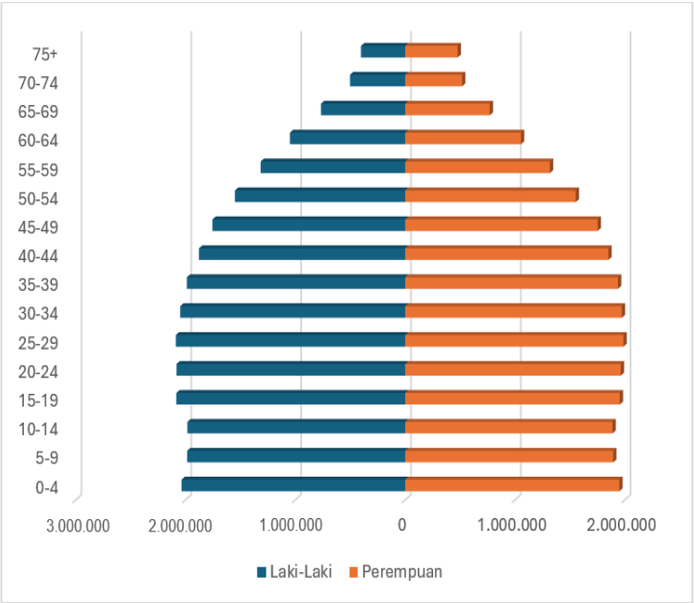
1D17AF9E85

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km
Sumedang	1.187.130	0,79	757,97
Indramayu	1.914.040	1,14	921,96
Subang	1.663.160	1,12	768,01
Purwakarta	1.050.340	1,38	1.057,65
Karawang	1.554.380	1,24	1.334,78
Bekasi	3.273.870	1,35	2.616,96
Bandung Barat	1.884.190	1,40	1.468,08
Pangandaran	434.100	0,65	384,78
Kota Bogor	1.078.350	0,89	9.682,60
Kota Sukabumi	365.740	1,46	7.570,59
Kota Bandung	2.528.160	0,91	15.175,96
Kota Cirebon	344.850	0,91	8.743,69
Kota Bekasi	2.644.060	1,04	12.411,09
Kota Depok	2.163.640	1,37	10.823,05
Kota Cimahi	598.700	1,39	14.110,25
Kota Tasikmalaya	750.730	1,27	4.081,37
Kota Banjar	209.790	1,15	1.601,34
Provinsi Jawa Barat	**50.345.190**	**1,13**	**1.359,21**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat berada pada periode jendela kesempatan atau *window opportunity* untuk menikmati bonus demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini akan menjadi modal besar bagi Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Proporsi penduduk usia anak (0-14 tahun) masih cukup besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif lainnya (65-75+ tahun). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengarusutamaan anak masih menjadi isu utama. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak serta kelembagaan pengarusutamaan anak. Salah satunya dengan meningkatkan optimalisasi perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

2.1.1.5.2 Kebudayaan Lokal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan nasional dan lokal. Undang-undang ini penting karena menjadi langkah konkret negara dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun.

Salah satu hal yang perlu dilindungi dan dikembangkan adalah kampung adat, yaitu wilayah permukiman masyarakat yang masih memegang teguh, melestarikan, dan menjalankan adat istiadat, tradisi, sistem sosial, arsitektur, serta kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan identitas budaya suatu komunitas etnis atau suku tertentu. Kampung adat umumnya masih mempertahankan pola kehidupan tradisional yang tidak banyak berubah akibat modernisasi. Terdapat enam karakteristik kampung adat, antara lain: (1) memiliki struktur sosial tradisional yang dipimpin oleh tokoh adat, seperti kepala adat atau tetua adat; (2) memiliki arsitektur rumah adat khas yang sesuai dengan budaya setempat, seperti atap ijuk, tiang kayu, dan ukiran khas; (3) memiliki tempat-tempat sakral atau ritual, seperti balai adat, batu keramat, rumah leluhur, atau lumbung adat; (4)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

masih menjalankan tradisi dan upacara adat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, kematian, panen, dan lain-lain; (5) mengalami isolasi relatif dari modernisasi, baik secara geografis maupun sosial; dan (6) menerapkan hukum adat serta norma-norma tradisional yang ditaati oleh masyarakatnya. Keberadaan dan karakteristik kampung adat ini menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Jawa Barat. Kampung adat tidak hanya merupakan warisan sejarah dan identitas masyarakat Sunda, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya, edukasi, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk perlindungan hukum, pengembangan ekonomi lokal, dan promosi budaya sangat diperlukan agar nilai-nilai tradisional tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan destinasi pariwisata budaya. Hal ini didukung oleh seni budaya dan tradisi yang khas, serta adat istiadat yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Jawa Barat. Kampung adat dan kampung budaya, yang menjadi tempat hidup dan tinggalnya masyarakat adat atau masyarakat tradisional Jawa Barat, juga merupakan daya tarik wisata budaya yang unik dan otentik yang tersebar di sembilan kabupaten.

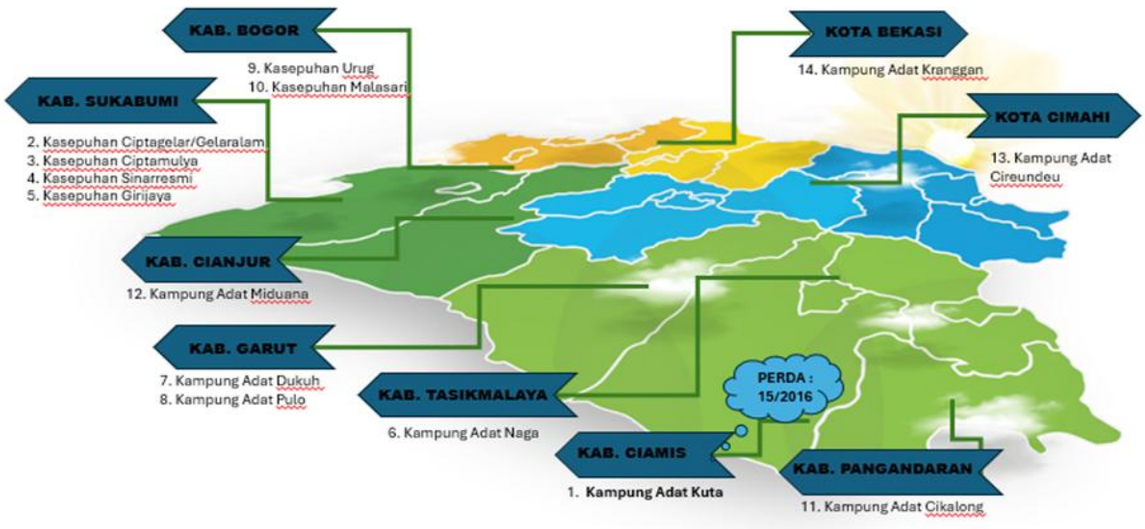
Terdapat 14 kampung adat yang menjadi tempat hidup dan tinggalnya Masyarakat Hukum Adat yang masih memegang teguh hukum adat dan telah ditetapkan pengakuan serta perlindungannya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kampung-kampung adat tersebut tersebar di 12 desa/kelurahan dan di 9 kabupaten/kota, yaitu: Kampung Adat atau KMHA Kuta di Kabupaten Ciamis; Kasepuhan atau KMHA Ciptagelar/Gelaralam, KMHA Sinarresmi, KMHA Ciptamulya, dan KMHA Girijaya di Kabupaten Sukabumi; KMHA Naga di Kabupaten Tasikmalaya; KMHA Dukuh dan KMHA Pulo di Kabupaten Garut; KMHA Urug dan KMHA Malasari di Kabupaten Bogor; KMHA Cikalong di Kabupaten Pangandaran; KMHA Miduana di Kabupaten Cianjur; KMHA Cireundeu di Kota Cimahi; dan KMHA Kranggan di Kota Bekasi. Kampung Adat atau KMHA Kuta memiliki perbedaan dibandingkan dengan kampung adat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

lainnya. Kampung Adat Kuta ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah, karena selain ditetapkan sebagai KMHA, juga diberikan penetapan terhadap Hutan Adatnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9.

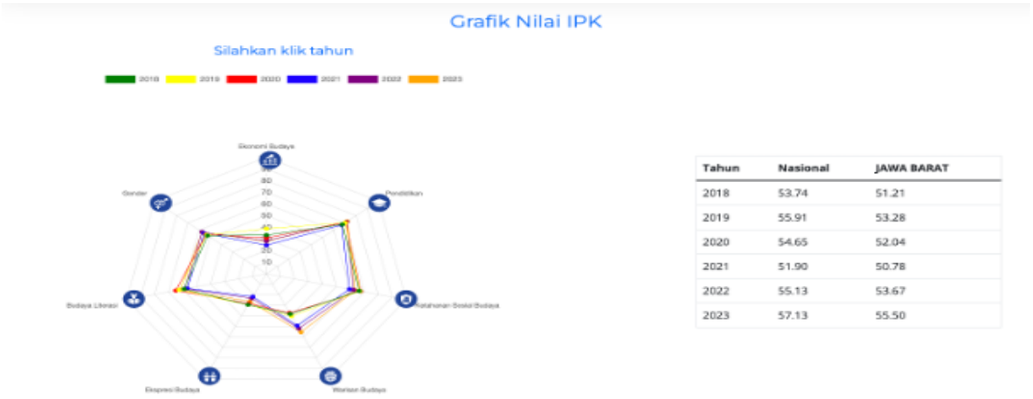
Gambar 2.9
Kampung Adat Yang Direkomendasikan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat (KMHA) Di Jawa Barat



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, 2024

Masyarakat adat di kampung adat menjadi modal pada komponen warisan budaya yang merupakan komponen komposit dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Kampung adat diharapkan tidak saja meningkatkan komponen warisan budaya tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan komponen lainnya khususnya komponen ekonomi budaya.

Gambar 2.10
Grafik Nilai Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Tahun	Nasional	JAWA BARAT
2018	53.74	51.21
2019	55.91	53.28
2020	54.65	52.04
2021	51.90	50.78
2022	55.13	53.67
2023	57.13	55.50

Sumber: Indeks Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek,2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Perhitungan IPK merupakan komposit dari 7 (tujuh) Dimensi sebagai berikut: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Literasi Budaya dan Gender.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kinerja beberapa indikator pembangunan yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan data beberapa tahun terakhir disajikan pada subbab ini.

2.1.2.1 Pertumbuhan dan Ekonomi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang memberikan gambaran terkait dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi serta menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Jawa Barat mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Faktor utama yang mendukung pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan proaktif dari pemerintah daerah, peningkatan investasi, bertambahnya konsumsi masyarakat yang berdampak pada sektor perdagangan besar dan eceran, berkurangnya dampak *El Nino* terhadap sektor pertanian, serta pengembangan teknologi digital.

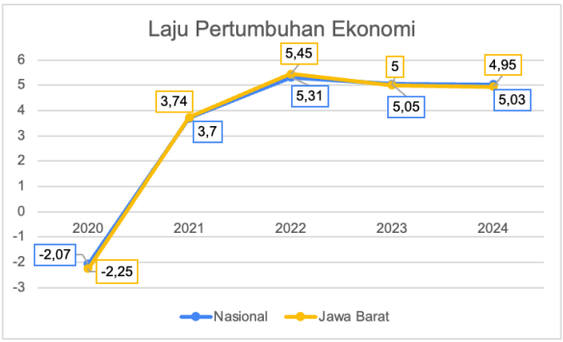
Peningkatan kinerja ekonomi pada gambar 2.11, mengindikasikan penguatan pemulihan ekonomi dibandingkan capaian tahun 2020 yang terkontraksi cukup dalam, ini dapat terwujud dengan partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

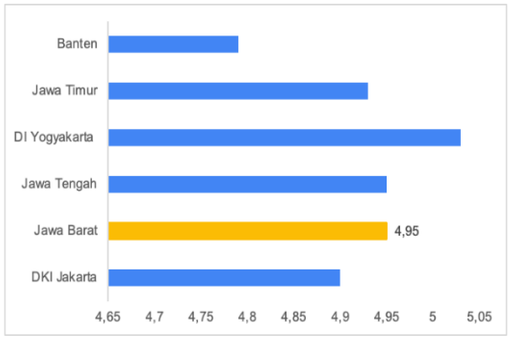
ke Jawa Barat. Momentum libur hari natal dan tahun baru, libur sekolah, serta keberadaan kereta cepat *Whoosh* turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024 karena didukung peningkatan aktivitas masyarakat.

Gambar 2.11
Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025 (diolah)

Gambar 2.12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025 (diolah)

Penguatan ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar sektor lapangan usaha terutama pada 3 sektor dominan diantaranya; Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dominasi sektor Industri Pengolahan dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat mengindikasikan kegiatan ekonomi bertumpu pada kegiatan mengubah suatu barang dasar menjadi barang yang bernilai tinggi. Pada tahun 2024, perekonomian Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan melambat secara tahunan (*year-on-year*). Perlambatan ini lebih signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2023. Sementara itu, secara triwulanan (*quarter-to-quarter*), pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup besar sejak triwulan I tahun 2023. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi pola aktivitas masyarakat, baik dalam pergerakan maupun konsumsi, yang dipengaruhi oleh momen-momen penting seperti Hari Raya Idulfitri dan Iduladha pada triwulan II di tahun 2023 dan 2024, serta perayaan Natal dan Tahun Baru yang disertai masa liburan pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

triwulan IV di kedua tahun tersebut. Selain itu, aktivitas politik seperti masa kampanye pemilu turut memberikan dorongan terhadap perekonomian. Meskipun mengalami perlambatan, Provinsi Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan kontribusi ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa maupun secara nasional.

Secara keseluruhan, ekonomi Jawa Barat menunjukkan resiliensi yang cukup kuat terhadap tantangan global. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Pengeluaran Modal Tetap Bruto. Analisis terhadap komponen pengeluaran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didominasi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi ini tercermin selama bulan Ramadan dan Lebaran Iduladha. Selain itu, peningkatan investasi dan konsumsi lembaga non-profit juga memberikan kontribusi yang signifikan. Dari sisi lapangan usaha, penguatan ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar sektor usaha, terutama pada tiga sektor utama, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB berdasarkan Triwulanan Tahun 2023-2024 (dalam persen, yoy)

Komponen PDRB		Laju Pertumbuhan Ekonomi								Distribusi Persentase PDRB 2024
		2023				2024				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Pengeluaran										
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,6	5,53	5,83	5,39	4,97	5,02	4,98	5,05	65,53
2	Konsumsi Lembaga Non-Profit	4,29	15,31	16,75	19,35	20,28	4,77	4,23	4,06	0,67
3	Konsumsi Pemerintah	9,44	14,46	-4,40	5,94	32,86	-7,02	-1,54	-3,24	4,68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,98	7,08	8,40	12,39	9,72	6,13	6,83	5,35	24,84
5	Perubahan Inventori	2,54	-227,78	-7,36	-249,02	51,11	-108,35	-296,18	-83,14	-0,20
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,01	12,01	14,62	17,87	21,71	9,71	13,62	6,33	64,61
7*	Impor Barang dan Jasa	3,25	15,87	22,02	28,44	34,82	11,12	4,91	5,18	60,13
Lapangan Usaha										
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,27	0,05	-1,89	0,29	-10,98	3,24	-3,26	1,59	8,45
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,18	-1,09	0,84	1,05	-0,96	0,04	-0,62	-0,28	0,95
C	Industri Pengolahan	6,62	5,68	4,73	2,09	3,87	2,79	5,12	3,52	41,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,49	-2,09	-0,34	3,7	0,67	1,84	-2,37	-0,60	0,43
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,96	2,18	-3,29	5,73	7,5	6,32	8,35	5,48	0,10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Komponen PDRB		Laju Pertumbuhan Ekonomi								Distribusi Persentase PDRB 2024
		2023				2024				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
F	Konstruksi	0,03	4,85	5,88	12,68	10,26	6,61	7,3	7,09	8,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,44	3,67	4,37	4,94	4,86	4,53	3,43	4,85	14,33
H	Transportasi dan Pergudangan	6,37	10,09	12,44	14,67	14,43	14,13	11,87	12,34	6,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,19	6,86	7,76	10,97	8,35	8,77	2,76	6,43	2,9
J	Informasi dan Komunikasi	7,36	8,17	6,31	9,57	8,96	8,75	8,24	8,20	3,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	2,61	4,93	6,54	5,72	7,83	4,96	4,20	2,86
L	Real Estate	6,66	7,69	5,72	4,96	6,02	7,12	8,54	6,64	1,17
M, N	Jasa Perusahaan	3,11	7,17	6,31	12,43	6,92	-3,57	-4,76	2,49	0,43
O	Administrasi Pemerintahan	3,31	7,52	-5,74	4,82	17,49	9,68	6,03	8,73	2,30
P	Jasa Pendidikan	5,43	7,18	0,88	6,88	9,47	4,99	6,27	5,95	3,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,7	6,79	6,74	8,09	7,86	5,91	4,25	5,98	0,80
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,15	8,39	9,86	10,86	6,67	9,06	7,43	7,93	2,30
PDRB		5,01	5,13	4,94	5,00	4,93	4,95	4,91	5,02	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025, (diolah)

Keterangan:

Warna Hijau menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat daripada tahun i dibanding pada tahun t-1

Warna Orange menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat daripada tahun t dibanding pada tahun t-1

Warna Merah menunjukkan kontraksi dari triwulan i pada tahun t dibanding triwulan i pada tahun t-1

*) Asumsi yang digunakan untuk impor barang dan jasa adalah semakin rendah pertumbuhannya semakin baik karena ketergantungan akan impor semakin melambat.

Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berfokus pada transformasi barang dasar menjadi produk bernilai tinggi. Namun, pada tahun 2023 hingga tahun 2024 triwulan II, Industri Pengolahan sebagai sektor dominan mengalami fluktuasi yang cenderung mengarah pada perlambatan. Sedangkan pada tahun 2024 triwulan IV, sektor Industri Pengolahan mengalami percepatan yang signifikan. Percepatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan pada aktivitas produksi sektor industri pengolahan terutama pada sub sektor Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Logam Dasar, dan Industri Makanan dan Minuman. Peningkatan aktivitas produksi tersebut membuat sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan sumber pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami perlambatan di triwulan IV pada tahun 2024 dibandingkan triwulan IV pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, penurunan pada sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan adanya penurunan pada pola kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik.

Sektor Konstruksi pada tahun 2024 triwulan III menunjukkan kontribusi yang lebih unggul dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi. Aktivitas pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan pertumbuhan investasi yang digambarkan oleh pembentukan modal tetap bruto.

Tabel 2.16
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024 (persen)

Provinsi	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	3,56	5,25	4,96	4,90
Jawa Barat	3,74	5,45	5,00	4,95
Jawa Tengah	3,33	5,31	4,98	4,95
DI Yogyakarta	5,58	5,15	5,07	5,03
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93
Banten	4,49	5,03	4,81	4,79
Indonesia	**3,70**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.16 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,03 persen, dengan DI Yogyakarta kembali mencatat angka tertinggi sebesar 5,03 persen. Sebaliknya, Jawa Tengah dan Jawa Barat mencatat pertumbuhan yang sama sebesar 4,95 persen, yang lebih rendah daripada Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak terlepas dari kontribusi signifikan yang diberikan oleh masing-masing kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik unik yang berkontribusi pada dinamika perekonomian regional. Kontribusi kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan dan kelemahan ekonomi daerah, serta peluang untuk meningkatkan sinergi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota menunjukkan tren positif pada tahun 2024. Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kuningan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi. Di sisi lain, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang pertumbuhannya relatif lebih lambat. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat jelas pada kasus Kabupaten Indramayu yang berhasil meningkatkan status IPM-nya dari kategori sedang menjadi tinggi. Penguatan tersebut akan terus dipertahankan pada 2025, melihat kondisi pertumbuhan dan penguatan di 27 Kabupaten/Kota yang meningkat.

Tabel 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Bogor	3,55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	3,74	5,12	5,17	5,15
Cianjur	3,48	5,04	5,16	5,14
Bandung	3,56	5,35	4,97	5,04
Garut	3,58	5,08	4,94	4,95
Tasikmalaya	3,43	4,70	4,69	4,64
Ciamis	3,66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	3,56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	2,47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	4,75	6,63	6,15	6,38
Sumedang	3,17	5,03	5,01	4,05
Indramayu	0,58	2,88	9,76	2,18
Subang	2,18	4,21	4,64	4,81
Purwakarta	3,42	5,24	4,97	4,64
Karawang	5,85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	3,62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	3,46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	3,67	5,03	5,26	5,12
Kota Bogor	3,76	5,65	5,10	5,15
Kota Sukabumi	3,71	5,35	5,12	5,11
Kota Bandung	3,76	5,41	5,07	4,99
Kota Cirebon	3,05	5,10	5,01	5,02
Kota Bekasi	3,22	4,96	5,43	5,19
Kota Depok	3,76	5,24	5,05	5,47
Kota Cimahi	4,19	5,92	5,19	5,26
Kota Tasikmalaya	3,57	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	3,49	4,19	4,63	5,48
Jawa Barat	**3,74**	**5,45**	**5,00**	**4,95**

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024

Perekonomian Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota. Tabel 2.18 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024. Kabupaten/kota yang memberikan distribusi terbesar diantaranya; Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung dengan total distribusi gabungan sebesar 49,87

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Berdasarkan struktur perekonomian, sektor Industri Pengolahan menjadi basis ekonomi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dan sektor Perdagangan menjadi basis ekonomi di Kota Bandung.

Tabel 2.18
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
Bogor	11,12	11,09	10,94	10,93	10,99
Sukabumi	3,18	3,15	3,12	3,11	3,11
Cianjur	2,24	2,23	2,21	2,21	2,27
Bandung	5,83	5,81	5,84	5,82	5,84
Garut	2,74	2,71	2,72	2,73	2,78
Tasikmalaya	1,77	1,75	1,74	1,74	1,76
Ciamis	1,51	1,50	1,50	1,51	1,52
Kuningan	1,21	1,20	1,21	1,23	1,25
Cirebon	2,34	2,33	2,32	2,32	2,37
Majalengka	1,52	1,52	1,54	1,58	1,63
Sumedang	1,67	1,66	1,64	1,64	1,66
Indramayu	3,74	3,63	3,71	3,92	3,72
Subang	1,89	1,88	1,88	1,88	1,94
Purwakarta	3,16	3,15	3,13	3,11	3,11
Karawang	10,54	10,86	10,96	11,00	10,92
Bekasi	14,98	15,16	15,02	14,89	14,85
Bandung Barat	2,19	2,17	2,16	2,15	2,16
Pangandaran	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55
Kota Bogor	2,16	2,15	2,16	2,16	2,15
Kota Sukabumi	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Kota Bandung	13,37	13,24	13,42	13,28	13,11
Kota Cirebon	1,10	1,09	1,09	1,09	1,08
Kota Bekasi	4,55	4,52	4,49	4,50	4,56
Kota Depok	3,32	3,31	3,32	3,31	3,32
Kota Cimahi	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53
Kota Tasikmalaya	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04
Kota Banjar	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20
Jawa Barat	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Keterangan : * Angka Sementara

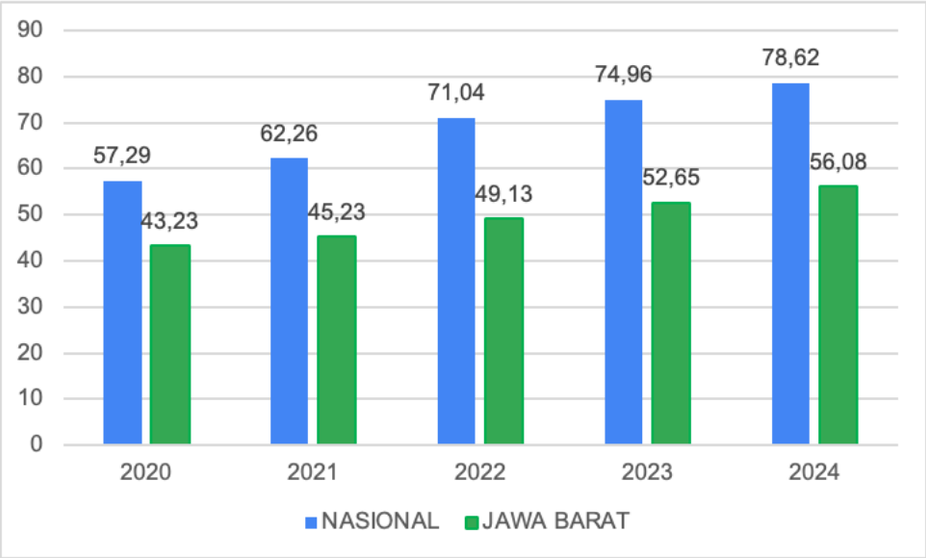
2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Jawa Barat selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, kenaikan berkelanjutan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini terjadi seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat dan kontribusi yang lebih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

besar dari sektor-sektor unggulan. Meski demikian, rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat masih di bawah atau lebih rendah dari capaian nasional. Berdasarkan kategori Bank Dunia, Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan kategori pendapatan per kapita menengah bawah.

Gambar 2.13
Nilai PDRB Per Kapita Nasional dan Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

PDRB per kapita menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki nilai PDRB per kapita paling tinggi diikuti lapangan usaha Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor seperti pada Tabel 2.14. Artinya, penduduk yang bekerja di ketiga lapangan usaha tersebut terutama Industri Pengolahan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang bekerja di lapangan usaha lainnya. Tabel 2.18 menunjukkan 5 (lima) lapangan usaha dengan PDRB per kapita terbesar tahun 2024.

Tabel 2.19
PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2024

Lapangan Usaha	Jumlah Pekerja (Juta Jiwa)	Persentase Pekerja	PDRB ADHB Sektor (Miliar Rupiah)	PDRB per Kapita (Miliar Rupiah)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	22,80%	408.257,19	408.257,19
Industri Pengolahan	4,44	18,89%	1.168.548,23	1.168.548,23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Lapangan Usaha	Jumlah Pekerja (Juta Jiwa)	Persentase Pekerja	PDRB ADHB Sektor (Miliar Rupiah)	PDRB per Kapita (Miliar Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	15,33%	237.631,60	237.631,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,28	9,69%	86.660,11	86.660,11
Konstruksi	1,79	7,60%	238.500,79	238.500,79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.20 menyajikan nilai PDRB Per Kapita provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2021-2024. Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah *output* dari setiap sektor ekonomi.

Tabel 2.20
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2024 (Ribu Rupiah)

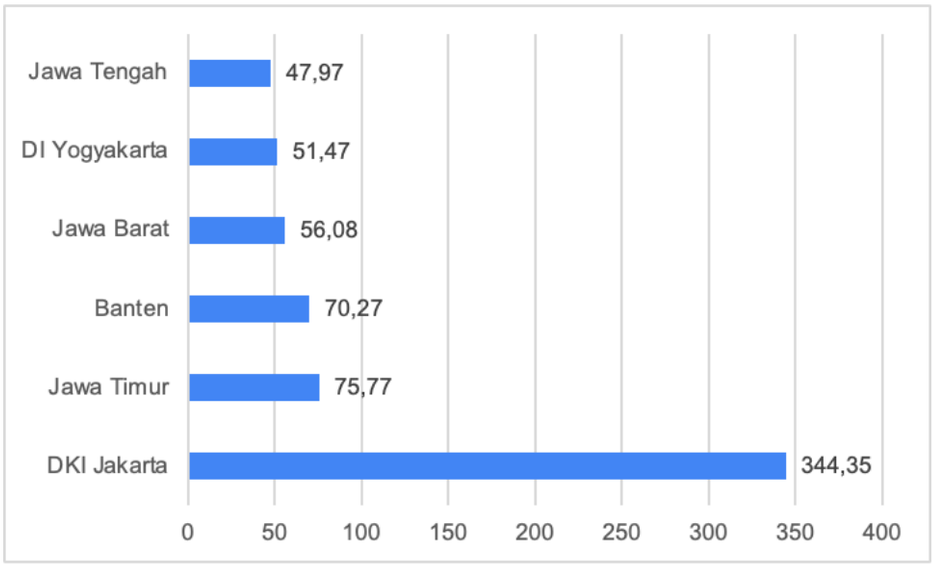
Provinsi	PDRB per Kapita ADHB				PDRB per Kapita ADHK			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	274.659,62	299.674,52	322.615,13	344.349,76	175.004,64	183.598,47	192.133,32	201.315,13
Jawa Barat	45.234,18	49.136,90	52.651,45	56.079,61	30.935,23	32.246,78	33.481,87	34.801,16
Jawa Tengah	38.568,08	41.946,05	45.198,51	47.972,22	27.092,91	28.248,16	29.369,6	30.534,61
DI Yogyakarta	40.516,00	44.637,15	48.358,22	51.473,44	29.115,86	30.410,57	31.748,21	33.140,14
Jawa Timur	59.988,44	66.246,91	71.121,93	75.770,26	40.779,82	42.635,85	44.423,32	46.295,19
Banten	55.383,29	61.413,76	66.147,39	70.275,82	38.339,42	39.790,39	41.228,33	42.773,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.14
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam skala provinsi, PDRB per kapita kabupaten/kota (lihat Tabel 2.21) menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar >Rp100 juta per tahun, jauh di atas rata-rata pendapatan provinsi. Dilihat dari peranannya, Kabupaten Bekasi dengan basis ekonomi sektor Industri Pengolahan dan Kota Bandung dengan basis ekonomi sektor Perdagangan memiliki peranan yang besar dan penting dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kunci yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dinamika ekonomi yang terjadi di Jawa Barat menjadi tantangan yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Kondisi PDRB per kapita di Jawa Barat pada lima tahun terakhir mencerminkan disparitas yang cukup besar antara kabupaten dan kota. Kabupaten/Kota dengan fokus pada industri yang baik menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat, sementara daerah yang bergantung pada sektor pertanian menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, daerah yang bergantung pada sektor pertanian relatif lebih tahan meskipun kontribusi ekonominya tetap terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berimbang dengan fokus yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

hanya pada penguatan sektor industri, tetapi juga diversifikasi ekonomi yang dapat meningkatkan daya tahan daerah sebagai upaya antisipasi terhadap krisis di masa mendatang.

Tabel 2.21
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	43.586	45.384	48.187	51.378	54.857
Sukabumi	24.836	25.747	27.472	29.374	31.167
Cianjur	19.241	20.050	21.341	22.826	24.914
Bandung	34.206	35.724	38.783	41.372	44.126
Garut	22.480	23.277	25.138	26.914	29.012
Tasikmalaya	20.120	20.931	22.545	24.172	25.916
Ciamis	26.048	27.282	29.577	31.834	34.336
Kuningan	21.996	22.891	24.827	27.081	29.273
Cirebon	21.869	22.730	24.301	25.974	28.140
Majalengka	24.708	25.975	28.447	31.115	34.234
Sumedang	30.821	31.970	34.243	36.773	39.699
Indramayu	43.308	44.064	48.454	54.669	55.166
Subang	25.209	26.095	28.223	30.120	33.037
Purwakarta	67.349	70.152	74.745	79.194	84.024
Karawang	91.873	98.846	107.455	115.169	121.298
Bekasi	102.419	108.104	115.085	121.647	128.693
Bandung Barat	26.088	26.965	28.852	30.622	32.500
Pangandaran	27.195	28.501	30.714	33.042	35.647
Kota Bogor	44.100	45.984	49.875	53.239	56.616
Kota Sukabumi	35.926	37.278	39.931	42.562	44.760
Kota Bandung	116.056	120.710	132.098	140.144	147.081
Kota Cirebon	70.468	72.978	78.532	84.135	88.560
Kota Bekasi	37.999	39.479	42.293	45.281	48.922
Kota Depok	34.358	35.741	38.402	40.817	43.515
Kota Cimahi	56.715	59.612	64.427	68.552	72.528
Kota Tasikmalaya	30.223	31.592	34.096	36.955	39.445
Kota Banjar	22.184	22.993	24.029	25.284	26.451

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

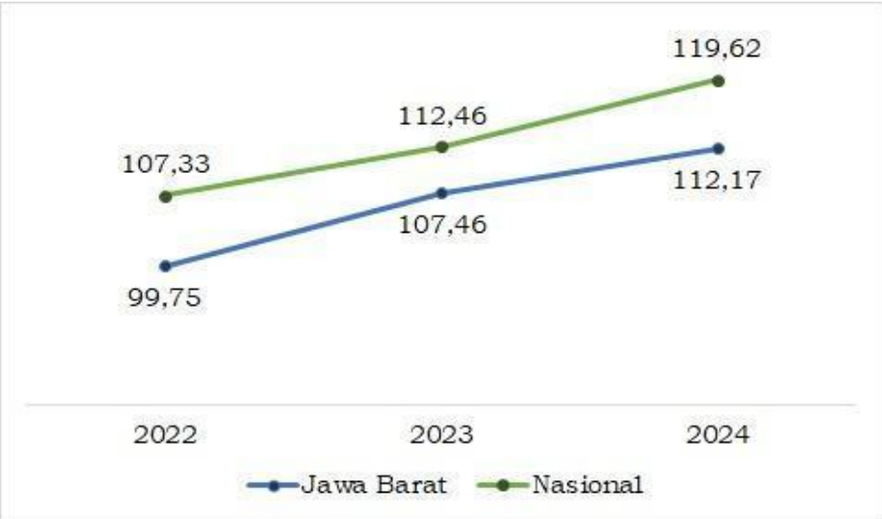
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu. NTP menggambarkan indeks terima dibanding indeks bayar petani. Indeks terima merupakan hasil yang diterima petani dari hasil produksi pertaniannya, sedangkan indeks bayar merupakan pengeluaran untuk biaya produksi dan juga biaya

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

kebutuhan sehari-hari termasuk biaya konsumsi, biaya pendidikan, biaya transportasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh petani.

Pada kurun waktu 2022–2024, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, rata-rata NTP berada di bawah angka 100 kemudian mengalami kenaikan secara cukup signifikan hingga mencapai 112,17 pada tahun 2024.

Gambar 2.15
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2022-2024



Sumber : BPS, 2025

NTP terdiri atas 5 (lima) subsektor sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.21. NTP subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada peningkatan NTP di tahun 2024. Terjadi kenaikan NTP subsektor Tanaman Pangan dari 107,46 poin pada tahun 2023 menjadi 113,22 poin pada tahun 2024 dan kenaikan NTP subsektor Hortikultura dari 112,75 poin pada tahun 2023 menjadi 116,65 poin pada tahun 2023. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024 yang merupakan dampak dari El Nino. Hal ini menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan berimplikasi terhadap kenaikan harga komoditi di pasaran.

NTP subsektor memperlihatkan perbedaan tingkat kesejahteraan petani. Petani yang berkecimpung di subsektor Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perikanan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sementara itu, petani yang berkecimpung di subsektor Tanaman

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Perkebunan Rakyat dan Peternakan memiliki NTP relatif lebih rendah dan berada sedikit di atas ambang batas defisit.

Tabel 2.22
Nilai Tukar Petani menurut Subsektor Tahun 2022-2024 (Persen)

Sub Sektor	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	97,50	107,46	113,22
Hortikultura	109,24	112,75	116,65
Tanaman Perkebunan Rakyat	96,45	99,66	105,57
Peternakan	101,04	103,88	104,13
Perikanan	109,58	111,82	112,01
Jawa Barat	**99,74**	**107,46**	**112,17**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Secara umum, terjadi peningkatan NTP di seluruh provinsi di pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan tertinggi disebabkan naiknya NTP di Subsektor Tanaman Pangan 12,24 persen, Subsektor Tanaman Hortikultura 14,92 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 7,31 persen, dan Subsektor Perikanan 2,74 persen. Sementara itu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024.

Tabel 2.23
Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024

Provinsi	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	104,13	107,70	106,49
Jawa Barat	**99,74**	**107,46**	**112,17**
Jawa Tengah	107,27	111,14	114,21
DI Yogyakarta	98,14	103,68	104,86
Jawa Timur	102,51	109,47	112,21
Banten	101,37	106,09	108,76
Indonesia	**107,33**	**112,46**	**119,62**

Sumber: BPS. 2025

2.1.2.4 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga. Ancaman resesi global yang sebelumnya mengancam perekonomian dunia perlahan mulai berkurang seiring dengan meredanya laju inflasi yang mencapai puncaknya pada

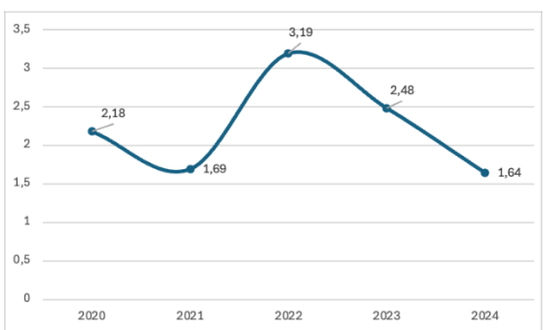
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

tahun 2022. Meski begitu, tantangan baru muncul dalam bentuk ketegangan geopolitik yang mengancam kestabilan ekonomi global. Fragmentasi ekonomi dan meningkatnya proteksionisme berpotensi memperlambat perdagangan dan investasi internasional, serta menyulitkan upaya pengendalian inflasi secara global.

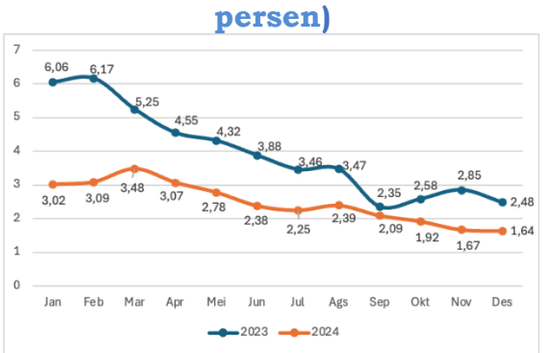
Sepanjang tahun 2023, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan cukai rokok, penyesuaian harga BBM, dan lonjakan permintaan menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Di samping itu, fluktuasi harga minyak dunia turut memberikan tekanan tambahan pada dinamika inflasi. Kondisi cuaca panas ekstrem dan kemarau yang berkepanjangan masih menjadi isu utama dalam kenaikan beberapa komoditas pangan. Meskipun demikian, berbagai program pengendalian inflasi, misalnya yang dilakukan Bank Indonesia, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) memberikan pengaruh pada pengendalian harga melalui penguatan sektor pertanian, *urban farming*, dan kerja sama antar daerah. Dampak positif dari program ini terlihat pada komoditas-komoditas strategis seperti minyak goreng, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah yang menjadi penyumbang deflasi bulanan.

Gambar 2.16
Perkembangan Inflasi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (*y-to-y*) persen



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024, diolah

Gambar 2.17
Perbandingan Inflasi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (m-to-m) persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024, diolah

Perjalanan inflasi di Jawa Barat lima tahun terakhir mencerminkan dinamika perekonomian yang penuh tantangan. Pada Gambar 2.16, Tahun 2021 menjadi titik terendah dengan inflasi 1,69 persen akibat pandemi, sebelum perlahan bangkit dan terjadi lonjakan yang cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

tinggi pada tahun 2022 sebesar 3,19 persen. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas global dan penyesuaian BBM.

Gambar 2.17 menggambarkan perbandingan inflasi bulanan (mtm) antara tahun 2023 dan 2024. Jika dilihat secara *month-to-month*, inflasi bulan Januari 2023 tercatat pada 3,02 persen, kemudian mengalami variasi sepanjang tahun, mencapai 5,25 persen pada bulan Mei sebelum kembali turun menjadi 2,85 persen pada bulan Desember 2024. Secara umum, Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi di pertengahan tahun. Tren penurunan ini mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik dan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini tidak terlepas dari deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Secara keseluruhan, analisis terhadap kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami peningkatan di awal periode, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif telah berhasil menstabilkan perekonomian dan mengurangi laju inflasi menuju tahun 2024. Keberhasilan ini dapat tercapai melalui sinergi berbagai kebijakan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

2.1.2.5 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi adalah dengan melihat Indeks Gini *(Gini Ratio). Gini Ratio* merupakan indikator dalam mengukur distribusi pendapatan suatu daerah. Besarnya *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika indeks Gini sama dengan 0 (nol) hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sedangkan indeks Gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata.

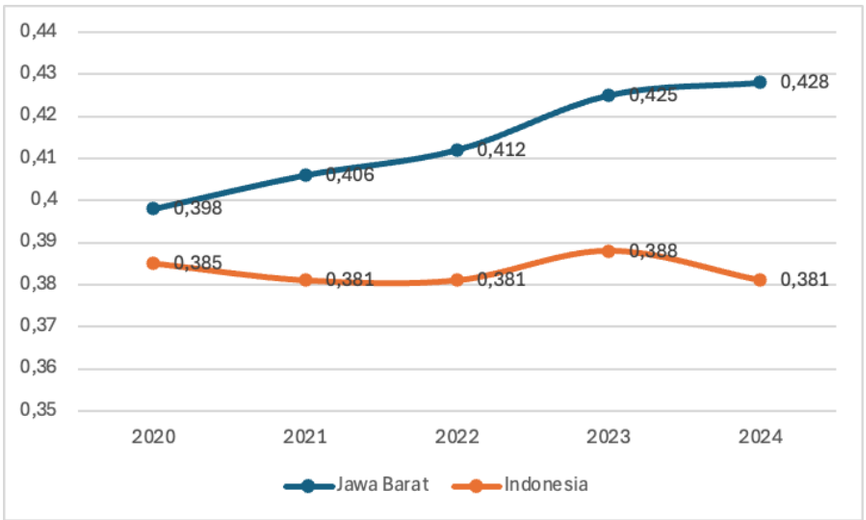
Gambar 2.18 menunjukkan bahwa perkembangan *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat. Berdasarkan data tersebut, *Gini Ratio* di Jawa Barat mengalami peningkatan secara konsisten dari 0,398 pada tahun 2020 menjadi 0,428 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, *Gini Ratio* Nasional cenderung stabil dengan berkisar antara 0,381 hingga 0,388 dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

periode yang sama. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia secara keseluruhan relatif terkendali.

Gambar 2.18
Realisasi *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

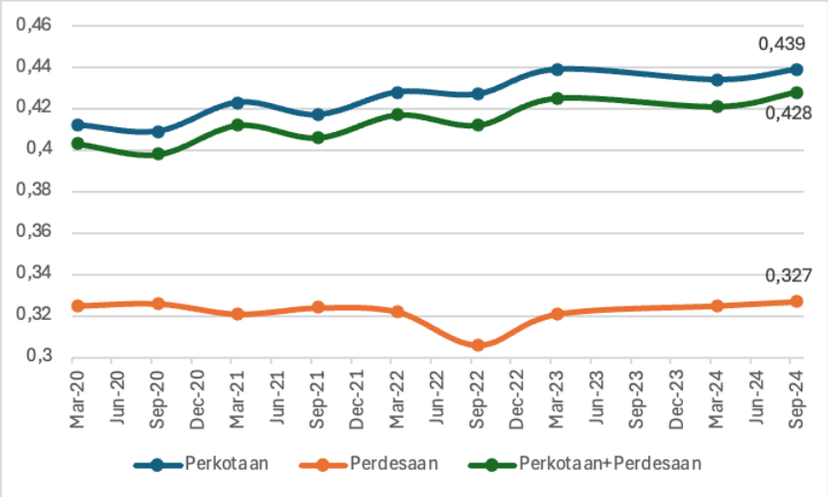


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2024

Gambar 2.18 menunjukkan tidak ada perubahan *Gini Ratio* yang signifikan di daerah perkotaan pada Maret 2023 dan September 2024. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,321 menjadi 0,327 pada September 2024. Meskipun ada perbedaan, nilai *Gini Ratio* di kedua wilayah masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. *Gini Ratio* wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang di pedesaan. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih besar. Penurunan *Gini Ratio* didorong oleh pembangunan di kawasan metropolitan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.19
Perkembangan *Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada September 2024 adalah 15,91 persen. Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan pada Maret 2023 sebesar 20,74 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan di Jawa Barat termasuk ke dalam ketimpangan sedang sementara daerah pedesaan termasuk ketimpangan rendah.

Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu: 1) ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; 2) ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; 3) konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan 4) ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Hal ini terlihat saat terjadi goncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Dalam konstelasi regional Jawa, jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya, *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga dan melebihi *Gini Ratio* nasional, sehingga diperlukan program-program pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan cukup efektif mempersempit ketimpangan di wilayah pedesaan. Program pengembangan ekonomi di wilayah perkotaan perlu memperkuat sisi inklusif dan pemerataan khususnya usaha mikro dan kecil, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.24
***Gini Ratio* Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022-2024**

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
Jawa Barat	**0,398**	**0,406**	**0,412**	**0,425**	**0,428**
Jawa Tengah	0,359	0,368	0,366	0,369	0,364
DI Yogyakarta	0,437	0,436	0,459	0,449	0,428
Jawa Timur	0,364	0,364	0,365	0,387	0,373
Banten	0,365	0,363	0,377	0,368	0,359
Indonesia	**0,385**	**0,381**	**0,381**	**0,388**	**0,381**

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Dalam konteks Jawa Barat, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka Gini Ratio lebih banyak disebabkan oleh disparitas dan eksklusivitas pembangunan ekonomi antarwilayah. Hal ini tercermin dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota pada Triwulan III tahun 2024 terhadap pembentukan PDRB provinsi, di mana sebesar 51 persen disumbang oleh tiga kabupaten (Bogor, Bekasi, dan Karawang) serta satu kota, yaitu Kota Bandung.

Pada tingkat provinsi, ketimpangan antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan menurut Michael Todaro, kabupaten/kota di Jawa Barat terbagi ke dalam dua kelompok: pertama, kelompok dengan tingkat ketimpangan sedang (Gini Ratio antara 0,36–0,49); dan kedua, kelompok dengan tingkat pemerataan yang relatif tinggi (Gini Ratio antara 0,20–0,35).

Pertumbuhan Gini Ratio kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi pada Tabel 2.25. Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi di Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kabupaten/kota yang termasuk kategori ketimpangan sedang, umumnya memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis industri dan perdagangan. Adapun kelompok kabupaten/kota dengan distribusi pengeluaran yang merata memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis pertanian. Hal ini disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pola spasial status pencapaian gini rasio kabupaten/kota tahun 2023 ditunjukan pada Gambar 2.20.

Tabel 2.25
***Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

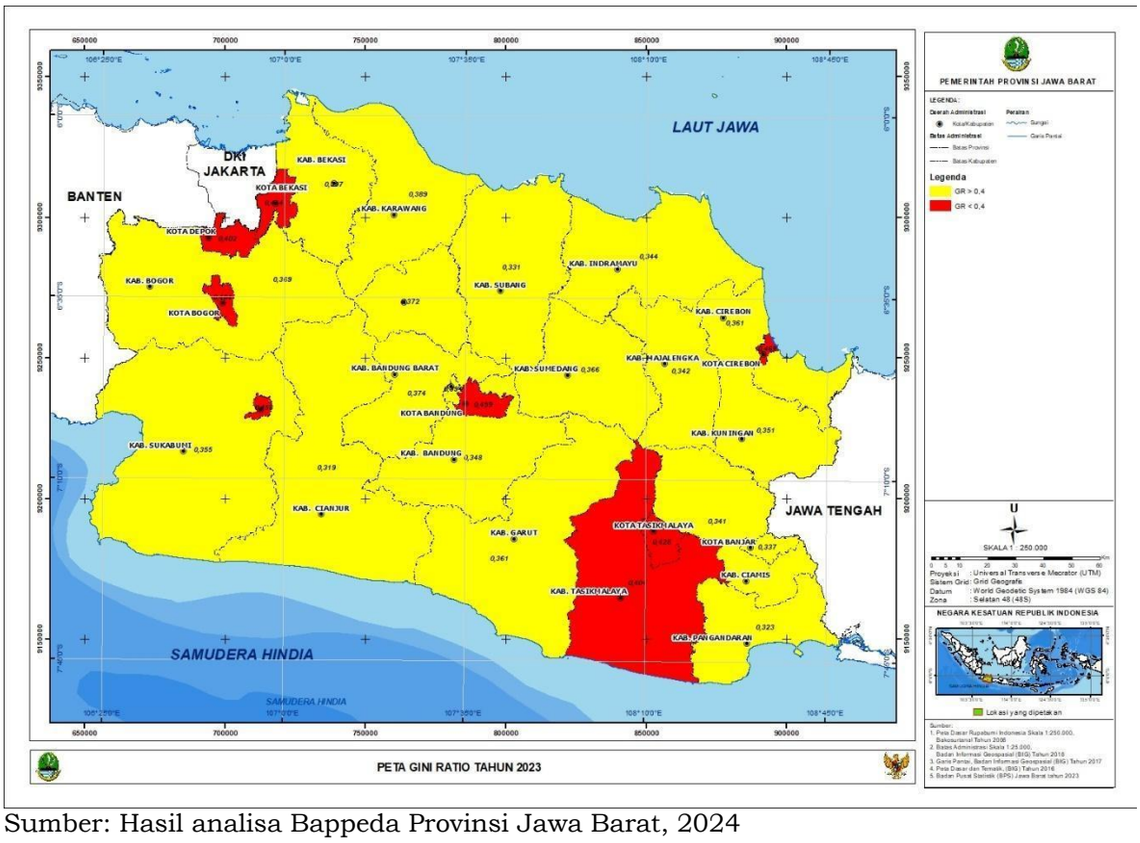
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	**0,403**	**0,406**	**0,412**	**0,425**	**0,421**
Bogor	0,381	0,396	0,400	0,369	0,398
Sukabumi	0,334	0,343	0,309	0,355	0,342
Cianjur	0,350	0,372	0,313	0,319	0,338
Bandung	0,414	0,386	0,370	0,348	0,364
Garut	0,352	0,322	0,302	0,361	0,324
Tasikmalaya	0,343	0,378	0,378	0,404	0,363
Ciamis	0,336	0,342	0,337	0,341	0,326
Kuningan	0,361	0,349	0,345	0,351	0,369
Cirebon	0,338	0,339	0,355	0,361	0,374
Majalengka	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354
Sumedang	0,384	0,359	0,394	0,366	0,337
Indramayu	0,319	0,321	0,301	0,344	0,306
Subang	0,350	0,329	0,360	0,331	0,320
Purwakarta	0,414	0,388	0,367	0,372	0,398
Karawang	0,327	0,374	0,353	0,389	0,376
Bekasi	0,372	0,340	0,373	0,397	0,367
Bandung Barat	0,376	0,356	0,368	0,374	0,400
Pangandaran	0,335	0,320	0,294	0,323	0,286
Kota Bogor	0,412	0,441	0,430	0,464	0,477
Kota Sukabumi	0,397	0,436	0,482	0,458	0,436
Kota Bandung	0,402	0,427	0,459	0,459	0,440
Kota Cirebon	0,421	0,489	0,468	0,468	0,424
Kota Bekasi	0,352	0,401	0,441	0,414	0,435
Kota Depok	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398
Kota Cimahi	0,380	0,415	0,408	0,394	0,402
Kota Tasikmalaya	0,366	0,414	0,405	0,428	0,359
Kota Banjar	0,312	0,341	0,362	0,337	0,318

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.20
Peta Capaian *Gini Ratio* Tahun 2023



Sumber: Hasil analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

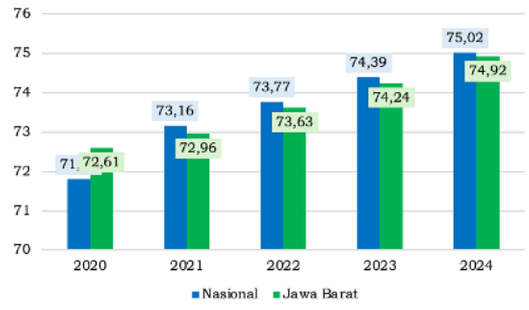
2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan, yang meliputi angka harapan hidup dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli).

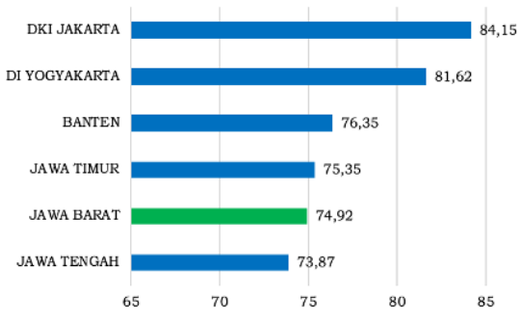
IPM Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Jawa Barat meningkat dari 74,24 menjadi 74,92. Namun, kondisi IPM di Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah Nasional bahkan masih dalam posisi kedua terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perkembangan dari IPM, Provinsi Jawa Barat masih perlu mengejar ketertinggalan dari Provinsi lainnya agar bisa menciptakan manusia yang berkualitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.21
Perbandingan IPM Jawa Barat dan Nasional



Gambar 2.22
Perbandingan IPM di Pulau Jawa (dalam poin)



Sumber: BPS RI, BPS Jawa Barat, 2024

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah.

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, capaian IPM provinsi menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan DI Yogyakarta lebih maju dibandingkan provinsi lain ditunjukkan dengan capaian IPM yang sudah ≥ 80 yang berarti pembangunan sumber daya manusia termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Sementara itu, capaian pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat bersama 3 (tiga) provinsi lainnya masih tergolong kategori “Tinggi”. Faktor penyebab adanya disparitas pembangunan manusia antardaerah adalah perbedaan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal ini masih menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah di Jawa Barat.

Tabel 2.26
Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	81,92	82,25	82,77	83,55	84,15
Jawa Barat	**72,61**	**72,96**	**73,63**	**74,24**	**74,92**
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,80	73,39	73,87
DI Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09	81,63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

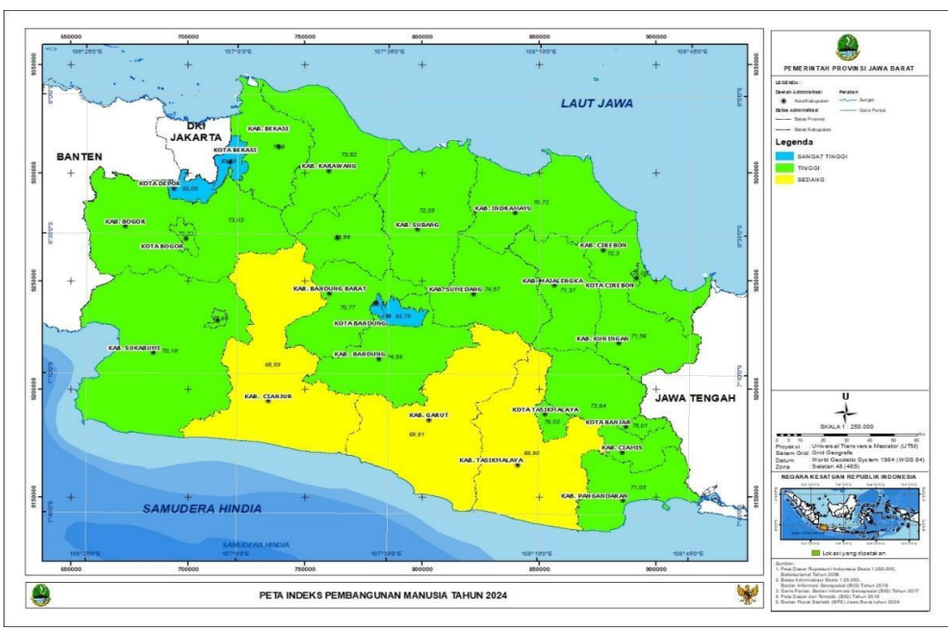
1D17AF9E85

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
Banten	74,41	74,68	75,252	75,77	76,35
Indonesia	**72,81**	**73,16**	**73,77**	**74,39**	**75,02**

Sumber: BPS, 2024

Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM pada tahun 2021 meskipun di tengah kondisi disrupsi pandemi. Peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat merupakan resultan dari kemajuan pembangunan manusia di 27 kabupaten/kota. Pola spasial status pencapaian IPM kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 2.17. Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan permasalahan disparitas antar wilayah. Luasnya wilayah dan tidak meratanya pembangunan menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan disparitas terjadi antar kabupaten/kota.

Gambar 2.23
Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024



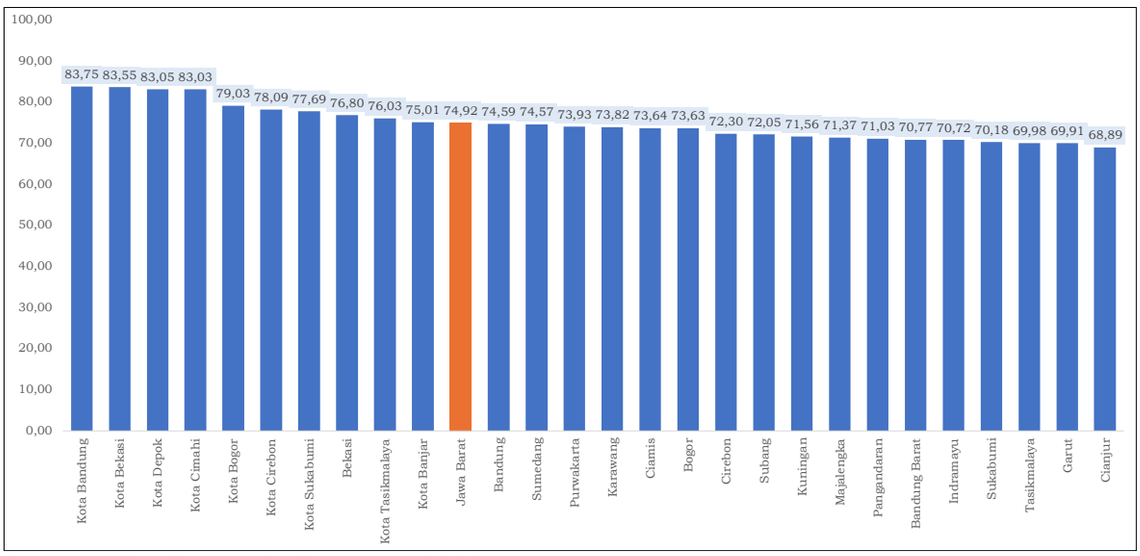
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat tahun 2024 sebesar 74,92 poin tidak terlepas dari kontribusi capaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat. Di tingkat Kabupaten Kota, capaian IPM tertinggi didominasi oleh daerah perkotaan, utamanya Kota Bandung (83,75), Kota Bekasi (83,55), dan Kota Depok (83,05). Sementara itu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

capaian terendah didominasi daerah di Jabar Selatan, yaitu Kabupaten Cianjur (68,89), Garut (69,91), dan Tasikmalaya (69,98). Capaian IPM di tingkat Kabupaten Kota cenderung lebih rendah dari Jawa Barat, terhitung sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten memiliki IPM di bawah rata-rata Jawa Barat. Pemerataan pembangunan ke Jabar Selatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan investasi pada potensi lokal diharapkan dapat meningkatkan IPM di Jabar Selatan.

Gambar 2.24
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2024 dicapai oleh Kabupaten Cianjur dengan angka 1,04 persen, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kota Bandung sebesar 0,55 persen. Tahun 2024 beberapa kabupaten/kota mengalami pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2023.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Rill per Kapita (ribu rupiah)
1	Bogor	74,9	12,75	8,39	11.563
2	Sukabumi	74,85	12,39	7,34	9.815
3	Cianjur	74,8	12,04	7,33	9.026
4	Bandung	75,23	12,74	9,15	11.392
5	Garut	74,87	12,17	7,85	9.168

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No.	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Rill per Kapita (ribu rupiah)
6	Tasikmalaya	74,06	12,64	7,97	8.965
7	Ciamis	75,26	14,3	8,1	10.085
8	Kuningan	75,22	12,27	7,9	10.418
9	Cirebon	74,98	12,42	7,65	11.529
10	Majalengka	74,98	12,27	7,53	10.842
11	Sumedang	75,29	13,02	8,74	11.589
12	Indramayu	74,82	12,32	6,95	11.010
13	Subang	75,08	12,11	7,46	11.894
14	Purwakarta	74,92	12,25	8,14	13.099
15	Karawang	75,16	12,21	8,05	12.942
16	Bekasi	75,33	13,18	9,76	12.500
17	Bandung Barat	75,06	12	8,24	9.583
18	Pangandaran	75,11	12,31	8,1	9.654
19	Kota Bogor	75,8	13,51	10,71	13.154
20	Kota Sukabumi	75,11	13,62	10,38	12.252
21	Kota Bandung	75,83	14,25	11,07	18.795
22	Kota Cirebon	75,48	13,17	10,53	12.869
23	Kota Bekasi	76,14	14,14	11,79	16.775
24	Kota Depok	75,82	14,11	11,59	16.640
25	Kota Cimahi	75,55	13,85	11,52	13.278
26	Kota Tasikmalaya	75,31	13,5	9,63	11.431
27	Kota Banjar	74,99	13,28	8,83	11.811
Provinsi Jawa Barat		**75,16**	**12,8**	**8,87**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

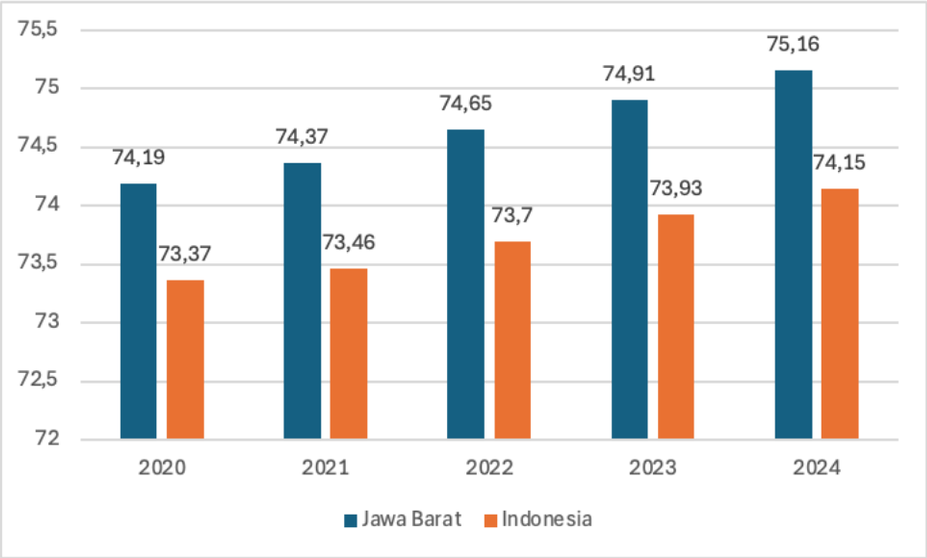
Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku hidup sehat dan ketersediaan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu penerapan perilaku hidup sehat adalah peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yang dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan mencegah terjadinya pertambahan kasus *stunting*. Sementara itu, dengan mudahnya akses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui edukasi PHBS oleh petugas puskesmas, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan ibu hamil minimal 6 (enam) kali, serta pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.25
Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Indonesia telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun pada Gambar 2.15. Sementara itu, pertumbuhan UHH di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sedikit melambat menjadi 0,33 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan UHH pada 2023 yang sebesar 0,35 persen. Untuk indikator kesehatan yang terkait dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat di tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan akses terhadap sanitasi dan sumber air minum layak menunjukkan perbaikan dalam infrastruktur dan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dikaitkan dengan investasi pemerintah dalam sektor kesehatan dan utilitas dasar. Akses yang lebih baik terhadap fasilitas ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, UHH Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami peningkatan UHH yang cukup tinggi menempati urutan ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

ditunjukkan pada Tabel 2.26. Pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin.

Tabel 2.28
Usia Harapan Hidup Provinsi se-Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	75,20	75,28	75,54	75,81	75,99
Jawa Barat	**74,19**	**74,37**	**74,65**	**74,91**	**75,16**
Jawa Tengah	74,39	74,49	74,58	74,69	74,91
DI Yogyakarta	74,95	75,04	75,11	75,18	75,36
Jawa Timur	74,21	74,28	74,57	74,87	75,07
Banten	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97
Indonesia	**73,37**	**73,46**	**73,70**	**73,93**	**74,15**

Sumber: BPS, 2025
UHH (SP2020-LF)

Perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif (Tabel 2.27). Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, kesenjangan antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah juga semakin mengecil. Tahun 2024, selisih antara Kota Bekasi yang memiliki UHH tertinggi dengan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki UHH terendah sebesar 2,08 tahun.

Tabel 2.29
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No.	Wilayah Jawa Barat	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil *Long Form* SP2020 (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	73,9	74,09	74,42	74,67	74,9
2	Sukabumi	73,9	74,15	74,4	74,65	74,85
3	Cianjur	73,9	74,1	74,37	74,61	74,8
4	Bandung	74,19	74,38	74,67	74,92	75,23
5	Garut	73,97	74,16	74,43	74,66	74,87
6	Tasikmalaya	73,06	73,22	73,64	73,87	74,06
7	Ciamis	74,23	74,42	74,69	74,96	75,26
8	Kuningan	74,25	74,43	74,67	74,91	75,22
9	Cirebon	73,97	74,16	74,43	74,71	74,98
10	Majalengka	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
11	Sumedang	74,3	74,49	74,77	75,04	75,29
12	Indramayu	73,88	74,09	74,39	74,61	74,82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No.	Wilayah Jawa Barat	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil *Long Form* SP2020 (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Subang	73,99	74,22	74,46	74,87	75,08
14	Purwakarta	73,92	74,11	74,4	74,67	74,92
15	Karawang	74,17	74,35	74,63	74,9	75,16
16	Bekasi	74,54	74,65	74,86	75,09	75,33
17	Bandung Barat	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
18	Pangandaran	74,12	74,32	74,6	74,88	75,11
19	Kota Bogor	74,72	74,92	75,21	75,52	75,8
20	Kota Sukabumi	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
21	Kota Bandung	74,82	74,99	75,26	75,53	75,83
22	Kota Cirebon	74,43	74,59	74,87	75,17	75,48
23	Kota Bekasi	75,01	75,27	75,6	75,86	76,14
24	Kota Depok	74,8	74,97	75,24	75,53	75,82
25	Kota Cimahi	74,56	74,73	74,99	75,27	75,55
26	Kota Tasikmalaya	74,34	74,52	74,8	75,08	75,31
27	Kota Banjar	73,99	74,19	74,48	74,77	74,99
Provinsi Jawa Barat		74,19	74,37	74,65	74,91	75,16

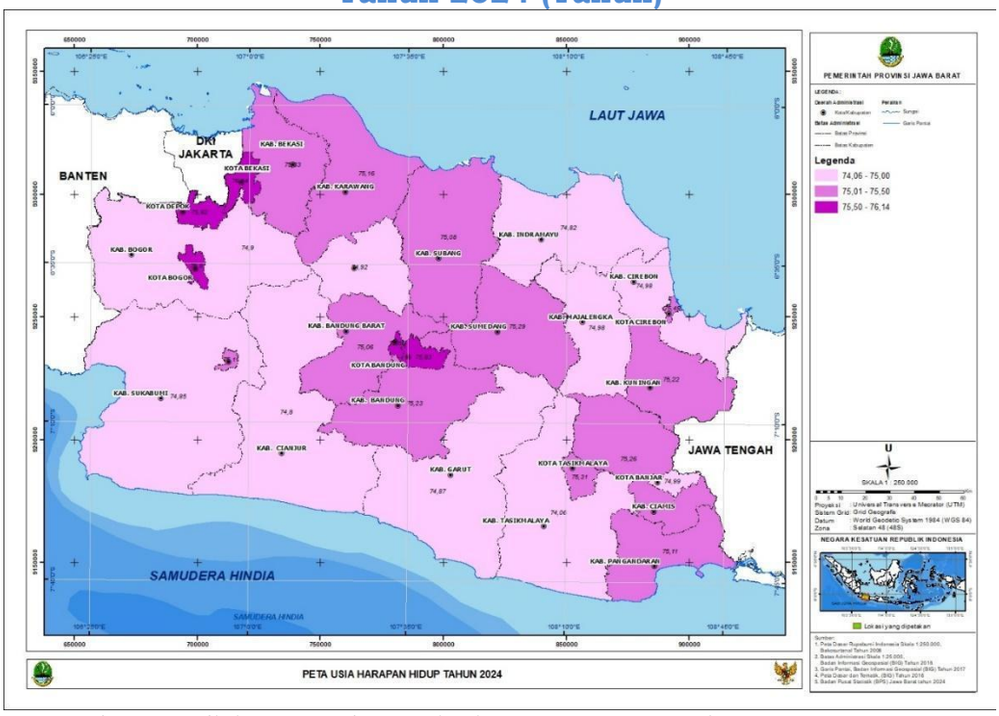
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
UHH (LF SP2020)

Pola spasial capaian UHH kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur dengan capaian UHH paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain (<74,90 tahun). Hal ini mengindikasikan pembangunan bidang kesehatan di kedua kabupaten tersebut perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya. Capaian UHH Kabupaten/Kota pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.26
Pola Spasial Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

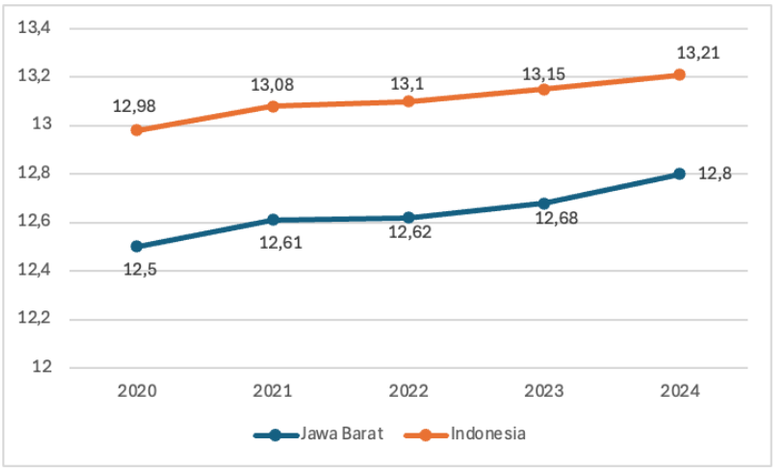
Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator *output* pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. HLS terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 HLS Jawa Barat mencapai 13,21 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I.

Pada Gambar 2.20 menunjukkan data capaian harapan lama sekolah dalam untuk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan selama periode 2020-2024. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat tren peningkatan di kedua wilayah. Capaian harapan lama sekolah di tingkat nasional secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses atau kualitas pendidikan tingkat regional. Dalam konteks ekonomi, peningkatan harapan lama sekolah mencerminkan investasi yang lebih baik pada modal manusia, yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Gambar 2.27
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibanding lima provinsi lainnya (Tabel 2.28). Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan di lima provinsi tersebut lebih lama dibandingkan di Jawa Barat.

Tabel 2.30
Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51
Jawa Barat	**12,50**	**12,61**	**12,62**	**12,68**	**12,80**
Jawa Tengah	12,70	12,77	12,81	12,85	12,86
DI Yogyakarta	15,59	15,64	15,65	15,66	15,70
Jawa Timur	13,19	13,36	13,37	13,38	13,43
Banten	12,89	13,02	13,05	13,09	13,10
Indonesia	**12,98**	**13,08**	**13,10**	**13,15**	**13,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian HLS kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Perbedaan HLS mengindikasikan adanya disparitas dalam mengakses fasilitas pendidikan antar daerah kabupaten/kota. Disparitas tersebut terlihat dari capaian HLS tertinggi sebesar 14,30 tahun di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kabupaten Ciamis dan terendah sebesar 12,00 tahun di Kabupaten Bandung Barat (Tabel 2.31). Selisih 2,3 tahun menandakan perbedaan jumlah tahun (kesempatan) untuk menempuh pendidikan bagi penduduk usia 7 (tujuh) tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023. baik Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Bandung Barat capaian HLS meningkat pada tahun 2024.

Tabel 2.31
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	12,48	12,49	12,50	12,64	12,75
2	Sukabumi	12,23	12,24	12,25	12,38	12,39
3	Cianjur	11,99	12,00	12,01	12,03	12,04
4	Bandung	12,69	12,70	12,71	12,73	12,74
5	Garut	11,91	12,03	12,15	12,16	12,17
6	Tasikmalaya	12,53	12,54	12,59	12,63	12,64
7	Ciamis	14,06	14,20	14,28	14,29	14,30
8	Kuningan	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
9	Cirebon	12,25	12,27	12,28	12,41	12,42
10	Majalengka	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
11	Sumedang	12,97	12,98	12,99	13,01	13,02
12	Indramayu	12,25	12,26	12,27	12,29	12,32
13	Subang	11,70	11,71	11,78	11,91	12,11
14	Purwakarta	12,11	12,12	12,13	12,18	12,25
15	Karawang	12,09	12,10	12,19	12,20	12,21
16	Bekasi	13,09	13,10	13,11	13,17	13,18
17	Bandung Barat	11,87	11,88	11,89	11,91	12,00
18	Pangandaran	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31
19	Kota Bogor	13,41	13,42	13,43	13,45	13,51
20	Kota Sukabumi	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
21	Kota Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,25
22	Kota Cirebon	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
23	Kota Bekasi	14,00	14,10	14,11	14,12	14,14
24	Kota Depok	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
25	Kota Cimahi	13,80	13,81	13,82	13,84	13,85
26	Kota Tasikmalaya	13,45	13,46	13,47	13,49	13,50
27	Kota Banjar	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
	Provinsi Jawa Barat	**12,50**	**12,61**	**12,62**	**12,68**	**12,80**

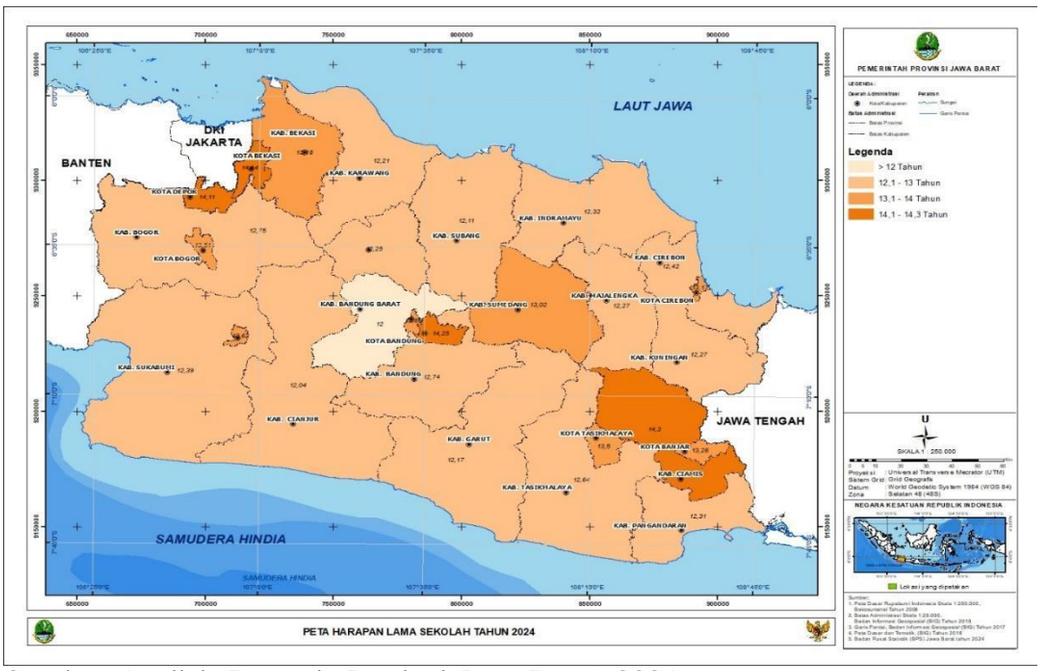
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pola spasial capaian HLS kabupaten/kota (Gambar 2.21) memperlihatkan disparitas yang cukup tajam. Terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan HLS >13 tahun, 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan capaian HLS antara 12-13 tahun, dan tidak ada kabupaten/ kota dengan capaian HLS < 12 tahun pada tahun 2024. Kabupaten Cianjur,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang relatif tertinggal dibanding daerah lain dalam hal pembangunan bidang pendidikan. Sementara, Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan capaian HLS tertinggi melampaui capaian HLS Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Gambar 2.28
Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)



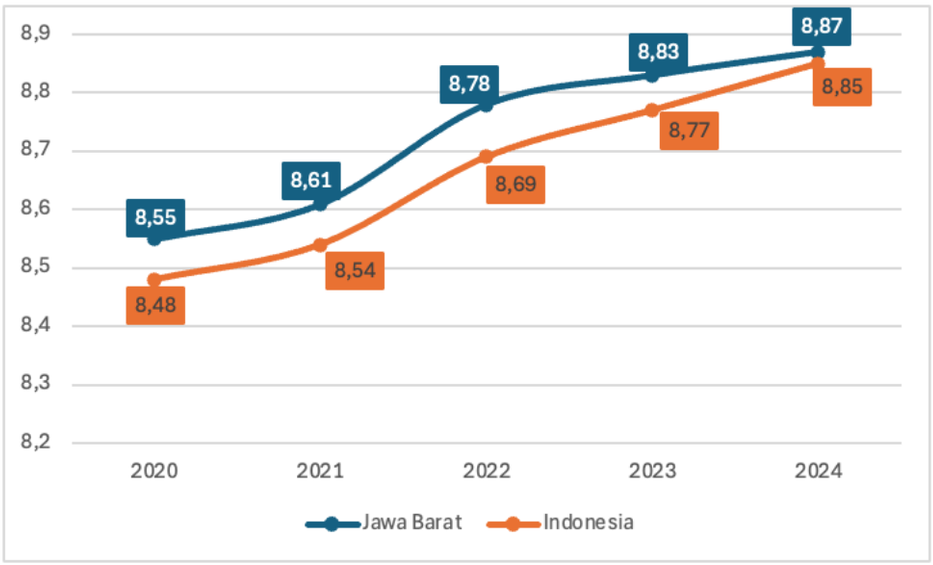
Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh selama periode 2020 hingga 2024. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2024, secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,87 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas II).

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.29
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.32 Rata-rata Lama Sekolah se Pulau Jawa Tahun 2020-2024 terlihat tren peningkatan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa secara keseluruhan mengalami kenaikan, dari 8,48 tahun pada 2020 menjadi 8,85 tahun pada 2024. Capaian RLS Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menempati urutan keempat setelah Provinsi Banten. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan di setiap provinsi, didukung oleh kebijakan pemerintah seperti program wajib belajar dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun disparitas antara provinsi dengan rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah masih terlihat, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pemerataan pendidikan di Pulau Jawa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan lebih merata.

Tabel 2.32
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	11,13	11,17	11,31	11,45	11,49
Jawa Barat	**8,55**	**8,61**	**8,78**	**8,83**	**8,87**
Jawa Tengah	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02
DI Yogyakarta	9,55	9,64	9,75	9,83	9,92
Jawa Timur	7,78	7,88	8,03	8,11	8,28
Banten	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23
Indonesia	**8,48**	**8,54**	**8,69**	**8,77**	**8,85**

Sumber: BPS, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Berdasarkan Tabel 2.33 merefleksikan disparitas pembangunan manusia dalam skala kabupaten/kota. Disparitas komponen RLS jauh lebih tinggi dibandingkan HLS. Pada tahun 2024 adalah Kota Bekasi (11,79 tahun) dan terendah Kabupaten Indramayu (6,95 tahun). Tren ketimpangan RLS kedua wilayah ini berfluktuatif dan disparitas RLS di kedua wilayah tetap lebar dan selisihnya meningkat dari 4,21 poin di tahun 2023 menjadi 4,84 poin di tahun 2024.

Tabel 2.33
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	8,31	8,34	8,37	8,39
2	Sukabumi	7,10	7,11	7,33	7,34
3	Cianjur	7,19	7,20	7,22	7,33
4	Bandung	9,07	9,08	9,10	9,15
5	Garut	7,53	7,83	7,84	7,85
6	Tasikmalaya	7,48	7,73	7,96	7,97
7	Ciamis	7,90	8,00	8,09	8,10
8	Kuningan	7,80	7,88	7,89	7,90
9	Cirebon	7,10	7,40	7,64	7,65
10	Majalengka	7,31	7,49	7,52	7,53
11	Sumedang	8,52	8,72	8,73	8,74
12	Indramayu	6,52	6,83	6,94	6,95
13	Subang	7,11	7,20	7,45	7,46
14	Purwakarta	8,10	8,11	8,13	8,14
15	Karawang	7,78	7,96	8,04	8,05
16	Bekasi	9,30	9,53	9,57	9,76
17	Bandung Barat	8,20	8,22	8,23	8,24
18	Pangandaran	7,85	8,03	8,04	8,10
19	Kota Bogor	10,53	10,63	10,64	10,71
20	Kota Sukabumi	9,81	10,14	10,37	10,38
21	Kota Bandung	10,99	11,00	11,06	11,07
22	Kota Cirebon	10,12	10,33	10,37	10,53
23	Kota Bekasi	11,31	11,44	11,66	11,79
24	Kota Depok	11,46	11,47	11,58	11,59
25	Kota Cimahi	11,08	11,21	11,39	11,52
26	Kota Tasikmalaya	9,52	9,53	9,54	9,63
27	Kota Banjar	8,77	8,78	8,79	8,83
	Provinsi Jawa Barat	**8,61**	**8,78**	**8,83**	**8,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

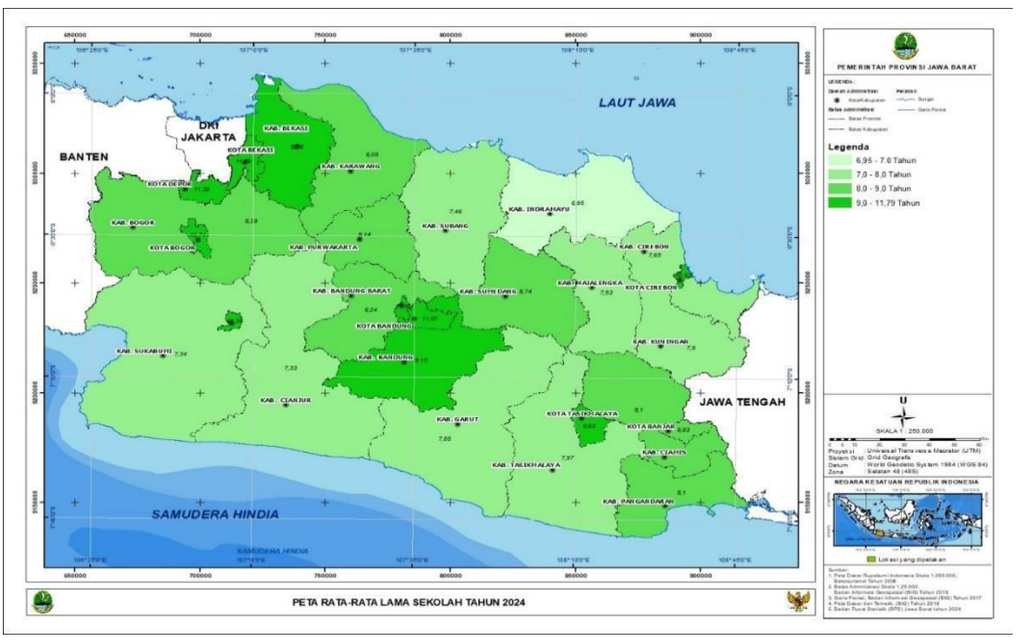
Gambar 2.30 memperlihatkan pola spasial capaian RLS kabupaten/kota pada tahun 2024. Terlihat jelas disparitas RLS antara wilayah Tengah dengan wilayah Utara dan Selatan serta wilayah Timur.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kabupaten/kota di wilayah Tengah pada umumnya memiliki capaian RLS di atas 8 (delapan) tahun, sedangkan wilayah kabupaten yang terletak di bagian Utara, Selatan dan Timur hampir seluruhnya memiliki capaian RLS di bawah 8 (delapan) tahun. Artinya secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah tersebut telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

Gambar 2.30
Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)



Sumber: BPS dan Bappeda, 2025

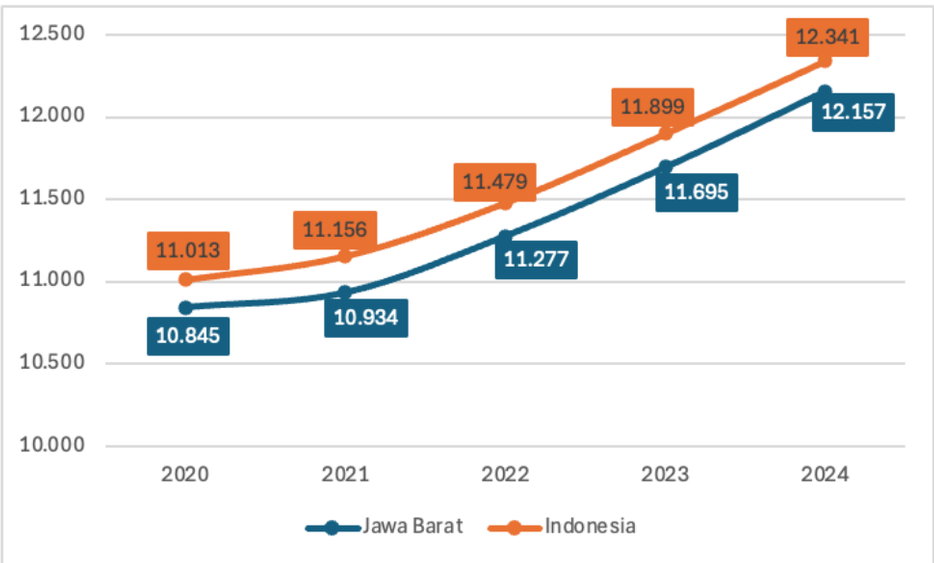
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Berdasarkan Gambar 2.31 menunjukkan capaian pengeluaran per kapita tahun 2020-2024, terdapat tren peningkatan baik Nasional maupun Jawa Barat. Pengeluaran per kapita Indonesia terus meningkat dari Rp11.013 ribu pada 2020 menjadi Rp12.341 ribu pada 2024. Tren serupa terjadi di Jawa Barat, di mana pengeluaran per kapita juga meningkat dari Rp10.845 ribu pada 2020 menjadi Rp12.157 ribu pada 2024. Meskipun nilai pengeluaran per kapita di Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode, selisih antara keduanya relatif stabil dan tidak terlalu signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan ekonomi pemerintah, inflasi yang terkendali, atau peningkatan pendapatan riil. Namun, perbedaan pengeluaran antara Jawa Barat dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas ekonomi antar wilayah yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Gambar 2.31
Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Tahun 2020-2024 (Rp.000)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan pengeluaran per kapita kecuali Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan sebesar Rp 1.081 ribu. Berdasarkan data dalam Tabel 2.32, Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan pengeluaran per kapita dari Rp 10.845 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 12.157 ribu pada tahun 2024. Meskipun angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif, posisi Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional serta tertinggal dibandingkan Daerah Khusus Jakarta dan DI Yogyakarta. Pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat yang stabil bisa diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring waktu. Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi ekonomi secara nasional.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.34
Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	18.227	18.520	18.927	19.370	19.953
Jawa Barat	**10.845**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**
Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276
DI Yogyakarta	14.015	14.111	14.482	14.924	15.361
Jawa Timur	11.601	11.707	11.992	13.870	12.852
Banten	11.964	12.033	12.216	12.601	13.097
Indonesia	**11.013**	**11.156**	**11.479**	**11.899**	**12.341**

Sumber: BPS RI, 2024

Capaian pengeluaran per kapita kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Semua kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2024. Seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.33). Peningkatan tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar Rp 18.795 ribu per kapita, sementara peningkatan pengeluaran per kapita terendah terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 8.965 ribu per kapita. Kondisi ini menyebabkan selisih antara nilai pengeluaran per kapita yang tertinggi (Kota Bandung) dengan yang terendah (Kabupaten Tasikmalaya) semakin besar mencapai Rp 9.830 ribu per kapita pada tahun 2024.

Tabel 2.35
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	11.563	10.410	10.860	11.153	11.563
2	Sukabumi	9.815	8.850	9.210	9.482	9.815
3	Cianjur	9.026	8.052	8.244	8.626	9.026
4	Bandung	11.392	10.307	10.588	11.018	11.392
5	Garut	9.168	7.961	8.227	8.685	9.168
6	Tasikmalaya	8.965	7.829	8.177	8.562	8.965
7	Ciamis	10.085	9.259	9.428	9.750	10.085
8	Kuningan	10.418	9.409	9.620	10.011	10.418
9	Cirebon	11.529	10.368	10.791	11.128	11.529
10	Majalengka	10.842	9.591	9.950	10.340	10.842
11	Sumedang	11.589	10.262	10.776	11.136	11.589
12	Indramayu	11.010	9.810	10.166	10.580	11.010
13	Subang	11.894	10.854	11.294	11.537	11.894
14	Purwakarta	13.099	11.669	12.193	12.619	13.099
15	Karawang	12.942	11.522	11.927	12.392	12.942
16	Bekasi	12.500	11.341	11.757	12.123	12.500

1D17AF9E85

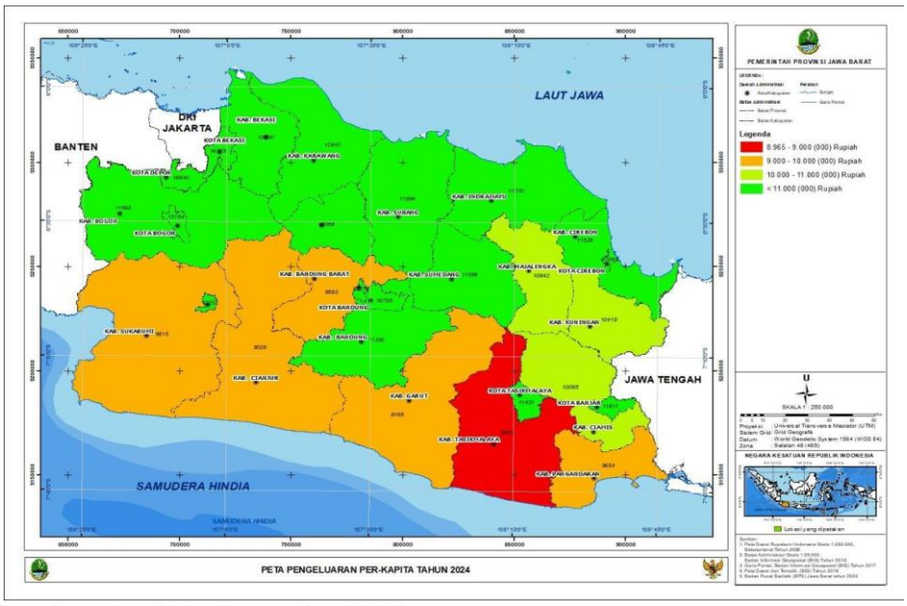
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
17	Bandung Barat	9.583	8.546	9.044	9.392	9.583
18	Pangandaran	9.654	9.065	9.389	9.406	9.654
19	Kota Bogor	13.154	11.716	12.058	12.656	13.154
20	Kota Sukabumi	12.252	10.942	11.229	11.799	12.252
21	Kota Bandung	18.795	16.996	17.639	18.236	18.795
22	Kota Cirebon	12.869	11.810	12.087	12.506	12.869
23	Kota Bekasi	16.775	15.903	16.239	16.479	16.775
24	Kota Depok	16.640	15.420	15.926	16.279	16.640
25	Kota Cimahi	13.278	12.019	12.500	12.883	13.278
26	Kota Tasikmalaya	11.431	10.213	10.578	11.063	11.431
27	Kota Banjar	11.811	10.476	10.967	11.356	11.811
	Provinsi Jawa Barat	**12.157**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.32 memperlihatkan pola spasial capaian pengeluaran per kapita kabupaten/kota pada tahun 2024. Gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp10.000.000 per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat bagian Utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp10.000.000 hingga Rp16.000.000 per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antar wilayah Jawa Barat bagian Utara dengan Jawa Barat bagian Selatan dalam hal ekonomi.

Gambar 2.32
Pola Spasial Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Rp.000/kapita/tahun)



Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.1.2.7 Kemiskinan

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selama kurun waktu setahun dari Maret 2024–September 2024, Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 535.509/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 400.115 (74,72 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 135.394 (25,28 persen). Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan sebesar 1,89 persen, yaitu dari Rp 517.841 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp 527.645 per kapita per bulan pada September 2024. Sedangkan Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 2,27 persen dari Rp 525.489 per kapita per bulan di Maret 2024 menjadi Rp 537.457 per kapita per bulan pada September 2024.

Tabel 2.36
Kondisi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	410.988	427.402	452.580	495.229	535.509
2	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	4,19	4,00	4,05	3,89	3,67
3	Persentase penduduk Miskin (%)	8,43	7,97	7,98	7,62	7,08

Sumber: BPS, 2025

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun 2022-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga di Jawa Barat berangsur pulih. Hal ini tidak terlepas dari upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya dengan fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.37
Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Persen)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	4,69	4,67	4,61	4,44	4,14
Jawa Barat	**8,43**	**7,97**	**8,06**	**7,62**	**7,08**
Jawa Tengah	11,84	11,25	10,98	10,77	9,58
DI Yogyakarta	12,80	11,91	11,49	11,04	10,40
Jawa Timur	11,46	10,59	10,49	10,35	9,56
Banten	6,63	6,50	6,24	6,17	5,70
Indonesia	**10,19**	**9,71**	**9,57**	**9,36**	**8,57**

Sumber: BPS, 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa pada periode 2022-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.35. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan nasional, meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Pada September 2024 selisih persentase penduduk miskin dengan Nasional mencapai 1,49 persen. Namun demikian, secara kuantitas jumlah penduduk miskin Jawa Barat menunjukkan jumlah masih cukup banyak (3,668,35 ribu jiwa) yang menduduki terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota pada periode 2022-2024 (kondisi Maret) menunjukkan kenaikan persentase penduduk miskin (Tabel 2.38). Tingkat kemiskinan tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan di semua kabupaten/kota. Pada tahun 2023, terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan menyentuh angka 2 (dua) digit (>10 persen), kemudian jumlahnya tetap bertahan di tahun 2024 dengan tetap 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan >10 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Jawa Barat selama periode 2022 hingga 2024.

Tabel 2.38
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2	Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3	Cianjur	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14
4	Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

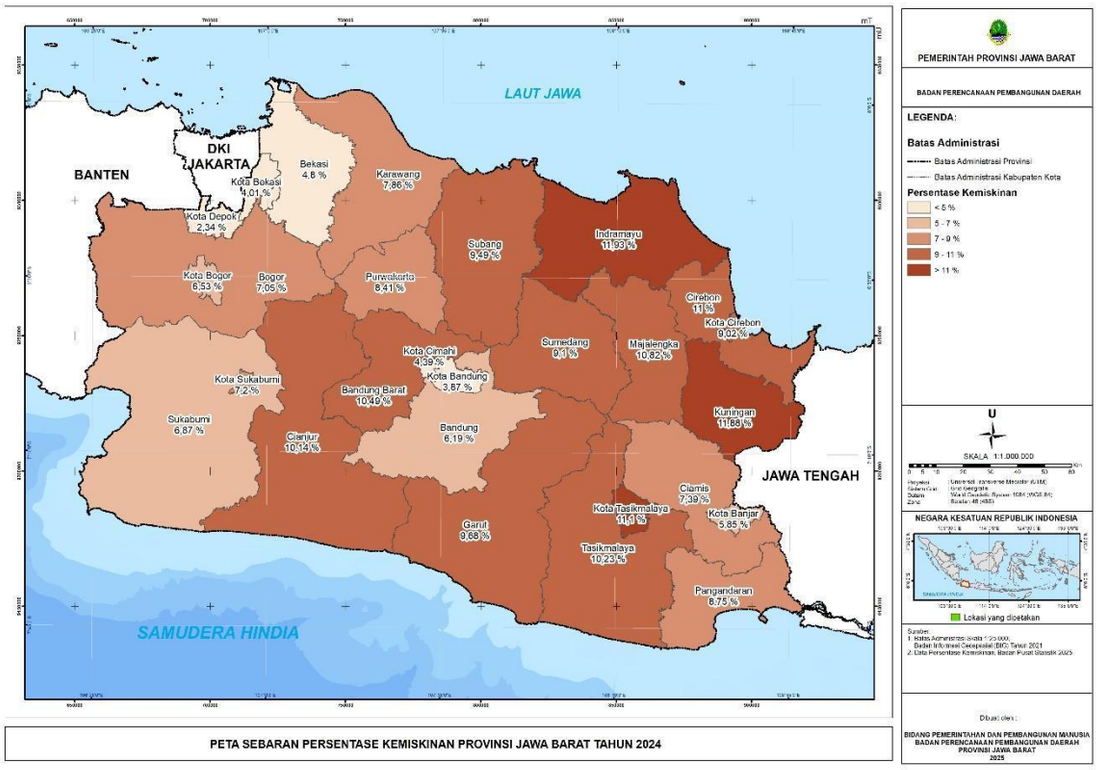
No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
5	Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6	Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7	Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8	Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9	Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11
10	Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11	Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,1
12	Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13	Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14	Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15	Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16	Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,8
17	Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18	Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,2
21	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,1
27	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
	Provinsi Jawa Barat	**7,88**	**8,40**	**8,06**	**7,62**	**7,08**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
* capaian bulan September 2024

Secara spasial, Gambar 2.33 memperlihatkan pola tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Sebaran penduduk miskin terkonsentrasi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bandung barat, yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian Utara Kota Tasikmalaya. Pola spasial memperlihatkan adanya disparitas tingkat kemiskinan yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; keterbatasan akses layanan dasar; ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan; rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan rendahnya investasi yang masuk.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.33
Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Persen)



PETA SEBARAN PERSENTASE KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Data dan informasi beserta analisis yang diuraikan di atas, menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Untuk itu, kemiskinan semestinya menjadi isu strategis yang dikedepankan pada tahun rencana 2026.

b. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

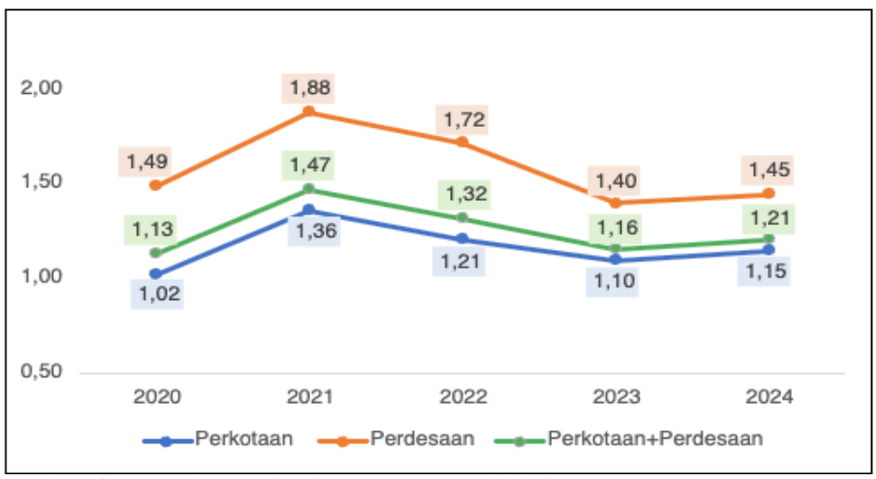
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 maka semakin besar potensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Gambar 2.34 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2020 hingga 2024 di Jawa Barat. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, meskipun secara persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan perkotaan. Kondisi ini memberikan pesan bahwa kelompok penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami tekanan yang lebih berat akibat menurunnya atau bahkan hilangnya pendapatan imbas dari guncangan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut.

Gambar 2.34
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam skala provinsi pada Tabel 2.39, indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dialami Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) daerah tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.39
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	0,83	1,36	1,49	0,97	1,08
2	Sukabumi	0,80	1,04	0,93	1,01	0,88
3	Cianjur	1,38	1,83	1,35	1,29	1,58
4	Bandung	0,92	1,23	0,90	1,10	0,61
5	Garut	0,97	1,4	1,81	1,17	1,41
6	Tasikmalaya	0,83	1,57	1,42	1,61	1,01
7	Ciamis	0,92	0,88	1,07	0,90	0,99
8	Kuningan	2,41	2,02	2,14	1,87	2,02
9	Cirebon	1,30	1,94	2,27	1,98	1,69
10	Majalengka	1,41	2,44	1,55	1,34	1,76
11	Sumedang	1,72	1,72	1,98	1,64	1,6
12	Indramayu	2,18	2,46	1,72	2,20	2,05
13	Subang	1,29	1,93	1,55	1,90	1,63
14	Purwakarta	1,04	1,31	1,19	1,48	1,37
15	Karawang	1,28	1,27	1,58	1,06	1,18
16	Bekasi	0,72	0,91	0,74	0,82	0,7
17	Bandung Barat	1,40	1,62	1,70	1,54	1,17
18	Pangandaran	1,32	1,25	1,24	1,28	1,23
19	Kota Bogor	1,08	1,1	1,27	0,99	0,95
20	Kota Sukabumi	1,17	1,39	1,27	1,21	0,88
21	Kota Bandung	0,61	0,78	0,70	0,59	0,6
22	Kota Cirebon	1,68	2,22	1,34	1,29	1,18
23	Kota Bekasi	0,60	0,66	0,96	0,63	0,8
24	Kota Depok	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
25	Kota Cimahi	0,75	0,93	0,67	0,54	0,83
26	Kota Tasikmalaya	1,75	2,42	2,34	1,62	1,35
27	Kota Banjar	0,70	1,19	1,02	0,68	1,03
	Provinsi Jawa Barat	**1,13**	**1,47**	**1,24**	**1,16**	**1,05**

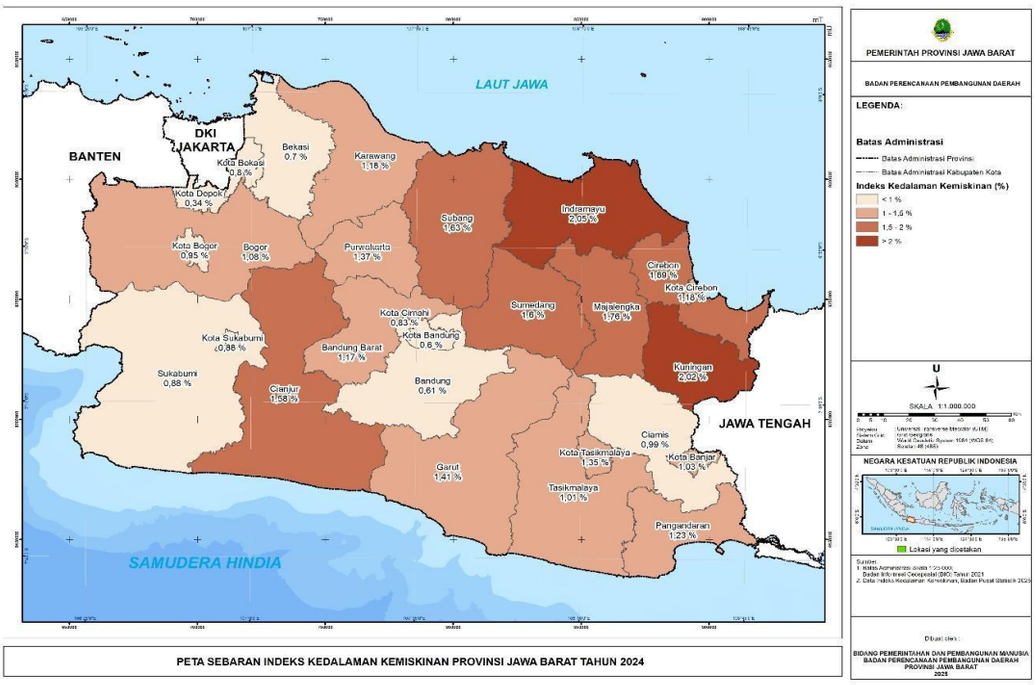
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Pada Gambar 2.31 memperlihatkan pola spasial indeks kedalaman kemiskinan Maret 2024. Pola tersebut memberikan gambaran skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Terdapat dua Kabupaten/kota (Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan) yang memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan lebih dari dua persen (2%) yang seharusnya menjadi lokus utama dan memerlukan upaya yang lebih keras untuk akselerasi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Penurunan indeks kedalaman

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

kemiskinan yang dimaknai dengan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, tentu saja akan memudahkan intervensi terhadap kelompok penduduk miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan (pengeluaran di atas garis kemiskinan) melalui konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.35
Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota
Maret 2024



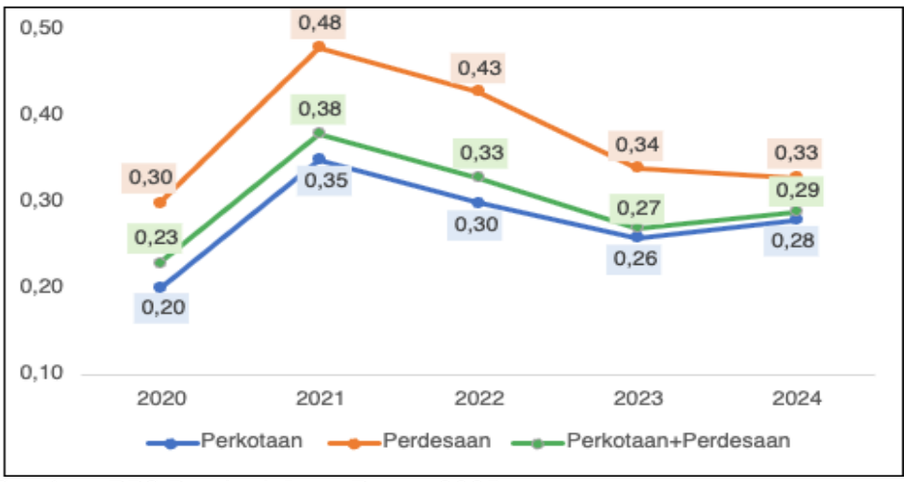
Sumber: Bappeda. 2025

Hasil Susenas September 2024, menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat mencapai 1,05 poin persen. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,11 poin persen dibandingkan P1 pada Maret 2023 yang mencapai 1,16 poin persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jika dilihat secara *year to year* (Maret 2023 –September 2024) kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Pada kurun waktu yang sama, P1 di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,14 poin persen dari sebelumnya Maret 2023 sebesar 1,10 poin persen menjadi 0,96 poin persen pada September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin persen dari sebelumnya Maret 2023 sebesar 1,40 poin persen menjadi 1,44 poin persen pada September 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun sebesar 0,03 poin persen dari sebelumnya 0,27 pada Maret 2023 menjadi 0,24 pada September 2024. Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan yang semakin menyempit selama periode waktu antara Maret 2023-September 2024. Pada kurun waktu yang sama, P2 di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,05 poin persen dari sebelumnya 0,26 poin persen pada Maret 2023 menjadi 0,21 poin persen pada September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin persen dari sebelumnya 0,34 poin persen pada Maret 2023 menjadi 0,36 poin persen pada September 2024.

Gambar 2.32
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Dalam skala provinsi, indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks keparahan kemiskinan tertinggi dialami Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka (lihat Tabel 2.40). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) kabupaten tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

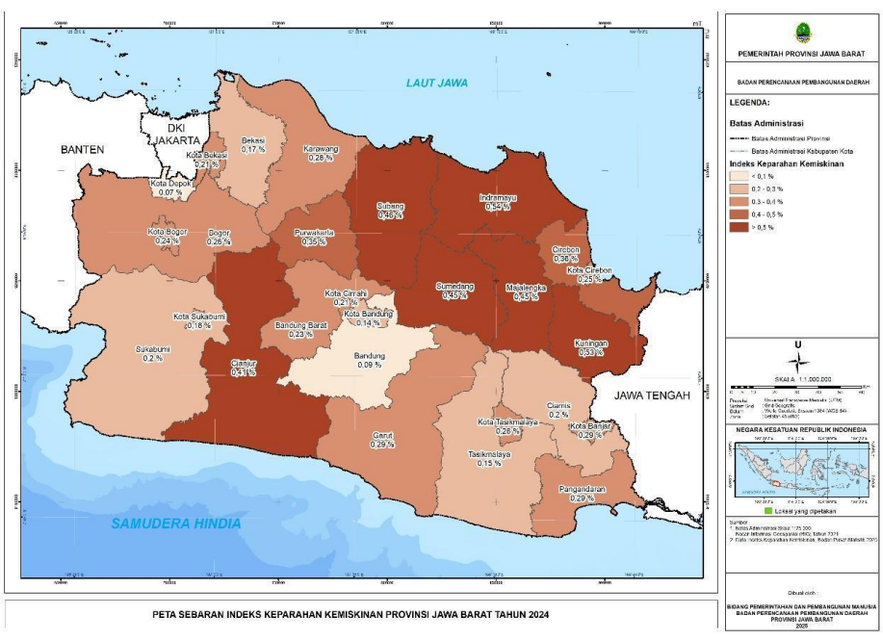
1D17AF9E85

Tabel 2.40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	0,11	0,35	0,45	0,21	0,26
2	Sukabumi	0,12	0,23	0,19	0,23	0,2
3	Cianjur	0,27	0,46	0,27	0,26	0,41
4	Bandung	0,17	0,34	0,21	0,29	0,09
5	Garut	0,15	0,29	0,45	0,23	0,29
6	Tasikmalaya	0,11	0,35	0,28	0,42	0,15
7	Ciamis	0,16	0,15	0,24	0,17	0,2
8	Kuningan	0,62	0,46	0,53	0,42	0,53
9	Cirebon	0,24	0,47	0,59	0,53	0,36
10	Majalengka	0,25	0,77	0,36	0,26	0,45
11	Sumedang	0,42	0,46	0,53	0,35	0,45
12	Indramayu	0,56	0,66	0,48	0,62	0,54
13	Subang	0,25	0,5	0,41	0,55	0,46
14	Purwakarta	0,20	0,3	0,25	0,36	0,35
15	Karawang	0,25	0,29	0,41	0,22	0,28
16	Bekasi	0,18	0,26	0,18	0,20	0,17
17	Bandung Barat	0,25	0,32	0,41	0,34	0,23
18	Pangandaran	0,28	0,27	0,26	0,27	0,29
19	Kota Bogor	0,26	0,27	0,29	0,20	0,24
20	Kota Sukabumi	0,22	0,36	0,38	0,31	0,18
21	Kota Bandung	0,13	0,24	0,17	0,15	0,14
22	Kota Cirebon	0,40	0,68	0,30	0,29	0,25
23	Kota Bekasi	0,15	0,16	0,27	0,13	0,21
24	Kota Depok	0,06	0,07	0,10	0,03	0,07
25	Kota Cimahi	0,18	0,21	0,14	0,10	0,21
26	Kota Tasikmalaya	0,39	0,69	0,65	0,32	0,26
27	Kota Banjar	0,12	0,28	0,28	0,12	0,29
	Provinsi Jawa Barat	**0,23**	**0,38**	**0,38**	**0,27**	**0,29**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.36
Pola Spasial Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota
Maret 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Profil kemiskinan di Jawa Barat sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran kondisi terkini. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 941,86 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 403,38 ribu jiwa pada tahun 2023. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 146,12 ribu jiwa pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 47,22 ribu jiwa pada tahun 2023. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terendah berada di Kota Bekasi dan Kota Depok dengan jumlah 0 ribu jiwa pada tahun 2023.

Tabel 2.41
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Bogor	107,25	146,12	47,22
2	Sukabumi	24,61	19,90	24,05
3	Cianjur	57,04	36,16	11,89
4	Bandung	66,96	56,43	46,81
5	Garut	30,32	82,17	9,55
6	Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12
7	Ciamis	5,51	17,90	1,32
8	Kuningan	24,03	31,89	15,7
9	Cirebon	64,44	81,89	36,64
10	Majalengka	43,84	24,13	10,64
11	Sumedang	31,71	36,82	6,37
12	Indramayu	75,82	53,05	38,55
13	Subang	57,51	35,44	34,61
14	Purwakarta	18,58	16,93	10,19
15	Karawang	28,22	64,02	17,89
16	Bekasi	56,00	25,82	19,82
17	Bandung Barat	28,25	33,59	15,04
18	Pangandaran	5,61	5,93	2,65
19	Kota Bogor	13,59	14,45	4,93
20	Kota Sukabumi	9,98	4,49	2,54
21	Kota Bandung	24,79	25,37	9,14
22	Kota Cirebon	13,06	5,32	1,09
23	Kota Bekasi	33,25	61,75	0
24	Kota Depok	9,44	17,57	0
25	Kota Cimahi	8,34	2,63	2,98
26	Kota Tasikmalaya	27,17	23,88	6,59
27	Kota Banjar	2,08	2,49	0,08
	Provinsi Jawa Barat	**895,64**	**941,86**	**403,38**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Pada Gambar 2.30 dan 2.31 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat dan Indonesia pada periode tahun sebelum pandemi dan di masa pandemi hingga tahun 2024. Namun selama 4 (empat) tahun terakhir sejak pandemi tahun 2020, selisih ini terus mengalami penurunan seiring dengan pengurangan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat maupun di nasional.

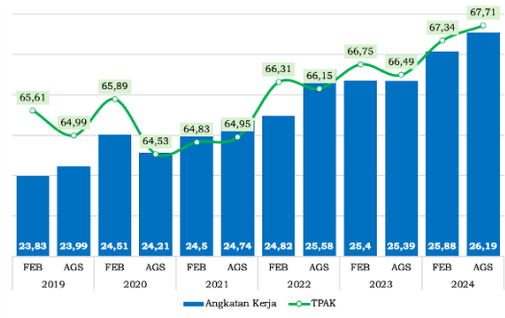
Pada Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat mencapai 38,67 juta jiwa, yang terdiri dari 26,19 juta jiwa angkatan kerja dan 12,48 juta jiwa bukan angkatan kerja. Kondisi kependudukan di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh usia muda dengan angka kelahiran yang cukup tinggi, sehingga seiring dengan bertambahnya usia muda maka akan bertambah pula penduduk dengan usia yang siap kerja.

Secara umum, angkatan kerja akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan usia kerja. Namun peningkatan angkatan kerja tersebut tidak selalu disertai dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Naik turunnya TPAK disebabkan oleh beberapa faktor musiman, salah satu diantaranya adalah faktor pendidikan, semakin mudah akses pelajar terhadap pendidikan maka akan TPAK akan menurun. Hal ini dikarenakan pelajar yang melanjutkan sekolah tidak akan tercatat sebagai angkatan kerja. Di samping itu, TPAK Perempuan akan terus meningkat dan perlu diproyeksikan terus meningkat untuk menciptakan pemerataan kesempatan bekerja.

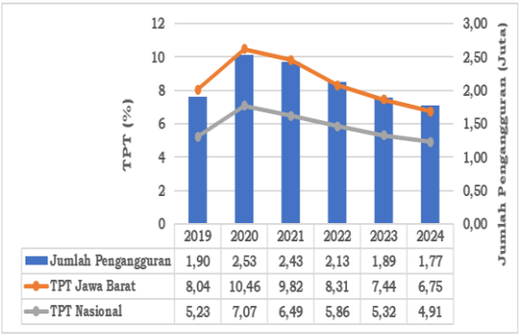
1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.37
Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Juta Jiwa dan Persen)



Gambar 2.38
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengangguran	1,90	2,53	2,43	2,13	1,89	1,77
TPT Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
TPT Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

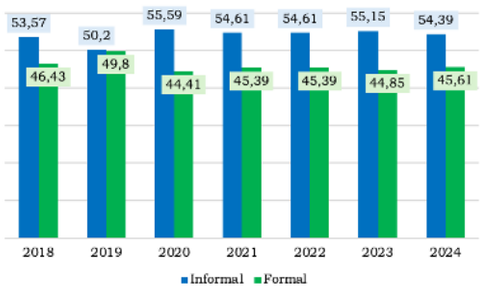
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, (diolah)

Peningkatan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, diiringi dengan peningkatan jumlah bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Provinsi Jawa Barat saat ini berada pada posisi kedua terbawah di Pulau Jawa berdasarkan TPT. Meskipun berada pada posisi bawah, TPT di Provinsi Jawa Barat terus mengalami perbaikan dari tahun 2021 bulan Agustus hingga tahun 2024 bulan Agustus. Penurunan TPT tersebut dipengaruhi oleh TPAK laki-laki sebanyak 84,51 persen dan TPAK Perempuan sebanyak 50,59 persen. Selain itu, sebaran TPT di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus tahun 2024 khususnya di kawasan perkotaan sebanyak 6,98 persen sedangkan di pedesaan sebanyak 5,84 persen.

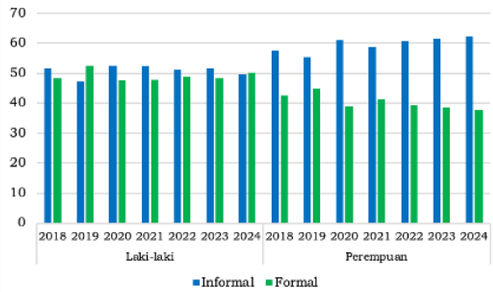
Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja dibedakan menjadi dua kategori: kegiatan formal dan informal. Kegiatan formal mencakup penduduk yang berusaha dengan bantuan buruh tetap/bayaran dan buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, kegiatan informal meliputi usaha sendiri, usaha dengan bantuan buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja lepas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Sebagian besar, pekerja di Provinsi Jawa Barat bekerja di sektor informal. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 proporsi pekerja laki-laki dominan bekerja di sektor formal. Sementara bagi pekerja perempuan sebagian besar bekerja pada sektor informal.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.39
Proporsi Pekerja Formal dan Informal (dalam persen)



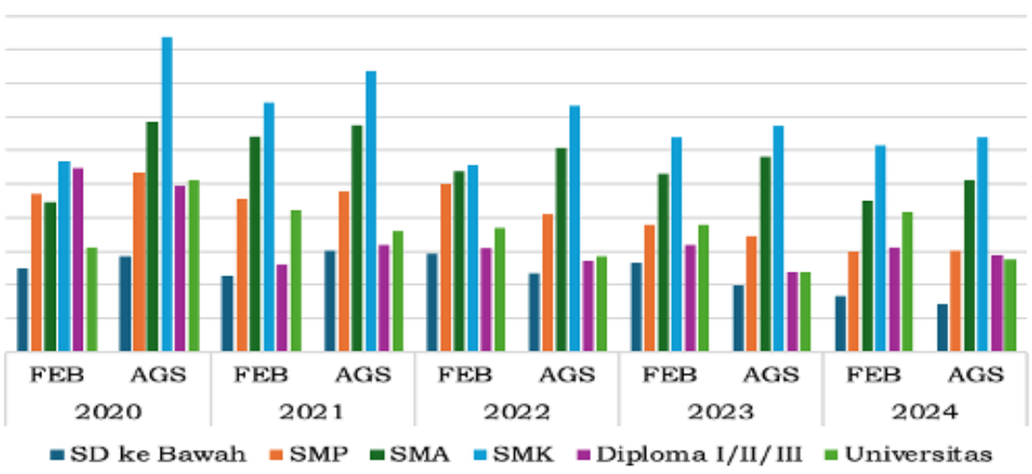
Gambar 2.40
Proporsi Pekerja Formal dan Informal berdasarkan Jenis Kelamin (dalam persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat saat ini, didominasi oleh angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMK terutama pada bulan Agustus yang menunjukkan bahwa pelajar SMK yang lulus tidak bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi pemicu tingginya TPT pada jenjang pendidikan SMK. Selain itu, tingginya TPT pada jenjang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya masalah ketidaksesuaian antara lulusan sekolah vokasi dengan kebutuhan sektor industri di Provinsi Jawa Barat. Sehingga diperlukan upaya yang lebih matang untuk meningkatkan peluang bagi lulusan pendidikan vokasi.

Gambar 2.41
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen)



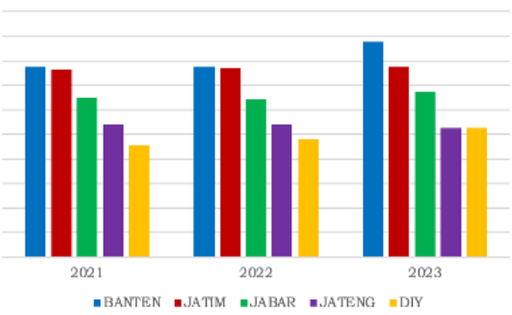
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

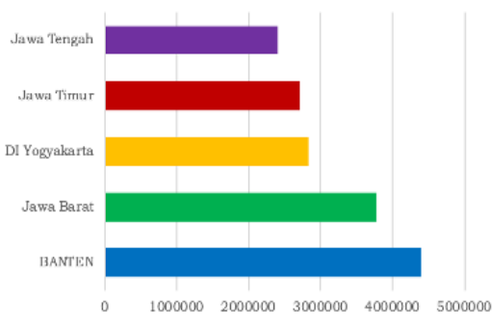
1D17AF9E85

Produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 masih berada di bawah Banten dan Jawa Timur yakni sebesar 67,65 Juta Rupiah per Jiwa. Selain itu, rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori tinggi. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara output dengan upah yang diberikan. Hal ini memicu terjadinya inefisiensi struktural yang mengakibatkan perusahaan mengalami tekanan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi tanpa output yang memadai dapat memicu inflasi, mengurangi minat investor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mendorong perusahaan untuk beralih ke otomatisasi atau melakukan pemutusan hubungan kerja guna mengurangi beban operasional yang akhirnya berisiko meningkatkan pengangguran. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah menurunnya daya beli, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas sosial yang mengarah pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

Gambar 2.42
Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa (dalam Rp. Juta per Jiwa)



Gambar 2.43
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (dalam rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah)

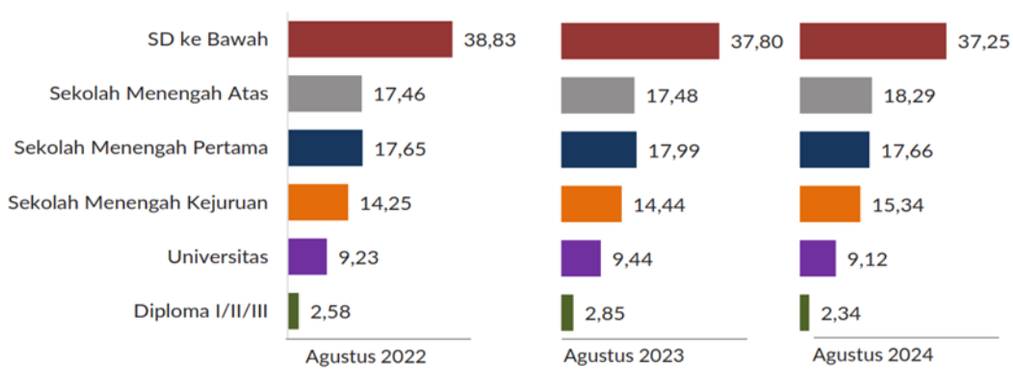
Kondisi lebih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dibandingkan nasional ini menandakan bahwa perbandingan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja di Jawa Barat masih lebih besar daripada daerah lain, sehingga angkatan kerja yang tersedia yang tidak terserap pasar kerja juga lebih besar dibanding daerah lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Berdasarkan status pekerjaan, lebih dari setengah dari total pekerja di Jawa Barat terlibat dalam kegiatan informal, 54,39 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi informal memainkan peran penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi penduduk Jawa Barat. Terdapat kenaikan jumlah pekerja baik di sektor formal maupun informal dari tahun sebelumnya, di mana kenaikan jumlah pekerja formal lebih besar (0,60 Juta orang) dibandingkan di sektor informal (0,32 juta orang).

Profil ketenagakerjaan berdasarkan pendidikan yang ditamatkan menunjukkan pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Jawa Barat masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 37,25 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 11,46 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023. Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, SMP, Universitas dan diploma mengalami penurunan persentase. Sementara untuk tamatan pendidikan SMA dan SMK mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi terdapat pada tamatan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni sebesar 0,90.

Gambar 2.44
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Baik pada skala regional Pulau Jawa maupun Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat ke depan. Dinamika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat berbeda dengan provinsi lain, jumlah penduduk yang banyak tentu saja mempengaruhi laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 2.42
Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Persen)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah Khusus Jakarta	10,95	8,5	7,18	6,53	6,21
Jawa Barat	**10,46**	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
DI Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Banten	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2024

Pada tahun 2024, tidak ada kabupaten/kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen). TPT tertinggi masih terjadi di Kota Cimahi yakni sebesar 8,97 persen, sedangkan TPT terendah masih terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,58 persen. Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami penurunan TPT pada tahun 2024 kecuali Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar yang mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2	Sukabumi	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
3	Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4	Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5	Garut	8,96	8,68	7,6	7,33	6,96
6	Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
7	Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
8	Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9	Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10	Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11	Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12	Indramayu	9,21	8,30	6,49	6,46	6,25
13	Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14	Purwakarta	11,07	10,70	8,75	7,72	7,34
15	Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16	Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82

1D17AF9E85

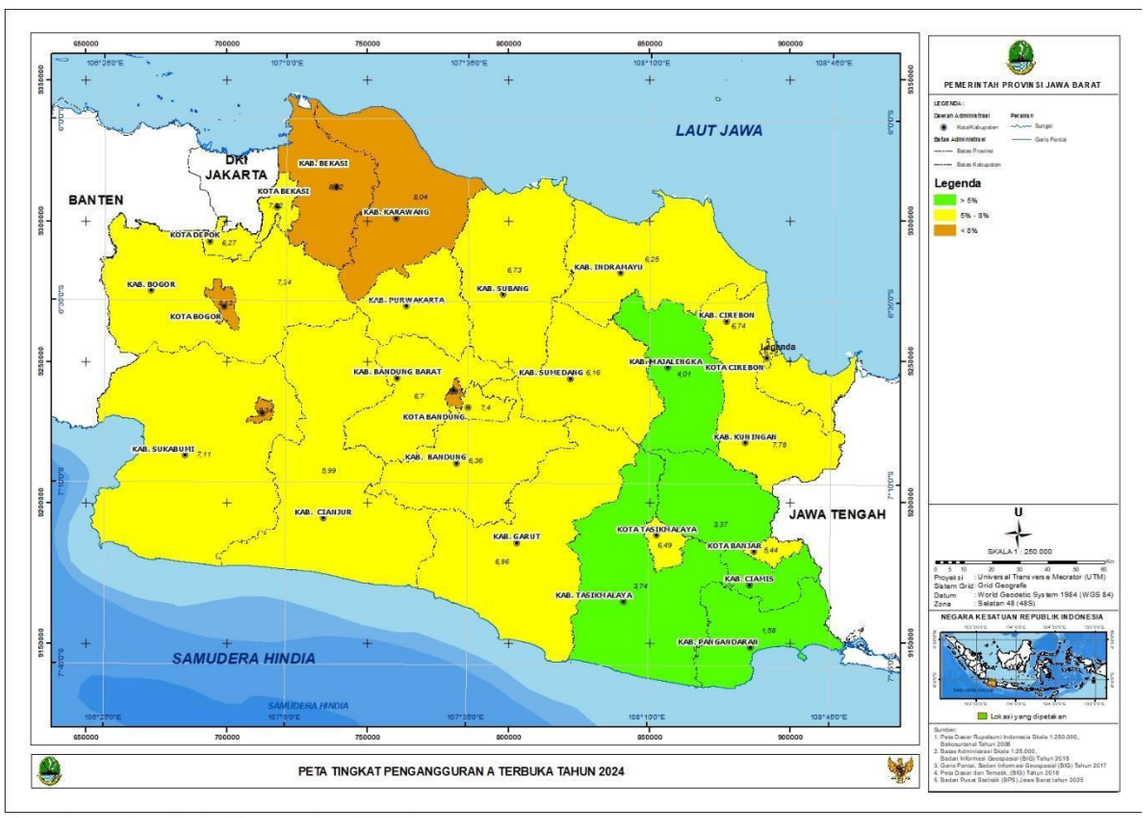
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
17	Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
18	Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
22	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,9	7,82
24	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25	Kota Cimahi	13,30	13,07	10,77	10,52	8,97
26	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
	Provinsi Jawa Barat	**10,46**	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pola spasial Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran tinggi umumnya memiliki basis ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan perdagangan (Gambar 2.38). Pada tahun 2024, terdapat 8 kabupaten/kota dengan TPT di atas 8 persen. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, di mana terdapat 9 kabupaten/kota dengan TPT yang melebihi 8 persen.

Gambar 2.45
Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)



Sumber: Analisis Bappeda. 2025

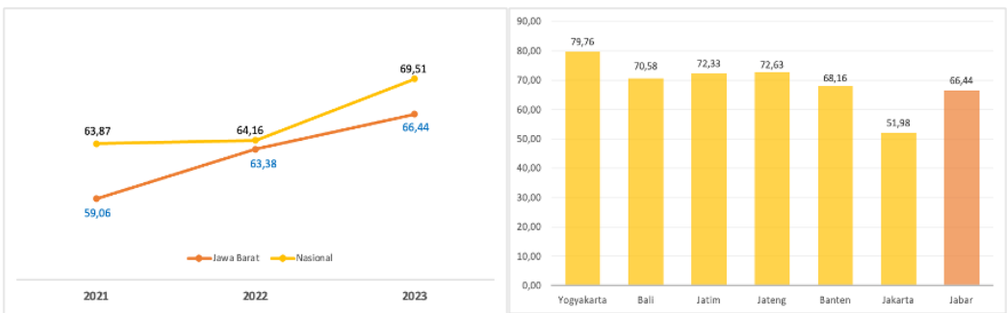
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

2.1.2.9 Keluarga Berkualitas, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Keluarga berkualitas menjadi fondasi utama dalam upaya membangun manusia menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui implementasi fungsi keluarga. hal ini berkaitan erat dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diharapkan memiliki keuletan dan ketangguhan, kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Keluarga berkualitas direfleksikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK terdiri dari 3 (tiga) dimensi pengukur meliputi ketahanan, kesejahteraan, dan partisipasi. Namun pada prosesnya, perhitungan dari IPKK ini mengalami penyesuaian sehingga terjadi perubahan pada *baseline* capaiannya.

Gambar 2.46
Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: BPS dan Bappenas RI, 2024 (diolah)

Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan dibawah capaian Provinsi lainnya. Masih rendahnya kualitas keluarga di Jawa Barat ini dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, resiliensi terhadap perubahan perubahan kondisi, serta peran dan kontribusi keluarga dalam menjalankan fungsinya.

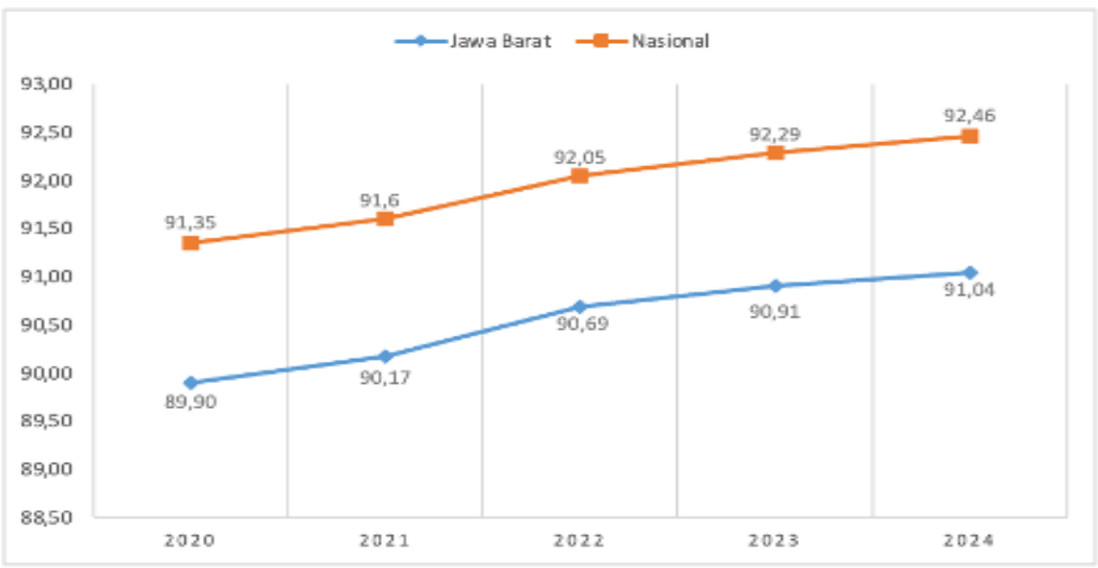
Gender didefinisikan sebagai konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

masyarakat. Implementasi dari perspektif ini yaitu kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama agar mampu berperan dan berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Salah satu indikator yang merefleksikan kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indikator ini digunakan untuk mengukur perbedaan pencapaian antara laki-laki dengan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Jika hasil perhitungan IPG semakin kecil jaraknya dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak antara angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.47
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024

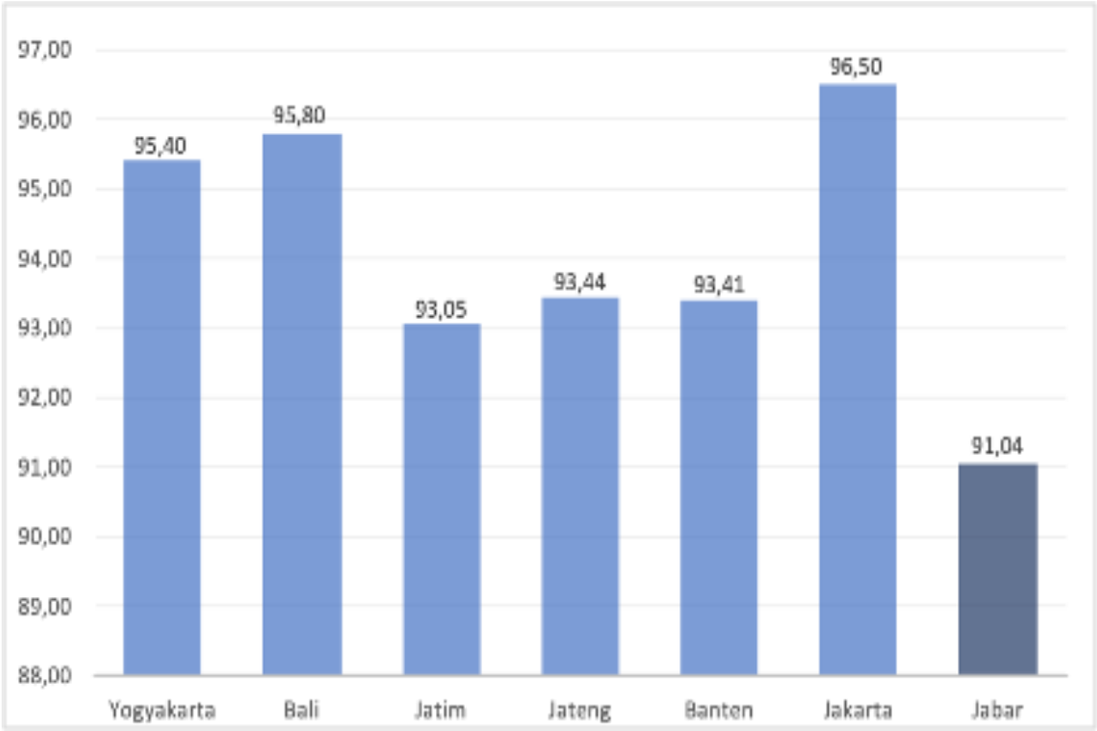


Sumber: Badan Pusat Statistik (menggunakan UHH SP2020 LF), 2025

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.48
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Jawa-Bali Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (menggunakan UHH SP2020 LF), 2025

Dilihat dari data di atas, capaian IPG Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung menurun dan capaiannya berada di bawah nasional. Capaian IPG Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menjadi capaian terendah jika dibandingkan dengan Provinsi di Jawa-Bali. Artinya pembangunan manusia di Jawa Barat belum mencapai kesetaraan, karena masih adanya gap antara pencapaian pembangunan perempuan dengan pencapaian pembangunan laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan manusia ke depan.

Sementara itu, capaian IPG di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan angka yang bervariasi. Perbedaan capaian IPG menandakan adanya disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan antar kabupaten/kota. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota dengan capaian IPG di bawah provinsi. Capaian IPG dengan posisi 3 (tiga) kabupaten/Kota terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Sementara itu, 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPG tertinggi yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, dan Kota

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia masih menjadi tantangan di Jawa Barat.

Tabel 2.44
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Bogor	90,70	90,93	90,98
Sukabumi	88,29	89,02	89,38
Cianjur	85,56	85,88	86,22
Bandung	94,71	94,80	95,10
Garut	83,37	84,05	84,24
Tasikmalaya	87,01	87,47	87,64
Ciamis	87,86	88,01	88,29
Kuningan	87,65	87,79	88,00
Cirebon	84,69	84,96	85,43
Majalengka	87,39	87,84	87,98
Sumedang	95,99	96,13	96,22
Indramayu	88,89	89,51	89,78
Subang	91,74	91,92	92,11
Purwakarta	87,63	87,80	87,96
Karawang	91,32	91,85	91,98
Bekasi	90,30	90,06	90,18
Bandung Barat	80,41	80,96	81,59
Pangandaran	91,01	90,83	91,22
Kota Bogor	91,98	92,19	92,34
Kota Sukabumi	92,67	93,04	93,24
Kota Bandung	95,39	95,24	95,38
Kota Cirebon	95,87	96,37	96,59
Kota Bekasi	94,15	94,28	94,28
Kota Depok	93,92	94,03	94,26
Kota Cimahi	92,51	92,54	92,78
Kota Tasikmalaya	92,79	92,96	92,98
Kota Banjar	88,39	88,62	88,93
Provinsi Jawa Barat	**90,69**	**90,91**	**91,04**

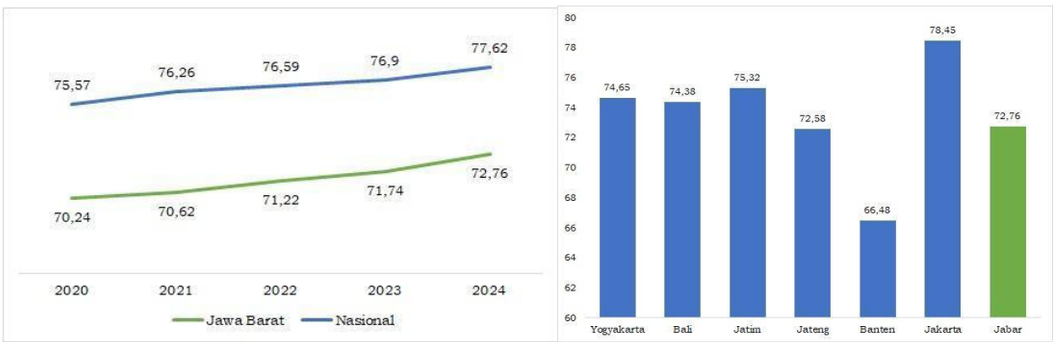
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (menggunakan UHH SP2020 LF), 2025

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Gambar 2.43 memperlihatkan bahwa selama tahun 2020-2024, IDG Jawa Barat masih berada di bawah IDG nasional. Namun demikian, angka IDG menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan IDG ini dipengaruhi oleh meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

keterlibatan di parlemen, yang disertai dengan kondisi cukup baik dalam hal sumbangan pendapatan perempuan.

Gambar 2.49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan, capaian IDG kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih rendah. Pada tahun 2024, terdapat 16 (enam belas) kabupaten/kota dengan IDG lebih rendah dibandingkan provinsi. Hal ini menandakan peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik masih rendah. Idealnya peningkatan IPG disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender (IDG). Dalam periode 2022-2024, IDG di 27 kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang positif ditandai dengan meningkatnya capaian IDG di semua kabupaten/kota.

Tabel 2.45
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Bogor	55,07	55,76	56,99
Sukabumi	61,52	62,28	65,00
Cianjur	59,74	60,30	63,11
Bandung	69,26	70,19	71,17
Garut	73,74	72,08	76,05
Tasikmalaya	65,40	61,52	60,82
Ciamis	65,79	65,41	66,07
Kuningan	73,67	73,47	78,86
Cirebon	73,15	74,33	75,09
Majalengka	59,82	57.91	62,81
Sumedang	72,23	72.60	76,99
Indramayu	68,62	71.84	68,95
Subang	73,14	71.61	71,76
Purwakarta	76,80	77.15	76,22
Karawang	73,28	70.65	65,80

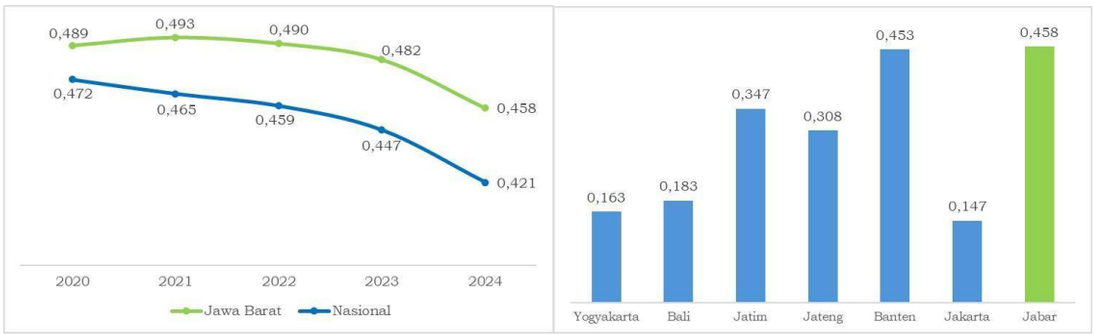
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Bekasi	63,62	65.16	66,49
Bandung Barat	65,32	66.97	74,23
Pangandaran	76,09	76.53	73,89
Kota Bogor	72,56	71.13	75,60
Kota Sukabumi	66,24	69.12	69,05
Kota Bandung	72,36	73.01	70,95
Kota Cirebon	78,07	77.03	81,14
Kota Bekasi	68,30	67.74	70,49
Kota Depok	77,94	76.82	75,62
Kota Cimahi	74,26	75.62	76,26
Kota Tasikmalaya	59,99	59.81	69,84
Kota Banjar	55,08	55.58	62,66
Provinsi Jawa Barat	**71,22**	**71,74**	**72,76**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Namun seiring dengan pergeseran perhitungan IDG yang sebelumnya mengacu pada indikator internasional yaitu *Gender Empowerment Measure* (GEM), menjadi *Gender Inequality Index* (GII), yang menyebabkan adanya penyesuaian pada dimensi perhitungannya. Sehingga terjadi perubahan indikator IDG menjadi Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG ini digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Hasil perhitungan IKG antara 0 – 1 poin, semakin rendah nilai IKG dan mendekati angka 0 maka menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah dan kesetaraan gender yang semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai IKG semakin mendekati angka 1 maka menunjukkan ketimpangan gender yang semakin tinggi dan kesetaraan gender yang semakin rendah.

Gambar 2.50
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, diolah, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Dilihat dari data di atas, capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang cenderung menurun dari Tahun 2020-2024, sehingga dibutuhkan adanya perbaikan dari berbagai dimensi pengukurnya meliputi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Namun apabila disandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain, capaian Provinsi Jawa Barat masih relatif lebih tinggi.

Sementara itu, capaian IKG tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) kabupaten/kota dengan IKG lebih rendah dibandingkan provinsi, sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya memiliki IKG lebih tinggi dibandingkan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan gender di kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang positif dan lebih baik dibandingkan dengan provinsi.

Tabel 2.46
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Bogor	0,588	0,582	0,577
Sukabumi	0,535	0,559	0,533
Cianjur	0,565	0,567	0,544
Bandung	0,522	0,472	0,387
Garut	0,551	0,555	0,533
Tasikmalaya	0,554	0,565	0,559
Ciamis	0,510	0,445	0,439
Kuningan	0,370	0,368	0,415
Cirebon	0,476	0,393	0,385
Majalengka	0,493	0,459	0,437
Sumedang	0,484	0,438	0,217
Indramayu	0,411	0,400	0,349
Subang	0,517	0,511	0,432
Purwakarta	0,532	0,549	0,548
Karawang	0,485	0,498	0,478
Bekasi	0,394	0,443	0,348
Bandung Barat	0,564	0,564	0,520
Pangandaran	0,463	0,416	0,415
Kota Bogor	0,434	0,343	0,376
Kota Sukabumi	0,343	0,221	0,359
Kota Bandung	0,360	0,275	0,244
Kota Cirebon	0,282	0,409	0,383
Kota Bekasi	0,334	0,253	0,273
Kota Depok	0,160	0,152	0,165

1D17AF9E85

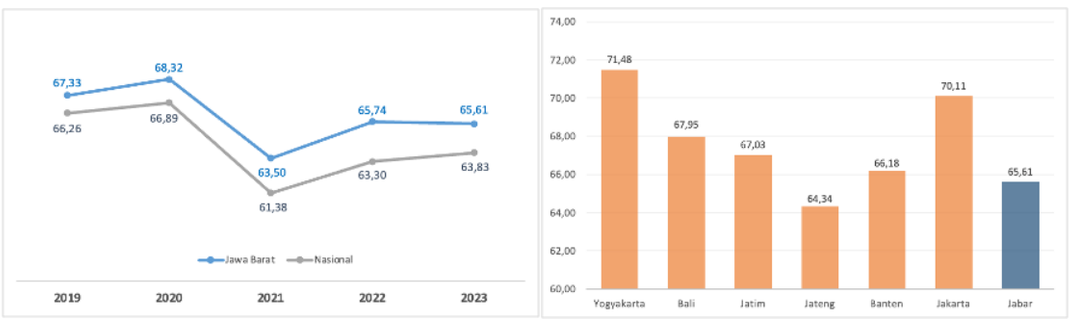
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Kota Cimahi	0,381	0,276	0,162
Kota Tasikmalaya	0,482	0,390	0,354
Kota Banjar	0,296	0,288	0,239
Provinsi Jawa Barat	**0,490**	**0,482**	**0,458**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Di sisi lain, pembangunan manusia tersebut tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam upaya perwujudan generasi yang unggul untuk Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya dalam memastikan kualitas pembangunan bagi anak-anak adalah dengan memenuhi hak dan memberikan perlindungan yang direfleksikan dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indikator ini terdiri dari 2 (dua) indikator komposit yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) meliputi 4 (empat) klaster pengukurnya yaitu: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) meliputi 1 (satu) klaster yaitu perlindungan khusus. Secara keseluruhan, perhitungan IPA ini dilakukan berdasarkan 27 indikator komponen dari seluruh klaster pembangun IPA.

Gambar 2.51
Capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Kemenpppa RI, 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 cenderung dinamis. Meskipun sudah mampu melampaui capaian nasional, namun capaian IPA Provinsi Jawa Barat tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

serta belum mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan capaian tertingginya di tahun 2020. Secara posisi di nasional, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-7 untuk capaian IPA tertinggi di Indonesia tahun 2023, posisi ini turun dari tahun sebelumnya yang berhasil berada di peringkat ke-4.

Apabila dilihat dari indikator komposit IPA, capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 62,02, menurun dari capaian sebelumnya yaitu 62,04. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada klaster hak sipil dan kebebasan, serta adanya 2 (dua) klaster yang masih rendah yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga klaster-klaster ini yang membutuhkan perhatian lebih ke depannya.

Kondisi serupa ditunjukkan oleh capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 80,13 menjadi 79,96 di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan dari klaster perlindungan anak, yang dapat dipengaruhi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta banyaknya anak yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat. Meski demikian, capaian Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai 100 persen dengan berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, dari aspek daerah ramah anak dapat dilihat dengan persentase kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat dalam KLA yang berhasil mencapai 100 persen, sehingga Jawa Barat telah berhasil mencapai Provinsi Layak Anak (Provila). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian predikat ini belum berjalan beriringan dengan capaian IPA di daerah.

Masa anak-anak mencakup usia 0-18 tahun. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal agar lebih siap transisi menuju fase pemuda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun yang sedang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya terintegrasi yang dilakukan menuju perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi prasyarat utama dalam pembangunan Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah tersebut.

Untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik efektif dalam menggerakkan roda pembangunan, penyelenggaraannya harus dipastikan memiliki dampak dalam mengubah kondisi masyarakat. Maka pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 2 (dua) fokus yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Fokus pertama adalah pada percepatan terwujudnya birokrasi digital. Adapun fokus kedua adalah dampak reformasi birokrasi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu yang terbaik. Hal ini diperlihatkan dari Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sebesar 99,01 poin. Nilai ini termasuk ke dalam rentang kategori A dengan predikat 'Memuaskan' yang berarti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi 100 persen kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berAKHLAK namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

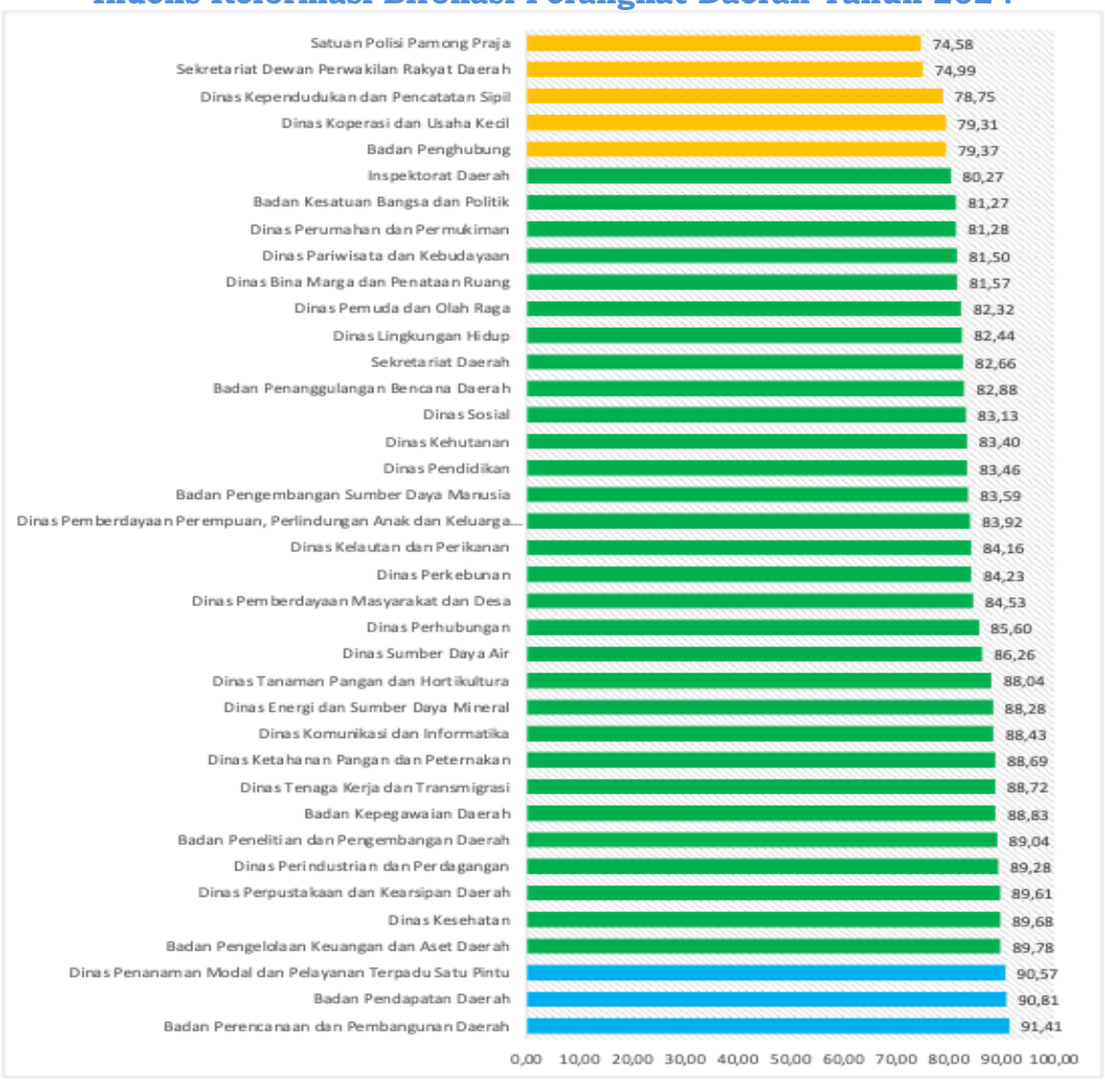
Tabel 2.47
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2024

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	80.7	93.08	99,01
		(A)	(A)	(A)

Sumber: Kemenpan RB, 2025

Penyelenggaraan reformasi birokrasi yang memuaskan juga terjadi pada sebagian perangkat daerah. Sebanyak 13,16 persen perangkat daerah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dalam rentang 70-80 poin atau pada kategori BB. 78,95 persen Perangkat daerah lainnya memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dalam rentang 80-90 poin atau pada kategori A, dan 3 perangkat daerah atau 7,89 persen memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dalam rentang 90-100 poin dalam kategori AA dengan predikat 'Sangat Memuaskan'.

Gambar 2.52
Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah Tahun 2024

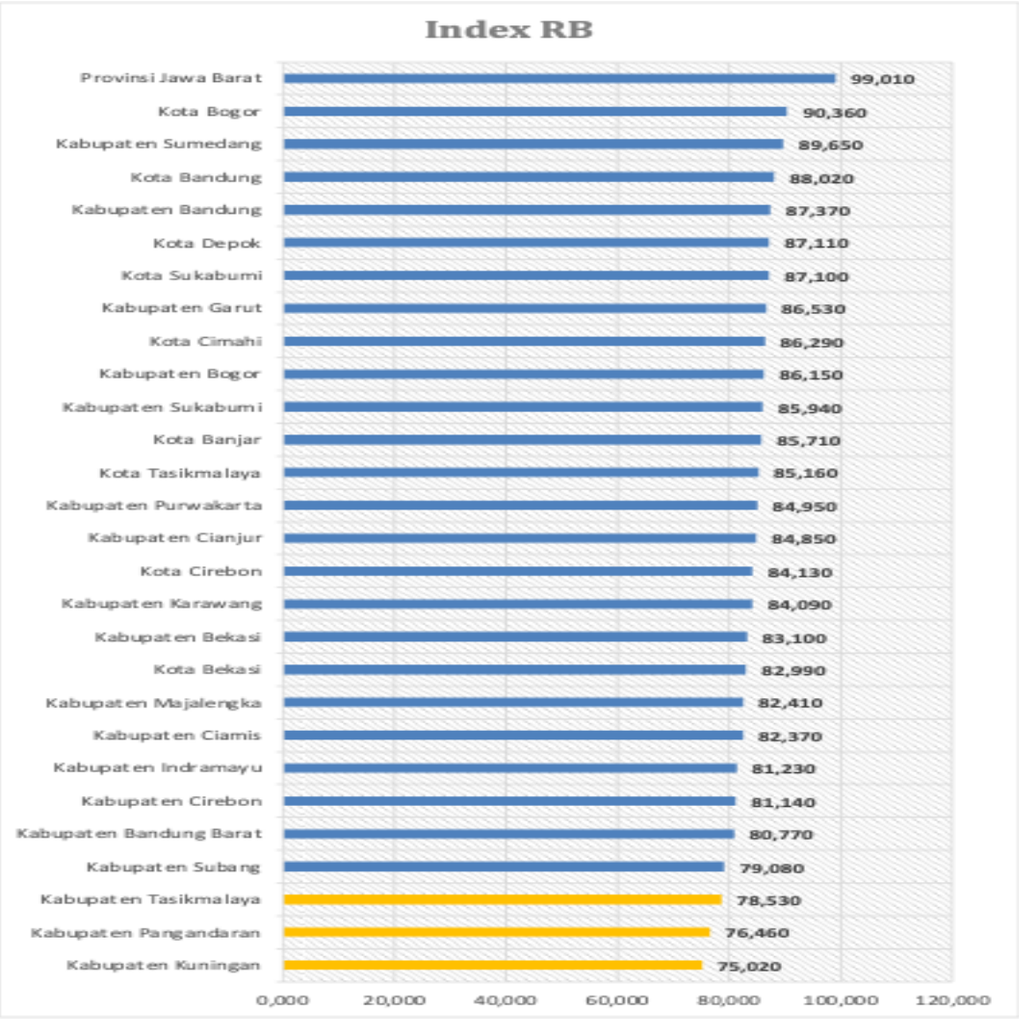


Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Penyelenggaraan reformasi birokrasi yang memuaskan pun terjadi pada level pemerintah daerah kabupaten dan kota meskipun baru pada sebagian kabupaten/kota. Sebanyak 88,89 persen memperoleh predikat 'Memuaskan' dengan rentang nilai 80-100 poin dari hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi tahun 2024. Kemudian sebanyak 11,11 persen memperoleh predikat 'Sangat Baik' dengan rentang nilai 70-80 poin atau dalam kategori 'BB'. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada dalam kategori ini telah memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berAKHLAK belum optimal sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Gambar 2.53
Perkembangan IRB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2020- 2023



Sumber: https://surabi.jabarprov.go.id/ , 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

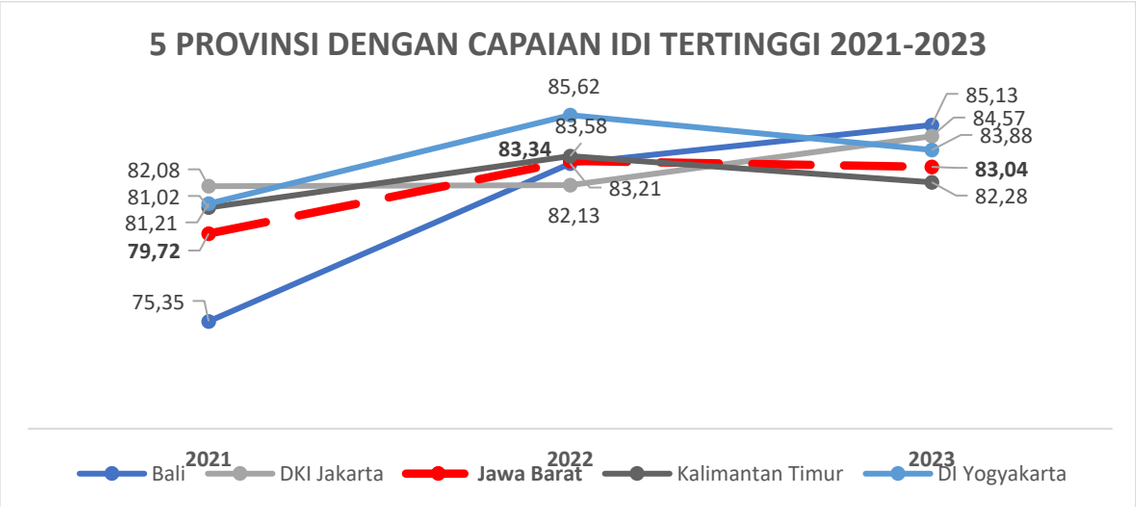
1D17AF9E85

2.1.3.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah, masyarakat, dan seluruh *stakeholder* terkait pada suatu wilayah. Selama ini, IDI telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki indikator komposit yang dibangun dari 3 (tiga) aspek yang terdiri dari 22 indikator. Pada tahun 2021 telah dilakukan finalisasi indikator revisi dan metode pengukuran yang menjadi 3 (tiga) aspek dan 22 indikator demokrasi. Ringkasan indikator metode baru tersebut meliputi : 1) Aspek Kebebasan terdapat 7 (tujuh) Indikator; 2) Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator; dan 3) Aspek Lembaga Demokrasi terdapat 8 (delapan) indikator.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat bersama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Koordinasi terkait pencapaian target IDI di Jawa Barat mencakup 3 (tiga) indikator yaitu Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD; Jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah perda yang dihasilkan; dan Jumlah rekomendasi DPRD kepada Eksekutif.

Gambar 2.54
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2023



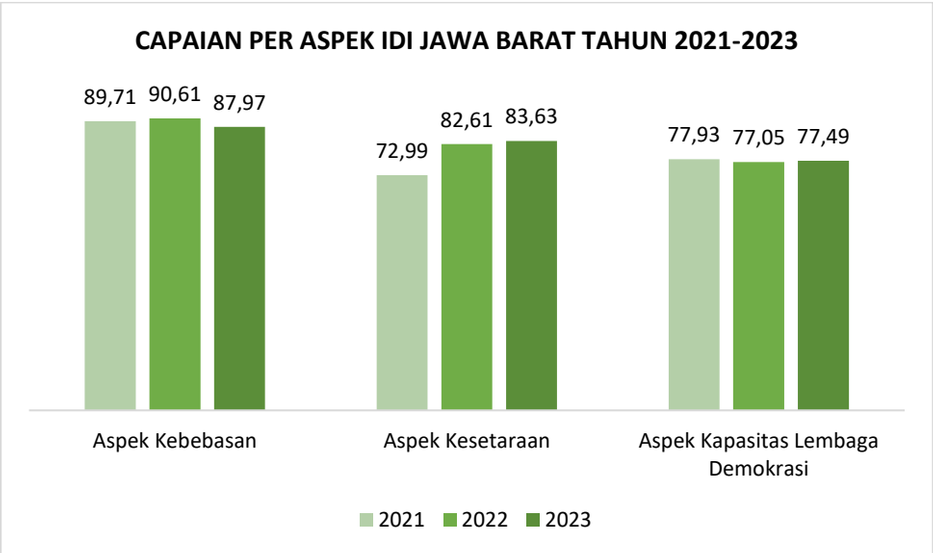
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat diolah, Tahun 2024
*) Tahun 2020 masih menggunakan metode lama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, IDI Jawa Barat tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari tahun 2022. Penurunan Capaian IDI ini, tidak dialami oleh Provinsi Jawa Barat saja, namun secara capaian IDI Nasional serta beberapa provinsi lainnya juga mengalami penurunan. Secara nasional, IDI Jawa Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula berada peringkat 5 naik menjadi urutan ke-4. Secara kategori IDI Jawa Barat tahun 2023 termasuk kategori kinerja demokrasi tinggi.

Gambar 2.55
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Per Aspek
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat diolah, Tahun 2024
*) Tahun 2020 masih menggunakan metode lama

Secara Keseluruhan, Capaian IDI Provinsi Jawa Barat 2023 paling rendah disumbang dari Aspek kebebasan dan paling rendah dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Dari tiga aspek IDI, hanya Aspek Kebebasan yang mengalami penurunan pada 2023 sebesar 2,64 poin dibandingkan 2022. Penurunan Aspek Kebebasan ditopang oleh menurunnya 1) Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara turun 3,26 poin 2) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat turun 2,72 poin 3) Terjaminnya kebebasan berkeyakinan turun 11,79 poin. Selanjutnya, secara keseluruhan indikator pada Aspek Kesetaraan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, namun Indikator Anti Monopoli Sumber

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Daya Ekonomi mengalami penurunan sebesar 2,50 poin. Selanjutnya pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi secara keseluruhan indikator mengalami peningkatan, kecuali indikator 1) Indikator Kinerja Lembaga Legislatif turun 7,69 poin 2) Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu turun 3,57 poin 3) Indikator Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik turun 1,80 poin.

2.1.3.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia dan Provinsi, dengan tiga dimensi utama yang ditekankan, yaitu toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama.

Tabel 2.48
Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	poin	72,21	74,10	76,47

Sumber: Kementerian Agama RI, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat semakin baik dibanding tahun sebelumnya dan termasuk ke dalam kategori Tinggi dalam hal kerukunan umat beragama. Tingginya kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat dorong oleh meningkatnya toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama di Provinsi Jawa Barat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian tersebut antara lain Rapat Koordinasi FKUB se-Jawa Barat, silaturahmi pengurus FKUB Provinsi Jawa Barat, dan Penyelarasan Kemah Harmoni Beragama.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.3.4 Layanan Urusan Wajib

2.1.3.4.1 Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat kecamatan. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 127 kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan negeri jenjang SMA/SMK (Tabel 2.49), dan 14 kecamatan di antaranya bahkan sama sekali tidak memiliki sekolah menengah, baik negeri maupun swasta (

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.50Tabel 2.49). Ketimpangan ini menghambat akses peserta didik, meningkatkan risiko putus sekolah, serta memperbesar beban biaya pendidikan akibat jauhnya jarak tempuh. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi strategis melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Tabel 2.49
Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1	Kabupaten Bandung	8
2	Kabupaten Ciamis	9
3	Kabupaten Cianjur	2
4	Kabupaten Cirebon	13
5	Kabupaten Garut	9
6	Kabupaten Indramayu	4
7	Kabupaten Karawang	1
8	Kabupaten Kuningan	13
9	Kabupaten Majalengka	5
10	Kabupaten Pangandaran	1
11	Kabupaten Purwakarta	1
12	Kabupaten Subang	5
13	Kabupaten Sukabumi	15
14	Kabupaten Sumedang	11
15	Kabupaten Tasikmalaya	14
16	Kota Bandung	11
17	Kota Cirebon	1
18	Kota Sukabumi	2
19	Kota Tasikmalaya	2
Total		**127**

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id, 2024

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.50
Daftar Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMA Negeri dan Swasta

No	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Kec. Banjaranyar	Kabupaten Ciamis
2	Kec. Sukamantri	
3	Kec. Tambaksari	
4	Kec. Cisarua	Kabupaten Sumedang
5	Kec. Cisitu	
6	Kec. Ganeas	
7	Kec. Jatigede	
8	Kec. Cibeureum	Kabupaten Kuningan
9	Kec. Cilebak	
10	Kec. Cimahi	
11	Kec. Hantara	
12	Kec. Kalimanggis	
13	Kec. Karangkancana	
14	Kec. Nusaherang	

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id, 2024

Kabupaten Kuningan merupakan daerah dengan jumlah kecamatan terbanyak yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) baik negeri maupun swasta, yaitu sebanyak 7 kecamatan. Kabupaten Ciamis menyusul dengan 3 kecamatan, sedangkan Kabupaten Sumedang terdapat 4 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi layanan pendidikan menengah yang masih cukup nyata di beberapa wilayah, sehingga memerlukan prioritas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan.

Sementara itu, beberapa indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, di antaranya: APK SMA/SMK/MA, APM SMA/SMK/MA, APM SMA, SMK dan SLB, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Atas, serta Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Data Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	Persen	83,58	69,63	72,31	72,64
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	Persen	94,82	96,10	98,82	97,41
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	67,80	68,66	68,58	71,15
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	18	20	19	20
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	SMA: 0,16 SMK: 0,15	SMA: 0,09 SMK: 0,14	SMA: 0,06 SMK: 0,12	SMA: 0,03 SMK: 0,07
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	SMA: 99,96 SMK: 99,89	SMA: 99,98 SMK: 99,92	SMA: 99,94 SMK: 99,86	SMA: 99,97 SMK: 99,90
Kualifikasi S2 Guru SMA	Persen	13,52	15,14	11,82	11,67
Kualifikasi S2 Guru SMK	Persen	8,76	7,73	6,77	6,51
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Poin	3,61	4,47	4,64	4,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023 & 2024
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun, 2024

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan pendidikan dari Tahun 2021-2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan angka capaian. Pada indikator Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, capaian indikator Angka Putus Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mengalami penurunan, yang menunjukkan kondisi yang baik dimana semakin banyak peserta didik yang menyelesaikan jenjang pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA). Hal ini disebabkan oleh berbagai program bantuan yang diberikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, baik negeri maupun swasta, serta bantuan lainnya yang dikhususkan bagi keluarga tidak mampu.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.3.4.2 Kesehatan

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu berdaya saing, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya-upaya pemenuhan kesehatan. Dilihat dari capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menggambarkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat namun peningkatan tersebut belum cukup untuk menggambarkan peningkatan kesehatan masyarakat baik dari segi pemerataan layanan kesehatan sampai dengan penerapan perilaku hidup bersih sehat di masyarakat. Adapun Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,80	75,14
Prevalensi *Stunting*	Persen	20,20	21,7	15,9
Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	3,54	6,40	7,28
Angka Kematian Ibu	Per 100,000 KH	83,57	96,89	98,40
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	94,97	94,40	91,34
Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	61,79	63,33	70
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100
Persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	N/A	60,2
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Persen	45,5	1018	Data menjadi indikator di bawahnya
Persentase Kab/Kota yang Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Persen	N/A	N/A	72,84
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	84,96	95,67	96,95
Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	Persen	95,34	93,87	99,10
Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	Persen	90,36	95,13	97,47

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
menuju *Universal Health Coverage* (UHC)				
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*	Persen	80,3	83,72	82
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	Persen	95,6	85,1	97,86
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI (*Universal Child Immunitation*) >90%	Persen	86,4	82,05	77,47
Prevalensi Hipertensi	Persen	39,60	30,8	Diganti dengan indikator di bawahnya
Prestasi Kab/Kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Persen	N/A	N/A	86,79
Jumlah Warga Negara yang terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan*	Orang	135,611 (sementara)	100% terlayani (680 Jiwa)	148.661
Jumlah Warga Negara pada Kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan*	Orang	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2023
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah
Keterangan : * Indikator baru digunakan tahun 2021 (Perubahan RPJMD 2018-2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, masih terdapat beberapa masalah kesehatan yang harus diselesaikan, dalam menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, Kementerian Kesehatan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan siklus hidup. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui kolaborasi dan kemitraan. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penguatan kapasitas sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan sesuai dengan standar. Selain meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

perlu menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat baik dari sisi kepesertaan juga keaktifan agar dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Permasalahan gizi kurang di masyarakat masih menjadi perhatian dan prioritas pada tahun 2026 walaupun dilihat dari capaian prevalensi stunting Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 15,9 persen dimana capaian tersebut sudah di bawah capaian nasional, namun jika dibandingkan dengan dilihat dari target prevalensi stunting Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 15,52 persen, masih belum mencapai target. Di samping itu, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya karena berpengaruh kepada capaian derajat kesehatan masyarakat. Saat ini kasus penyakit menular di antaranya kasus tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS Jawa Barat yang masih terus bertambah setiap tahunnya dan terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2024, kasus TB di Jawa Barat mencapai 229.683 meningkat 17.724 kasus dari total tahun 2023 sebanyak 211.959 sedangkan untuk kasus HIV/AIDS pada tahun 2024 sebanyak 13.406 terdiri dari 10.638 kasus HIV dan 2.768 kasus AIDS meningkat 1.974 kasus dari angka 11.432 kasus pada tahun 2023.

Penyakit tidak menular juga menjadi penyebab kematian di Jawa Barat yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun seperti diabetes melitus, Cirrhosis, kanker paru-paru, serta penyakit jantung hipertensif. Hal ini terjadi karena bergesernya perilaku hidup masyarakat dan pergeseran struktur masyarakat seperti pertambahan penduduk usia tua. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular dilaksanakan skrining kesehatan kepada masyarakat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas presiden atau yang dikenal dengan program hasil terbaik cepat (PHTC).

2.1.3.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain kemantapan jalan yang semakin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

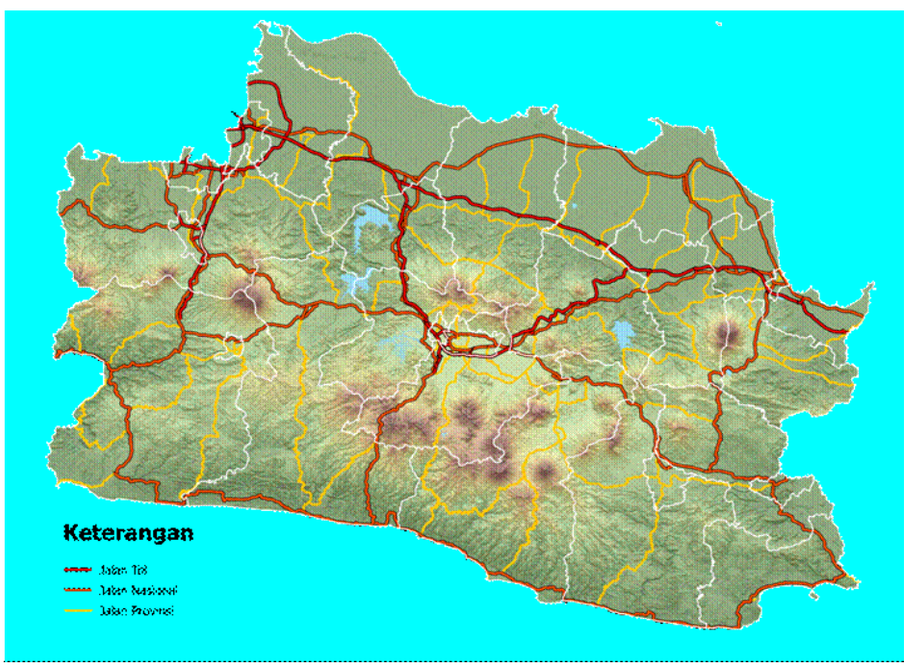
1D17AF9E85

meningkat, kondisi jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik, cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman, dan lain-lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar.

Sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 Tanggal 2 Desember 2022, panjang jaringan jalan nasional di wilayah Provinsi Jawa barat adalah 1.782,65 km dengan tingkat kemantapan jalan 98,47% pada tahun 2024. Selain itu, di wilayah Provinsi Jawa Barat juga terdapat sejumlah 21 ruas jalan tol yang beroperasi hingga tahun 2025 dengan total Panjang 664,89 km.

Sementara itu, panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.884 /DBMTR/2022 adalah 2362.183 km dengan tingkat kemantapan jalan 86,44% pada tahun 2024. Jaringan jalan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat panjangnya mencapai 25.244 km dengan tingkat kemantapan 83,48% pada tahun 2024.

Gambar 2.56
Peta Jaringan Jalan Eksisting di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Penyajian Bappeda, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Dari sudut pandang wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Beberapa kota mencatatkan capaian kemantapan jalan yang sangat baik, seperti Kota Cimahi dengan tingkat kemantapan mencapai 99,22 persen, diikuti oleh Kota Bandung (97,48 persen), Kota Cirebon (97,21 persen), Kota Tasikmalaya (97,18 persen), dan Kota Bekasi (97,11 persen).

Sementara itu, wilayah kabupaten memperlihatkan capaian yang lebih bervariasi, bahkan cenderung lebih rendah. Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah dengan kemantapan jalan terendah, yaitu hanya 62,11 persen, meskipun memiliki total panjang jalan yang paling besar mencapai lebih dari 4.600 km. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, yang memiliki kemantapan hanya 69,73 persen, serta diikuti oleh Kabupaten Pangandaran (76,43 persen) dan Kabupaten Ciamis (76,73 persen). Ketimpangan ini mengindikasikan masih perlunya intervensi penanganan jalan secara lebih merata, khususnya di wilayah selatan.

Tabel 2.53
Tingkat Kemantapan Rata-Rata Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

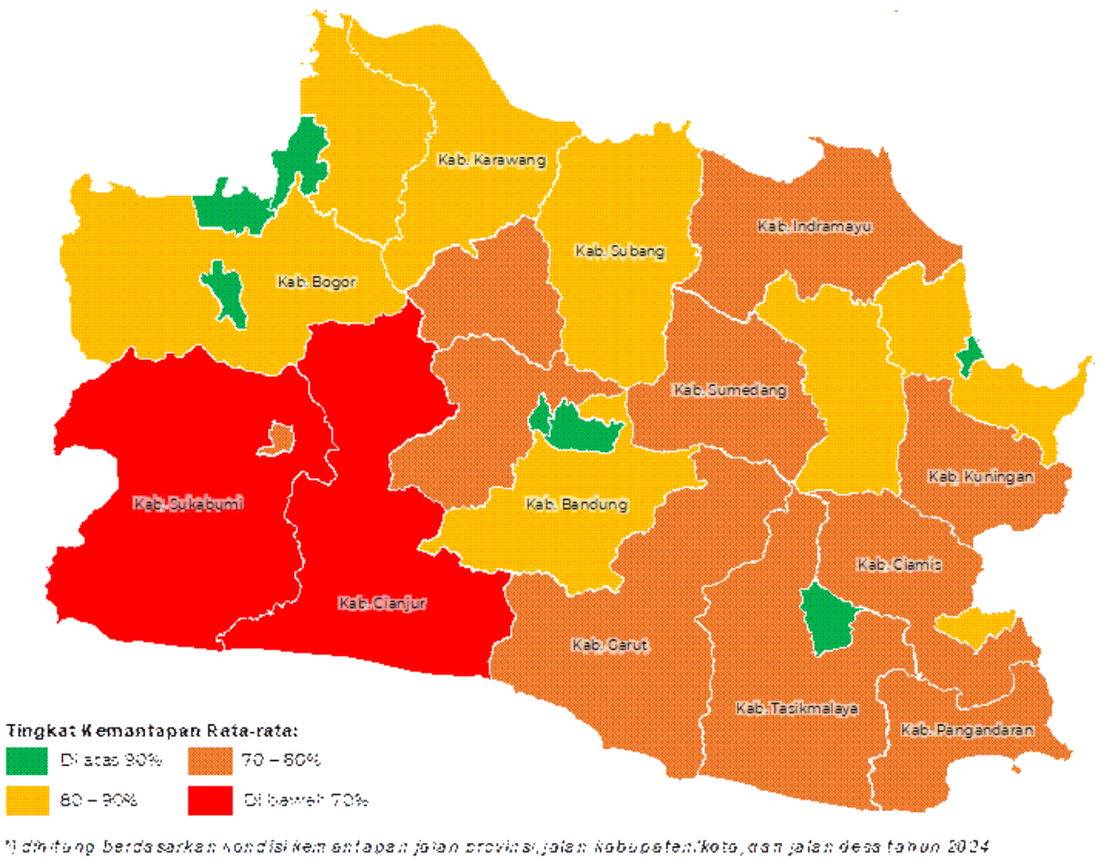
No	Kabupaten/Kota	Total Panjang (km)	Kemantapan Rata-rata (%)
1	Kabupaten Bogor	3.787,11	86,02
2	Kabupaten Sukabumi	4.636,41	62,11
3	Kabupaten Cianjur	3.897,95	69,73
4	Kabupaten Tasikmalaya	3.844,53	71,97
5	Kabupaten Bandung	2.473,93	82,67
6	Kabupaten Garut	3.558,45	78,63
7	Kabupaten Ciamis	3.517,07	76,73
8	Kabupaten Kuningan	2.322,56	77,80
9	Kabupaten Cirebon	2.417,45	83,14
10	Kabupaten Majalengka	2.121,71	83,95
11	Kabupaten Sumedang	2.620,47	76,77
12	Kabupaten Indramayu	2.285,66	79,78
13	Kabupaten Subang	2.406,71	80,66
14	Kabupaten Purwakarta	1.226,16	77,85
15	Kabupaten Karawang	3.316,93	83,05
16	Kabupaten Bekasi	1.711,36	82,25
17	Kabupaten Bandung Barat	2.162,20	72,57

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	Total Panjang (km)	Kemantapan Rata-rata (%)
18	Kabupaten Pangandaran	1.399,11	76,43
19	Kota Bogor	220,18	95,02
20	Kota Sukabumi	1.462,10	73,45
21	Kota Bandung	686,74	97,48
22	Kota Cirebon	165,72	97,17
23	Kota Bekasi	325,71	94,71
24	Kota Depok	1.969,66	94,73
25	Kota Cimahi	114,55	99,22
26	Kota Tasikmalaya	485,76	91,27
27	Kota Banjar	402,78	81,87

Gambar 2.57
Rata-rata tingkat kemantapan jalan per Kabupaten/Kota



*) dihitung berdasarkan kondisi kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa tahun 2024

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terus dilakukan dalam upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

meningkatkan kondisi jaringan irigasi, tetapi karena kondisi sarana dan prasarana irigasi yang sudah termakan usia serta banyaknya terjadi bencana alam yang belum diimbangi secara optimal dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi, sehingga peningkatan capaian kondisi baik jaringan irigasi rata-rata 1 persen per tahun dengan rincian pada tahun 2019 menjadi 52,20 persen, 53,38 persen pada tahun 2020, 54,60 persen pada tahun 2021, 55,52 persen pada tahun 2022, dan 56,54 persen pada tahun 2023. Indeks Penggunaan Air menunjukkan kondisi yang terjaga, hal ini dapat dilihat dari penurunan capaian pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 1,1878 menjadi 1,1765. Kondisi ini menunjukkan jumlah kebutuhan air dibanding jumlah ketersediaan air di Jawa Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan (secara empiris) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Infrastruktur dasar Permukiman yang terdiri dari Air Minum, Air Limbah Domestik (Sanitasi), dan Persampahan tetap menjadi fokus pembangunan di Jawa Barat dan terus ditingkatkan kinerjanya yang tercermin dalam peningkatan angka pada masing-masing indikator. Capaian indikator bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022-2024 selalu mengalami peningkatan, khususnya pada capaian Akses Air Minum Layak yang mencapai 94,90 dan Akses Sanitasi Layak yang mencapai 75,10 pada tahun 2024. Peningkatan capaian pada kedua indikator ini didorong oleh adanya penilaian SPM *Awards* yang membuat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi lebih aktif dalam penyelesaian masalah yang ada. Selain itu, capaian ini didukung juga dengan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang terealisasi secara optimal. Di sisi lain, capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan masih terlampau jauh di bawah target yang ditetapkan karena masih banyaknya kondisi sarana dan prasarana persampahan di kabupaten/kota yang belum memadai.

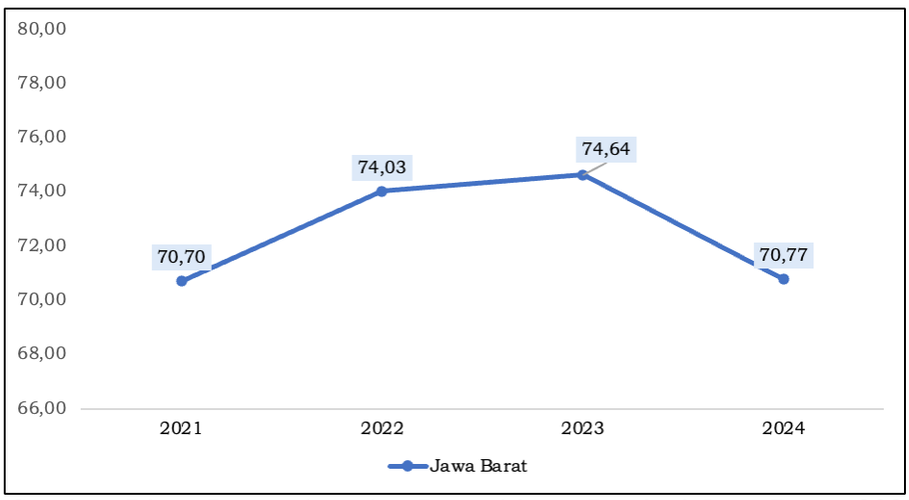
Cakupan pelayanan persampahan di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal ditunjukkan oleh akses penanganan sampah di perkotaan yang mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 70,77 persen. Penurunan capaian ini disebabkan karena masih kurangnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

tingkat layanan persampahan dan kondisi sarana prasarana persampahan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota masih belum memadai. Berikut ini adalah capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021-2024 (Gambar 2.54).

Gambar 2.58
Capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tren timbulan sampah di tingkat kabupaten/kota terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Peningkatan volume sampah tersebut belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun kelembagaan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota (Tabel 2.54).

Tabel 2.54
Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahun 2022 - 2024 (Ton/Hari)		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	2,813.51	2,813.51	2,813.51
2	Sukabumi	1,708.00	1,090.14	1,643.50
3	Cianjur	1,267.00	1,267.50	1,267.50
4	Bandung	1,283.16	1,301.53	1,312.21
5	Garut	1,112.25	1,121.82	1,145.92
6	Tasikmalaya	1,316.00	705.33	698.29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahun 2022 - 2024 (Ton/Hari)		
		2022	2023	2024
7	Ciamis	574.68	499.11	501.02
8	Kuningan	599.40	599.41	599.41
9	Cirebon	1,250.33	1,274.64	1,274.64
10	Majalengka	971.02	1,047.00	670.97
11	Sumedang	442.72	478.92	482.27
12	Indramayu	1,113.65	1,124.95	1,136.54
13	Subang	997.32	659.93	665.26
14	Purwakarta	404.00	160.40	418.28
15	Karawang	1,003.94	1,254.92	1,066.97
16	Bekasi	2,250.35	2,219.00	1,683.46
17	Bandung Barat	572.56	742.74	742.74
18	Pangandaran	70.00	176.07	176.07
19	Kota Bogor	744.46	779.81	779.81
20	Kota Sukabumi	180.35	184.41	184.41
21	Kota Bandung	1,594.18	1,609.77	1,496.31
22	Kota Cirebon	209.06	212.84	216.35
23	Kota Bekasi	1,830.63	1,747.34	1,747.34
24	Kota Depok	1,337.70	1,000.00	1,363.00
25	Kota Cimahi	275.46	230.21	231.96
26	Kota Tasikmalaya	319.11	323.17	333.44
27	Kota Banjar	85.67	86.64	86.64
Jawa Barat		**26,326.49**	**24,711.11**	**24,737.82**

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diolah, 2025

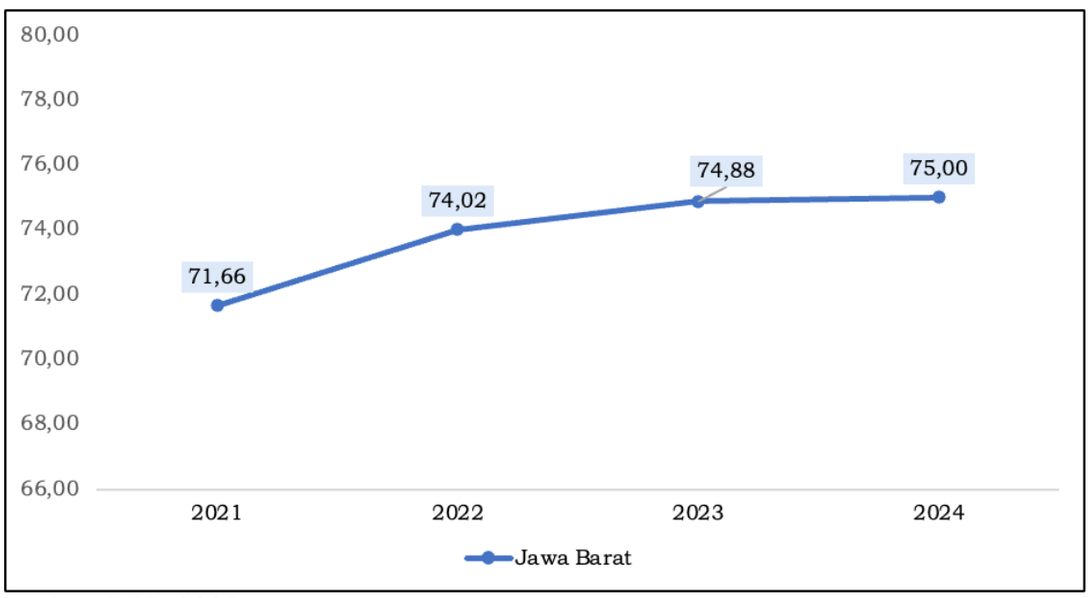
Salah satu tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat adalah minimnya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia. Banyak daerah belum memiliki jumlah armada truk pengangkut sampah yang memadai dibandingkan dengan volume timbulan sampah harian yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua sampah dapat terangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir secara rutin, sehingga menimbulkan penumpukan sampah di TPS, lingkungan permukiman, hingga di ruang-ruang publik. Di samping itu masih terbatasnya sarana prasarana pengolah persampahan di Kab/Kota seperti TPS3R dan TPST dan juga masih berlangsungnya praktik pengelolaan TPA yang bersifat *open dumping* membuat penumpukan sampah tersebut semakin tidak terkendali, dan terjadi kedaruratan sampah pada beberapa kab/kota. Di samping itu masih terbatasnya sarana prasarana pengolah persampahan di Kab/Kota seperti TPS3R dan TPST dan juga masih berlangsungnya praktik pengelolaan TPA yang bersifat open dumping membuat penumpukan sampah tersebut semakin tidak terkendali, dan terjadi kedaruratan sampah pada beberapa kabupaten/kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Selain persampahan, sektor sanitasi (air limbah domestik) juga menjadi infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat. Capaian akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya konsisten dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dalam memperluas layanan dasar, khususnya dalam pengelolaan sanitasi yang aman, termasuk pembangunan jamban sehat, tangki septik, dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih terkontrol. Capaian tahun 2021 hingga tahun 2024 tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.59
Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS, 2025

Meski terjadi peningkatan capaian di setiap tahunnya, capaian tersebut masih belum memenuhi target dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024. Seluruh capaian ini masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan kumuh perkotaan, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur sanitasi. Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Jawa Barat belum sepenuhnya tertangani secara sistematis. Sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan sistem sanitasi individu yang tidak selalu memenuhi standar kesehatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

lingkungan, seperti tangki septik tanpa resapan atau pembuangan langsung ke badan air. Infrastruktur sistem pengolahan terpusat, seperti IPAL Komunal dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), masih terbatas jumlah dan kapasitasnya, dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan, pengelolaan teknis, serta kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mempercepat cakupan layanan sanitasi aman dan pengolahan air limbah yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan catatan bahwa ada data yang tidak tersedia di tahun tertentu sebab belum digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah/perangkat daerah.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82,79	83,90 (PKRMS =85,21)	86,44
Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ ditingkatkan	Persen	19,34	25,91	26,28
Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	Persen	86,98	94,93	59,8[1)]
Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	Persen	48,48	61,81	
Persentase Sumber Daya Konstruksi yang terlatih*	Persen	183,85	273,99	N/A[2)]
Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1913	1,1878	1,1765
Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	0,27	0,26	0,437
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	55,52	56,64	57,04
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	48,21	50,92	52,38
Akses Sanitasi Layak	Persen	74,02	74,88	75,00
[1] Akses Air Minum Layak	Persen	93,04	93,86	99,27
[2] Akses Penanganan Sampah di Perkotaan	Persen	74,03	74,64	70,77
Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	83,50	93,33	95

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; Dinas Sumber Daya Air; dan Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025
Keterangan :
*) Data indikator tidak tersedia di tahun tertentu sebab belum digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah/perangkat daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

1) Indikator menjadi Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
2) Indikator menjadi Tingkat Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan Infrastruktur (JAKON)

2.1.3.4.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Salah satu capaian indikator kinerja daerah pada bidang ini adalah peningkatan Persentase Rumah Tangga Hunian Layak sebesar 2,08 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini melibatkan empat aspek penilaian yang mengadaptasi tujuan SDG's ke-11.1, yaitu menjamin akses terhadap hunian yang layak dan aman. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1) Ketahanan Bangunan; 2) Luas Bangunan per kapita; 3) Akses Air Minum Layak; dan 4) Akses Sanitasi Layak.

Program-program yang mendukung peningkatan capaian Persentase Rumah Tangga Hunian Layak antara lain meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di 27 Kabupaten/Kota, perbaikan rumah relokasi bagi korban bencana, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sembilan lokasi, supervisi pembangunan SPAM di 27 Kabupaten/Kota, serta pembinaan teknis dan pengembangan SDM serta kelembagaan untuk pengelolaan air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Selain itu, indikator Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik pada tahun 2024 tercatat mencapai 100 persen, telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Tingkat Ketersediaan Rumah Layak juga mengalami peningkatan menjadi 100,26 persen pada tahun 2024, naik sebesar 4,61 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian pada indikator Persentase Capaian Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) mengalami penurunan menjadi 71,57 persen dari target sebesar 80,85 persen, penurunan ini menunjukkan hal positif dimana telah berkurangnya luasan kumuh yang perlu ditangani. Data capaian indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.53.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	53,14	53,37	54,17	56,25
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik*	Persen	N/A	N/A	N/A	20
Tingkat ketersediaan rumah layak	Persen	92,33	93,89	95,65	100,26
Persentase Capaian Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)*	Persen	N/A	N/A	N/A	71,57

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2024
Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2024 (RPD 2024-2026)

2.1.3.4.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terbagi menjadi tiga sub urusan yaitu sub urusan 1) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 2) bencana, dan 3) kebakaran. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024 dimana tahun 2023 dan 2024 diperoleh nilai maksimal berturut-turut. Hal tersebut mencerminkan kinerja di sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	poin	87,50	100	100
Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,69	0,71	0,72
Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	N/A	N/A	100

Sumber : BPBD; Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
Keterangan : N/A pada tahun 2022-2023 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam RPJMD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Indeks ketahanan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Capaian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024. Capaian terakhir tahun 2024 meningkat sebesar 0,1 poin dari tahun 2023. Sementara itu, berkaitan dengan sub urusan kebakaran pada tahun 2024 diperoleh capaian 100 persen terhadap indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota.

2.1.3.4.6 Urusan Sosial

Sasaran pelayanan bidang urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program dan kegiatan bidang urusan sosial adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan serta menurunkan tingkat kesenjangan masyarakat Jawa Barat. Upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan Sosial, sedangkan dalam rangka mewujudkan tanpa kesenjangan dilakukan melalui Program Perlindungan Jaminan Sosial.

Permasalahan sosial masyarakat di Jawa Barat masih banyak yang harus ditangani dan diselesaikan bersama, yang melibatkan lintas sektor, baik unsur pemerintah, dunia usaha serta peran serta masyarakat setempat. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat harus dapat tertangani semua secara komprehensif, dan tingkat pencapaiannya harus dapat mencapai 100 persen. Pelayanan SPM yang menjadi kewenangan urusan sosial tingkat pemerintah provinsi para PPKS terlantar yang ada di dalam panti. Jumlah PPKS terlantar di Jawa Barat cukup banyak, tetapi daya tampung untuk klien pada panti yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sangat terbatas, sehingga masih banyak PPKS terlantar yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial secara maksimal. Kondisi geografis di Jawa Barat juga sangat mempengaruhi masalah sosial masyarakat, mengingat banyak wilayah Jawa Barat yang rawan terhadap gempa. Setiap kejadian gempa akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Penerapan Perlindungan sosial yang adaptif perlu dilaksanakan secara baik, supaya semua masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial dapat terlayani. Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan Jaminan Sosial bagi masyarakat di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan, oleh karena itu perlu ada sistem reformasi perlindungan sosial bagi masyarakat. Kualitas dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar dalam pemberian penyaluran bantuan sosial sampai saat ini masih banyak permasalahan dan belum akurat. Oleh karena itu, pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) perlu ditingkatkan di tiap desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota.

Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran dalam pelayanan urusan bidang sosial di Jawa Barat, menjadi perhatian dan komitmen Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk dapat dilayani dengan maksimal di antaranya fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis. Selain PPKS, sasaran pelayanan urusan bidang sosial adalah masyarakat korban bencana kewenangan provinsi, melalui perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Realisasi indikator-indikator urusan Dinas Sosial tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	42,92	43,32	44,57
Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos	persen	64,3	100	100
Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	persen	1,20	1,35	-
Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	persen	117	100	100
Persentase Fakir Miskin yang tertangani	persen	69,7	54,5	-
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Tingkat pengelolaan makam pahlawan	persen	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan indikator utama penyelenggaraan urusan sosial Provinsi Jawa Barat yang menjadi Indikator Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, capaian indikator Ikesos dari tahun 2022 sampai tahun 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2024, Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat sebesar 1,25 persen dari tahun 2023 di mana menunjukkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat semakin membaik. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat sampai tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2.1.3.4.7 Tenaga Kerja

Selama periode 2022-2024, indikator terkait urusan tenaga kerja menunjukkan kecenderungan meningkat disebabkan kondisi perekonomian Jawa Barat yang berangsur pulih pasca pandemi COVID-19 sehingga banyak lapangan pekerjaan yang kembali terbuka. Hal tersebut terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka yang berangsur menurun.

Lebih lanjut, TPAK Laki - Laki di Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir selalu lebih besar dibanding TPAK Perempuan. Tingginya TPAK laki-laki di Jawa Barat menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja laki-laki yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut data capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja	Juta Orang	25,58	25,39	26,19
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,69	92,56	93,24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,15	66,49	67,71
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki - Laki*	persen	83,93	84,63	84,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	persen	48,01	47,98	50,59
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,31	7,44	6,75
Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	51,49	53,68	52,23
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan*	Persen	100	79,92	60,29
Persentase perusahaan yang diawasi	Persen	20	21,16	24,3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2025

Pembahasan mengenai indikator jumlah angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka telah disampaikan secara komprehensif pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini difokuskan pembahasan terhadap tiga indikator berikutnya, yaitu: persentase pencari kerja terdaftar yang bekerja, persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, dan persentase perusahaan yang diawasi.

Pertama, capaian indikator persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dari 5,00 persen pada tahun 2023 menjadi 4,95 persen pada tahun 2024. Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, sektor Pertambangan serta sektor Pengolahan Listrik dan Gas tercatat mengalami kontraksi, padahal sektor-sektor ini merupakan penyumbang signifikan terhadap serapan tenaga kerja.

Kedua, indikator persentase penyelesaian kasus hubungan industrial (HI) sudah tidak lagi digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakertrans Jawa Barat sejak tahun 2024. Namun demikian, data pencapaiannya tetap dicatat. Persentase tersebut dihitung dari perbandingan jumlah kasus HI yang dilaporkan kepada Disnakertrans dengan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dan/atau Anjuran. Penurunan capaian pada tahun 2024 disebabkan oleh lonjakan jumlah kasus, dari 976 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.040 kasus pada tahun 2024. Perlu dipahami bahwa penyelesaian kasus HI dapat melampaui satu tahun anggaran; kasus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

yang belum terselesaikan pada tahun berjalan akan tetap diproses hingga tuntas di tahun berikutnya.

Ketiga, indikator persentase perusahaan yang diawasi mencerminkan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawas Ketenagakerjaan. Setiap pejabat fungsional pengawas memiliki target jumlah perusahaan yang harus diawasi dalam periode tertentu. Evaluasi terhadap capaian target dilakukan secara berkala, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat terjaga konsistensinya dan hasilnya sesuai dengan perencanaan.

2.1.3.4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya yang mencakup kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Jawa Barat melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong perempuan untuk mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak maupun pencegahan terjadinya pornografi. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Jawa Barat.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,69	90,91	91,04
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,490	0,482	0,458
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,74	70,51	70,51*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	N/A	N/A	816
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	62,04	62,02	62,02*
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	N/A	N/A	55,56
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	92,59	100	100
Persentase Keberhasilan penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	100	100
Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	N/A	N/A	100
Tingkat penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap anak	Persen	100	100	100
Persentase Sumber Daya Manusia terbina yang menerapkan Pengarusutamaan Gender	Persen	N/A	N/A	9,62
Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang *Up To Date* Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	74	100	100
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	5,23	1,71	1,77
Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan untuk standardisasi di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	18,52
Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	50	100	100
Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Rasio	0,85	0,20	0,29
Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024. Namun terdapat 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan capaian di antaranya yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

100.000 Penduduk Perempuan), dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak). Pada tahun 2023, capaian IPA Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 0,13 dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian pada 3 (tiga) klaster meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Sementara itu, penurunan capaian pada indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Penduduk Perempuan) dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak) menunjukkan kondisi yang positif. Faktor yang berpengaruh terhadap Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah telah timbulnya kesadaran masyarakat untuk berani menyampaikan kasus kepada pihak berwajib, serta adanya kanal pengaduan yang telah memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dalam meminimalkan masalah pelanggaran hak anak dan perlindungan perempuan, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan 5 (lima) arahan khusus yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

2.1.3.4.9 Pangan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan bidang pangan terdiri atas aspek ketahanan pangan yang mencakup 3 (tiga) pilar utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan.

Pembangunan ketahanan pangan di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 82,97 pada tahun 2024 yang meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 82,19. Secara kewilayahan, daerah perkotaan besar seperti Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok cenderung lebih tahan pangan daripada wilayah rural. Hal ini dapat disebabkan oleh jaringan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

infrastruktur, distribusi pangan, serta daya beli masyarakat di perkotaan yang lebih baik.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu produsen utama komoditas pangan nasional, khususnya padi, dengan kontribusi sebesar 17,23 persen. Saat ini, terdapat 1.293.534 Ha lahan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian terutama sawah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Jawa Barat untuk mempertahankan luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan memperkuat posisi sebagai lumbung pangan nasional. Selain padi, Provinsi Jawa Barat juga mengalami surplus dalam sejumlah komoditas pangan lain, seperti jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur ayam.

Dalam hal keterjangkauan pangan, stabilitas harga memiliki peran yang sangat krusial. Ketika harga komoditas pangan cenderung fluktuatif, yang tercermin dari tingginya koefisien variasi harga, daya beli masyarakat menjadi terganggu. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga memperbesar risiko kerawanan pangan. Koefisien variasi harga di Jawa Barat sangat bervariasi untuk berbagai komoditas pangan. Sepanjang tahun 2024, koefisien variasi harga untuk komoditas beras berkisar di angka 4,22 persen hingga 9,06 persen. Sementara itu, jagung menjadi salah satu komoditas dengan fluktuasi koefisien harga paling tinggi, yaitu mencapai 83,65 persen pada April 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh fluktuasi produksi musiman sehingga terjadi ketidakseimbangan permintaan pada waktu tertentu.

Pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang merupakan salah satu hal penting dalam pilar pemanfaatan pangan. Pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Jawa Barat masih relatif rendah. Pada tahun 2024, konsumsi kalori per kapita sehari penduduk Jawa Barat hanya mencapai 2.069,91 kilo kalori. Capaian ini masih berada di bawah angka rata-rata kecukupan energi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2019 ayat 2 (dua) yaitu 2.100 kilo kalori. Berdasarkan proporsinya, konsumsi kalori masih didominasi oleh kelompok makanan padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta minyak dan lemak. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pangan yang belum optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan sebagai indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan Jawa Barat. Selain itu, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Capaian indikator kinerja urusan pangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	87,0	93,8	92,33
Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	94,02	94,41	95,37
Tingkat Konsumsi Pangan:				
- energi	kkal/kap/ hr	2216	2110	2040,58
- protein	gr/kap/hr	63,7	63,44	61,47
Persentase Cadangan Pangan	persen	52,17	80,12	50
Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	persen	4	3	3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

2.1.3.4.10 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebagai pengampu urusan. Dalam perkembangannya, terlihat peningkatan dari capaian indikator kinerja Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan dengan capaian sebesar 98,31 persen pada tahun 2023 serta meningkat menjadi 113,8 pada tahun 2024. Peningkatan ini tentunya didukung dengan terealisasinya program urusan pertanahan yang berjalan secara optimal, di antaranya seperti inventarisasi data re-distribusi tanah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan pembinaan warga desa penerima re-distribusi tanah dalam penataan akses reforma agraria. Kolaborasi berbagai *stakeholder* seperti Pemerintah Pusat,

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pemerintah Daerah dan juga masyarakat yang telah menghasilkan tata kelola pertanahan telah jauh melampaui target 100 persen di tahun 2024.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	54,2	72,88	98,31	113,8

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023

2.1.3.4.11 Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari beberapa indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Selain itu juga terkait dengan penanganan perubahan iklim, indikator tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) juga menjadi kinerja urusan lingkungan hidup yang perlu perhatian. Adapun penurunan emisi GRK ini juga merupakan kontribusi dari upaya penurunan emisi GRK di sektor kehutanan, pertanian dan peternakan, limbah domestik (termasuk persampahan), energi, dan transportasi, sehingga hal tersebut perlu didukung oleh beberapa Perangkat Daerah terkait. Dalam hal ini yang menjadi lingkup tugas di Dinas Lingkungan Hidup adalah penurunan emisi GRK di sektor limbah domestik. Secara umum, Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	64,66	64,77	66,09
Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	47,13	46,87	46,86
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	87,83	85,03	88,34
Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	80,31	81,39	83,68
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	poin	41,88	41,99	42,07
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	5,86	7,25	7,99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	persen	3,83	10,26	13,70

Sumber:
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2025
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2025
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2025
- Laporan PEP RAD GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, 2023, dan 2024

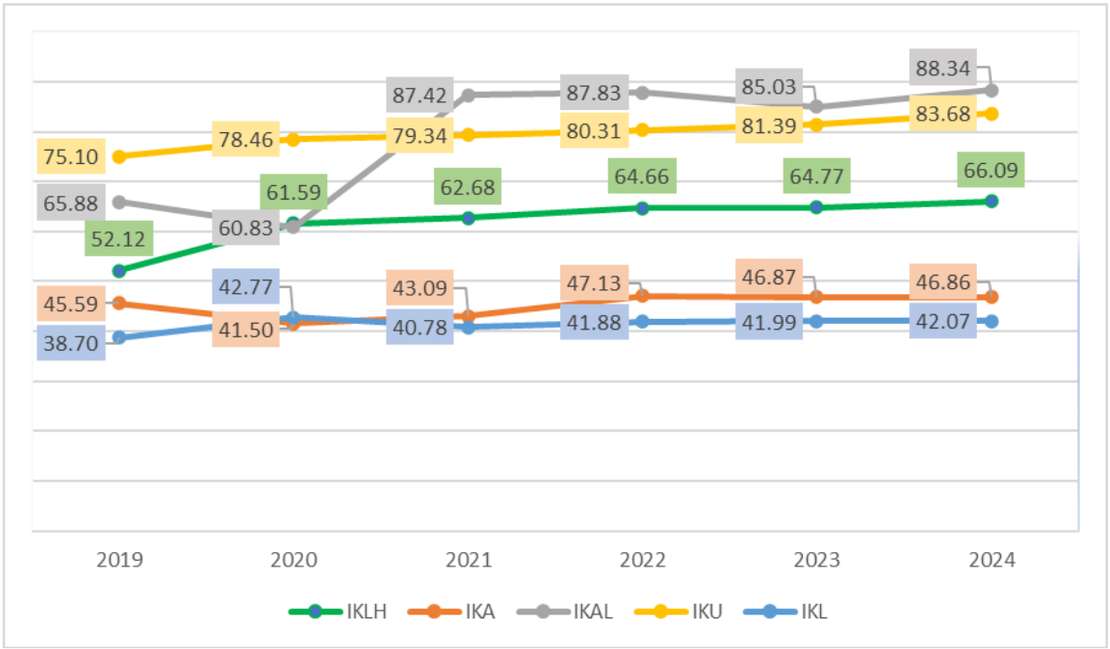
Dalam pemenuhan indikator IKLH metode perhitungan yang dilakukan sangat dinamis dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perkembangan berbagai hasil penelitian. Perhitungan IKLH terkini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan metode terbaru, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada metode sebelumnya, IKAL belum menjadi komponen perhitungan IKLH. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.60. Pada tahun 2020 capaian IKLH Provinsi Jawa Barat menggunakan perhitungan dengan 3 (tiga) komponen yaitu IKA, IKU dan IKTL. Sedangkan capaian IKLH Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. IKLH Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode Tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 66,09. Capaian IKLH Tahun 2024 dihitungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup namun masih menggunakan perhitungan lama. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat didukung dengan peningkatan capaian 4 (empat) komponen tersebut dalam perhitungan IKLH.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.60
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Kondisi kualitas air yang digambarkan dengan Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi skor IKA menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Dalam hal ini, kualitas air menjadi sesuatu yang mempengaruhi pembangunan, kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan energi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, di antaranya penggunaan lahan, litologi, waktu, dan curah hujan. Selain itu, aktivitas manusia juga turut mempengaruhi kualitas air melalui pencemaran air sungai, baik fisik, kimia, maupun biologi. Dalam hal ini sebagaimana Gambar 2.56 nilai IKA pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,1 poin dari capaian tahun 2023, dikarenakan faktor curah hujan dan aktivitas manusia salah satunya.

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur melalui pemantauan kualitas air pada 11 (sebelas) sungai, terdiri dari 4 (empat) sungai utama kewenangan Pemerintah Pusat dan 7 (tujuh) sungai kewenangan provinsi dengan parameter yang diukur meliputi 11 (sebelas) parameter. Peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) didukung oleh berbagai upaya penanganan DAS Prioritas, di antaranya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan secara pentahelix melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang tercantum dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 yang dilakukan perubahan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018. Melalui Program ini DAS Citarum telah mengalami perbaikan kondisi yang cukup signifikan, dimana kondisi kualitas air dari semula Cemar Berat di tahun 2018 berubah menjadi Cemar Ringan di Tahun 2024. Selain DAS Citarum, di tahun 2025 Jawa Barat telah menyusun Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025, serta sedang akan menyusun Rancangan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Kali Bekasi. Selain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat pun sedang menyusun Rencana Aksi untuk DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya di Jawa Barat.

Selain melalui IKA, kualitas air juga dapat dimodelkan dari Potensi Beban Pencemar (PBP) pada air sungai. PBP pada air sungai dapat dilihat dari kadar jumlah zat pencemar: *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Total Suspende Solid* (TSS). PBP untuk setiap zat pencemar merupakan akumulasi dari pencemaran yang bersumber dari kegiatan domestik, pertanian, maupun penggunaan lahan. PBP yang bersumber dari domestik dipengaruhi oleh pola distribusi penduduk dan jaraknya terhadap sungai, beserta beberapa faktor lain seperti rasio ekuivalen kota dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. PBP dari kegiatan pertanian dan penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. Sehingga dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.56 beberapa aktivitas tersebut berkontribusi menyebabkan terjadinya penurunan IKA sebesar 0,1 poin selain memang faktor cuaca juga sangat mempengaruhi, dimana musim kemarau saat ini berlangsung lebih lama dari musim hujan sehingga dari sisi ketersediaan air berkurang dan menyebabkan IKA mengalami penurunan.

Selain kualitas air permukaan yang ditunjukkan melalui IKA, dilakukan juga pemantauan kualitas air laut yang kemudian digambarkan melalui Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yang dilakukan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2 (dua) titik pantau yang mewakili pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, dengan parameter yang diukur meliputi padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), amonia total (NH3-N), orto fosfat (PO4-P), dan minyak dan lemak. Jumlah titik lokasi pemantauan air laut perlu ditingkatkan agar lebih representatif menggambarkan kualitas air laut di Jawa Barat, meliputi muara sungai utama, lokasi yang berpotensi terdampak kegiatan daratan atau lautan, dan ekosistem penting seperti hanya mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari, dan ekosistem lainnya. Sama seperti IKA, sumber pencemar yang dapat mempengaruhi nilai dari IKAL adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah pertambangan. Dalam hal ini, capaian nilai IKAL di tahun 2024 mengalami kenaikan 3,31 poin dari capaian tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.60

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKA), kondisi udara ambien menjadi salah satu yang diperhitungkan. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan serta berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup, sementara baku mutu udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang keberadaannya ditoleransi dalam udara ambien tersebut (PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemar Udara) (Presiden Republik Indonesia, 1999). Apabila udara tersebut melebihi baku mutu, maka lingkungan sekitarnya dapat rusak dan memiliki potensi mengganggu kesehatan. Penetapan baku mutu udara ambien nasional dilakukan untuk mencegah pencemaran udara, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien. Indeks kualitas udara (IKU) merupakan ukuran/indeks yang digunakan untuk menilai pencemaran udara serta kualitas udara ambien. Nilai IKU dapat menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas udara di suatu daerah serta dapat menjadi nilai dasar yang menjadi sumber informasi untuk perencanaan terkait udara bersih. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 27 kabupaten/kota dengan parameter yang diuji meliputi sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) titik yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Melalui Gambar 2.56 digambarkan bahwa telah ada perbaikan nilai IKU di Jawa Barat Tahun 2024 yang meningkat 2.37 poin berdasarkan capaian tahun 2023.

Selain capaian IKA, IKAL, dan IKU terdapat juga elemen Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang juga dalam Tabel 2.56 menunjukkan peningkatan sebesar 0,08 poin dari capaian 2024. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup banyak seperti salah satunya Program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) dan konservasi tanah melalui upaya vegetatif maupun sipil teknis. Namun terkait dengan IKL ini akan lebih banyak dijelaskan rincian kegiatannya dalam kegiatan di Dinas kehutanan.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup juga dapat direpresentasikan melalui Pembangunan Rendah Karbon yang diukur melalui indikator tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersifat capaian daerah yang dilakukan Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya ini meliputi aksi-aksi melalui penurunan emisi GRK yang dilakukan pada sektor kehutanan dan lahan, sektor energi, sektor persampahan dan limbah domestik, sektor pertanian dan peternakan, dan sektor transportasi. Pemerintah Pusat juga melakukan upaya serupa dalam hal penurunan emisi GRK dengan tambahan sektor-sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK.

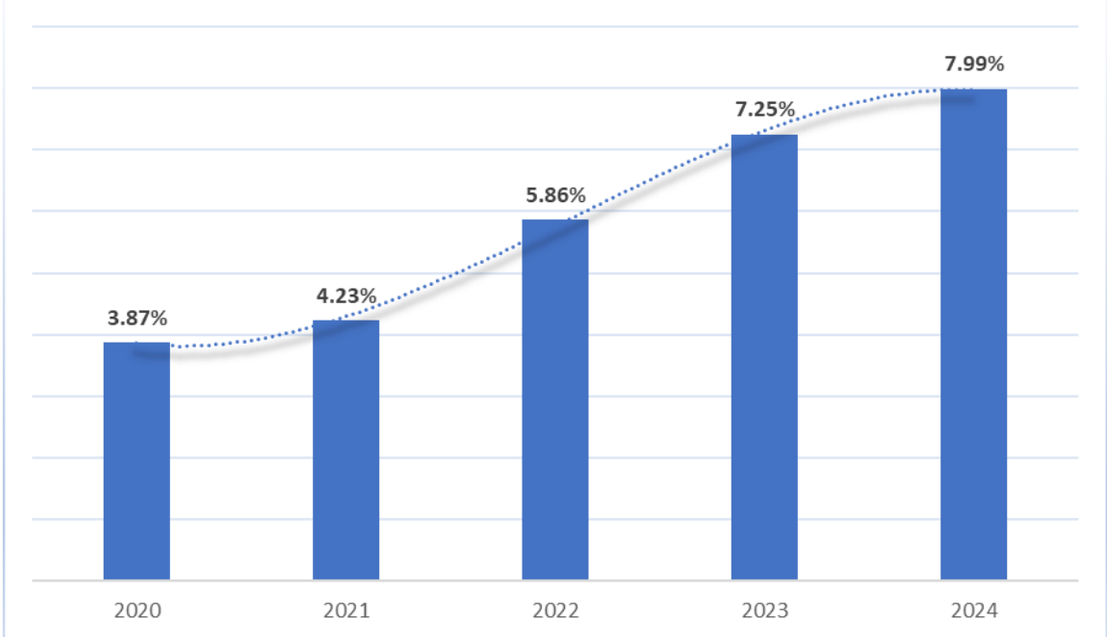
Sampai dengan tahun 2024 Jawa Barat telah berhasil menurunkan emisi GRK dari kondisi *baseline* 93.620.403 Ton CO2eq menjadi 82.823.926,28 Ton CO2eq di tahun 2024. Capaian penurunan emisi di tahun 2024 ini setara dengan 7,99 persen atau sebesar 10.796.476,42 Ton CO2eq dari target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 13.446.822 atau 9,9aaa4 persen sebagaimana tercantum dalam dokumen RAD GRK kaji ulang 2018. Besaran penurunan emisi GRK tersebut merupakan kumulatif dari penurunan emisi GRK pada tahun-tahun sebelumnya yang terus menunjukkan capaian yang baik atau meningkat terhadap target penurunan emisi GRK kondisi baseline

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2030. Capaian tingkat penurunan emisi GRK Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.61
Capaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan PEP RAD GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Berdasarkan pada Gambar 2.61 terkait Capaian Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semakin meningkat. Capaian tingkat penurunan emisi GRK Tahun 2024 terdiri dari kontribusi sektor kehutanan sebesar 1.140.671,64 Ton CO2eq, sektor energi sebesar 438.027,35 Ton CO2eq, sektor persampahan dan limbah domestik sebesar 510.774,33 Ton CO2eq, pertanian dan peternakan sebesar 45.077,93 Ton CO2eq, dan sektor transportasi sebesar 21.069,41 Ton CO2eq. Capaian penurunan emisi GRK Tahun 2024 ini masih bersifat daerah yang artinya kontribusi dari aksi-aksi penurunan emisi GRK di tingkat daerah. Sedangkan di tingkat pusat dengan kontribusi pada sektor yang sama ditambah dengan sektor industri dihitung secara terpisah, karena penurunan emisi pada sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya System Rice Intensification (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, di antaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);
4. Sektor Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area Traffic Control System* (ATCS), pelaksanaan *Car Free Day* (CFD), peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan
5. Sektor Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya, pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

Untuk perhitungan tahun 2025, pengukuran capaian penurunan emisi GRK dilakukan melalui indikator yang berbeda dengan sebelumnya, di mana secara imperatif Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator persentase penurunan emisi GRK kumulatif dan persentase penurunan emisi GRK tahunan, serta persentase penurunan intensitas emisi GRK untuk dijadikan indikator baru yang bersifat kewilayahan. Sehingga ke depan pengukuran capaian penurunan emisi GRK tidak terpisah antara di tingkat daerah dan di tingkat pusat, namun dihitung sebagai satu

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

kesatuan utuh yang memerlukan integrasi perhitungan capaian pusat dan daerah.

2.1.3.4.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah provinsi bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi: 1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3) pembinaan dan sosialisasi; 4) penyajian data kependudukan berskala provinsi; dan 5) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Barat diukur dengan Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat dengan capaian 94,4 persen pada tahun 2024.

Untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, diperlukan upaya dengan (1) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan; (2) melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara komprehensif kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pelayanan administrasi kependudukan yang prima guna tercapainya target nasional di Jawa Barat; (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang administrasi kependudukan; serta (4) penyesuaian regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah terkait kewenangan Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	84,29	84,35	N/A
Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat*	Persen	N/A	84,45	94,4
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	85,73	86,73	N/A
Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Persen	84,78	85,74	N/A
Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Persen	95,45	95,77	N/A
Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	Persen	100	100	100
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota*	Persen	N/A	N/A	99,18
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota*	Persen	N/A	N/A	88,28
Persentase Data yang Dimanfaatkan*	Persen	N/A	N/A	83,78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2025
*indikator baru pada RPD 2024-2026

Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota tahun 2024 sudah hampir mencapai 100 persen, sehingga pada RPJMD 2025-2029 terdapat perubahan meta data yang semua menghitung kepemilikan dokumen KTP menjadi kepemilikan dokumen KIA dengan *baseline* tahun 2024 sebesar 54,02 persen.

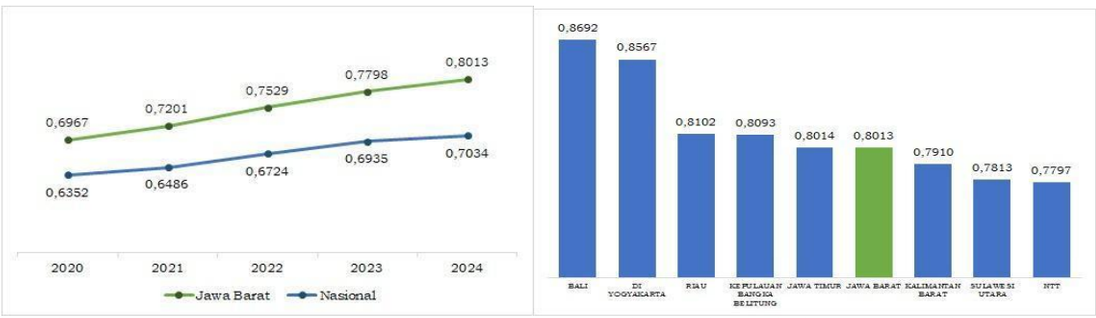
2.1.3.4.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam Ketahanan Ekonomi wilayah, Ketahanan Pangan, Ketahanan Sosial dan Budaya serta Ketahanan Ekologi dan Lingkungan. Indeks Desa Membangun menjadi alat ukur yang digunakan dalam menilai perkembangan pembangunan desa melalui tingkat kemandirian desa. Tujuan utama perhitungan Indeks Desa Membangun adalah untuk mendorong pembangunan desa yang terarah, terukur dan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi melalui kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Gambar 2.62
IDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan Skor IDM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 berada pada peringkat keenam nasional dengan status maju. Capaian IDM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang signifikan dari kategori berkembang menjadi kategori maju. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah desa terbesar memiliki tantangan untuk meningkatkan status IDM menjadi Kategori Mandiri. Berdasarkan capaian setiap dimensi, pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Sosial yaitu sebesar 0,8577, nilai Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8006, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,7456. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun *stakeholders* dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi. Capaian Indeks Desa Membangun diklasifikasikan menjadi 5 (lima) strata yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Pengukuran kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat diukur menggunakan persentase desa mandiri yang dimana merupakan strata dengan capaian rata-rata Indek Desa Membangun tertinggi.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	persen	21,27	34,42	46,09
Persentase Desa Maju	persen	47,27	48,07	44,35
Persentase Desa Berkembang	persen	31,46	17,51	9,57
Persentase Desa Tertinggal	persen	0,00	0,00	0,00
Persentase Desa Sanagat Tertinggal	persen	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Berdasarkan perkembangan strata desa di Provinsi Jawa Barat dari hingga 2024, bahwa sudah tidak desa sangat tertinggal sejak tahun 2019 dan sudah tidak desa tertinggal sejak tahun 2022. Capaian pada tahun 2024, mayoritas desa di Jawa Barat berada pada strata Mandiri, dengan jumlah mencapai 2.448 desa atau sekitar 46,09 persen. Selain itu Desa berkembang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2022 sebanyak 31,46 persen hingga tahun 2024 sebesar 9,57 persen. Selain itu desa maju berkurang sebanyak 198 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat desa-desa di Jawa Barat dalam mencapai kategori yang lebih tinggi, khususnya desa Mandiri yang mengalami lonjakan sebesar 620 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Pemerintah mengeluarkan indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa yaitu Indeks Desa sebagai pengembangan dari IDM yang digunakan pada RPJPN 2025-2045. Indeks Desa dihitung berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola.

2.1.3.4.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan suatu upaya untuk mengatur, mengontrol dan mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk agar seimbang. Pada dasarnya, pengendalian penduduk bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengendalian pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan dan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk tolak ukur pengendalian penduduk adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Selain itu, dalam rangka pengendalian penduduk, dilakukan upaya untuk mengendalikan jumlah kelahiran melalui keluarga berencana dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pembangunan keluarga berkualitas. Keluarga berencana menggambarkan perencanaan jumlah anak, waktu kelahiran, dan jarak kelahiran yang ideal. Sementara itu, kualitas keluarga menggambarkan kondisi kesejahteraan keluarga yang memenuhi beberapa aspek di antaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Berikut capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,22	1,18	1,13
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	63,38	66,44	66,44*
Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,10	2,06	2,03
Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	63	63,2	64,30
Persentase kebijakan pengendalian penduduk yang diterapkan	Persen	N/A	N/A	75
Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	Persen	N/A	16,73	21,05
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun	Persen	N/A	N/A	5,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2025
Keterangan: (*) Data belum rilis dan menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Dilihat dari data capaian tahun 2022-2024, LPP Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2024, LPP Provinsi Jawa Barat mencapai 1,13 persen, mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi serupa ditunjukkan oleh indikator *Total Fertility Rate* (TFR) dengan capaian yang terus menurun dari tahun 2022-2024. Kondisi ini sejalan dengan kesertaan ber-KB Aktif/mCPR yang mengalami peningkatan pada Tahun 2024, yang menunjukkan bahwa adanya keberhasilan upaya pengendalian penduduk di Jawa Barat. Namun upaya pengendalian penduduk ini masih perlu dioptimalkan, salah satunya dengan mendorong kesertaan ber-KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang.

Sedangkan indikator lainnya cenderung mengalami peningkatan capaian, yang menunjukkan kondisi yang cukup baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, upaya penurunan jumlah perkawinan anak di Jawa Barat menunjukkan keberhasilan, di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

mana kasus perkawinan anak menurun sebanyak 968 kasus menjadi 3.631 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh adanya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi, dari sisi jumlah masih relatif tinggi, sehingga membutuhkan upaya pencegahan yang lebih masif.

2.1.3.4.15 Perhubungan

Indikator kinerja urusan perhubungan Tahun 2022-2024 mengalami tren positif untuk semua indikator. dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	persen	38,04	40,21	51,28
Persentase Terminal Tipe B yang dibangun**	persen	31,91	45,72	-
Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Dukungan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP**	persen	86,98	97,52	-
Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel**	persen	77,10	100	-
Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat*	persen	-	-	41,12
Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum di Jawa Barat*	Persen	-	-	4,93

Catatan:
**) merupakan IKU Dishub penyesuaian pada Renstra 2024-2026; dan digunakan pada Renstra 2025-2029;*
***) data tidak tersedia di Tahun 2024 karena mengalami penyesuaian nomenklatur indikator*
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

Dinas Perhubungan rentang waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami perubahan indikator kinerja utama dikarenakan ada beberapa komponen perhitungan yang harus disesuaikan kembali. Dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024 tersebut mengalami penyesuaian terhadap indikator kinerja utama (IKU). Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian komponen perhitungan yang mempengaruhi formulasi indikator. Penyesuaian ini dilakukan agar indikator yang digunakan lebih akurat dalam mencerminkan kinerja sektor transportasi sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi capaian kinerja dalam periode tersebut harus mempertimbangkan perubahan definisi dan komposisi indikator. Salah satu indikator strategis yang menggambarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

konektivitas transportasi di Jawa Barat adalah tingkat aksesibilitas transportasi. Berdasarkan data tahun 2024, capaian tingkat aksesibilitas mencapai 41,12 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 39,21 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya perluasan jangkauan dan kemudahan akses layanan transportasi kepada masyarakat mulai menunjukkan hasil yang positif.

Kemudian capaian indikator persentase peningkatan pengguna angkutan umum di Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan peningkatan realisasi 4,93 persen dari target 4,15 persen. Hal tersebut terdiri dari jumlah penumpang transportasi darat sebanyak 3.125.798 orang, penumpang ASDP sebanyak 250.337 orang, penumpang kereta api sebanyak 47.208.047 orang dan penumpang pesawat udara sebanyak 364.635 orang sumber data tersebut diambil dari data jumlah penumpang di terminal penumpang tipe B di Jawa Barat, jumlah penumpang ASDP dari data 6 satpel ASDP, jumlah penumpang kereta api dari DAOP I dan II, penumpang pesawat udara dari Bandara Nusawiru dan Bandaran BIJB Kertajati serta data jumlah penumpang BRT Bandung Raya. Persentase peningkatan pengguna angkutan umum juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2024, capaian realisasi sebesar 4,93 persen, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 4,15 persen. Capaian ini mencerminkan peningkatan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik, yang berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan emisi karbon. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari jumlah penumpang angkutan umum, yang terdiri atas: 3.125.798 orang pengguna angkutan darat (data dari terminal penumpang tipe B di Jawa Barat), 250.337 orang pengguna jasa penyeberangan ASDP (dari 6 satpel ASDP), 47.208.047 orang penumpang kereta api (data DAOP I dan DAOP II), 364.635 orang penumpang pesawat udara (dari Bandara Nusawiru dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati), serta data dari sistem angkutan massal perkotaan seperti BRT Bandung Raya.

Dengan mempertimbangkan capaian indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan menunjukkan tren yang positif meskipun dalam prosesnya terdapat penyesuaian indikator. Kinerja Dinas Perhubungan dalam periode ini memperlihatkan efektivitas kebijakan transportasi publik, khususnya dalam mendorong aksesibilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

dan utilisasi moda umum. Pencapaian ini harus dilihat tidak hanya dari sisi angka, namun juga dari dampaknya terhadap mobilitas masyarakat, efisiensi waktu tempuh, dan pengurangan emisi. Tantangannya ke depan adalah menjaga konsistensi data lintas moda, mengatasi ketimpangan layanan di wilayah hinterland, serta mempercepat digitalisasi sistem informasi transportasi.

2.1.3.4.16 Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Barat, indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan indikator yang mengukur sejauh mana hak atas informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024, pengukuran IKIP menggunakan tiga pendekatan yaitu lingkungan fisik/politik (terdiri dari 6 indikator dan 35 sub indikator), lingkungan ekonomi (7 indikator dan 22 sub indikator), dan lingkungan hukum (7 indikator dan 28 sub indikator). Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indeks yang mengukur kesiapan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengukuran Indeks SPBE dinilai dari tingkat kematangan 47 indikator yang terdapat pada delapan aspek di empat domain yang terdiri dari Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE. Adapun realisasi indikator disajikan pada tabel berikut.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	98,95	95,53	85,22
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,37	4,14	4,73

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami penurunan. Nilai IKIP 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan nilai yang digunakan. Nilai IKIP Tahun 2023 merupakan nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan enam aspek penilaian yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi. Sementara itu, Nilai IKIP Tahun 2024 merupakan hasil dari penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang pengukurannya menggunakan tiga pendekatan yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.

Perolehan IKIP Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 85,22 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sekaligus menjadikan Jawa Barat mendapatkan peringkat pertama pada kategori 'Baik' dari Komisi Infomasi (KI) Pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik untuk dapat mencapai IKIP dengan kategori 'Baik Sekali'.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik terus mengalami peningkatan. Realisasi SPBE Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat adalah 4,73 poin dengan predikat memuaskan sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan nilai Indeks SPBE Tertinggi di antara Provinsi lainnya di Indonesia. Meski demikian, terdapat hal-hal yang harus terus ditingkatkan dalam pelaksanaan SPBE Provinsi Jawa Barat terutama pada domain manajemen SPBE karena berdasarkan Laporan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, Domain dengan perolehan nilai terendah yaitu sebesar 3,82 Poin, terlebih pada sub domain Audit TIK.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital akan berdampak pada masyarakat jika masyarakat memiliki literasi digital yang memadai. Semakin baik literasi digital masyarakat, maka akan semakin membantu masyarakat mendapatkan pelayanan berbasis digital yang optimal. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks literasi Digital yang dipublikasi pada literasidigital.id, Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 3,73 poin. Angka tersebut masih berada di bawah Indeks Literasi Digital Nasional. Dari nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tersebut, Budaya Digital (*Digital Culture*) merupakan pilar dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan pilar lainnya. Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan capaian 3 (tiga) pilar lainnya yaitu Kecakapan Digital (*Digital Skill*), Etika Digital (*Digital Ethics*), dan Keamanan Digital (*Digital Safety*).

2.1.3.4.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama periode 2022-2023 memperlihatkan tren positif yang menunjukkan bahwa kinerja di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil berjalan cukup baik. Secara lebih lengkap untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	Persen	31,33	32,63	N/A
Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	8,38	10,38	78,25
Persentase Koperasi Aktif	Persen	49,62	49,99	50,27
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	14,672	16.075	16.890
Tingkat Koperasi yang Berkualitas	Persen	36,98	37,90	28,85
Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	Persen	76,82	100	N/A
Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	28,02	29,53	33,12
Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	6,75	12,31	20,54

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	11,22	19,13	N/A
Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	Persen	77,8	78,98	N/A

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2024
Keterangan: N/A: Indikator sudah tidak digunakan lagi di tahun 2024

Capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat terdapat perbedaan pada tahun 2024. Terdapat beberapa indikator yang sudah tidak digunakan pada tahun 2024 yaitu indikator persentase koperasi yang mengakses kredit, persentase wirausaha menjadi usaha mikro, laju pertumbuhan omzet UMKM binaan, persentase kelembagaan usaha UMKM.

Pada indikator persentase UMKM yang naik kelas terdapat perbedaan hasil yang signifikan dimana pada tahun 2024 didapatkan nilai sebesar 78,25 persen sedangkan pada tahun 2023 hanya mencapai 10,38 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan rumus perhitungan indikator sehingga terlihat peningkatan yang cukup signifikan.

2.1.3.4.18 Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Mengingat peran investasi yang begitu penting, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Peningkatan capaian indikator urusan penanaman modal, terutama kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA), dipengaruhi oleh promosi investasi, letak geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kawasan industri Jawa Barat yang lebih unggul dari provinsi lainnya.

Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan perizinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Rp. triliun	576,9	644,38	708,47
Nilai Realisasi Investasi	Rp. triliun	174,58	210,61	184,90
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	poin	90,84	91,24	91,81
Persentase peningkatan investor	persen	N/A *	10	10
Persentase pelayanan perizinan yang sesuai standar	persen	N/A *	100	100
Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	persen	N/A *	100	100
Persentase pengaduan dan Permohonan advokasi yang terlayani sesuai standar	persen	N/A *	100	100
Persentase Layanan PMPTSP yang memanfaatkan Sistem Informasi	persen	N/A *	N/A **	100
Persentase dokumen data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	persen	N/A *	N/A **	100
Persentase perubahan untuk mendukung implementasi RB, ZI, kinerja PPB dan MCP	persen	N/A *	N/A **	100
Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Yang Sesuai Ketentuan	persen	N/A *	N/A **	90
Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	persen	10	10	N/A***
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	persen	75	75	N/A ***
Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	persen	51,00	15	N/A ***
Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	persen	100	100	N/A ***

* Data sudah tidak relevan karena adanya pembaharuan indikator pada tahun 2023-2024
** Data sudah tidak relevan karena adanya pembaharuan indikator pada tahun 2024
*** Data sudah tidak relevan karena indikator tersebut sudah tidak digunakan pada tahun 2024
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain data capaian indikator yang disajikan pada tabel di atas, capaian realisasi investasi dengan proyek dan serapan tenaga kerja berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh daya tarik Jawa Barat sebagai tujuan investasi yang didukung oleh pemerintah daerah yang secara aktif mempromosikan potensi investasi. Promosi dilaksanakan dalam bentuk forum dan pameran, salah satunya melalui *West Java Investment Summit* (WJIS) yang melibatkan investor nasional dan internasional. Selain itu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

kebijakan kemudahan berinvestasi, kemudahan izin berusaha, iklim yang kondusif, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar penunjang mobilitas, seperti terbangunnya pelabuhan patimban, dan bandara Kertajati juga memperkuat daya saing daerah.

Tabel 2.71 hingga Tabel 2.74 menunjukkan realisasi investasi Jawa Barat dan perbandingannya dengan provinsi lain. Dalam 3 tahun terakhir, realisasi PMDN dan PMA Provinsi Jawa Barat selalu menempati posisi 1 atau 2 di tingkat nasional.

Tabel 2.71
Realisasi Investasi 2022-2024

Tahun	PMA			PMDN			PMA+PMDN		
	Proyek	Investasi (Rp. T)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi (Rp. T)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi (Rp. T)	Tenaga Kerja
2022	12.419	93,77	107.819	24.071	80,81	75.564	36.490	174,58	183.383
2023	25.250	122,60	122.908	69.219	88,01	130.516	94.469	210,61	253.424
2024	37.346	149,58	168.223	121.362	101,55	215.484	158.708	251,14	383.707

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.72
Tren Lokasi PMDN Tahun 2022-2024

No	2022	2023	2024
1	Daerah Khusus Jakarta	Daerah Khusus Jakarta	Daerah Khusus Jakarta
	Rp 89,2 T (16,1%)	Rp.95,2 T (14,1%)	Rp128,4 T (15,8%)
2	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	Rp 80,8 T (14,6%)	Rp.88,0 T (13,0%)	Rp101,5 T (12,5%)
3	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
	Rp 65,4 T (11,8%)	Rp.74,9 T (11,1%)	Rp 92,4 T (11,4%)
4	Riau	Kalimantan Timur	Riau
	Rp 43,1 T (7,8%)	Rp.52,2 T (7,7%)	Rp 61,1 T (7,5%)
5	Kalimantan Timur	Riau	Kalimantan Timur
	Rp 39,6 T (7,2%)	Rp.48,2 T (7,1%)	Rp 55,1 T (6,8%)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2024

Tabel 2.73
Tren Lokasi PMA Tahun 2022-2024

No	2022	2023	2024
1	Sulawesi Tengah	Jawa Barat	Jawa Barat
	US$ 7,5 M (16,4%)	US$ 8,3 M (16,5%)	US$ 10,0 M (16,6%)
2	Jawa Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
	US$ 6,5M (14,3%)	US$ 7,2 M (14,4%)	US$ 9,0 M (15,0%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	2022	2023	2024
3	Maluku Utara	Maluku Utara	Jakarta
	US$ 4,5 M (9,8%)	US$ 5,0 M (9,9%)	US$ 7,6 M (12,6%)
4	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Maluku Utara
	US$ 3,7 M (8,2%)	US$ 4,8 M (9,6%)	US$ 4,4 M (7,3%)
5	Banten	Jawa Timur	Banten
	US$ 3,4 M (7,5%)	US$ 4,7 M (9,4%)	US$ 3,9 M (6,4%)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2024

Tabel 2.74
Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2022-2024

No	2022	2023	2024
1	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	Rp 174,6 T (14,5%)	Rp.210,6 T (14,8%)	Rp 251,1 T (14,7%)
2	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta
	Rp 143,0 T (11,8%)	Rp.166,7 T (11,7%)	Rp 241,9 T (14,1%)
3	Sulawesi Tengah	Jawa Timur	Jawa Timur
	Rp 111,2 T (9,2%)	Rp.145,1 T (10,2%)	Rp 147,3 T (8,6%)
4	Jawa Timur	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
	Rp 110,3 T (9,1%)	Rp.112,0 T (7,9%)	Rp 139,9 T (8,2%)
5	Riau	Banten	Banten
	Rp 82,5 T (6,8%)	Rp.103,9 T (7,3%)	Rp 105,6 T (6,2%)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2024

Indikator lain yang menggambarkan kinerja bidang penanaman modal yakni Realisasi Investasi terhadap serapan Tenaga Kerja. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serapan tenaga kerja pada tahun 2024 merupakan paling tinggi yaitu 383.707 orang dengan realisasi investasi sebesar Rp251,1 Triliun. Hal ini menggambarkan setiap 1 Triliun realisasi investasi menyerap tenaga kerja 1.528 orang.

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2024, 3 (tiga) penyumbang realisasi investasi terbesar PMA dan PDMN adalah Sektor Industri Pengolahan (Rp.133,31 T (53,08 persen)), Sektor Informasi dan Komunikasi (Rp.30,9 T (12,31 persen)), serta Sektor Real Estat (Rp.28,18 T (11,22 persen)). Namun, sektor Industri Pengolahan tidak termasuk ke dalam 5 sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tertinggi. Sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tertinggi per Rp.1 T adalah sektor Jasa Perusahaan (4.589 orang), yang memberikan kontribusi yang tidak besar terhadap realisasi investasi di Jawa Barat, yaitu sebesar Rp.2,87 T.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.75
Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Realisasi Investasi (Triliun)	136,13	174,58	210,61	251,1
Tenaga Kerja	109.331	183.383	255.699	383.680
Penyerapan TK per 1 Triliun (Rp)	803	1.050	1.214	1.528

Sumber: DPMPTSP, diolah, 2025

Tabel 2.76
Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2024

No	Sektor Usaha	Realisasi Investasi (Rp.T)	Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan TK per Rp.1T (orang)
1	Jasa Perusahaan	2,87	13.182	4.589
2	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	11,54	44.011	3.815
3	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	5,85	21.206	3.624
4	Jasa Lainnya	0,56	1.630	2.934
5	Jasa Pendidikan	0,04	108	2.523

Sumber: DPMPTSP, diolah, 2025

2.1.3.4.19 Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia tahun 2024, persentase kelompok umur pemuda (16-30 tahun) Jawa Barat sebesar 23,81 persen dari keseluruhan penduduk satu provinsi. Meskipun kelompok umur pemuda tidak mendominasi proporsi penduduk Jawa Barat, pada kenyataannya persentase pemuda bukanlah jumlah yang kecil, mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang terbanyak di Indonesia.

Jawa Barat menghadapi tantangan pembangunan pemuda terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan lainnya yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2023 dengan capaian sebesar 51,17 poin, angka tersebut 5,16 poin di bawah capaian nasional (56,33 poin).

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, IPP dilakukan re-formulasi sehingga terdapat beberapa perubahan komponen indikator dan bobot perhitungan. Untuk IPP tahun 2024 akan dirilis 2 (dua) capaian yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

capaian IPP dengan perhitungan lama untuk evaluasi dan capaian IPP hasil re-formulasi untuk *baseline* pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67	51,17	Belum rilis
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	poin	36,67	36,67	36,67*
Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	peringkat	2	2	1
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	61,02	60,72	61,4

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025
*) Capaian 2024 Rilis pada bulan Oktober 2025

Capaian tahun 2024 masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu 51,17 karena capaian tahun 2024 belum rilis secara resmi. 61,1 poin merupakan *baseline* dari pemerintah pusat untuk IPP formulasi baru sehingga bukan merupakan capaian tahun 2024. Untuk capaian tahun 2024 akan rilis di Oktober 2025.

Pembangunan Olahraga di Jawa Barat selaras dengan tujuan Desain Besar Olahraga Nasional yaitu: 1) meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; 2) meningkatkan kapasitas, sinergitas, produktivitas olahraga prestasi; dan 3) memajukan perekonomian berbasis olahraga. Peningkatan budaya olahraga di masyarakat dapat dilihat dari capaian Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO). Pada tahun 2024 capaian APMO sebesar 61,4 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2023. Meskipun telah mengalami kenaikan, masih diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat olahraga untuk kesehatan. Di sisi lain, Jawa Barat berhasil mempertahankan prestasinya pada *multievent* Pekan Olahraga Nasional (PON) dengan meraih peringkat 1 selama tiga tahun berturut-turut, dan peringkat 2 pada *multievent* Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) tahun 2024.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.3.4.20 Kebudayaan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Kebudayaan nasional dan lokal. Salah satu indikator persentase objek pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Persentase objek pemajuan kebudayaan Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 24,78, dan tahun 2024 56,53 persen. Selain itu terdapat juga indikator Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan capaian meningkat menjadi sebesar 45 objek pada tahun 2023 dan 57 .pada tahun 2024.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	Persen	24,78	29,73	31,15	56,53
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	44	44	45	57
Persentase /Jumlah Benda Koleksi Museum yang dilindungi	Koleksi	NA	NA	NA	732

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

2.1.3.4.21 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pentingnya data dalam setiap tahapan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan data geospasial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pelaksanaan kinerja urusan statistik diukur melalui indikator kinerja berikut ini.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*	persen	100	100	N/A
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	poin	N/A	2,82	3,07
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah*	persen	100	100	N/A
Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah*	persen	100	100	N/A
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**	persen	N/A	N/A	100
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**	persen	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025
Keterangan: (*) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(**) Indikator baru digunakan pada Tahun 2024

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,25 poin dari Tahun 2023. Secara lebih spesifik, kenaikan tersebut terdapat pada domain Kualitas Data, Kelembagaan, dan Statistik Nasional. Kenaikan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang relatif kurang signifikan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu dari aspek prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional yang juga menjadi domain dalam pengukuran indeks pembangunan statistik.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Sementara itu, realisasi Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah mencapai 100 persen yang artinya seluruh data statistik telah digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Pembangunan Daerah.

2.1.3.4.22 Persandian

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi bertujuan untuk mengamankan dan melindungi informasi yang dikelola Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kinerja urusan persandian diukur melalui indikator kinerja berikut ini.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	634	637	642
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah*	Persen	98,29	98,76	N/A
Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi**	Persen	N/A	N/A	100
Nilai Pengelolaan Risiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi**	Persen	N/A	N/A	99,17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan: (*) Indikator sudah tidak digunakan di tahun 2024
(**) Indikator baru digunakan Tahun 2024

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menggambarkan kesiapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi. Indeks KAMI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Skor Indeks KAMI Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 642 atau meningkat sebesar 5 (lima) poin dari Tahun 2023. Capaian ini menggambarkan Provinsi Jawa Barat telah siap menerapkan keamanan informasi pada setiap area penilaian. Jika dilihat lebih dalam dari area keamanan informasi yang menjadi area pengukuran Indeks KAMI, Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) area yang mengalami peningkatan skor dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu area tata kelola yang mencapai nilai maksimal sebesar 126 poin dan kerangka kerja keamanan informasi yang mencapai nilai maksimal

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

sebesar 159 poin. Selain itu, terdapat 2 (dua) area keamanan informasi yang mampu mempertahankan skor optimal yang didapat pada Tahun 2023 yaitu area pengelolaan risiko dan area pengelolaan aset. Namun, terdapat satu area keamanan informasi yang nilainya tidak mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke 2024 yaitu area teknologi dan keamanan informasi, capaian ini menggambarkan bahwa kesiapan penerapan keamanan informasi Provinsi Jawa Barat tergolong sangat baik meskipun perlu adanya peningkatan terutama pada area teknologi dan keamanan informasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keamanan informasi melalui pelatihan, bimbingan teknis secara berkelanjutan, ditambah dengan kontinuitas literasi keamanan informasi serta implementasi otomatisasi manajemen *password* pada seluruh sistem dan aplikasi. Selain itu, dapat dilakukan pemantauan pemutakhiran sistem operasi pada setiap perangkat *desktop* dan *server* untuk meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana direkomendasikan oleh BSSN sebagai Tim Penilai Indeks KAMI.

2.1.3.4.23 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, bahwa Standar Nasional Perpustakaan Umum meliputi: 1) Standar koleksi perpustakaan; 2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan; 3) Standar pelayanan perpustakaan; 4) Standar tenaga perpustakaan; 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan 6) Standar pengelolaan perpustakaan. Selain itu, penyelenggaraan urusan perpustakaan juga mengacu terhadap beberapa komponen pendukung mencakup inovasi dan kreativitas perpustakaan, Tingkat Kegemaran Membaca, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Dalam mendukung hal tersebut, indikator Tingkat Gemar Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator tolak ukur kinerja urusan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Budaya Literasi	Poin	N/A	N/A	73,68
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	72,73	60,02	72,76
Nilai Tingkat Gemar Membaca	Poin	70,10	70,47	75,07
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Poin	1,4898	0,2331	0,2706
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Poin	0,0024	0,2207	0,9023
Tingkat Kunjungan masyarakat per hari	Poin	0,4277	0,2571	0,3930
Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Poin	2,1987	1,000	1,000
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	23	23	24

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa capaian IPLM Provinsi Jawa Barat menunjukkan kondisi yang cukup baik, dengan peningkatan capaian sebesar 12,74 Poin di Tahun 2024, meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 12,71 Poin dari capaian Tahun 2022. Sementara itu, dilihat dari Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun 2022-2024, yang menggambarkan bahwa minat membaca masyarakat terus meningkat meskipun tidak signifikan. Sehingga perlu adanya dukungan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat.

2.1.3.4.24 Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun upaya untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip meliputi pembinaan kearsipan, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada Perangkat Daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip tokoh-tokoh skala Provinsi Jawa Barat, alih media arsip, digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan dan digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik	Perangkat Daerah	28	36	38
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Poin	N/A	N/A	93,5
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Poin	N/A	N/A	80,5
Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	N/A	N/A	82
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	67,07	100	100
Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	85,83	100	100
Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persen	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan kearsipan dari Tahun 2022-2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan angka capaian. Salah satunya ditunjukkan oleh indikator kinerja Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik dengan capaian tahun 2023 sebanyak 36 Perangkat Daerah, meningkat di tahun 2024 menjadi 38 Perangkat Daerah. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa semakin banyaknya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sadar terhadap pentingnya arsip dan sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara tertib.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.3.5 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.5.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat. Peranansub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan, namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan	ton	1.510.105.78	1.589.754.29	1.589.396,38
PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan*	miliar rupiah	24.516,84	24.780,19	25.101,65
Produksi Perikanan Tangkap	ton	277.610,07	281.119.41	291.284.149
Produksi Perikanan Budidaya	ton	1.232.495,71	1.308.634,88	1.298.112.23
Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	5,11	2,75	N/A*
Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ tahun	40,76	41,54	41,55
Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	27,03	30,81	N/A*
Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	persen	91,24	84,82	N/A*
Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan	persen	91,24	84,82	85,5
Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang	persen	60,14	65,02	65,5
Jumlah Produksi Garam	ton	65.554.34	394.462.07	368.493.08
Persentase produk perikanan yang sesuai	persen	-	-	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
standar mutu dan keamanan*				
Persentase Penanganan Pelanggaran Sesuai dengan Ketentuan	persen	87,54	93,23	96,05

Sumber:- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2024
Keterangan: (*) pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD
N/A* indikator sudah tidak digunakan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan, di antaranya penerapan teknologi produksi perikanan melalui *smart fishing*, pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak pantura, serta penebaran benih di perairan umum.

2.1.3.5.2 Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Sektor ini memberikan kontribusi melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Melalui *multiplier effect*, pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.120	537.443	734.870	1.242.782
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	47.132.138	72.435.138	85.634.314	88.201.549

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja utama urusan pariwisata ditunjukkan melalui jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Barat yang melalui pintu masuk Bandara Husein Sastranegara (Kota Bandung), Bandara Kertajati (Kabupaten Majalengka), dan Pelabuhan Muara Jati (Kota Cirebon). Hingga tahun 2024, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 1.242.782 orang, meningkat sebesar 69,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan tren positif pemulihan ekonomi.

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 88.201.549 orang, atau naik 2,99 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan kunjungan/perjalanan wisatawan nusantara ke akomodasi dan objek wisata selama tahun 2024, terutama pada masa libur akhir tahun, menunjukkan perbaikan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi. Hal ini juga tercermin dari tingkat okupansi kamar hotel dan penginapan yang mengalami peningkatan signifikan pada akhir tahun 2024.

2.1.3.5.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Jawa Barat, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, di antaranya penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas.

Secara umum, capaian indikator kinerja urusan pertanian pada periode 2022-2024 mengalami fluktuasi. Terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Sementara itu, beberapa indikator yang berkaitan dengan produksi pertanian mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh kemarau yang terjadi sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (NTP)	persen	99,73	107,45	112,17
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	8,57	8,44	8,42
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	persen	-0,04	-0,07	-0,05
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	persen	-0,08	0,06	0,03
Produksi Padi	ton	9.881.222	9.140.039,20	10.448.740
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persen	-3,81	-6,78	-4,74
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	persen	-8,46	5,58	3,20
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Perkebunan	poin	97,93	101,78	109,30
Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Utama Perkebunan	persen	5,68	5,22	1,58
Produksi Peternakan	ton	2.130.506	2.403.121	2.167.697
Persentase Peningkatan Mutu Produk Hewan	persen	520	25,25	18
Persentase Peningkatan Tingkat Kelahiran Ternak	persen	N/A	N/A	1,5
Tingkat Pemenuhan Penataan Prasarana Peternakan	persen	29,47		
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	persen	91,72	73,89	74,09
Persentase Pelaku Usaha Peternakan dengan Produktivitas yang Meningkat Kinerjanya	persen	25	25	50

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2025; Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2025; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan : * Data Sementara

2.1.3.5.4 Kehutanan

Indikator kinerja urusan kehutanan ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Tutupan Lahan dan Nilai Produksi Hasil Hutan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator kinerja urusan kehutanan ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Tutupan Lahan dan Nilai Produksi Hasil Hutan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen IKLH.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pencapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Hutan dan peningkatan persentase tutupan hutan dilakukan melalui rehabilitasi pada lahan kritis, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Selain itu, dilakukan juga Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) oleh Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Nomor 522.4/17/Rek tanggal 19 Februari 2020. Realisasi dari GTPP pada tahun 2024 sudah mencapai lebih dari sebanyak 100 juta pohon yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk mengawal kegiatan ini, digunakan aplikasi *E-Tanam* berupa SiMantri Bibit dan SiMantap untuk memetakan lahan kritis yang ada di Jawa Barat melalui penggunaan peta digital yang berfungsi menginformasikan lokasi lahan kritis dan lokasi yang sudah dilaksanakan penanaman.

Peningkatan peran sektor kehutanan dari segi ekonomi dilakukan dengan memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat, sementara hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, jamur kayu, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata.

Berikut ini indikator yang dapat menggambarkan pembangunan di sektor kehutanan selama periode Tahun 2022-2024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	40,81	41,99	42,07
Persentase Tutupan Hutan	persen	41,19	42,29	42,15
Nilai Produksi Hasil Hutan	Rp milyar	1.948,36	1.970,42	1.992,48
Persentase Penanganan Lahan Kritis	persen	4,99	2,49	6,44
Tingkat Kerusakan Hutan	persen	0,19	0,33	0,1
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persen	31,45	32,33	32,88
Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha	45.541,95	22.731,11	12.590,87
Luas kawasan hutan yang diberikan Ijin/Akses Legal pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial	ha	34.761,78	34.761,78	78.568,22

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Persentase tutupan hutan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan luas lahan sebesar 1.563.542,47 Ha pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh capaian luasan lahan yang berhasil direhabilitasi hanya seluas 12.590,87 Ha, berkurang hampir 50 persen dari tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target penanganan lahan kritis dilakukan melalui:

a. Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) yang melibatkan semua *stakeholder* di Jawa Barat baik dari Instansi Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
b. Aplikasi Simantri bibit dan SiMantap untuk mengetahui lokasi penanganan lahan kritis sampai tingkat tapak dengan titik koordinat lapangan.
c. Pembangunan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan di luar Hutan Negara melalui rehabilitasi *Mangrove* dan Hutan Pantai.

Pada tahun 2022, Indikator Luas Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat mencapai 34.761,78 Ha. Perluasan kawasan hutan ini didukung oleh program Perhutanan Sosial yang melibatkan masyarakat. Luas ini sama dengan realisasi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh hak akses legal yang baru diberikan ke masyarakat setelah bulan Desember 2023, sehingga tidak tercatat sebagai realisasi tahun tersebut. Sedangkan untuk tahun 2024, realisasi yang dicapai sebesar 78.568,22 Ha atau meningkat sebesar hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial oleh pemerintah pusat.

2.1.3.5.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor energi dan sumber daya mineral mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan Jawa Barat. Sektor energi dan sumber daya mineral sering disebut sebagai ”mesin” penggerak ekonomi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Barat, diperlukan upaya dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi serta optimalisasi sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

demikian, permasalahan dan tantangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral semakin kompleks pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi mekanisme perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Di tengah keterbatasan kewenangan akan pengelolaan sektor energi dan sumber mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses listrik ke seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Hal ini terlihat dari capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat pada tahun 2023 meningkat menjadi 67.355 GWh dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 70.064 GWh. Faktor pendukung peningkatan tersebut karena adanya peningkatan konsumsi listrik dari pelanggan PLN dan non PLN.

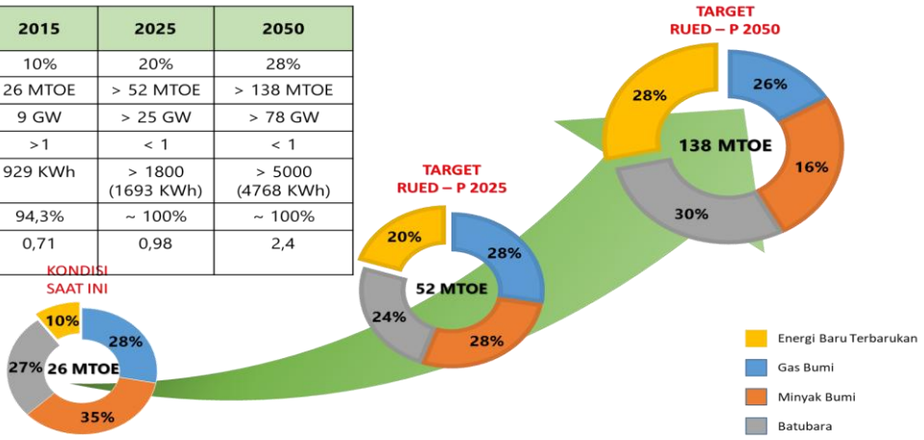
Kemandirian dan ketahanan energi di Jawa Barat masih menghadapi permasalahan. Hal ini diakibatkan oleh konsumsi energi yang masih didominasi oleh energi fosil. Berdasarkan data analisis pada tahun 2023, porsi energi fosil dalam bauran energi primer memiliki nilai 75,64 persen, sedangkan EBT hanya 24,36 persen. Besarnya porsi energi fosil ini berdampak terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca Jawa Barat pad sektor energi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan atau biasa disebut dengan Energi Baru Terbarukan (EBT). Jawa Barat diberikan sumber daya dan potensi EBT yang melimpah. Potensi EBT di Jawa Barat diperkirakan sekitar 170,4 GW yang bersumber dari angin (12.727 Mw), hidro (3.508 Mw), biomassa dari limbah industri (167,5 MWe), biomassa dari limbah kota (470,82 MWe), surya (156,63 GWp), dan panas bumi (5.956,80 MW), yaitu target bauran energi primer pada tahun 2025 sebesar paling sedikit 20 persen dan 28 persen dari total bauran energi primer pada tahun 2050.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 2.63
Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P Jawa Barat
Tahun 2025-2050

TARGET RUED – P JAWA BARAT	2015	2025	2050
Bauran EBT	10%	20%	28%
Penyediaan Energi	26 MTOE	> 52 MTOE	> 138 MTOE
Pembangkit Listrik	9 GW	> 25 GW	> 78 GW
Elastisitas Energi	>1	< 1	< 1
Listrik/Kapita/Thn	929 KWh	> 1800 (1693 KWh)	> 5000 (4768 KWh)
Rasio Elektrifikasi	94,3%	~ 100%	~ 100%
Konsumsi Energi (BOE)/Kapita	0,71	0,98	2,4



Sumber: Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050

Aksi yang dilakukan dalam transisi energi fosil ke energi baru terbarukan, di antaranya dengan melakukan pengembangan dan pemanfaatan PLTS Atap baik di gedung pemerintahan maupun sekolah, pengembangan ekosistem dan implementasi kendaraan listrik (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), inovasi pembiayaan/pendanaan alternatif untuk pembangkit EBT setempat. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan penurunan Gas Rumah Kaca pada sektor energi dapat terus meningkat. Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dalam kurun waktu 2022-2024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	65.320	67.355	70.064
Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1.337,16	1.346,41	1.391,67
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Persen	2,46	5,49	7,61
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	48,33	50	56,57
Persentase Sumur Bor yang Meningkat Muka Air Tanahnya)*	Persen	9,76	30,42	N.A
Persentase Meningkatnya Konservasi Cekungan Air Tanah di Jawa Barat)*	Persen	N.A	N.A	34,78

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan:)* N.A pada tahun 2024 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Indikator kinerja sektor energi dan sumber daya mineral juga direpresentasikan dengan persentase usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis. Masih minimnya tingkat kesadaran pengusaha pertambangan dalam menerapkan *good mining practices* menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan. Dengan keterbatasan kewenangan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang tertib secara administrasi dan teknis melalui strategi yang dilakukan yakni meningkatkan pengelolaan pengusahaan sumber daya pertambangan, melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan dan inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan.

Selain itu, pengelolaan air tanah di Jawa Barat didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Eksploitasi air tanah yang tak terkendali dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar seperti turunnya muka air tanah, penurunan kualitas air, intrusi air laut, dan *land subsidence*. Salah satu upaya untuk menjaga kondisi kualitas dan kuantitas air tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya konservasi kepada pengguna air tanah.

2.1.3.5.6 Perdagangan

Sektor Perdagangan tetap menempati posisi strategis sebagai penyumbang kedua terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat, dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,21 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2025. Kinerja sektor ini menunjukkan tren yang terus membaik, di mana laju pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 4,58 persen pada triwulan I tahun 2025, meningkat dari 4,12 persen pada periode yang sama tahun 2024, atau tumbuh sebesar 0,46 persen (y-on-y). Peningkatan ini didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat, meningkatnya aktivitas ritel modern dan *e-commerce*, serta didukung oleh perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada awal kuartal tahun ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Di sisi lain, ekspor nonmigas Jawa Barat kembali menunjukkan pemulihan setelah mengalami tekanan global pada tahun 2023. Saat itu, ekspor nonmigas sempat mengalami kontraksi sebesar minus 5,22 persen sebagai dampak dari melambatnya permintaan global terutama dari negara mitra utama seperti Amerika Serikat dan Jepang, serta gangguan logistik internasional. Namun, pada triwulan I tahun 2025, ekspor nonmigas berhasil tumbuh kembali sebesar 3,17 persen, yang ditopang oleh meningkatnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi seperti elektronik, kimia, dan tekstil, serta membaiknya kondisi perdagangan internasional seiring dengan pemulihan ekonomi global dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024	TW I-2025
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,36	4,52	4,58
Laju Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	Persen	13,75	-5,22	2,88	3,17
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Rp Triliun	349,00	378,83	402,10	415,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.5.7 Perindustrian

Sektor industri masih menjadi sektor unggulan atau primadona dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat mencapai 41,28 persen, dan posisi ini tetap bertahan hingga Triwulan I tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 41,35 persen. Capaian ini menegaskan bahwa sektor industri, khususnya industri pengolahan, terus memainkan peran penting sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Keunggulan sektor industri pengolahan dibandingkan sektor-sektor lainnya terlihat dari berbagai aspek strategis. Salah satu keunggulan utamanya adalah besarnya kapitalisasi investasi yang tertanam, baik dari sumber domestik maupun investasi asing langsung. Selain itu, sektor ini memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja secara langsung, terutama di kawasan-kawasan industri utama

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang menjadi pusat kegiatan manufaktur regional. Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi, khususnya melalui produk-produk ekspor unggulan seperti otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil.

Sepanjang tahun 2024, sektor industri pengolahan menunjukkan tren pemulihan yang sangat positif. Kinerja ini didorong oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, seperti stabilitas harga energi dan bahan baku global, serta meningkatnya permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagang utama. Kebijakan hilirisasi yang diperkuat oleh pemerintah pusat juga turut memperkuat struktur sektor ini, khususnya dalam mendorong diversifikasi produk bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Industri Ramah Lingkungan telah mendorong banyak pelaku industri untuk mengadopsi modernisasi serta teknologi digital dalam proses produksi mereka.

Kinerja ekspor sektor industri pengolahan juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada akhir tahun 2024, terutama pada sub sektor otomotif dan elektronik. Hal ini merupakan dampak dari membaiknya permintaan global dan terbukanya akses pasar baru melalui berbagai perjanjian dagang bilateral dan regional, seperti Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dan Regional *Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang memberikan preferensi tarif dan kemudahan akses pasar bagi produk-produk manufaktur Indonesia.

Selama periode 2022 hingga 2024, struktur perekonomian Jawa Barat secara konsisten didominasi oleh empat kategori lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi di atas 8%, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian kehutanan dan perikanan, serta sektor konstruksi. Dari seluruh kategori tersebut, industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, baik dari sisi kontribusi nilai maupun dalam hal pertumbuhan.

Memasuki tahun 2025, khususnya pada triwulan pertama, sektor industri pengolahan tidak hanya bertahan sebagai kontributor utama PDRB, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang paling

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

dinamis. Hal ini sejalan dengan meningkatnya produktivitas sektor ini serta adopsi teknologi industri 4.0 yang semakin luas di kawasan-kawasan industri strategis seperti REBANA Metropolitan. Salah satu fenomena penting pada awal tahun ini adalah kenaikan harga energi global yang bersifat moderat, sehingga hanya memberikan tekanan terbatas terhadap biaya produksi sektor industri. Di sisi lain, pola investasi juga mengalami pergeseran, di mana minat investor mulai terarah pada sektor industri hijau, seperti produksi kendaraan listrik dan panel surya, yang mencerminkan orientasi industri masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai indikator tambahan, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan pada Triwulan I tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 3,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal positif atas pemulihan pasar kerja pasca pandemi, serta semakin menguatkan posisi sektor industri sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Jawa Barat secara menyeluruh. kinerja indikator bidang Perindustrian disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024	TW I-2025
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	4,74	4,89	4,93
PDRB Industri Non Migas	Rp Triliun	1.023,40	1.009,08	1.104,80	1.134,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.5.8 Transmigrasi

Perpindahan penduduk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Persentase transmigrasi yang ditempatkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 27,02 persen dibanding tahun sebelumnya, pada Tabel 2.90.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	84,09	111.11	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024

Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah penempatan. Daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Namun implementasi KSAD sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan kementerian terkait. Dikarenakan semua alokasi target dari Kementerian Desa sudah terpenuhi realisasinya.

2.1.3.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.6.1 Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari periode 2022 sampai dengan 2024 tergolong ke dalam Kategori A dan secara poin terus meningkat secara signifikan. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa Kategori A dengan interpretasi 'Memuaskan' mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, memiliki kinerja yang tinggi, dan sangat akuntabel. Di tahun 2024 secara nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari lima pemerintah daerah provinsi yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP ber-Kategori A dengan skor 88,89 poin.

Tabel 2.91
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	85.21 (A)	87.00 (A)	88,89 (A)

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Tingkat akuntabilitas kinerja yang memuaskan ini pun merata terjadi pada level unit kerja. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2024, dari 38 perangkat daerah sebanyak 13 Perangkat Daerah memperoleh hasil evaluasi SAKIP ber-Kategori A sementara 25 perangkat daerah memperoleh Kategori AA dengan rata-rata hasil penilaian 89,95. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki unit kerja yang telah mampu mewujudkan pemerintahan yang baik. Bahwa seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh sub unit sehingga pada unit tersebut praktik pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien telah terlaksana.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.64
Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2024



Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024

Di sisi lain, tingkat akuntabilitas kinerja yang memuaskan belum terlihat di seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari hasil evaluasi pada tahun 2023, hanya satu pemerintah daerah kota yang masuk ke dalam Kategori A. Sementara 22,22 persen di antaranya berada dalam rentang Kategori BB dan sebanyak 74,07 persen berada dalam rentang Kategori BB. Gambaran ini memperlihatkan bahwa mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat komitmen dalam manajemen kinerja baru terlihat pada sepertiga unit kerja. Di samping itu, pengukuran kinerja baru dilaksanakan hingga level eselon 2. Walau proses perbaikan terus memperlihatkan *tren* meningkat dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian PANRB, namun komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota perlu lebih ditingkatkan.

Gambar 2.65
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			
		2023	2024	PROGRES	PREDIKAT
1	KOTA BANDUNG	80,56	81,40	0,84	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			
		2023	2024	PROGRES	PREDIKAT
2	KOTA BOGOR	76,73	78,29	1,56	BB
3	KABUPATEN SUMEDANG	77,16	77,44	0,28	BB
4	KOTA SUKABUMI	77,73	76,36	-1,37	BB
5	KABUPATEN GARUT	74,91	75,93	1,02	BB
6	KABUPATEN BANDUNG	71,76	72,97	1,21	BB
7	KOTA TASIKMALAYA	71,83	71,11	-0,72	BB
8	KABUPATEN MAJALENGKA	68,00	70,52	2,52	BB
9	KABUPATEN BOGOR	69,06	69,38	0,32	B
10	KABUPATEN CIAMIS	69,30	69,28	-0,02	B
11	KOTA CIREBON	68,56	69,04	0,48	B
12	KABUPATEN SUBANG	68,32	69,01	0,69	B
13	KOTA BANJAR	68,30	68,89	0,59	B
14	KABUPATEN BANDUNG BARAT	68,59	68,85	0,26	B
15	KOTA DEPOK	67,32	68,80	1,48	B
16	KABUPATEN PANGANDARAN	67,99	67,98	-0,01	B
17	KABUPATEN KARAWANG	66,95	67,48	0,53	B
18	KOTA BEKASI	67,10	67,33	0,23	B
19	KABUPATEN CIANJUR	67,18	67,08	-0,10	B
20	KABUPATEN BEKASI	65,86	67,03	1,17	B
21	KABUPATEN SUKABUMI	66,21	66,84	0,63	B
22	KABUPATEN PURWAKARTA	66,57	66,34	-0,23	B
23	KOTA CIMAHI	65,90	66,22	0,32	B
24	KABUPATEN CIREBON	67,84	66,20	-1,64	B
25	KABUPATEN KUNINGAN	65,13	65,64	0,51	B
26	KABUPATEN INDRAMAYU	64,98	65,09	0,11	B
27	KABUPATEN TASIKMALAYA	64,20	64,80	0,60	B

Sumber: Kemenpan RB,2025

2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri diperoleh gambaran kinerja pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kondisi ini didorong oleh kinerja Perangkat Daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh 6 (enam) perangkat daerah.

Tabel 2.92
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat 4, Skor 3,6485, Status Tinggi (rilis tahun 2024)	Peringkat 2, Skor 3,6672, Status Tinggi (rilis tahun 2025)	belum rilis (perkiraan rilis di tahun 2026)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Ketercapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan didorong oleh adanya beberapa upaya yaitu:

a) Menginternalisasikan hasil LPPD ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja melalui harmonisasi target capaian kinerja sebagai dasar prioritas pengalokasian anggaran;
b) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik;
c) Menyelenggarakan bimbingan teknis bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan capaian kinerja serta menyusun data dukung akurat yang dapat dipertanggungjawabkan; serta
d) Menyusun manual tata cara perhitungan dan penyajian data dukung yang disepakati bersama oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota.

3) Level Kematangan/Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Indeks tata kelola pengadaan merupakan indikator yang mengukur tata kelola pengadaan barang jasa dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

maupun dari segi sistem pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan juga merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Adapun penilaian indeks tata kelola pengadaan diperoleh melalui pemenuhan tiga indikator yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
   a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
   b. *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
   c. *E-Purchasing*;
   d. *Non E-Tendering* & *Non E-Purchasing*; dan
   e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai kategori "Baik" sejak Tahun 2022. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya kategori "Baik" dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu antara lain:

a) Terbentuknya kelembagaan UKPBJ melalui terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas, fungsi serta organisasi kelembagaan yang jelas dan terdokumentasi sesuai peraturan perundangan.
b) Terpenuhinya 17 standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan;
c) Terpenuhinya kebutuhan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
d) Tercapainya tingkat kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif);
e) Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik (SIRUP, *e-Tendering, e-Purchasing*, SIKAP) secara terpadu.
f) Terselenggaranya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak;
g) Terpenuhinya kepatuhan dalam pemanfaatan sistem pengadaan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,2 (Baik)	81,08 (Baik)	90,29 (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025

4) Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Lainnya

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat juga dinilai dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

a. Kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkualitas. Hal ini ditandai dengan nilai kualitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 62,72 poin, nilai kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 78,72 poin, nilai kualitas kebijakan bidang Perekonomian sebesar 84,57 poin, dan nilai kualitas kebijakan bidang BUMD, Investasi Daerah dan BLUD sebesar 78,06 poin. Pencapaian tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas agenda setting dan formulasi kebijakan serta implementasi dan evaluasi kebijakan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesejahteraan Rakyat, bidang Perekonomian, serta bidang BUMD, Investasi Daerah, dan BLUD;
b. Pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri (PDN), yang ditandai dengan persentase penyedia ber-PDN yang mendapatkan nilai preferensi harga dan menentukan peringkat penawaran. Pencapaian in didukung oleh regulasi PDN diterapkan secara efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang ditandai dengan persentase penerapan regulasi diterapkan secara efektif sebesar 100%. Upaya yang mendorong pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri, yaitu penerapan regulasi spesifikasi PDN dalam pelaksanaan PBJ, Evaluasi kandungan PDN dalam produk pekerjaan dan Penerapan regulasi preferensi harga dalam pemilihan penyedia;
c. Produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertata, yang ditandai dengan persentase produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang harmonis sebesar 100%. Upaya yang mendorong produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertata, yaitu Meningkatnya desa/kelurahan sadar hukum di Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Barat, Produk hukum daerah sesuai standar, Meningkatnya kualitas naskah akademik yang diselaraskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi produk hukum daerah provinsi sesuai standar, serta Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM.

d. Mekanisme kerja baru diterapkan perangkat daerah, yang ditandai dengan tingkat implementasi mekanisme baru dan peta proses bisnis sesuai kebutuhan kinerja dan mendorong terbentuknya organisasi berbasis kinerja, yang ditandai dengan persentase rekomendasi perbaikan proses bisnis yang sesuai ketentuan arsitektur kinerja sebesar 100%

e. Kualitas Layanan Sekretariat Daerah sangat baik. Hal ini ditandai dengan nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal setda "sangat baik" dengan kategori "A", kualifikasi kepuasan layanan pimpinan "sangat baik", dan kepuasan terhadap layanan keprotokolan "sangat baik". Hasil tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan *stakeholder* yang dilaksanakan selama Tahun 2024. Pencapaian tersebut didorong oleh meningkatnya meningkatnya kualitas layanan biro umum, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja setda serta kualitas layanan kepegawaian dan kearsipan. Selain itu, didorong juga oleh meningkatnya kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pimpinan serta didorong oleh meningkatnya kualitas layanan keprotokolan di Tahun 2024.

f. Nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal setda pada Tahun 2024 sangat baik dengan kategori A. hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas layanan biro umum, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja setda serta kualitas layanan kepegawaian dan kearsipan;

g. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti merupakan Indikator yang menggambarkan kewajiban para pihak yang dicantumkan dalam kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pihak lain (pemda lain, instansi luar negeri, pihak ketiga) dipenuhi seluruhnya. Pada Tahun 2024, realisasi persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen dan meningkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

dari tahun sebelumnya sebesar 2,45 persen serta telah melebihi target jangka menengah sebesar 98,05 persen. Ketercapaian tersebut didorong oleh komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pihak mitra kerja sama dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati serta didorong juga oleh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti;

h. Calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan yang diusulkan ke DPRD dapat dilakukan sesuai harapan. Hal ini diperlihatkan dari realisasi persentase dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang dianalisis sebesar 100 persen. Sampai dengan tahun 2023 telah disampaikan usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru sebanyak 9 (sembilan) usulan yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara. Pencapaian tersebut didorong oleh usulan daerah otonomi baru dari kabupaten/kota induk yang memenuhi persyaratan dan komitmen Gubernur dan DPRD Jawa Barat dalam mendorong pembentukan daerah persiapan otonomi baru di Provinsi Jawa Barat;

i. Tata Kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat dimensi deregulasi kebijakan semakin efektif di tahun 2023. Hal ini ditandai dengan realisasi penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM yang tertata sebesar 100 persen. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah mencapai target jangka menengah. Ketercapaian tersebut didorong oleh meningkatnya peraturan perundang-undangan yang harmonis yang ditandai dengan nilai deregulasi kebijakan sebesar 92,60 poin. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan produk hukum sebanyak 9 (sembilan) Peraturan Daerah (Perda), 7 (tujuh) Peraturan Gubernur (Pergub) dan 961 Keputusan Gubernur (Kepgub). Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengevaluasi produk hukum Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 687 produk hukum;

j. Kinerja fasilitasi administrasi pemerintahan umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan realisasi persentase Fasilitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2023 sebesar 100 persen. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah mencapai target jangka menengah. Ketercapaian tersebut didorong oleh tertibnya administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD baik Provinsi maupun kabupaten/kota, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota.

2.1.3.7 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.7.1 Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

2) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah tersusun adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut merupakan dokumen teknokratis perencanaan jangka menengah pada masa transisi dimana terdapat kekosongan pimpinan kepala daerah sebelum dilaksanakannya pilkada serentak pada tahun 2024. RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat belum tersedia. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan rancangan akhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih.

3) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, (b) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, (c) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, (d) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan (d). Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 100 persen.

5) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

2.1.3.7.2 Keuangan

Salah satu bentuk prestasi dari kinerja pengelolaan keuangan yang juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2022-2024. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di antaranya adalah 1) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (*Adequate disclosures*) pada Laporan Keuangan, 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta 4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.94
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.3.7.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, indikator kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu alat ukur penting untuk menilai kualitas tata kelola sumber daya manusia aparatur. Dua indikator utama yang digunakan dalam menilai kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.95
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Sistem Merit	poin	396,5	396,5	400
Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL*	persen	116	100	N/A
Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat*	persen	200	100	N/A
Indeks Profesionalitas ASN	poin	94,03	89,89	84,61**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025
Keterangan : (*) Indikator sudah tidak digunakan sejak Tahun 2024
(**)Data sementara berdasarkan perhitungan mandiri

Indeks Sistem Merit mengukur penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, yang meliputi aspek (1) Perencanaan Kebutuhan, (2) Pengadaan, (3) Pengembangan Karier, (4) Promosi dan Mutasi; (5) Manajemen Kinerja, (5) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, (7) Perlindungan dan Pelayanan, dan (8) Sistem Informasi. Indeks ini penting karena sistem merit yang baik mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, kompetitif, dan akuntabel.

Dalam periode 2022–2024, capaian Indeks Sistem Merit menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Tren peningkatan ini menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pemerintah dalam membangun manajemen ASN yang berbasis kinerja dan kompetensi. Faktor utama yang mendorong pencapaian tersebut meliputi optimalisasi kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen berbasis merit, serta penguatan sistem informasi kepegawaian.

Indeks Profesionalitas ASN–mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Bagi pegawai, Indeks Profesionalitas ASN berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan guna meningkatkan tingkat profesionalitas sebagai aparatur negara. Sementara itu, bagi instansi pemerintah hasil pengukuran ini menjadi acuan dalam merancang strategi pengembangan ASN secara menyeluruh pada level organisasi.

Berbeda dengan Indeks Sistem Merit, capaian Indeks Profesionalitas ASN dalam periode 2022–2024 mengalami fluktuasi yang mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi profesionalitas ASN. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengembangan ASN, dan belum terintegrasinya data kepegawaian Provinsi Jawa Barat dengan data BKN pada SIASN.

2.1.3.7.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan atau Riset dan Inovasi sangat diperlukan dalam Pembangunan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah, Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, landasan pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah, naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah, dan/atau solusi permasalahan pembangunan. Pelaksanaan kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan atau Riset dan Inovasi diukur melalui indikator kinerja berikut ini.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.96
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	poin	69,15 (sangat inovatif)	74,77 (sangat inovatif)	81,27 (sangat inovatif)
Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Bior Pemprov Jabar/Pemerintah Kab/Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya*	persen	100	100	N/A
Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI)*	jumlah	18	40	N/A
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dirujuk oleh Dokumen Perencanaan Daerah**	persen	N/A	N/A	100
Persentase Kematangan Inovasi Daerah**	persen	N/A	N/A	79,77

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan : (*) Indikator sudah tidak digunakan sejak Tahun 2024
(**) Indikator baru digunakan pada Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat menggambarkan bahwa penyelenggaraan inovasi Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terus melakukan perbaikan melalui berbagai program dan kegiatan sehingga penyelenggaraannya terus meningkat. Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 81,27 poin membawa Jawa Barat menjadi Peringkat ke-3 secara nasional di antara Provinsi lainnya di Indonesia, meningkat dari Tahun 2023 yang ada pada peringkat ke-4. Sementara itu, tingkat kematangan inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mencapai 79,77 persen. Capaian tersebut melebihi dari yang ditargetkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 66,38 persen. Tingkat kematangan inovasi daerah mengacu pada sejauh mana inovasi telah diterapkan dan dikembangkan di suatu daerah serta seberapa efektif inovasi tersebut dalam mencapai tujuan yang diukur dengan indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

Seluruh hasil kelitbangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah disebarluaskan kepada seluruh *stakeholders* pembangunan daerah. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dirujuk oleh Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 telah mencapai 100 persen

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

yang artinya seluruh penelitian dan pengembangan yang dilakukan telah digunakan sebagai bahan rujukan dalam perumusan dokumen perencanaan sekaligus perumusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan peran kelitbangan dalam pembangunan daerah.

2.1.3.7.5 Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B). Berdasarkan tabel di bawah, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja urusan pengawasan mengalami kenaikan dan terdapat pula yang tetap. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, indikator kinerja urusan pengawasan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022- 2024

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	opini	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	persen	98,85	97,62*	97
3.	Tingkat kapabilitas APIP	level	3	N/A	3
4.	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	level	3	3	3

Sumber: LKPJ Inspektorat 2023, Tahun 2024
Keterangan: *data per tanggal 5 Februari 2024

2.1.3.7.6 Pemerintahan Umum

Masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi di Jawa Barat terbina dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi bangsa Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 2.98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Realisasi persentase masyarakat yang menerapkkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi sebesar 100% artinya terdapat 10.568 orang telah menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Penurunan Potensi Konflik Sosial berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Penurunan Potensi Konflik Sosial sebagaimana dalam tabel 2.98 diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%. Realisasi penurunan potensi konflik sosial sebesar 100% artinya terjadi penurunan potensi konflik dari 19 potensi konflik tahun 2023 menjadi tidak ada.

Ketercapaian ini berkaitan dengan upaya Bakesbangpol dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan politik bagi generasi muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota parpol serta kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam rangka memberikan pemahaman tentang pendidikan politik di Jawa Barat serta Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai Politik serta Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat, dan Rapat Koordinasi Tim Pokja IDI. Berikut Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Tabel 2.98
Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1.	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa*	persen	106	100	N/A
2.	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi*	persen	N/A	100	N/A
3.	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi **	persen	N/A	N/A	100
4.	Persentase Penurunan Konflik Sosial **	persen	N/A	N/A	100

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2025
Keterangan : (*) Indikator sudah tidak digunakan sejak Tahun 2024
(**) Indikator baru digunakan pada Tahun 2024

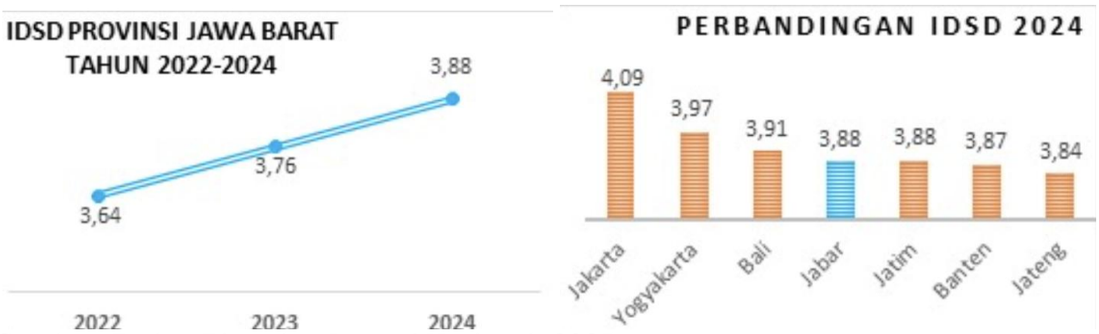
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pemanfaatan dan optimalisasi potensi suatu daerah sangat dipengaruhi produktivitas daerah itu sendiri. Badan Riset dan Inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Nasional (BRIN) telah membuat instrumen pengukuran berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 2.66
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat mencatat skor Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,88, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 3,43 dan menempatkan provinsi ini di peringkat keempat baik di tingkat Pulau Jawa dan Bali maupun secara nasional. Komponen dengan skor tertinggi dalam indeks tersebut adalah aspek inovasi, yang mencakup pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi, mencerminkan kemudahan dalam memulai maupun menghentikan usaha serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah. Kekuatan ini menjadi modal penting bagi daya saing Jawa Barat. Namun demikian, perhatian lebih perlu diberikan pada aspek pasar yang mencatat skor terendah dibandingkan komponen lainnya, khususnya pada pilar pasar produk yang menunjukkan masih rendahnya keterbukaan dan kesetaraan peluang bersaing antar pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang adil, khususnya di sektor jasa dan pengendalian dominasi pasar.

Pengukuran daya saing daerah memperhatikan komponen-komponen seperti kualitas SDM, pemanfaatan IPTEK, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan aspek lainnya yang diuraikan dalam penjelasan berikut.

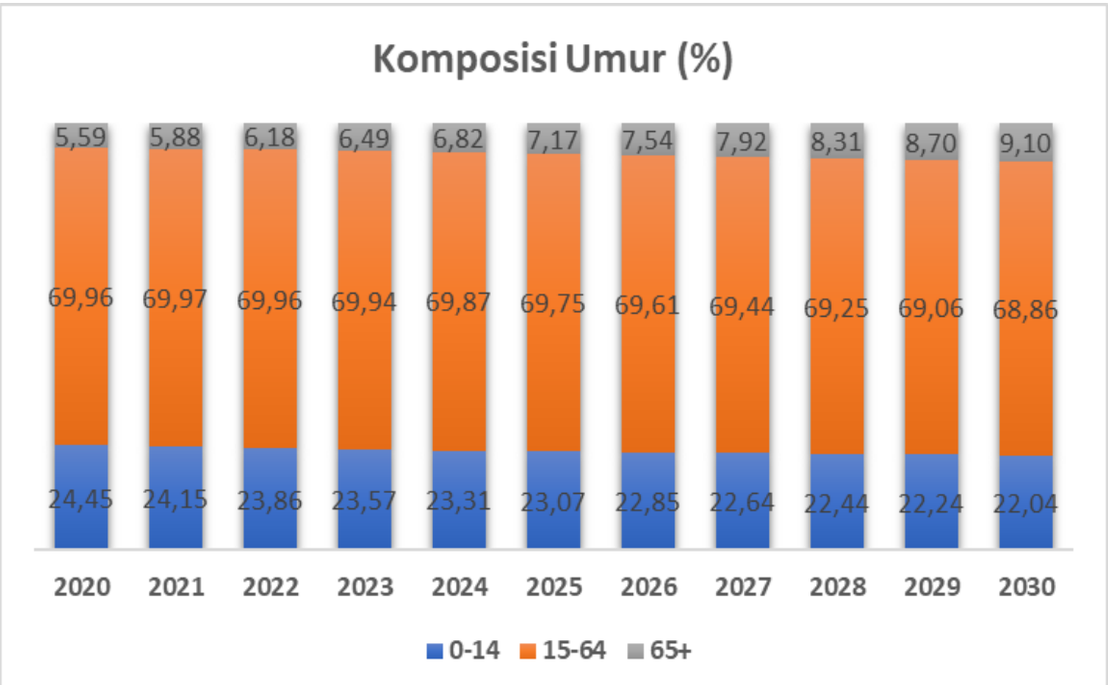
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Daerah yang menunjukkan daya saing Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat yaitu Angka/Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Berdasarkan struktur umur penduduk, Jawa Barat memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia ini menjadi kekuatan utama dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, keberadaan penduduk usia muda (0-14 tahun) yang cukup besar mencerminkan potensi generasi penerus, meskipun menuntut investasi besar dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja berkualitas.

Gambar 2.67
Kelompok Usia Penduduk



Sumber : BPS, 2024, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Proporsi penduduk usia produktif yang besar memberi peluang bagi Jawa Barat untuk memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif, yaitu anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (>64 tahun). Kondisi ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan *output* ekonomi jika penduduk produktif didukung oleh keterampilan yang relevan dan lapangan kerja yang memadai. Namun, tanpa persiapan yang baik, potensi ini bisa menjadi beban, terutama jika terjadi pengangguran massal.

Namun, proporsi usia produktif di Provinsi Jawa Barat terlihat sedikit demi sedikit terus mengalami penurunan dari sebesar 69,96% pada tahun 2020 menjadi 69,87% pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan menjadi 68,86% di tahun 2030.

Terjadinya pengurangan usia produktif utamanya disebabkan oleh semakin rendahnya tingkat kelahiran dan semakin tingginya derajat kesehatan yang menyebabkan peningkatan usia harapan hidup yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Meskipun jumlah penduduk usia lanjut masih relatif kecil, tren penuaan penduduk tetap perlu diantisipasi. Dalam beberapa dekade mendatang, peningkatan angka harapan hidup akan meningkatkan proporsi penduduk lansia. Hal ini menuntut perhatian khusus terhadap kebijakan pensiun, layanan kesehatan lansia, dan sistem perlindungan sosial yang memadai.

Untuk melihat besaran beban yang harus ditanggung usia produktif terhadap usia non produktif digunakan indeks yang disebut dengan rasio ketergantungan. Kaitannya dengan aspek daya saing daerah, ditunjukkan dengan membandingkan dengan angka nasional dan Pulau Jawa. Gambar berikut menunjukkan proyeksi rasio ketergantungan untuk Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan pada periode 2020-2030.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

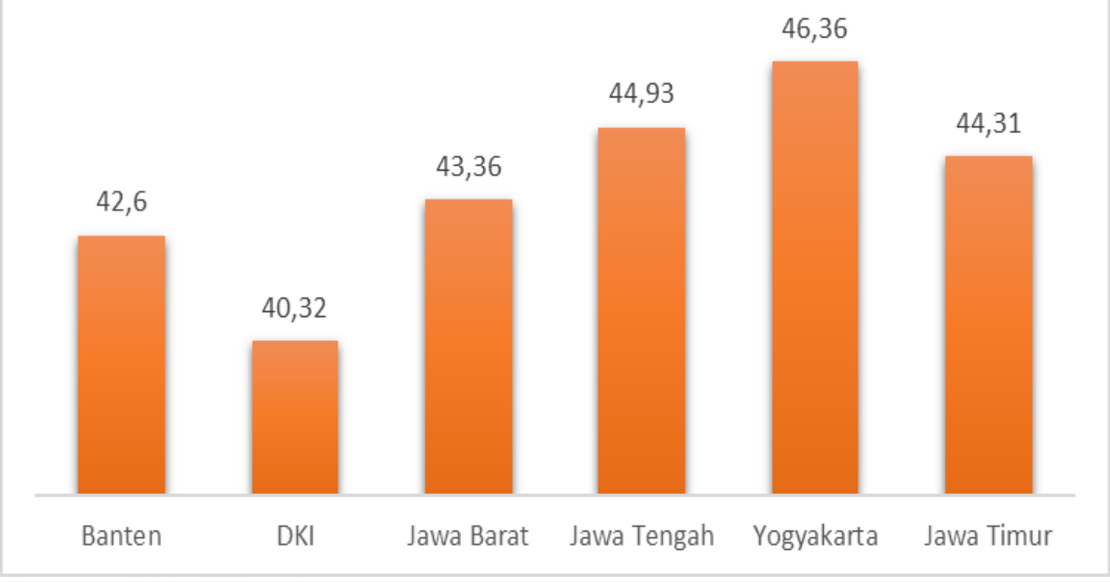
Gambar 2.68
Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2030



Sumber : BPS, 2024, diolah

Gambar di bawah membandingkan rasio ketergantungan pada tahun 2024 di berbagai provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat. Dengan rasio ketergantungan sebesar 43,36. Rasio ini berpengaruh pada kemampuan daya saing sumber daya manusia di masing-masing wilayah.

Gambar 2.69
Perbandingan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat dan Pulau Jawa Tahun 2024



Sumber : BPS, 2024, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Dibandingkan dengan daerah lainnya, Jawa Barat termasuk memiliki proporsi usia produktif yang relatif seimbang. Struktur umur penduduk yang relatif mendukung ini memberi Jawa Barat peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, potensi tersebut hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah agar kekuatan demografi benar-benar menjadi keunggulan pembangunan daerah.

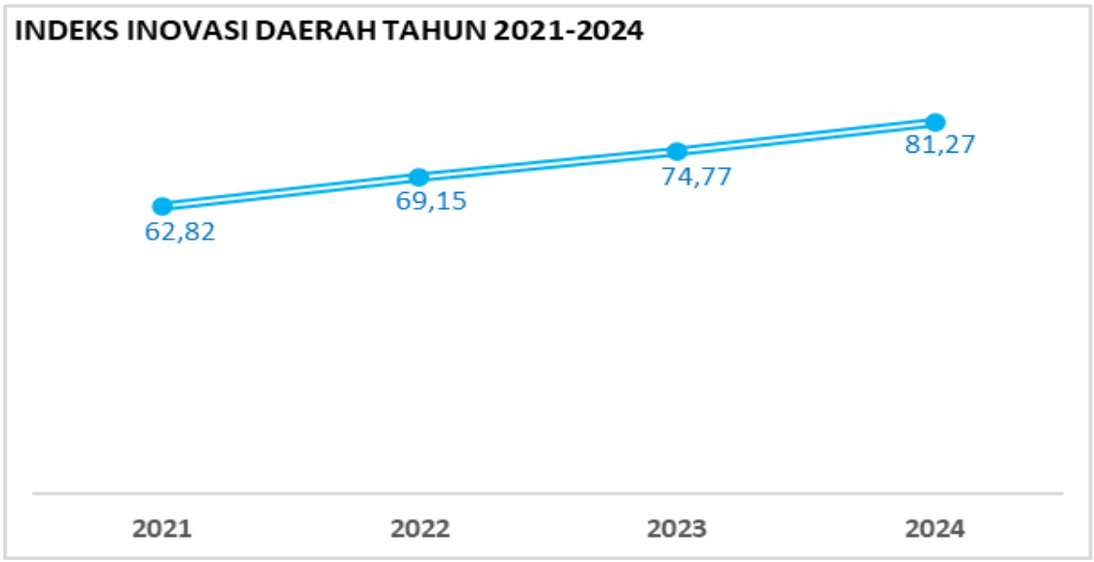
2.1.4.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan penyelenggaraan inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terus melakukan perbaikan melalui berbagai program dan kegiatan sehingga penyelenggaraannya terus meningkat. Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 81,27 poin dengan predikat Sangat Inovatif membawa Jawa Barat menjadi Peringkat ke-3 secara nasional di atas Provinsi lainnya di Indonesia, meningkat dari Tahun 2023 yang mendapat peringkat ke-4. Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat ini menggambarkan bahwa tingkat inovasi Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Capaian Indeks Inovasi Daerah sebagai salah satu gambaran dari Daya Saing Jawa Barat ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.70
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Dari aspek produktivitas ekonomi, kondisi ketenagakerjaan dan dinamika pasar kerja memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas sektor ekonomi. Tiga elemen utama dalam analisis pasar tenaga kerja adalah Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah penduduk usia kerja yang besar mencerminkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi, tergantung bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, tanpa batas usia maksimal, sehingga kelompok usia 65 tahun ke atas pun tetap masuk kategori ini meskipun secara umum dianggap tidak lagi produktif.

Namun, tidak semua penduduk usia kerja aktif secara ekonomi, karena ada yang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja, dan tingkat keterlibatan mereka diukur melalui TPAK. Indikator TPAK menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencerminkan pemanfaatan potensi tenaga kerja. TPAK yang tinggi umumnya menandakan pasar tenaga kerja yang sehat, meskipun perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi kualitas pekerjaan dan ketenagakerjaan secara keseluruhan.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

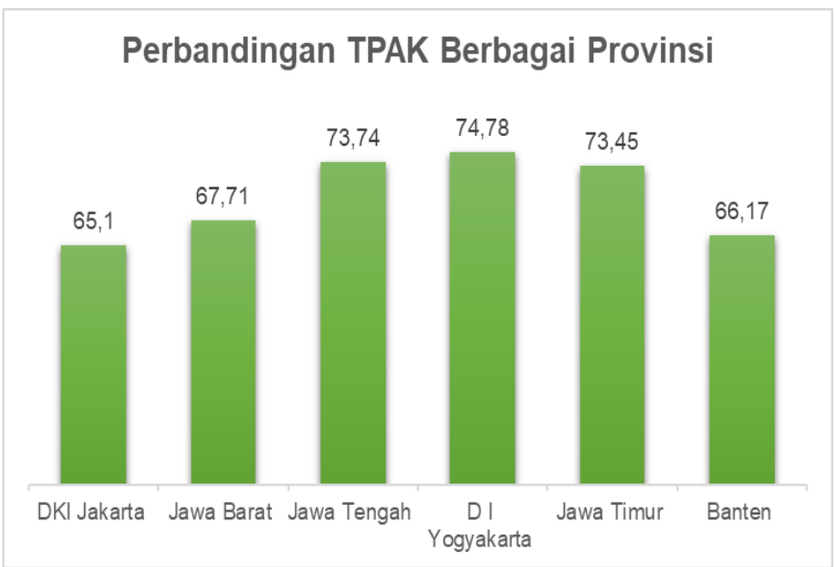
Gambar 2.71
TPAK Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : BPS, 2024

Grafik menunjukkan selama periode 2021–2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun tren TPAK di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif, kesenjangan dengan tingkat nasional tetap terlihat. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, TPAK Jawa Barat pada 2024 menempati posisi kedua terendah, yang menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja Jawa Barat masih relatif rendah meski terus membaik.

Gambar 2.72
Perbandingan TPAK Jawa Barat dengan Provinsi Lain



Sumber : BPS, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Meskipun TPAK Jawa Barat menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi di sektor produktif. Dengan penguatan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan dan menyamai capaian provinsi lain di Pulau Jawa.

2.1.4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

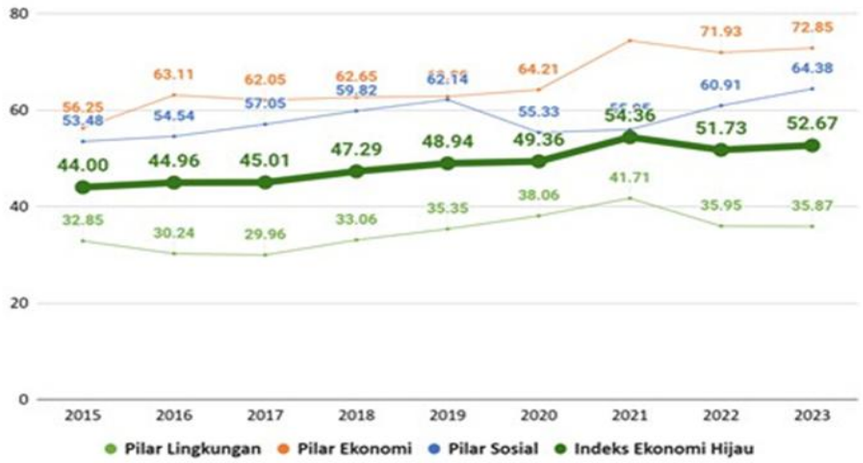
Pengembangan Ekonomi Hijau menjadi sasaran utama dalam meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan pada pengukuran indeks ekonomi hijau di Jawa Barat hanya mengukur 14 indikator dari 15 indikator multidimensi yang mencakup keterkaitan antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi sebagai tiga pilar utama keberlanjutan. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya indikator lahan gambut pada daerah administrasi Provinsi Jawa Barat sehingga indikator tersebut tidak dimasukkan untuk menghitung indeks ekonomi hijau di Provinsi Jawa Barat.

Secara keseluruhan, Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode sembilan tahun (2015-2023), seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut dengan skor komposit 52,67 poin pada tahun 2023 dengan pilar tertinggi dari pilar ekonomi sebesar 72.85 poin.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.73
Capaian Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat Tahun 2015-2023



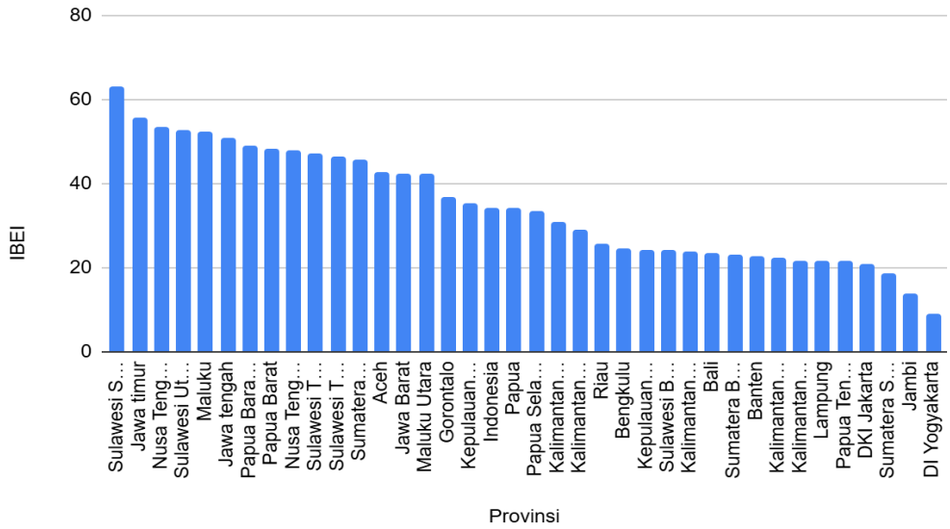
Sumber : Bappenas, 2024

Skor komposit pilar sosial mencapai 64,38 poin, dipengaruhi oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang masing-masing masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Sementara itu, pilar lingkungan mencatat indeks komposit terendah, disebabkan oleh tantangan dalam hal tutupan lahan, kualitas air permukaan (parameter BOD), dan penurunan emisi gas rumah kaca. Meski demikian, kualitas udara tercatat memberi kontribusi positif pada pilar lingkungan, terutama pada tahun 2015 dan 2023. Namun, intervensi yang lebih masif tetap diperlukan, khususnya pada sektor energi dan pengendalian pencemaran air.

Selain fokus pada ekonomi hijau, Jawa Barat juga mulai mengembangkan pendekatan ekonomi biru, yakni konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

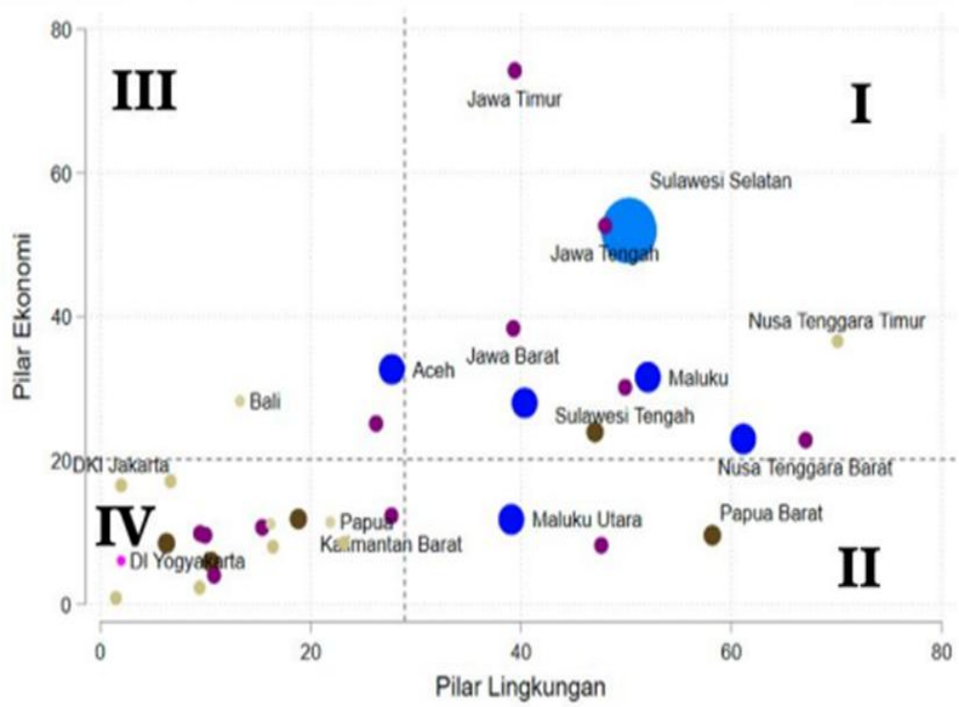
Gambar 2.74
Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2023



Sumber : Bappenas, 2024

Hasil dari perhitungan Bappenas menggambarkan bahwa secara keseluruhan dari 3 pilar, poin Indeks Ekonomi Biru Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 42,56 berada di atas rata-rata Nasional sebesar 34,25. Namun dibandingkan dengan Provinsi lain Jawa Barat menduduki rangking 14.

Gambar 2.75
Analisis Kuadran IBEI Tahun 2023



Sumber : Bappenas, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Berdasarkan grafik analisis kuadran IBEI 2023, Provinsi Jawa Barat berada di kuadran I yang memiliki arti bahwa skor pilar lingkungan dan ekonomi berada di atas rata-rata nasional. Namun, poin pilar sosial IBEI Provinsi Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional yang memiliki poin sebesar 53,22, sedangkan Jawa Barat sebesar 47,89 poin, hal ini terjadi karena Indeks pilar sosial subpilar kesehatan yang pembobotannya mencapai 20,78 persen, poin Jawa Barat Kecil, terutama pada indikator Persentase penduduk desa pesisir yang memiliki jaminan kesehatan poinnya 0,01.

2.1.4.4 Transformasi Digital

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diukur melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Indeks Transformasi Digital Nasional.

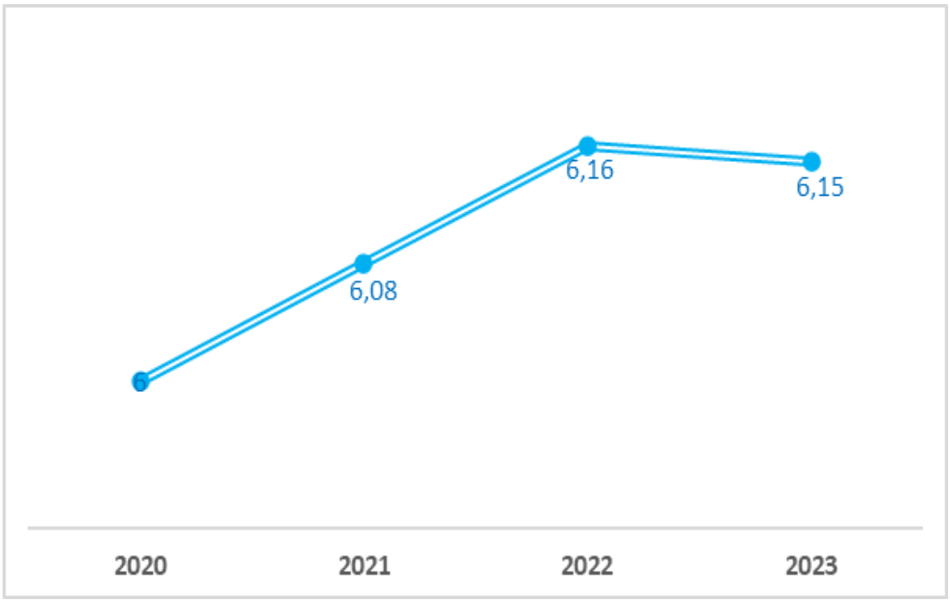
2.1.4.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu berada di atas IP-TIK nasional. IP-TIK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jawa Barat terus bertumbuh. Sementara itu, pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Terjadi penurunan poin pada Sub Indeks Akses dan Infrastruktur TIK serta Sub Indeks Keahlian TIK. Meskipun penurunan yang terjadi relatif tidak signifikan, namun hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus bagi Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bentuk upaya transformasi digital di Jawa Barat.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.76
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

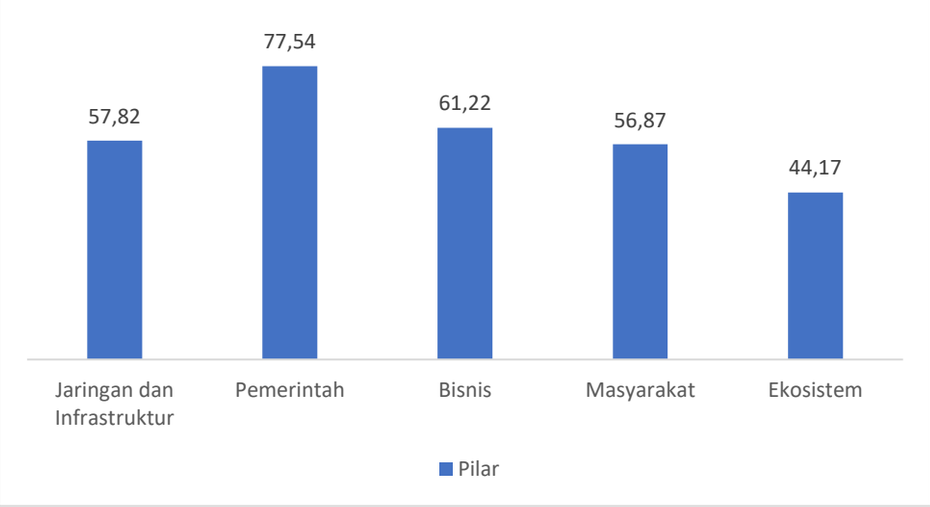


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.1.4.4.2 Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Gambar 2.77
Indeks Transformasi Digital Nasional
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Hasil Indeks Transformasi Digital Nasional menunjukkan Provinsi Jawa Barat telah memiliki tingkat transformasi digital yang relatif cukup baik di Indonesia. Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar 60,26 poin. Berdasarkan hasil analisis per pilar, pilar pemerintah digital menjadi satu-satunya pilar yang masuk ke dalam Klasifikasi A. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menciptakan lingkungan investasi dan kebijakan yang progresif dalam mendukung percepatan transformasi digital, penerapan teknologi digital dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik, dan kesiapan pemerintah dalam mengadopsi berbagai *new emerging technologies*. Dalam pemerintahan digital, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Provinsi guna mengamankan dan melindungi informasi yang dikelola Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting. Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi Provinsi Jawa Barat oleh BSSN pun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Guna memperkuat persandian dan siber, Provinsi Jawa Barat telah membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer sejak Tahun 2020 serta terus melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 17 Kabupaten/Kota yang juga telah membentuk CSIRT, yang artinya masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang belum membentuk CSIRT. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada, Provinsi Jawa Barat perlu terus melakukan peningkatan pelayanan publik, komunikasi dan informasi, serta keamanan siber dan aspek pemerintahan lainnya untuk mendukung transformasi digital di Jawa Barat.

Selain itu, pilar bisnis juga memiliki kinerja yang cukup baik, ditandai dengan perolehan skor sebesar 61,22 dan dikategorikan ke dalam Klasifikasi B pada tahun 2022. Perolehan skor yang cukup baik pada pilar pemerintah dan bisnis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi strategis untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di tingkat regional, yang berpotensi menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Meskipun pilar-pilar pembangunan digital di Jawa Barat telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi masih terdapat ruang untuk mengembangkan beragam potensi yang mendukung kemajuan dan keberlanjutan pembangunan digital. Penguatan dalam aspek infrastruktur digital dan masyarakat digital menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pertumbuhan digital. Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur digital seperti pusat data Jawa Barat dan penyediaan akses internet melalui wifi gratis di area publik serta upaya dalam pengentasan desa *blank spot*. Meski demikian, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan survei lapangan masing-masing Dinas Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa masih terdapat 8 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa selular yang tersebar di 5 Kabupaten dan 61 Desa *Blank Spot* dengan kriteria tanpa konektivitas fiber optik yang tersebar di 12 Kabupaten.

Selanjutnya, pilar masyarakat di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Namun, terdapat aspek yang masih perlu ditingkatkan, utamanya pada upaya untuk meningkatkan keterampilan digital bagi masyarakat umum dan kelompok masyarakat khusus. Program pelatihan perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan digital dan mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi yang terus berkembang.

2.1.4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.4.5.1 Perdagangan

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit menurun dibandingkan 5,00 persen pada tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dengan andil sebesar 1,51 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 12,09 persen, menandakan ketergantungan signifikan terhadap pasar global. Nilai ekspor pada 2024 mencapai USD 37,87 miliar, meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun 2023, dengan ekspor nonmigas mendominasi sebesar USD 37,53 miliar dan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

industri pengolahan (3,54 persen). Namun, sektor migas, pertanian, dan pertambangan justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,00 persen, 6,76 persen, dan 27,65 persen. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat masih berasal dari industri pengolahan sebesar 41,8 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi kendaraan bermotor yang menyumbang 14,43 persen.

Tabel 2.99
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,22	4,36	4,85
Laju Pertumbuhan Eksport Nonmigas	Persen	27,51	13,75	5,22	3,45
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun	319,59	349,00	378,83	408,25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Di sisi lain, perdagangan Jawa Barat mengalami surplus perdagangan signifikan dengan nilai ekspor mencapai USD 31,52 miliar, berkontribusi 14,51% terhadap total ekspor Indonesia, dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand; meskipun ekspor mengalami penurunan 1,96% pada Desember 2024, neraca perdagangan tetap surplus USD 1,98 miliar, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang kuat pada pasar ekspor.

2.1.4.5.2 Perindustrian

Dalam struktur ekonomi Jawa Barat selama periode 2021–2024, terdapat empat sektor yang konsisten menyumbang lebih dari 8 persen terhadap PDRB, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi kendaraan bermotor), pertanian-kehutanan-perikanan, serta konstruksi. Di antara sektor-sektor tersebut, industri pengolahan tetap menjadi yang paling dominan. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini menurun dari 4,74 persen pada 2023 menjadi 3,52 persen, akibat menurunnya permintaan global, kenaikan biaya produksi karena fluktuasi harga bahan baku dan energi, serta melambatnya investasi di beberapa sub sektor strategis.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

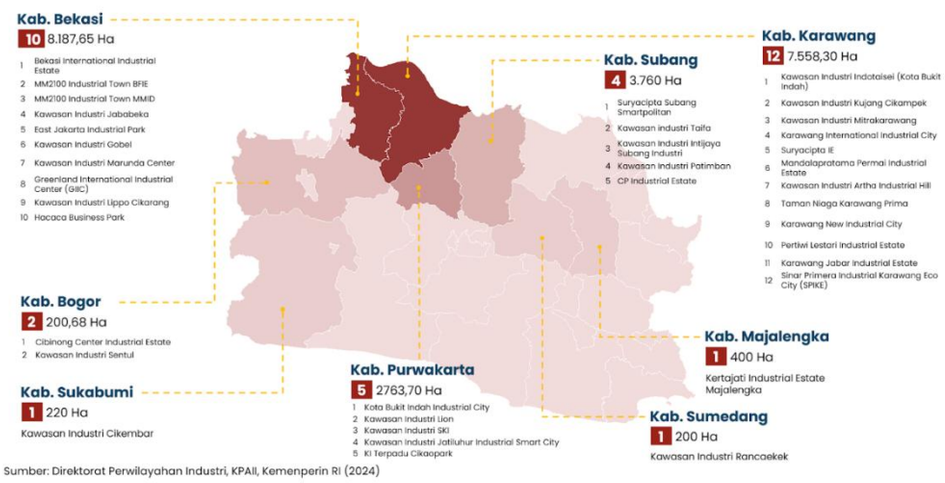
Tabel 2.100
Capaian Indikator Bidang Perindustrian
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	7,00	4,74	3,52
PDRB Industri Non Migas	Rp Triliun	921,58	1.023,40	1.009,08	1.168,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan luas kawasan industri terbesar di Indonesia, yakni seluas 28.328 Ha atau setara dengan 33,7 persen dari keseluruhan kawasan industri di Indonesia dengan jumlah perusahaan sebanyak 50 perusahaan. Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kawasan industri yang pembangunannya tidak hanya terfokus di Jawa Barat bagian barat, namun di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Kawasan-kawasan Industri tersebut tersebar di 8 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang.

Gambar 2.78
Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat



Sumber : Direktorat Perwilayahan Industri, KPAII, Kemenperin RI (2024)

Secara rinci, data persebaran industri besar dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Barat, bisa dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.101
Data Sebaran Industri Besar dan IKM di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bandung	704	766	940	1.177
2	Kab. Bandung Barat	246	273	330	747
3	Kab. Bekasi	2.436	2.569	2.784	2.986
4	Kab. Bogor	1.141	1.303	1.685	2.235
5	Kab. Ciamis	16	28	43	153
6	Kab. Cianjur	79	88	101	164
7	Kab. Cirebon	261	286	338	445
8	Kab. Garut	40	76	117	188
9	Kab. Indramayu	31	40	51	74
10	Kab. Karawang	668	701	762	836
11	Kab. Kuningan	20	24	46	105
12	Kab. Majalengka	65	79	127	341
13	Kab. Pangandaran	2	3	8	197
14	Kab. Purwakarta	215	263	287	333
15	Kab. Subang	109	120	138	165
16	Kab. Sukabumi	166	196	252	342
17	Kab. Sumedang	112	125	171	204
18	Kab. Tasikmalaya	15	50	78	150
19	Kota Bandung	618	701	907	1.190
20	Kota Banjar	37	40	45	55
21	Kota Bekasi	723	800	965	1.118
22	Kota Bogor	142	164	224	372
23	Kota Cimahi	186	207	258	353
24	Kota Cirebon	34	40	46	73
25	Kota Depok	156	198	278	451
	Jawa Barat	**8.287**	**9.215**	**11.084**	**14.620**

Sumber : Satu Data Disperindag, 2025

2.1.4.5.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam ekosistemnya, UMKM memiliki keterkaitan dan saling bersinergi dengan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas di sektor UMKM akan berdampak positif terhadap daya saing produk lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat bagi pembangunan ekonomi. Adapun kondisi eksisting UMKM di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Kondisi Eksisting Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total
1	Bogor	413.103	2.026	417	415.546
2	Sukabumi	234.258	374	81	234.713
3	Cianjur	214.717	303	77	215.097

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total
4	Bandung	324.860	1.140	286	326.286
5	Garut	301.552	241	87	301.880
6	Tasikmalaya	193.533	67	49	193.649
7	Ciamis	144.250	167	52	144.469
8	Kuningan	142.172	159	37	142.368
9	Cirebon	225.254	433	71	225.758
10	Majalengka	173.806	180	45	174.031
11	Sumedang	137.617	83	34	137.734
12	Indramayu	185.255	272	67	185.594
13	Subang	149.681	361	69	150.111
14	Purwakarta	94.787	157	39	94.983
15	Karawang	282.798	331	86	283.215
16	Bekasi	321.865	774	220	322.859
17	Bandung Barat	170.748	280	92	171.120
18	Pangandaran	95.429	386	37	95.852
19	Kota Bogor	105.449	224	104	105.777
20	Kota Sukabumi	55.122	44	33	55.199
21	Kota Bandung	351.509	809	286	352.604
22	Kota Cirebon	52.506	691	105	53.302
23	Kota Bekasi	198.051	538	226	198.815
24	Kota Depok	198.656	564	202	199.422
25	Kota Cimahi	86.890	920	115	87.925
26	Kota Tasikmalaya	133.794	124	60	133.978
27	Kota Banjar	33.365	45	10	33.420
	Provinsi Jawa Barat	5.021.027	11.693	2.987	5.035.707

Sumber : Kementerian UMKM (2025)

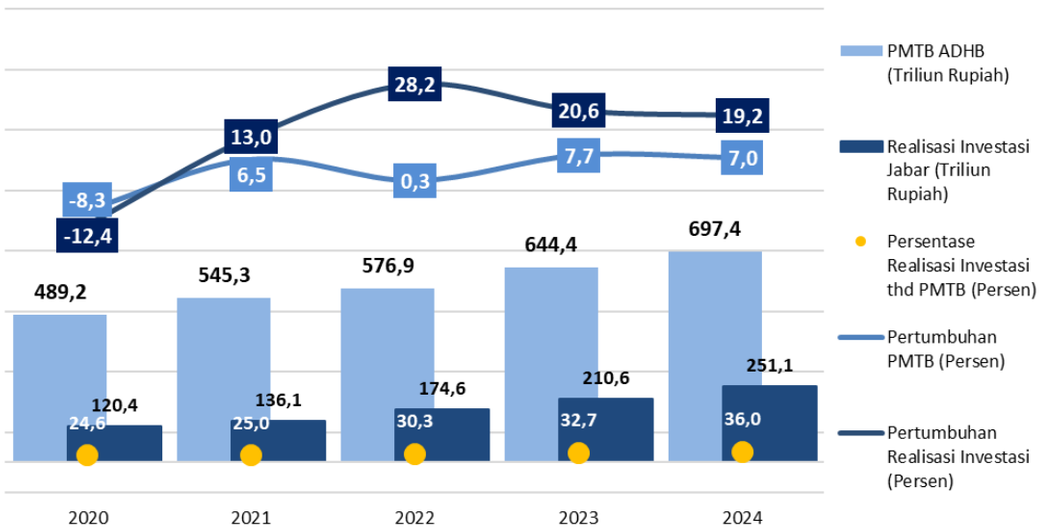
2.1.4.5.4 Realisasi Investasi

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2024 mencapai 7,0 persen yang setara dengan Rp 697 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian pertumbuhan 2024 merupakan perlambatan dari capaian tahun 2023 yang tumbuh di tingkat 7,7 persen. Adapun capaian realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai Rp251 Triliun, sekitar 36 persen dari nilai PMTB Jawa Barat. Capaian realisasi investasi tersebut juga merupakan perlambatan dari capaian tahun sebelumnya yang mampu tubuh pada tingkat 20,6 persen. Meskipun demikian, Jawa Barat tetap mampu menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kontribusi terhadap realisasi investasi nasional mencapai 14,7 persen.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.79
Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024

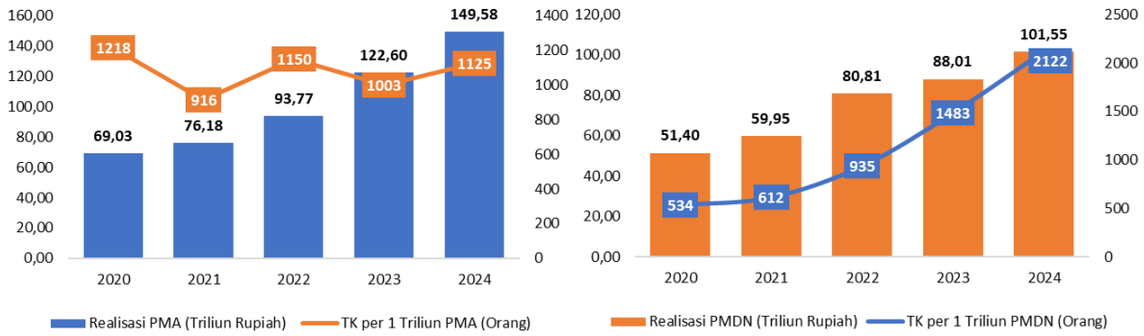


Sumber: BKPM, diolah.

Pertumbuhan realisasi investasi yang tinggi diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran di Jawa Barat. Kinerja penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi PMDN di Jawa Barat terus mengalami perbaikan sejak tahun 2020 (534 orang) ke tahun 2024 (2122 orang) yang menunjukkan investasi PMDN cenderung padat karya dengan spesifikasi tenaga kerja yang mampu disediakan di Jawa Barat. Adapun penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi PMA masih cenderung berfluktuasi antara 900 - 1100 tenaga kerja. Hal ini didukung oleh karakteristik PMA yang cenderung padat bodal dengan spesfikasi keahlian tenaga kerja yang cenderung tinggi. Kondisi serapan tenaga kerja PMA dan PMDN dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memanfaatkan investasi sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat pengangguran.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.80
Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024



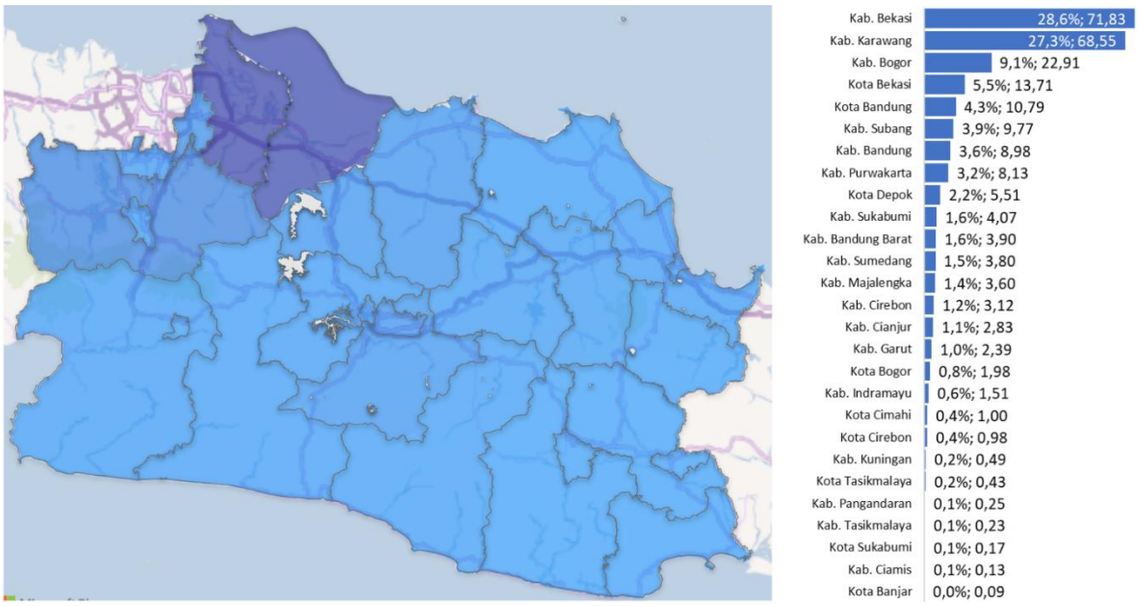
Sumber: BKPM, diolah 2025

Adapun Tingginya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat utamanya didukung oleh kematangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, dan Purwakarta. Realisasi investasi Jawa Barat sebesar Rp251 triliun terkonsentrasi lebih dari 60 persen di Jawa Barat bagian barat, utamanya Kabupaten Bekasi (28,6 persen), Kabupaten Karawang (27,3 persen), dan Kabupaten Bogor (9,12 persen). Investasi yang terkonsentrasi signifikan di suatu wilayah dengan porsi investasi PMA yang mencapai 59,5 persen dapat menyebabkan kondisi *enclave economy*. Kondisi tersebut ditandai dengan mekanisasi dan otomasi proses produksi, minim dampak terhadap UMKM dan IKM, tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan lebih berfokus pada penyerapan tenaga kerja terampil. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, ketimpangan wilayah semakin lebar, serta daerah non-industri minim manfaat dari lonjakan investasi.

Ekspansi investasi yang tinggi di wilayah industri menyisakan investasi di kawasan Jabar Selatan yang hanya berkontribusi sebesar 3,94 persen dari total investasi. Realisasi investasi yang timpang ini juga terlihat di Kawasan Rebana yang digadang-gadang menjadi Kawasan Industri baru di Jawa Barat yang hanya menyumbang sekitar 9,26 persen dari total investasi.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.81
Sebaran Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Tingkat Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: DPMPTSP Jawa Barat, diolah.

Pembahasan investasi tidak dapat dilepaskan dari seberapa efisien proses produksi dalam memanfaatkan investasi yang ada dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi produksi ditunjukan oleh nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), menggambarkan kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan satu unit *output*. Indonesia tercatat memiliki rata-rata ICOR sebesar 6,5 dalam lima belas tahun terakhir dengan periode 2020-2022 dikecualikan untuk mengeliminasi dampak pandemi. Jika dibandingkan dengan ICOR negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (5,4), Filipina (4,1), Thailand (4,4), dan Vietnam (3,7), ICOR Indonesia termasuk kategori tinggi yang menunjukan inefisiensi produksi.

Rata-rata nilai ICOR Jawa Barat lima belas tahun terakhir adalah sebesar 4,7 (periode 2020-2022 dikecualikan untuk mengeliminasi dampak covid). Kondisi ICOR ini tidak mengalami perbaikan setiap tahunnya, melainkan berfluktuasi dengan trend yang meningkat, bahkan pada tahun 2024 ICOR Jawa Barat mencapai 5,0.

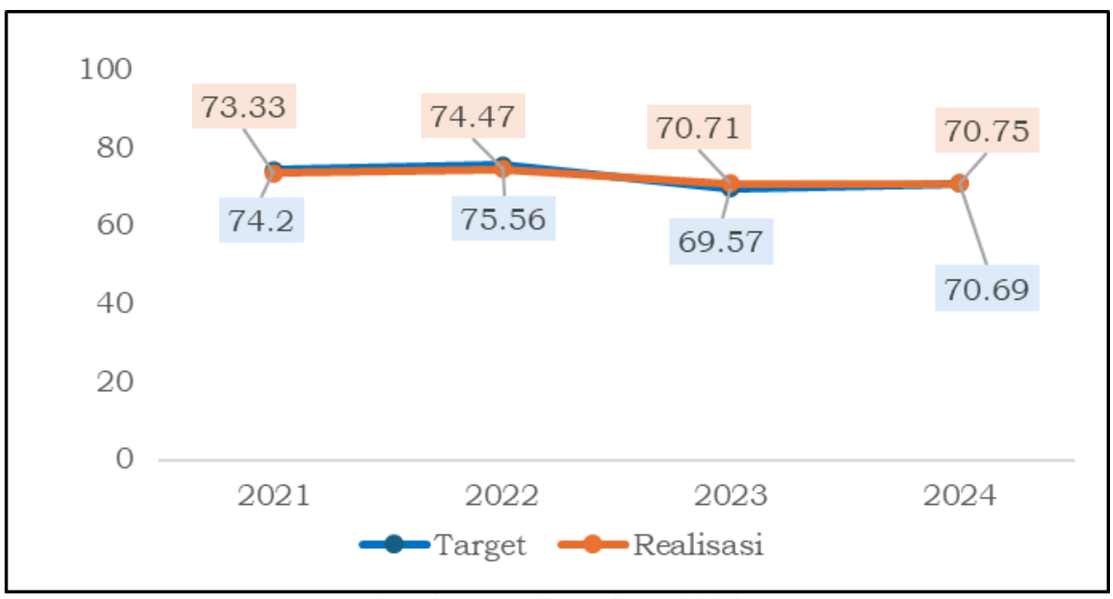
1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.1.4.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang membentuk satu sistem saling melengkapi.Untuk mendukung hubungan ini, ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai sangat diperlukan, yang diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur. Pada tahun 2024, indeks kualitas infrastruktur Provinsi Jawa Barat 2024 mencapai angka 70,75 persen, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 70,69 persen. Hal ini menunjukkan secara umum kinerja pembangunan serta layanan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik serta menunjukkan kemajuan yang cukup progresif pada tahun 2024. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Infrastruktur dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.82
Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)
Tahun 2021-2024



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 2.103
Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)
Tahun 2024

Sektor	Ruang Lingkup (Indikator)	2024			
		Target Indikator	Realisasi Indikator	Target Komposit	Realisasi Komposit
Jalan & Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	90,50%	90,22%	**19,53%**	**19,36%**
	Persentase Aksesibilitas Jalan	28,54%	26,28%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sektor	Ruang Lingkup (Indikator)	2024			
		Target Indikator	Realisasi Indikator	Target Komposit	Realisasi Komposit
Sumber Daya Air	Kondisi Sistem Irigasi	56,60%	57,04%	**16,98%**	**17,11%**
Perumahan & Permukiman	Akses Terhadap Air Minum Layak	94,00%	99,27%	**19,19%**	**19,64%**
	Askes Terhadap Sanitasi Layak	75,00%	86,89%		
	Akses Penanganan Sampah Perkotaan	76,00%	60,08%		
	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	56,00%	56,25%		
Energi/ Kelistrikan	Konsumsi Listrik Perkapita	100,00%	101,88%	**15,00%**	**15,28%**
NILAI INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR				**70,69%**	**71,40%**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Realisasi indikator tingkat kemantapan jalan menunjukkan angka 90,22 persen, sedikit berada di bawah target yaitu 90,50 persen. Tidak tercapainya target indikator tingkat kemantapan jalan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kejadian bencana alam gempa bumi dan tanah longsor di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi pada akhir tahun 2024. Ruas jalan yang terdampak yaitu Ruas Jalan Sukanagara – Sindangbarang sepanjang 1.2 km, Ruas Jalan Bts. Kab.Bandung/Cianjur - Kebon Muncang – Cikadu sepanjang 0.2km, Ruas Jalan Sukabumi (Baros) – Sagaranten sepanjang 4.2 km, Sagaranten – Tegalbuleud sepanjang 0.2 km, Jampang Tengah – Kiara Dua sepanjang 1.00 km, SP.Karanghawu – Cikotok sepanjang 0.4 km dan Ruang Jalan Loji – Puncak Darma sepanjang 0.40 km.

Meskipun demikian, secara umum jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat telah berhasil menghubungkan titik-titik pusat kegiatan utama, termasuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Keterhubungan ini mencerminkan peran strategis infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah provinsi. Namun demikian, meskipun konektivitas antar pusat kegiatan tersebut telah terbentuk, dari sisi kondisi fisik jalan, masih terdapat sejumlah ruas yang belum berada dalam kondisi mantap. Ketimpangan kualitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan efisiensi dan keselamatan transportasi, sehingga perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

mendapat perhatian melalui program pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 57.318,94 km, mencakup jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa yang tersebar dari kawasan perkotaan hingga perdesaan.

Tabel 2.104
Panjang Ruas Jalan berdasarkan Kewenangan Pengelolaan

No	Kewenangan Pengelolaan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Kemantapan (%)
1.	Jalan Nasional	1.782,65	98,47 (2024)
2.	Jalan Provinsi	2.362,183	86,44 (2024)
3.	Jalan Kabupaten/Kota	25.244,00	83,48 (2024)
4.	Jalan Desa	27.932,75	65,46 (2024)

Dalam lingkup administrasi Provinsi Jawa Barat, ruas jalan nasional memiliki panjang total 1.782,65 km, dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 mencapai 98,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ruas jalan nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi yang relatif sangat baik, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Kondisi Jalan Nasional

No	Provinsi Jawa Barat	Ruas Jalan Kewenangan Nasional					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi Jawa Barat	98,47	1782,65	638,91	1116,47	27,27	0

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Selain itu, dalam konteks jalan nasional, Provinsi Jawa Barat juga memiliki jaringan jalan tol yang luas dan strategis, memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Hingga tahun 2025, Total panjang jalan tol yang beroperasi di Jawa Barat mencapai lebih dari 570 km, mencakup berbagai koridor strategis yang mendukung konektivitas antar wilayah, efisiensi logistik, dan pertumbuhan ekonomi.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.106
Kondisi Jalan Tol yang Beroperasi
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Nama Ruas Tol Beroperasi	Panjang (km)	Wilayah yang Dihubungkan	Keterangan
1.	Cikopo–Palimanan (Cipali)	116,7	Cikopo (Purwakarta) – Palimanan (Cirebon)	Bagian dari Tol Trans-Jawa; menghubungkan Jakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2.	Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang)	58,5	Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Bandung Barat)	Menghubungkan Jakarta dengan Bandung melalui jalur selatan.
3.	Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu)	60,3	Cileunyi – Sumedang – Kertajati (Majalengka)	Terowongan kembar pertama di Indonesia; akses ke Bandara Internasional Kertajati.
4.	Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi)	53,6	Ciawi (Bogor) – Sukabumi	Meningkatkan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa Barat.
5.	Soreang–Pasir Koja (Soroja)	10,6	Soreang – Pasir Koja (Bandung)	Menghubungkan ibu kota Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung.
6.	Cimanggis–Cibitung (Cimaci)	26	Cimanggis – Cibitung	Bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2; mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.
7.	Jakarta–Cikampek (Japek)	83	Jakarta – Cikampek	Jalur utama penghubung Jakarta dengan wilayah timur Jawa Barat dan Jawa Tengah.
8.	Padalarang–Cileunyi (Padaleunyi)	64,4	Padalarang – Cileunyi (Bandung)	Menghubungkan wilayah barat dan timur Bandung.
9.	Palimanan–Kanci	26,3	Palimanan – Kanci (Cirebon)	Bagian dari Tol Trans-Jawa; melanjutkan konektivitas dari Cipali ke arah timur.
10.	Kanci–Pejagan	35	Kanci (Cirebon) – Pejagan (Brebes)	Menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah bagian utara.

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Dalam konteks jalan kewenangan provinsi, saat ini jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ini memiliki panjang 2.362,183 km, dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 mencapai 86,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi yang relatif cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah ruas yang perlu penanganan baik itu rekonstruksi maupun pemeliharaan berkala. Dari segi pemerataan, ruas jalan provinsi di wilayah Jawa Barat bagian selatan masih cenderung memerlukan penanganan jika dibandingkan dengan wilayah tengah maupun utara.

Tabel 2.107
Kondisi Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogor	88,44	131,97	85,67	31,04	9,54	5,70
2	Sukabumi	78,93	309,99	111,32	133,34	42,80	27,09
3	Cianjur	75,04	186,25	90,61	49,14	13,50	33,00
4	Tasikmalaya	91,32	129,06	58,04	59,82	11,10	0,10
4	Bandung	93,81	127,37	60,04	59,44	7,89	0,00
5	Garut	87,73	286,03	143,79	107,15	31,89	3,20
7	Ciamis	81,84	28,63	13,23	10,20	5,20	0,00
8	Kuningan	74,63	86,33	28,75	35,68	17,00	4,90
9	Cirebon	96,75	72,37	42,57	27,45	2,35	0,00
10	Majalengka	95,78	126,84	68,77	52,72	3,75	1,60
11	Sumedang	87,46	115,63	61,80	39,33	11,10	3,40
12	Indramayu	84,09	157,62	49,26	83,29	17,97	7,10
13	Subang	86,74	167,86	108,27	37,33	21,84	0,40
14	Purwakarta	87,86	58,81	29,83	21,84	7,14	0,00
15	Karawang	77,14	91,53	58,13	12,48	13,62	7,30
16	Bekasi	99,37	31,74	22,00	9,54	0,20	0,00
17	Bandung Barat	96,04	73,17	56,30	13,97	2,90	0,00
18	Pangandaran	94,38	8,89	1,50	6,89	0,50	0,00
19	Kota Bogor	100,00	12,20	10,20	1,99	0,00	0,00
20	Kota Sukabumi	86,33	37,74	18,51	14,07	0,50	0,10
21	Kota Bandung	97,05	39,27	12,89	25,22	1,06	0,10
22	Kota Cirebon	100,00	6,55	5,17	1,38	0,00	0,00
23	Kota Bekasi	90,80	21,75	16,85	2,90	2,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kota Depok	100,00	11,73	10,86	0,87	0,00	0,00
25	Kota Cimahi	100,00	9,36	6,01	3,35	0,00	0,00
26	Kota Tasikmalaya	91,02	24,55	13,85	8,50	2,21	0,00
27	Kota Banjar	97,77	8,97	3,57	5,20	0,20	0,00
	Provinsi Jawa Barat	**86,44**	**2.362,18**	**1.187,78**	**854,12**	**226,26**	**93,98**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Untuk jalan kewenangan kabupaten/kota, saat ini jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ini memiliki total panjang mencapai 25.244,00 km, dengan tingkat kemantapan 83,48 persen pada tahun 2024. Pada beberapa kabupaten seperti Sukabumi, Cianjur dan Tasikmalaya, masih terdapat cukup banyak ruas jalan yang memiliki kondisi rusak berat.

Tabel 2.108
Kondisi Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogor	86,61	1.763,69	1.234,29	293,30	102,17	133,93
2	Sukabumi	60,58	1.424,36	572,16	290,67	54,05	507,48
3	Cianjur	75,06	1.335,22	789,93	212,27	53,55	279,48
4	Tasikmalaya	67,36	1.230,47	699,00	129,90	104,67	296,90
4	Bandung	83,09	1.428,37	942,50	244,31	101,66	139,90
5	Garut	93,55	829,00	569,83	205,66	6,50	47,01
7	Ciamis	90,12	1.098,13	805,67	183,96	63,18	45,32
8	Kuningan	82,35	771,57	463,62	171,78	35,31	100,86
9	Cirebon	84,91	1.240,31	758,68	294,42	91,32	95,89
10	Majalengka	86,65	915,02	445,86	346,97	89,56	32,64
11	Sumedang	87,54	811,32	577,01	133,19	29,46	71,66
12	Indramayu	88,12	827,42	528,92	200,22	56,37	41,92
13	Subang	79,57	1.163,78	801,15	124,84	44,07	193,72
14	Purwakarta	81,49	728,92	429,27	164,74	80,37	54,55
15	Karawang	82,15	1.798,07	1.300,20	176,92	53,69	267,26
16	Bekasi	70,34	1.077,39	482,31	275,51	102,86	216,71
17	Bandung Barat	75,90	648,06	374,33	117,54	47,52	108,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pangandaran	80,35	632,54	468,60	39,63	51,10	73,21
19	Kota Bogor	90,03	207,98	53,75	133,49	20,74	-
20	Kota Sukabumi	60,58	1.424,36	572,16	290,67	54,05	507,48
21	Kota Bandung	97,92	647,47	591,42	42,61	9,25	4,19
22	Kota Cirebon	94,34	159,17	135,76	14,41	2,09	6,92
23	Kota Bekasi	98,62	303,96	290,55	9,21	0,92	3,29
24	Kota Depok	89,46	1.957,93	1.396,36	355,30	128,13	78,14
25	Kota Cimahi	98,43	105,19	84,57	18,97	1,66	-
26	Kota Tasikmalaya	91,52	461,21	397,59	24,49	22,64	16,50
27	Kota Banjar	77,46	253,09	134,40	61,65	31,98	25,06
Provinsi Jawa Barat		**83,48**	**25.244,00**	**15.899,89**	**4.556,61**	**1.438,85**	**3.348,66**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Tingkat kemantapan jalan desa pada tahun 2024 baru sebesar 65,46 persen. Angka ini menunjukkan bahwa banyak ruas jalan desa masih dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat, dan sebagian besar masih berupa jalan tanah yang belum dilapisi perkerasan khususnya pada kawasan rebana (Cirebon, Patimban, kertajati) dan Jawa Barat bagian Selatan.

Tabel 2.109
Kondisi Jalan Desa berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Desa					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogor	83,01	1.891,45	1.407,11	163,06	139,67	181,60
2	Sukabumi	46,82	2.902,06	968,10	390,52	491,92	1.051,52
3	Cianjur	59,10	2.376,48	1.098,38	306,11	368,01	603,98
4	Tasikmalaya	57,24	2.485,00	1.038,59	383,78	487,58	575,05
4	Bandung	71,11	918,19	550,94	102,00	98,77	166,47
5	Garut	54,61	2.443,42	987,51	346,82	430,19	678,91
7	Ciamis	58,24	2.390,31	1.115,20	276,93	358,80	639,38
8	Kuningan	76,43	1.464,66	964,45	155,00	135,33	209,88
9	Cirebon	67,77	1.104,77	623,65	125,05	141,26	214,81
10	Majalengka	69,43	1.079,85	622,67	127,11	129,16	200,92
11	Sumedang	55,31	1.693,52	748,77	187,86	223,78	533,11
12	Indramayu	67,12	1.300,62	774,15	98,76	133,03	294,68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Desa					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Subang	75,67	1.075,07	735,45	78,10	91,88	169,65
14	Purwakarta	64,19	438,43	230,67	50,75	68,76	88,25
15	Karawang	89,85	1.427,33	1.236,59	45,80	45,35	99,58
16	Bekasi	77,04	602,23	411,78	52,20	56,53	81,72
17	Bandung Barat	45,78	1.440,97	499,79	159,84	228,69	552,65
18	Pangandaran	54,57	757,68	328,12	85,34	119,74	224,49
19	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-
20	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-
21	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-
22	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	
23	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-
24	Kota Depok	-	-	-	-	-	-
25	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-
26	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	
27	Kota Banjar	70,39	140,72	87,64	11,41	27,17	14,51
Provinsi Jawa Barat		**65,46**	**27.932,75**	**14.429,54**	**3.146,44**	**3.775,63**	**6.581,15**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.83
Peta Jaringan Jalan Eksisting Provinsi Jawa Barat



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

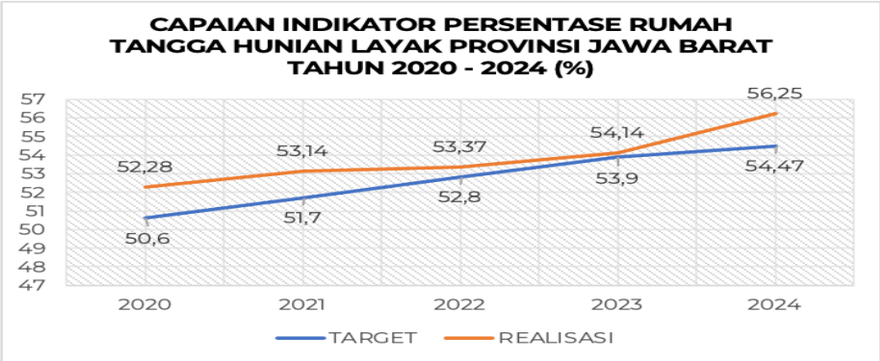
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Capaian indikator disektor perumahan dan kawasan permukiman terus mengalami peningkatan, menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang lebih tertata. Perwujudan permukiman yang lebih tertata juga dapat dilihat dari penanganan kawasan kumuh. Penetapan kawasan kumuh di level nasional ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR dan pada level provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui SK Kepala Daerah. Secara total terdapat 8.658,97 hektar kawasan kumuh di Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan dari kewenangan pemerintah pusat (3.127,40 hektar), pemerintah provinsi (963,57 hektar), dan pemerintah kab/kota (4.568 hektar). Penanganan kawasan kumuh secara kolaboratif (pemerintah pusat, provinsi, dan kab-kota) dari tahun 2020 – 2023 mencapai 2.319 hektar, sehingga sampai tahun 2023 kawasan kumuh secara total di Provinsi Jawa Barat masih tersisa seluas 6.340,05 hektar dengan rincian sebagai berikut:

- proporsi pemerintah pusat masih tersisa 2.080,17 hektar;
- proporsi pemerintah provinsi masih tersisa 787,19 hektar; dan
- proporsi pemerintah kab/kota masih tersisa 3.472,68 hektar.

Penanganan kawasan kumuh tersebut juga merupakan bagian dari pencapaian penanganan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang Data dari salah satu indikator kunci, yaitu Persentase Rumah Tangga Hunian Layak mengalami peningkatan dari 52,28 persen pada tahun 2020 menjadi 56,25 persen pada tahun 2024..

Gambar 2.84
Capaian Persentase Rumah Tangga Hunian Layak Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen dapat diverifikasi keasliannya dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri (ada *backlog* kepemilikan rumah) serta masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (Tabel 2.107). Angka pada tabel tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan kepemilikan hunian bagi masyarakat serta masih adanya penduduk yang hidup dalam kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, hal ini berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.110
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri (RT)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni (RT)
		(2023)	(2023)	(2024)	(2024)	(2024)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
1	Kab. Bogor	1.400.324	1.401.318	1.222.230	179.088	654.416	746.902
2	Kab. Sukabumi	949.015	765.722	698.338	67.384	251.387	514.335
3	Kab. Cianjur	827.627	697.418	635.836	61.582	267.041	430.377
4	Kab. Bandung	1.039.634	966.456	774.614	191.842	523.433	443.023
5	Kab. Garut	789.962	660.627	605.729	54.898	228.643	431.984
6	Kab. Tasikmalaya	579.826	536.222	498.686	37.536	201.727	334.495
7	Kab. Ciamis	343.286	373.505	343.923	29.582	251.070	122.435
8	Kab. Kuningan	291.978	309.121	280.342	28.779	239.723	69.398
9	Kab. Cirebon	776.436	616.780	477.079	139.701	495.829	120.951
10	Kab. Majalengka	373.386	396.620	353.349	43.271	298.893	97.727
11	Kab. Sumedang	388.442	349.178	316.739	32.439	240.933	108.245
12	Kab. Indramayu	539.503	550.023	456.079	93.944	471.810	78.213
13	Kab. Subang	482.999	465.100	442.124	22.976	387.289	77.811
14	Kab. Purwakarta	280.213	273.667	250.323	23.344	182.016	91.651
15	Kab. Karawang	608.755	678.799	615.942	62.857	481.812	196.987
16	Kab. Bekasi	828.608	881.763	739.623	142.140	562.565	319.198
17	Kab. Bandung Barat	407.309	492.600	421.074	71.526	191.474	301.126
18	Kab. Pangandaran	133.739	129.818	123.574	6.244	80.370	49.448
19	Kota Bogor	242.443	264.578	184.596	79.982	131.045	133.533

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri (RT)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni (RT)
		(2023)	(2023)	(2024)	(2024)	(2024)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
20	Kota Sukabumi	103.303	92.116	66.324	25.792	33.438	58.678
21	Kota Bandung	519.288	659.343	372.067	287.276	276.726	382.617
22	Kota Cirebon	80.217	88.403	54.748	33.655	65.692	22.711
23	Kota Bekasi	748.157	670.981	487.870	183.111	441.640	229.341
24	Kota Depok	457.256	547.091	402.002	145.089	270.208	276.883
25	Kota Cimahi	121.495	155.678	93.547	62.131	85.405	70.273
26	Kota Tasikmalaya	204.791	192.461	158.472	33.989	86.627	105.834
27	Kota Banjar	51.885	57.906	52.799	5.107	48.357	9.549
	Provinsi Jawa Barat	**13.569.877**	**13.273.294**	**11.075.237**	**2.198.057**	**7.466.228**	**5.807.066**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sebanyak 309.909 unit rumah berada di kawasan rawan bencana gunung api (sekitar lereng gunung aktif), kawasan rawan gempa bumi (tersebar 27 kabupaten/kota) dan di kawasan potensi gelombang ekstrim dan abrasi pantai (wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Barat), serta di kawasan rawan tsunami (pantai selatan). Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.85.

Gambar 2.85
Jumlah Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (2025)

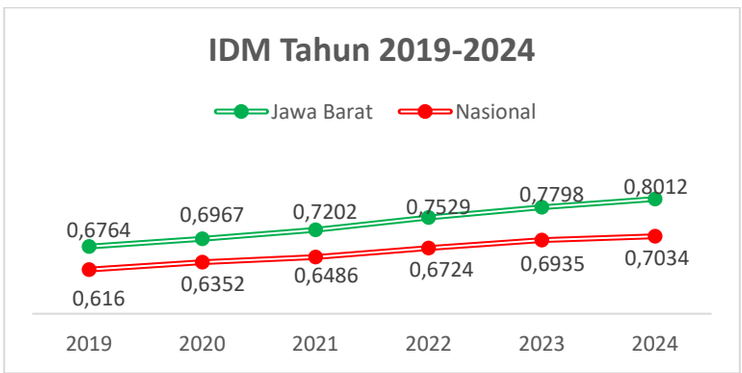
Selain Kawasan Perkotaan, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam Ketahanan Ekonomi wilayah, Ketahanan Pangan, Ketahanan Sosial dan Budaya serta Ketahanan Ekologi dan Lingkungan. Transformasi Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan mengalami pergeseran yang menempatkan Desa sebagai penguatan kapasitas lokal dengan model yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pengintegrasian teknologi digital dalam pengelolaan desa dan inovasi sosial sebagai fokus utama. Pembangunan

Desa dan Kawasan Perdesaan telah menjadi fokus penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial-ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Dalam mengukur Perkembangan Pembangunan Desa, indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi alat ukur yang digunakan dalam menilai tingkat perkembangan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

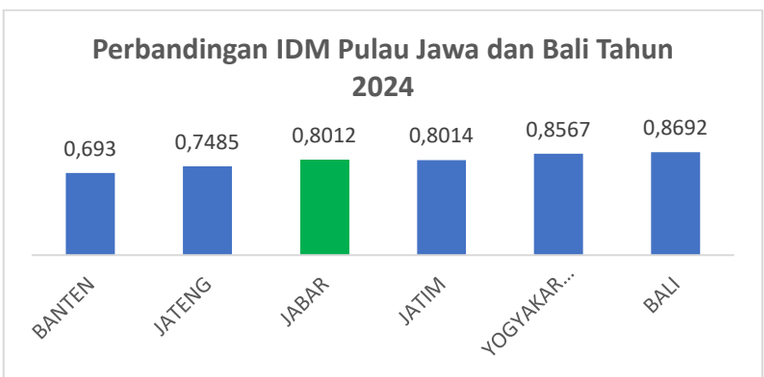
kemandirian desa dalam pembangunan. Tujuan utama perhitungan IDM adalah untuk mendorong pembangunan desa yang terarah, terukur dan berkelanjutan yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Namun pada tahun 2025, Pemerintah mengeluarkan indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa yaitu Indeks Desa (ID) sebagai pengembangan dari IDM yang digunakan pada RPJPN 2025-2045. ID dihitung berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola.

Gambar 2.86
Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2024



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025 (diolah)

Gambar 2.87
Perbandingan IDM Pulau Jawa dan Bali Tahun 2024



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025 (diolah)

Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2019-2020, IDM Provinsi Jawa Barat berada pada status

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

berkembang, tetapi tahun pada 2021 sudah mengalami kenaikan status menjadi maju. Jika dilihat dari nilai IDM, Provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, nilai IDM Provinsi Jawa Barat meningkat dari tahun sebelumnya dari 0,7798 menjadi 0,8692 dan nilai tersebut melampaui rata-rata nilai IDM nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat keenam nasional dengan status maju.

Capaian IDM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2024 mengalami kenaikan yang signifikan dari kategori berkembang menjadi kategori maju. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah desa terbesar memiliki tantangan untuk meningkatkan status IDM menjadi Kategori Maju. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Sosial yaitu sebesar 0,8577, nilai Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8006, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,7456. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun *stakeholders* dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

2.1.4.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Di tengah tekanan dan dinamika risiko global, perekonomian Jawa Barat tetap menunjukkan kinerja yang stabil dan positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95 persen dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp2.823,34 triliun, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ketiga di Indonesia dan menyumbang 12,82 persen terhadap total PDB nasional. Tiga sektor utama yang mendominasi struktur PDRB Jawa Barat adalah industri pengolahan (41,39 persen), perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi kendaraan (14,46 persen), serta konstruksi (8,45 persen). Pertumbuhan signifikan di sektor-sektor ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan strategis yang ditujukan untuk mendorong produktivitas dan menciptakan iklim usaha ementara itu, tingkat inflasi di yang kondusif. Jawa Barat pada 2024 tercatat sebesar 1,64 persen (y-o-y), sedikit di atas rentang target 2,5 ±1 persen dan juga di atas inflasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

nasional sebesar 1,57 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh sisi penawaran, seperti penurunan harga BBM non subsidi dan melimpahnya pasokan cabai dan tomat yang menurunkan harga, serta tekanan harga dari komoditas seperti kopi, rokok, biaya pendidikan tinggi, dan emas. Dari sisi permintaan, inflasi yang tetap rendah juga mencerminkan adanya pelemahan daya beli masyarakat sepanjang tahun tersebut.

Gambar 2.88
Tren Inflasi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024 (*y-o-y*, %)



Sumber: BPS, 2025

Inflasi y-o-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,75 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,34 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,34 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,39 persen.

Secara spasial, inflasi tertinggi tahun 2024 di Kota Sukabumi sebesar 2,59 persen, Kota Depok sebesar 1,95 persen, dan Kota Tasikmalaya sebesar 1,94 persen. Adapun daerah dengan capaian inflasi terendah dan bahkan berada di bawah target adalah di Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Subang sebesar 0,93 persen. Kota Cirebon sebesar 1,10 persen, dan Kabupaten Bandung sebesar 1,46 persen.

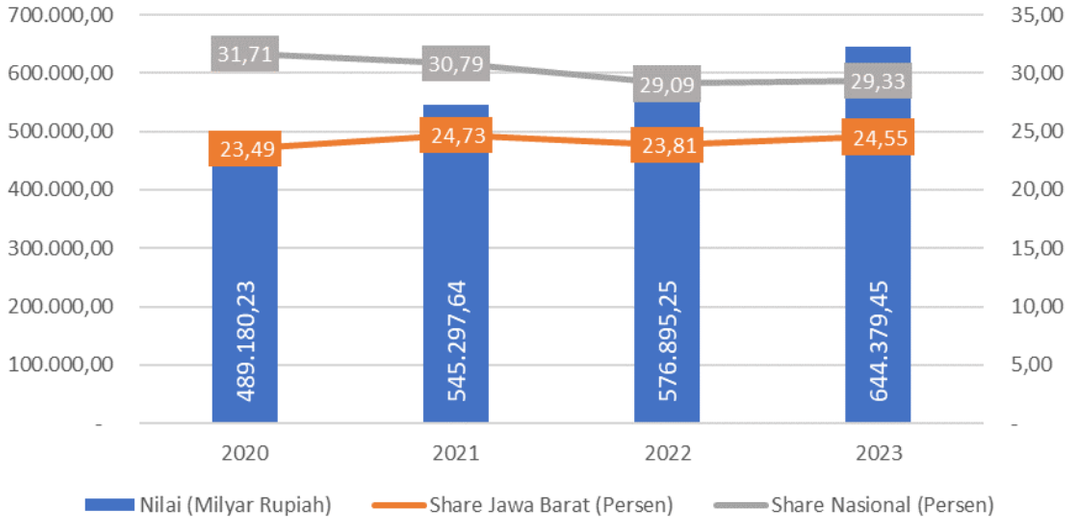
2.1.4.8 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merepresentasikan besaran investasi. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Peningkatan *share* PMTB terhadap PDRB suatu daerah dari waktu ke waktu adalah gejala yang diharapkan. Sebab, kenaikan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Gambar 2.52 memperlihatkan perkembangan nilai dan share PMTB terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, nilai PMTB Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Nilai PMTB tahun 2021 mencapai 545 triliun, dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 576 triliun. Pada tahun 2023, nilai PMTB mencapai 644 triliun, dengan *share* sebesar 24,55 terhadap PDRB Jawa Barat. Dengan *share* tersebut, PMTB menjadi salah satu kontributor terbesar nilai PDRB sisi pengeluaran pada PDRB Jawa Barat setelah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 2.89
Nilai dan *Share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS. 2024

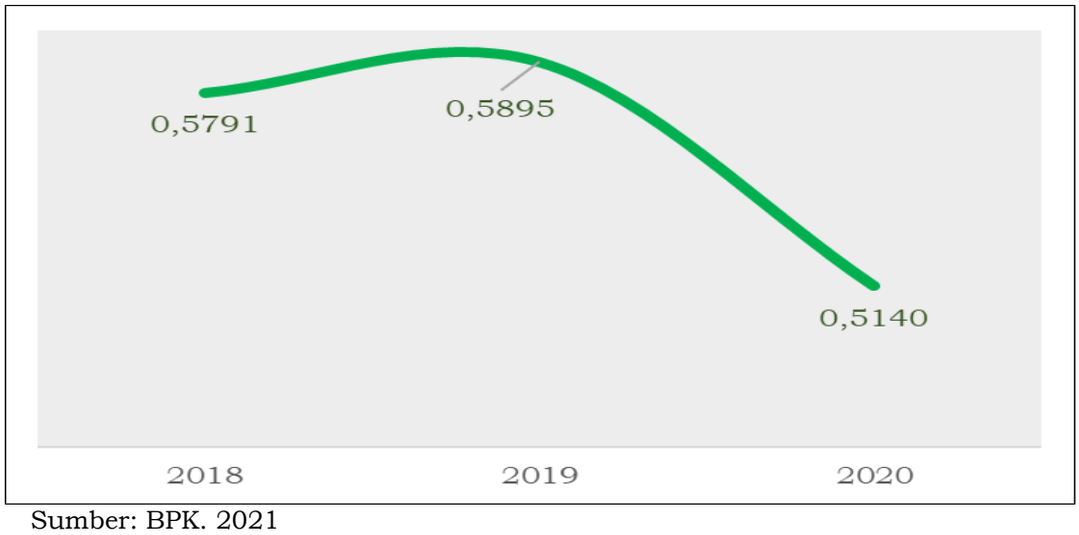
2.1.4.9 Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Esensi kemandirian fiskal daerah yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran).

Perkembangan IKF dari Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori “Mandiri” (angka indeks berada di rentang 0,50≤IKF<0,75). Namun demikian terjadi penurunan angka IKF pada tahun 2020. Hal ini dapat dimaknai dana transfer dari pusat bertambah sementara penerimaan dari PAD berkurang. Kondisi ini merupakan transmisi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang terkontraksi cukup dalam yang kemudian berakibat menurunnya penerimaan pajak daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 2.90
Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2018-2020



Sumber: BPK. 2021

Dalam lingkup kabupaten/kota, angka IKF menunjukkan bahwa berdasarkan kategori kemandirian fiskal daerah terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota, yakni kelompok kabupaten/kota dengan kategori IKF "Menuju Kemandirian" (angka indeks direntang 0,25 ≤ IKF < 0,50) dan kelompok kabupaten/kota dengan kategori "Belum Mandiri" (angka indeks direntang 0,00 ≤ IKF < 0,25). Hal ini menandakan semua kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki kemampuan secara mandiri dalam membiayai belanja pembangunan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 111
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandung	0,1763	0,1789	0,1907				
Bandung Barat	0,1623	0,1819	0,1837				
Bekasi	0,4032	0,4300	0,4289				
Bogor	0,3828	0,3884	0,3656				
Ciamis	0,0903	0,0896	0,0968				
Cianjur	0,1418	0,1527	0,1466				
Cirebon	0,1588	0,1585	0,1635				
Garut	0,0979	0,1015	0,1055				
Indramayu	0,1258	0,1161	0,1461				
Karawang	0,2792	0,2899	0,2980				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuningan	0,1199	0,1091	0,1076				
Majalengka	0,1597	0,1484	0,1515				
Pangandaran	0,0978	0,0779	0,0630				
Purwakarta	0,1790	0,1937	0,1948				
Subang	0,1411	0,1510	0,1537				
Sukabumi	0,1503	0,1525	0,1683				
Sumedang	0,1560	0,1495	0,1504				
Tasikmalaya	0,0698	0,0752	0,0851				
Kota Bandung	0,4329	0,3993	0,3656				
Kota Banjar	0,1452	0,1264	0,1500				
Kota Bekasi	0,4138	0,4095	0,4024				
Kota Bogor	0,3861	0,3763	0,3544				
Kota Cimahi	0,2545	0,2518	0,2562				

Sumber: BPK. 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai Tahun 2025

Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, sebagai salah satu landasan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan, pelaksanaan, hingga hasil RKPD untuk memastikan bahwa RKPD Provinsi Jawa Barat telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026

Capaian indikator makro menjadi tolok ukur pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kinerja sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan periode berikutnya. Pada subbab ini disajikan sandingan capaian indikator makro Provinsi Jawa Barat dengan indikator makro nasional mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa:

a. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun akhir periode RPJMD (2021-2023) secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar 4,95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

persen, capaian tersebut di bawah target yang ditetapkan pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Tiga sektor terbesar penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan dan Konstruksi.

b. Perbaikan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan tercatat sebesar 7,98 persen pada September 2022 dan tercatat sebesar 7,62 persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan tersebut menurun jika dibandingkan September 2021 sebesar 7,97 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 mencapai 4.071,0 ribu jiwa dan Maret 2023 sebanyak 3.888,6 ribu jiwa. Sementara itu, pada September 2021 tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 4.195,3 ribu jiwa. Artinya terdapat penurunan sebanyak 124,3 ribu jiwa dari September 2021 ke September 2022 dan terdapat penurunan sebanyak 306,7 ribu jiwa dari September 2021 ke Maret 2023.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2021 mencapai 9,82 persen, mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2020 (10,46 persen). Namun TPT tahun 2021 belum dapat kembali ke posisi yang sama sebelum terjadi pandemi yakni 8,04 persen pada tahun 2019. TPT tahun 2019 sampai dengan 2021 di Jawa Barat masih tidak melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Pada tingkat nasional, TPT Indonesia selama kurun waktu 2017 sampai 2021 menunjukkan fluktuasi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun demikian, TPT Indonesia selalu berada di bawah target RPJMN, dan kondisi pada 2021 mencapai 6,49 persen yang berarti lebih rendah dari TPT Jawa Barat.
d. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Jawa Barat. Dilihat dari trennya, IPM mengalami kenaikan selama periode 2017 sampai 2021 yakni dari 72,03 menjadi 72,45. Pencapaian IPM ini selalu melampaui target yang ditetapkan di RPJMD Jawa Barat. Sementara itu tren IPM Indonesia juga meningkat walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan di RPJMN untuk tahun 2020 dan 2021.
e. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021 mengalami kenaikan pada 2021. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat cenderung meningkat. Pada September 2020,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat sebesar 0,398 dan naik menjadi 0,406 pada September 2021. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan di RPJMD, sementara untuk tahun 2020 menunjukkan angka realisasi lebih rendah dibandingkan target.

Perkembangan Rasio Gini Indonesia selama tiga tahun terakhir selalu berada di bawah 0,4, dengan posisi terakhir tahun 2021 mencapai 0,381. Rasio Gini selama kurun waktu 2017-2021 selalu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, kecuali pada tahun 2020.

f. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik yaitu selalu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Hal ini menunjukkan semakin baiknya upaya dan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat Jawa Barat dalam mendukung upaya penurunan emisi GRK. Sementara indikator Penurunan Emisi GRK di tingkat nasional pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan 2019 yaitu dari 23,46 menjadi 25,51. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 23,55.

Secara rinci target dan realisasi masing-masing indikator makro Indonesia dan Jawa Barat tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 2.112
Persandingan Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Nasional							Provinsi Jawa Barat						
Indikator	2022		2023		2024		Indikator	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,4	5,31	5,3-5,5	5,05	5,3 - 5,7	5,03	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,92	5,45	4,35	5	5,67	4,95
Tingkat kemiskinan (%)	8,5–9,0	9,57	7,5-8,5	9,36	6,5 - 7,5	8,57	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,67	7,98	7,54	7,62	7,68	7,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,86	5,86	5,3-6,0	5,32	5,0 - 5,7	4,91	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,16	8,31	8,13	7,44	7,4	6,75
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,73	72,91	73,31-73,49	74,39	73,99 - 74,02	75,02	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,57	73,12	73,05	73,74	73,56	74,92
Rasio Gini	0,376–0,378	0,381	0,375-0,378	0,388	0,374 - 0,377	0,381	Rasio Gini	0,4	0,412	0,396	0,425	0,408	0,428
Penurunan Emisi GRK (%)	26,87	27,82	27,02	27,02*	27,27	n/a	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	4,75	5,86	6,49	7,25	7,11	7,98

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Berdasarkan Tabel 2.112 di atas, terdapat beberapa indikator makro pembangunan pada periode 2021-2023 di Jawa Barat yang masih memerlukan upaya dalam mencapai target indikator makro yang diharapkan dapat mendukung indikator nasional, di antaranya:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 6,75 persen, lebih baik dari capaian tahun 2023 yang mencapai 7,44 persen. Namun demikian angka TPT tersebut masih jauh di atas capaian nasional tahun 2024 sebesar 4,91 persen sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan angka TPT tersebut.
b. Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat tahun 2024 tergolong rendah dibanding rata-rata nasional. Meskipun tingkat kemiskinan di Jawa Barat relatif rendah, namun jumlah penduduk miskin masih cukup besar terdapat 3,65 juta jiwa penduduk di Jawa Barat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan
c. Angka *Gini Ratio* Jawa Barat tahun 2024 tergolong tinggi dibanding rata-rata nasional dan menempati peringkat ke-33 dari 34 provinsi Meskipun angka *Gini Ratio* tergolong kategori ketimpangan Moderat, namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Artinya distribusi pengeluaran antar penduduk di Jawa Barat semakin tidak merata.

Capaian beberapa indikator makro di atas menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Pengendalian kemiskinan dan ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM di Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.113
Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2024

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Rasio Gini			Indeks Pembangunan Manusia		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Aceh	4,21	4,23	5,17	6,17	6,03	5,75	14,75	14,45	12,64	0,291	0,296	0,294	72,8	74,7	75,36
2	Sumatera Utara	4,73	5,01	5,2	6,16	5,89	5,6	8,33	8,15	7,19	0,326	0,309	0,306	72,71	75,13	74,02
3	Sumatera Barat	4,36	4,62	4,33	6,28	5,94	5,75	6,04	5,95	5,42	0,292	0,28	0,287	73,26	75,64	76,43
4	Riau	4,55	4,21	3,46	4,37	4,23	3,7	6,84	6,68	6,36	0,323	0,324	0,306	73,52	74,95	75,67
5	Jambi	5,13	4,66	4,01	4,59	4,53	4,48	7,7	7,58	7,26	0,335	0,343	0,315	72,14	73,73	74,36
6	Sumatera Selatan	5,23	5,08	5,04	4,63	4,11	3,86	11,95	11,78	10,51	0,33	0,338	0,331	70,9	73,18	73,84
7	Bengkulu	4,31	4,26	4,57	3,59	3,42	3,11	14,34	14,04	12,52	0,315	0,333	0,343	72,16	74,3	74,91
8	Lampung	4,28	4,55	4,81	4,52	4,23	4,19	11,44	11,11	10,62	0,313	0,324	0,301	70,45	72,48	73,13
9	Kep. Bangka Belitung	4,4	4,38	0,13	4,77	4,56	4,63	4,61	4,52	5,08	0,255	0,245	0,235	72,24	74,09	74,55
10	Kep. Riau	5,09	5,2	5,02	8,23	6,8	6,39	6,03	5,69	4,78	0,325	0,34	0,357	76,46	79,08	79,89
11	Dki Jakarta	5,25	4,96	4,93	7,18	6,53	6,21	4,61	4,44	4,14	0,412	0,431	0,431	81,65	83,55	84,15
12	Jawa Barat	5,45	5	4,91	8,31	7,44	6,75	7,98	7,62	7,08	0,412	0,425	0,428	73,12	74,24	74,92
13	Jawa Tengah	5,31	4,98	4,93	5,57	5,13	4,78	10,98	10,77	9,58	0,366	0,369	0,364	72,79	73,39	73,87
14	Di Yogyakarta	5,15	5,07	5,05	4,06	3,69	3,48	11,49	11,04	10,4	0,459	0,449	0,428	80,64	81,09	81,62
15	Jawa Timur	5,34	4,95	4,91	5,49	4,88	4,19	10,49	10,35	9,56	0,365	0,387	0,373	72,75	74,65	75,35
16	Banten	5,03	4,81	4,93	8,09	7,52	6,68	6,24	6,17	5,7	0,377	0,368	0,359	73,32	75,77	76,35
17	Bali	4,84	5,71	5,43	4,8	2,69	1,79	4,53	4,25	3,8	0,362	0,362	0,348	76,44	78,01	78,63
18	Nusa Tenggara Barat	6,95	1,8	6,22	2,89	2,8	2,73	13,82	13,85	11,91	0,374	0,375	0,364	69,46	72,37	73,1
19	Nusa Tenggara Timur	3,05	3,52	3,66	3,54	3,14	3,02	20,23	19,96	19,02	0,34	0,325	0,316	65,9	68,4	69,14
20	Kalimantan Barat	5,07	4,46	4,87	5,11	5,05	4,86	6,81	6,71	6,25	0,311	0,321	0,314	68,63	70,47	71,19
21	Kalimantan Tengah	6,45	4,14	4,64	4,26	4,1	4,01	5,22	5,11	5,26	0,309	0,317	0,304	71,63	73,73	74,28
22	Kalimantan Selatan	5,11	4,84	5,23	4,74	4,31	4,2	4,61	4,29	4,02	0,309	0,313	0,298	71,84	74,66	75,19
23	Kalimantan Timur	4,48	6,22	5,52	5,71	5,31	5,14	6,44	6,11	5,51	0,317	0,322	0,31	77,44	78,2	78,79

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Rasio Gini			Indeks Pembangunan Manusia		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
24	Kalimantan Utara	5,34	4,94	4,29	4,33	4,01	3,9	6,86	6,45	5,38	0,27	0,277	0,259	71,83	72,88	73,41
25	Sulawesi Utara	5,42	5,48	5,21	6,61	6,1	5,85	7,34	7,38	6,7	0,359	0,37	0,347	73,81	75,04	75,68
26	Sulawesi Tengah	15,17	11,91	9,08	3	2,95	2,94	12,3	12,41	11,04	0,305	0,304	0,309	70,28	71,66	72,24
27	Sulawesi Selatan	5,09	4,51	5,08	4,51	4,33	4,19	8,66	8,7	7,77	0,365	0,377	0,36	72,82	74,6	75,18
28	Sulawesi Tenggara	5,53	5,35	5,24	3,36	3,15	3,09	11,27	11,43	10,63	0,366	0,371	0,365	72,23	72,94	73,62
29	Gorontalo	4,04	4,5	3,98	2,58	3,06	3,13	15,51	15,15	13,87	0,423	0,417	0,413	69,81	71,25	72,01
30	Sulawesi Barat	2,3	5,25	2,16	2,34	2,27	2,68	11,92	11,49	10,71	0,371	0,351	0,33	66,92	69,8	70,46
31	Maluku	5,11	5,21	6,23	6,88	6,31	6,11	16,23	16,42	15,78	0,306	0,288	0,291	70,22	72,75	73,4
32	Maluku Utara	22,94	20,49	4,42	3,98	4,31	4,03	6,37	6,46	6,03	0,309	0,3	0,296	69,47	70,98	71,84
33	Papua Barat	2,01	3,91	19,56	5,37	4,18	4,13	21,43	20,49	21,09	0,384	0,37	0,385	65,89	66,84	67,69
34	Papua Barat Daya	-	-	-	-	6,58	6,48	-	-	16,95	-	-	0,347	-	69,07	69,65
35	Papua	8,97	5,22	1,66	2,83	6,9	6,48	26,8	26,03	18,09	0,393	0,386	0,405	61,39	73,23	73,83
36	Papua Selatan	-	-	-	-	3,38	4,05	-	-	19,35	-	-	0,424	-	68,24	68,86
37	Papua Tengah	-	-	-	-	2,13	2,75	-	-	27,6	-	-	0,355	-	59,44	60,25
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	1,02	1,32	-	-	29,66	-	-	0,346	-	53,45	54,43
INDONESIA		**5,31**	**5,05**	**4,95**	**5,86**	**5,32**	**4,91**	**9,57**	**9,36**	**8,57**	**0,381**	**0,388**	**0,381**	**72,91**	**74,39**	**75,02**

Sumber: BPS RI, diolah 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah memasuki tahun terakhir periodisasi. Berdasarkan capaian IKU tahun 2023, diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki predikat Sangat Tinggi. Predikat Sangat Tinggi memiliki tingkat capaian kinerja 91 persen ≤ 100 persen, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hanya terdapat tiga indikator yang belum mencapai target tahun 2023, yaitu: Persentase penduduk miskin, Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru, dan Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan. Sedang terdapat 2 (dua) Indikator yang belum memiliki nilai capaian 2023 yaitu Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Demokrasi, karena menunggu rilis data dari kementerian terkait.

Indikator Kinerja Utama yang mencapai target sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi. Indikator yang tercapai sebanyak 100 persen disebabkan pada tahun 2021 dilakukan perubahan RPJMD yang memuat realisasi sebagai kinerja IKU tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dari 30 IKU sebanyak 28 indikator atau 93,3 persen yang mencapai target sebagaimana dimuat dalam RPJMD. Sementara indikator yang tidak mencapai target sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Nilai Tukar Petani (NTP). Informasi lebih rinci mengenai capaian IKU disajikan pada tabel di bawah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022		2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,6	8,78	8,8	8,83	9,03	8,87	98,23%
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,54	12,62	12,6	12,68	12,75	12,8	100,00%
3	Angka Harapan Hidup	tahun	73,09	73,52	73,71	74,91	73,9	75,16	100,00%
4	Prevalensi *Stunting*	persen		20,2	19,2	21,7	15,52	n/a	
5	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp0.00		11277	11,39	11,695	11504	12157	100,00%
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	persen	7,67	7,98	7,41	7,62	7,34	7,08	96,46%
7	Indeks Pemberdayaan Gender	nilai	69,8	71,22	70,3	71,74	71,37	n/a	
8	Indeks Perlindungan Anak	angka		63,5*	48,23	65,74*	64,5	n/a	
9	Indeks Pembangunan Pemuda	poin	52	48	54	51,17	51,84	n/a	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen		1,42	1,42	1,12	1,42	n/a	
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	persen	3,4	7	6	4,74	5,76	3,93	68,23%
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	persen	4,01	4,22	4,45	4,36	4,53	4,27	94,26%
13	Skor Pola Pangan Harapan	poin	84,8	92,3	92,8	93,80	93,3	93,28	99,98%
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	103,39	99,74	100,71	107,46	107,92	112,17	100,00%
15	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen		4,41	4,45	0,11	4,5	-3,26*	-72,44%
16	Laju Pertumbuhan Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	persen		11,27	11,77	8,72	12,3	2,76*	22,44%
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	triliun rupiah	515,31	576,9	521,78	644,38	644,88	708,47	100,00%
18	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	persen	20,5	21,62	22,00	28,84	23,34	26,84*	100,00%
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	10,16	8,31	8,13	7,44	8,01	6,75	84,27%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022		2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Tingkat Konektivitas	persen	44	53,2	57,87	59,62	60	60,61	100,00%
21	Indeks Kualitas Infrastruktur	persen	75,56	74,47	69,57	70,71	69,94	70,00	100,00%
22	Persentase rumah tangga hunian layak	persen	52,8	53,37	53,9	54,14	54,47	56,25	100,00%
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	60,78	64,66	61,6	64,77	66,13	66,09	99,93%
24	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	4,75	5,86	6,49	7,25	7,98	7,99	100,00%
25	Indeks Risiko Bencana	poin	147	131,62	130	123,16	119	114,15	104,07%
26	Indeks Desa Membangun	poin	0,71	0,75	0,72	0,77	0,77	0,8013	100,00%
27	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	poin	71,79	80,52	81,32	83,04	82,14	n/a	
28	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	A (80,01)	A	A	A (93,08)	A	n/a	
29	Indeks Inovasi Daerah	poin		69,15	69,35	74,77	69,65	81,27	100,00%

Sumber: - Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025
- BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2024

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau akses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari misi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator dan target per tahun untuk mengukur kinerja pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, target dan realisasi serta tingkat capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 2.115
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL	2019		2020		2021		2022		2023		
				2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		4	5	6	8	9	11	12	14	15	14	15	16
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI															
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban															
1.1.	Terwujudnya manusia yang ber-Ketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Demokrasi (poin)	73,91	68,79 - 70,78	69,09	70,7	69,09	70,79	79,72	71,79	80,52	80,25	83,04	103,47
1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,7	68,60 – 69,00	68,5	68,1	68,5	68,6	72,7	69,1	72,21	73,09	74,10	101,38%
		b.	Indeks Demokrasi (poin)	65,5	68,79 - 70,78	69,09	70,7	71,32	70,79	79,72	71,79	80,52	80,25	83,04	103,47
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif															
2.1.	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	71,3	71,42-71,91	72,03	71,82	72,09	72,19	72,45	72,57	73,12	73,05	73,74	100,94%
2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,25	6,66-6,90	6,82	8,48	7,88	7,77	8,4	7,67	7,98	7,54	7,62	98,94%
		b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,17	8,00-7,90	8,04	10,58	10,46	10,45	9,82	10,16	8,31	8,13	7,44	108,49%
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,76	73,67 – 74,87	72,85	72,82	73,04	73,06	73,23	73,09	73,52	73,65	73,80	100,20%
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,2	70,34	69,48	69,48	70,24	69,6	70,62	69,8	71,22	71,36	71,74	100,53%
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,19	89,32	89,26	89,26	89,2	89,3	89,36	89,42	89,8	90,02	90,23	100,23%
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,18	8,28	8,37	8,35	8,55	8,58	8,61	8,6	8,78	8,8	8,83	100,34%
		b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	13,15	12,48	12,2	12,5	12,52	12,61	12,54	12,62	12,63	12,68	100,40%
2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	49	53,63	50	49	48,83	50	49	52	48	54	51,17	94,75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	KONDISI AWAL	2019		2020		2021		2022		2023		
				2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	4	5	6	8	9	11	12	14	15	14	15	16
2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan dan nilai budaya lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A	16,63	17,43	8,07	17,86	19,56	24,78	24,89	30,36	31,02	31,15	100,42%
2.2.1.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A	16,63	17,43	8,07	17,86	19,56	24,78	24,89	30,36	31,02	31,15	100,42%
2.2.2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (poin)	69,61	70,00-71,00	77,5	70	88,4	72	87,5	74	87,5	88	100	113,64%
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah															
3.1.	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Williamson (poin)	0,673	-	0,665	0,664	0,692	0,659	0,667	0,655	0,67	0,650	0,696	107,07%
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.231	1.300	1.302	1.000	1.146,60	1.050	1.280,53	1.100	1.337,16	1.340	1.346,41	100,48%
3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen)	41	41,00 – 43,00	46,13	38	39,06	41	43,51	44	53,2	55	59,62	108,40%
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,7	0,72	0,71	0,7529	0,76	0,77	101,32%
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	1	3	0	2	1	3	2	1	50,00%
3.2.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	60,57	61,59	60,78	62,69	61,19	64,66	61,6	64,77	105,15%
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	60,57	61,59	60,78	62,69	61,19	64,66	61,6	64,77	105,15%

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL	2019		2020		2021		2022		2023		
				2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		4	5	6	8	9	11	12	14	15	14	15	16
	perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	b.	Tingkat upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,38	2,8	3,85	3,82	3,87	4,29	4,23	4,75	5,86	6,49	7,25	111,71%
		c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	n/a	-	-	50,6	52,28	51,7	53,14	52,8	53,14	53,90	54,14	100,45%
3.2.2.	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A (dihitung per tahun 2019)	1,192	1,192	1,1927	1,1927	1,1922	1,1913	1,1912	1,1878	1,187	1,1765	100,88%
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	165	152,13	150,45	145,82	149	134,94	147	131,69	130	123,16	105,26%
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan															
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)	5,66	5,40-5,80	5,07	-2,63	-2,52	3,15	3,74	3,92	5,45	4,35	5,00	114,94%
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	89	82,4	84,8	83,2	84,1	84	84,1	84,8	92,3	92,8	93,8	101,08%
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	110,9	113,11	112,36	101,12	101,41	102,25	97,84	103,39	99,75	104,52	107,45	102,80%
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,85	2,30-3,00	6,84	2,65	2,85	2,91	2,84	2,99	3,01	3,08	3,2	103,90%
4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	6,49	2,63	4,04	-4,49	-4,22	2,78	4,22	3,4	7	4,14	4,74	114,49%
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,19	3	7,51	-7,96	-7,94	3,23	3,19	4,01	4,22	4,45	4,36	97,98%
4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	473	495,4	535,72	490,16	493,96	501,52	547,93	515,31	576,9	613,86	644,38	104,97%
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	20,1	21	21,1	19	19,41	19,9	21,67	20,5	21,62	21,32	28,84	135,27%
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota															
5.1.	Terwujudnya good governance dan whole of government	a.	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB -78,01	BB	BB 78,01	BB 78,68	A 80,01	A 80,7	A 82,01	A 93,08	113,50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Mobile, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL	2019		2020		2021		2022		2023		
				2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		4	5	6	8	9	11	12	14	15	14	15	16
5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB -78,01	BB	BB 78,01	BB 78,68	A 80,01	A 80,7	A 82,01	A 93,08	113,50%
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A	50	61,22	54	73,43	56	80,24	58	86,5	87	91,26	104,90%

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan BPS RI, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2024

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian: < 50 persen Sangat Rendah; 51 persen < 65 persen Rendah; 66 persen < 75 persen Sedang; 76 persen < 90 persen Tinggi dan 91 persen < 100 persen Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2022 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.116
Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*)

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100	Sangat Tinggi
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	92.83	Sangat Tinggi
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.11	Tinggi
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.28	Tinggi
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	Sangat Tinggi
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100	Sangat Tinggi
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	100	Sangat Tinggi
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100	Sangat Tinggi
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	100	Sangat Tinggi
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	100	Sangat Tinggi
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	98.03	Sangat Tinggi
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100	Sangat Tinggi
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	Sangat Tinggi
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100	Sangat Tinggi
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100	Sangat Tinggi
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100	Sangat Tinggi
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	100	Sangat Tinggi
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	80	Tinggi
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	98.57	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100	Sangat Tinggi
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100	Sangat Tinggi
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	79.72	Tinggi
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	97.72	Sangat Tinggi
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100	Sangat Tinggi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	100	Sangat Tinggi
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	100	Sangat Tinggi
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	88.09	Tinggi
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	78.75	Tinggi
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	74.61	Sedang
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	87.5	Tinggi
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	86.93	Tinggi
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	100	Sangat Tinggi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4.01	Sekretariat Daerah	86.2	Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	100	Sangat Tinggi
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5.01	Perencanaan	100	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	82.47	Tinggi
5.03	Kepegawaian	100	Sangat Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	95.93	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	100	Sangat Tinggi
5.07	Pengelolaan Penghubung	100	Sangat Tinggi
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6.01	Inspektorat Daerah	100	Sangat Tinggi
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	100	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan evaluasi dari Tabel 2.116 di atas rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD tahun 2023 pada 40 urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat berada pada level **Sangat Tinggi – Tinggi**. Adapun urusan pertanahan memiliki capaian rendah hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya realisasi pemanfaatan tanah kosong untuk pembangunan strategis serta penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*)

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program (*outcome*). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat secara triwulanan.

Berikut ini disajikan tabel realisasi indikator kinerja program (*outcome*) hingga Triwulan III Tahun 2024. Data bersumber dari laporan evaluasi hasil Renja dan aplikasi e-Monev Jabar (https://e-monev.jabarprov.go.id/), yang dikumpulkan pada Desember 2024 oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 2.117
Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1						
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
	DINAS PENDIDIKAN					
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	NIlai Rata-rata Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB **	65.45	NILAI	65.45	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB **	72.23	NILAI	72.23	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB	60.43	NILAI	60.43	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Kompetensi Literasi *	66.95	NILAI	66.95	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB **	0.11	PERSEN	0.11	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Kompetensi Numerasi *	57.85	NILAI	57.85	100	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB **	66.6	NILAI	66.6	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan Angka Putus Sekolah	0.11	PERSEN	0.11	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK **	85.7	NILAI	85.7	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK **	82.86	NILAI	82.86	100	Sangat Tinggi
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					
	Indeks Refleksi Guru	63.5	INDEKS	63.5	100	Sangat Tinggi
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
	DINAS KESEHATAN					
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
	Persentase Kab/kota dengan IKS >60%	1.97	PERSEN	3.7	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan	18	PERSEN	55.5	82.24	Tinggi
	Persentase Kab/kota yang Menurun Angka Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular	85	PERSEN	86.79	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	67.24	PERSEN	72.84	100	Sangat Tinggi
	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC)	96	PERSEN	97.47	100	Sangat Tinggi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					
	Persentase Kabupaten/ Kota Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	55	PERSEN	60.02	100	Sangat Tinggi
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					
	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Sesuai Standar Perizinan	92	PERSEN	92.51	92.23	Sangat Tinggi
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					
	Persentase Kab/kota dengan Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS >80%	70	PERSEN	70	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS nya)	5	PERSEN	5	100	Sangat Tinggi
1.03						
	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG					
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					
	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	100	PERSEN	99.93	99.93	Sangat Tinggi
	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	100	%	99.93	99.93	Sangat Tinggi
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
	Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100	PERSEN	99.93	99.93	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	20	PERSEN	20	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100	PERSEN	99.93	99.93	Sangat Tinggi
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					
	Persentase Kawasan yang Dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	70.4	PERSEN	70.4	100	Sangat Tinggi
	Persentase Ketersediaan Kebijakan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang	66.7	PERSEN	66.7	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	70	PERSEN	70	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	60	PERSEN	60	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Sinkronisasi RTR Kabupaten/Kota	32	PERSEN	32	100	Sangat Tinggi
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					
	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					
	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	76	PERSEN	60.08	79.05	Sangat Tinggi
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					
	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					
	Persentase Luas genangan yang tertangani	77	PERSEN	78.26	100	Sangat Tinggi
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					
	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					
	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	87.1	PERSEN	95	100	Sangat Tinggi
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					
	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0.2	RASIO	0.2	100	Sangat Tinggi
	DINAS SUMBER DAYA AIR					
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					
	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	49.4	PERSEN	49.4	100	Sangat Tinggi
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.04						
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani 10-15 Ha	19.15	PERSEN	28.438	100	Sangat Tinggi
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					
	Persentase Perumahan Terfasilitasi PSU	53.26	PERSEN	91.57	100	Sangat Tinggi
1.05						
	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA					
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang Mendapatkan Pelatihan	82	PERSEN	82	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	PERSEN	75	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	50	PERSEN	8	16	Sangat Rendag
	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur yang Terselesaikan	27	PERSEN	14	51.85	Sangat Rendah
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					
	Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada Saat Keadaan Darurat Bencana)	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan dan/atau Pendampingan Pasca Bencana	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					
	Persentase Pemetaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	50	PERSEN	50	100	Sangat Tinggi
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
	DINAS SOSIAL					
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					
	Persentase PSKS aktif	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase PSKS yang Aktif	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					
	Persentase PPKS (Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan) yang Dipulangkan ke Kab/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					
	Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					
	Persentase Anak yang Mendapat Orang Tua Angkat	70	PERSEN	70	100	Sangat Tinggi
	Persentase KPM yang Mendapatkan Bimbingan Kewirausahaan Sosial	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					
	Persentase Korban Bencana yang Terpehuni Kebutuhan Dasar	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2						
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	48.3	PERSEN	48.3	100	Sangat Tinggi
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	90	PERSEN	90	100	Sangat Tinggi
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**					
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20.15	PERSEN	24.3	100	Sangat Tinggi
2.08						
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA					
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					
	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	57.04	PERSEN	0	0	~~Sangat Tinggi~~ Sangat Rendah
	Persentase sumber daya manusia terbina yang menerapkan pengarusutamaan gender	9.62	PERSEN	9.62	100	Sangat Tinggi
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	1.71	ANGKA	1.71	100	Sangat Tinggi
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					
	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di kabupaten/kota di Jawa Barat	18.52	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan untuk tahapan standarisasi di Jawa Barat	18.52	PERSEN	18.52	100	Sangat Tinggi
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					
	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					
	~~Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi~~	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Mobile, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					
	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	0.21	ANGKA	0.21	100	Sangat Tinggi
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN					
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					
	Persentase Cadangan Pangan	50	PERSEN	50	100	Sangat Tinggi
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					
	Persentase Desa Rentan Pangan yang Diintervensi	3	PERSEN	3	100	Sangat Tinggi
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					
	Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT **	2	PERSEN	2	100	Sangat Tinggi
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
2.10.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**					
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
	Persentase Invetarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang Selesai Tepat Waktu	**100**	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Terfasilitasi Redistribusi Tanah dan Penataan Akses Dibagi Jumlah Kabupaten/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					
	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	~~100~~ 20	PERSEN	~~100~~ 20	100	Sangat Tinggi
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**					
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan dan/atau Produk Hukum	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Sudah Terintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	21.2	MG/M3	0	0	Sangat Rendah
	Penurunan Parameter COD (mg/L)	24.87	MG/L	0	0	Sangat Rendah
	Persentase Kab/kota di Wilayah Pesisir yang Dibina	33.33	PERSEN	33.33	100	Sangat Tinggi
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					
	Persentase Taman Kehati atau RTH Kehati yang Dibina	89.99	PERSEN	89.99	100	Sangat Tinggi
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					
	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100	PERSEN	100,00	100	Sangat Tinggi
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					
	Persentase Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Provinsi	100	PERSEN	100,00	100	Sangat Tinggi
	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai Implementasinya	100	PERSEN	100,00	100	Sangat Tinggi
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**					
	Persentase Peningkatan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang Terinventarisir	75	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					
	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	76.46	PERSEN	76.46	100,00	Sangat Tinggi
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					
	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	77.17	PERSEN	77.17	100	Sangat Tinggi
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	97.89	PERSEN	99.18	100	Sangat Tinggi
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99	PERSEN	88.28	95.62	Sangat Tinggi
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					
	Persentase Data yang Dimanfaatkan	80	PERSEN	83.78	100	Sangat Tinggi
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					
	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**					
	Persentase Desa yang Difasilitasi Penataannya	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**					
	Persentase peningkatan nilai Indeks Komposit Ekonomi Desa di Kab/Kota	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					
	Desa yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					
	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	64.59	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Persentase kebijakan pengendalian penduduk yang diterapkan **	75	PERSEN	75	100	Sangat Tinggi
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Masyarakat yang Terpapar Program Kependudukan, Keluaga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) *	75	PERSEN	0	o	Sangat Rendah
	Persentase Peserta ber-KB Aktif/mCPR **	64.59	PERSEN	64.59	100	Sangat Tinggi
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					
	Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	5	PERSEN	5	100	Sangat Tinggi
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
	DINAS PERHUBUNGAN					
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					
	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat	0,19	Persen	35,13	-	Sangat Tinggi
	IKM Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	92,20	Persen	90,77	98,45	Sangat Tinggi
	IKM Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	90,20	Persen	91,64	101,60	Sangat Tinggi
	IKM Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	88,20	Persen	74,55	84,52	Sangat Tinggi
	IKM Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	93,80	Persen	96,75	103,14	Sangat Tinggi
	Persentase Perencanaan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	33,33	Persen	33,33	169,25	Sangat Tinggi
	Persentase Peningkatan Simpul Transportasi yang terkoneksi angkutan umum	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					
	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP	6,00	Persen	-33,07	-	Sangat Rendah
	IKM Layanan ASDP	86,80	Persen	89,88	103,55	Sangat Tinggo
	Persentase Peningkatan Simpul Transportasi Laut dan ASDP yang terkoneksi	20,00	Persen	33,85	169,25	Sangat Tinggi
	Persentase Persyaratan Pengelolaan Pelabuhan Laut yang Terpenuhi	60,00	Persen	67,50	112,50	Sangat Tinggi
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**					
	Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api	4,06	Persen	4,73	116,50	Sangat Tinggi
	Persentase kajian hasil pengembangan perkeretaapian yang diterapkan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase kajian hasil pengembangan bidang transportasi yang diterapkan	80,00	Persen	80,00	100	Sangat Tinggi
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	0	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					
	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	70	PERSEN	70	63.49	Rendah
	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo **	100	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terhubung dengan akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Diskominfo *	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL					
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**					
	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	8	PERSEN	8	100	Sangat Tinggi
	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	15	ERSEN	15	100	Sangat Tinggi
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					
	Persentase Kepatuhan Koperasi	15	PERSEN	15	100	Sangat Tinggi
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					
	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	25	PERSEN	25	100	Sangat Tinggi
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					
	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang MElaporkan RAT	7	PERSEN	20.54	100	Sangat Tinggi
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					
	Persentase Unit Usaha Umkm Yang Difasilitasi Pemasaran	22	PERSEN	22	100	Sangat Tinggi
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
	Jumlah Investor yang Berminat untuk Investasi	12	Investot	20	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Peningkatan Investor **	10	Persen	10	100	Sangat Tinggi
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					
	Jumlah Investor yang Berminat untuk Investasi	12	Investor	12	100	Sangat Tinggi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
	Persentase Pelayanan Perizinan yang Sesuai Standar	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					
	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh terhadap Ketentuan Penanaman Modal	15	PERSEN	15	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pengaduan dan Permohonan Advokasi yang Terlayani Sesuai Standar	100	PERSEN	100	100	Sangata Tinggi
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					
	Persentase Dokumen Data dan Informasi PMPTSP yang Dimanfaatkan	100	PERSEN	88.2	100	Sangat Tinggi
	Persentase Layanan PMPTSP yang Memanfaatkan Sistem Informasi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Perubahan untuk Mendukung Implementasi RB, ZI, Kinerja PPB dan MCP	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang Sesuai Ketentuan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					
	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	3.84	PERSEN	3.84	100	Sangat Tinggi
	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	72.72	PERSEN	72.71	99.99	Sangat Tinggi
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	14.39	PERSEN	14.4	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	18.11	PERSEN	18.11	100	Sangat Tinggi
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					
	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional	20	PERSEN	19.99	99.95	Sangat Tinggi
	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	10	PERSEN	10	100	Sangat Tinggi
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	87.87	PERSEN	87.87	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Kepramukaan	16.97	PERSEN	16.97	100	Sangat Tinggi
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	94	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	94.35	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					
	Nilai Akses dan Diseminasi Informasi **	94	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Nilai Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbarui **	94.35	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	98.45	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	98.45	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					
	Persentase Pemajuan Kebudayaan	28.98	PERSEN	28.98	100	Sangat Tinggi
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	33.33	PERSEN	33.33	83.33	Tinggi
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					
	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	1.49	POIN	0.274	18.39	Sangat Rendah
	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0.0026	POIN	0.902	100	Sangat Tinggi
	Rasio Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5)	2.1989	POIN	2.558	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM4)	0.428	POIN	0.393	91.92	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					
	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	25	PERSEN	25	100	Sangat Tinggi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Mobile, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional)	91	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip **	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	71	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**					
	Jumlah Produksi Garam	66000	TON	245547.05	100	Sangat Tinggi
	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	3	KAWASAN	3	100	Sangat Tinggi
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	268000	TON	282775.29	100	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	268000	TON	282775.29	100	Sangat Tinggi
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1233000	TON	1317795.35	100	Sangat Tinggi
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	85	PERSEN	93.23 100	100	Sangat Tinggi
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					
	Jumlah unit pengolahan ikan skala menengah dan besar	74	Unit	74	100	Sangat Tinggi
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					
	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	40	PERSEN	27	67.5	Rendah

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					
	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	27.27	PERSEN	28.4	100	Sangat Tinggi
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					
	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	26.1	PERSEN	104.29	100	Sangat Tinggi
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN					
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.5	PERSEN	1.5	100	Sedang
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
	Tingkat pemenuhan penataan prasarana peternakan **	33.3	PERSEN	33.3	100	Sangat Tinggi
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					
	persentase pengendalian penyakit hewan dari wilayah terdampak PHMSZ	86	PERSEN	86	100	Sangat Tinggi
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					
	Presentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	50	PERSEN	50	100	Sangat Tinggi
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	86	Persen	86	100	Sangat Tinggi
	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha) **	139.04	(KU/HA)	139.04	100	Sangat Tinggi
	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha) **	65.26	(KU/HA)	65.26	100	Sangat Tinggi
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					
	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	4.5	PERSEN	0	0	Sangat Rendah
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					
	Jumlah petani yang Menerapkan Teknologi melalui Pendampingan Penyuluh	7000	ORANG	7000	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	89.6	PERSEN	89.6	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kelompok Tani yang Dibina oleh Penyuluh	56.15	PERSEN	56.15	100	Sangat Tinggi
	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih *	18.18	PERSEN	18.18	100	Sangat Tinggi
	DINAS PERKEBUNAN					
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
	Laju Peningkatan Petani yang Terfasilitasi Promosi Produk Perkebunan	10	PERSEN	10	100	Sangat Tinggi
	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Pengolahan Produk Perkebunan	10	Persen	10	100	Sangat Tinggi
	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	25	Persen	25	100	Sangat Tinggi
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana perkebunan	20	%	20	100	Sangat Tinggi
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					
	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	20	PERSEN	20	100	Sangat Tinggi
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**					
	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	20	PERSEN	20.5	100	Sangat Tinggi
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					
	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	25	%	25	100	Sangat Tinggi
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**					
	DINAS KEHUTANAN					
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					
	Persentase Gangguan dan Kerusakan Hutan	0.4	PERSEN	0.4	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	3	PERSEN	3	100	Sangat Tinggi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Digital, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	10	PERSEN	10	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	1.5	PERSEN	9.8	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *	5	PERSEN	1	100	Sangat Tinggi
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**					
	Persentase Peningkatan Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix yang Berijin	5	PERSEN	5	100	~~Sedang~~ Sangat Tinggi
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**					
	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya	5	PERSEN	5	100	Sangat Tinggi
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**					
	Rasio RPDAS yang Telah Ditetapkan pada Wilayah DAS di Jawa Barat	53.1	PERSEN	53.1	100	Sangat Tinggi
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**					
	Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	13.56	PERSEN	32.87	100	Sangat Tinggi
	Persentase penetapan NPA di Jawa Barat	33	PERSEN	91.22	100	Sangat Tinggi
	Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat)*	57,4	PERSEN	82,34	100	Sangat Tinggi
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**					
	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	61	PERSEN	76.47	100	Sangat Tinggi
	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek tertib teknis	53.5	PERSEN	56.67	100	Sangat Tinggi
	Persentase pengujian kualitas bahan tambang di Jawa Barat)*	70	PERSEN	70,59	100	Sangat Tinggi
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**					
	Persentase Pemanfaatan EBT	33	PERSEN	33	100	Sangat Rendah
	Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan)*	33	PERSEN	33	100	Sangat Rendah
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	33	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase pemenuhan Tingkat Mutu Pelayanan penyediaan tenaga listrik kewenangan Provinsi	60	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase rumah tangga miskin yang menerima layanan listrik sesuai ketentuan)*	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
3.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					
	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkat Kualitasnya *	5.19	PERSEN	8.89	100	Sangat Tinggi
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**					
	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Barang Pokok **	6	PERSEN	3.17	100	Sangat Tinggi
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					
	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA *	10.45	Milyar USD	14.1	69.67	~~Sangat Tinggi~~
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					
	Persentase Barang Beredar dan/atau Jasa yang Diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang undangan **	77	PERSEN	88	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang undangan *	73	PERSEN	80	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen **	90	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					
	Peningkatan Nilai Omset Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemasaran Produk dalam Negeri *	25	PERSEN	2056	100	Sangat Tinggi
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Nilai Produksi Industri Pengolahan	1120 TRILIUN (1120)	Rupiah	1120	100	Sangat Tinggi
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha Industri	>50	PERSEN	>50	100	Sangat Tinggi
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					
	Persentase Peningkatan Industri yang Masuk SIINas	11	PERSEN	32.07	100	Sangat Tinggi
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					
	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	86	PERSEN	86	100	Sangat Tinggi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
	Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85.5	POIN	89.78	100	Sangat Tinggi
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**					
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50.15	PERSEN	62.72	10.42	Sangat Rendah
	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**					
	Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	85	PERSEN	92.67	100	Sangat Tinggi
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**					
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.15	NILAI	0	0	Sangat Rendah
	BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	50.15	POIN	70.2	100	Sangat Tinggi
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**					

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Elektronik, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Administrasi Pembangunan *	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	BIRO PEREKONOMIAN					
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	50.15	POIN	38	50	Sangat Rendah
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA					
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**					
	Level Maturitas UKPBJ *	3	LEVEL	3	100	Sangat Tinggi
	BIRO ORGANISASI					
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**					
	Nilai Pelaporan Kinerja	12.35	POIN	13.55	100	Sangat Tinggi
	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	3	PERINGKAT	4	100	Sangat Tinggi
	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan kebijakan sistem kerja Dinamis	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori “B”	92	PERSEN			
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik" **	66.79	PERSEN			
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal Baik	66.79	PERSEN			
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	80	PERSEN			
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan *	BAIK	KLASIFIKASI	BAIK	100	Sangat Tinggi
	BIRO UMUM					
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
	Nilai Indeks Kepuasa Pengguna Layanan Internal Setda *	B	NILAI	B	100	Sangat Tinggi
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					
	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5.01	**PERENCANAAN**					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					
	Rata-Rata Tingkat kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					
	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
5.02	**KEUANGAN**					
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat	TEPAT WAKTU	WAKTU	TEPAT WAKTU	100	Sangat Tinggi
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu	80	PERSEN	80	100	Sangat Tinggi
	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu	TEPAT WAKTU	WAKTU	TEPAT WAKTU	100	Sangat Tinggi
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	6	PERSEN	13.46	100	Sangat Tinggi
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					
	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	80	PERSEN	99.73	100	Sangat Tinggi
	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.36	PERSEN	1.09	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah *	69.5	PERSEN	45.13	64.94	Rendah
5.03	**KEPEGAWAIAN**					
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					
	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120	POIN	120	100	Sangat Tinggi
	Nilai Kriteria Pengembangan Karir	120	POIN	120	100	Sangat Tinggi
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	116.5	POIN	116.5	100	Sangat Tinggi
	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40	POIN	40	100	Sangat Tinggi
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					
	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi **	90	PERSEN	89.31	99.23	Sangat Tinggi
	Persentase Diklat yang Terakreditasi **	100	PERSEN	89.31	89.31	Tinggi
	Persentase Pelaksana Sertifikat Kompetensi dan ber-STTPL *	90	PERSEN	89.31	99.23	Sangat Tinggi
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Teknologi dan Hasil Kelitbangan	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**					
	BADAN PENGHUBUNG					
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**					
	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, dan Promosi Informasi Yang Difasilitasi	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Peramban, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kode	Urusan / Bidang Urusan / SKPD / Sub SKPD / Program / Indikator	Target Kinerja	Satuan Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					
	INSPEKTORAT					
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					
	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	100	PERSEN	218.9	100	Sangat Tinggi
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					
	Terselenggara kegiatan pembinaan dan pengawasan	100	PERSEN	68.56	100	Sangat Tinggi
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					
	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan **	0.01	PERSEN	0.01	100	Sangat Tinggi
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					
	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri **	0.01	PERSEN	0.01	100	Sangat Tinggi
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					
	Persentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan **	0	PERSEN	0	100	Sangat Tinggi
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya	100	PERSEN	100	100	Sangat Tinggi
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					
	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial **	0.01	PERSEN	0.01	100	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Mobile, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Berdasarkan data yang tertera, dapat diketahui bahwa terdapat 251 indikator kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah yang dievaluasi. Tingkat ketercapaian indikator kinerja program tersebut mencapai 80,88 persen. Dengan kata lain, terdapat 203 indikator kinerja program yang hasil realisasinya memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan indikator kinerja program yang tidak tercapai sebanyak 48 indikator atau sebesar 19,12 persen. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) indikator yang tidak tersedia datanya atau tidak dilaporkan realisasi capaian oleh Perangkat Daerah penanggung jawab.

2.2.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2024 hingga Triwulan III dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada Triwulan III, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 hingga Triwulan III, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja, seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah dan faktor penghambat antara lain: adanya penyusunan ulang anggaran, proses pencairan dana terkendala, dan sebagainya. Untuk penjelasan yang lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.118
Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat hingga Triwulan IV Tahun 2024

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
DINAS PENDIDIKAN	Kepemimpinan yang Visioner dan Tegas. Pemimpin yang mampu memberikan arahan strategis, mengambil keputusan yang tepat, dan mendorong inovasi dalam pelaksanaan program.	Perencanaan yang Tidak Optimal. Penyusunan program atau kegiatan yang kurang berbasis data dan tidak selaras dengan target pembangunan daerah.
	Perencanaan yang Matang dan Terintegrasi. Penyusunan rencana strategis yang berbasis data dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Daerah.	Keterbatasan Anggaran. Tidak memadainya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai IKU.
	Sumber Daya Manusia yang Kompeten. Ketersediaan aparatur dengan keahlian, pengetahuan, dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten. Keterbatasan aparatur dengan keahlian dan pengalaman yang sesuai, atau rendahnya motivasi kerja.
	Pengelolaan Anggaran yang Efektif. Penyediaan anggaran yang memadai serta penggunaan yang efisien dan sesuai prioritas program.	Koordinasi yang Lemah. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah atau antar unit dalam satu perangkat daerah, sehingga menimbulkan tumpang tindih atau kesenjangan dalam pelaksanaan program.
	Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Perangkat Daerah. Sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan *stakeholder* untuk mencapai tujuan bersama.	Hambatan Regulasi. Kebijakan atau aturan yang kurang mendukung atau bertentangan dengan kebutuhan pencapaian target IKU.
	Partisipasi Masyarakat. Dukungan aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program, baik melalui partisipasi langsung maupun dukungan moral.	Ketergantungan pada Pihak Lain. Beberapa target IKU memerlukan dukungan pihak eksternal, seperti masyarakat, swasta, atau instansi lain, yang mungkin tidak berjalan optimal.
	Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program yang dicanangkan oleh perangkat daerah.
	Pengawasan dan Evaluasi yang Berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.	Keterbatasan Teknologi dan Data Tidak adanya sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data kinerja.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Dukungan Regulasi yang Jelas. Adanya kebijakan, peraturan, dan pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target.	Faktor Lingkungan Eksternal. Kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam, perubahan ekonomi global, atau pandemi, yang berdampak pada pelaksanaan program.
	Budaya Kerja yang Berorientasi pada Kinerja. Membangun budaya kerja yang fokus pada hasil (result-oriented) dan komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik.	Resistensi terhadap Perubahan. Aparatur atau pemangku kepentingan yang kurang terbuka terhadap inovasi atau perubahan dalam pelaksanaan program.
		Monitoring dan Evaluasi yang Lemah. Kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi masalah sejak dini.
		Budaya Kerja yang Tidak Produktif. Rendahnya disiplin kerja, kurangnya rasa tanggung jawab, atau minimnya penghargaan
DINAS KESEHATAN	Kebijakan dan Program Kesehatan yang Efektif, Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, memastikan layanan kesehatan yang lebih baik tersedia di semua wilayah	Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
	Sinergi Antar Lintas Sektor, Kolaborasi dengan sektor pendidikan mendorong peningkatan literasi kesehatan, termasuk pentingnya gizi seimbang dan PHBS	Keterbatasan Sumber Daya, Alokasi anggaran yang terbatas memengaruhi kemampuan daerah untuk melaksanakan program kesehatan secara optimal.
	Dukungan Teknologi dan Data, Penggunaan aplikasi berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Kesehatan, memungkinkan pengelolaan data kesehatan yang lebih baik untuk pemantauan dan evaluasi program	Masalah Data dan Pemantauan, Kurangnya konsistensi dan validitas dalam pengumpulan dan pelaporan data kesehatan menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan evaluasi program
	Komitmen Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat	
	Dukungan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat	
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, Biro Barang dan Jasa dalam proses pengadaan, khususnya lelang Pra DPA	Terlambatnya proses lelang
	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan karena kendala cuaca, bencana alam, banyaknya utilitas dilokasi pekerjaa
	Tersedianya alokasi anggaran yang cukup mendekati kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan	Diperlukan perbaikan mutu untuk hasil yang lebih optimal melalui penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan alokasi anggaran secara proporsional (sesuai kapasitas dinas dan *stakeholder* terkait) untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya Kegiatan Pelatihan dan Diklat dan Bimbingan Teknik Peningkatan Sumber Daya Aparatur	
DINAS SUMBER DAYA AIR	Beberapa Sub Kegiatan sesuai dengan rencana dan mempunyai Kinerja yang baik	-
	Agar memperhtikan kembali dan mencermati target keuangan dan fisik agar sesuai antara rencana dan realisasi	
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Arahan Pimpinan yang cermat dalam penyelesaian masalah pada pekerjaan fisik	Adanya perubahan nomenklatur Kementerian yang ada di Pemerintah Pusat sehingga mempengaruhi pekerjaan yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian terkait tersebut
	Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan	Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tanggal kontrak, sehingga paket tersebut diberikan tambahan waktu 50 Hari Kerja untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak.
SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	Adanya dasar hukum pelaksanaan yang jelas Seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat	Luas wilayah dan Keterbatasan Jumlah Personil Kurangnya kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Kurangnya SDM pada BPBD Provinsi Jawa Barat
		Sarana dan prasarana BPBD kurang memadai
DINAS SOSIAL	Ketepatan Waktu dalam Penyelenggaraan/Pelaksanaan Kegiatan	Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	Dukungan dari perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan	Beberapa pemahaman teknis pada capaian output dan outcome masih belum sesuai dengan timline namun dari sisi ketercapaian anggaran maupun fisik sudah tercapai sesuai dengan target rencana kerja
	Koordinasi yang baik antara bidang dalam penyediaan data dan informasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan pekerjaan	
	Kolaborasi dan komunikasi yang inovatif antara pemangku sektor Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	Kegiatan Pengadaan cadangan pangan komoditas beras sudah terlaksana tetapi ada 800 jt an efisiensi dari pengadaan sedangkan pengadaan cadangan pangan komoditas pangan lainnya (daging ayam, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir) sudah memasuki tahap negosiasi pada proses pengadaan dengan biro PBJ melalui metode pengadaan e catalog dan proses administrasi dengan penyedia, tetapi tidak terlaksana dikarenakan secara teknis dan administrasi serta keterbatasan waktu pihak penyedia tidak menyanggupinya
	Melaksanakan konsolidasi antara pengelola administrasi keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Bendahara Pengeluaran yang diawasi oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrasi	Sisa anggaran lainnya dikarenakan memang untuk antisipasi penyaluran bantuan cadangan pangan tidak terserap semuanya (sewa kendaraan truk untuk distribusi, dll)
	Telah dilaksanakannya percepatan pelaksanaan kegiatan	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ketepatan Waktu dalam Penyelenggaraan/Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Masih dalam Waktu yang telah ditetapkan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tingkatan koordinasi yang baik antara Kementrian yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Jawa Barat	Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kebermanfaatan Dokumen Administrasi Kependudukan
	Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal penyusunan dan analisis data Profil Kependuduka	Belum Optimalnya Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah
	Pemanfaatan Teknologi Informasi sosial media dalam hal Sosialisasi Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan	Sulitnya proses pemadanan/penyandingan data kependudukan dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat yang berdampak Disdukcapil Provinsi tidak dapat memberikan/menyajikan data kependudukan kepada instansi/lembaga lain karena sudah tidak memilki data By Name By Address (BNBA);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Terbatasnya Sarana dan Prasarana Untuk Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
		Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten di Bidang Administrasi Kependudukan;
		Tantangan Kondisi Geografis.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Ketersediaan anggaran yang cukup akan memungkinkan SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatannya secara optimal.	Rendahnya motivasi pegawai dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang terlalu tinggi, kurangnya penghargaan, atau ketidakjelasan karier
	Kualitas SDM yang baik, baik dari segi pendidikan, pengalaman, maupun kompetensi teknis, akan meningkatkan produktivitas kerja.	
DINAS PERHUBUNGAN	Dibentuknya Tim Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi	Komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang belum optimal
	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan di Jawa Barat agar terjalin kolaborasi dan sinergitas yang lebih baik dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta *stakeholder* terkait untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama	Kompetensi sumber daya manusia pada setiap unit kerja yang belum merata
		Ketersedian data yang belum terinventarisir dengan baik dan belum terintegrasi secara spasial
		Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Tahap II mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan putus kontrak terhadap penyedia
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja	Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
	Tersedianya prosedur pelaksanaan yang baku dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	Adanya ketergantungan terhadap Institusi lain dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
	Adanya keselarasan dengan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	Terhambatnya proses pencairan keuangan
	Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	Memperoleh modal usaha yang lebih besar melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya menjadi faktor penting untuk mengembangkan usaha koperasi dan UMKM. Adanya program kredit atau dukungan pembiayaan seperti KUR dan LPDB yang lebih mudah menjadi pendorong utama	Koperasi dan UMKM sering kali kesulitan dalam memperoleh modal yang cukup untuk ekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi. Banyak yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan karena kendala administrasi atau jaminan.
	Fokus pada inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan tren pasar atau kebutuhan konsumen membantu koperasi dan UMKM bersaing di pasar yang lebih besar	Banyak koperasi dan UMKM yang tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengelola bisnis secara efisien dan berkembang lebih besar
	Pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan kemampuan manajerial, seperti dalam hal keuangan, pemasaran, dan pengelolaan SDM, sangat penting untuk koperasi dan UMKM agar dapat berkembang lebih jauh.	Beberapa koperasi dan UMKM sulit untuk mengakses pasar yang lebih luas, terutama jika mereka terfokus pada pasar lokal yang lebih kecil dan kurang mengenal strategi pemasaran digital.
	Memanfaatkan teknologi digital, e-commerce, dan platform online memungkinkan koperasi dan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global	Koperasi dan UMKM kesulitan bersaing dengan produk dari perusahaan besar atau brand besar yang memiliki sumber daya lebih banyak dan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif
	Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi dan UMKM, seperti insentif pajak, program pendampingan, atau kemudahan dalam perizinan usaha, sangat membantu koperasi dan UMKM untuk tumbuh	Koperasi dan UMKM yang masih menggunakan teknologi dan sistem tradisional yang kurang efisien, serta terbatasnya infrastruktur yang mendukung operasional yang lebih besar
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi yang baik antar bidang dalam penyediaan data dan informasi	Keterbatasan sumber daya ; seperti anggaran, sumber daya manusia juga sarana dan prasarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan	Perubahan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
	Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan	Kesulitan dalam pengumpulan data yang terkait realisasi investasi karena semuanya ada di Kementerian Investasi/BKPM
	Ide/gagasan untuk pengembangan Sistem Informasi	Tidak tersampaikan nya informasi yang dibutuhkan kepada pelaku usaha tentang peluang investasi di Jawa Barat
	Kemajuan teknologi dan inovasi	
	Peraturan Kementerian Investasi untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Ketersediaan anggaran yang mencukupi dapat mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.	Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
	SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola program dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.	Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
	Koordinasi yang baik antara bidang dan memaksimalkan sumber daya yang ada.	Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat implementasi program, terutama di daerah terpencil.
	Komitmen yang selaras dengan kebutuhan daerah dapat mempercepat pencapaian target kinerja.	Kurangnya komitmen antar dapat menyebabkan tumpang tindih inefisiensi sumber daya.
	Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi operasional.	SDM memiliki resistensi terhadap perubahan atau inovasi, yang dapat menghambat implementasi kebijakan baru.
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Dibentuknya Team of Team lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sarana dan prasaran kerja memadai	Keterbatasan aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
	Keterseidaan dana tepat waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas sub kegiatan
	Akselerasi ketercapaian output sub kegiatan	Kegiatan bersifat penyediaan
	Pemanfaatan dukungan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan pustakawan dan arsiparis dalam diklat terkait Public Speaking dan Communication Skill secara offline maupun online	Keterbatasan dan gangguan jaringan SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Mobile, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Jalinan komunikasi dan kerjasama antar bidang	Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi Perangkat Daerah lain (diklat pegawai)
	Peran serta media sosial dalam meningkatkan promosi program dan kegiatan	Keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah
	Kebijakan Pemprov Jabar yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 dan No. 12 Tahun 2022 tentang Perpustakaan dan Kearsipan	Rendahnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah
		Sarana pendukung layanan perpustakaan keliling dan layanan perbaikan arsip belum mencukupi permintaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memilliki Potensi Budidaya Ikan yang Tinggi	Upaya pengembangan luas kawasan pergaraman perlu dukungan sarana prasarana yang memadai, dukungan *stakeholder* lokal maupun pusat serta kolaborasi berbagai pihak
	Koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan POKMASWAS dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan dan Perikanan Tangkap masih belum optimal
	Adanya bazar produk hasil perikanan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulanny	Kurangnya SDM yang memahami menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran
	Koordinasi yang Baik Antar Unit Kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Berkurangnya minat budidaya ikan bagi kaum muda
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanam	Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanam	Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran
	Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanam	Proses pencairan dana mengalami keterlambatan
		Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal tanam
DINAS PERKEBUNAN		
DINAS KEHUTANAN	Koordinasi yang cukup baik antara dinas dengan UPTD dan CDK dalam penyediaan data dan informasi	Kurangnya ketersediaan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan program/kegiatan
	Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan	Proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas ESDM, unit kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun dengan Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	Terdapat hambatan mengenai pemanfaatan tenaga listrik non-PLN yang menurun di antaranya tidak dilakukan perpanjangan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) antara PT Tatajabar Sejahtera dan PT. Green Power South East Asia, sehingga PT. Green Power South East tidak memproduksi listrik mulai September 2024 dan PT Dian

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Swastatika Sentosa-Unit Karawang 1 dan 2 sedang dalam proses permohonan pencabutan IUPTLU karena beralih menjadi IUPTLS.
	Kerja sama yang baik antara Dinas ESDM dengan instansi lainnya seperti Pemerintah Pusat, Perusahaan/ Pemilik Izin Usaha Sektor ESDM, Asosiasi, Akademisi, dan masyarakat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dinas	Belum terdapat platform aplikasi untuk melakukan validasi data secara langsung di lapangan guna mendukung keabsahan data dukung penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi sehingga data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.
	Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) y guna mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran dinas	Terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan, sehingga tidak semua Pemegang IUP dapat dilakukan pengawasan.
	Pemberian sambungan listrik untuk rumah tangga miskin belum berlistrik di Jawa Barat melalui skema pendanaan APBD dan CSR Jabar Caang.	Kewajiban pelaporan berkala oleh Pemegang IUP belum berjalan dengan baik dan optimal.
	Pembangunan PLTS Atap di 7 SMA/K pada Wilayah Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendorong peningkatan bauran EBT di Jawa Barat, penyusunan Laporan Akhir PEP RAD GRK 2024, Lembar Platform Pengisian Capaian Kinerja Tahunan PEP RAD GRK, Data Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi 2022 s/d 2024, data dari Aplikasi SIBENI (Sistem Informasi Bidang Energi), perhitungan pencapaian Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi secara lengkap dilaporkan melalui aplikasi AKSARA dan diverifikasi oleh BAPPENAS dan desk penyesuaian angka target tingkat penurunan emisi GRK pada sektor energi dengan BAPPEDA (koordinator PEP RAD GRK seluruh sektor di Jawa Barat).	Kurangnya penguatan organisasi dimana Pemilik Perusahaan atau Pemegang IUP kurang mendukung program KTT yang telah direncanakan dalam RKAB.
	Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan kewajiban pelaporan bagi pemegang IUP serta memberikan surat teguran kepada pemegang IUP bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan serta mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan presentasi pelaksanaan tindak lanjut inspeksi baik secara offline/online.	Terdapat beberapa Pemegang IUP yang belum memiliki dokumen teknis dan pengesahannya seperti Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Rencana Pascatambang beserta bukti penempatan Jaminan Pascatambang
	Memastikan komitmen perusahaan untuk mendukung program KTT yang tercantum didalam RKAB dan memastikan terkait ketersediaan personil minimal yang memegang bidang safety, produksi, lingkungan, dan admin	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sektor energi dan sumber daya mineral

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Menyampaikan surat pemberitahuan bagi Pemegang IUP untuk melengkapi dokumen teknis yang dimiliki sebagai panduan dasar kegiatan operasional dan mewajibkan seluruh pemegang IUP untuk menyusun dokumen studi kelayakan untuk mendapat persetujuan dari pemerintah	Belum terbitnya peraturan pelaksana/turunan dari terbitnya beberapa peraturan/perundang-undangan dan peraturan di tingkat pemerintah provinsi
	Pendampingan yang cukup intensif dalam penyusunan finalisasi dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
	Melaksanakan sosialisasi/ pembinaan kepada para pengguna air tanah secara daring maupun luring terkait tatacara pengukuran, pemantauan dan pemeliharaan untuk selanjutnya dilakukan pelaporan data secara berkala ke Dinas ESDM melalui sistem e-osmosys 5.0	
	Penerapan pentingnya konservasi dengan pembangunan titik sumur imbuhan dan sumur pantau dalam rangka konservasi air tanah dengan menjaga keseimbangan air tanah antara pengambilan dan aliran alamiah sehingga pembangunan dapat berkelanjutan	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koordinasi yang intensif antar bidang dan UPTD dalam penyediaan data dan informasi	Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan yang menyebabkan nilai deviasinya di atas -11% atau ketegori Sangat Rendah
	Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan	Anggaran mengalami refocusing, sehingga ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku	Terdapat Kegiatan yang mengalami waktu pengunduran pelaksanaan
SEKRETARIAT DAERAH	Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang menyebabkan beberapa sub kegiatan hanya dilaksanakan di sekretariat perangkat daerah, sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan di lingkup Biro.
	Adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas dan kerjasama yang baik diantara pemegang kegiatan di Biro, Verifikatur, dan pihak ketiga serta perangkat daerah terkait.	Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga pelayanan oleh Biro Administrasi Pimpinan hanya dilakukan pada satu individu yaitu Pj. Gubernur, sehingga terjadi penurunan intensitas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan.
	Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, ketersediaan dana tepat waktu	Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, sehingga terjadi pemecahan paket pengadaan pada saat tahun berjalan.
	Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.	Kekurangcermatan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak menggambarkan kegiatan secara mendetil.
		Adanya perubahan nomenklatur dan pergeseran APBD sehingga proses administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan.
		Terdapat perubahan mekanisme pencapaian kinerja pada tahun berjalan sehingga terjadi penyesuaian mekanisme, sehingga pelaksanaan kinerja mengalami pengunduran waktu.
		Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada jadwal instansi lain, sehingga sering mengalami keterlambatan pelaksanaan.
		Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan anggaran hibah/bantuan keuangan yang memakan waktu dengan jumlah ajuan yang jumlahnya banyak, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Versi Web, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		penyelesaiannya, sehingga pencairan terealisasi lebih dari waktu yang ditetapkan.
		Kekurangcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran, target keuangan dan fisik.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Koordinasi yang baik antara bagian dalam penyediaan data dan informasi serta teknik pelaksanaan kegiatan	Adanya masa transisi dari Anggota DPRD lama masa jabatan 2019-2014 ke Anggota yang abu dilantik masa jabatan 2024-2029
	Adanya komitmen dan kerjasama antar pimpinan yang baru masa jabatan 2024-2029 dengan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan	adanya pergeseran jadwal pelaksanaan menyesuaikan jadwal kegiatan anggota DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektivitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan;	Belum adanya pemahaman yang sama dalam penyusunan laporan;
	Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota.	Banyaknya kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaporkan,dimonitor dan dievaluasi;
		Terdapat beberapa penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan Anggaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Pengelolaan Bantuan dan Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah	
	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	
	Administrasi Barang Milik Daerah Andal	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup SKPD	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	
	Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	
	Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Akuntabel dan Produktif	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja Bapenda untuk optimal melaksanakan program/kegiatan sesuai yang direncanakan yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sehinga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Gubernur Jawa Barat;	Anggaran Kas antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sub kegiatan/aktivitas berbed
	Adanya momen perubahan Anggaran 2024	Pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa masih belum optimal
	Koordinasi yang baik antara Bapenda Pusat dengan P3DW se-Jawa Barat dalam penyediaan data dan informasi	Terbatasnya pelaksana SDM untuk membantu administrasi keuangan karena menjalankan tugas membantu pelayanan
	Semakin meningkatnya peran sistem pengendalian internal di setiap unit pelaksanaan kegiatan serta arahan perbaikan kebijakan dari kantor Pusat Bapenda.	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Adanya kepemimpinan yang efektif dalam mendorong ketercapaian hasil rencana kerja	Keterbatasan sumberdaya termasuk anggaran
	Koordinasi antar unit di BKD yang baik dapat mempercepat target	Adanya kegiatan yang tingkat ketergantungan pelaksanaannya pada instansi pusat tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sistem pengawasan internal dan evaluasi yang dilakukan secara berkala	Adanya perubahan kebijakan dari instansi pusat
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang/Sub Bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencaaan dan pelaporan dapat mengendalikan, mengevaluasi, dan menyetujui secara sistem	Mekanisme penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kompetensi memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya
	Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda-BPKAD-Biro Organisasi memperlancar proses e-budgeting. Biro Organisasi penting terkait komponen-komponen harus ditetapkan dengan regulasi berupa SBU dan SBK	Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda dari Lembaga Administrasi
		Negara
		Penyesuaian kurikulum penyelenggaraan pengembangan kompetensi
		Terdapat perubahan desain pembelajaran berdasarkan hasil pembahasan dengan perangkat daerah yang mengampu substansi urusan pelatihan dimaksud sehingga terjadi rasionalisasi penggunaan anggaran
		Penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat keterlambatan pembayaran karena menunggu pengajuan dari pihak ketiga sehingga belum bisa dibayarkan
		Terbatasnya kuota internet yang dimiliki dengan jumlah pengguna yang banyak, sehingga jaringan menjadi lamban dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di lingkup BPSDM
		Dalam pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada Narasumber dari luar karena keterbatasan praktisi di lingkup BPSDM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen seperti pengendalian yang menjamin program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemantauan yang dapat mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul	Pada Triwulan IV ini sebagian besar program/kegiatan berfokus pada pencapaian proses yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam rencana aksi. Namun, dalam menjalankan proses tersebut ditemukan beberapa kendala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, serta evaluasi yang bertujuan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;	terutama dalam input yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi sesuai dengan rencana;
	Berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* seperti Lembaga Kelitbangan di Perguruan Tinggi dan di Kementerian (sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerjasama yang di lakukan) dan Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Narasumber merupakan salah satu input utama dalam kegiatan penelitian menjadi kendala yang dihadapi dalam menjalankan program/kegiatan di Triwulan IV ini. Adanya narasumber yang mengundurkan diri, sakit, dan beberapa kondisi lainnya cukup menghambat proses penelitian/kajian yang telah disusun;
		Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan merupakan program lanjutan dari Kementerian;
		Perangkat Daerah terkait yang belum mengirimkan data sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
		Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimtek pegawai belum dilaksanakan dikarenakan harus berpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat maka menunggu kolaborasi kegiatan pengembangan kompetensi antara BPSDM dengan Perangkat Daerah yang lainnya.
BADAN PENGHUBUNG	Pemanfaatan Tim Kerja Internal dan Koordinasi yang Lebih Baik	Lokasi Jarak Antar 2 Kantor (Badan Penghubung dan Anjungan Jawa Barat TMII) Membutuhkan Koordinasi dan Manajemen Pengelolaan Kegiatan yang Baik
	Pemanfaatan Teknologi untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan	Kebijakan dan Manajemen TMII yang Selalu Berubah Terutama dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat
		Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Baik di Kantor Badan Penghubung maupun di Anjungan Jawa Barat TMII
INSPEKTORAT	Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan	Terbatasnya jumlah elativ pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa elativ, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu elative singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya
	Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan	Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Auditan ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan itu sendiri
	Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal	
	Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun Kabupaten/Kota dalam penyediaan data dan informasi	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan Sinergitas antar pemangku kebijakan (*stakeholder*) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.	Terdapat perbedaan satuan antara indikator program dan indikator kegiatan (persen dan jumlah)
		Terdapat beberapa indikator kegiatan yang harus diperbaiki/direvisi karena tidak dapat dihitung sebagai output

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

SKPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat

Sumber: E-Monev & Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

2.2.4 Realisasi Sasaran RPJMD/RPD

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2026, kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan 2 (dua) tahun terakhir. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kinerja perekonomian makro, namun juga berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat terefleksikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi sasaran RPJMD sampai dengan tahun 2021, kinerja pemerintahan daerah menunjukkan kinerja yang positif dan semakin baik. Hal ini tercermin dari capaian 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dimana secara rata-rata capaian 2021 di atas 100 persen. Tabel 2.119 menyajikan ringkasan realisasi sasaran RPDyang terbagi dalam 4 (empat) misi.

Tabel 2.119
Ringkasan Realisasi Sasaran RPJMD/RPD Menurut Misi

NO	TUJUAN	SASARAN		Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Sasaran Misi 2024
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**				
		1.1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	2	99.31%
		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	102.08%
		1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	2	105.45%
		1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	3	98.60%
		1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	1	120.42%
2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**				
		2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	2	106.23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO	TUJUAN	SASARAN		Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Sasaran Misi 2024
	dan Berkelanjutan	2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	3	79.47%
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	1	52.28%
		2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	3	101.76%
3	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**				
		3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	1	100.78%
		3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	100.20%
		3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1	103.02%
		3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	99.83%
		3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	2	98.02%
		3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	1	101.43%
4	**Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah**				
		4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	1	99.98%
		4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1	100.00%
		4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	1	114.05%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda. 2024

Secara rinci, hasil evaluasi realisasi sasaran RPD tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi” (tingkat capaian kinerja di atas 90 persen) , sementara dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 capaian kinerja pemerintahan daerah terbagi dalam 3 (tiga) kategori dengan predikat “ST : Sangat Tinggi”, “S : Sedang”, dan “SR : Sangat Rendah”. Gambaran kinerja pembangunan daerah ini mengindikasikan bahwa dengan tercapainya atau terpenuhinya sasaran pembangunan daerah maka tujuan pembangunan daerah pun kemungkinan besar akan tercapai pada akhir periode RPJMD 2018-2023 dan diharapkan akan berdampak terhadap kinerja pembangunan makro di Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 2.120
Realisasi Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023		Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2023	Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja
			Target	Realisasi					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	73,09	74,10	101,38%	Sangat Tinggi	73,09	101,38%	Sangat Tinggi
2	Indeks Demokrasi	Persen	80,25	83,04	103,47	Sangat Tinggi	83,04	103,47	Sangat Tinggi
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,54	7,62	98,94%	Sangat Tinggi	7,54	98,94%	Sangat Tinggi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,13	7,44	108,49%	Sangat Tinggi	8,13	108,49%	Sangat Tinggi
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,65	73,80	100,20%	Sangat Tinggi	73,65	100,20%	Sangat Tinggi
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,36	71,74	100,53%	Sangat Tinggi	71,36	100,53%	Sangat Tinggi
7	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,02	90,23	100,23%	Sangat Tinggi	90,02	100,23%	Sangat Tinggi
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,80	8,83	100,34%	Sangat Tinggi	8,80	100,34%	Sangat Tinggi
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,68	100,40%	Sangat Tinggi	12,63	100,40%	Sangat Tinggi
10	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	54,00	51,17	94,75%	Sangat Tinggi	51,17	94,75%	Sangat Tinggi
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	31,02	31,15	100,42%	Sangat Tinggi	31,02	100,42%	Sangat Tinggi
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	88,00	100,00	113,64%	Sangat Tinggi	88,00	113,64%	Sangat Tinggi
13	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/kapita	1340,00	1346,41	100,48%	Sangat Tinggi	1340,00	100,48%	Sangat Tinggi
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	55,00	59,62	108,40%	Sangat Tinggi	55,00	108,40%	Sangat Tinggi
15	Indeks Desa Membangun	Poin	0,76	0,77	101,32%	Sangat Tinggi	0,76	101,32%	Sangat Tinggi
16	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	2	1	50,00%	Sangat Rendah	2	50,00%	Sangat Rendah
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,6	64,77	105,15%	Sangat Tinggi	61,6	105,15%	Sangat Tinggi
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,49	7,25	111,71%	Sangat Tinggi	6,49	111,71%	Sangat Tinggi

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau Kode, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023		Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2023	Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja
			Target	Realisasi					
19	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1870	1,1765	100,88%	Sangat Tinggi	1,1870	100,88%	Sangat Tinggi
20	Indeks Risiko Bencana	Poin	130,00	123,16	105,26%	Sangat Tinggi	130,00	105,26%	Sangat Tinggi
21	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,80	93,80	101,08%	Sangat Tinggi	92,80	101,08%	Sangat Tinggi
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	53,9	54,14	100,45%	Sangat Tinggi	53,9	100,45%	Sangat Tinggi
23	Nilai Tukar Petani	Poin	104,52	107,45	102,80%	Sangat Tinggi	104,52	102,80%	Sangat Tinggi
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	3,08	3,20	103,90%	Sangat Tinggi	3,08	103,90%	Sangat Tinggi
25	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,14	4,74	114,49%	Sangat Tinggi	4,14	114,49%	Sangat Tinggi
26	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,45	4,36	97,98%	Sangat Tinggi	4,45	97,98%	Sangat Tinggi
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB	Triliun Rupiah	613,86	644,38	104,97%	Sangat Tinggi	613,86	104,97%	Sangat Tinggi
28	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,32	28,84	135,27%	Sangat Tinggi	21,32	135,27%	Sangat Tinggi
29	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A (82,01)	A (93,08)	113,50%	Sangat Tinggi	A (82,01)	113,50%	Sangat Tinggi
30	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	87,00	91,26	104,90%	Sangat Tinggi	87,00	104,90%	Sangat Tinggi

Sumber: LKPJ Provinsi Jawa Barat 2023

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemindai Dokumen atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

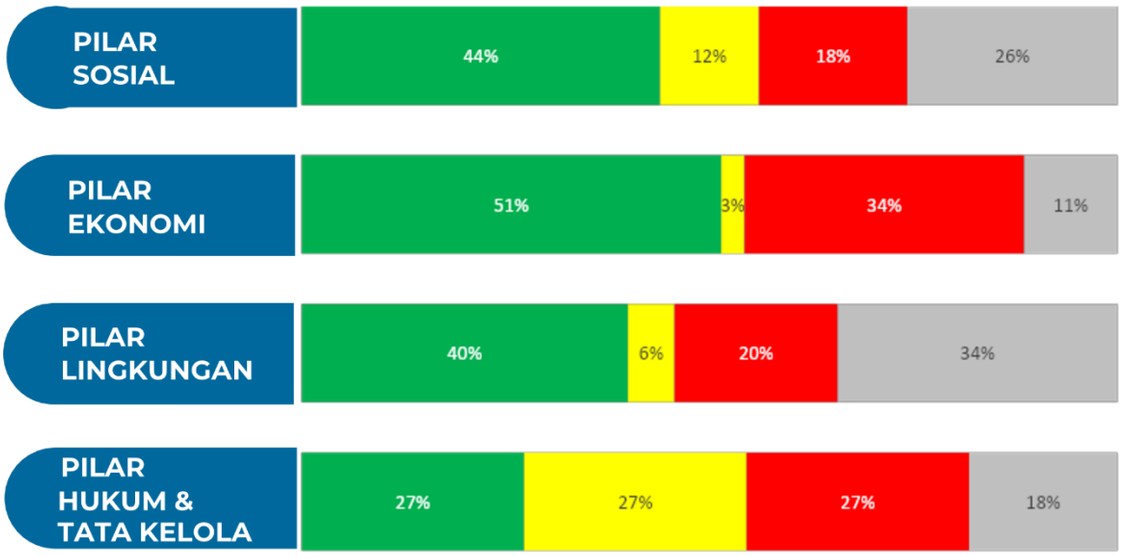
Amanat pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 atau *Sustainable Development Goals*/SDGs Jawa Barat 2018-2023. TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat terdiri dari empat pilar dengan 17 Tujuan (*Goals*), 70 Target Sasaran, dan 147 Indikator. Pada tahun 2013 baru sekitar 64 indikator (44 persen) dari jumlah total indikator SDGs Kawa Barat yang mencapai target. Kemudian hanya sekitar 14 indikator (10 persen) yang menunjukkan peningkatan atau diharapkan akan mencapai target, dan 34 indikator (23 persen) yang tidak mencapai target, sisanya sebesar 24 persen indikator SDGs Jawa Barat tidak tersedia datanya. Status ketercapaian target indikator SDGs Jawa Barat per pilar dapat pada Gambar 2.82.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 2.91
Status Ketercapaian Target Indikator SDGs Jawa Barat Per Pilar



Sumber: Sekretariat SDGs Bappeda Jabar, diolah (2024)

a. Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, pelaksanaan SDGs Jawa Barat telah menunjukkan pencapaian cukup baik terutama pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. Namun jika dilihat lebih mendalam dari indikator lainnya pada setiap tujuan SDGs, masih terdapat tantangan pencapaian SDGs pada beberapa aspek yang memerlukan percepatan, seperti penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Jawa Barat juga perlu meningkatkan perhatian pada isu kesetaraan gender pada segala aktivitas pembangunan. Pilar Pembangunan Sosial ini dijelaskan lebih lanjut ke dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Pencapaian SDGs Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan masih diperlukan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem di beberapa daerah. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil adalah peningkatan partisipasi sekolah, pemenuhan legalitas hak anak khususnya kepemilikan akta kelahiran, cakupan program perlindungan sosial, cakupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pendanaan penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.

Capaian persentase status ketercapaian indikator SDGs Tujuan 1 sebanyak 43 persen telah tercapai, 14 persen indikator akan tercapai, 21 persen tidak tercapai, dan 21 persen indikator tidak terdapat.

2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah tanpa kelaparan, pada tujuan ini penurunan prevalensi stunting memerlukan percepatan khususnya pemenuhan gizi anak dan penurunan anemia pada ibu hamil. Demikian pula dengan Skor Pola Pangan Harapan dan Nilai Tukar Petani termasuk upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga perlu dilakukan percepatan dalam menangani permasalahan yang ada. Persentase ketercapaian indikator SDGs Jawa Barat untuk tujuan 2 sebanyak 38 persen tercapai, 8 persen akan tercapai, 23 persen tidak tercapai, dan sisanya sebanyak 31 persen tidak tersedia datanya.

3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, salah satu kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada tujuan 3 ini, upaya pencapaian masih perlu ditingkatkan pada penanganan kesehatan terkait penanganan kesehatan ibu serta pencegahan dan penanganan AIDS, Tuberkulosis, Hepatitis B, dan kebiasaan merokok masyarakat, serta peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persentase status ketercapaian indikator SDGs untuk Tujuan 3 sebanyak 67 persen telah tercapai, 11 persen akan tercapai, dan 22 persen tidak terdapat data.

4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Pada Tujuan 4 ini perlu didorong untuk capaian Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), termasuk tingkat literasi masyarakat. Sebanyak 29 persen indikator pada Tujuan 4 telah tercapai, 21 persen akan tercapai, 21 persen tidak tercapai, dan 20 persen tidak ada datanya.

5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan sehingga diperlukan peningkatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Adapun persentase ketercapaian indikator SDGs untuk Tujuan 5 adalah 29 persen telah tercapai, 41 persen tidak tercapai, sedangkan sebanyak 29 persen tidak ada datanya.

Jika dilihat dari target dan jumlah indikator pada Pilar Pembangunan Sosial yang telah ditetapkan pada RAD-SDGs Jawa Barat tahun 2018-2023, indikator yang mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebanyak 67 persen, sedangkan indikator yang tidak mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 5 Kesetaraan Gender yaitu 43 persen. Ketidaktercapaian target dipengaruhi juga oleh penetapan target indikator yang terlalu tinggi atau optimis pada RAD-SDGs dan memerlukan penyesuaian target sesuai perkembangan terkini menurut RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Upaya penyediaan data pada Pilar Pembangunan Sosial masih perlu ditingkatkan, terutama pada Tujuan 2, Tujuan 3, dan Tujuan 5 yang ketidaktersediaan datanya lebih dari 50 persen. Penentuan indikator SDGs memerlukan penyesuaian dengan Metadata II yang dikeluarkan oleh Bappenas RI.

b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pencapaian SDGs Jawa Barat pada Pilar Pembangunan Ekonomi jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pembangunan infrastruktur serta akses energi, telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Namun jika dilihat dari aspek lainnya, Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek ketenagakerjaan, riset dan inovasi, pengurangan kesenjangan, serta kemitraan pembangunan, terutama kapasitas pendanaan untuk pencapaian target SDGs. Penerapan *Green Economy* juga masih menjadi tantangan besar untuk Jawa Barat. Penjelasan mengenai Pilar Pembangunan Ekonomi diuraikan pada lima tujuan, sebagai berikut:

1. **Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

   Pada SDGs Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Provinsi Jawa Barat saat ini masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung pencapaian Pilar Pembangunan Lingkungan serta akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau khususnya akses terhadap listrik. Status ketercapaian Tujuan 7 untuk indikator yang tercapai adalah 67 persen, 17 persen akan tercapai, dan 17 persen tidak tercapai.

2. **Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

   Pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilihat dari perspektif SDGs Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini perlu disertai dengan upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), peningkatan akses layanan keuangan untuk UMKM, serta peningkatan kualitas pemuda dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta lapangan dan kesempatan kerja. Selain itu perlu adanya upaya peningkatan daya tarik wisata. Tujuan 8 memiliki ketercapaian indikator sebesar 54 persen untuk indikator tercapai dan 46 persen untuk indikator yang tidak tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

c. Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi merupakan tujuan kesembilan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur kontributor utama dan keunggulan kompetitif perekonomian Jawa Barat adalah industri pengolahan dan perdagangan. Dari perspektif SDGs, tantangan kinerja pembangunan industri Jawa Barat di antaranya adalah nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri serta pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, dukungan infrastruktur untuk aktivitas perekonomian dilihat dari tingkat kemantapan jalan, operasional jalur kereta api, bandara dan pelabuhan perlu terus ditingkatkan. Persentase status ketercapaian indikator SDGs Tujuan 9 untuk indikator yang tercapai sebanyak 43 persen, 29 persen untuk indikator yang tidak tercapai, dan 29 persen untuk indikator yang tidak ada datanya.

d. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Pencapaian SDGs Jawa Barat pada Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan mempunyai tantangan utama yang dihadapi, yaitu ketimpangan ekonomi dilihat dari Rasio Gini serta kemiskinan ekstrim. Upaya pengurangan kesenjangan terlihat dari jumlah desa mandiri serta capaian Indeks Desa Membangun Jawa Barat yang terus meningkat dan tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Barat, namun masih perlu peningkatan pada aspek ketahanan ekonomi desa. Selain itu perlu adanya penguatan kebebasan sipil untuk meningkatkan Indeks Demokrasi. Persentase status ketercapaian indikator SDGs untuk Tujuan 10 untuk indikator yang tercapai adalah sebesar 29 persen, 43 persen indikator tidak tercapai, dan 29 persen indikator tidak ada datanya.

e. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kapasitas pendanaan menjadi tantangan terbesar pencapaian SDGs Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Berbagai inovasi sumber pendanaan perlu terus didorong untuk pendanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pencapaian SDGs. Kemitraan penyediaan data statistik dengan standar penjamin kualitas juga perlu terus ditingkatkan, demikian halnya dengan akses layanan internet. Persentase Status Ketercapaian Indikator SDGs untuk Tujuan 17 sebanyak 100 persen telah tercapai.

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, indikator yang telah mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan sebesar 100 persen sedangkan indikator yang tidak mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 46 persen. Ketidaktercapaian target dipengaruhi juga oleh penetapan target indikator yang terlalu tinggi atau optimis pada RAD-SDGs, serta memerlukan penyesuaian target sesuai perkembangan terkini. Penentuan indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi juga memerlukan penyesuaian dengan Metadata II dari Bappenas. Ketersediaan data pada Pilar Pembangunan Ekonomi kurang dari 50 persen tetapi masih tetap perlu ditingkatkan, terutama pada Tujuan 9 dan Tujuan 10.

f. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pencapaian SDGs Jawa Barat pada Pilar Pembangunan Lingkungan masih menjadi tantangan terbesar Jawa barat yang memerlukan intervensi dan percepatan pada berbagai aspek, meliputi air bersih dan sanitasi, pemukiman dan perkotaan, persampahan, ekonomi hijau dan pengelolaan limbah B3, ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi hutan dan lahan, dan keanekaragaman hayati.Adapun pencapaian yang cukup baik ditunjukkan pada upaya penanganan perubahan iklim. Selanjutnya Pilar Pembangunan Lingkungan dijelaskan dengan enam tujuan TPB/SDGs, sebagai berikut:

1. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi

Pada Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi, percepatan peningkatan kinerja perlu dilakukan baik pada akses air minum, sanitasi, serta kuantitas dan kualitas air baku. Persentase status ketercapaian indikator SDGs untuk Tujuan 6 masih mengalami kesulitan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

memperoleh datanya karena sebanyak 40 persen indikator tidak ada datanya, 10 persen tidak tercapai, 20 persen indikator akan tercapai, dan 30 persen yang telah tercapai.

2. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Pada Tujuan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi akses hunian layak, pengelolaan sampah dan penyediaan transportasi massal, serta penanggulangan bencana dan aspek tata ruang di kawasan rawan bencana. Persentase status ketercapaian indikator Tujuan 11, sebanyak 25 persen indikator telah tercapai, 50 persen tidak tercapai, dan 25 persen tidak ada datanya.

3. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab masih perlu ditingkatkan untuk pengelolaan limbah B3 industri. Selain itu penerapan industri hijau, produk ramah lingkungan, dan sirkular ekonomi industri masih menjadi tantangan yang dihadapi Jawa Barat. Pada Tujuan 12 sebanyak 20 persen indikator telah tercapai, 20 persen tidak tercapai, dan 60 persen indikator tidak ada datanya.

4. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Jawa Barat telah cukup baik sesuai SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, tetapi masih perlu percepatan untuk mendukung pencapaian *Net Zero Emission* nasional pada tahun 2060. Selain itu, perlu dikaji lebih jauh mengenai implikasi dari upaya penurunan emisi rumah kaca terhadap PDRB (intensitas emisi) dalam kerangka *Green Economy*, serta kehilangan PDRB akibat perubahan iklim pada sektor-sektor terdampak. Pada Tujuan 13, indikator yang telah tercapai sebesar 60 persen, indikator yang tidak tercapai sebesar 20 persen, dan 20 persen indikator tidak ada data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

5. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Pada Tujuan 14 pencapaian Jawa Barat dilihat dari Produksi Perikanan Tangkap yang memenuhi batas aman ekologis, luas kawasan hutan konservasi Laut Jawa dan kualitas air laut telah cukup baik namun tetap perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan sampah di laut. Persentase status ketercapaian indikator SDGs Tujuan 14 yang telah tercapai sebesar 50 persen dan indikator yang tidak ada data sebesar 50 persen.

6. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Ekosistem daratan merupakan salah satu tujuan dalam pilar pembangunan lingkungan. Tujuannya antara lain melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Selain itu kualitas tutupan lahan, luas tutupan hutan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati masih memerlukan intervensi khusus termasuk peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Pada Tujuan 15 ini sebanyak 57 persen indikator telah tercapai, 29 persen indikator tidak tercapai, dan 14 persen indikator tidak ada datanya.

Secara keseluruhan pada Pilar Pembangunan Lingkungan, indikator yang telah mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim sebesar 60 persen, sedangkan indikator yang tidak mencapai target terbanyak terdapat pada Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab sebesar 20 persen. Ketidaktersediaan data pada Pilar Pembangunan Lingkungan lebih dari 50 persen memerlukan peningkatan penyediaan data ditingkatkan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

g. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pencapaian SDGs Jawa Barat pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yaitu Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Jika dilihat dari aspek kelembagaan di lingkungan pemerintahan, telah menunjukkan kinerja cukup baik pada Indeks Demokrasi. Adapun pada aspek keadilan yang dapat ditunjukkan akses terhadap keadilan layanan hukum untuk orang miskin, akuntabilitas kinerja pemerintah, peran perempuan dalam kepemimpinan dan legalitas hak anak khususnya kepemilikan akta kelahiran masih perlu ditingkatkan. Sedangkan penanganan pelanggaran HAM dan pemenuhan hak politik masih memerlukan penyediaan data dan informasi.

Aspek lainnya pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang memerlukan perhatian adalah kekerasan pada anak dan perlindungan dan pemajuan hak korban perempuan. Indikator yang telah mencapai target pada Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh baru mencapai 27 persen, sedangkan indikator yang tidak mencapai target sebanyak 27 persen. Ketidaktercapaian target dipengaruhi juga oleh penetapan target indikator yang terlalu tinggi atau optimis pada RAD-SDGs, dan memerlukan penyesuaian target sesuai perkembangan terkini. Ketidaktersediaan data pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola kurang dari 50 persen tetapi masih tetap perlu ditingkatkan ketersediaan data.

1. Pilar Sosial
   a) Tujuan 1
      1) Tingginya Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
      2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan
      3) Perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan
      4) Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
      5) Rumah tidak layak huni
      6) Akses terhadap pendidikan
      7) Pengurangan Risiko Bencana
   b) Tujuan 2
      1) Pemenuhan Gizi Masyarakat (Balita, Anak, Remaja dan Ibu Hamil)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2) Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat
3) Kesejahteraan Lapangan Usaha sektor Pertanian

c) Tujuan 3
1) Cakupan jaminan kesehatan
2) Pola Hidup Sehat dan Tidak Merokok
3) Pelayanan Kesehatan serta Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas

d) Tujuan 4
1) Mutu pendidikan
2) Akses terhadap Pendidikan
3) Angka tidak sekolah dan Putus sekolah masih tinggi
4) Budaya partisipasi pendidikan masih rendah

e) Tujuan 5
1) Kekerasan terhadap anak dan perempuan
2) Pernikahan anak
3) Peran perempuan dalam pengambilan keputusan
4) Partisipasi perempuan dalam pendidikan

2. Pilar Ekonomi

a) Tujuan 7
1) Peningkatan Akses Energi yang terjangkau Khususnya Listrik
2) Pemanfaatan energi terbarukan

b) Tujuan 8
1) TPT
2) Akses Modal UKM
3) Kualitas Pemuda (Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Usaha, dan Kesempatan Kerja)
4) Daya Tarik Wisata

c) Tujuan 9
1) Nilai Tambah Industri
2) Riset dan Inovasi
3) Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi

d) Tujuan 10
1) Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah
2) Ekonomi Pedesaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

3) Kebebasan Hak Sipil

e) Tujuan 17

1) Kualitas Kerjasama

3. Pilar Lingkungan

a) Tujuan 6

1) Kualitas serta kuantitas air minum dan baku
2) Kualitas sanitasi

b) Tujuan 11

1) Hunian Layak
2) Pengelolaan Sampah
3) Transportasi Massal dan Berkelanjutan
4) Pengendalian tata ruang kawasan rawan bencana
5) Penanggulangan Risiko Bencana

c) Tujuan 12

1) Pengelolaan Limbah B3 Industri
2) *Green Industry*
3) Produk Ramah Lingkungan
4) Sirkular Ekonomi Industri

d) Tujuan 13

1) *Net Zero Emission*
2) Emisi Gas Rumah Kaca
3) *Green Economy*
4) Ancaman Perubahan Ekonomi terhadap kerugian ekonomi

e) Tujuan 14

1) Pengelolaan Sampah Laut
2) Kualitas ekosistem laut

f) Tujuan 15

1) Kualitas dan luas tutupan lahan
2) Pemanfaatan keanekaragaman hayati
3) Rehabilitas Hutan dan Lahan

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

a) Tujuan 16

1) Akses bantuan hukum masyarakat miskin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2) Akuntabilitas kinerja Pemerintah
3) Legalitas Hak Anak (Akta Kelahiran)
4) Perlindungan anak dan perempuan

2.2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dimana pelaksanaannya harus memenuhi 4 (empat) tahapan perencanaan SPM sesuai amanat Permendagri Nomor 59 tahun 2021. Tahapan perencanaan SPM terdiri atas pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan penerapan SPM tersebut harus masuk ke dalam dokumen perencanaan dan dilaksanakan karena menjadi salah satu poin dalam penilaian penerapan SPM oleh pemerintah pusat selain kepatuhan daerah dalam melaporkan pelaksanaan SPM pada setiap triwulannya.

Capaian penerapan SPM Provinsi Jawa Barat Tahun ~~2023~~ 2024 pada semua urusan provinsi sudah mencapai 100%, rincian capaian SPM Provinsi Jawa Barat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Target dan capaian Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

No	URUSAN	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	Pendidikan Menengah	100,00%	100,00%	
		Pendidikan Khusus	100,00%	100,00%	
2	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	100,00%	100,00%	
		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100,00%	100,00%	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	URUSAN	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	100,00%	100,00%	
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		100,00%	
5	KENTENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	100,00%	100,00%	
6	SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	100,00%	100,00%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	100,00%	100,00%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	100,00%	100,00%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	100,00%	100,00%	
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100,00%	100,00%	

Berdasarkan capaian pada setiap urusan SPM di atas, ~~akan~~ menjadi salah satu gambaran pembangunan di Jawa Barat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat sudah berjalan cukup maksimal namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan diantaranya adalah belum optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan SPM yang sesuai dengan 4 Tahapan Perencanaan SPM, terutama dalam penentuan jumlah sasaran yang harus dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat hal tersebut berdampak pada belum maksimalnya alokasi anggaran penerapan SPM pada setiap perangkat daerah pengampu urusan SPM. Hasil penerapan SPM tahun 2024 dapat dijadikan tolok ukur dalam hal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

perencanaan dan penerapan SPM ke depannya, sehingga pengalokasian anggaran pemerintah daerah dapat diprioritaskan untuk belanja urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana amanat pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi "Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)". Dengan demikian, dapat dipastikan masyarakat Jawa Barat akan mendapatkan pelayanan minimal pada aspek pelayanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara tanpa terkecuali dan masyarakat akan semakin sejahtera dapat tercapai.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada sub bab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023, maka permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2025, diantaranya: 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 2) Perlambatan ekonomi daerah serta tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, dan keamanan; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur serta adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 4) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara terperinci, penjelasan masing-masing permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan pembangunan di Jawa Barat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tercermin dari capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 yang masih berkisar di angka 8,87 tahun. Artinya dari total penduduk usia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menamatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

jenjang pendidikan formal selama 8,87 tahun atau setara SMP kelas 3. Indikator lain menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Data BPS menunjukkan pada tahun 2023 APS kelompok umur 13 -15 tahun sebesar 95,75 persen, APS kelompok umur 16 – 18 tahun sebesar 68,66 persen dan APS kelompok umur 19 - 24 tahun hanya sebesar 24,72 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Kurang Berkualitas

Ekonomi Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang mengalami fluktuasi dan berada di kisaran 5 persen. Jawa Barat tetap menjadi kontributor ekonomi terbesar ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun, kualitas pertumbuhannya masih menjadi catatan penting. Pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi Jawa Barat mulai pulih sejak terjadinya pandemi COVID-19, dengan masing-masing tumbuh sebesar 3,74 persen dan 5,45 persen. Namun, pada 2023, pertumbuhan sedikit menurun menjadi 5,00 persen dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 4,95 persen.

Gambar 2.92
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2010-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

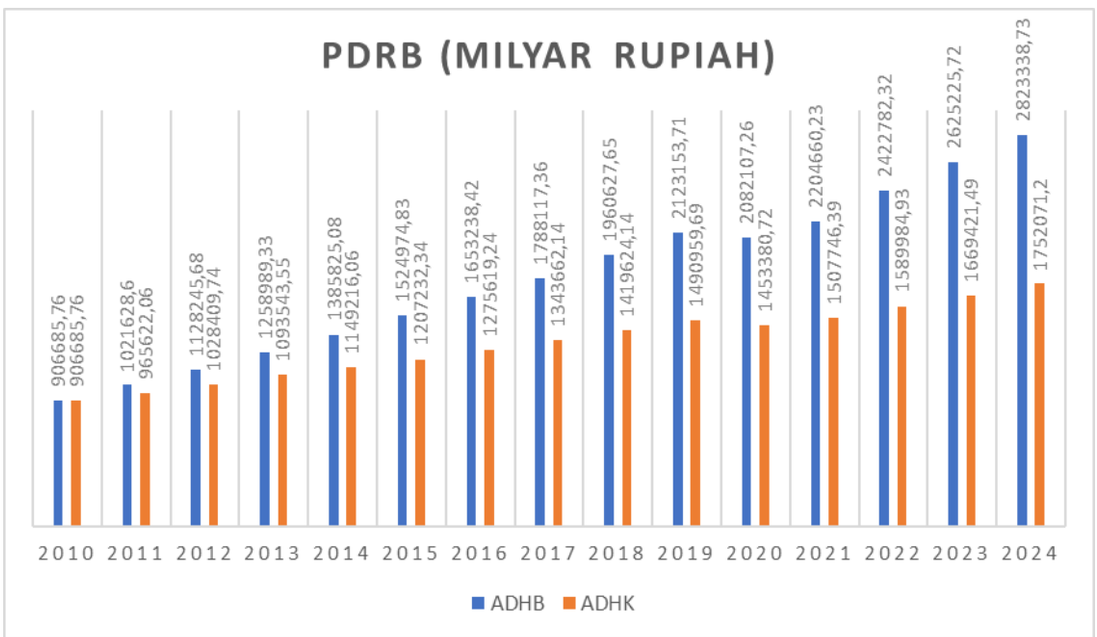
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Kontribusi sektor industri pengolahan sektor unggulan Jawa Barat mencapai 41,39 persen, namun belum cukup mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan riil. PDRB per kapita tahun 2024 tercatat sebesar Rp50,23 juta, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kesenjangan antarwilayah masih tinggi. Daerah perkotaan jauh lebih maju dibandingkan wilayah pedesaan, dan pemerataan infrastruktur belum optimal.

Investasi di sektor teknologi dan inovasi juga masih terbatas. Selain itu, kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan era industri 4.0, dan struktur ekonomi masih bergantung pada ekspor barang mentah yang rentan terhadap gejolak harga global. Dengan lemahnya diversifikasi ekonomi dan rendahnya investasi pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, ekonomi Jawa Barat dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat
Tahun 2010-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas, dibutuhkan transformasi struktural yang menyeluruh, penguatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor dalam membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh, adaptif, dan merata.

3. Penyediaan Infrastruktur yang Tidak Merata dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Rendah

Pembangunan di Jawa Barat masih belum merata, khususnya dalam aspek infrastruktur. Secara umum, Jawa Barat mengalami ketimpangan dalam hal pembangunan. Beberapa daerah di Jawa Barat memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi daripada daerah lainnya. Sebagian besar daerah di Jawa Barat, terutama di wilayah tengah dan utara memiliki jalan yang relatif lebih baik, pasokan listrik yang handal, dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik daripada daerah lain di wilayah selatan Jawa Barat. Daerah-daerah di Jawa Barat bagian selatan umumnya masih mengalami kurangnya infrastruktur yang memadai. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti investasi yang rendah, keterbatasan dalam mengakses permodalan, dan sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Selain permasalahan infrastruktur, masalah lingkungan hidup juga masih mengemuka hingga saat ini. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hingga tahun 2024, nilai IKLH mencapai 66,09 meningkat 1,32 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan secara umum terjadi perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, jika dilihat dari capaian nilai IKLH menurut parameternya, indeks kualitas air dan tutupan lahan menunjukkan kualitas yang masih relatif rendah.

Kualitas air yang rendah mengindikasikan tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air, sumber pencemar dapat diperkirakan berasal dari limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sementara, rendahnya kualitas tutupan lahan lebih dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan permukiman. Kualitas air laut yang cukup baik masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut karena

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

jumlah titik lokasi pemantauan diperkirakan belum representatif menunjukkan kualitas air laut Jawa Barat.

4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Dilihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam kondisi baik. Hasil evaluasi pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 99,01 poin dengan kategori A atau termasuk ke dalam predikat 'memuaskan'. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi 100 persen kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berAKHLAK namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Sebagaimana interpretasi tersebut, perbaikan tata kelola yang dilakukan belum optimal dalam memberikan dampak terhadap pembangunan. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi belum memperlihatkan konvergensi program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemetaan atau *mapping* intervensi kegiatan berikut monitoring dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat belum dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang efektif. Saat ini, pengklasifikasian program kegiatan dalam penanganan permasalahan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sebatas '*tagging*' dan belum berdasarkan dari *logical framework* yang ideal. Dengan demikian, kualitas dampak pelaksanaan program kegiatan terhadap pembangunan belum dapat terukur secara jelas.

Ketiadaan penerapan *logical framework* yang ideal juga menyebabkan penyelesaian isu-isu publik tidak terkelola dengan baik oleh perangkat daerah. Sebagai contoh, peran unit kerja yang tergambarkan dalam anggaran penanganan kemiskinan tidak mampu secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Maka, dari sisi tata kelola organisasi pun perlu dilakukan *review* sehingga unit kerja secara terintegrasi memiliki peran dan langkah aksi yang jelas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

dengan penggunaan anggaran yang efektif dalam menyelesaikan isu-isu publik.

2.3.2 Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2026, evaluasi capaian RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Bidang Pendidikan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan yaitu Utilisasi Sumber Daya meliputi:

1. Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan:
   a. Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB. "Guru pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).
   b. Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru Sertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMA/MA. "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1". (PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengacu pada SNP).

c. Rasio Guru SMA/MA Berkualifikasi Akademik per Sekolah yaitu perbandingan antara jumlah guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi minimal S1/DIV dengan jumlah sekolah. "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru).

d. Persentase Guru SMA/MA Berkualifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).

e. Persentase Guru SMA/MA Bersertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1". (PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengacu pada SNP).

2. Belum memadainya jumlah guru dan tenaga kependidikan dan belum meratanya distribusi guru antar daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

3. Masih belum memadainya Insentif untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN.
4. Belum meratanya sebaran SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta khususnya di wilayah terpencil dan masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri jenjang SMA/SMK/SLB;
5. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan;
6. Belum optimal dan memadainya Utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan serta pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan, penguatan jaringan internet di *blank spot* area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran sesuai operator yang memiliki jangkauan baik di masing-masing wilayah.
7. Belum optimalnya pelatihan *life skill* dan *soft skill* yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah pengangguran; dan
8. Belum efektifnya pelaksanaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

2.3.2.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, dilihat dari masih tingginya masalah kesehatan dasar seperti adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi, masih terdapat permasalahan gizi masyarakat, rendahnya kualitas kesehatan lingkungan serta penanganan penyakit menular dan tidak menular yang belum optimal dilihat dari tingginya angka kesakitan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2. Belum optimal pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang disebabkan oleh belum meratanya ketersediaan sumber daya yang memadai dan sesuai standar diantaranya adalah sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan SDM kesehatan di setiap daerah.
3. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan dan belum tercapainya target Jaminan Kesehatan menuju *universal Health Coverage* (UHC) yang artinya masih ada masyarakat Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki kepesertaan BPJS kesehatan;
4. Belum terpenuhinya SDM kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar. Terbatasnya tenaga kesehatan ditunjukan dengan indikator Puskesmas Lengkap 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 baru mencapai 53 persen, penyebaran/distribusi sumber daya manusia kesehatan tidak merata di Kabupaten/Kota serta masih kurangnya pelatihan untuk tenaga Kesehatan;
5. Belum terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/minuman;
6. Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan yang ditujukan dengan belum terintegrasinya data kesehatan, masih adanya pengelolaan rekam medis secara manual, serta pemanfaatan teknologi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih optimal dan efisien;
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang ditunjukkan dengan rendahnya literasi dan mindset masyarakat terkait pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) sebagai salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan serta peran masyarakat dalam mendukung budaya promotif untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekitar.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.3.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Disparitas pembangunan dan akses layanan infrastruktur dasar terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
2. Masih terdapat sejumlah ruas jalan yang berada dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat)
3. Masih terdapat sejumlah ruas jalan yang mendekati atau sudah habis umur teknisnya;
4. Terdapat sejumlah ruas jalan Sebagian dari ruas jalan Provinsi berada pada jalur rawan bencana;
5. Muatan kendaraan berlebih / *Over Dimension and Over Loading* (ODOL) yang berpotensi menurunkan kualitas dan memperpendek umur teknis jalan;
6. Masih terdapat kabupaten/kota yang belum memiliki perda RTRW sesuai ketentuan UUCK terbaru (integrasi dengan RZWP3K);
7. Masih terdapat cukup banyak kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTR sebagai acuan perizinan pemanfaatan ruang;
8. Masih banyak terjadinya alih fungsi lahan terutama pada kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam RTRW;
9. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan akses aman/akses layak/akses jaringan perpipaan, yang disebabkan antara lain :
    a. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
    b. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum;
    c. Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
    d. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat.

10. Ketersediaan air minum belum mencukupi secara optimal yang disebabkan antara lain:
    a. Jaringan dan sumber air minum belum tersedia;
    b. Kebutuhan air bersih setiap individu tidak terpenuhi.
11. Belum optimalnya cakupan pelayanan dan akses air limbah domestik (akses aman/akses layak), yang disebabkan antara lain:
    a. Masih tingginya angka BABS, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PHBS, terutama menyangkut air limbah domestik;
    b. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat, dan belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah;
    c. Masih rendahnya pelayanan limbah terpusat, tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan/atau kebocoran tangki septik, dan masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat Kabupaten/Kota;
    d. Terbatasnya pendanaan di tingkat Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah sistem terpusat;
    e. Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan limbah.
    f. Sarana Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah domestik belum memenuhi persyaratan teknis.
12. Belum optimalnya pengelolaan persampahan (aspek penanganan/pengurangan) yang disebabkan antara lain :
    a. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah (3R);
    b. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

c. Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir) yang belum efektif dan terpadu;
d. Masih rendahnya pembiayaan pengelolaan persampahan;
e. Sarana prasarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan belum memenuhi persyaratan teknis.

13. Belum optimalnya pengelolaan drainase yang disebabkan antara lain:
    a. Ketidakmampuan badan air penerima dalam menampung air limpasan dari permukiman;
    b. Tidak terbentuknya sistem drainase buatan;
    c. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi;
    d. Penyumbatan/tidak mengalirnya saluran;
    e. Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir;
    f. Belum kuatnya dukungan pengelolaan sistem drainase;
    g. Belum tersedianya drainase lingkungan;
    h. Masih tingginya genangan air
    i. Kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk.
14. Masih belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau; dan
15. Masih belum optimal penyelenggaraan bangunan gedung.

2.3.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Masih rendahnya akses Rumah Layak Huni yang disebabkan antara lain :
    a. Harga rumah yang sesuai standar tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR;
    b. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di Rumah tidak layak huni (Rutilahu);
    c. Kurangnya ketersediaan rumah yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

d. Tingkat pemahaman masyarakat yang belum memadai tentang perlunya rumah dilengkapi dengan prasarana air minum dan sanitasi.

2. Masih besarnya luasan kawasan permukiman kumuh yang disebabkan antara lain :
   a. Ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki rumahnya;
   b. SK kumuh terbaru angka target menjadi lebih tinggi (SK kumuh terbaru membuat luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi menjadi naik dari luasan sebelumnya;
   c. Keterbatasan pendanaan APBD untuk pengentasan permukiman kumuh.
3. Perumahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan permasalahan sebagai berikut:
   a. Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang tidak memenuhi standar;
   b. Penyediaan infrastruktur permukiman masih rendah;
   c. Akses infrastruktur permukiman masih rendah;
   d. Akses infrastruktur dasar permukiman belum optimal;
   e. Keterbatasan pengetahuan tentang regulasi penataan bangunan (rumah) dan lingkungan
   f. Pelayanan PSU yang tidak memenuhi standar;
   g. Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah dikarenakan pengembang belum menyerahkan asetnya yang disebabkan prasyarat untuk serah terima belum terpenuhi.
4. Persoalan penyediaan tanah untuk rumah MBR: keterbatasan dan mahalnya harga lahan, pembangunan rumah bagi MBR yang sesuai dengan batas harga pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja, dan belum ada intervensi pemerintah untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan dan mengendalikan harga lahan;
5. Tahapan perizinan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum transparan dan akuntabel;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

6. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya.

2.3.2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1. Masih terdapat ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
2. Masih rendahnya pencegahan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan kebakaran;
3. Peralatan penanggulangan bencana dan kebakaran yang belum memadai;
4. Kurangnya personil penanggulangan bencana dan kebakaran;
5. Kurangnya kompetensi personil penanggulangan bencana dan kebakaran;
6. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku;
7. Belum Optimalnya pelaksanaan program pengorganisiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi yang strategis; (kewenangan kabupaten/kota);
8. Masih tingginya pelanggaran hukum oleh masyarakat dan dunia usaha;
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas;
10. Luasnya jangkauan sosialisasi dan pengawasan serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
11. Kualitas dan kuantitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai;
12. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

13. Belum optimalnya pelaksanaan operasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
14. Terbatasnya jumlah diklat keterampilan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2.3.2.1.6 Bidang Sosial

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Urusan Bidang Sosial meliputi:

1. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi.
2. Tingkat akurasi dan validitas data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan masih rendah, sehingga program bantuan sosial bagi masyarakat miskin banyak yang tidak tepat sasaran.
3. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Jumlah PPKS terlantar di Jawa Barat cukup banyak, tetapi kapasitas panti di Dinas Sosial masih terbatas, sehingga memerlukan pembangunan gedung dan pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan daya tampung panti.
5. Masih rendahnya aksesibilitas PPKS, terutama para penyandang disabilitas dalam mencari lapangan kerja di sektor formal
6. Peran pilar-pilar sosial di Jawa Barat dalam membantu menangani masalah kesejahteraan masih rendah.
7. Tingginya intensitas terjadinya bencana di Jawa Barat, sehingga potensi masyarakat mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sosial cukup tinggi.
8. Koordinasi dengan kabupaten/kota maupun dengan para *stakeholder* terkait dalam penanganan PPKS terlantar belum maksimal.
9. Minimnya alokasi anggaran di beberapa kabupaten/kota dalam rangka penanganan PPKS di daerahnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

10. Program pemberdayaan masyarakat belum optimal, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menangani masalah kesejahteraan sosial masih rendah.

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja meliputi:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi
   Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 1,77 juta jiwa dengan nilai TPT sebesar 6,75 persen yang merupakan nilai TPT tertinggi di Indonesia.
2. Masih minimnya jumlah Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
   Jumlah pencari kerja/penganggur di Jawa Barat pada tahun 2024 sebanyak 1,77 juta orang, tidak sebanding dengan jumlah BLK dan LPK yang hanya 3.013 unit dengan total kapasitas 127.177 juta.
3. Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia yang belum merata serta banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan DUDI.
   Kualitas infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi masih belum merata begitu juga dengan ketersediaan dan instruktur/narasumber yang dibutuhkan. Kurikulum vokasi seringkali kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis khususnya di wilayah sekitar, belum optimalnya *link* and *match* kompetensi dengan DUDI menyebabkan lulusan vokasi belum dapat terserap optimal di pasar kerja.
4. Minimnya Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
   Jumlah pegawai pengawas di Jawa Barat adalah sebanyak 160 orang. Jika membandingkan dengan standar kebutuhan berdasarkan Permenakertrans RI Nomor: PER. 02/MEN/2014, maka jumlah pengawas yang ideal adalah sebanyak 375 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai pengawas di Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

sebanyak 215 orang. Dengan kurangnya jumlah SDM pengawas maka berdampak pada tingkat perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang masih kurang memadai.

5. Kualitas tenaga kerja masih rendah

   Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas tenga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 37,25 persen (9,09 juta orang). Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 11,46 persen (2,80 juta orang).

6. Produktivitas Tenaga Kerja Relatif Rendah

   Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Pada tahun 2023, tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat adalah sebesar 71,03 juta rupiah per pekerja per tahun, nilai ini berada cukup jauh di bawah tingkat produktivitas tenaga kerja nasional yang mencapai 87,96 juta rupiah per pekerja per tahun.

7. Banyaknya gen Z yang tergolong *Not in Education, Employment or Training* (NEET).

   Jumlah gen Z yang tergolong NEET di Provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan data sakernas BPS Tahun 2023 mencapai sebesar 2,3 juta orang. Jumlah NEET yang besar ini menandakan banyaknya tenaga potensial muda yang tidak atau belum bisa terberdayakan sehingga menjadi beban pada kelompok usia lainnya khususnya kelompok lansia yang sudah tidak masuk usia produktif.

8. Perlindungan Pekerja Informal yang belum optimal

   Minimnya kesadaran terhadap hak-hak pekerja, pendapatan yang tidak stabil dan seringkali jauh di bawah UMR. Kurangnya akses terhadap perlindungan jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

9. Penentuan upah minimum

   Penetapan upah minimum sering kali menjadi polemik antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Para pekerja kerap menuntut kenaikan upah minimum yang sesuai dengan kenaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

kebutuhan hidup, sementara pengusaha berpendapat bahwa kenaikan yang terlalu tinggi dapat mengganggu stabilitas usaha.

10. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih rendah

    TPAK perempuan pada Agustus 2024 hanya sebesar 50,59 persen. TPAK perempuan yang rendah ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki hambatan signifikan untuk terjun ke pasar kerja

11. Banyaknya tenaga kerja yang pesimis dalam mendapatkan pekerjaan.

    Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan pada laki-laki mencapai sebesar 17,06 persen dan perempuan 9,72 persen. Tenaga kerja pesimis ini cenderung menjadi tetap menganggur jika tidak dibantu dalam mendapatkan pekerjaan.

12. Tingginya proporsi pekerja tidak penuh, khususnya setengah pengangguran

    Penduduk bekerja yang menjadi pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu termasuk sementara tidak bekerja) pada Agustus 2024 tercatat sebesar 29,80 persen (6,65 juta orang). Sebagian diantaranya (1,87 juta orang) karena terpaksa akibat ketiadaan kesempatan kerja yang memadai (setengah pengangguran).

13. Perlindungan tenaga kerja masih rendah

    Salah satu indikasinya adalah terlihat dari masih rendahnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Pada November 2024, tingkat kepesertaannya baru mencapai 34,1 persen (6.018.361 orang). Dimana untuk pekerja formal adalah sebesar 47,77 persen dan pekerja informal hanya mencapai 17,62 persen.

14. Masih Banyaknya pelaku pungli calon tenaga kerja

    Banyak pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena diminta membayar sejumlah uang yang tidak sedikit oleh para calo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.3.2.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap isu gender serta manfaat/peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender;
2. Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal dan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Perlunya penguatan ekonomi perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga;
4. Masih tingginya tingkat perkawinan di bawah umur;
5. Keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah, di bawah kuota 30 persen; dan
6. Masih cukup tingginya ketimpangan gender di Jawa Barat.

2.3.2.2.3 Bidang Pangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pangan meliputi:

1. Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat;
2. Tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah;
3. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola konsumsi kandungan energi dan protein serta kualitas bahan pangan produk pertanian yang rendah belum memenuhi standar yang mutu pangan; dan
5. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin dan bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh manusia.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.3.2.2.4 Bidang Pertanahan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan meliputi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki data dan informasi aset pertanahan yang jelas dan akurat serta bisa diakses *stakeholder* yang berkepentingan.
2. Belum adanya data dan informasi spasial dan aspasial yang andal dan terintegrasi sebagai masukan (*input*) dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya bidang perumahan dan permukiman.
3. Belum adanya sistem yang baik sebagai sarana komunikasi antara Disperkim dengan publik pada umumnya dan instansi pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada khususnya.
4. Banyaknya tanah kosong dan tanah terlantar di Jawa Barat yang belum terdata.
5. Banyaknya tanah ulayat di Jawa Barat yang belum terdata.
6. Banyaknya aset tanah milik Provinsi Jawa Barat yang dibiarkan dan tidak jelas peruntukannya.
7. Terjadinya permasalahan/konflik pertanahan antara: masyarakat vs Pemerintah; Swasta vs Pemerintah; Pemerintah; Pemerintah Daerah; dan Pemerintah Daerah vs Pemerintah Daerah.
8. Kebutuhan sinkronisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan BPN.
9. Belum adanya data untuk kebutuhan Redistribusi Tanah;
10. Perlunya regulasi khusus yang mengatur hubungan antar instansi terkait urusan pertanahan;
11. Belum optimalnya kualitas pelayanan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk penetapan lokasi gubernur yang menyebabkan:
    a. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana verifikasi;
    b. Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan verifikasi;
    c. Belum optimalnya kompetensi petugasnya verifikasi;
    d. Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

12. Belum optimalnya kualitas layanan informasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga menyebabkan:
    a. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana;
    b. Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan;
    c. Belum optimalnya kualitas petugas;
    d. Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan.

2.3.2.2.5 Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

1. Rendahnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Rendahnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
3. Belum optimalnya pengelolaan persampahan secara terintegrasi yang berdampak pada tingginya pencemaran, terutama pada upaya pengurangan sampah pada sumbernya, upaya pengolahan sampah bernilai ekonomi (sirkular ekonomi), belum beroperasinya TPPAS Regional, serta TPA kabupaten/kota yang belum terkelola dengan baik.
4. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
5. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan kebijakan 45 persen kawasan lindung Jawa Barat;
7. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana;

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

8. Belum sinerginya berbagai sektor diantaranya sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, dan perhubungan dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup;
9. Belum optimalnya komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan;
10. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan;
11. Penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut dengan meningkatnya abrasi, pencemaran yang menyebabkan rusaknya ekosistem;
12. Perlunya peningkatan penaatan hukum lingkungan dimulai dari pembinaan seluruh pemangku kepentingan, pengawasan dan pengendalian hukum lingkungan yang komprehensif;
13. Pengawasan pengelolaan sampah daerah pantai belum tersentuh oleh pihak yang berwenang sehingga menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk dan tercecer; dan
14. Pembentukan Satuan Tugas pengawasan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) selain DAS Citarum dan DAS Cilamaya Kali Bekasi sehingga kualitas air sungai bisa terpantau dan pemahaman pola pikir masyarakat sekitar DAS tersebut bisa meningkat ke sampah bukan musuh bersama melainkan sumber pendapatan bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.

2.3.2.2.6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebermanfaatan dokumen administrasi kependudukan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang administrasi kependudukan;
3. Belum selarasnya regulasi administrasi kependudukan dengan kebijakan K/L;
4. Belum optimalnya implementasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah;
5. Rendahnya pelaporan pemanfaatan data dan data balikan oleh perangkat daerah yang sudah melakukan kerjasama;
6. Sulitnya proses pemadanan/penyandingan data kependudukan dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat yang berdampak Disdukcapil Provinsi tidak dapat memberikan/menyajikan data kependudukan kepada instansi/lembaga lain karena sudah tidak memiliki data *By Name By Address* (BNBA);
7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
8. Tantangan Kondisi Geografis.

2.3.2.2.7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif untuk menuju Gerbang Desa Juara;
2. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, baik secara parsial maupun sektoral di tingkat desa;
3. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian pedesaan.
4. Masih terbatasnya pemahaman dan aksesibilitas IT di pedesaan khususnya pada desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi (*blankspot*) untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa.
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas kerjasama dalam pengembangan produksi desa serta akses pemasaran potensi desa.
7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah dalam pembangunan desa
8. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa; dan
9. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2.2.8 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Pertambahan penduduk atau laju kelahiran yang tidak disertai dengan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Persebaran dan mobilitas penduduk yang belum merata sehingga berdampak pada kesejahteraan antar wilayah yang juga belum merata;
3. Masih tingginya masyarakat yang belum mengikuti program KB; dan
4. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi *stunting* dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.

2.3.2.2.9 Bidang Perhubungan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan meliputi:

1. Belum optimalnya layanan angkutan umum di Jawa Barat yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

bersifat multidimensi mencakup aspek teknis, kelembagaan, kebijakan dan perilaku pengguna, di antaranya:

a. Belum optimalnya cakupan layanan angkutan orang dan barang;
b. Kualitas sarana dan layanan masih rendah;
c. Daya saing rendah terhadap angkutan *online* dan kendaraan pribadi;
d. Keterbatasan infrastruktur pendukung;
e. Data dan sistem informasi belum terintegrasi dan tidak diperbarui secara berkala serta belum didukung sistem digital yang mendukung manajemen dan pemantauan layanan angkutan umum secara *realtime;*
f. Belum terintegrasinya sistem angkutan barang antar moda;
g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi; dan
h. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan layanan transportasi.

2. Masih rendahnya pelayanan manajemen rekayasa lalu lintas jalan
   a. Perencanaan dan desain tidak berbasis data;
   b. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung lalu lintas;
   c. Keterbatasan kapasitas SDM yang berkompetensi teknis;
   d. Laboratorium transportasi yang sudah tersedia belum berfungsi secara optimal, sehingga minimnya sistem dan teknologi pengelolaan lalu lintas; dan
   e. Masih lemahnya penegakan dan pengawasan di lapangan.
3. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di ruas jalan Provinsi
   a. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan;
   b. Masih banyaknya kendaraan *Over Dimension And Over Load* (ODOL);
   c. Masih rendahnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
   d. Kurangnya sarana edukasi dan kampanye tertib lalu lintas;
   e. Belum optimalnya evaluasi lokasi rawan di Ruas Jalan Provinsi;
   f. Belum optimalnya kolaborasi penanganan kemacetan;
   g. Belum adanya integrasi data, penanganan, pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

lokasi rawan; dan

h. Kurangnya pembinaan, sosialisasi dan penegakan hukum.

4. Belum optimalnya layanan lalu lintas ASDP dan Laut

a. Keterbatasan saran dan prasarana pelabuhan penyebrangan dan laut yang belum memadai

b. Belum terintegrasinya data dan layanan Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP)

c. Belum adanya penetapan alur dan peta keselamatan alur, sehingga Alur pelayaran tidak teratur

5. Belum optimalnya pelayanan perkeretaapian

a. Cakupan dan jaringan kereta api di beberapa wilayah strategis masih belum terhubung dan terintegrasi antar moda dan layanan *feeder;*

b. Pemanfaatan KA untuk angkutan barang masih sangat terbatas dan belum terkoneksi dengan *dryport* atau kawasan industri;

c. Beberapa jalur kereta api non aktif di Jawa Barat belum direaktivasi;

d. Belum tersedianya kelembagaan transportasi yang terintegrasi;

e. Potensi pengembangan kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun masih belum optimal; dan

f. Masih terbatasnya layanan kereta api perkotaan.

6. Layanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara belum terintegrasi dengan baik

2.3.2.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disebabkan oleh:

a. Belum tuntasnya penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam penerapan SPBE di Jawa Barat;

b. Belum tersedianya pedoman untuk melaksanakan tata kelola SPBE Jawa Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

c. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Pemerintah Daerah, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi;

2. Belum meratanya infrastruktur digital di semua wilayah Jawa Barat;
3. Belum maksimalnya kinerja keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh :
   a. Belum dipahaminya kewajiban penyampaian informasi publik sesuai regulasi;
   b. Belum tersedianya kebijakan terkait hak dan kewajiban publik atas informasi yang menyeluruh;
   c. Belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme bagi pakai informasi publik antar perangkat daerah; dan
   d. Belum maksimalnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyampaian informasi publik.

2.3.2.2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi:

1. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
2. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan;
3. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM;
4. Belum optimalnya kapasitas literasi digital bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya; dan
5. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

2.3.2.2.12 Bidang Penanaman Modal

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal meliputi:

1. Banyaknya potensi investasi dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum diinventarisasi menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk promosi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2. Terbitnya UUCK disusul oleh implementasi OSS RBA tidak segera dibarengi dengan penerbitan peraturan perundangan turunan termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga menghambat pelayanan perizinan. Kemudian, tidak semua jenis perizinan diakomodir ke dalam aplikasi OSS RBA sehingga mengakibatkan beberapa layanan perizinan yang tidak segera terlayani;
3. Provinsi Jawa Barat dengan wilayah yang luas dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar mengakibatkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Sehingga, banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk berusaha terutama dalam hal pengisian LKPM sehingga pencatatan nilai realisasi tidak seluruhnya terlaporkan; dan
4. Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang diwajibkan di semua kabupaten/kota dimana tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP ini, sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan.

2.3.2.2.13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

1. TPT Pemuda tahun 2023 masih cukup tinggi yaitu 16,26 persen dan lebih tinggi 4,02 persen dari capaian nasional;
2. Partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan dan kontribusi nyata dalam pembangunan belum optimal;
3. Masih tingginya kerentanan pemuda terhadap perilaku berisiko;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat olahraga untuk kesehatan;
5. Keterbatasan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat terutama fasilitas olahraga yang dirancang secara inklusif;
6. Peran sentra keolahragaan belum optimal karena belum terbangun Sekolah Khusus Keolahragaan sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

7. Belum terdapat wisma atlet untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
8. Terbatasnya kuantitas dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
9. Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet dalam kompetisi olahraga nasional maupun internasional; dan
10. Tantangan dalam upaya mempertahankan prestasi Jawa Barat dalam *Single Event* dan *Multi Event* Nasional.

2.3.2.2.14 Bidang Statistik

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik meliputi:

1. Belum dilaksanakannya *review* atas kebijakan/regulasi penyelenggaraan Satu Data dan Satu Peta secara berkala;
2. Belum dimutakhirkannya regulasi terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik di Jawa Barat;
3. Belum maksimalnya penerapan regulasi terkait penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik;
4. Belum tersedianya tata kelola pemanfaatan data, baik data statistik maupun data geospasial, yang menyeluruh;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang Statistik dan Informasi Geospasial;
6. Belum adanya regulasi pendukung pengelolaan statistik secara umum (untuk panduan pengelolaan statistik di daerah) serta aturan pemanfaatan BIG data.

2.3.2.2.15 Bidang Persandian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian meliputi:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2. Belum optimalnya penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan SNI/ISO/IEC 27001:2022; dan
3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Informasi, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi.

2.3.2.2.16 Bidang Kebudayaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kebudayaan meliputi:

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Provinsi Jawa Barat;
2. Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Kurang optimalnya promosi budaya tradisional Provinsi Jawa Barat di dalam dan luar negeri;
4. Besarnya peluang masuknya pengaruh negatif budaya asing ke Provinsi Jawa Barat;
5. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat;
6. Masih kurangnya ruang publik sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya;
7. Masih kurangnya *event*/festival seni budaya unggulan yang menjadi ikon Jawa Barat;
8. Adanya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat;
9. Masih banyaknya aset tinggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah;
10. Belum terdata dengan baik, tercatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya Jawa Barat oleh pemerintah pusat. Pencatatan belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan; dan
11. Masih kurangnya sarana publik yang secara berkesinambungan menampilkan seni budaya daerah baik dengan fungsi pembinaan maupun fungsi media apresiasi dan ekspresi masyarakat di bidang seni budaya.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.3.2.2.17 Bidang Perpustakaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan meliputi:

1. Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat;
2. Masih minimnya literasi dan minat baca masyarakat Jawa Barat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan daerah di Jawa Barat;
4. Perlunya peningkatan literasi di sekolah dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan;
5. Perlu adanya penguatan Lembaga perpustakaan di desa-desa baik SDM, sarana prasarana maupun penunjang, dan bahan Pustaka;
6. Ketersediaan bahan pustaka masih belum mencukupi kebutuhan di masyarakat; dan
7. Sarana pendukung layanan perpustakaan keliling belum mampu mencukupi permintaan Kabupaten/Kota dan masyarakat di Jawa Barat.

2.3.2.2.18 Bidang Kearsipan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan meliputi:

1. Komitmen kepala perangkat daerah selaku penanggung jawab penciptaan arsip belum maksimal;
2. Perlu adanya peningkatan pengelolaan kearsipan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Transformasi digital arsip melalui alih media arsip belum diimplementasikan secara efektif;
4. Pembinaan kearsipan oleh unit kearsipan masih belum optimal.
5. Penyelamatan arsip bernilai kesejarahan belum maksimal; dan
6. Sarana pendukung layanan perbaikan arsip belum memenuhi kebutuhan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2.3.2.3 Urusan Pilihan

2.3.2.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan;
3. Pengawasan dan pengendalian SDKP (Penanggulangan dan penyelesaian IUU *Fishing*);
4. Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan *mangrove*, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, *overfishing, destructive fishing* dan sedimentasi di Kawasan Pelabuhan perikanan);
5. Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut (manajemen dan teknologi pemanfaatan yang belum optimal dan belum teradaptasi oleh masyarakat);
6. Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
7. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal;
8. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi;
9. Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah Selatan Jawa Barat sehingga sumber daya kelautan dan perikanan yang ada belum termanfaatkan secara optimal;
10. Terbatasnya teknologi penangkapan yang dihadapi nelayan khususnya nelayan wilayah Selatan Jawa Barat;
11. Meminimalkan disparitas pembangunan antara wilayah pesisir Utara dan Selatan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat;
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat; dan
13. Kelembagaan dan struktur penganggaran yang belum kompatibel dengan pembagian pengurusan saat ini.

Kelembagaan dan struktur penganggaran saat ini belum kompatibel dengan pembagian pengurusan saat ini. Di satu sisi belanja pegawai meningkat hingga, namun peningkatan belanja publik tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

sejalan dengan peningkatan belanja pegawai. Adanya gap dari segi penganggaran ini menjadikan program yang dapat dilakukan menjadi terbatas. Untuk mengurangi gap penganggaran tersebut bisa dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu mendorong APBD provinsi untuk dinaikkan atau pusat memberikan ke provinsi atau bisa juga mendorong pihak swasta dalam bentuk *bussiness to bussiness*.

1. Terbatasnya SDM

   Keterbatasan SDM tidak hanya dari segi jumlah tapi juga dari kapasitas. Untuk jumlah SDM yang terbatas terutama pada terbatasnya jumlah penyuluh karena jumlah penyuluh saat ini masih di bawah ideal. Selain itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat sebanyak 54 persen bidang tugasnya tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan 46 persen yang bidang tugasnya sesuai dengan pendidikan.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perkembangan teknologi kelautan dan perikanan

   Ketersediaan prasarana dan sarana perikanan yang ada di Jawa Barat belum optimal dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Diantaranya adalah permasalahan dalam teknologi penangkapan dan budidaya serta pengolahan.
3. Monitoring dan pencatatan data yang masih lemah dan belum terintegrasi.

   Saat ini monitoring dan pencatatan data masih lemah dan belum terintegrasi. Minimnya data realisasi capaian dari target yang direncanakan, diduga karena indikator kinerja belum terukur dan terarah sehingga sulit untuk dihitung.
4. Terbatasnya anggaran dari sumber lainnya

   Dana pengelolaan saat ini mengandalkan dan alokasi APBD. Anggaran untuk pengelolaan dari sumber lainnya seperti kerjasama masih terbatas.

2.3.2.3.2 Bidang Pariwisata

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pariwisata meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata masih rendah;
2. Masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pengembangan kegiatan pariwisata;
3. Belum semua kabupaten/kota memiliki destinasi wisata unggulan yang dapat menarik kunjungan wisatawan;
4. Belum optimalnya keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi;
5. Belum optimalnya pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata;
6. Belum optimalnya pengembangan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata;
7. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif di Jawa Barat;
8. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat;
9. Belum optimalnya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pariwisata;
10. Belum memadainya fasilitas pendukung pariwisata sebagai pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan terhadap faktor pendukung dan infrastruktur pariwisata, aksesibilitas menuju daya tarik wisata di Jawa Barat;
11. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan pariwisata Jawa Barat oleh seluruh *stakeholder* pariwisata; dan
12. Masih perlu ditingkatkannya peran serta aktif masyarakat dan seluruh *stakeholder* pariwisata dalam meningkatkan pembangunan pariwisata.

2.3.2.2.3.3 Bidang Pertanian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian meliputi:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
2. Kondisi fisik jaringan irigasi belum optimal;
3. Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan air;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

4. Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas;
5. Penerapan teknologi belum optimal pada sektor pertanian;
6. Kerentanan terhadap guncangan eksternal (ketidakpastian pasar, bencana, perubahan iklim, regulasi);
7. Belum optimalnya regenerasi petani;
8. Daya saing, nilai tambah dan akses pasar masih rendah dalam bidang pertanian;
9. Terlalu rendahnya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditingkat petani;
10. Perlu adanya terobosan dalam pengentasan permasalahan pada bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis holtikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
11. Semakin tingginya alih fungsi lahan;
12. Menurunnya kualitas tanah (lahan) pertanian khususnya di wilayah utara
13. Lambatnya perbaikan Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi;
14. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/ kebanjiran);
15. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani;
16. Kemampuan permodalan petani terbatas;
17. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi;
18. Masih kurangnya indek yang diterima peternak dibandingkan dengan indek harga yang dibayar peternak;
19. Masih tingginya impor daging dan susu;
20. Rendahnya populasi ternak, produksi dan produktivitas ternak yang belum optimal, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan meningkatnya produksi daging, telur dan susu; dan
21. Masih ditemukan produk hewan di masyarakat yang belum memenuhi standar mutu.

2.3.2.3.4 Bidang Kehutanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kehutanan meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

1. Degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga masih banyaknya lahan kritis;
2. Meningkatnya gangguan hutan;
3. Pemanfaatan multifungsi hutan yang tidak hanya mengandalkan pada hasil hutan kayu, tetapi juga untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum optimal;
4. Masih terbatasnya kapasitas penyuluh kehutanan; dan
5. Masih rendahnya kapabilitas Kelompok Tani Hutan.

2.3.2.3.5 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Masih kurangnya kesadaran para pemilik instalasi tenaga listrik untuk melakukan proses sertifikasi laik operasi;
2. Perubahan kewenangan provinsi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diberlakukannya pemberhentian sementara untuk SLO dan Perizinan pada tanggal 12 November 2020, hingga adanya peraturan pelaksanaan serta arahan lebih lanjut;
3. Belum tersedianya Peraturan dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM sebagai NSPK bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang IUPTL di Jawa Barat;
4. Masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik namun belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ketenagalistrikan khususnya inspektur ketenagalistrikan sebagai pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
6. Belum adanya NSP dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM terkait penetapan konsumsi listrik per kapita sebagai indikator pembangunan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki referensi dalam pelaksanaan Perhitungan Konsumsi Perkapita;
7. Sektor terkait sebagai *driver factor* maupun sebagai pendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita belum memiliki pemahaman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

yang baik mengenai kepentingan perhitungan konsumsi listrik per kapita;

8. Terbatasnya kewenangan provinsi dalam membangun pembangkit listrik dengan kapasitas maksimal hanya 10 mW;
9. Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola EBT yang bersumber dari potensi daerah masing-masing (PLTMH, Biogas, PLTS) bagi daerah yang tidak mendapat akses listrik dari PLN;
10. Sumber energi pada pembangkit EBT bersifat intermittent;
11. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan, ataupun telah memiliki sumur imbuhan tetapi belum diregistrasi, dan belum memasang piezometer;
12. Adanya kendala dalam masalah biaya dalam melakukan pengujian konstruksi sumur bor melalui *bore hole camera*; dan
13. Masih ditemukan adanya meter air yang belum dikalibrasi (ditera) atau meter air yang kondisinya rusak.
14. Terdapat hambatan mengenai pemanfaatan tenaga listrik non-PLN yang menurun diantaranya tidak dilakukan perpanjangan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) antara PT Tatajabar Sejahtera dan PT. Green Power South East Asia, sehingga PT.Green Power South East tidak memproduksi listrik mulai September 2024 dan PT Dian Swastatika Sentosa-Unit Karawang 1 dan 2 sedang dalam proses permohonan pencabutan IUPTLU karena beralih menjadi IUPTLS.
15. Belum terdapat *platform* aplikasi untuk melakukan validasi data secara langsung di lapangan guna mendukung keabsahan data dukung penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi sehingga data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.
16. Terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan, sehingga tidak semua Pemegang IUP dapat dilakukan pengawasan.
17. Kewajiban pelaporan berkala oleh Pemegang IUP belum berjalan dengan baik dan optimal
18. Kurangnya penguatan organisasi dimana Pemilik Perusahaan atau Pemegang IUP kurang mendukung program KTT yang telah direncanakan dalam RKAB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

19. Ditemukan permasalahan internal antara KTT dengan Direksi/Pemilik IUP yang mengakibatkan tidak dapat terimplementasikannya kaidah pertambangan yang baik akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal perusahaan.
20. Terdapat beberapa Pemegang IUP yang belum memiliki dokumen teknis dan pengesahannya seperti Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Rencana Pascatambang beserta bukti penempatan Jaminan Pascatambang.
21. Belum terbitnya peraturan pelaksana/turunan dari terbitnya beberapa peraturan/perundang-undangan dan peraturan di tingkat pemerintah provinsi yakni Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha yang masih proses Propemperda Rancangan Peraturan Daerah Sektor Pertambangan.
22. Masih banyak pemegang IUP yang belum menerapkan *good mining practice*.
23. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sektor energi dan sumber daya mineral.

2.3.2.3.6 Bidang Perdagangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan meliputi:

1. Fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
2. Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang;
3. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
4. Daya saing produk lokal yang masih lemah; dan
5. Lemahnya rantai nilai yang utuh dan terintegrasi (belum terbentuknya sistem logistik yang terpadu).

2.3.2.3.7 Bidang Perindustrian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

1. Produk industri berdaya saing rendah, Pandemi COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
2. Infrastruktur pendukung Kawasan industri yang belum terintegrasi
3. Bahan baku industri mayoritas impor;
4. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi; dan
5. Produk industri unggulan yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi.

2.3.2.3.8 Bidang Transmigrasi

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Transmigrasi meliputi:

1. Alokasi target penempatan calon transmigran

   Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Penetapan target ini menjadi permasalahan bagi daerah pengirim, termasuk Jawa Barat. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2018 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK), kemudian menjadi 40 KK pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada target penempatan calon transmigrasi karena dampak dari pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021 hanya 40 KK. Tahun 2022 alokasi penempatan transmigran sebanyak 44 KK dan tahun 2023 sebanyak 13 KK. Alokasi ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Jawa Barat.
2. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan

   Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

2.3.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.4.1 Bidang Perencanaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan meliputi:

1. Belum optimalnya pelibatan *stakeholder* non pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2.3.2.4.2 Bidang Keuangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan meliputi:

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
2. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK masih sering terjadi;
3. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
4. Pelaksanaan *e-audit* dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
5. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai.
6. Tuntutan agilitas struktur dan sub struktur serta *actor* pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi kompleksitas perubahan ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang sesuai dengan pengaturan pemerintah pusat;
7. Belum optimal dan andalnya ekosistem sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung penerapan *e governance* di pemerintah daerah, terbatasnya sumberdaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pengelola sistem informasi yang kompeten dan terbatasnya sarana prasarana penunjang *e governance* yang representatif;

8. Potensi penurunan pendapatan daerah pemerintah provinsi pasca implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang berdampak pada keharusan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan *fiscal reform*, dalam Upaya peningkatan target pendapatan pemerintah daerah, peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah (*spending better*), serta pembiayaan yang berkualitas;
9. Tuntutan disrupsi regional dan nasional terhadap keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk Upaya pencapaian *good governance*;
10. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten serta tersertifikasi;
11. Kompleksitas permasalahan pencatatan, pengelolaan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah baik yang dalam posisi termanfaatkan maupun yang *idle* dalam Upaya pengelolaan aset yang optimal.

2.3.2.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

1. Belum sepenuhnya aplikasi layanan kepegawaian yang terdigitalisasi dalam *Super Apps* kepegawaian;
2. Belum semua terintegrasi data kepegawaian antara BKD dan BKN;
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Manajemen ASN;
4. Masih banyaknya ASN yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN;
5. Belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN;

2.3.2.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah;
2. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah;
3. Kurangnya eksistensi kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten/Kota;
4. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan IPTEK;
5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya;
6. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK;
7. Terbatasnya SDM Peneliti;
8. Belum seluruhnya data base tersedia sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan;
9. Belum optimalnya program kerja sama baik antardaerah, swasta, dan masyarakat;
10. Belum terkoordinasinya sinkronisasi dan terintegrasi program-program kelitbangan antar-PD; dan
11. Belum optimalnya peran Lembaga-lembaga pendukung kelitbangan seperti Dewan Riset Daerah (DRD). Tim Koordinasi SIDa, Tim Advisori IPTEK dan Sosial Budaya, dan Majelis BP2D.

2.3.2.4.5 Bidang Pengawasan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengawasan meliputi:

1. Inspektorat belum bisa sepenuhnya memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, risiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi;
2. Mempertahankan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum sesuai harapan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

4. Masih lemahnya sistem pengendalian internal (SPI/wasnal) pada PD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);
5. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rawan tindak pidana korupsi;
6. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan yang belum optimal;
7. *Skill, knowledge* dan *attitude* pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan;
8. Perlu mempersiapkan SDM pembinaan dan pengawasan yang memahami tentang hukum pidana dan perdata, serta mampu berkoordinasi dengan APH; dan
9. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

2.3.2.4.6 Fungsi Lainnya

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah yaitu:

1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengisi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
2. Permasalahan dalam integrasi *e-Budgeting* dengan SIPD, dimana terdapat beberapa data yang belum ada di formulir sebelumnya, sehingga harus menambahkan lagi informasi yang sesuai dengan kebutuhan data SIPD;
3. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota;
5. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
6. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;

7. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan;
8. Belum optimalnya Penganggaran CSR dan *Crowdfunding*;
9. Belum adanya standar keamanan informasi;
10. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik;
11. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral ;
12. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awareness*);
13. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat;
14. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
15. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
16. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat;
17. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
18. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Provinsi Jawa Barat;
19. Capaian SPM Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum mencapai 100 persen;
20. Masih terdapat beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang capaian LPPD nya masih rendah;
21. Belum masifnya penyelenggaraan nama rupabumi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. Terdapat potensi permasalahan batas daerah Provinsi dan batas pengelolaan sumber daya alam di laut yang menjadi kewenangan Provinsi;
23. Belum meratanya pembangunan di Jawa Barat dikarenakan adanya ketimpangan luas wilayah dan dana transfer ke daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

24. Belum sinergisnya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
25. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kerja sama serta tingkat efektivitas implementasi kerja sama;
26. Belum optimalnya koordinasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat dengan mitra perangkat daerah lingkup kesejahteraan rakyat terutama setelah adanya perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak diketahui oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
27. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan hibah khususnya dalam pengajuan hibah yang tidak didukung dengan aplikasi yang memadai, penggunaan dana hibah yang sering tidak sesuai dengan dokumen perencanaannya, banyak penerima hibah yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban, dan pengelolaan arsip hibah yang belum optimal;
28. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sehingga banyak warga masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis;
29. Jumlah kuasa hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang masih terbatas;
30. Keterbatasan sumber daya manusia dalam merancang produk hukum yang diajukan oleh perangkat daerah;
31. Masih kurangnya desa/kelurahan yang belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum;
32. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum kabupaten/kota serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di kabupaten/kota;
33. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
34. Penerapan *e-Government* belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/ aturan hukum daerah;
35. Belum optimalnya koordinasi antara berbagai unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah pada program dan kebijakan ekonomi yang tidak terintegrasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

sehingga kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi;

36. Rendahnya partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat dalam program-program ekonomi daerah dapat mengurangi dampak positif dari program;
37. Kurangnya data dan informasi ekonomi yang akurat dan terkini;
38. Akses Infrastruktur pendukung ekonomi belum optimal, sehingga minat investor dalam percepatan investasi daerah masih kurang;
39. Ketersediaan dan validitas data capaian kinerja provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian administrasi pembangunan;
40. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD Provinsi Jawa Barat;
41. Belum optimalnya kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat;
42. Belum adanya pedoman pengaturan investasi Pemerintah Daerah, meliputi investasi langsung dan investasi pembelian surat berharga;
43. Belum adanya pedoman penilaian kinerja BLUD;
44. Belum semua pelaku pengadaan memahami proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan pengadaan dan pengelolaan kontrak;
45. Terdapat indikasi tusi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan indikasi tumpang tindih tusi baik internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah;
46. Masih terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur struktur perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsinya;
47. Tugas perangkat daerah yang ada saat ini cenderung spesifik dan belum menggambarkan beban kerja dan *output* yang dihasilkan;
48. Masih terdapat ketidaksesuaian antara jenjang jabatan fungsional dengan target kinerja dan kontribusinya;
49. Pelayanan publik yang dilaksanakan hingga saat ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat;
50. Unit kerja pemerintahan belum memiliki dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang tetap untuk dibuat menjadi suatu dasar aktivitas kerja dan kinerja sehingga kanal tunggal penyelenggaraan layanan publik sulit dibangun;
51. Belum optimalnya pengayaan fungsi staf ahli gubernur dalam pencapaian target pembangunan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

52. Masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam hal pelayanan pimpinan antara Biro Administrasi Pimpinan dan juga Biro Umum;
53. Belum optimalnya penyusunan Perencanaan kinerja, pelaksanaan pengendalian dan pengukuran kinerja lingkup Sekretariat Daerah;
54. Belum adanya mapping kompetensi SDM Sekretariat Daerah mendorong ketidaktepatan penempatan pegawai baik pada jabatan maupun pada unit kerja;
55. Belum optimalnya layanan yang diberikan Biro Umum terhadap biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan penelaahan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta penelaahan faktor eksternal yang meliputi penelaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, dan hasil evaluasi RKPD yang lalu, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Isu strategis merupakan hal-hal yang berdaya ungkit, bersifat penting untuk pembangunan jangka menengah, dan gambaran permasalahan atau tantangan yang akan ditangani atau dijawab, serta potensi dan peluang yang akan diambil atau dioptimalkan. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi: 1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan; 3) Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan 4) Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memuat kondisi capaian kinerja perekonomian Jawa Barat tahun 2024, perkiraan/prospek tahun 2025, serta kebijakan pembangunan perekonomian daerah tahun 2026. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian Jawa Barat tahun 2026 mempertimbangkan perkembangan dan prospek perekonomian global, arah kebijakan nasional terhadap Jawa Barat, serta potensi dan modalitas pembangunan yang dimiliki Jawa Barat.

3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

International Monetary Fund (IMF) awalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2 persen pada tahun 2025, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1 persen. Namun, berdasarkan situasi terkini, IMF menurunkan prediksi tersebut menjadi hanya 2,8 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kekhawatiran atas dampak kebijakan proteksionisme perdagangan, termasuk diantaranya kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter yang ketat di negara-negara besar turut memperburuk prospek pertumbuhan global. Organisasi

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,1 persen menjadi 3,0 persen pada 2025.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, tetapi masih berada di atas target bank sentral di beberapa negara maju. Sementara itu, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah perlambatan global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,1 persen, relatif stabil dibandingkan proyeksi sebelumnya. OECD yang semula optimistis dengan pertumbuhan 5,2 persen di Indonesia, kemudian merevisi proyeksi pertumbuhannya turun menjadi 4,9 persen akibat prospek melemahnya permintaan global. Konsumsi domestik diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia, didukung oleh investasi swasta yang meningkat serta kondisi inflasi yang terkendali.

Inflasi di Indonesia telah mengalami penurunan ke kisaran target Bank Indonesia, tercatat inflasi sebesar 1,7 persen pada Oktober 2024. Selain itu, pasar tenaga kerja juga menunjukkan pemulihan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen pada pertengahan tahun 2024. Meski demikian, risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan utama. Pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2025 sesuai dengan APBN, sedangkan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Untuk memperkuat pertumbuhan jangka menengah, OECD merekomendasikan Indonesia untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk peningkatan efisiensi belanja publik dan pengurangan subsidi energi.

OECD juga mencatat bahwa meskipun ekspor Indonesia akan diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas global, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di bawah tren sebelum pandemi. Oleh karena itu, kesinambungan reformasi dan peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ke depan. Perdagangan internasional telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi global, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, tidak semua aspek perdagangan berjalan dengan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

lancar, dan manfaatnya tidak selalu terdistribusi secara merata. Peningkatan ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis berpotensi mengganggu rantai pasokan, menaikkan harga barang konsumen, dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, eskalasi ketegangan atau konflik geopolitik dapat merusak perdamaian global dan mengganggu pasar keuangan internasional.

Untuk tahun 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit meningkat ke 3,0 persen, seiring pelonggaran kebijakan moneter di negara maju dan stabilisasi harga energi. Pertumbuhan di negara berkembang diperkirakan tetap kuat, terutama di Asia, termasuk India dan Indonesia. OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia bisa kembali ke kisaran 5,3 persen pada tahun 2026 dengan asumsi membaiknya ekspor dan meningkatnya investasi infrastruktur. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan momentum pertumbuhan tetap terjaga melalui akselerasi hilirisasi industri, transformasi digital, dan perluasan pasar ekspor non-tradisional. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada respons terhadap risiko global termasuk volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, dan transisi energi yang adil dan terencana.

3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

IMF menggambarkan proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2025 dan 2026 dengan istilah *"resilient but slow"*, yang mengindikasikan bahwa ekonomi global masih tangguh, namun tumbuh secara perlahan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan besar karena dunia masih diliputi oleh risiko ketidakpastian global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme perdagangan. Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat sepanjang tahun 2024. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan pada 2024, sedikit di bawah angka tahun sebelumnya sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemilu, serta investasi infrastruktur yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam 6 (enam) tahun terakhir.

Dari segi capaian inflasi Indonesia pada akhir tahun 2024 masih tetap terkendali. Secara tahunan (*year-on-year*), inflasi mencapai 1,57

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

persen pada Desember 2024, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen ±1 persen. Stabilitas harga ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang masa transisi pemerintahan. Selain itu, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi, mencatatkan angka 51,2 pada Desember 2024, yang mencerminkan peningkatan produksi dan optimisme pelaku industri.

Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi tumbuh positif pada tahun 2024, termasuk sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia bersifat menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu sektor. Kinerja ekspor Indonesia memang tertekan akibat melemahnya permintaan global, namun tetap ditopang oleh harga komoditas yang relatif tinggi.

Untuk tahun 2025, sejumlah lembaga internasional telah mengeluarkan proyeksi mereka terhadap perekonomian Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 4,7 persen pada 2025 dan tetap stabil di level yang sama pada 2026. *World* Bank juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 4,9 persen pada 2026. Di sisi lain, OECD lebih optimistis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dengan angka pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN Tahun Anggaran 2025, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran antara 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh belanja pemerintah yang masih tumbuh positif, serta investasi swasta yang meningkat di sektor energi dan manufaktur. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu waspada terhadap risiko eksternal seperti gejolak pasar keuangan global, perubahan arah kebijakan suku bunga *The Fed*, serta fluktuasi harga komoditas global. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indonesia didorong untuk terus melakukan reformasi struktural, memperkuat daya saing industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. OECD juga menyarankan agar efisiensi belanja

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

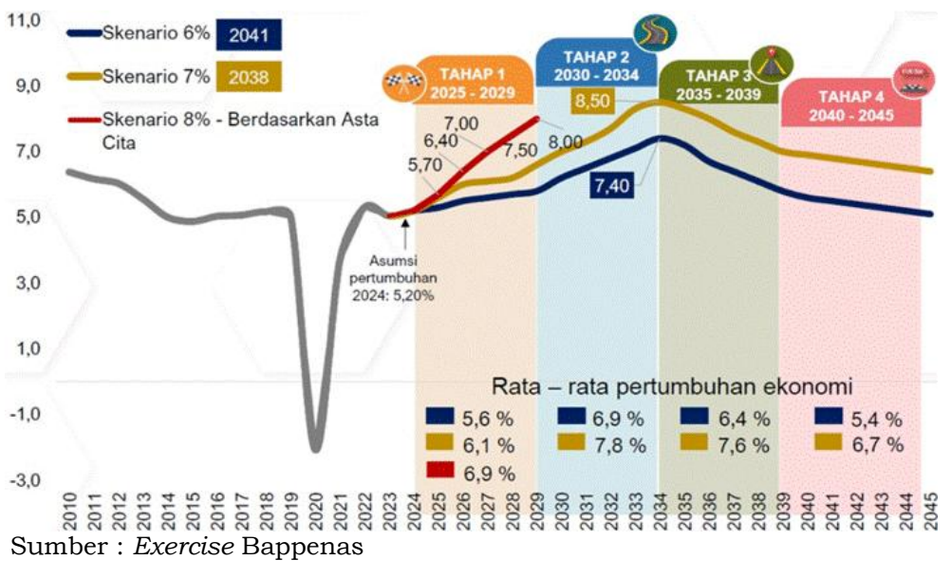
publik ditingkatkan, termasuk dengan mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat dan inflasi yang terkendali, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah ketidakpastian global. Fokus pada hilirisasi industri, transformasi digital, serta keberlanjutan fiskal menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen diperkirakan tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* sebelum 2045, sehingga diperlukan rata - rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai dengan 7 persen pada Tahun 2025-2045. Berlandaskan pada Asta Cita, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 8 persen dalam periode 2025-2029 (Gambar 3.1), yang didorong melalui transformasi perekonomian sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas untuk peningkatan *output* potensial dan pertumbuhan ekonomi;
2. Sumber-sumber pertumbuhan baru yang berasal dari proyek prioritas;
3. Peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan proyek prioritas.

Gambar 3.1
Trayektori Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : *Exercise* Bappenas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah pada tahun 2026 mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Proyek Strategis Nasional Infrastruktur di Jawa Barat

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Keterangan
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Pembebasan Lahan
2.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Konstruksi Seksi IV (Bojonggede - Salabenda)
3.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Operasional
4.	Jalan Tol Bogor *Ring Road* (termasuk Caringin - Salabenda)	Konstruksi
5.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Konstruksi
6.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Operasional
7.	Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. *North - South Link* Bandung; dan b. Bandung *Inter Urban Toll Road*	Pembebasan Lahan
B. Sektor Pelabuhan		
1.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Tahap I-2 Jangka Pendek
C. Sektor Kereta		
1.	*Double Track* Jawa Selatan	Segmen Kiaracondong - Cicalengka
2.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Operasional Line 1 Jatimulya-Dukuh Atas dan Line 2 Harjamukti - Duku Atas
3.	*Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta East - West Phase I	Konstruksi
D. Sektor Bendungan dan Irigasi		
1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Kegiatan *Multiyears*
E. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Proses KPBU
F. Sektor Energi		
1.	*Upgrading* Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Tahap 2 dan 3
G. Sektor Tanggul Pantai		
1.	Tanggul Pantai	Kegiatan *Multiyears*
H. Sektor Perumahan		
1.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Kegiatan *Multiyears*
I. Sektor Kawasan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Keterangan
1.	Kawasan Industri Patimban Industrial *Estate*	Pencarian Tenant Potensial

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026, 2025;

Tabel 3.2
Program Strategis Nasional di Jawa Barat

No.	Daftar Program Strategis Nasional	Keterangan Program Strategis Nasional
1.	Pengentasan Kemiskinan	a. Penanggulangan Kemiskinan
		b. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		c. Sekolah Rakyat
		d. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	a. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
		b. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		c. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		d. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*)
3.	Kesehatan untuk Semua	a. *Stunting*
		b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		c. Jaminan Kesehatan Nasional
		d. Penuntasan TBC
		e. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap
4.	Perluasan Akses Pendidikan	a. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		b. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		c. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		d. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	a. Pengendalian Inflasi
		b. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		c. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		d. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		e. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber: Permendagri 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, 2025;

3.1.3 Kondisi dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Tabel 3.3
Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator	Realisasi 2024[1)]	Target 2025[2)]	Target 2026[3)]
1	LPE (%, *c-to-c*)	4,95	4,96 – 5,37	5,15 - 6,20
2	Laju Inflasi (%, *y-o-y*)	1,67	2,5 ± 1	2,5 ± 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41.15 - 41.38	40,10 - 42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21 - 3,46
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	**21,53**	**26,3**	**20,50 - 20,54**

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2025;
2) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan;
3) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Terkendalinya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalinya inflasi pada tingkat 2,5 ± 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen pada tahun 2024, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan *output* pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan *Real Estate*. Sektor Industri

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Pertumbuhan pariwisata di wilayah yang menjadi koridor pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yang mencakup Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Cekungan Bandung, pada tahun 2026 diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2026 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,30 - 7,58 persen (*c-to-c*), dengan nilai ADHB sebesar Rp793,36 - Rp804,52 T. Sementara itu, nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya *input*, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi *green economy* dan *blue economy,* ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jawa Barat bagian Selatan. Pengembangan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

3.1.4 Kondisi dan Prospek Komponen PDRB

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan yang akan dihadapi ke depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari pertumbuhan 4,95 persen (*c-to-c*) pada tahun 2024 menjadi 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini tidak terlepas

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN Tahun 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan dalam melakukan perluasan pasar ekspor, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor.

Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya tingkat inflasi pada target 2,5 $\pm$ 1 persen. Pengendalian inflasi pada berbagai *peak season,* efektivitas sistem distribusi komoditas, dan kemudahan sistem pembayaran dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, stabilitas suku bunga, dan berlanjutnya berbagai program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dapat menjadi sebab yang penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2026, PMTB diproyeksikan tumbuh lebih ekspansif pada tingkat 6,30 - 7,58 persen, seiring dengan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan mulai beroperasinya kawasan industri baru yang tentunya dapat meningkatkan akumulasi modal pada tahun tersebut. Selain itu, fokus pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar di Jawa Barat bagian Selatan, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan PMTB ke tingkat yang lebih tinggi.

Kinerja Ekspor Luar Negeri Jawa Barat tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 7,21 - 8,18 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, serta Karet. Penguatan peran dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

fungsi Pelabuhan Patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor, serta diversifikasi produk unggulan ekspor Jawa Barat juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2026.

Dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan tumbuh 2,16 - 2,60 persen pada tahun 2026. Target pertumbuhan tahun 2026 dapat diwujudkan melalui peran Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi *blue economy*.

Target pertumbuhan yang lebih tinggi juga diberikan kepada sektor Industri pengolahan di tingkat 4,69 - 5,65 persen pada tahun 2026. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi di luar industri besar, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri, maupun kebutuhan produksi industri besar melalui *link and match*. Selain itu, hilirisasi sektor primer juga diharapkan mampu meningkatkan *output* pada sub sektor industri makan minum.

Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dan 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta pembangunan kawasan industri di Subang *Smartpolitan* dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2026, sektor Konstruksi ditargetkan tumbuh pada rentang 6,66 - 8,02 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029 didorong oleh peningkatan pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2026.

Tabel 3.4
Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB	*Realisasi* 2024[1)]	Realisasi 2024[2)]	Proyeksi 2025[3)]	Proyeksi 2026[4)]
Pengeluaran				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,20	5,01	3,94	5,03 - 6,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	7,89	3,34	0,94 - 1,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	1,39	2,46	6,56 - 7,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,70	6,96	4,10	6,30 - 7,58
Ekspor Barang dan Jasa	60,62	12,09	5,52	7,21 - 8,18
Impor Barang dan Jasa	57,14	15,07	5,07	0,32 - 1,32
Produksi				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,42	1,59	4,54	2,16 - 2,60
Pertambangan dan Penggalian	0,97	-0,28	-0,08	0,66 - 0,79
Industri Pengolahan	41,39	3,52	5,84	4,69 - 5,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	-0,60	3,86	4,63 - 5,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	5,48	4,90	2,75 - 3,32
Konstruksi	8,45	7,09	5,91	6,66 - 8,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,46	4,85	4,85	4,57 - 5,51
Transportasi dan Pergudangan	6,24	12,34	6,78	8,58 - 10,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	6,43	12,85	7,97 - 9,59
Informasi dan Komunikasi	3,83	8,20	8,64	6,27 - 7,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	4,20	4,01	5,45 - 6,56
Real Estate	1,16	6,64	5,34	6,90 - 8,31
Jasa Perusahaan	0,46	2,49	7,28	6,01 - 7,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,79	8,73	2,00	2,99 - 3,56
Jasa Pendidikan	3,27	5,95	6,18	5,65 - 6,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	5,98	7,60	6,44 - 7,75
Jasa Lainnya	2,37	7,93	6,71	6,76 - 8,14

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (% PDRB);
2) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (%, c-to-c);
3) RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat, dan;
4) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target pada RKP 2026[1)]	Target 2026[2)]
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,57	0,58
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 – 6,00	5,51 – 6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30 – 6,65	6,31 - 6,66
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70 – 6,20	5,15 - 6,20
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah/Kapita)	63,90 – 65,60	63,65 - 66,00
6	*Gini Ratio* (Poin)	0,381 – 0,410	0,381 - 0,420
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,97	6,97
8	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,8	12,62
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (Poin)	64,31	64,31

Sumber: [1)] Rancangan RKP 2026
[2)] Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

Dalam rangka peningkatan Indeks Modal Manusia, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa. Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,58 poin di tahun 2026.

Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat dijalankan melalui strategi kebijakan yang mencakup:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1. **Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

   Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan masyarakat miskin, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, mendapatkan perlindungan sosial, bantuan, dan jaminan sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, seperti untuk biaya mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.

2. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya dilakukan dengan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan izin usaha. Hal ini mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga masyarakat tidak tergantung pada lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi .

3. **Penurunan Jumlah Kantung-Kantung Kemiskinan**

   Program seperti "Kampung Anti Miskin" difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat. Mengurangi jumlah kemiskinan dengan meminimalkan ketimpangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. Meningkatkan akses masyarakat miskin di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

4. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

   Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menyusun, menjalankan serta mengelola program/kegiatan serta melakukan kolaborasi dengan semua unsur terkait. Pengelola program/kegiatan untuk penanggulangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

kemiskinan diperlukan Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi. Peningkatan KOMITMEN semua pihak dan unsur *stakeholder* menjadi model penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Dalam implementasinya, Jawa Barat menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program secara tepat. Data ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Sekolah Rakyat yang berkaitan dengan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Secara statistik, penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024, atau menurun sebesar 0,38 persen. Meskipun persentase kemiskinan di Jawa Barat (7,08 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,57 persen), jumlah absolutnya terhitung masih tinggi karena populasi Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya pada tahun 2025, dan selambatnya pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi langkah strategis yang diambil. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta sertifikasi keahlian. Untuk memperkuat akses ke pasar kerja, di fasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan *job fair* dan *platform* informasi lowongan kerja.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Di sektor perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses pekerjaan yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin akan memberikan andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah pada level 5,51 – 6,02 persen pada tahun 2026.

Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat bagian Selatan.

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor-sektor pembangunan. Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2026 ditargetkan pada angka 6,97 persen melalui 4 (empat) sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, lahan *mangrove*), sektor energi dan transportasi, serta sektor limbah dan persampahan terhadap PDRB.

3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi :

1. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
3. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

4. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
7. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen;
8. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;
9. Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*;
10. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global;
11. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
12. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
13. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat bagian Selatan);
14. Penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*;

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

15. Penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
16. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
17. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan UKM/UMKM;
18. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
19. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
20. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *off setting* dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*);
21. Pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing,* bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; dan
22. Penataan dan restrukturisasi BUMD.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diarahkan dan dikelola berasaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, diperlukan pendanaan selain melalui APBD Provinsi juga diperlukan pendanaan diantaranya melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); obligasi daerah; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); serta swadaya masyarakat melalui konsep pemanfaatan Dana Umat.

Gambar 3.2
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2023, 2024, serta target tahun 2025.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024, APBD Tahun 2025 dan Target Tahun 2026-2027

URAIAN	Realisasi APBD 2023 *(Audited* BPK) [1]	APBD 2024 *(Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN	**34.772.844.052.840**	**36.686.793.694.469**	**30.998.963.018.931**	**31.181.133.927.567**	**32.014.609.407.213**
Pendapatan Asli Daerah	**24.375.389.630.532**	**25.311.062.568.010**	**19.307.785.060.631**	**19.708.940.662.567**	**20.263.636.615.036**
Pajak Daerah	22.467.329.387.753	23.432.165.679.367	17.500.724.356.809	18.101.778.010.932	18.649.582.265.645
Retribusi Daerah	60.804.726.832	814.501.472.803	881.900.498.726	845.531.470.737	845.699.205.585
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	541.138.347.206	430.658.809.497	410.640.579.501	431.832.773.448	436.107.764.545
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.306.117.168.741	633.736.606.343	514.519.625.595	329.798.407.450	332.247.379.261
Pendapatan Transfer	**10.282.444.762.670**	**11.352.536.350.459**	**11.667.983.182.300**	**11.448.998.489.000**	**11.726.360.897.532**
Transfer Pemerintah Pusat	**10.255.156.462.670**	**11.352.536.350.459**	**11.667.983.182.300**	**11.448.998.489.000**	**11.726.360.897.532**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.987.047.229.841	2.551.545.408.500	2.503.586.756.300	2.284.602.063.000	2.378.783.562.806
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.298.949.402.645	3.664.312.930.238	4.042.633.210.000	4.042.633.210.000	4.101.697.418.122
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	4.957.076.641.184	5.099.829.232.721	5.121.763.216.000	5.121.763.216.000	5.245.879.916.604
Dana Insentif Daerah (DID)	-	36.848.779.000	-		-
Dana Penyesuaian	12.083.189.000		-		-
Transfer Antar Daerah	**27.288.300.000**	**-**	**-**		**-**
Pendapatan bagi hasil			-		-
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.288.300.000		-		-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	**115.009.659.638**	**23.194.776.000**	**23.194.776.000**	**23.194.776.000**	**24.611.894.645**
Hibah	21.978.000.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	24.611.894.645
Dana darurat	-	-	-		-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

URAIAN	Realisasi APBD 2023 *(Audited* BPK) [1]	APBD 2024 *(Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	93.031.659.638		-		-
			-	-	-
BELANJA	**35.513.040.224.353**	**35.548.799.933.035**	**31.075.544.907.123**	**30.714.327.892.423**	**30.847.803.372.067**
Belanja operasi	**19.092.270.596.143**	**19.984.707.792.554**	**20.160.050.586.717**	**20.106.531.272.338**	**20.113.747.642.038**
Belanja pegawai	7.128.719.982.768	8.121.654.828.721	9.114.143.199.597	9.903.591.321.887	9.574.674.486.802
Belanja barang dan jasa	6.929.929.568.526	6.674.957.432.817	7.568.806.949.567	7.648.693.017.297	7.140.509.378.543
Belanja bunga			-		
Belanja subsidi	10.888.578.950	13.357.475.900	161.341.421.779	146.341.421.779	175.673.917.511
Belanja hibah	4.779.009.848.767	5.110.982.109.616	3.281.692.265.774	2.373.905.511.375	3.102.897.919.322
Belanja bantuan sosial	243.722.617.132	63.755.945.500	34.066.750.000	34.000.000.000	119.991.939.860
Belanja modal	**2.523.831.913.631**	**2.116.137.579.713**	**1.769.776.812.928**	**2.580.361.355.731**	**3.572.340.648.093**
Belanja Modal	2.523.831.913.631	2.116.137.579.713	1.769.776.812.928	2.580.361.355.731	3.572.340.648.093
Belanja tidak terduga	**23.602.781.810**	**784.110.806**	**1.154.221.541.130**	**510.000.000.000**	**150.000.000.000**
Belanja tidak terduga	23.602.781.810	784.110.806	1.154.221.541.130	510.000.000.000	150.000.000.000
Belanja transfer	**13.873.334.932.769**	**13.447.170.449.962**	**7.991.495.966.348**	**7.517.435.264.354**	**7.011.715.081.936**
Belanja bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	9.796.443.745.014	9.992.153.126.253	5.451.031.805.167	5.496.468.773.059	5.597.554.672.875
Belanja bantuan Keuangan	4.076.891.187.755	3.455.017.323.709	2.540.464.161.181	2.020.966.491.295	1.414.160.409.061
Belanja bantuan Keuangan ke Pemerintahan desa			-		-
Surplus/Defisit (Pendapatan - Belanja)	**- 740.196.171.513**	**1.137.993.761.434**	**-76.581.888.192**	**466.806.035.144**	**1.166.806.035.146**
PEMBIAYAAN	**1.540.602.953.484**	**618.253.076.073**	**76.581.888.192**	**(466.806.035.144)**	**(1.166.806.035.144)**
Penerimaan Pembiayaan	**2.899.940.245.619**	**1.237.059.111.217**	**693.387.923.336**	**250.000.000.000**	**-**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	2.335.392.104.049	800.167.988.688	693.387.923.336	250.000.000.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

URAIAN	Realisasi APBD 2023 (*Audited* BPK) [1]	APBD 2024 (*Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pencairan Dana Cadangan	563.789.491.913	436.210.508.087	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali Dana Bergulir	758.649.657	680.614.442	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-
Pengeluaran pembiayaan	**1.359.337.292.135**	**618.806.035.144**	**616.806.035.144**	**716.806.035.144**	**1.166.806.035.144**
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	328.337.292.135	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144
Penyertaan modal daerah	231.000.000.000	52.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	300.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	800.000.000.000	-	-	-	300.000.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			-	-	-
			-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**1.540.602.953.484**	**618.253.076.073**	**76.581.888.192**	**- 466.806.035.144**	**- 1.166.806.035.144**
Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (Surplus/Defisit APBD)	**800.406.781.971,00**	**1.756.246.837.507**	**0**	**0**	**0**
Volume APBD	**36.872.377.516.488**	**36.167.605.968.179**	**31.692.350.942.267**	**31.431.133.927.567**	**32.014.609.407.211**

Sumber: Bappeda, 2025
1. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (*Audited* BPK)
2. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (*Audited* BPK)
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
4. Hasil Analisis Bappeda, 2025
5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diproyeksikan mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi, potensi sumber-sumber pendapatan daerah, pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Namun seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya situasi kondisi ekonomi yang kurang menentu, pendapatan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang tipis sebesar Rp182 miliar dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2025.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,59 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2025, kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Kenaikan pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp401 miliar atau meningkat 2,08 persen. Sementara itu, Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp218,98 miliar rupiah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sama dengan target pendapatan tahun 2025. Ikhtisar proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2023 - 2027

No	Uraian	Realisasi APBD 2023 *(Audited* BPK) [1]	APBD 2024 *(Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**24.375.389.630.532**	**25.311.062.568.010**	**19.307.785.060.631**	**19.708.940.662.567**	**20.263.636.615.036**
4.1.01	Pajak Daerah	22.467.329.387.753	23.432.165.679.367	17.500.724.356.809	18.101.778.010.932	18.649.582.265.645
4.1.02	Retribusi Daerah	60.804.726.832	814.501.472.803	881.900.498.726	845.531.470.737	845.699.205.585
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	541.138.347.206	430.658.809.497	410.640.579.501	431.832.773.448	436.107.764.545
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.306.117.168.741	633.736.606.343	514.519.625.595	329.798.407.450	332.247.379.261
4.2	**Pendapatan Transfer**	**10.282.444.762.670**	**11.352.536.350.459**	**11.667.983.182.300**	**11.448.998.489.000**	**11.726.360.897.532**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**10.255.156.462.670**	**11.352.536.350.459**	**11.667.983.182.300**	**11.448.998.489.000**	**11.726.360.897.532**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.987.047.229.841	2.551.545.408.500	2.503.586.756.300	2.284.602.063.000	2.378.783.562.806
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.298.949.402.645	3.664.312.930.238	4.042.633.210.000	4.042.633.210.000	4.101.697.418.122
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	4.957.076.641.184	5.099.829.232.721	5.121.763.216.000	5.121.763.216.000	5.245.879.916.604
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	36.848.779.000	-		
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	12.083.189.000		-	-	-
4.2.03	**Transfer Antar Daerah**	**27.288.300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil			-	-	-
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	27.288.300.000		-	-	
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**115.009.659.638**	**23.194.776.000**	**23.194.776.000**	**23.194.776.000**	**24.611.894.645**
4.3.01	Hibah	21.978.000.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	24.611.894.645
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Uraian	Realisasi APBD 2023 *(Audited* BPK) [1]	APBD 2024 *(Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	93.031.659.638		-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	**34.772.844.052.840**	**36.686.793.694.469**	**30.998.963.018.931**	**31.181.133.927.567**	**32.014.609.407.213**

Sumber: Bappeda, 2025
1. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (*Audited* BPK)
2. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (*Audited* BPK)
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
4. Hasil Analisis Bappeda, 2025
5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pada tahun 2026 diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan membeli kendaraan baru, serta diperlukan analisis dan strategi dalam penggalian pendapatan daerah, mengingat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Dinas/Balai Penghasil;
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan;
5. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
8. Menambah sumber sumber pendapatan yang potensial lainnya seperti pembangunan papan reklame di ruas jalan provinsi dan aset-aset provinsi lainnya;
9. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
10. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima; dan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

11. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pemberian NPWP pada perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Selain kebijakan pendapatan daerah di atas, terdapat pula kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari sinergi pembiayaan dari opsen PKB dan opsen BBNKB yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan penerimaan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diarahkan untuk :

1. Peningkatan dan perluasan layanan samsat digital, melalui pengadaan dan penyebarluasan samsat digital mandiri di tempat-tempat strategis;
2. Peningkatan layanan *Tax Centre* melalui *WA Blast* kepada wajib pajak baik untuk info pajak, *updating* kepemilikan kendaraan bermotor sampai pada upaya penagihan pajak kendaraan bermotor; dan
3. Sosialisasi dan edukasi perpajakan baik melalui media massa, media elektronik maupun *on the spot* ke berbagai lapisan masyarakat.

Pendataan dan pemetaan kendaraan bermotor, melalui sensus, *survei*, penelusuran sampai pada operasi gabungan dan operasi khusus untuk menjaring wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1D17AF9E85

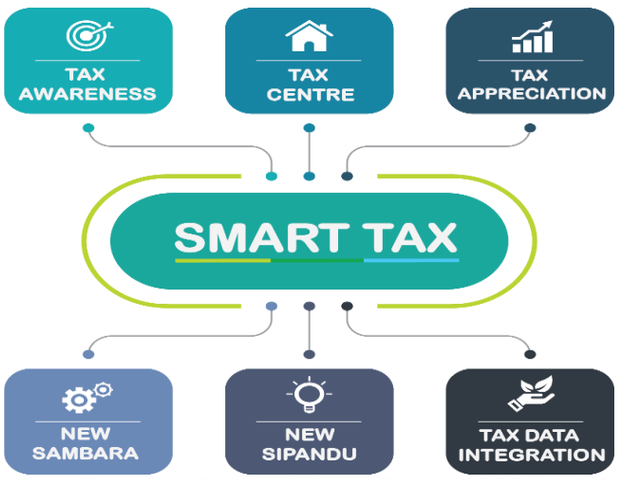
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

Digitalisasi layanan pemerintah melalui *platform* digital dan elektronik sudah menjadi keharusan, khususnya dalam proses transaksi keuangan agar lebih efisien dan transparan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upayanya meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kepada digitalisasi layanan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan secara digital, pengembangan infrastruktur digital serta kecakapan dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi.

Digitalisasi tersebut kemudian diimplementasikan dengan strategi dan arah kebijakan yang disebut dengan *SMART TAX,* seperti tercantum dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan SMART TAX



Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2023, diolah.

SMART TAX dimaksud kemudian diimplementasikan ke dalam strategi dan kebijakan pendapatan berbasis digitalisasi sebagai berikut:

A. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui:

1) *TAX AWARENESS*, Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pada semua struktur dan lapisan masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan, fokus kepada:

a. Penguatan dan penyusunan regulasi pajak dan retribusi, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, khususnya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Sosialisasi kebijakan pendapatan di tingkat pusat maupun daerah, dengan optimalisasi berbagai media sosialisasi yang paling efektif di lapangan, diantaranya sosial media, videotron, *push* notifikasi serta sosialisasi langsung berbasis kolaborasi aktivitas dengan seluruh lapisan masyarakat.

2) *NEW* SAMBARA, Upaya pelayanan samsat *online* berbasis web dan *android/ios* untuk wilayah perkotaan dan pelayanan samsat *mobile* dan *channeling* untuk wilayah pedesaan. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :

a. Implementasi *New* Sambara dengan elektronik Pengesahan;
b. Digitalisasi Layanan kesamsatan, khususnya dalam perluasan *channeling* transaksi pembayaran.

3) *NEW* SIPANDU, Upaya pengelolaan data dan *analysis-insight* pajak daerah dengan pendapatan berbasis *platform* dan *artificial intelligence.* Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:

a. Implementasi *Virtual Account* dalam Sistem Layanan Pembayaran Setoran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. *New SSOS* (Sistem Layanan Samsat) terintegrasi penuh dengan Elektronik *Regident* dan *Identification* (ERI), aplikasi registrasi dari Kepolisian RI;

B. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui:

1) *TAX CENTER*, Upaya mendekatkan komunikasi antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:

a. Operasionalisasi Sim-C (Samsat *Information Centre*) dengan aktivasi layanan 24 jam pada nomor 150410, dan layanan berbasis *chatbot* pada nomor 081122301818;
b. Pengembangan kompetensi SDM Layanan dan Jafung Perpajakan seiring dengan upaya Reformasi Birokrasi di daerah.

2) *TAX APPRECIATION*, Upaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga menjadi *role model* bagi masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :

a. Relaksasi pajak yang dilaksanakan secara selektif untuk mendorong kebijakan peningkatan pendapatan di tingkat pusat dan daerah;
b. Pelaksanaan *event exhibition* bekerjasama dengan seluruh *stakeholders* pendapatan daerah;
c. Pemberian Anugerah Philotra dari Gubernur Jawa Barat kepada para wajib pajak teladan di Jawa Barat.

3) *TAX DATA INTEGRATION*, Upaya kolaborasi Provinsi Jawa Barat dengan pusat, kabupaten/kota dan *stakeholder* pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan *join analysis* dan supervisi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada: Integrasi data, diantaranya: data Kendaraan Bermotor dengan Korlantas Mabes Polri, data kependudukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, data wajib pajak dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, data pemilik seluler wajib pajak dengan operator, dan sebagainya;

Selain itu, secara umum, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap melakukan upaya-upaya lain yang efektif untuk peningkatan pendapatan, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

1) Optimalisasi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2) Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara profesional.
3) Optimalisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
4) Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:

a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:

a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Saat ini Provinsi Jawa Barat harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Jawa Barat antara pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gaji dan Honorarium Pegawai ASN BLUD, Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Pemenuhan belanja *fixed cost* seperti: Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Gas, Telepon/Internet); Pemeliharaan Peralatan, Mesin, Kendaraan dan Bangunan; Tenaga *Outsourcing*; Tenaga Teknis yang akan beralih menjadi PPPK paruh waktu; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
3. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
    a. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

5. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

8. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

merupakan belanja infrastruktur daerah diantaranya yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

9. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
11. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Keuangan dan Hibah yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah.
12. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
13. Revitalisasi Kantor Dinas, Kantor Cabang Dinas/Balai/UPTD dan Satuan Pelayanan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi dan revitalisasi.
14. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
15. Pendukungan *event* olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
16. Pendukungan untuk meningkatkan akses permodalan melalui subsidi bunga, penempatan dana, dan subsidi imbal jasa penjaminan.
17. Pendukungan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti Pendidikan dan Pelatihan maupun Beasiswa.
18. Penyediaan kebutuhan Pelayanan Dasar seperti per-makanan, obat-obatan, jasa lainnya di panti sosial serta penyediaan per-makanan, pakan, obat-obatan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah selama 2 (dua) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, maka proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp361 miliar atau menurun 1,81 persen. Belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp53,5 miliar atau menurun 0,27 persen, yang diakibatkan adanya penurunan pada belanja hibah sebesar Rp907,78 miliar atau menurun 27,66 persen meskipun belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp789,4 miliar atau meningkat 8,66 persen. Selain itu belanja modal diproyeksikan meningkat sebesar Rp810 miliar dan belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp644 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2025 atau menurun 55,81 persen.

Belanja Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 5,93 persen atau Rp474 miliar dikarenakan Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya menurun sebesar Rp519 miliar rupiah. Hal ini sebagai implikasi dari kebijakan Kepala Daerah untuk berfokus terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 s.d. Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi APBD 2023 (*Audited* BPK) [1]	Realisasi APBD 2024 (*Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05.01	**Belanja Operasi**	**19.092.270.596.143**	**19.984.707.792.554**	**20.160.050.586.717**	**20.106.531.272.338**	**20.113.747.642.038**
05.01.01	Belanja pegawai	7.128.719.982.768	8.121.654.828.721	9.114.143.199.597	9.903.591.321.887	9.574.674.486.802
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	6.929.929.568.526	6.674.957.432.817	7.568.806.949.567	7.648.693.017.297	7.140.509.378.543
05.01.03	Belanja Bunga			-		
05.01.04	Belanja Subsidi	10.888.578.950	13.357.475.900	161.341.421.779	146.341.421.779	175.673.917.511
05.01.05	Belanja Hibah	4.779.009.848.767	5.110.982.109.616	3.281.692.265.774	2.373.905.511.375	3.102.897.919.322
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	243.722.617.132	63.755.945.500	34.066.750.000	34.000.000.000	119.991.939.860
05.02	**Belanja Modal**	**2.523.831.913.631**	**2.116.137.579.713**	**1.769.776.812.928**	**2.580.361.355.731**	**3.572.340.648.093**
05.02.01	Belanja Modal	2.523.831.913.631	2.116.137.579.713	1.769.776.812.928	2.580.361.355.731	3.572.340.648.093
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	**23.602.781.810**	**784.110.806**	**1.154.221.541.130**	**510.000.000.000**	**150.000.000.000**
05.03.01	Belanja tidak terduga	23.602.781.810	784.110.806	1.154.221.541.130	510.000.000.000	150.000.000.000
05.04	**Belanja Transfer**	**13.873.334.932.769**	**13.447.170.449.962**	**7.991.495.966.348**	**7.517.435.264.354**	**7.011.715.081.936**
05.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	9.796.443.745.014	9.992.153.126.253	5.451.031.805.167	5.496.468.773.059	5.597.554.672.875
05.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	4.076.891.187.755	3.455.017.323.709	2.540.464.161.181	2.020.966.491.295	1.414.160.409.061
	TOTAL BELANJA DAERAH	**35.513.040.224.353**	**35.548.799.933.035**	**31.075.544.907.123**	**30.714.327.892.423**	**30.847.803.372.067**

Sumber: Bappeda, 2025
1. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (*Audited* BPK)
2. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (*Audited* BPK)
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
4. Hasil Analisis Bappeda, 2025
5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan perencanaan tahunan yang di dalamnya sudah ada menu atau fitur SSH, SBU, HSPK dan ASB, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan serta penatausahaan keuangan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berdasarkan hasil analisis perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 serta dengan melihat target pada tahun 2025, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sementara sebesar 0 (nol) rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dan penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp716 miliar diperuntukkan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang dan Penyertaan Modal Daerah untuk Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 3.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d 2027

No	Uraian	Realisasi APBD 2023 (*Audited* BPK) [1]	Realisasi APBD 2024 (*Audited* BPK) [2]	APBD 2025 [3]	Proyeksi/Target RKPD 2026 [4]	Proyeksi/Target RKPD 2027 [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.335.392.104.049	800.167.988.688	693.387.923.336	250.000.000.000	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	563.789.491.913	436.210.508.087	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah				-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-			-	-
6.1	Penerimaan Piutang Daerah				-	-
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	758.649.657	680.614.442	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**2.899.940.245.619**	**1.237.059.111.217**	**693.387.923.336**	**250.000.000.000**	**-**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**			-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	800.000.000.000	-	-	-	300.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	231.000.000.000	52.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	300.000.000.000
6.2.03	Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	328.337.292.135	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.359.337.292.135**	**618.806.035.144**	**616.806.035.144**	**716.806.035.144**	**1.166.806.035.144**
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.540.602.953.484**	**618.253.076.073**	**76.581.888.192**	**- 466.806.035.144**	**- 1.166.806.035.144**

Sumber: Bappeda, 2025
1. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (*Audited* BPK)
2. LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (*Audited* BPK)
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
4. Hasil Analisis Bappeda, 2025
5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Jawa Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Kabupaten/Kota; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 6) Hibah; serta 7) Obligasi Daerah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Tabel 3.10
Alokasi APBN Jawa Barat Tahun 2022-2025

NO	JENIS APBN	2022	2023	2024	2025
DANA TRANSFER		**10.017.953.210.000**	**10.530.740.384.000**	**11.108.773.753.000**	**11.902.944.270.000**
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.040.988.804.000	2.198.044.917.000	2.280.603.655.000	2.738.547.844.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.015.641.290.000	3.298.968.208.000	3.675.121.100.000	4.042.633.210.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	640.686.447.000	577.847.874.000	500.743.038.000	276.679.056.000
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.301.238.835.000	4.455.871.633.000	4.629.260.874.000	4.845.084.160.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	JENIS APBN	2022	2023	2024	2025
5	Dana Insentif Daerah (DID)	19.397.834.000	-	-	-
6	Hibah Ke Daerah	-	7.752.000	-	-
7	Insentif Fiskal	-	-	23.045.086.000	-
DIPA K/L		**186.778.342.000**	**423.926.630.000**	**366.699.404.000**	
1	Dana Dekonsentrasi	51.487.382.000	83.285.047.000	76.036.337.000	
2	Dana Tugas Pembantuan	135.290.960.000	340.641.583.000	290.663.067.000	
TOTAL		**10.204.731.552.000**	**10.954.667.014.000**	**11.475.473.157.000**	

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.3.2 APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Tabel 3.11
Data APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023-2025

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kab. Bandung	5.458.320.940.791	5.928.432.484.321	6.425.156.775.479
2	Kab. Bekasi	6.951.799.778.476	7.675.927.850.247	8.471.083.818.174
3	Kab. Bogor	9.342.814.361.779	10.528.238.583.075	11.533.508.780.022
4	Kab. Ciamis	2.707.990.886.321	2.759.318.611.817	2.613.997.954.569
5	Kab. Cianjur	4.539.108.758.301	4.842.778.907.876	4.872.063.870.852
6	Kab. Cirebon	3.625.352.695.399	4.048.922.982.008	4.734.637.373.172
7	Kab. Garut	4.563.018.882.452	4.786.238.404.520	5.039.571.562.691
8	Kab. Indramayu	3.671.777.590.740	3.800.166.091.285	3.755.576.337.826
9	Kab. Karawang	5.321.238.123.579	5.867.375.518.816	6.093.618.879.041
10	Kab. Kuningan	2.852.772.144.220	2.983.043.827.322	2.844.197.735.477
11	Kab. Majalengka	3.405.223.563.895	3.064.947.022.404	3.105.392.287.973
12	Kab. Purwakarta	2.567.797.647.962	2.658.589.477.779	2.636.160.765.943
13	Kab. Subang	2.978.606.174.304	2.801.432.170.406	3.006.530.828.804
14	Kab. Sukabumi	4.244.515.906.805	4.555.467.173.646	4.637.883.793.087
15	Kab. Sumedang	2.816.822.749.856	3.043.553.209.614	2.934.191.214.462

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
16	Kab. Tasikmalaya	3.309.737.840.702	3.643.782.790.862	3.541.157.118.118
17	Kota Bandung	7.202.856.990.555	7.704.032.556.575	7.809.391.947.890
18	Kota Bekasi	5.986.265.026.438	6.423.653.318.098	7.057.120.328.180
19	Kota Bogor	3.171.614.163.806	3.127.361.919.483	2.970.946.868.660
20	Kota Cirebon	1.433.078.787.228	1.622.332.986.603	1.761.061.685.882
21	Kota Depok	3.926.126.110.981	4.272.937.976.222	4.627.067.866.021
22	Kota Sukabumi	1.160.364.434.915	1.274.828.818.997	1.295.849.541.127
23	Kota Tasikmalaya	1.666.796.638.856	1.693.628.860.908	1.754.623.837.429
24	Kota Cimahi	1.525.559.089.415	1.616.833.373.981	1.679.193.341.027
25	Kota Banjar	755.196.117.320	783.180.062.392	789.461.242.287
26	Kab. Bandung Barat	3.511.727.713.840	3.554.230.748.520	3.465.066.875.614
27	Kab. Pangandaran	988.514.549.013	1.600.017.848.987	1.567.346.019.629
	Total APBD	99.684.997.667.949	106.661.253.576.764	142.714.209.591.703

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hampir semua APBD kabupaten/kota pada tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023, hanya beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan diantaranya adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kota Bogor.

3.3.3 Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.4 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

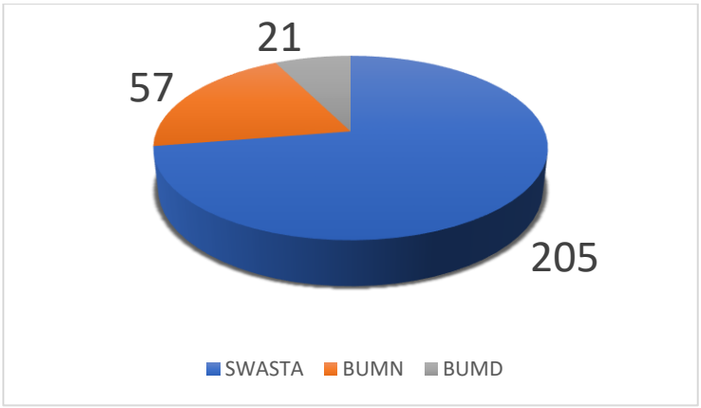
Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Provinsi Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Sampai dengan tahun 2024, telah terdaftar sebanyak 283 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 205 perusahaan swasta, 57 BUMN dan 21 BUMD.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerja sama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

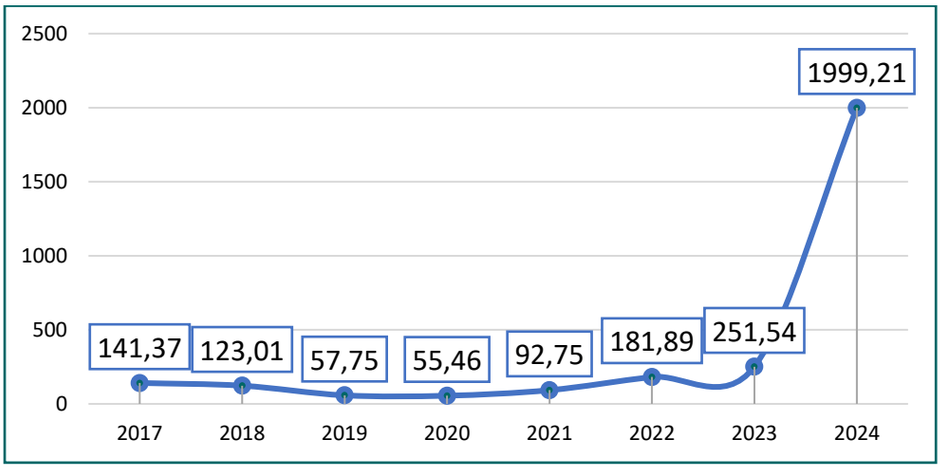
Gambar 3.4
Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat, 2024

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari TJSL/PKBL dari Tahun 2017 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.5
Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat



Sumber: Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat, 2025, diolah kembali

Dari gambar di atas didapatkan informasi bahwa sumber pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat bersifat sangat fluktuatif dari Tahun 2017 hingga 2024. Jumlah dana tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp1,9 Triliun, disusul dengan tahun berikutnya pada tahun 2023 sebesar Rp251,54 miliar. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2023 menuju tahun 2024. Sebaliknya, penurunan terbesar terdapat pada tahun 2018 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar Rp55,36 miliar. Adapun realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024 berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 3.12
Realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024

No.	Kategori	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)
1	Infrastruktur dan sanitasi Lingkungan	42.446.527.906	2,12
2	Kesehatan	17.685.034.544	0,88
3	Lingkungan	472.082.968.123	23,61
4	Pendidikan	1.323.189.515.099	66,19
5	Peningkatan Daya beli	18.086.916.179	0,90
6	Sarana Keagamaan	5.753.677.353	0,29
7	Sosial	112.088.377.440	5,61
8	Lainnya	7.878.982.632	0,39
	Jumlah	**1.999.211.999.276**	**100**

Sumber: *website* CSR Jawa Barat, 2025, diolah kembali

Apabila melihat tabel di atas, didapatkan informasi bahwa kegiatan PKBL dan TJSL pada tahun 2024, kategori lingkungan mempunyai proporsi yang paling besar yaitu sebesar 69,92 persen atau sebesar Rp451.273.228.387, hal ini dapat diindikasikan bahwa terhadap isu lingkungan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan, mendapatkan dukungan pendanaan yang paling besar dari perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Jawa Barat tahun 2025 ditempuh melalui:

1. Perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Jawa Barat.
2. Penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2025.

3.3.5 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiayaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Terlebih lagi kebutuhan pembiayaan infrastruktur strategis di Jawa Barat diprediksi mencapai Rp1.219.586.509.745.670,- untuk sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Jalan, Bangunan Gedung, Sumber Daya Air, Transportasi, Energi, dan Lingkungan. Sehingga dalam kondisi tersebut, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk bisa membangun Jawa Barat. Melalui skema pembiayaan KPBU ini, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan khususnya di Jawa Barat.

Terkait KPBU ini, berdasarkan beberapa regulasi yang sudah ditetapkan di antaranya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Sampai dengan tahun 2024, dari seluruh proyek strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU, sebanyak 2 (dua) proyek telah mencapai tahap transaksi (*already tendered*) yaitu TPPAS regional Nambo dan TPPAS Regional Legok Nangka, dan sisanya masih dalam tahap penyiapan dan perencanaan. Status KPBU TPPAS Nambo Saat ini masih dalam tahap transaksi khususnya untuk fase *ultimate* dengan kapasitas 1.800 s.d. 2.300 ton per hari sesuai dengan rencana KPBU yang telah disepakati. Namun dalam kesepakatan / perjanjian KPBU TPPAS Regional

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Nambo ini disyaratkan adanya pemberian pelayanan sebelum tanggal operasional berupa pengolahan sampah minimal sebesar 50 ton/hari dengan teknologi MBT yang menghasilkan RDF, sehingga dengan ketentuan tersebut sudah terbangun Fase I sebagai percontohan atau uji coba dengan Kapasitas 50 ton/hari yang sudah mulai operasional sejak 20 Agustus 2024 dengan pasokan sampah dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Sampai dengan akhir tahun 2024 telah terolah sampah sebanyak 4.565,52 Ton yang kemudian diolah menjadi RDF dan telah dikirimkan ke *offtaker* dalam hal ini PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebanyak 1.856,46 ton. Sedangkan untuk Fase II atau Fase *Ultimate* dengan kapasitas 1.800 – 2.300 ton/hari saat ini masih dalam tahap transaksi untuk pemenuhan keuangan (*Financial Closed*). Namun memang masih terdapat kendala hingga saat ini belum ada mitra strategis/ investor sebagai partner PT. Jasa Sarana untuk melakukan pembangunan TPPAS Regional Nambo, dikarenakan terjadi wanprestasi dari kandidat investor sebelumnya. Saat ini PT. Jasa Sarana sedang melakukan pencarian mitra strategis melalui Penugasan dari Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana Dalam Pengusahaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Kabupaten Bogor. Diharapkan bahwa di tahun ini diperoleh mitra strategis pendamping PT. Jasa Sarana sehingga sebagaimana tercantum dalam PKS KPBU TPPAS Regional Nambo target *financial closed* dapat dipenuhi di pertengahan tahun 2025, dan dapat dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi selama 18 bulan sehingga *Commercial Operation Date* (COD) ditargetkan dapat terwujud di awal tahun 2027.

Sama halnya dengan Nambo, proyek TPPAS Regional Legok Nangka juga saat ini telah memasuki fase Transaksi (*already tendered*), dan telah diperoleh pemenang yaitu Konsorsium Sumitomo – EPN – Hitachi Zosen melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5297/PBLS.04/DLH tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan telah dibentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT. Jabar Environmental Solutions (PT. JES) sejak 17 Januari 2024. Perjanjian Kerja Sama KPBU telah ditandatangani pada 28 Juni 2024 antara PJPK dan BUP, termasuk perjanjian penjaminan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

infrastruktur dengan PT. PII yang dilaksanakan bersamaan bertempat di Gedung Sate, Kota Bandung. Saat ini pihak PJPK, BUP, dibantu oleh Tim *Transaction Advisory* TPPAS Regional legok Nangka tengah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan target pemenuhan dokumen transaksi (*Transaction Document Fulfillment Date* – TDFD) dan target tanggal efektif (*Effective Date* – ED) sesuai kesepakatan dalam PKS KPBU. Adapun ditargetkan tercapai *Commercial Operation Date* (COD) pada awal tahun 2029 untuk pelayanan persampahan di TPPAS Regional Legok Nangka.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) proyek yang saat ini masih dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, SPAM Sinumbra (*unsolicited*), dan Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung. Selain itu juga terdapat beberapa proyek yang masih berada dalam tahap perencanaan, yaitu Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya; dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung sekolah kewenangan provinsi dan pemerintahan di Jawa Barat. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan dan dioptimalkan.

3.3.6 Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (*departemen dan non-departemen*), lembaga pemerintahan *non-departemen* (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan yang dapat diusulkan Pemerintah Daerah adalah:

a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; Untuk usulan kegiatan ini harus melampirkan Surat Persetujuan DPRD calon penerima penerusan pinjaman, dan memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

   1) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda, yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
   2) Kegiatan tersebut merupakan urusan Pemda;
   3) Kegiatan yang diusulkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan program RPJM;
   4) Hasil dari kegiatan PHLN yang diusulkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
   5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

b. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerusan hibah. Untuk usulan kegiatan ini harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

   1) Kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
   2) Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberian layanan dasar umum;
   3) Kegiatan tersebut untuk pemberdayaan aparatur Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Daerah.

4) Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

Selain sumber dana tersebut di atas, alternatif sumber pembiayaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya adalah melalui penerbitan Sukuk Daerah, penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat. Seta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

3.3.7 Pendanaan Obligasi Daerah dan Sukuk

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bond*). Selain obligasi daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah obligasi syariah atau sukuk.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat serta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2025-2030. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 memperhatikan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diimplementasikan dengan: (1) menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2025, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan *stunting*, serta penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan diluar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 mengacu dan memperhatikan: (1) RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; (2) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; (4) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan I; (6) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (7) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026; dan (8) Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya penerapan strategi dan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penetapan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga keterkaitan terhadap sasaran pembangunan nasional.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", pembangunan perlu dilaksanakan dengan bekerja sama antara seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berdasar pada fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan cita-cita Indonesia Emas dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional atau *goals* (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 4.2
8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional

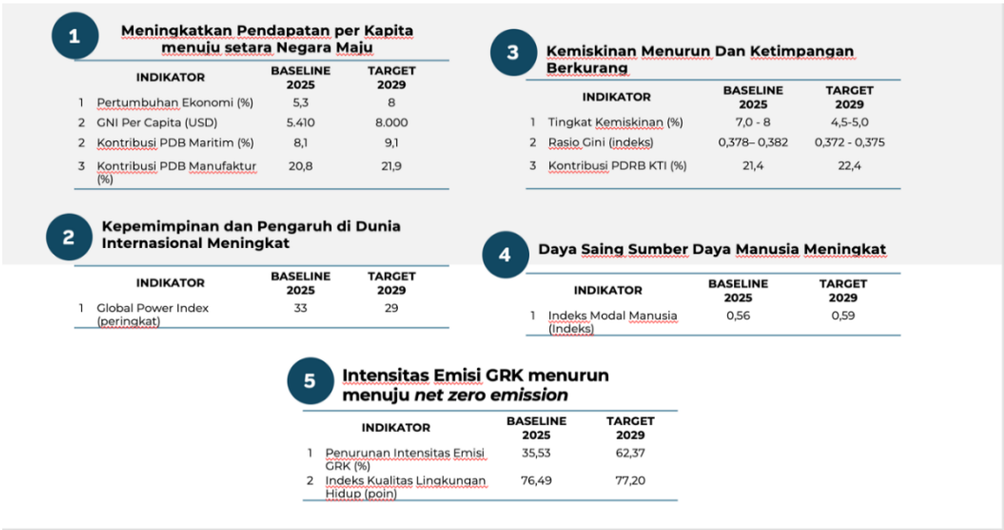


Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran utama pembangunan nasional pada jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan nasional tersebut tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*. Kelima sasaran utama pembangunan nasional memiliki target sebagai berikut.

Gambar 4.3
Target sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2029



1 Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	8
2	GNI Per Capita (USD)	5.410	8.000
2	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
3	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9

2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Global Power Index (peringkat)	33	29

3 Kemiskinan Menurun Dan Ketimpangan Berkurang

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8	4,5-5,0
2	Rasio Gini (indeks)	0,378– 0,382	0,372 - 0,375
3	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	22,4

4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,59

5 Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,53	62,37
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	76,49	77,20

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, diolah, 2025

Rencana pembangunan nasional Tahun 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8 (delapan) persen memiliki beberapa upaya atau prasyarat sebagai berikut.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 4.4
Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, diolah, 2025

Adapun strategi penurunan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas memiliki beberapa upaya atau prasyarat sebagai berikut.

Gambar 4.5
Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, diolah, 2025

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa pada Tahun 2025-2029 difokuskan pada tema pembangunan "Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan". Tema tersebut masih memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

2. Pengembangan industrialisasi perikanan *modern*, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak);
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green*, *gray*, dan *social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multi ancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi **"Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional"**. Indikasi intervensi/ProP per Prioritas Nasional (PN) di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.1
Indikasi Intervensi/ProP per Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Barat

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk prior berkumpul,berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Lanjutan Pembangunan pembangkit listrik tenaga air *Pumped Storage Upper* Cisokan • Fasilitasi *business matchmaking startup* digital • Fasilitasi digital *technopreneur* • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle*,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
	atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan • Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun pada sistem penyediaan air minum perkotaan Majalengka • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada sistem penyediaan air minum Kota Cimahi • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Palabuhanratu • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada Bendung Cariang di Kabupaten Sumedang • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan • Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis • Pengembangan sentra cabai pada Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Bandung • Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Sukabumi • Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Pengembangan Kertajati *Aerocity* • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki • Penguatan ekosistem film, animasi, *visual arts*, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya • Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey • Modernisasi Daerah Irigasi Rentang • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan Embung Ranca Hilir di Kabupaten Subang • Layanan perencanaan dan pengawasan teknik berupa pembangunan *Fly Over* di Lemah Abang Kabupaten Bekasi • Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan • Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian pada Kereta Api Cipatat-Tagog Apu-Padalarang di Kabupaten Bandung Barat • Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
	nasional di Kota Bogor • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun berupa penanganan tanggul kritis Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pengajaran dan Pembelajaran • Penguatan Sistem Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan • Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas • Peningkatan Produktivitas, daya saing, dan Kemampuan Kerja • Pengelolaan dan Pengembangan BLUD SMK • Pemenuhan Pendidikan Inklusivitas dan Pendidikan Luar Biasa • Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesatren dan Penidikan Keagamaang yang Lebih berkualitas • Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (*science*), teknologi (*technology*), teknik (*engineering*), seni (*art*), dan matematika (*mathematics*) unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "*Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project*" (PRIME STeP) • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (*science*), teknologi (*technology*), teknik (*engineering*), seni (*art*), dan matematika (*mathematics*) unggulan di tingkat regional pada Universitas Singaperbangsa Karawang • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital • Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kabupaten Majalengka • Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi berupa pengembangan Kampus ITB Cirebon
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Hilirisasi industri tembaga dan bauksit • Hilirisasi industri kelapa dan karet • Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi • Pengembangan industri alat angkut termasuk *electric vehicle* dan kedirgantaraan • Pengembangan industri elektronik dan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
	• Pembangunan Pelabuhan Patimban • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (*Bus Rapid Transit* Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung) • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan jalan bebas hambatan berupa pembebasan lahan untuk pembangunan *Fly Over* Kiaracondong-Buahbatu di Kota Bandung • Pembangunan *Area Traffic Control System/ Intelligent Transportation System* berupa penyediaan angkutan umum massal perkotaan Bus Rapid Transit di Bandung Raya • Pembangunan baru kawasan permukiman berupa rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Reviu dan penyusunan pengaturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis *online single submission* dan mal pelayanan publik digital
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota metropolitan Bandung • Pengamanan Pantai Eretan dan Kabupaten Cirebon • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

1. **Kesetaraan Gender**

   Pembangunan nasional memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

   Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. **Pembangunan Berkelanjutan**

   Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. **Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim**

   Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. **Modal Sosial dan Budaya**

   Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. **Transformasi Digital**

   Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan adalah fondasi penting dalam arah pembangunan suatu negara. Konsep ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan berjalan seiring dan saling mendukung.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sasaran global pada *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* yang terdiri dari 4 (empat) Pilar pada RAD-SDGs Jawa Barat, yaitu Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jumlah target dan indikator SDGs Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.6
***Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Analisa Bappeda, 2023

Muatan SDGs diinternalisasi ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS memuat rekomendasi isu dan prioritas SDGs untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah yang ada di dalam dokumen perencanaan daerah.

KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, salah satunya memuat pengkajian pembangunan berkelanjutan yang bersifat prioritas sebagai

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

dasar penentuan permasalahan, isu strategis dan sasaran strategis pembangunan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat 9 (sembilan) isu prioritas SDG's Jawa Barat yang ditetapkan melalui proses *cross cutting issues* antara 9 (sembilan) muatan isu KLHS terhadap capaian target SDGs Jawa Barat. Kesembilan isu prioritas SDGs tersebut, yaitu:

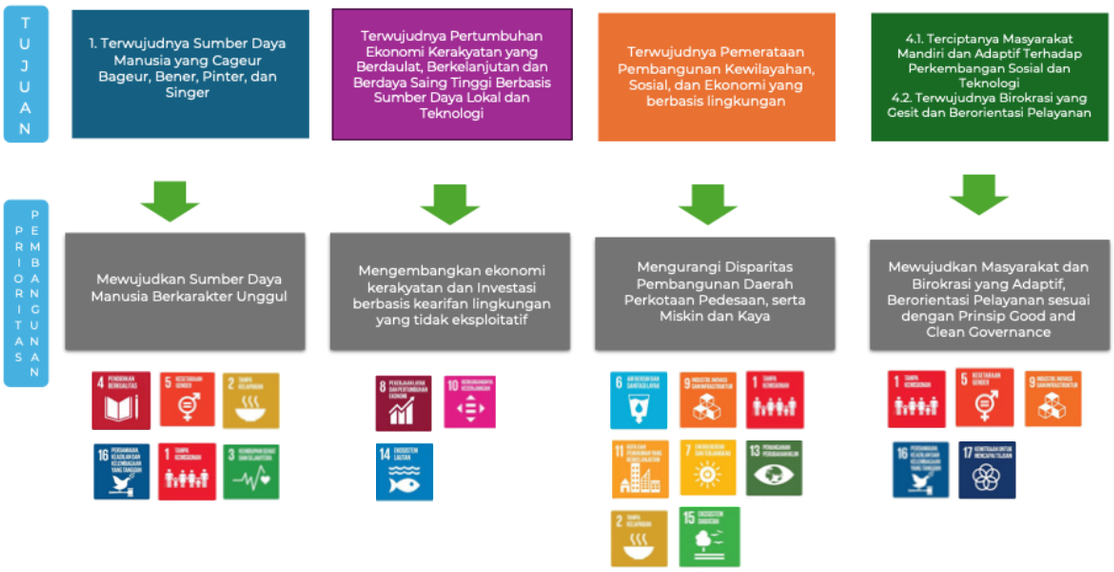
1) Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital (berkaitan dengan TPB 4 dan TPB 5);
2) Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, dan TPB 16);
3) Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan (berkaitan dengan TPB 11, TPB 9, TPB 6, dan TPB 7);
4) Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas (berkaitan dengan TPB 3, TPB 2, TPB 1, dan TPB 5);
5) Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah (berkaitan dengan TPB 8, TPB 14, dan TPB 10);
6) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim , serta upaya penurunan gas rumah kaca (berkaitan dengan TPB 1, TPB 9, TPB 11, dan TPB 13);
7) Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, TPB 9, TPB 16, dan TPB 17);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

8) Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air (berkaitan dengan TPB 2, TPB 6, dan TPB 15);
9) Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut (berkaitan dengan TPB 6 dan TPB 15).

Pengarusutamaan SDG's pada dasarnya telah selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.7
Pengarusutamaan SDGs Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Sebagai upaya menangani salah satu isu prioritas SDGs yaitu belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah, maka Provinsi Jawa Barat melalui dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, menuangkan kebijakan pembangunan rendah karbon kedalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu sasaran: "Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan". Sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan "Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

iklim" dengan strategi: 1) Meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim khususnya aksi-aksi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, energi, transportasi, limbah, dan persampahan; dan 2) Meningkatkan upaya-upaya untuk adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi kerugian ekonomi sebagai dampak bencana perubahan iklim pada sektor pertanian, sumber daya air, dan kesehatan serta konservasi ekosistem pesisir khususnya bagian utara.

Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya System Rice Intensification (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB);
4. Sektor Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan Integrated Transportation System (ITS) atau Area Traffic Control System (ATCS), pelaksanaan car free day, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan eco-smart driving; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

5. Sektor Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya (Cira), pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2030, yaitu **"JABAR ISTIMEWA, Lembur diurus, Kota ditata"**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur Bageur, Bener, Pinter,* dan *Singer*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya;
3. Terbentuknya Individu Berintegritas dan Taat Hukum;
4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan;
5. Terbentuknya Individu Kreatif dan Cekatan.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan yang Berdaya Saing;
2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Berkualitas;
3. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan serta Kesejahteraan Petani/Nelayan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4. Meningkatnya Nilai Investasi, Penciptaan Lapangan Kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Tenaga Kerja Kompeten;
5. Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro; dan
6. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

Tujuan 4.1

Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 4.2

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
								2024	2025	2026	2027	
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer**			**Indeks Modal Manusia**		Poin	N/A	0,55	0,56	0,57	
			1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	75,56	75,84	
					b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,90	14,90	12,40	11,10	
			1.2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	74.79 - 74.85	75.13 - 75.22	75.48 - 75.60	
					b.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	56,70	57,13	57,57	
			1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	b.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	51,78	52,53	53,3	
					c.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	49,51	50,01	50,26	
					d.	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	N/A	3,02	3,08	3,14	
			1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	a.	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	9,24	9,52	9,64	9,75	
					b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,87	12,94	12,98	
			1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	51,17*	63,36	65,63	67,6	
					b.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44*	69,71	70,61	71,29	
					c.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,458	0,457	0,448	
					d.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,51*	71,95	73,12	73,87	
2	**Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan**	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan,**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		Persen	4,95	4,98 - 5,37	5,15 - 6,20	5,23 - 7,48	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
								2024	2025	2026	2027	
	lingkungan yang tidak eksploitatif	**dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi**			**Kontribusi PDRB Provinsi**		Persen	12,82	12,72	12,62	12,54	
					Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Poin	Belum Rilis	61,30	61,73	62,69	
					Indeks Ekonomi Biru Indonesia		Poin	45,29	48,19	51,38	54,78	
					Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	6.75	6,42 - 6,99*	6,31 - 6,66	6,05 - 6,49	
					PDRB Per Kapita		Juta Rupiah	56.08	57,41 - 59,6	63,65 - 66,0	68,22 - 71,6	
			2.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Poin	41,39	41,87 - 42,00	41,51 - 41,67	41,15 - 41,35	
					b.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,4	6,55	6,7	
			2.1.2	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	a.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	4,85	4.92	5.79	6.39	
			2.1.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	a.	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Poin	N/A	4,58	4,42	4,23	
					b.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	1,77	2,6	3,31	
					c.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	112,17	112-117	114-119	115-121	
			2.1.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	Belum Rilis	24,72	24,73	24,77	
					b.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,05	3,5	3,79	3,97	
			2.1.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	a.	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	3,12 - 3,77	2,95 - 3,74	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
								2024	2025	2026	2027	
					b.	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94.22	94.45	94.69	
					c.	Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2,142*	1,444	1,475	1,500	
					d.	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	23,70	25,08	26,55	
			2.1.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	a.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	22,58	22,36	
					b.	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65	
3	**Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan**			**Rasio Gini**		Poin	0,430	0,383 - 0,390	0,381 - 0,420	0,381 - 0,420	
					Penurunan Intensitas Emisi GRK		Persen	N/A	6,61*	6,97	7,98	
			3.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	a.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	70,75	63,11	66,29	67,71	
					b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	58,11	59,26	
					c.	Indeks Desa	Poin	N/A	77,46	79,00	80,00	
					d.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,09	64,06*	64,31	64,56	
					e.	Persentase Penurunan Emisi GRK						
						a. Kumulatif	Persen	N/A	2,66	3,31	4,02	
						b. Tahunan	Persen	N/A	9,27	10,63	12,46	
					f.	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	108,3	107,44	
			3.2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	a.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	
					b.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	44,57	45,07	46,57	48,27	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
								2024	2025	2026	2027	
4	**Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance***	**Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi**			**Indeks Daya Saing Daerah**		Poin	3,88	3,90	3,96	4,04	
			4.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	81,29	81,30	
			4.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	a.	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	Tinggi (86,03)	87,52	89,02	
		Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan			**Indeks Reformasi Birokrasi**		Poin	A-	A	A	A	
			4.3	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	a.	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	Poin	86,44	86,45	86,47	86,50	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan: Target 2025 berdasarkan *baseline* 2025 RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sesuai tabel di atas akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat, perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		DUKUNGAN PROGRAM
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul						
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter,* dan *Singer***					
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	a.	Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
				b.	Menyediakan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				c.	Menyediakan layanan infrastruktur sanitasi	
				d.	Meningkatkan kualitas infrastruktur ruang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					terbuka hijau di perkotaan	4. Program Kesejahteraan Rakyat 5. Program Kepegawaian Daerah
		2	Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan	a.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan	
				b.	Menyediakan pelayanan kesehatan rutin bagi masyarakat	
		3	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.	a.	Melaksanakan penataan dan redistribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk daerah-daerah sulit/terpencil	
				b.	Menyediakan beasiswa bagi dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit	
		4	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	a.	Menyediakan pelayanan kesehatan prima dan sarana/prasarana layanan kesehatan bagi lansia dan kelompok rentan lainnya	
		5	Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	a.	Meningkatkan deteksi dini/*screening* untuk penyakit menular dan tidak menular	
				b.	Menggerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat termasuk menjaga kesehatan lingkungan	
				c.	Memanfaatkan nilai-nilai budaya dan integrasi kearifan lokal dalam program kesehatan	
				d.	Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam rangka penyediaan pangan sehat, perbaikan gizi, perbaikan gizi,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					penggunaan obat yang rasional, dan imunisasi lengkap bagi balita dan anak-anak, serta kesehatan jiwa untuk masyarakat	
				e.	Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi	
				f.	Pengembangan kesehatan tradisional	
		6	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Menyiapkan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas terutama di Daerah Afirmasi 3TP	
		7	Peningkatan penuntasan dan pencegahan *stunting*.	a.	Meningkatkan upaya penuntasan dan pencegahan *stunting*	
				b.	Meningkatkan peran Kader Posyandu dan PKK dalam upaya penuntasan dan pencegahan *stunting*	
		8	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	
				b.	Meningkatkan akses, kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak	
		9	Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	a.	Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	
				b.	Mengembangkan program promotif dan preventif kesehatan dan gizi pada kelompok dalam siklus hidup	
1.2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	1	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan	a.	Mengoptimalkan pengembangan kampung adat berbasis hutan, daerah aliran	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			pengelolaan lingkungan hidup.		sungai, kampung nelayan dan kampung adat berbasis perkotaan	2. Program Kesejahteraan Rakyat 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 6. Program Pengelolaan Permuseuman
		2	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	a.	Melestarikan budaya lokal, Nilai budaya dan tradisi masyarakat	
		3	Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	a.	Meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar etnis dan umat beragama	
1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	1	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	a.	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	a.	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan untuk Partisipasi Publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	
		3	Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	a.	Penguatan struktural (regulasi kelembagaan), budaya (kontrol masyarakat), dan agensi (fungsi media sosial) melalui pendekatan pentahelix	
				b.	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	
		4	Peningkatan penyelenggaraan trantibum linmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibum linmas	a.	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas	
1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	1	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	a.	Mengembangkan skema pemberian beasiswa/kerja sama pembiayaan peserta pendidikan dasar dan menengah serta pesantren.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pembinaan Perpustakaan 5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
				b.	Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA	
		2	Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan	a.	Menyiapkan kurikulum STEAM dan pemenuhan infrastruktur digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		untuk mendukung pengajaran berbasis TIK	6. Program Kesejahteraan Rakyat
				b.	Meningkatkan minat baca dan literasi digital bagi seluruh masyarakat	
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	a.	Meningkatkan akses guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan dan sertifikasi.	
		4	Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	a.	Menyediakan jaringan internet yang menjangkau daerah terpencil/*blank spot*	
		5	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	a.	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang memenuhi standar, aman bencana, serta sarana transportasi sekolah dasar dan menengah sesuai kondisi daerah	
				b.	Kolaborasi pengadaan tanah sekolah dengan pemerintah kabupaten/kota dan swasta	
		6	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	a.	Mengembangkan sekolah-sekolah vokasi pada pusat-pusat perkembangan wilayah / pusat ekonomi wilayah	
				b	Mengembangkan pendidikan berkarakter yang diwujudkan antara lain melalui sekolah kebangsaan	
				c.	Mengembangkan kurikulum ekologi, sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, dan muatan lokal pancawaluya.	
		7	Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	a.	Mengembangkan akses pendidikan berkebutuhan khusus	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				b.	Mengembangkan akses pendidikan nonformal	
		8	Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	a.	Mengembangkan bantuan biaya pendidikan vokasi bagi warga tidak mampu	
		9	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Mengembangkan dan memperluas jangkauan sekolah terbuka dan pesantren, serta sekolah berbasis asrama	
		10	Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	a.	Mengembangkan jejaring, kemitraan dan kerja sama internasional untuk memperluas peluang beasiswa pendidikan di luar negeri	
				b.	Memberikan dukungan pengembangan hub pendidikan global	
		11	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	a.	Mengembangkan kurikulum STEAM berbasis Vokasi dan keunggulan wilayah bertaraf global	
		12	Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi	a.	Meningkatkan minat baca masyarakat	
				b.	Mengoptimalkan pembangunan literasi masyarakat	
1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	a.	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Pengendalian Penduduk
				b.	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		2	Pemberdayaan perempuan, pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	
				b.	Penguatan karakter, kompetensi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik pada laman berikut https://sidebangprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda	7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 9. Program Perlindungan Perempuan 10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 11. Program Perlindungan Khusus Anak 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		3	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	a.	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketangguhan keluarga.	
				b.	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga	
Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif						
2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi**					
2.1	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	1	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi).	a.	Membangun kawasan pergudangan/stock yard yang modern terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				b.	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif fiskal/non fiskal lainnya	
		2	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	a.	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan dry port KA Pelabuhan Patimban	
				b.	Mengintegrasikan dryport KA Patimban dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon	
		3	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	a.	Pengembangan penggunaan bahan baku lokal untuk kebutuhan industri unggulan	
		4	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang	a.	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK untuk meningkatkan daya saing Dunia Usaha dan Dunia Industri	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penerima Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			berdaya saing di tataran global		(DUDI) di tataran global	
				b.	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis	
		5	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	a.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peneliti untuk penguatan riset di sektor ekonomi produktif	
				b.	Meningkatkan pembiayaan dan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri	
		6	Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*)	a.	Menata dan menyiapkan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*)	
		7	Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	a.	Mengembangkan sektor industri (besar dan IKM/UMKM) unggulan berbasis potensi wilayah	
				b.	Penguatan pengarusutamaan penerapan industri hijau pada sektor industri	
2.2	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	1	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	a.	Memperluas ekosistem digital untuk memperkuat bisnis UMKM	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi
				b.	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis	
		2	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Meningkatkan perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan untuk pemberdayaan IKM/UMKM, terutama di daerah afirmasi 3TP	
		3	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek	a.	Penguatan P3DN, UMK dan Koperasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				DUKUNGAN PROGRAM
			sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	b.	Memperkuat rantai pasok nilai tambah industri dalam negeri	Perdagangan 5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM
				c.	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
				d.	Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan melalui proses Litbang dan dukungan pengembangan sumber daya produksi yang berkualitas	
				e.	mengembangkan sistem perdagangan yang optimal, efisien, merata dan berdaya saing	
		4	Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand.	a.	Menyiapkan dan melaksanakan penataan *government-induced activities* untuk peningkatan pergerakan orang dan barang di daerah afirmasi 3TP	
2.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	1	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	a.	Meningkatkan penyediaan instrumen hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5. Program Pengawasan
				b.	Penguatan infrastruktur pelabuhan perikanan	
		2	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan	a.	Penyiapan lahan untuk komoditas unggulan	
				b.	Perluasan Akses pasar	
				c.	Penambahan gudang penyimpanan	
				d.	Digitalisasi pertanian,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau melalui tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					perikanan, dan kehutanan	Keamanan Pangan 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11. Program Pengelolaan Hutan 12. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil 13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 14. Program Penyuluhan Pertanian
				e.	Hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan kehutanan	
				f.	Penataan fasilitas penangkapan dan budidaya perikanan	
		3	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	a.	Mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
				b.	Meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia serta kelembagaan perkebunan melalui transformasi sistem regenerasi petani, penyuluhan pertanian, serta sinergi pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha	
				c.	Mengembangkan klaster pertanian bio industri berbasis unggulan daerah	
				d.	Menerapkan pertanian pangan berkelanjutan	
				e.	Menerapkan pertanian presisi	
		4	Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	a.	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi	
		5	Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	b.	Mengembangkan ketahanan pangan berkelanjutan	
		6	Pengelolaan susut dan sisa pangan	c.	Melakukan konservasi energi dengan pemanfaatan prasarana/sarana bersumber energi terbarukan dan pemanfaatan angkutan umum massal	
		7	Peningkatan pelayanan sistem irigasi	d.	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi	
		8	Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai.	a.	Mengembangkan teknologi dan inovasi pemanfaatan sumber daya laut dan pantai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
2.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	1	Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	a.	Memperkuat tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Perencanaan Tenaga Kerja 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (IKU PD) 11. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (IKU PD) 15. Program Hubungan Industrial
				b.	Mengembangkan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi	
		2	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	a.		
		3	Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Memetakan dan melakukan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di daerah afirmasi 3TP
				b.	Memberikan kemudahan perizinan dan/atau insentif fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP	
		4	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM.	a.	Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM	
2.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	a.	Mengoptimalkan pengaturan harga, pengendalian biaya produksi, dan peningkatan efisiensi produksi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program Pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Perencanaan Pembangunan Daerah atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	a.	Mengoptimalkan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Pendapatan Daerah 3. Program BUMD Sehat
				b.	Mengoptimalkan potensi CSR, KPBU, Ekonomi dan keuangan syariah	
				c.	Meningkatkan kapasitas belanja daerah	
				d.	Mengoptimalkan pendapatan transfer daerah	
				e.	Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan swasta	
				f	Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	
2.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	1	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	a.	Pengembangan atraksi wisata, Promosi dan pemasaran, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan paket wisata, serta penerapan pariwisata digital	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				b.	Meningkatkan penyediaan akomodasi dan sarana prasarana lainnya untuk mengembangkan produktivitas pariwisata	
				c.	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultural, dan heritage) secara kolaboratif dan partisipatif	
		2	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	a.	peningkatan infrastruktur	
Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya						
3	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan**					
3.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	a.	Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan				terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya	Jasa Konstruksi 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5. Program Pengelolaan Pelayaran 6. Program Pengelolaan Perkeretaapian 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10. Program penyelesaian sengketa tanah garapan 11. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 12. Program Penataan Bangunan Gedung 13. Program Kawasan Permukiman 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 15. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 16. Program Penatagunaan Tanah 17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 18.Program
		2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	a.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	
		3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	a.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan	
				b.	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi terpadu perkotaan	
		4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.	a.	Menerapkan Pembangunan infrastruktur *hybrid (green and grey infrastructure)* di kawasan perkotaan untuk ketahanan bencana	
		5	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	a.	Menetapkan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)	
		6	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	a.	Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
		7	Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	a.	Meningkatkan penyediaan hunian vertikal perkotaan	
				b.	Meningkatkan penataan kawasan kumuh perkotaan dan/atau urban renewal	
		8	Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	a.	Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi	
		9	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	a.	Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penerima Dokumen Perencanaan atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
		10	Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	a.	Membangun Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan	Pengembangan Perumahan 19. Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 20. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 21. Program Pengembangan Permukiman 22. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 23. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 24. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 25. Program Penataan Desa 26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 27. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 28. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 29. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 30. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin
		11	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	a.	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar pusat kegiatan, klaster perekonomian dan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan	
				b.	Mengoptimalisasikan Bandar Udara di Jawa Barat	
				c.	Membangun dan mengoptimalkan Pelabuhan Laut dan ASDP di Jawa Barat	
				d.	Meningkatkan peran terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi	
				e.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas berkeselamatan;	
		12	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	a.	Mendorong pemanfaatan energi rendah emisi untuk aktivitas industri	
				b.	Menyediakan akses jalan yang terkoneksi ke kawasan industri	
				c.	Menyediakan akses telekomunikasi dan digital untuk aktivitas industri	
				d.	Melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan limbah dan sampah industri	
				e.	Menyediakan dan melakukan penataan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	
				f.	Menyediakan dukungan untuk penataan fasilitas hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		DUKUNGAN PROGRAM
				g.	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)
		13	Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	a.	Membangun dan memperluas cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan dan perdesaan	31. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 32. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 33. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 34. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 35. Program Pengelolaan Persampahan 36. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 37. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 38. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 39. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 40. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 41. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 42. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		14	Persiapan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intra regional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	a.	Melakukan persiapan dan dukungan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan di kawasan metropolitan	
		15	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	a.	Memperkuat pengelolaan jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa	
				b.	Meningkatkan kemantapan jalan pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa	
		16	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1.Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 2. Akses Pelabuhan Patimban. 3. Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) 4. Cabadak-Pelabuhan Ratu; 5. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 6. Ciranjang-Padalarang; 7. Garut-Pameungpeuk; 8. Kalipucang-Pangandaran; 9. Cirebon-Indramayu; dan 10. Cirebon-Kuningan; 11. Kertajati-Indramayu;	a.	Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada ruas: 1. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojong Gede) 2. Depok-Antasari Seksi 4 (Bojong Gede-Salabenda) 3. Bekasi- Cawang-Melayu Seksi 2B (Margajaya-Tambun) 4. Bogor-*Ring Road* Seksi 3B (Kayumaning-Salabenda) 5. Ciawi-Sukabumi Seksi IIIB (Cibadak-Sukabumi Barat) 6. Ciawi-Sukabumi Seksi IVB (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) 7. Jakarta-Cikampek II Selatan (Jatiasih-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Verifikasi Dokumen di laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					Setu dan Setu-Sukabungah) 8. Akses Pelabuhan Patimban 9. Cikunir-Karawaci *Elevate* 10. Bogor-Serpong Via Parung (JORR III) 11. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) 12. Sukabumi-Ciranjang 13. Ciranjang-Padalarang 14. Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis 15. Caringin-Cisarua 16. Akses Patimban *Extend* (sadang-Subang) 17. Bandung-*Inter Urban Toll Road*	43. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 44. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 45. Program Penanggulangan Bencana 46. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 47.Program Penanganan Bencana
		17	Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	a.	Meningkatkan kualitas dan spesifikasi jalan khusus, terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan dan perdesaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah antar Provinsi dan dunia usaha	
		18	Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	a.	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan dry port KA Pelabuhan Patimban	
				b.	Mengintegrasikan dryport KA Patimban dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon	
		19	Reaktivasi layanan perkeretaapian di Jawa Barat terutama pada: 1. Layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang; 2. Layanan perkeretaapian Banjar-Pangandaran-Cijulang. 3. Layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari; 4. Layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; serta 5. Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Cibatu-Garut-Cikajang.	a.	Meningkatkan upaya penyiapan readiness criteria untuk mendukung reaktivasi layanan perkeretaapian, meliputi: i. Dukungan penyiapan dokumen perencanaan ii. Dukungan penyiapan lahan iii. Upaya mitigasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					dampak sosial dan lingkungan	
		20	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	a.	Meningkatkan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat)	
		21	Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	a.	Menyiapkan prasarana dan sarana elektrifikasi jalur KA, terutama untuk layanan perkeretaapian komuter	
		22	Pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.	a.	Mendukung pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya	
		23	Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone* & *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	a.	Mendukung penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian	
		24	Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	a.	Membangun sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP	
		25	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	a.	Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat di kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, dan/atau Daerah Afirmasi 3TP	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
		26	Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	a.	Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman untuk mengembangkan desa mandiri	
				b.	Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan permukiman perdesaan dan kawasan strategis non perkotaan	
				c.	Menyediakan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perdesaan	
				d.	Menyediakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah kawasan perdesaan	
				e.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu pada permukiman perdesaan yang dapat mendukung circular economy	
		27	Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	a.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	
				b.	Meningkatkan pengelolaan maupun diversifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tanaman obat	
		28	Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	a.	Meningkatkan upaya konservasi, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan di Daerah Aliran Sungai Prioritas (DAS CItarum, DAS Cilamaya, DAS Kali Bekasi) dan wilayah pesisir dan laut	
				b.	Mengendalikan pembangunan wilayah dan infrastruktur melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					rencana detail tata ruang (RDTR)	
				c.	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan peruntukkan ruang sebagaimana arahan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)	
		29	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	a.	Meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim khususnya aksi-aksi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, energi, transportasi, limbah, dan persampahan	
				b.	Meningkatkan upaya-upaya untuk adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi kerugian ekonomi sebagai dampak bencana perubahan iklim pada sektor pertanian, sumber daya air, konservasi ekosistem pesisir khususnya bagian utara, dan kesehatan	
		30	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	a.	Mengembangkan sistem pengelolaan limbah domestik secara individu maupun terpadu pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan untuk mengurangi pencemaran air dan mengurangi emisi gas rumah kaca sektor limbah domestik, menuju akses sanitasi AMAN	
		31	Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	a.	Pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi timbulan sampah dan penanganan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					kawasan tuntas sampah	
				b.	Pemanfaatan sampah menjadi energi (RDF, WtE, Hydrogen, atau skema lainnya) untuk mengurangi timbulan sampah di *landfill* dan mengurangi emisi gas rumah kaca	
				c.	Pengelolaan sampah di DAS untuk mengurangi penyumbatan DAS	
			32	a.	Menyiapkan tata kelola dan kelembagaan penerapan perdagangan dan pajak karbon	
			33	a.	Melakukan percepatan penyelesaian konstruksi dan operasionalisasi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional pada wilayah Bandung Raya dan Bogor-Depok-Tangerang Selatan (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Nambo)	
				b.	Melakukan optimalisasi pelayanan sampah Regional Bandung Raya pada TPAS Regional Sarimukti sampai dengan beroperasinya TPPASR Legok Nangka, melakukan pengelolaan gas metan, serta melakukan konservasi dan penutupan TPAS Regional Sarimukti	
				c.	Melakukan fasilitasi perencanaan dan penyiapan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur) dan pengelolaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
					sampah terpadu (TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya)	
		34	Penyiapan dan penetapan instrumen *circular economy* dalam pengelolaan sampah.	a.	Mempersiapkan mekanisme dan instrumen pelaksanaan *circular-economy* pengelolaan sampah	
		35	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	a.	Mengurangi ancaman terhadap ekosistem darat dan laut pada sektor hutan dan lahan, pertanian dan perkebunan, serta perairan	
				b.	Melakukan pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem darat dan laut guna melestarikan keanekaragaman hayati	
		36	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	a.	Membangun jaringan irigasi	
		37	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	a.	Melakukan upaya penambahan kapasitas tampung dan pengembangan jaringan infrastruktur sumber daya air	
		38	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis; 2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka;	a.	Membangun bendungan/waduk baru untuk meningkatkan kapasitas tampung, pemenuhan air baku dan pengendalian banjir	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.			
		39	Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	a.	Menyediakan infrastruktur energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan di kawasan perkotaan	
		40	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	a.	Membangun infrastruktur jaringan transmisi migas	
		41	Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan	a.	Membangun akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau dengan mengunjungi alamat berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.			
		42	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	a.	Menguatkan kurikulum di setiap satuan pendidikan untuk mengelola risiko bencana	
				b.	Meningkatkan penggunaan sistem peringatan dini bencana	
				c.	Meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana	
				d.	Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	
		43	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	a.	Meningkatkan upaya implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, serta pengelolaan limbah dan sampah	
				b.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
3.2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	1	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Menjamin pemenuhan dan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Kesejahteraan Rakyat
		2	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan	a.	Memperkuat sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau dengan mengunjungi tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).		peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi bagi kelompok marginal, rentan dan masyarakat di daerah afirmasi 3TP (Jabar Selatan)	
			3	Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	a.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kerja penyandang disabilitas di sektor formal	
					b.	Meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas di sektor formal	
					c.	Mengembangkan edukasi sektor formal untuk menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja	
			4	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	a.	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	
					b.	Menyediakan layanan panti wreda/griya lansia di 27 kabupaten/kota	
					c.	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
			5	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	b.	Penguatan karakter, kompetensi individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda	
		6	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	a.	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*						
4.1	**Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi**					
4.1.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	1	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	a	Meningkatkan riset berbasis permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Program Riset Dan Inovasi Daerah
				b	Meningkatkan kolaborasi riset di berbagai sektor pembangunan terutama sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri	
		2	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.	a	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di Daerah.	
4.1.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	1	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	a.	Meningkatkan Kerja sama Internasional dan Ketahanan Daerah	1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4. Program Penguatan
		2	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Menyediakan dan memperkuat Infrastruktur Pertahanan di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	
		3	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	a.	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan Kerja Sama Antardaerah dalam pengelolaan wilayah, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
						Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
4.2	**Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan**					
4.2.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	a.	Mengembangkan instrumen regulasi yang efektif dan efisien selaras dengan Regulasi Nasional	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 9. Program Perizinan Penggunaan Arsip 10. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 11. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 12. Program Penataan Organisasi 13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 16. Program Pelayanan Penghubung
				b.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik selaras dengan prinsip *Good and Clean Governance*	
		2	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	a.	Mengembangkan Kelembagaan dan penataan aparatur daerah yang Adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	
				b.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah melalui Penguatan Kompetensi SDM serta Peningkatan Etos Kerja dan Integritas	
		3	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	a.	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN serta Penguatan Sistem Manajemen Talenta	
				b.	Mengembangkan Sistem *Reward* dan *Punishment* yang Transparan	
				c.	Meningkatkan Kesejahteraan ASN Berbasis Capaian Kinerja	
		4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	a.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui desain kebijakan penataan wilayah (pemekaran/penggabungan wilayah/kabupaten/kota/kelurahan/desa)	
		5	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	a.	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Risiko	
		6	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka	a.	Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

MISI/TUJUAN/ SASARAN		ARAH KEBIJAKAN			STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.		dan komunikasi (TIK)	17. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 21. Program Kepegawaian Daerah 22. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 23. Program Penyelenggaraan Pengawasan 24. Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi 25. Program Pencatatan Sipil 26. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 27. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 28. Program Pendaftaran Penduduk 29. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				b.	Meningkatkan digitalisasi pada sektor strategis	
				c.	Meningkatkan literasi digital	
				d.	Meningkatkan keamanan siber dan pusat data	
				e	Meningkatkan Implementasi *Smart Province*	
		7	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	a.	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan pelayanan publik	

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penerima Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi pelaksanaan program–program perangkat daerah untuk fokus pada penanganan yang bersifat prioritas dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026.

4.2.1 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan pada Sub Bab 4.1.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

   Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang mencapai 74,92, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 74,24 (2023). Namun mulai dari tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak lagi digunakan dan digantikan dengan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagaimana arahan nasional. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki target IMM sebesar 0,57, hal ini dapat dicapai dengan mengukur seberapa baik kontribusi Jawa Barat terhadap Indonesia dalam memobilisasi modal manusia, potensi ekonomi, dan profesionalisme warganya. Sehingga perlu ada akselerasi terkait ketahanan hidup, kualitas pendidikan, dan kesehatan penduduk di Jawa Barat.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 yaitu 9,24 tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 9,33, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 yaitu 12,80 tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 12,87 – 12,88. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 75,16 tahun. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum optimalnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat.

Permasalahan lain terkait kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat juga terdapat pada belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebanjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

anak dengan jumlah kasus sebanyak 3.159 kasus kekerasan pada tahun 2024. Dilihat dari kesenjangannya, masih rendahnya akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan terutama jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,458poin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 50,59 persen dibandingkan dengan laki-laki sebesar 84,51 persen pada tahun 2024.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai *green dan blue economy* serta pembangunan inklusif diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan serta belum optimalnya penerapan *green* dan *blue economy*.

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 7,08 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 5,85 – 6,46 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan kesenjangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi dengan capaian gini rasio sebesar 0,430 poin pada tahun 2024. Sehingga diperlukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 masih mencapai 6,75 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 6,42 – 6,99 persen. Faktor pemicu tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat adalah pertumbuhan lapangan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, serta rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan masih menjadi permasalahan di Jawa Barat.

Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan, serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 66,09 poin pada tahun 2024. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

4. **Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**

   Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2024. Meskipun capaian sudah tinggi, permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu, adaptif, responsif, dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu ”Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

“PEMERATAAN DISTRIBUSI AKSES LAYANAN DASAR DAN KONEKTIVITAS DAERAH”

Tema tersebut memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar dan konektivitas daerah perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penerbit Dokumen Elektronik Provinsi Jawa Barat atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Proses penyusunan isu strategis tahun 2026 mempertimbangkan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan mengacu pada arah kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta memastikan keterkaitan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2026.

4.2.1.1 Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Keterkaitan isu strategis pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan isu strategis pembangunan tahun 2026, dengan permasalahan pembangunan dituangkan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Portal Verifikasi Dokumen Elektronik pada alamat berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 4.4
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Isu Strategis RPJMD Jabar 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.	1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2. Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan termasuk kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.	
	3. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dalam mewujudkan *zero new stunting* serta penyelesaian masalah gizi masyarakat.	
	4. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular serta timbulnya masalah kesehatan baru seperti kesehatan jiwa	
	5. Masih rendahnya literasi masyarakat terkait kesehatan serta penerapan PHBS.	
	6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan integrasi data kesehatan	
	7. Belum optimalnya kualitas hidup dan perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas), pembangunan pemuda, serta kesetaraan gender	
	8. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan ketahanan keluarga	
2. *Green and Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif	1. Masih rendahnya penerapan *link and match* industri kecil-industri besar.	2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
	2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau.	
	3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong.	
	4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.	
	5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis.	
	6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan.	
	7. Nilai investasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan.	
	8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.	
	9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.	
	10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong.	
	11. Masih rendahnya penerapan *circular economy*.	
3. Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Serta Keberlanjutan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.	3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
	2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.	
	3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung.	
	4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RPJMD Jabar 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026
	5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah.	
	6. Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah.	
	7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni.	
4. Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	1. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal.	
	2. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.	
	3. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	
	4. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian.	
	5. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.	
5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi.	4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
	2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.	
	3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.	
	4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi.	
	5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur.	
	6. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas.	
	7. Belum optimalnya penguatan pengawasan.	
	8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

4.2.1.2 Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKP 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Tema tersebut merupakan penjabaran tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, ditetapkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029 atau sasaran pembangunan tahun 2026 yang disebut Trisula Pembangunan, yaitu:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan** dengan target indikator:

Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
GNI per Capita	5.870
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67

2. **Penurunan Kemiskinan** dengan target indikator:

Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4.96
Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Rasio Gini	0,377 – 0,380

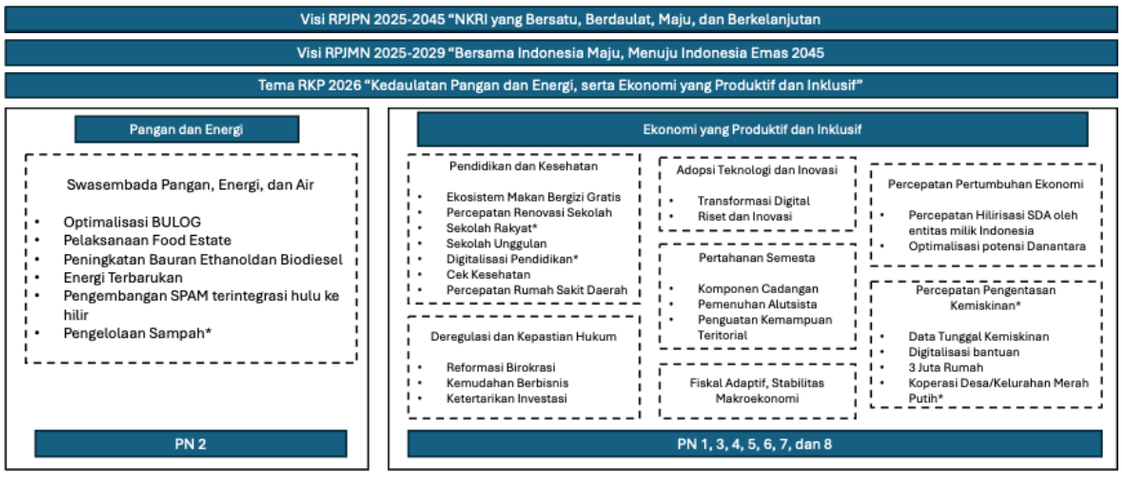
3. **Sumber Daya Manusia Berkualitas** dengan target indikator:

Indeks Modal Manusia	0,57

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang didukung oleh Prioritas Nasional secara spesifik sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Dokumen dapat diverifikasi pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 4.8
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, 2025
(*) Lima Direktif Presiden

Berdasarkan gambar di atas, prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 merupakan integrasi dari Trisula Pembangunan dalam RPJMN dengan 3 (tiga) pilar utama pembangunan nasional dan 5 (lima) arahan direktif presiden sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Dokumen Digital Reader atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.5
Program Direktif Presiden pada RKP Tahun 2026

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
				Indikator	2024	2025	2026		
1	Pengelolaan Sampah Terpadu	1 Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan	KP : Perubahan Perilaku dan penguatan Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64	58	60	Lokasi PSEL dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain berada di DK Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, **Bekasi, Bandung**, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado.	1 Pelibatan Danantara untuk menarik investasi dalam pengelolaan sampah
		2 Menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan sampah		Meningkatnya Sampah Dikelola (%)	39,01 %	51,21 %	63,41 %	Wilayah metropolitan dengan timbulan sampah >1.000 ton/hari: Kota Adm. Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Medan, **Kota Bekasi, Kota Bandung**, Kota Tangerang, Kota Adm. Jakarta Utara, **Kota Depok**, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota. Adm. Jakarta Pusat, Kota Batam, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Bandar Lampung, **Kota Bogor**, Kota Malang, Kota Padang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan	2 Dukungan penugasan PLN
		3 Mengurangi volume sampah kota secara signifikan		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar (pilar 4 STBM)	4	30	60		3 Bantuan biaya operasional dengan DAK Non-Fisik
		4 Meningkatkan investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah	ProP : Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 % (13% terdaur ulang)	24% (16% terdaur ulang)	28% (17% terdaur ulang)		4 Mendorong Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025	2026			
		5	Meningkatkan tata kelola persampahan	Pengelolaan Sampah	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (kumulatif)	744,60 ton	18 ton	296 ton	sekitarnya, Kota Jambi dan sekitarnya, Kota Pontianak dan sekitarnya, Kota Surakarta dan sekitarnya, Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Kota Manado dan sekitarnya, **Kab. Bogor**, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi.	5	Dukungan DAK Fisik dan Non-Fisik Persampahan.
		6	Mendukung target nasional dan komitmen internasional dalam pengurangan gas rumah kaca								
2	Sekolah Rakyat		Mencetak agen perubahan pada keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan.	-	Sekolah	-	100 sekolah	200 sekolah	Fokus kepada daerah yang sudah memiliki kesiapan sarana dan prasarana (Sentra, Balai, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Pemerintah Daerah) untuk pengembangan area pendidikan yang menyasar pendidikan untuk kelompok miskin dan rentan yang inklusif.	1	Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD
					Siswa Miskin, Rentan, dan Disabilitas	-	9.600 siswa	19.500 siswa		2	Pendanaan melalui DAK, KPBU, BUMN Pendidikan, dan mitra pembangunan
3	Penerapan Digitalisasi Pendidikan	1	Meningkatkan pemerataan fasilitas teknologi informasi pada satuan pendidikan di Indonesia.	KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	Satuan Pendidikan Tipe I (memiliki listrik dan internet)	-	38.472	88.45	**38 Provinsi**		Pendanaan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (selaku K/L utama).
		2	Meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas untuk	ProP: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran	Satuan Pendidikan Tipe II (memiliki	-	-	27.569			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025	2026			
			membantu meningkatkan pengalaman belajar peserta didik.	dalam Peningkatan Kompetensi	listrik, tanpa internet)						
		3	Akselerasi penguatan literasi, numerasi, dan sains dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran.	RO: Platform Digital Pendidikan	Satuan Pendidikan Tipe III (tanpa listrik dan internet)	-	-	2.593			
		4	Mengintegrasikan layanan digital pendidikan yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.	ProP: Penyediaan Sarana dalam Mendukung Digitalisasi Pembelajaran							
		5	Mempromosikan kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan terorganisasi di satuan pendidikan untuk mengurangi penggunaan berlebihan terhadap gawai.	RO: - Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - SMA yang							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
					Indikator	2024	2025	2026		
				mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran - Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran						
4	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan melalui bantuan sosial yang terintegrasi, melalui kartu kesejahteraan	KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57%	7,0 – 8,0 %	6,5 – 7,5 %	Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif akan dilaksanakan secara merata di **seluruh provinsi dan kabupaten/kota**	Pendanaan melalui APBN dan mitra pembangunan.
		2	Mendukung perlindungan sosial adaptif agar responsif terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan bencana	ProP: - Bantuan Keluarga, Pendidikan, dan Kesehatan - Bantuan Energi dan Pangan - Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi dari Kemiskinan	N/A	1,5 juta keluarga	1,5 juta keluarga	Pengentasan kemiskinan periode tahun 2025-2029 dilaksanakan pada 10 provinsi (Sumatera Utara, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan).	
		3	Mendorong kemandirian	KP: Peningkatan Kemandirian	Persentase Keluarga	60% (2023)	65%	70%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
					Indikator	2024	2025	2026		
			ekonomi dengan akses pada pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan, melalui kartu usaha afirmatif	melalui Kartu Usaha Afirmatif	Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (%)					
		4	Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan melalui sinkronisasi program-program pemberdayaan yang terintegrasi dengan pendampingan intensif dan berkelanjutan	ProP: - Penguatan Kapasitas Kerja - Penguatan Kewirausahaan Afirmatif	Jumlah Penerima Manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan	0	1 juta jiwa	1,5 juta jiwa		
		5	Menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan melalui pemanfaatan DTSEN sebagai acuan utama							
		6	Mendorong interoperabilitas sistem data antar program dan antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program							
		7	Meningkatkan inklusi sosial dan akses layanan dasar bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
					Indikator	2024	2025	2026		
			disabilitas, dan perempuan kepala keluarga							
		8	Mendorong graduasi bantuan sosial melalui peningkatan kemandirian ekonomi, terutama dengan kesempatan berusaha dan bekerja yang merata dan afirmatif bagi penduduk miskin dan rentan							
		9	Mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat rentan melalui integrasi layanan digital							
5	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	KP: Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Jumlah Berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP)	-	80.000	-	**Seluruh desa/kelurahan di Indonesia**, dengan prioritas pengembangan berdasarkan potensi ekonomi dan kesiapan kelembagaan.	APBN, APBD, Dana Desa, dan BUMN melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
		2	Menekan tingkat kemiskinan ekstrem	ProP: - Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Terjaganya Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP	-	-	30%		
		3	Menciptakan lapangan kerja	RO Kunci: -Pendampingan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025	2026			
		4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi 5 Modernisasi manajemen sistem perkoperasian 6 Menekan harga di tingkat konsumen 7 Meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik 8 Mewujudkan rantai pasok yang efektif	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Pendampingan Produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* -Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa - Grand Design Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Koperasi - Fasilitasi Pembinaan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025	2026			
				Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani - Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*							

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, 2025

(*) RO Baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Berkaitan dengan intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di Pulau Jawa tahun 2026 diarahkan untuk:

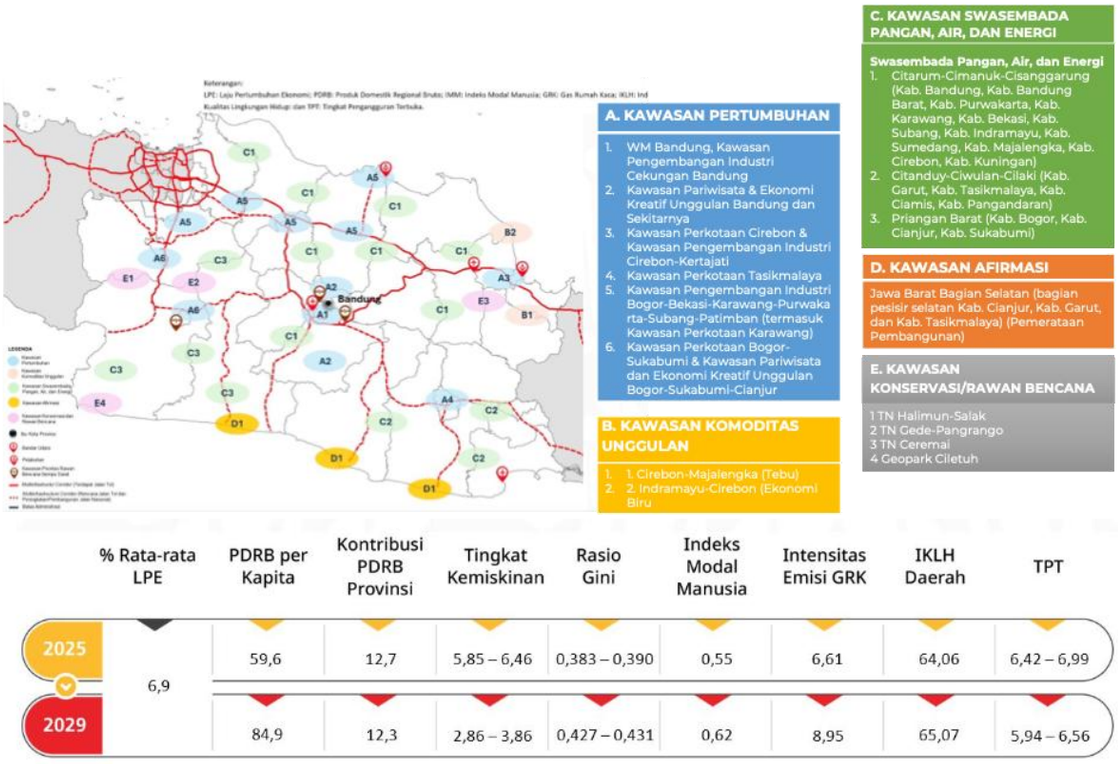
1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak);
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu *global brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green, gray, dan social infrastructure*), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multi ancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir.

Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, pembangunan pada tahun 2026 akan diarahkan sebagaimana berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 4.9
Sasaran Pembangunan Jawa Barat



Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, 2025

Tabel 4.6
Highlight Intevensi Provinsi Jawa Barat

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
Provinsi Jawa Barat	Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan *output*: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan.
	Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan *output* pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Bappenas atau dengan mengakses tautan berikut https://sidebangprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	berasrama.
	Direktif Presiden: Pemanfaatan *Platform* Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan *output* *Platform* Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan *output*: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.
	Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan *output:* • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. *Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.*
	Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan *output*: • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Bandung; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bandung; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Purwakarta; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Karawang; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Cimahi; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bekasi; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Depok; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Indramayu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	• Pembangunan PLTSa di Kota Bekasi; • Pembangunan PLTSa di Kota Bandung.
	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan *output*; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan *output*; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	• Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban **• Kota Bekasi** **• Kab. Bekasi** **• Kab. Bogor** **• Kab. Karawang** **• Kab. Purwakarta** **• Kab. Subang**	• Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan; • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban; • Pembangunan jalur KA akses Pelabuhan Patimban; • Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Patimban Industrial Estate; • Pembangunan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II; • Pembangunan SPAM di Kab. Subang; • Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya; • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi dan Cikarang; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Perkotaan Bekasi; • Pengendalian banjir Sungai Cipamingkis; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAU dr. Hoedijono (Kab. Subang); • Pengembangan SPAM Regional Cikarang-Karawang-Purwakarta; • Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek;
Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi **• Kota Bogor** **• Kab. Bogor** **• Kota Sukabumi** **• Kab. Sukabumi**	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain dengan *output* peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor); • Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi; • Proses Perencanaan Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur–Ciranjang-Padalarang; • Pembangunan Jalan Tol Bogor *Ring Road*; • Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung); • Pengembangan SPAM Bogor Raya; • Pembangunan SPAM di Kab. Sukabumi; • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM STP di Institut Pertanian Bogor melalui pembiayaan PHLN; • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Bogor.
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur (Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta)	• Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang; • *Urban Renewal* pada kota-kota wisata: Bogor dan Sukabumi; • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Gunungpadang; • Pengembangan KEK Lido;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Reviewer atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
• **Kota Bogor** • **Kab. Bogor** • **Kota Sukabumi** • **Kab. Sukabumi** • **Kab. Cianjur**	• Pengembangan kota agropolitan Sukabumi; • Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Sukabumi.
WM Bandung • **Kota Bandung** • **Kab. Bandung** • **Kab. Bandung Barat** • **Kota Cimahi** • **Kab. Sumedang**	• Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung; • Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di Perkotaan Bandung; • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Bandung, termasuk penerapan SIH3 dan FEWS; • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kota Cimahi; • Pembangunan SPAM Regional Bandung; • Elektrifikasi jalur KA Komuter Bandung Raya Segmen Cicalengka-Padalarang; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya; • Pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM STP di Institut Teknologi Bandung melalui pembiayaan PHLN; • Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek–Bandung; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. II Dustira (Kota Cimahi), Lembaga Farmasi Puskesad (Kota Bandung), Lembaga Biologi Vaksin Puskesad (Kota Bandung); • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. ABDUL RAHMAN SALEH (BANDUNG); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. SUKARNO - HATTA (BANDUNG); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. RAYA SINDANGLAYA (BANDUNG); • Pembangunan Jembatan Perkotaan FO Cibiru; • Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	(Pembangunan Stasiun Cimindi Andir dan Ciroyom antara Padalarang - Bandung); • Fasilitas pengelolaan sampah spesifik di Kota Bandung.
Pengembangan Industri Cekungan Bandung **• Kota Bandung** **• Kab. Bandung** **• Kab. Bandung Barat** **• Kota Cimahi** **• Kab. Sumedang**	• Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil, alas kaki dan produk tekstil); • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya.
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya (A2) **• Kota Bandung** **• Kab. Bandung** **• Kab. Bandung Barat** **• Kota Cimahi** **• Kab. Sumedang**	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon; • Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Bandung Barat; • Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Tangkuban Parahu dan Rancaupas-Pangalengan; • *Urban Renewal* pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey.
Kawasan Perkotaan Tasikmalaya **• Kota Tasikmalaya**	• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya (PHTC); • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya; • Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya; • Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya–Ciamis; • Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya.
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat **• Kab. Bogor** **• Kab. Sukabumi** **• Kab. Cianjur**	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh; • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni; • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau dengan mengunjungi tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	· Pembangunan Bendungan Cibeet; · Pembangunan Bendungan Cijurey; · Penetapan wilayah panas bumi di Kab. Cianjur; · Pembangunan infrastruktur PLTP Gunung Salak VII; · Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolok-Cisukarame; · Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kab. Sukabumi).
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung **· Kab. Bekasi** **· Kab. Karawang** **· Kab. Purwakarta** **· Kab. Bandung Barat** **· Kab. Bandung** **· Kab. Subang** **· Kab. Indramayu** **· Kab. Sumedang** **· Kab. Cirebon** **· Kab. Kuningan** **· Kab. Majalengka**	· Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Cikawung; · Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D.I. Bendung Carian, D.I. Rengrang, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka; · Revitalisasi sentra/kluster komoditas unggulan air payau di pantai utara; · Pembangunan infrastruktur PLTA PS Upper Cisokan; · Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur; · Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha; · Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang-Windu; · Pembangunan infrastruktur PLTP Tangkuban Parahu; · Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas; · Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan; · Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) – Pusat di Majalengka; · Pembangunan TPST Kabupaten Cirebon.
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki **· Kab. Garut** **· Kab. Tasikmalaya** **· Kab. Ciamis** **· Kab. Pangandaran**	· Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cikunten, D. I. Cikunten II, D. I. Manganti, D. I. Bantarheulang, D. I. Lakbok Utara; · Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banjar; · Pembangunan pengaman Pantai Bojongsalawe; · Kawasan Kelapa di Kab. Tasikmalaya; · Pembangunan infrastruktur PLTA PS Matenggeng; · Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut).
Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) **· Kab. Garut** **· Kab. Tasikmalaya**	· Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti; · Preservasi Jalan Lintas Selatan Jawa Barat; · Penguatan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Verifikasi Dokumen pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
· Kab. Cianjur	Pameungpeuk, serta penguatan Kawasan Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan matra udara; · Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Pameungpeuk (PHTC); · Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Garut.
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon **· Kab. Cirebon** **· Kab. Indramayu**	· Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan; · Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Indramayu-Cirebon; · Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu-Cirebon.
Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak (E1), TN Gede-Pangrango (E2), TN Ciremai (E3), dan *Geopark* Ciletuh (E4) **· TN Halimun-Salak: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi** **· TN Gede-Pangrango: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi** **· TN Ciremai: Kab. Kuningan, Kab. Majalengka** **· *Geopark* Ciletuh: Kab. Sukabumi**	Penguatan pengelolaan hutan lestari.
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	· Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
Provinsi Jawa Barat	· Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; · *Indonesia Game Academy;* · *Masterclass for Game Developers;* · *Women for Indonesian Game;* · Inkubasi startup gim; · Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; · Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; · Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; · Membangun unit sekolah baru SMA; · Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; · Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin; • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis; • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Melakukan penguatan kapasitas *Science Techno Park* (STP); • Mengembangkan *pilot project hub* ekosistem Iptekin di daerah; • Mengembangkan *pilot project hub* ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Pemberian bidang tanah melalui redistribusi tanah dengan *output* PBT redistribusi tanah, SK redistribusi tanah, dan SHAT redistribusi tanah; • Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dengan *output* data dan informasi IP4T; • Koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penandatangan Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	penataan aset dan akses dengan *output* GTRA; • Pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha subyek reforma agraria dengan *output* fasilitasi pendampingan usaha akses RA; • Identifikasi kebutuhan bantuan pemberdayaan untuk mengolah tanah dengan *output* akses RA; • Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitraan jaminan produk halal; • Irigasi Perpompaan (QW) – Pusat; • Daerah yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]; • Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru; • Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja.

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, 2025

Keselarasan Isu Strategis Jawa Barat Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026, dituangkan pada tabel sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 4.7
Keselarasan Isu Strategis Jawa Barat Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, serta Isu Strategi/Tanggapan dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 6. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 7. Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	1. Peningkatan Kualitas SDM: a. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil inklusif, dan merata. b. Penguatan pertahanan dan keamanan. c. SDM yang terampil, berdaya saing, dan memiliki karakter unggul.	1. Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. 2. Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	8. Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu. 9. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 10. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. 11. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 12. Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi 13. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. 14. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 15. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. 16. Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya 17. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/screening, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang		kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. 3. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. 4. Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga. 5. Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 18. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 19. Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting. 20. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima 21. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 22. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. 24. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 25. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.		berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif. 6. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 7. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. 8. Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM. 9. Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	26. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.		(i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi). 2. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. 3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada	1. Kedaulatan Pangan melalui swasembada pangan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif.	1. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan. 2. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. 3. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. 4. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. 5. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen 5. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 7. Penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand. 8. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 9. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global 10. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas		serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. 6. Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara. 7. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN. 8. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 11. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 12. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. 13. Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi 14. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. 15. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. 16. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM. 17. Penataan dan restrukturisasi BUMD.		pengembangan inovasi pembiayaan. 9. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi. 10. Swamsebada Pangan, melalui: (i) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (*blue food*); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi. 11. Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah. 12. Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	18. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. 19. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 20. Penguatan pengendalian inflasi daerah 21. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 22. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance* 23. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*) 24. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan		pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya. 13. Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru. 14. Memperluas pelaksanaan transformasi ekonomi hijau yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/*green jobs*; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari. 15. Penguatan faktor pendukung ekonomi digital untuk meningkatkan jumlah sumberdaya manusia digital dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 25. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 26. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 27. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai. 28. Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 29. Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. 30. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. 31. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 32. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.		dilaksanakan melalui (i) pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat; (ii) penguatan infrastruktur dan perlindungan keamanan data; (iii) riset dan pengembangan ekosistem ekonomi digital; serta (iv) pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis. 16. Penguatan ekonomi dan industri digital, serta sektor strategis lainnya yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan industri dan perangkat digital; (ii) pengembangan digitalisasi pemerintahan; (iii) pengembangan digitalisasi UMKM; (iv) pengembangan digitalisasi perdagangan; (v) pengembangan keuangan dan perbankan digital; (vi) pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan; (vii) pengembangan media digital; (viii) pengembangan digitalisasi transportasi dan pariwisata; (ix) pelayanan kesehatan digital; (x) pengembangan digitalisasi pendidikan; (xi) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; serta (xii) pengembangan digitalisasi sektor energi dan lingkungan. 17. Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital sebagai upaya untuk meningkatkan ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital, dapat dilaksanakan melalui (i) peningkatan infrastruktur pendukung layanan publik digital; (ii) peningkatan layanan masyarakat dan pemanfaatan ruang digital; (iii) pengembangan regulasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	33. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan 34. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 35. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan; (iv) riset dan pengembangan ekosistem digital; (v) pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *super platform*; serta (vi) pengembangan dan pemanfaatan *emerging technology*. 18. Pengembangan koperasi sektor produksi akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan usaha koperasi termasuk fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agro maritim; (ii) peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi terutama fasilitasi dan pembinaan manajemen koperasi; (iii) penguatan kapasitas SDM dan reputasi koperasi melalui layanan penyuluhan perkoperasian; serta (iv) penguatan sistem pengawasan koperasi terutama fasilitasi dan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP)/ Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS). 19. Penguatan ekosistem aplikasi dan gim sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sub sektor aplikasi dan gim akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan riset dan inovasi sub sektor aplikasi dan gim; (ii) pengembangan pendidikan sub sektor aplikasi dan gim; (iii) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sub sektor aplikasi dan gim; (iv) penyediaan infrastruktur subsektor aplikasi dan gim;

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
			(v) pengembangan sistem pemasaran sub sektor aplikasi dan gim; serta (vi) pengembangan insentif sub sektor aplikasi dan gim.
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan. 4. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan. 5. Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 6. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 7. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban *renewal* pada	1. Pemerataan Pembangunan: a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. b. Pembangunan dari desa dan dari bawah dan Pemberantasan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan. 2. Kedaulatan Energi, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Berkelanjutan: a. Kemandirian bangsa menuju swasembada energi dan air yang berkualitas dan berkelanjutan. b. Pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN.	1. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan dilaksanakan melalui (i) penanganan konektivitas jalan/jembatan lintas utama pulau; (ii) penanganan konektivitas jalan mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN); (iii) penanganan konektivitas jalan mendukung simpul transportasi dan/atau terintegrasi dengan *hinterland*; (iv) penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan; serta (v) penanganan jalan daerah. 2. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik. 3. Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik, dapat dilaksanakan melalui (i) pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antar pulau (*super grid*); (ii) pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. 8. Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan. 10. Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan 11. Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. 12. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan. 13. Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. 14. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan		pedesaan; serta (iii) digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. 4. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman. 5. Swasembada Energi, melalui: (i) peningkatan penyediaan energi; (ii) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; serta (iii) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih. 6. Swasembada Air, melalui: (i) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (ii) konservasi sumber daya air; (iii) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; (iv) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (*Citywide Inclusive Sanitation*); serta (v) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa. 7. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk pengurangan beban keluarga miskin dan rentan dengan Kartu Kesejahteraan dilaksanakan melalui (i) bantuan keluarga, pendidikan, dan kesehatan; (ii) bantuan energi dan pangan; serta (iii) layanan sosial dan bantuan kebencanaan. 8. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan melalui (i)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 15. Persiapan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intra regional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 16. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 17. "Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1. Cibadak-Pelabuhan Ratu; 2. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 3. Ciranjang-Padalarang; 4. Garut-Pameungpeuk; 5. Kalipucang-Pangandaran; 6. Cirebon-Indramayu; dan 7. Cirebon-Kuningan; 8. Kertajati-Indramayu; 9. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 10. Akses Pelabuhan Patimban. 18. Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan 19. Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.		penjangkauan kepesertaan aktif berbasis agen jaminan sosial dan komunitas disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial; (ii) pengembangan program Jaminan Sosial yang inklusif dan adaptif, mencakup perlindungan hari tua, perawatan jangka panjang, serta skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu; (iii) pengaturan keseimbangan iuran dan manfaat program Jaminan Sosial; (iv) penguatan tata kelola pelaksanaan program Jaminan Sosial, termasuk pengelolaan program Jaminan Sosial berbasis nomor induk kependudukan; serta (v) penguatan sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 9. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. 10. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	20. Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran. 21. Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang 22. Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey 23. Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari 24. Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. 25. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. 26. Pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. 27. Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *express way* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa." 28. Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. 29. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara		berkelanjutan dan inovatif. 11. Program 3 juta rumah melalui: a. Penyediaan perumahan terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dilaksanakan melalui (i) fasilitasi pembangunan rumah baru termasuk melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (ii) pengembangan perumahan dan permukiman melalui inisiasi pengembangan perumahan kooperatif; (iii) fasilitasi peningkatan kualitas rumah termasuk optimalisasi dana desa; serta (iv) penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak. b. Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu yang dilaksanakan melalui penyediaan hunian publik vertikal milik dan sewa, termasuk sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan melalui hunian terintegrasi dengan akses transportasi (*Transit Oriented Development*); serta revitalisasi rusun perumnas. c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). 30. Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 31. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air 32. Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. 33. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. 34. Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo). 35. Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya). 36. Penyiapan dan penetapan instrumen *circular economy* dalam pengelolaan sampah. 37. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. 38. Pengelolaan susut dan sisa pangan 39. Peningkatan pelayanan sistem irigasi		pembiayaan perumahan, termasuk restrukturisasi skema subsidi; (ii) fasilitasi dan penyaluran subsidi/bantuan kemudahan pembiayaan perumahan; (iii) fasilitasi kerja sama pembiayaan perumahan dengan berbagai instansi; serta (iv) penyiapan proyek kerja sama dan investasi perumahan. d. Penguatan ekosistem perumahan yang dilaksanakan melalui percepatan pembentukan kelembagaan Badan Percepatan Penyediaan Perumahan (BP3) serta inventarisasi lahan yang dioptimalkan. e. Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu yang dilaksanakan melalui penanganan permukiman kumuh terpadu skala kota (*urban renewal*) dan skala kawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	40. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 41. Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. 42. "Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1.Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis 2.Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang 3.Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4.Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5.Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6.Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung." 43. Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 44. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. 45. Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil *(isolated mini/micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 46. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 47. Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon. 48. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 49. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).		
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. 2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 3. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	Tata Kelola Pemerintahan: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 6. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan 7. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 8. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 9. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 10. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 11. Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.		penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2026	Arah Kebijakan RKP 2026
	12. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 13. Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi 14. Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas		

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Catatan:
Sumber perumusan isu strategis:
1. Permasalahan pembangunan dalam RPJMD;
2. Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD;
3. Arah kebijakan RPJMD; dan
4. Arah kebijakan RKP.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. **Prioritas 2**, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
3. **Prioritas 3**, yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. **Prioritas 4**, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

yang mencakup langkah-langkah strategis melalui 24 program prioritas dan 9 (sembilan) Langkah Membangun Jawa Barat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Prioritas 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
   a. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan;
   b. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional;
   c. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup;
   d. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
   e. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   f. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi;
   g. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat.

2. Program Prioritas 2 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
   a. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
   b. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
   c. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
   d. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan;
   e. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
   f. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah;
   g. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
   h. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen atau melalui tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

i. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan.

3. Program Prioritas 3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya
   a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
   b. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;
   c. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim;
   d. Program Pengurangan Risiko Bencana;
   e. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas).

4. Program Prioritas 4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*
   a. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
   b. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan;
   c. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital; dan
   d. Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk 9 (sembilan) Langkah Membangun Jabar sebagai berikut:

1. LANGKAH PERTAMA

Langkah Pertama yaitu **Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan**, dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa (*jalan leucir*), pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani jaringan listrik, serta penataan sanitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE atau melalui laman https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85 sesuai dengan petunjuk berikut
1D17AF9E85

lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, untuk mewujudkan Jabar ODF/BABS (*Open Defecation Free*/Bebas Buang Air Besar Sembarangan) serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.

2. LANGKAH KEDUA

Langkah Kedua yaitu **Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian**, dilaksanakan dengan melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya.

Langkah Kedua juga mendorong **terciptanya Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul** untuk memperkuat Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional. Langkah ini dilaksanakan melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta penggunaan alat pertanian modern dan tepat guna.

3. LANGKAH KETIGA

Langkah Ketiga yaitu **Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.**

Pengembangan Pendidikan Berkarakter dengan kurikulum pancawaluya disertai penguatan pendidikan budi pekerti dan agama yang didukung ketercukupan ruang kelas tingkat SD, SMP, SMA/SMK, serta pesantren dan madrasah guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan; pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* berkapasitas 1.000 siswa per sekolah dengan kurikulum *link and match* dunia kerja, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

vokasi untuk membentuk manager-manager baru di Jawa Barat; serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa Jawa Barat berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

Pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* diwujudkan melalui pembangunan SMK istimewa di kawasan industri bekerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai serta pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang salah satunya melalui beasiswa di perguruan tinggi dan politeknik berorientasi terapan. Program ini didampingi dengan pelatihan kewirausahaan dan penempatan kerja, untuk memastikan lulusan mampu menjadi manajer baik dalam usaha mandiri maupun perusahaan berskala nasional dan global.

Agenda pembangunan bidang pendidikan ini mencakup tiga fokus utama, yaitu: pengembangan pendidikan berkarakter, perluasan akses layanan pendidikan, dan penguatan akses lulusan ke dunia kerja. Pengembangan pendidikan berkarakter mencakup penerapan kurikulum berbasis keterampilan teknis lokal, vokasi ekologi, gerakan pembelajaran berbasis nilai pancawaluya, serta pelatihan integritas dan kedisiplinan siswa.

Program perluasan akses layanan pendidikan dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) untuk siswa SMA/SMK/SLB dan santri, serta beasiswa lanjutan bagi lulusan berprestasi ke jenjang pendidikan tinggi berorientasi terapan. Program ini juga meliputi penambahan ruang kelas baru dan pembangunan toilet bagi sekolah jenjang menengah yang membutuhkan, guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan proses belajar mengajar.

Dari aspek pemerataan, pembangunan sekolah baru diprioritaskan di 14 (empat belas) kecamatan yang belum memiliki sarana pendidikan jenjang SMA. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk usia sekolah di setiap wilayah secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah yang masih belum terjangkau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Scanner atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

4. LANGKAH KEEMPAT

Langkah Keempat yaitu **Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan**.

Pengembangan Lapangan Kerja Baru pada sektor industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui kemudahan perizinan, penyiapan tenaga kerja terampil berbasis penempatan, penguatan *link and match* industri besar dan industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini didukung juga dengan pengembangan wirausaha muda di berbagai bidang, termasuk *start-up*.

Upaya pengembangan lapangan kerja baru ini meliputi dorongan terhadap investasi di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan iklim kemitraan industri, serta mengembangkan ekosistem perwilayahan industri. Fokus pembangunan industri meliputi:

- Pemerataan dan pengembangan wilayah industri unggulan berdasarkan potensi lokal melalui pemetaan sektoral, peningkatan kawasan industri tematik, dan penguatan sentra IKM yang saling terintegrasi.
- Peningkatan kualitas industri berfokus pada peningkatan mutu bahan baku, pengembangan kapasitas SDM industri, adopsi teknologi industri ramah lingkungan, serta memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri.
- Meningkatkan Kemudahan Berusaha Sektor Industri dengan perbaikan layanan perizinan dan dokumen usaha industri secara digital, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat investasi industri dan menjamin kenyamanan berusaha.

Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk memperkuat rantai nilai tambah, menciptakan keterkaitan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar, serta mengembangkan sentra-sentra IKM unggulan.

Agenda pembangunan ini juga menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas, dengan fokus pada pengembangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebarujabar.pro.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pendidikan vokasi di jenjang SMK, Diploma, dan Sarjana yang diarahkan pada penempatan kerja dan penciptaan wirausaha baru.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, implementasi pembangunan bidang investasi difokuskan pada:

- Penetapan dan operasionalisasi peraturan daerah yang memberikan kemudahan investasi;
- Pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan kesiapan ruang investasi dan efisiensi distribusi barang serta jasa;
- Penciptaan ekosistem bisnis yang ramah dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, melalui:

- Standarisasi layanan jasa dan *amenitas* wisata; dan
- Pengembangan destinasi unggulan dengan melengkapi elemen atraksi buatan maupun budaya, aksesibilitas, paket wisata, aktivitas wisatawan, dan layanan pendukung.

Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada sektor-sektor unggulan Jawa Barat, seperti *fashion*, gim, kriya, dan kuliner. Penguatan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

1. Peningkatan akses pembelajaran digital untuk pelaku kreatif;
2. Pengembangan platform industri kreatif;
3. Penguatan basis data dan jaringan riset produk kreatif;
4. Perluasan akses pemasaran produk;
5. Aktivasi dan optimalisasi pusat kreasi;
6. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

5. LANGKAH KELIMA

Langkah Kelima yaitu **Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus serta pemberiaan beasiswa dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat**.

Penambahan layanan khusus meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya, termasuk penyediaan ambulans ICU dan ambulans transport, program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

dokter desa, serta pengembangan puskesmas rawat inap terutama di wilayah perbatasan provinsi, pengembangan layanan laboratorium kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, selain pemenuhan terhadap infrastruktur kesehatan secara beriringan perlu dilakukan pemenuhan dan pemerataan terhadap ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki strategi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, khususnya dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program beasiswa ini direncanakan dalam beberapa siklus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

6. LANGKAH KEENAM

Langkah keenam yaitu **Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan**. Penanganan *stunting* dan gizi buruk dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan asupan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi kepada ibu hamil, ibu menyusui (ASI Eksklusif), dan balita. Langkah ini sejalan dengan program prioritas nasional pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, terdapat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu Makanan Bergizi Gratis.

Pengembangan **Industri Pengobatan berbasis kearifan lingkungan**, peningkatan layanan kesehatan tradisional yang didukung dengan pengembangan industri obat-obat tradisional sebagai alternatif pengobatan.

7. LANGKAH KETUJUH

Langkah ketujuh yaitu **Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan**. Pemulihan kondisi lingkungan didukung oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau dengan mengunjungi tautan berikut https://sidebarujabar.prov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

pembangunan infrastruktur rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global. Langkah ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.

8. LANGKAH KEDELAPAN

Langkah kedelapan yaitu **Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)** dan pengolahan sampah menjadi energi lainnya. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri dilaksanakan secara terintegrasi sampai dengan tingkat Rumah Tangga (RT) yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dimulai dari hulu hingga ke hilir. Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan melalui upaya lainnya seperti daur ulang, 3R, dan pengolahan sampah menjadi energi. Dalam hal pengolahan sampah diarahkan untuk menjadi energi seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF), *Waste to Electricity* (WtE), *Waste to Hydrogen*, dan teknologi lainnya.

9. LANGKAH KESEMBILAN

Langkah Kesembilan yaitu **Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.** Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, serta guru agama dan guru ngaji guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintahan daerah sebagai bentuk perwujudan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan. Transformasi birokrasi berdampak tercermin dalam karakter birokrasi yang jujur, bersih, dan tulus melayani masyarakat.

Sandingan Program Prioritas dan 9 Langkah Membangun Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 4.8
Sandingan Program Prioritas dan 9 Langkap Membangun Jawa Barat

NO	PROGRAM PRIORITAS	9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT
1.	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	LANGKAH KELIMA: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.
2.	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional	
3.	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	LANGKAH KEENAM: Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
4.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
6.	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di perguruan-perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.
7.	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	
8.	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	LANGKAH KEENAM: Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
9.	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	
10.	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	LANGKAH KEDUA: Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya LANGKAH KEENAM: Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
11.	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	
12.	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	LANGKAH KETIGA:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS	9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT
13.	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat. LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
14.	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	
15.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
16.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	LANGKAH PERTAMA: Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).
17.	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	LANGKAH KETUJUH: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.
18.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	LANGKAH KEDELAPAN: Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).
19.	Program Pengurangan Risiko Bencana	LANGKAH KETUJUH: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.
20.	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	
21.	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	
22.	Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS	9 LANGKAH MEMBANGUN JAWA BARAT
23.	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	LANGKAH KESEMBILAN: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Keempat prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target		
			2024	2025	2026	2027
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,29	75,56	75,84
		Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,90	14,90	12,40	11,10
	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	74.79 - 74.85	75.13 - 75.22	75.48 - 75.60
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	56,70	57,13	57,57
	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	N/A	51,78	52,53	53,3
		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	49,51	50,01	50,26
		Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	N/A	3,02	3,08	3,14
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	9,24	9,52	9,64	9,75
		Harapan Lama Sekolah	12,80	12,87	12,94	12,98
	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,17*	63,36	65,63	67,6
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44*	69,71	70,61	71,29
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,458	0,457	0,448
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,51*	71,95	73,12	73,87
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,87 - 42,00	41,51 - 41,67	41,15 - 41,35
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	6,4	6,55	6,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau dengan mengunjungi tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target		
			2024	2025	2026	2027
lingkungan yang tidak eksploitatif	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,85	4.92	5.79	6.39
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	*Prevalence of Undernourishment (PoU)*	N/A	4,58	4,42	4,23
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	1,77	2,6	3,31
		Nilai Tukar Petani (NTP)	112,17	112-117	114-119	115-121
	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Belum Rilis	24,72	24,73	24,77
		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,05	3,5	3,79	3,97
	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	N/A	94.22	94.45	94.69
		Inklusi Keuangan	2,142*	1,444	1,475	1,500
		Kapasitas Fiskal Daerah	N/A	23,70	25,08	26,55
		Total Kredit/PDRB	N/A	22,81	22,58	22,36
	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	70,75	63,11	66,29	67,71
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,25	56,95	58,11	59,26
		Indeks Desa	Belum Rilis	77,46	79	80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,09	64,06*	64,31	64,56
		Persentase Penurunan Emisi GRK				
		a. Kumulatif	N/A	2,66	3,31	4,02
		b. Tahunan	N/A	9,27	10,63	12,46
		Indeks Risiko Bencana	114,15	109,18	108,3	107,44
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44
		Indeks Kesejahteraan Sosial	44,57	45,07	46,57	48,27
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good*	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	81,27	81,28	81,29	81,30
	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Provinsi	Belum Rilis	Tinggi (83,55)	83,79	89,02

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target		
			2024	2025	2026	2027
and Clean Governance	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	86,44	86,45	86,47	86,5

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2026, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan serta Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, dituangkan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Dokumen dapat diverifikasi pada laman berikut https://sidebarujabar.prov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 4.10
Keterkaitan Prioritas Pembanguan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.	1.Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.		Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta dan penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan.	
3. Masih rendahnya penerapan zero *new stunting* dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.			
4. Belum optimalnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.		Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.	
5. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.		Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	
		Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan penuntasan dan pencegahan *stunting*.	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	
		Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
		Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	
		Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	
		Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas	
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	
		Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	
		Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	
		Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi.	
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	
1. Masih rendahnya penerapan *link and match* industri kecil-industri besar.	2. *Green and Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ *stockyard* yang modern terintegrasi).	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau.		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong.		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	
5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis.		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	
6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan.		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*)	
7. Nilai investasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan.		Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	
8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	
9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong.		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
11. Masih rendahnya penerapan *circular economy*.		Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*.	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
		Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	
		Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai.	
		Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	
		Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	
		Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	
		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM.	
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.	3. Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Serta Keberlanjutan Penataan Ruang	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	
3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung.		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid *waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	
4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan.		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.	
5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah.		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	
6. Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah.		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	
7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni.		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban *renewal* pada area yang telah mengalami urban *decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	
		Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	
		Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	
		Persiapan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intra regional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	
		Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1.Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 2. Akses Pelabuhan Patimban. 3. Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) 4. Cabadak-Pelabuhan Ratu; 5. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 6. Ciranjang-Padalarang; 7. Garut-Pameungpeuk; 8. Kalipucang-Pangandaran; 9. Cirebon-Indramayu; dan 10. Cirebon-Kuningan; 11. Kertajati-Indramayu;	
		Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	
		Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	
		Reaktivasi layanan perkeretaapian di Jawa Barat terutama pada: 1. Layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang; 2. Layanan perkeretaapian Banjar-Pangandaran-Cijulang. 3. Layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari; 4. Layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; serta 5. Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Cibatu-Garut-Cikajang.	
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	
		Pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.	
		Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	
		Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	
		Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	
		Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	
		Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	
		Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon	
		Dukungan peningkatan pelayanan sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah regional	
		Penyiapan dan penetapan instrumen *circular economy* dalam pengelolaan sampah.	
		Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalu pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis; 2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.	
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	
		Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/*micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
1. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal.	4. Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.	
2. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.		Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	
3. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	
4. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian.		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
5. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	
		Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	
		Dukungan peningkatan pelayanan sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah regional	
		Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi.	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*
2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	
3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.		kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	
4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi.		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur.		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
6. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas.		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
7. Belum optimalnya penguatan pengawasan.		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	
8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital *skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2026)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4.2.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2026

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
Permasalahan Sumber Daya Manusia:	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**
1.Evaluasi kebijakan PPDB dan zonasi pendidikan	
2. Pembangunan Sekolah: SMA/SMK Negeri/Madrasah/Pesantren (khususnya di daerah yang belum memiliki unit sekolah tersebut)	
3. Pemberian bantuan pendidikan siswa tidak mampu	
4. Evaluasi kebijakan penahanan ijazah bagi siswa yang menunggak	
5. Implementasi/evaluasi kebijakan pengawasan administrasi sekolah	
6. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan guru honorer/non-ASN, guru pesantren, guru PAUD dsb	
7. Pemberian bantuan/insentif bagi sekolah keagamaan (termasuk operasional bagi guru madrasah/sejenisnya)	
8. Program pendidikan gratis	
9. Perbaikan gedung sekolah	
10. Pemberian bantuan bagi sekolah swasta	
11. Pembangunan kampus negeri (di Bekasi)	
12. Program Indonesia Pintar diberikan kepada sekolah keagamaan	
13. Pemberantasan Pungli di lingkungan sekolah	
14. Dana Pendidikan untuk anak berprestasi	
15. Penanganan *stunting*	
16. Pemberian bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk kesehatan masyarakat (khususnya masyarakat miskin)	
17. Pemberian & Peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan / Jaminan Kesehatan	
18. Pembangunan atau Perbaikan sarana prasarana puskesmas pembantu	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
19. Pembangunan RSUD dan sarprasnya	
20. Penyediaan fasilitas kesehatan kepada bayi, anak, ibu hamil, dan lansia	
21.Pendistribusian insentif bagi petugas program *stunting* secara tepat waktu	
22. Imunisasi CA Serviks	
23. Pemberian insentif *Puskesos*	
24. Pemberian bantuan sarana dan prasarana komunikasi (HT) untuk organisasi kepemudaan	
25. Penanaman nilai-nilai moral Pancasila di sekolah-sekolah seluruh Jawa Barat	
26. Pemberian bantuan untuk organisasi kemasyarakatan	
27. Program pemberdayaan pemuda (termasuk pelatihan perekonomian/lainnya bagi generasi milenial, generasi putus sekolah, dsb)	
28. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar kampung (Kota Bandung)	
29. Penyelenggaraan kejuaraan *single* dan *multi event* tingkat provinsi	
30. Pencegahan tawuran antar pelajar	
31. Keamanan Lingkungan	
32. Pemberantasan Narkoba	
33. Bantuan untuk anak berkebutuhan khusus	
34. Penyediaan Fasilitas Ruang Edukasi Rescue & *Safety Equipment*	
35.Pemberdayaan Kader PKK	
36. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung Kader PKK	
37. Perlindungan Anak terkait banyaknya berita pelecehan seksual dari pihak yang tidak bertanggung jawab	
Permasalahan Ekonomi:	**Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif**
1. Penguatan pengawasan terhadap bantuan dana desa	
2. Peningkatan pelayanan pajak	
3. Program keringanan biaya pajak dan mutasi balik nama kendaraan bermotor	
4. Sosialisasi dan stimulus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pemanfaatan sarana pariwisata	
5. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	
6. Pengalokasian bantuan keuangan Provinsi kepada Kab/Kota/Desa secara merata dan berkesinambungan	
7. Peningkatan alokasi anggaran untuk hibah dan bantuan sosial	
8. Kebijakan/program kredit/pembiayaan bagi petani dan nelayan	
9. Kesejahteraan Masyarakat	
10. Pelibatan peran masyarakat sekitar dalam aktivitas BUMD	
11. Peningkatan jumlah dan volume bantuan keagamaan dengan didukung pendataan dari pemerintah paling bawah (RT/RW)	
12. Peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat	
16. Kesejahteraan tokoh/pemuka agama/ organisasi keagamaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Verifikasi Dokumen pada laman berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
19. Eksekusi Dana Abadi	
2.Program Subsidi Listrik Desa	
2. Pengembangan perikanan (budidaya ikan lele, ikan patin, ikan nila)	
6. Pemberian bantuan (kesehatan, konsumsi, dsb) untuk korban bencana	
3.Pemberantasan Bank Emok	
2. Program pemberdayaan UMKM	
3. Pembangunan galeri UMKM	
4. Pengadaan Koperasi Pedagang sebagai modal usaha	
5. Peningkatan standar pelatihan untuk koperasi dan UMKM (contoh: pelatihan pengembangan hasil produksi pertanian)	
6. Pembangunan tempat pameran hasil karya UMKM	
7. Penyederhanaan, pembentukan dan fasilitas perizinan bagi pengusaha (mulai kelurahan s.d. provinsi)	
10. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok Usaha Bersama (KUBE))	
11. Program Pinjaman Tanpa Bunga	
12. Pemberdayaan Ekonomi Umat	
13. Permodalan UMKM	
14.Pengendalian harga kebutuhan pokok (terutama beras)	
15. Pengendalian harga gabah	
16. Ketahanan pangan (bagi masyarakat, ibu, lainnya)	
17. Pengembangan peternakan (di antaranya pengadaan bibit ternak kambing, domba, sapi, itik, dsb, bantuan program)	
18. Pengembangan pertanian (pengadaan alsintan, alat pertanian, bibit dan pupuk, dsb)	
19. Pemberdayaan kelompok tani/ternak	
20. Bantuan bagi petani gagal panen	
21. Pemberian stimulus berupa penyediaan pabrik pakan ikan air tawar dan pabrik pengelolaan pasca panen	
22. Pemerataan akses kartu tani untuk petani mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi	
23. Penyediaan PPL yang kapabel dan berkelanjutan	
24. Penyediaan pupuk dengan harga wajar dan penataan jalur distribusi pupuk	
25. Program agrobisnis terintegrasi (mulai dari pembukaan lahan s.d. pemasaran hasil pertanian)	
26. Pembangunan Green House	
27. Perevisian solar bagi para petani	
28. Rehabilitasi lumbung	
29. Kesejahteraan Petani (Termasuk Modal usaha untuk petani)	
30. permodalan pertanian	
31. Fasilitasi hasil perkebunan agar dapat diserap oleh industri besar	
32. Pelatihan Fotografi Kerajinan(Menenun, membuat furniture & Aksesoris	
33. Penyediaan fasilitasi sertifikat halal	
34. Program padat karya agar dapat menyerap tenaga kerja	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
35. Kemudahan akses bantuan permodalan bagi pedagang & pemula	
36. Pembangunan pasar desa	
37. Revitalisasi pasar daerah	
38. Program pendidikan dan pelatihan kerja untuk anak-anak jalanan	
39. Akses pelatihan keterampilan (teknologi, wirausaha, dsb) untuk peningkatan daya saing masyarakat di dunia kerja	
40. Penyediaan & informasi lapangan pekerjaan (termasuk untuk lulusan SMA/SMK)	
41. Edukasi pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan	
Permasalahan Infrastruktur:	**Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**
1. Pembangunan, perbaikan, dan legalitas sarana dan prasarana ibadah dan asrama (termasuk sosialisasi cara pengajuan)	
2. Akselerasi implementasi DOB Bogor Timur	
3. Penyediaan/instalasi SPLU (Bandung)	
4. Pembangunan gedung kesenian di daerah	
5. Rehabilitasi GOR Desa	
6. Pembangunan & Peningkatan Lapangan Olahraga	
7. Pembangunan/perbaikan infrastruktur sarana olahraga (*jogging track*, peralatan olahraga, dsb)	
8. Sarana Prasarana Penunjang Taruna	
9. Pembangunan sarana dan prasarana untuk para *gamers* atau pemain *esport*	
10. Bantuan sarana dan prasarana GOR	
11.Peningkatan dan perluasan akses internet	
12. Pemberian bantuan sarana desa digital	
13.Penyediaan hotline khusu pengaduan warga	
14. Penyediaan dan optimalisasi pengelolaan sampah (di antaranya TPS 3R, incinerator sampah, sarpras penunjang pengolahan sampah)	
15. Penyediaan dan peningkatan kualitas air bersih	
16. Pengadaan Biopori	
17. Proteksi sungai/Kali dan lingkungan hidup	
18. Akselerasi Zero Open *Defecation Free* (ODF)	
19. Edukasi pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan	
20. Pengembangan Desa Wisata (termasuk peningkatan alokasi dana stimulus untuk desa wisata)	
21. Kemudahan akses pariwisata (di antaranya pelebaran dan perbaikan jalan menuju tempat wisata)	
22. Pengembangan pariwisata berbasis olahraga Jawa Barat	
23. Potensi wisata situ dan wisata arung jeram	
24. Pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
25. Pembangunan sumur bor	
26. Pembangunan & Peningkatan akses air bersih (misal: Pembangunan bak penampungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
air bersih, bantuan pompanisasi dan pipanisasi,dsb)	
27. Penanganan TPU longsor	
28. Penataan sanitasi	
29. Pembangunan/rehabilitasi drainase permukiman berwawasan lingkungan	
30. Pembangunan Perpustakaan Desa	
31.Pembangunan Gedung/Taman Baca	
32. Pembangunan perpustakaan skala Kabupaten	
33. Pemasangan PJU	
34. Implementasi kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat	
35. Pemasangan rambu lalu lintas, dsb	
36. Pemasangan CCTV	
Permasalahan Sosial:	
1. Kemudahan dalam mengakses informasi BPJS Keternagakerjaan	
2. Pembangunan Fasilitas yang ramah difabel	
3. Pemberian insentif Puskesos	
4. Penyediaan rumah singgah untuk ODHA	
5. Rehabilitasi ODGJ	
6. Pelatihan atau aktivitas kepada para usia lanjut	
7. Pembangunan pelayanan/rumah singgah panti jompo	
8. Pelatihan atau aktivitas kepada para usia lanjut	
9. Pemberian bantuan permodalan bagi penyandang disabilitas	
10. Pembangunan pelayanan/rumah singgah panti jompo	
11. Peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat	
	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*
Permasalahan Tata Kelola:	
1. Peningkatan Kompetensi SDM aparatur	
2. Penambahan penghasilan bagi tenaga honorer dan kontrak	
3. Pembangunan budaya kinerja	
4. Duplikasi kebijakan yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan	
5. Optimalisasi pelayanan administrasi masyarakat (di antaranya pembuatan KTP, KK, dsb)	
6. Inventarisasi kebudayaan daerah	
7. Fasilitasi lomba kreativitas seni tradisional sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional	
8. Pelatihan bagi aparatur desa/lembaga sosial masyarakat tentang mekanisme SIPD	

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Scanner atau melalui tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

4.2.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP 2026

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2026 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Sasaran PN 1 yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan; (b) Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal; (c) Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih; (d) Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi; (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; (f) Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; dan (g) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (b) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB; (c) Meningkatnya nilai tambah pariwisata; (d) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Scanner atau melalui tautan berikut https://sidebarujabar.pray.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

dan (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.

4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu mendorong: (a) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (b) Kesehatan untuk Semua; (c) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (d) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; dan (e) Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga.
5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan; (b) Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; dan (c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan; (b) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (c) Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan (d) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (b) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani; (c) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Perencanaan Pembangunan Daerah atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

penyelundupan; (e) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan; (g) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi; dan (h) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan (b) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional serta Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Verifikasi Dokumen Elektronik pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 4.12
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		**P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance**	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	S15. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Provinsi
	2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga		
	3. Indeks Kemerdekaan Pers		
	4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
	5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		
	6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis		
	7. Indeks Demokrasi Indonesia		
	8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		
	10. Indeks Hak Asasi Manusia		
	11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
	12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan		
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul** **P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif** **P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (*Military Capability*)	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	-
	2. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)		-
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	4. Global *Cybersecurity Index*		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional		-
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	7. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan		-
	8. Meningkatkan Produksi Pangan		-
	9. Berkurangnya Impor Pangan		-
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani		Nilai Tukar Petani
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan
	12. Pasokan Energi Primer		
	13. Konsumsi Energi Final per Kapita		
	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
	15. Intensitas Energi Primer		
	16. Kapasitas Tampungan Air per Kapita		Indeks Kualitas Infrastruktur
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan		
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman		
	19. Menurunnya luas lahan kritis		
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman		
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka		
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan
	23. Kontribusi PDB Syariah		
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)		Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau		
	31. Tingkat Input Material Sirkular		
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	33. Perlindungan Kawasan Perairan		
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru		
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		**P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif** **P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur
	2. Waktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)		
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)		
	4. On Time Performance Udara (%)		
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)		
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)		
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)		
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional		
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)		
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)		Kapasitas Fiskal Daerah
	13. Aset Asuransi/PDB (%)		
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
	15. Total Kredit/PDB (%)		Total Kredit/PDRB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	16. Inklusi Keuangan (%)		Inklusi Keuangan
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
	22. Rasio Kewirausahaan (%)		
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah
	3. Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains		
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03 a. Literasi Membaca b. Numerasi		
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)		
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
	10. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)		
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun		
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
S16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender
	20. Indeks Pembangunan Gender		
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	S14. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games		
	29. Peringkat pada Asian Games		
	30. Peringkat pada Asian Para Games		
	31. Peringkat pada SEA Games		
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games		
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		**P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif**	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)		
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta)		
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)		
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5. Biaya Logistik (%PDB)	S7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)		
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)		
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)		
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)		
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		**P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
	2. Proporsi penduduk kelas menengah		
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal		
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)		Indeks Desa
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	
		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat
	2. Indeks Pembangunan Hukum		
	3. Indeks Materi Hukum		
	4. Indeks Persepsi Korupsi		
	5. Indeks Integritas Nasional		
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik	S16. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
	8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri		
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. *Clearance rate* tindak pidana judi		
	11. *Clearance rate* tindak pidana penyelundupan		
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Kapasitas Fiskal Daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)		
	14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta	15. Tingkat Inflasi (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul** **P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
	3. Indeks Layanan Keagamaan		
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian dan kesehatan)		
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana		

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Ket. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah menggunakan data RPJMD Tahun 2025-2029

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

4.2.3 Program Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat. Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 secara lengkap disajikan pada Lampiran II.

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	LANGKAH KELIMA: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
				3	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				4	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				5	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional		6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	LANGKAH KEENAM: Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	-	8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				9	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				10	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				11	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				13	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				14	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				15	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				16	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	17	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				18	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	19	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				20	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				21	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
				22	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				23	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan
				24	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				25	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				26	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	-	27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				28	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				31	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				32	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				33	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				35	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				37	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	LANGKAH KEENAM: Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	39	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	-	42	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				43	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				44	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				45	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				46	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				47	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
				48	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	LANGKAH KEDUA: Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya	49	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (DKPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				52	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				53	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				54	Program Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Prasarana Pertanian (DKPP)	Pangan dan Peternakan
				55	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				56	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				57	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			LANGKAH KEENAM: Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	58	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				59	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				60	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				61	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				62	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
				63	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				64	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				65	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				66	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				67	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				68	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	-	69	Program Penyuluhan Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				70	Program Penyuluhan Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				71	Program Penyuluhan Pertanian (DKPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Peningkatan dan pemerataan investasi	LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan	72	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				73	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan			Terpadu Satu Pintu
				74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	75	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				76	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				77	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah		78	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				79	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				80	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				81	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				82	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				83	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				84	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				85	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				86	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				87	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				88	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
				89	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis		90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kearifan Lingkungan		92	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				93	Program Perfilman Nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				94	Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	-	95	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				96	Program BUMD Sehat	Sekretariat Daerah
				97	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3.	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	LANGKAH PERTAMA: Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open *Defecation Free*/bebas buang air besar sembarangan).	98	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				99	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				101	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				102	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				103	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
				104	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Permukiman
				105	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				106	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				107	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				108	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				119	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman
				110	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				111	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				112	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				113	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				114	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				115	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				116	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				117	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				118	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				129	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				120	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air
				121	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air
				122	Program Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Permukiman
				123	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Permukiman
				124	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				125	Program Survei, Pengukuran dan Pemerataan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				126	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				127	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Dinas Perumahan dan Permukiman
				128	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				129	Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	LANGKAH KETUJUH: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki	130	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				131	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				132	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.			Masyarakat dan Desa
				133	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim		134	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				136	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				137	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				138	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				139	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				140	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
				141	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				142	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
				143	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
				144	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Kehutanan
				145	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				146	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				147	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				148	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			LANGKAH KEDELAPAN: Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik	149	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
				150	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tenaga Sampah (PLTS)."	151	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengurangan Risiko Bencana	-	152	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				153	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				154	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	-	155	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				156	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				157	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				158	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
				159	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
				160	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
4.	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-	161	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				162	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	-	163	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	LANGKAH KESEMBILAN: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	164	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				165	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				166	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				167	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
				168	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				169	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				170	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						dan Kearsipan Daerah
				171	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				172	Program Akreditasi dan Sertifikasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				173	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				174	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
				175	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
				176	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
				177	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
				178	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				179	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
				180	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				181	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				182	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				183	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				184	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				185	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				186	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				187	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
				188	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				189	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				190	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						dan Pencatatan Sipil
				191	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				192	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
				193	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				194	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
				195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

4.2.3.1 Penjabaran Prioritas pembangunan ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 ke dalam program prioritas dan program pembangunan daerah, disertai indikator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, dengan total pagu anggaran sebesar Rp25.302.756.902.177.-, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.14 sampai dengan Tabel 4.17 berikut.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 4.14
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	S1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,56	P1	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	L5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	70,37	489.450.572	Dinas Kesehatan
											2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	Rasio	5,3:1.000	23.048.714.755	Dinas Kesehatan
								P2	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (IUP)	Angka	852	787.982.235.091	Dinas Kesehatan
													2	Angka Kematian Balita	Angka	14		Dinas Kesehatan
				b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	17,86	P3	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	L6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan			3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	17,86		Dinas Kesehatan
											4	Program Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terimplementasi dengan Baik	Persen	100	88.146.902.648	Sekretariat Daerah
													2	Persentase kebijakan perlindungan dan kebebasan	Persen	80		Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														beragama yang terimplementasi dengan baik				
		S2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	a	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	75.13 - 75.22	P4	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		5	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan beragama	Persen	439	4.978.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	1.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											7	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi	Persen	43	1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				b	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55.29 - 55.33				8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan			658.559.444	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
											9	Program Pengelolaan Permuseuman	1	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi			3.252.480.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
											10	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase Pengelolaan Warisan Budaya			8.424.040.556	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		S3	Terbentuknya individu Berintegritas	a	Proporsi Penduduk yang Merasa	Persen	52,53	P5	Program Peningkatan Ketahanan		11	Program Peningkatan Ketenteraman	1	Persentase Penanganan Penegakan	Persen	80	19.625.709.900	Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
			dan Taat Hukum		Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya				Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			dan Ketertiban Umum		Perda dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan				
				b	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	50,01 -74,51						2	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	90		Satuan Polisi Pamong Praja
				c	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	3,08						3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	98,3		Satuan Polisi Pamong Praja
													4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang mendapatkan Pelatihan	Persen	92		Satuan Polisi Pamong Praja
		S4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	a	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	9,64 - 9,66	P6	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi		12	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	Indeks pemerataan guru	Persen	0,054861111	2.664.335.883	Dinas Pendidikan
													2	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	42.34.00		Dinas Pendidikan
				b	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88 - 12,96			LENGKAH KATILU Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan	13	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB	Persen	00.06	4.936.142.888.616	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.			2	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB	Nilai	67.19.00		Dinas Pendidikan
													3	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB	Nilai	69.01.00		Dinas Pendidikan
													4	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB	Nilai	69.65		Dinas Pendidikan
													5	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB	Nilai	65.12.00		Dinas Pendidikan
													6	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB	Nilai	72.22.00		Dinas Pendidikan
													7	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	84.31.00		Dinas Pendidikan
													8	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	82.16.00		Dinas Pendidikan
											14	Program Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Persen	27	1.071.578.523	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
													2	Persentase Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Persen	89		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
													3	Tingkat Kunjungan ke Perpustakaan	Persen	94,95		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													4	Persentase Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Persen	75		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											15	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	40	199.995.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		S5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	a	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	65,63	P7	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat		16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	0,72	1.504.009.540	Dinas Pemuda dan Olahraga
													2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan	Persen	73,46		Dinas Pemuda dan Olahraga
													3	Angka Pemuda aktif mengikuti organisasi	Pon	1,83		Dinas Pemuda dan Olahraga
													4	Angka Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	Poin	3,94		Dinas Pemuda dan Olahraga
											17	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	25	55.014.052.479	Dinas Pemuda dan Olahraga
													2	Persentase Peningkatan Masyarakat aktif Berolahraga	Persen	7,5		Dinas Pemuda dan Olahraga
													3	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan	Persen	88.75		Dinas Pemuda dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													4	Persentase atlet yang mendapatkan penghargaan sesuai standar	Persen	100		Dinas Pemuda dan Olahraga
											18	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	16,96	50.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				b	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	70,61				19	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	64,34	1.542.525.401	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											20	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun	Persen	4,78	2.077.316.994	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											21	Program Pengendalian Penduduk	1	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan	Persen	100	123.465.340	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan	Persen	46,67	167.522.011	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														untuk Standardisasi di Jawa Barat				
				c	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,317361111				23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	100	1.261.498.630	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											24	Program Perlindungan Perempuan	1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	1,67	666.906.258	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
													2	Persentase Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											25	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	100	325.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				d	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	73,12				26	Program Perlindungan Khusus Anak	1	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0,26	567.930.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													2	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak	Persen	100		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	100	410.357.496	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
																Total Pagu	**5.943.295.475.137**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.15
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	S6	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	a	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Poin	41,39	P8	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	L6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	1211	11.082.542.463	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam	Pelaku Usaha	40		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan	Pelaku Usaha	120		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha Industri	Persen	>50	174.888.802	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				b	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	6.55				3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	Persentase Peningkatan Industri yang masuk SIINAS	Persen	11	146.700.690	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		S7	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	a	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	5,51	P9	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri		4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Persen	6	15.735.071.868	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											5	Program Standardisasi	1	Persentase penanganan	Persen	90	6.764.006.117	Dinas Perindustria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
												Dan Perlindungan Konsumen		pengaduan konsumen				n dan Perdagangan
													2	Persentase barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	77		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													3	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	73		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													4	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Poin	4-5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													5	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin	4-5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													6	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektronika Karawang	Poin	4-5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													7	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap	Poin	4-5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
													pelayanan UPTD BPSMB Air Keramik dan Tabung Gas Bogor					
											6	Program Pengembangan Ekspor	1	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Milyar USD	10,54	1.806.890.127	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri	Persen	25	862.619.720	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi	Persen	6,25	1.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan perdagangan	Persen	100	354.166.344	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,31	2.760.977.941	Sekretariat Daerah
											11	Program Pengembangan UMKM	1	Persentase UMKM Binaan yang Meningkat Omzet Usahanya	Persen	14	32.500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		S8	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk	a	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Poin	4,42	P10	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung	L2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui	12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Persentase peningkatan prasarana peternakan			80.018.206.707	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				b	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,	Persen	2,6						2	Luas Panen Tanaman Pangan	Persen	11		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
		swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kehutanan, dan Perikanan			Ketahanan Pangan	konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.		3 Luas Panen Tanaman Hortikultura	Persen	25		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									4 Indeks Pertanaman (IP)	Persen	11,6		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
							L6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.		5 Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									6 Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									8 Persentase pengembangan jalan produksi perkebunan yang berfungsi	Persen	3,98	9.380.510.000	Dinas Perkebunan
									9 Persentase poktan yang meningkatkan produktivitas olahannya	Persen	38,89	4.080.058.000	Dinas Perkebunan
									10 Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan	Persen	9,60	8.895.743.375	Dinas Perkebunan
									11 Persentase Poktan yang produktif mendiversifikasi produk perkebunan	Persen	39,53	5.450.778.176	Dinas Perkebunan
									12 Persentase benih	Persen	33,20	5.450.778.176	Dinas Perkebunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
														perkebunan yang bersertifikat				
													13	Persentase Pengguna Benih yang terlayani kebutuhan benih bermutu	Persen	100	7.241.422.100	Dinas Perkebunan
											13	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Persentase Luas Lahan yang Teramankan dari Gangguan OPT/DPI	Persen	98,50	32.890.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
													2	Persentase luas lahan perkebunan terdampak perubahan iklim yang tertangani	Persen	4,57	4.528.910.169	Dinas Perkebunan
													3	Rasio penanganan serangan OPT Perkebunan	Angka	75	2.684.837.095	Dinas Perkebunan
											14	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Perkebunan Besar yang memenuhi ketentuan izin dan meningkat kinerjanya	Persen	28,95	150.000.000	Dinas Perkebunan
													2	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	100		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
											15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Persentase masyarakat terbina yang menerapkan rencana tindak lanjut hasil pembinaan konsumsi pangan			3.182.772.905	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
													2	Persentase Cadangan Pangan				Dinas Ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
																		Pangan dan Peternakan
											16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			1.294.436.714	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
											17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase PSAT Pre Market yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			650.954.650	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
													2	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang diintervensi				Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
											18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular			8.259.376.154	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
											19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Jumlah produksi perikanan budidaya			34.207.704.617	Dinas Kelautan dan Perikanan
											20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap			44.928.561.384	Dinas Kelautan dan Perikanan
											21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Angka Konsumsi Ikan			1.180.221.871	Dinas Kelautan dan Perikanan
													2	Persentase produk perikanan yang sesuai standar mutu dan keamanan				Dinas Kelautan dan Perikanan
											22	Program Pengelolaan Hutan					11.027.395.970	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
											23	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan			7.873.707.545	Dinas Kelautan dan Perikanan
											24	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Pelaku Usaha usaha budidaya, Perikanan Tangkap, dan Pengolahan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			2.608.528.072	Dinas Kelautan dan Perikanan
													2	Persentase Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku				Dinas Kelautan dan Perikanan
				c	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	114-119	P11	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan		25	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persen	90	17.765.681.766	Dinas Perkebunan
													2	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	22.73		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
													3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai	89.8		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
													4	Persentase Pelaku Usaha				Dinas Ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
														Peternakan yang Aktif				Pangan dan Peternakan
		S9	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	a	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	23,84 - 24,73	P12	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	L4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan	26	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Proyek	100000	1.930.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											27	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP	Persen	100	616.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Meratanya Sebaran Potensi Investasi di Jawa Barat	Izin	500000	4.665.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											29	Program Promosi Penanaman Modal	1	Jumlah Investor yang berminat untuk Berinvestasi	Calon Investor	12	1.845.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											30	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	Persen	100	2.063.988.015	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				b	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,79	P13	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	L3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan	31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	51,85	24.590.484	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
											32	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	16.381.975.765	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
											33	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri.	Persen	57,72	6.287.616.259	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
										dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.			2	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
											34	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	20,15	1.744.197.792	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
											35	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi	Persen	100	2.165.200.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
											36	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	17	1,923,541,584	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
											37	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persen	35	555,200,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
											38	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	100	10.547.351.896	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
											39	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persen	78	7.962.240.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
													2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persen	10,88	4.257.270.632	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
											40	Program Hubungan Industrial	1	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	60	4.436.537.813	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
											41	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	1	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Persen	100	5.467.066.408	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
												Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	2	Persentase UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pemerintah Daerah	Persen	30	59.843.901.856	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		S10	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	a	Tingkat Inflasi	Persen	3,12 - 3,77	P14	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD		42	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Return on Assets (ROA) BUMD			7.629.149.800	Sekretariat Daerah
				b	Inklusi Keuangan	Persen	94.45											
				c	Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1.69				43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Rasio		33.569.103.406	Badan Pendapatan Daerah
				d	Total Kredit/PDRB	Persen	33,44-33,96						2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen			Badan Pendapatan Daerah
		S11	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	a	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	22,58	P15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	L4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan	44	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar			5.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				b	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	3,21-3,46				45	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			2.100.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
											46	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan			600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
											47	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI			900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
																Total Pagu		**422.227.425.005**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.16
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	S12	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	a	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	66,29	P16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	L1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).	1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Persentase Jalan Terbangun/ Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis	Persen	100	2.374.465.488.415	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				b	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	58,11			L2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan			2	Persentase rekomendasi hasil survey kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													3	Persentase jalan terbangun yang menggunakan material	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										pompa bertenaga surya.				lulus uji pembanding				
													4	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD I	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													5	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD II	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													6	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD III	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													7	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD IV	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													8	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD V	Persen	100		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													9	Persentase panjang jalan	Persen	100		Dinas Bina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD VI				Marga dan Penataan Ruang
											2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur	Persen	15,69	3.625.523.420	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
											3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Tingkat sinkronisasi pemanfaatan ruang	Persen	24.60	23.100.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													2	Tingkat sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	30.80		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
													3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Persen	7,00		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
											4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase Konektivitas Transportasi Darat	Persen	94,73	211.631.163.682	Dinas Perhubungan
													2	Persentase Daerah Rawan Kecelakaan dan Kemacetan yang Ditangani	Persen	63,81		Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													3	Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Sesuai Ketentuan	Persen	100		Dinas Perhubungan
													4	IKM Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen	91.25		Dinas Perhubungan
													5	IKM Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen	92		Dinas Perhubungan
													6	IKM Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen	84.6		Dinas Perhubungan
													7	IKM Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Persen	96.83		Dinas Perhubungan
													8	Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat	Persen	6		Dinas Perhubungan
											5	Program Pengelolaan Pelayaran	1	Persentase Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Persen	92,86	11.000.000.088	Dinas Perhubungan
													2	IKM Layanan UPTD PP LLASDP	Persen	90.45		Dinas Perhubungan
													3	Persentase persyaratan pengelolaan pelabuhan laut yang terpenuhi	Persen	60,42		Dinas Perhubungan
													4	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi	Persen	2		Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Laut dan ASDP				
											6	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	Persentase Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat yang Dimanfaatkan	Persen	30,95	2.800.000.000	Dinas Perhubungan
														Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api	Persen	6		Dinas Perhubungan
											7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					2.700.000.000	
											8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	28,13	20.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum	Persen	100	250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Curah Lintas Kab/Kota				
											10	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	1	Prosentase Invetarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	50.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											11	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	Persen	100	50.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											12	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Persentase Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	100	110.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											13	Program Kawasan Permukiman	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang telah Ditangani	Persen	51,83	39.412.400.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											14	Program Pengembangan Permukiman	1	Persentase Terbangunnya Infrastruktur di Kawasan Strategis Provinsi	Persen	20	200.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU	Persen	40	125.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											16	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah	1	Masyarakat Mendapatkan Redistribusi Tanah dan	Persen	100	500.000.000	Dinas Perumahan dan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
												kelebihan maksimum dan tanah absentee		Penataan Akses dari BPN				Permukiman
											17	Program Penatagunaan Tanah	1	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	50.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	100	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											19	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Persentase pengembang tersertifikasi	Persen	1,43	50.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											20	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	11.062.793.970	Dinas Perumahan dan Permukiman
											21	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	100	25.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
											22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1	Persentase Dokumen Perencanaan	Persen		296.346.242.042	Dinas Sumber Daya Air

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Teknik Irigasi yang berkualitas sesuai standar				
													2	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Irigasi yang berfungsi sesuai ketentuan teknis operasional	Persen			Dinas Sumber Daya Air
													3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS. Ciliwung - Cisadane	Poin			Dinas Sumber Daya Air
													4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 27 Daerah Irigasi pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Poin			Dinas Sumber Daya Air
													5	(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 6 Daerah Irigasi pada WS. Ciwulan-Cilaki	Poin			Dinas Sumber Daya Air
													6	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS. Citanduy	Poin			Dinas Sumber Daya Air
													7	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin			Dinas Sumber Daya Air

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													(IKSI) di 34 Daerah Irigasi pada WS. Citarum					
													8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 12 Daerah Irigasi pada WS. Cisadea - Cibareno)	Poin			Dinas Sumber Daya Air
											23	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Persentase Infrastruktur Irigasi yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen	100	3.625.523.420	Dinas Sumber Daya Air
													2	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen	100		Dinas Sumber Daya Air
											24	Program Penetapan Tanah Ulayat	1	Persentase Tanah Ulayat yang terinventarisir	Persen	100	450.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				c	Indeks Desa	Poin	79	P17	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	L9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	26	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase peningkatan nilai indeks komposit sosial desa di kabupaten/kota	Persen	78,00	11.879.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											27	Program Penataan Desa	1	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten/kota	Persen	82,00	3.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
											28	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1	Persentase peningkatan nilai indeks komposit ekonomi desa di kabupaten/kota	Persen	72	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase peningkatan nilai indeks komposit sosial desa di kabupaten/kota	Persen	78	11.879.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											30	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	1	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisir di Kabupaten/Kota	Persen	100		Dinas Lingkungan Hidup
				d	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	64,31	P18	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	L7. Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat	31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	2.019.391.254	Dinas Lingkungan Hidup
													2	Persentase Pembinaan Terhadap Kebijakan dan/atau Produk hukum	Persen	100		Dinas Lingkungan Hidup
											32	Program Pengendalian Pencemaran	1	Penurunan konsentrasi	mg/L	24,73	16.625.289.953	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										berbasis lingkungan perkotaan.		dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Parameter COD				
													2	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	51.76		Dinas Lingkungan Hidup
													3	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	100		Dinas Lingkungan Hidup
													4	Persentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina	Persen	60		Dinas Lingkungan Hidup
													5	Parameter Pengujian Kualitas Air Laut yang terakreditasi	Persen	N/A		Dinas Lingkungan Hidup
													6	Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	9.26		Dinas Lingkungan Hidup
													7	Parameter Pengujian Kualitas Udara yang Terakreditasi	Persen	34.62		Dinas Lingkungan Hidup
											33	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	1	Persentase Dokumen Lingkungan yang di proses	Persen	100	920.451.367	Dinas Lingkungan Hidup
													2	Persentase Jumlah pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan	Persen	58.44 %		Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														kewenangan provinsi				
											34	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persen	80,35	2.368.950.000	Dinas Lingkungan Hidup
											35	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Persen	42.86 %	1.162.040.000	Dinas Lingkungan Hidup
													2	Persentase Lokasi Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen	74.19 %		Dinas Lingkungan Hidup
											36	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	88,16	1.466.020.000	Dinas Lingkungan Hidup
											37	Program Pengelolaan Hutan	1	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar	Persen	15	2.900.000.000	Dinas Kehutanan
													2	Persentase Peningkatan pengolahan Hasil Hutan Kayu yang berkualitas	Persen	15	600.000.000	Dinas Kehutanan
													3	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya	Persen	12	3.635.850.000	Dinas Kehutanan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														memenuhi standar				
													4	Persentase Peningkatan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berkualitas	Persen	12	400.000.000	Dinas Kehutanan
													5	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	100	10.390.000.000	Dinas Kehutanan
													6	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai RPKH	Persen	100	1.100.000.000	Dinas Kehutanan
													7	Persentase Penurunan Lahan Kritis	Persen	11	76.134.560.000	Dinas Kehutanan
													8	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan terhadap kawasan hutan dan hutan rakyat	Persen	0,45	6.700.000.000	Dinas Kehutanan
											38	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1	Persentase penurunan kerusakan areal preservasi dan perlindungan setempat	Persen	5	7.450.000.000	Dinas Kehutanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														yang ditangani				
											39	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Persentase peningkatan Nilai Kondisi Lahan DAS	Persen	48	2.750.000.000	Dinas Kehutanan
											40	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya	Persen	11,61	13.200.000.000	Dinas Kehutanan
										L8. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).	43	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	100	195.655.654	Dinas Lingkungan Hidup
											44	Program Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Jasa Layanan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	100		Dinas Lingkungan Hidup
													2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	85,53	82.834.281.536	Dinas Lingkungan Hidup
											45	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	73	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				e	Persentase Penurunan Emisi GRK						41	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan					4.065.479.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				a. Kumulatif	Persen	3,31				42	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	Persentase pemenuhan Peningkatan Mutu Pelayanan penyediaan tenaga listrik kewenangan Provinsi (IKP / ES III)	Persen	82	101.435.326.245	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				b. Tahunan	Persen	10,63						2	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (IKP / ES III)	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
												3	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (IKP / ES III)	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
												4	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Purwakarta (IKP / ES III)				
													5	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (IKP / ES III)	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													6	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (IKP / ES III)	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													7	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (IKP / ES III)	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													8	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan	Persen	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (IKP / ES III)				
													9	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													10	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													11	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Wilayah II Bogor (IKP / ES III)				
													12	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													13	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													14	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Sumedang (IKP / ES III)				
													15	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													16	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (IKP / ES III)	Persen	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
											33	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat (IKP / ES III)	Persen	33.45	1.470.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													2	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang	Persen	39.12		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Dinas I Cianjur (IKP / ES III)				
													3	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas II Bogor (IKP / ES III)	Persen	33.88		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													4	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta (IKP / ES III)	Persen	35.11		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													5	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung (IKP / ES III)	Persen	33.08		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													6	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas V Sumedang (IKP / ES III)	Persen	38.94		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													7	Persentase Meningkatnya Muka Air	Persen	23.8		Dinas Energi dan Sumber

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya (IKP / ES III)				Daya Mineral
													8	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon (IKP / ES III)	Persen	30.2		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													9	Persentase penetapan NPA di Jawa Barat (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													10	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													11	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													12	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													13	Persentase penetapan	Persen	93.22		Dinas Energi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung (IKP / ES III)				Sumber Daya Mineral
													14	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													15	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													16	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon (IKP / ES III)	Persen	93.22		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													17	Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat (IKP / ES III)	Persen	84		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				f	Indeks Risiko Bencana	Poin	108	P19	Program Pengurangan Risiko Bencana		34	Program Penanggulangan Bencana	1	Nilai Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Poin	0.78	7.846.665.939	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
													2	Persentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Keadaan Darurat Bencana				
													3	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
													4	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Poin	0.62		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	548.111.217	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											36	Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	1.215.000.000	Dinas Sosial
		S13	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	a	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,51 - 6,02	P20	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan		48	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang	Persen	100	844.879.650	Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)					disalurkan tepat sasaran				
				b	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	46,57							Persentase KUBE yang meningkat pendapatnnya	Persen	35		Dinas Sosial
														Persentase Anak yang Mendapat Pengasuhan Orang Tua Angkat	Persen	100		Dinas Sosial
											49	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PSKS yang Aktif	Persen	100	730.436.000	Dinas Sosial
														Persentase PSKS yang mendapatkan bimbingan teknis	Persen	100		Dinas Sosial
											50	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	Persen	100	29.543.873.213	Dinas Sosial
														Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	100		Dinas Sosial
																Total Pagu	2.374.465.488.415	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.17
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	S14	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	a	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,29	P21	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah		1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup pemerintahan dan pengkajian peraturan berbasis isu strategis	Persen	100	61.528.397	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													2	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup sosial dan kependudukan berbasis isu strategis	Persen	100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													3	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup ekonomi dan pembangunan berbasis isu strategis	Persen	100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
											2	Program Riset Dan Inovasi Daerah	1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan	Persen	100	1.783.536.244	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													2	Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi	Peringkat Akreditasi	SINTA 4		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													3	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	Persen	100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													4	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan	Persen	100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		S15	Meningkatnya Partisipasi	a		Poin	83,79	P22	Program Peningkatan		3	Program Pemberdayaan	1	Persentase Organisasi	Persen	49.83	7.500.000.000	Badan Kesatuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
			Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan		Indeks Demokrasi Provinsi				Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan			Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		kemasyarakatan yang aktif				Bangsa dan Politik
													2	Persentase Kerjasama Lembaga antar umat beragama	Persen	47.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	Persentase peserta (pemilih) yang mengikuti pendidikan politik	Persen	0.008	395.356.550.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		S16	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	a	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	Poin	86,47	P23	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	L9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Lingkungan, Desa di kabupaten/kota	Persen	76	48.900.779.584	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
													2	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Lingkungan, Desa di kabupaten/kota	Persen	83		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
													3	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Lingkungan, Desa di kabupaten/kota	Persen	88		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	1,8	103.772.189.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
											7	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1	Indeks Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Poin	79,62	12.677.400.290	Dinas Komunikasi dan Informatika
											8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,1	1.178.131.794	Dinas Komunikasi dan Informatika
											9	Program Penyelenggaraan Persandian	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	718	1.248.421.196	Dinas Komunikas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
												Untuk Pengamanan Informasi						i dan Informatika
											10	Program Pengelolaan Arsip	1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	100	466.486.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											11	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	72	363.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											12	Program Perizinan Penggunaan Arsip	1	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persen	61		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											13	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1	Persentase Kerjasama Daerah yang Diimplementasi	Persen		7.759.635.390	Sekretariat Daerah
													2	Skoring LPPD	Nilai			Sekretariat Daerah
													3	Tingkat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	87,21		Sekretariat Daerah
											14	Program Penataan Organisasi	1	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	4	1.589.000.000	Sekretariat Daerah
													2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4.78		Sekretariat Daerah
													3	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai	13.61		Sekretariat Daerah
													4	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja minimal "Baik"	Persen	100		Sekretariat Daerah
													5	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Minimal kategori “B”	Persen	100		Sekretariat Daerah
													6	Tingkat Implementasi Mekanisme Kerja baru	Poin	100		Sekretariat Daerah
													7	Tingkat Implementasi Tata	Poin	80.17		Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														Kelola Pemerintahan Biro Organisasi				
											15	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	91,14	2.037.061.303	Sekretariat Daerah
													2	Indeks Kepatuhan Daerah	Poin	84,55		Sekretariat Daerah
													3	Tingkat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Biro Hukum dan HAM	Poin	80,05		Sekretariat Daerah
											16	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD,Investasi, dan BLUD			350.000.000	Sekretariat Daerah
													2	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan				Sekretariat Daerah
											17	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1	Persentase Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPRD Lancar	Persen	100	319.657.626.522	Sekretariat DPRD
													2	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lancar	Persen	100		Sekretariat DPRD
													3	Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasikan	Persen	100		Sekretariat DPRD
													4	Persentase Pembahasan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Lancar	Persen	100		Sekretariat DPRD
													5	Persentase Pembahasan Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Lancar	Persen	100		Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													6	Persentase Profesionalisme Anggota DPRD	Persen	100		Sekretariat DPRD
													7	Persentase Pembahasan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Yang Lancar	Persen	100		Sekretariat DPRD
													8	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Lancar	Persen	100		Sekretariat DPRD
											18	Program Pelayanan Penghubung	1	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Difasilitasi kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	Persen	100	1.090.000.000	Badan Penghubung
											19	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	13.95	11.228.070.419	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													2	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Poin	13.86		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													3	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Poin	13.75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													4	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	10.44		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													5	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Poin	10.15		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													6	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Poin	9.6		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											20	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	13,89	23.692.102.931	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
													2	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	10,23		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											21	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat beserta Pergub Penjabarannya	Waktu	Tepat Waktu		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													2	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													3	Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Waktu	Tepat Waktu		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													5	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD	Persen	100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
														yang dievaluasi/disahkan				
													6	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disahkan	Persen	100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
											22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Poin	Baik (2,75)	10.089.198.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													2	Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	Persen	0.065		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
													3	Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah	500		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
											23	Program Kepegawaian Daerah	1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	117,5	7.713.980.646	Badan Kepegawaian Daerah
													2	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40		Badan Kepegawaian Daerah
													3	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	125		Badan Kepegawaian Daerah
													4	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120		Badan Kepegawaian Daerah
													5	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	20.91		Badan Kepegawaian Daerah
													6	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28.08		Badan Kepegawaian Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													7	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4.99		Badan Kepegawaian Daerah
											24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen	17,00	12.700.123.436	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													2	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen	17,00		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													3	Indeks Maturitas Corporate University	Poin	Mature (2955)		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											25	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Nilai dampak implementasi SAKIP	Poin	A (85,78)	35.730.108.618	Inspektorat Daerah
													2	Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti dalam LKPD	Persen	100		Inspektorat Daerah
													3	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan	Persen	75		Inspektorat Daerah
													4	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI yang diselesaikan	Persen	73		Inspektorat Daerah
													5	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persen	100		Inspektorat Daerah
													6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal	Persen	80		Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
													7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP eksternal	Persen	92		Inspektorat Daerah
													8	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum dan tujuan tertentu	Persen	100		Inspektorat Daerah
													9	Persentase rekomendasi hasil audit SPBE pada pemerintah daerah provinsi jawa barat yang diterapkan	Persen	90		Inspektorat Daerah
													10	Persentase KCD yang mematuhi ketentuan PPDB	Persen	100		Inspektorat Daerah
													11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BUMD	Persen	85		Inspektorat Daerah
													12	Persentase Kab/Kota penerima Bantuan Keuangan Kab/Kota yang patuh	Persen	100		Inspektorat Daerah
													13	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh	Persen	95		Inspektorat Daerah
													14	Persentase sampling sekolah penerima dana BOS, BOPD dan BPMU yang patuh	Persen	95		Inspektorat Daerah
													15	Persentase kepatuhan dalam penerapan P3DN	Persen	100		Inspektorat Daerah
													16	Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD	Persen	100		Inspektorat Daerah
											26	Program Perumusan Kebijakan,Penda	1	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria	Perangkat Daerah	6	3.583.038.356	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
												mpingan Dan Asistensi		menuju WBK/WBBM)				
													2	Persentase nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	97.4		Inspektorat Daerah
													3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100		Inspektorat Daerah
													4	Level Maturitas APIP	Level	3 (3.135)		Inspektorat Daerah
											27	Program Pendaftaran Penduduk	1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/kota	Persen	57	254.670.384	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											28	Program Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen	97	277.653.248	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											29	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Persentase Data yang Dimanfaatkan	Persen	86,49	435.549.088	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											30	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	Persen	100	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																Total Pagu	**1.011.595.841.346**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

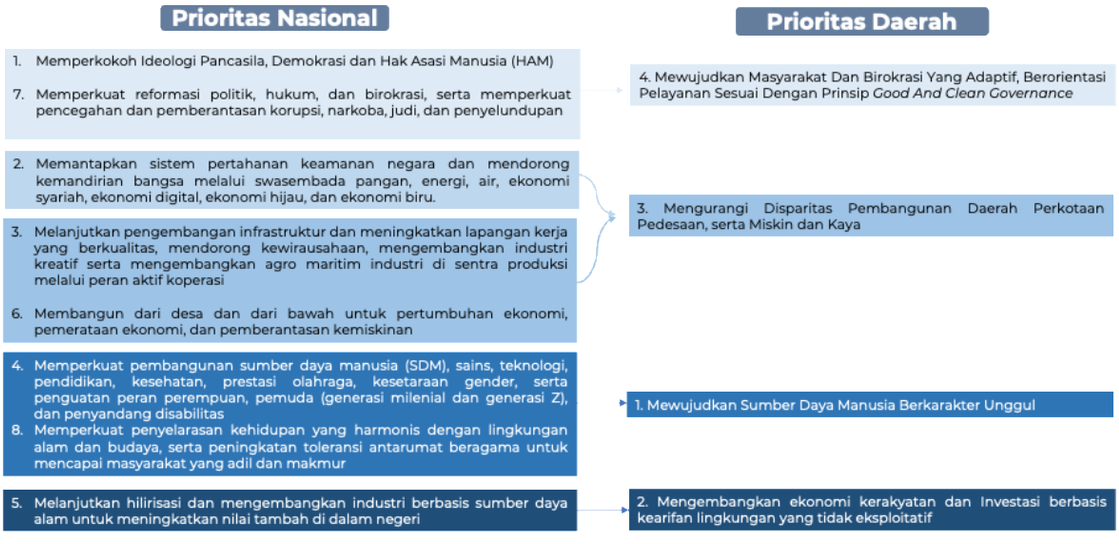
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4.2.3.2 *Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional, dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026*

Prioritas Nasional memuat 17 (tujuh belas) program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor dengan langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, program prioritas nasional, dan langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*, Provinsi Jawa Barat menetapkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas daerah serta 9 (sembilan) langkah membangun Jawa Barat sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

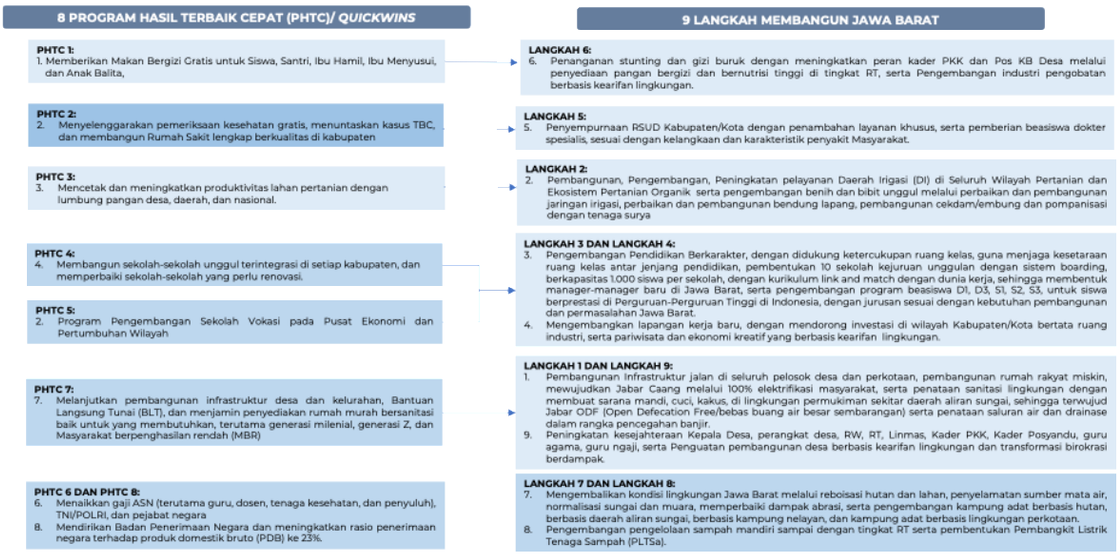
Gambar 4.10
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Nasional



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Gambar 4.11
Dukungan 9 (Sembilan) Langkah Membangun Jawa Barat Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam rangka penyelarasan pembangunan di Provinsi Jawa Barat maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan *Program* Prioritas Daerah pada RKPD 2026 terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 serta Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 yang disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau dengan mengunjungi alamat berikut https://sidebangpro.bappenas.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 4.18
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)							
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*	Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerjasama Internasional Efektivitas Kerjasama Daerah
PN 2. Sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.							
1	Mencapai Swasembada Pangan, Engeri, dan Air	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produksi peternakan 2. Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pengawasan Sarana Pertanian 3. Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan
		Pembangunan pangan hewani				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan yang Terlindungi dari Serangan OPT/DPI
		Pembangunan pangan lokal dan nabati				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan/kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase masyarakat terbina yang menerapkan rencana tindak lanjut hasil pembinaan konsumsi pangan
		Peningkatan penyediaan energi				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan lokasi rentan rawan pangan
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
		Konservasi sumber daya air				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Pengelolaan susut dan sisa pangan				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan
						Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	-			Program Peningkatan dan pemerataan investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek yang Dilaporkan Melalui LKPM
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi di 27 Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat untuk Berinvestasi
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar
12	Menjamin Ketersediaan pupuk, benih, dan Pestisida Langsung ke Petani				Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan 2. Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang produktif 3. Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital			Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Nilai Produksi Industri Pengolahan 2. Pertambahan Jumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
	daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	penerapan skema spend to invest					Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam 3. Pertambahan Jumah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha Industri
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya			Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berkaitan Keamanan Produk dan Jasa Serta Ketentuan Lain Sesuai dengan Perundang-undangan
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri
						Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Laju Pertumbuhan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)
						Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ
						Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkat Omzet Usahanya
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS			Penanganan Perubahan Iklim	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Penurunan Kerusakan Areal Preservasi dan Perlindungan Setempat yang ditangani
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Nilai Kondisi Lahan DAS
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan				Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi							
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital					
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Pengembangan koperasi sektor produksi			Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas							
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Penurunan kematian ibu dan anak	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (per 100.000KH) 2. Angka Kematian Balita (per 1000KH)
		Pencegahan dan penurunan stunting			Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup		Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek)
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis			Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan		Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa
		Penuntasan TBC					Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis					Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Investasi pelayanan kesehatan primer					Persentase penduduk usia ≥7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas			Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah				Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul					
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi					
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi					
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini					
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita			Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan untuk Standardisasi di Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Penurunan Jumlah Perkawinan Anak
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan
						Program Pengendalian Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender
						Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang *Up To Date* Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Program Perlindungan Khusus Anak	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	-			Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Angka pemuda aktif mengikuti organisasi
						Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
			P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW Unggulan Provinsi dan/atau Desa/Kampung Wisata Unggulan Provinsi yang memenuhi standar
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Aktivitas Promosi yang terealisasi
PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri							
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber	Pengembangan hilirisasi Nikel					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
	daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Pengembangan hilirisasi Tembaga					
		Pengembangan hilirisasi Bauksit					
		Pengembangan hilirisasi Timah					
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit					
		Pengembangan hilirisasi Kelapa					
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut					
		Pengembangan hilirisasi Kimia					
		Pengembangan industri semikonduktor					
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil					
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja					
		Pengembangan industri dirgantara					
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan							
5	Pemberantasan Kemiskinan	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan tepat sasaran
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Satuan Permukiman yang mendapatkan penanganan PSUnya
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa			Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase nilai indeks dimensi ekonomi desa di kabupaten/kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
1	2	3	4		5	6	7
						Program Penataan Desa	Persentase nilai indeks dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten/kota
PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan							
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Transformasi digital layanan publik prioritas				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintahan Digital
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan tindak pidana korupsi	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Regulasi Daerah yang Harmonis
PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil FKUB yang Ditindaklanjuti
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4.2.3.3 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2026 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2026 pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mengarusutamakan berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan meliputi gender dan inklusi sosial, SDGs, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta pembangunan berketahanan iklim. Masing-masing kebijakan diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mencakup perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pengarusutamaan pembangunan ini tidak hanya memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaan pengarusutamaan pembangunan sangat penting untuk menjamin integrasi pengarusutamaan di setiap sektor pembangunan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pengarusutamaan pembangunan pada RKP Tahun 2026.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Dokumen Anda dapat diverifikasi pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 4.19
Keterkaitan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarustamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2026

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2026
Gender	
• Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKP/RKPD, Renja K/L/D, RKA), serta dokumen perencanaan/kebijakan strategis/sektoral, yang didahului dengan proses: a. analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotip) dengan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; b. analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan c. menyusun rencana aksi/intervensi untuk mengatasi ketimpangan beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut • Dalam penyusunan Renja, K/L menyusun *Gender Action Budget* (GAB)/Kerangka Acuan Kegiatan Responsif Gender di level Rincian Output/Sub Kegiatan yang memuat poin a-c dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan PUG di K/L/D oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG di tingkat pusat dan daerah dengan mengoptimalkan sistem informasi yang ada untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan dampaknya • Meningkatkan komitmen dan kapasitas pelembagaan PUG di K/L dan pemerintah daerah, melalui advokasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi,	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 7. Program Penempatan Tenaga Kerja 8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 11. Program Perlindungan Khusus Anak 12. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 13. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2026
dan lainnya untuk memastikan strategi PUG dilaksanakan dengan efektif ● Mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasinya ● Meningkatkan sinergi antara K/L, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam implementasi kebijakan PUG ● Mendorong pendanaan inovatif, termasuk mengembangkan skema insentif fiskal dan insentif non fiskal untuk mendukung kesetaraan gender	
Inklusi Sosial	
● Mengurangi kesenjangan dan *social exclusion* yang dialami kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia, dalam berbagai sektor pembangunan melalui pengarusutamaan inklusivitas disabilitas dan lanjut usia dan penekanan pada perspektif yang akomodatif dan universal dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah ● Mendorong internalisasi isu penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam perencanaan dan penganggaran K/L dan pemerintah daerah ● Mendorong partisipasi bermakna penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, penggiat isu kelanjutusiaan, mitra pembangunan, dan sektor swasta ● Menyusun mekanisme pengukuran capaian pembangunan inklusif yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ● Memastikan ketersediaan data terpilah dan spesifik kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk mendukung analisa inklusivitas, kesenjangan kondisi sosio-ekonomi kelompok rentan, dan perumusan kebijakan berbasis bukti ● Meningkatkan kapasitas dan pemahaman K/L dan pemerintah daerah dalam memberikan akomodasi dan lingkungan yang inklusif, melalui pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, supervisi, dan lainnya ● Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk mengetahui capaian indikator inklusi sosial serta memastikan efektivitas dan dampaknya, baik di tingkat pusat dan daerah	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Kesejahteraan Rakyat 7. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2026
• Mendorong skema pendanaan inovatif, termasuk mengembangkan sumber pembiayaan dan insentif fiskal/non fiskal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan inklusi sosial	
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
• Integrasi 118 target dan 190 indikator SDGs ke dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, serta dokumen perencanaan sektoral dan daerah (Renja dan RKPD Tahun 2026) • Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs • Mendorong perencanaan dan anggaran yang mendukung pencapaian SDGs di berbagai sektor dan daerah • Mendorong pendanaan inovatif, termasuk hibah, crowdfunding, *blended finance*, filantropi, dan investasi hijau • Mengembangkan skema rekognisi bagi daerah, sektor, dan aktor nonpemerintah yang berkontribusi dalam pencapaian SDGs • Monitoring dan evaluasi berbasis data melalui dashboard SDGs untuk memantau perkembangan implementasi	1. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Transformasi Digital	
• Integrasi program prioritas transformasi digital dalam RKP Tahun 2026, Renja Tahun 2026, dan RKPD Tahun 2026 guna memastikan adopsi teknologi digital yang merata • Meningkatkan sinergi antara komponen pentahelix yaitu pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, universitas (akademisi), komunitas dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital dan mewujudkan pemerintahan digital • Mendorong perencanaan dan penganggaran terkait transformasi digital dalam sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan pelayanan publik serta sektor strategis lainnya • Mendorong pendanaan inovatif, termasuk insentif untuk wirausaha digital dan investasi di sektor teknologi termasuk *green tech* • Mengembangkan skema insentif untuk penelitian dan pengembangan inovasi, serta adopsi teknologi digital dalam layanan publik dan industri, serta sektor strategis lainnya • Monitoring dan evaluasi berbasis data diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan dan analisis big data termasuk dalam rangka adopsi	1. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 8. Program Perekonomian dan Pembangunan 9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2026
teknologi kecerdasan artifisial, sebagai umpan balik dalam proses perencanaan dan penganggaran	
Pembangunan Rendah Karbon	
• Integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan K/L dan pemerintah daerah • Mendorong perencanaan dan anggaran untuk transisi energi, efisiensi • energi, upaya dekarbonisasi industri, pengelolaan pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan • Meningkatkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan rendah karbon • Mendorong pendanaan inovatif, investasi hijau serta implementasi skema ekonomi karbon pada seluruh sektor mitigasi dan pajak karbon • Mengembangkan skema insentif untuk perusahaan dan daerah yang mengadopsi teknologi rendah karbon dan ekonomi sirkular • Mendorong pemantauan dan evaluasi efektivitas perencanaan, penganggaran, dan implementasi aksi pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan *dashboard* berbasis *online* terintegrasi	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 3. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 5. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 6. Program Perekonomian dan Pembangunan
Pembangunan Berketahanan Iklim	
• Integrasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim dalam RKP Tahun 2026, dan Renja Tahun 2026, mencakup sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan • Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aktor pembangunan non pemerintah, dan sektor swasta pada aksi ketahanan iklim • Mendorong perencanaan dan anggaran untuk peningkatan ketahanan iklim laut dan pesisir, pengelolaan sumber daya air, pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, dan pengendalian penyakit sensitif iklim • Mendorong pendanaan inovatif, termasuk mobilisasi sumber daya internasional dan domestik untuk aksi ketahanan iklim • Monitoring dan evaluasi berbasis data, dengan pemanfaatan dashboard ketahanan iklim untuk memantau dampak perubahan iklim dan efektivitas intervensi	1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 11. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 12. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Resmi Dan Prioritas Pembangunan Daerah atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2026
	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 13. Program Pengelolaan Persampahan 14. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 15. Program Penanggulangan Bencana 16. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 17. Program Penanganan Bencana

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

4.2.4 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;
5. Pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
6. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

7. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
8. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
   a. menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur- Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
   b. meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
   c. meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.

2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
   a. meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
   b. mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Portal Verifikasi Dokumen pada alamat berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

c. meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
d. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
e. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
f. pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi meliputi:
   a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
   b. mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
   c. mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
   d. mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
   e. mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

f. mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
g. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
h. mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
i. mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
j. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
k. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
b. membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
c. meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
d. mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
e. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung Hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

f. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
h. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
i. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
j. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30 persen dari luas DAS;
k. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
l. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
   a. mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
   b. mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
   c. melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
   d. merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
   e. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
   f. meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
   g. pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30 persen dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
   a. merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
   b. mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
   c. pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
   d. mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
   e. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
   a. meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
   b. menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
   c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Perpustakaan Nasional atau melalui tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

d. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.

8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
   b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
   c. strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

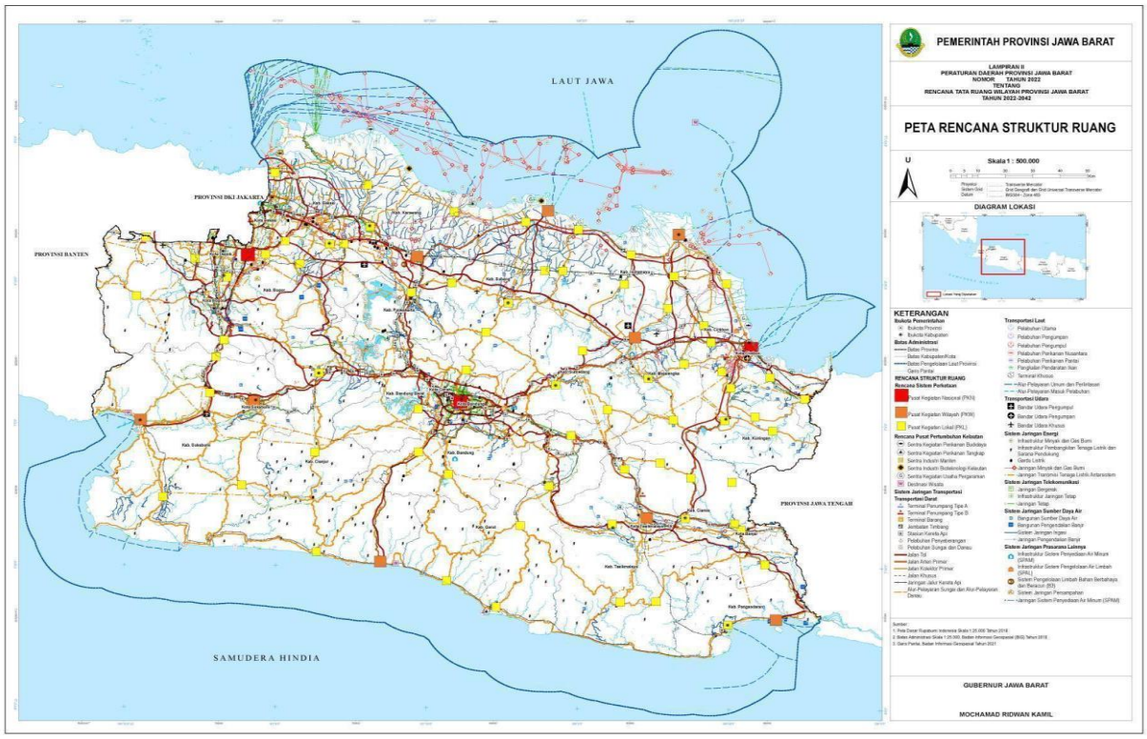
a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, penetapan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem dan jaringan prasarana lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Versi Web Browser atau Desktop atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 4.12
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, penetapan rencana pola ruang wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana berdasarkan kebijakan dan strategi terkait pola ruang dalam peraturan daerah tersebut adanya target tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari wilayah daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042, sedangkan untuk kawasan budidaya relatif tidak mengalami perubahan secara kontekstual, karena pada dasarnya perubahan di dalam kawasan budidaya selama sesuai dengan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung wilayahnya tetap dikembangkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara atau pada tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung provinsi meliputi upaya:

(a) Menetapkan kawasan lindung provinsi meliputi kawasan lindung dalam kawasan hutan (terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung) serta kawasan lindung di luar kawasan hutan (terdiri atas kawasan yang menunjang fungsi lindung di wilayah darat);

(b) Mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);

(c) Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan

(d) mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, maka penentuan rencana kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan:

1) Kawasan hutan yang menjadi kawasan lindung yakni kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor No. 9404 Tahun 2019. Pada Tahun 2021 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan Hutan yang digunakan sebagai dasar deliniasi Pola Ruang, menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2020;

2) Kawasan hutan pangongan dengan luas 7.286,08 Ha dan kawasan hutan cadangan 29.075,13 Ha;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau Dokumen Center Privy atau pada tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

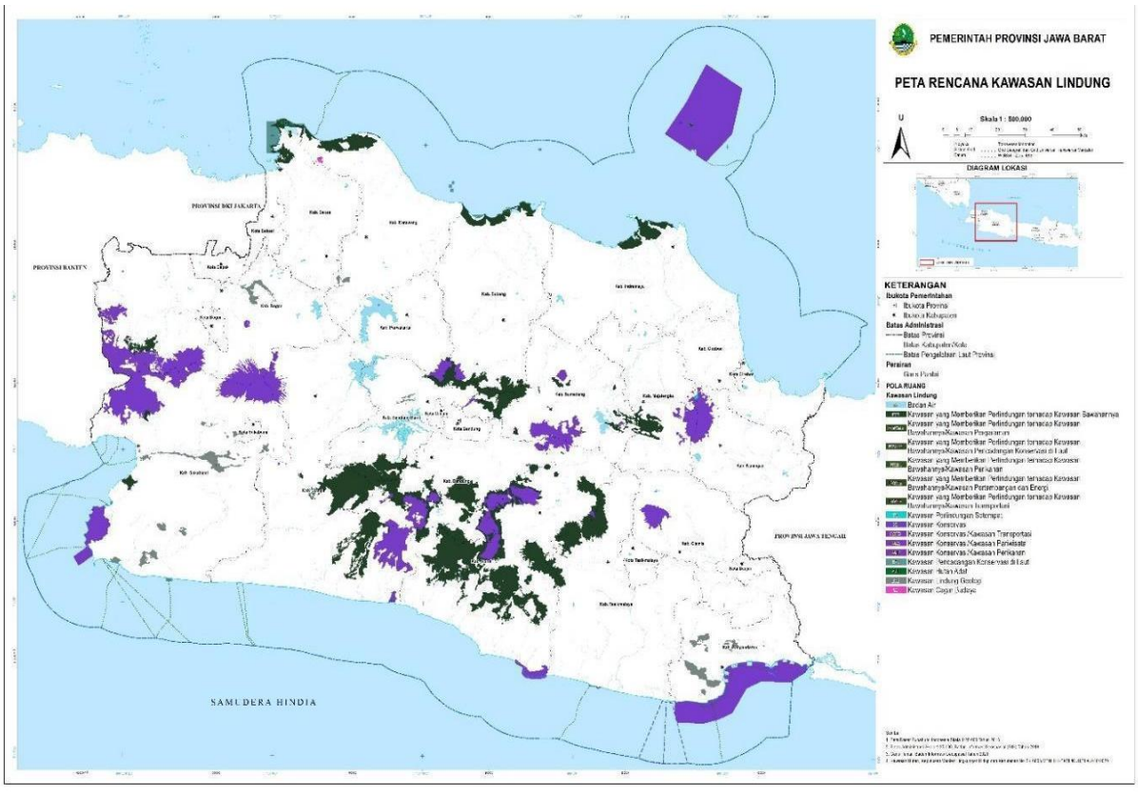
1D17AF9E85

3) Kawasan Hutan adat Leuweung Gede yang sejatinya merupakan hutan larangan yang dijaga dengan aturan-aturan adat.
4) Kawasan resapan air merupakan kawasan imbuhan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
5) Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 dengan luas 15.999 Ha.
6) Kawasan Lindung Geologi bersumber data dari Direktorat Geologi hasil penyelidikan sampai dengan, Badan Geologi tahun 2018.
7) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk.
   (a) Sempadan sungai tidak bertanggul bukan kawasan perkotaan
   (b) Sempadan danau/waduk sebesar 50 meter
   (c) Sempadan pantai sebesar 100 meter
8) Kawasan rawan bencana alam berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG, 2016) dan BNPB Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas: Kawasan Bahaya Gunung api, Gerakan tanah, rawan tsunami, dan sesar aktif.
9) Kawasan cagar budaya;
10) Kawasan lindung berdasarkan RZWP3K Provinsi (Revisi Materi Teknis Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 Tahun 2021, versi November 2021)
11) Hasil sinkronisasi antar RTR secara hierarkis dengan:
   (a) PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
   (b) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018
   (c) Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Versi Desktop atau melalui tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Gambar 4.13
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung
Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

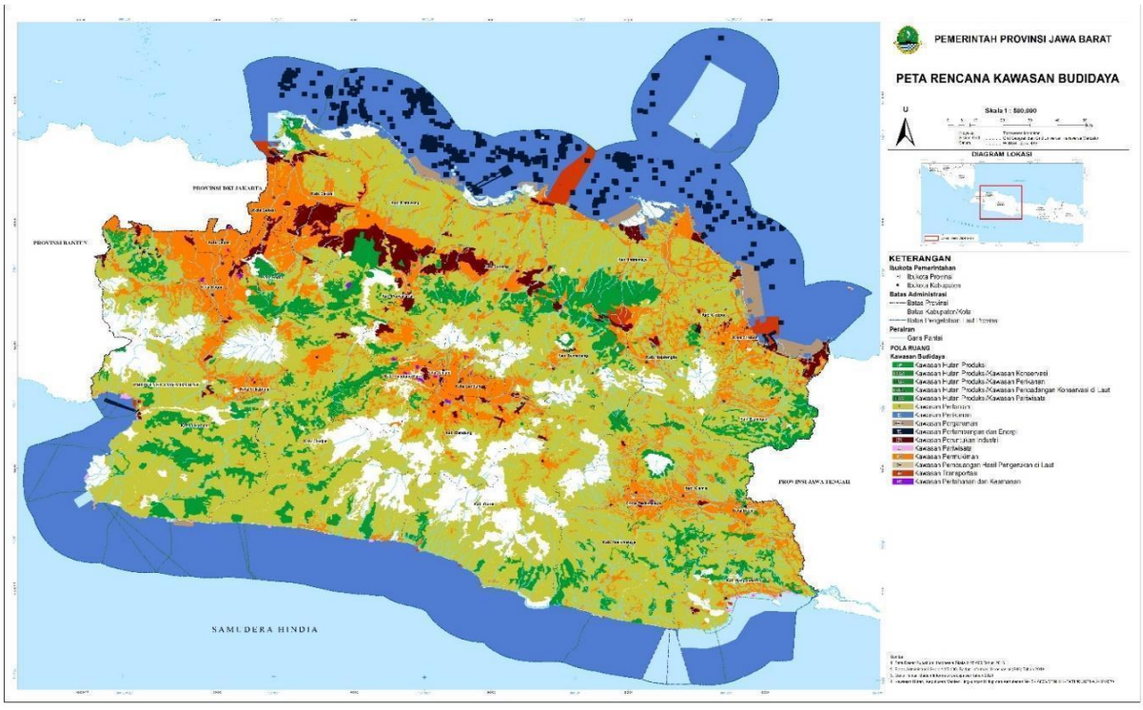
2. Kawasan Peruntukan Budidaya

   Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan peruntukan budidaya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (Hp); Kawasan Pertanian (P); Kawasan Perikanan (IK); Kawasan Pergaraman (KEG); Kawasan Pertambangan dan Energi (TE); Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Pariwisata (W); Kawasan Permukiman (PM); Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA); Kawasan Transportasi (TR); dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kawasan peruntukan budidaya disesuaikan dengan perkembangan karakteristik struktur dan pola ruang yang terjadi. Selain itu pengaruh perubahan iklim dan karakteristik eksternal mewarnai pola ruang yang direncanakan. Perubahan karakteristik pola ruang yang terjadi antara lain berkaitan dengan persoalan, isu dan tantangan dalam mewujudkan pola ruang yang modern berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, mendorong terwujudnya ketahanan energi, adaptif terhadap bencana, mendorong terwujudnya ketahanan pangan, serta kompetitif dan membuka ruang investasi namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Gambar 4.14
Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta provinsi (1:250.000).

Kawasan lindung berupa delineasi badan air, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebangprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, dan kawasan cagar budaya.

c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, maka rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dalam revisi RTRWP Jawa Barat Tahun 2022-2042 terdiri dari beberapa sudut kepentingan. Tabel dan gambar berikut di bawah ini menyajikan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Tabel 4.20
Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
1	**Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**	**KSP Bandung Utara**	▪ Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian ▪ Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro ▪ Memiliki pusat kegiatan pada Kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam
2	**Pertumbuhan Ekonomi**	**KSP Sukabumi Bagian Selatan dsk**	▪ Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi ▪ Memiliki potensi ekspor ▪ Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah ▪ Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
3	**Pertumbuhan Ekonomi**	**KSP *Aerocity*-Kertajati**	▪ Keberadaan BIJB sebagai bandar udara internasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Penerima Dokumen Elektronik BSrE atau pada tautan berikut https://sidebarujabar.prov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

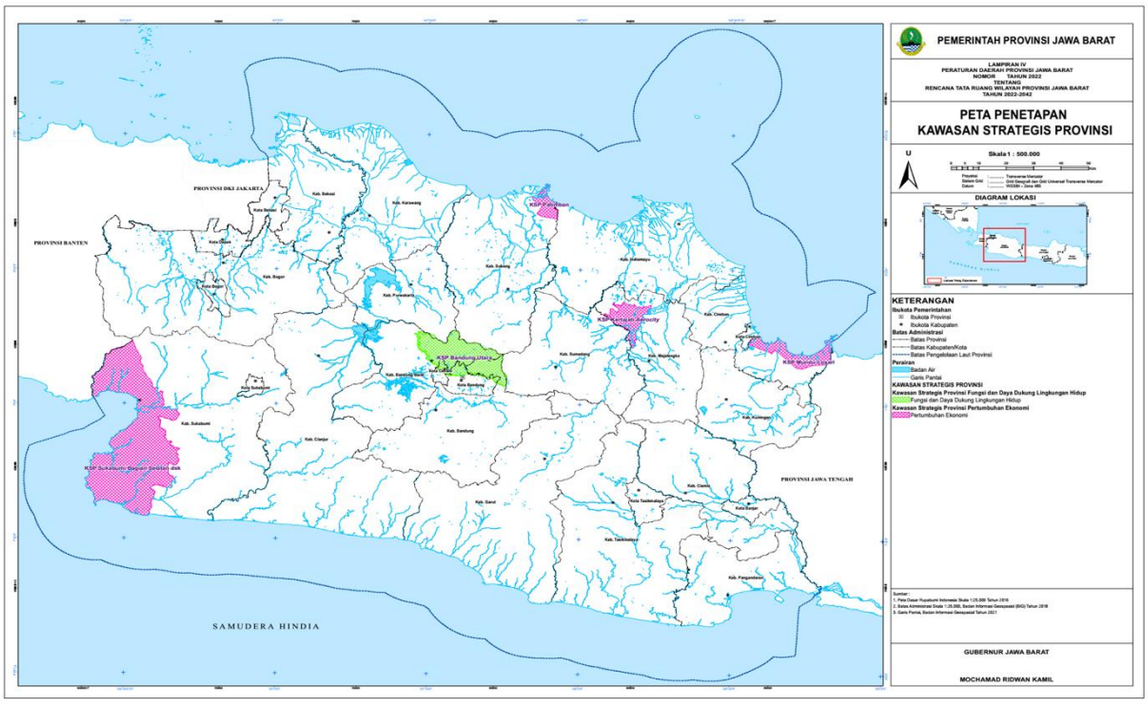
No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
			▪ Potensi peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui kegiatan distribusi logistik; ▪ Potensi pengembangan kawasan tematik pendukung dan penghubung *Aerocity*; ▪ Keberadaan BUMD Provinsi Jawa Barat yang dapat diarahkan sebagai pengelola kawasan; ▪ Penetapan kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang (Bersama Kadipaten).
4	**Pertumbuhan Ekonomi**	**KSP Patimban**	▪ Keberadaan Pelabuhan Utama Patimban yang merupakan Pelabuhan internasional; ▪ Potensi peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kegiatan ekspor-impor dan distribusi logistik; ▪ Potensi pengembangan kawasan untuk mendukung kawasan industri di sekitarnya; ▪ Penetapan kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang;
5	**Pertumbuhan Ekonomi**	**KSP Mundu - Losari**	▪ Pengembangan kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan daya saing ekonomi kawasan; ▪ Peningkatan konektivitas antar kawasan, terutama menuju simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; ▪ Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik; ▪ Melindungi kawasan pesisir dan pantai serta kawasan lainnya yang berfungsi lindung; ▪ Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; ▪ Peningkatan kerjasama antar wilayah (Provinsi Jabar dengan jateng)

Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 4.15
Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

4.2.5 Kebijakan Kerjasama Perbatasan

Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi yang berbatasan langsung adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan antar daerah. Perangkat Daerah berkomitmen untuk merencanakan, mengawal dan melaksanakan rencana kegiatan kerja sama pembangunan Jawa Barat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Hubungan kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan daerah-daerah perbatasan, yakni Banten dan Daerah Khusus Jakarta, terus ditingkatkan dan diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam urusan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerja sama antar daerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama perbatasan akan mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah perbatasan sesuai dengan potensi yang dimiliki baik Banten, Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Barcode Reader atau melalui tautan berikut https://sidebarujabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Khusus Jakarta maupun Jawa Barat yang sangat melimpah dan saling membutuhkan satu sama lain.

a. Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

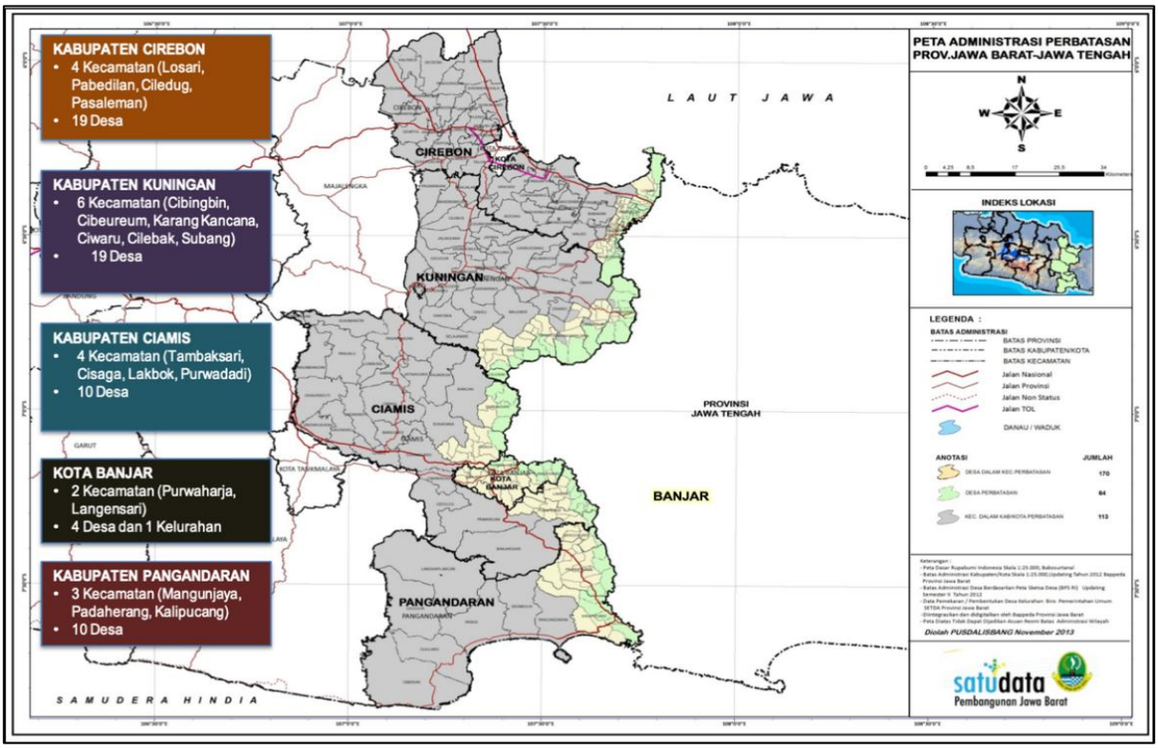
Objek kerja sama yaitu pembangunan daerah yang berbatasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di daerah yang berbatasan, dengan ruang lingkup meliputi: Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perhubungan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; dan Perindustrian dan Perdagangan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau melalui tautan berikut https://sidebangjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Gambar 4.16
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

b. Perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta

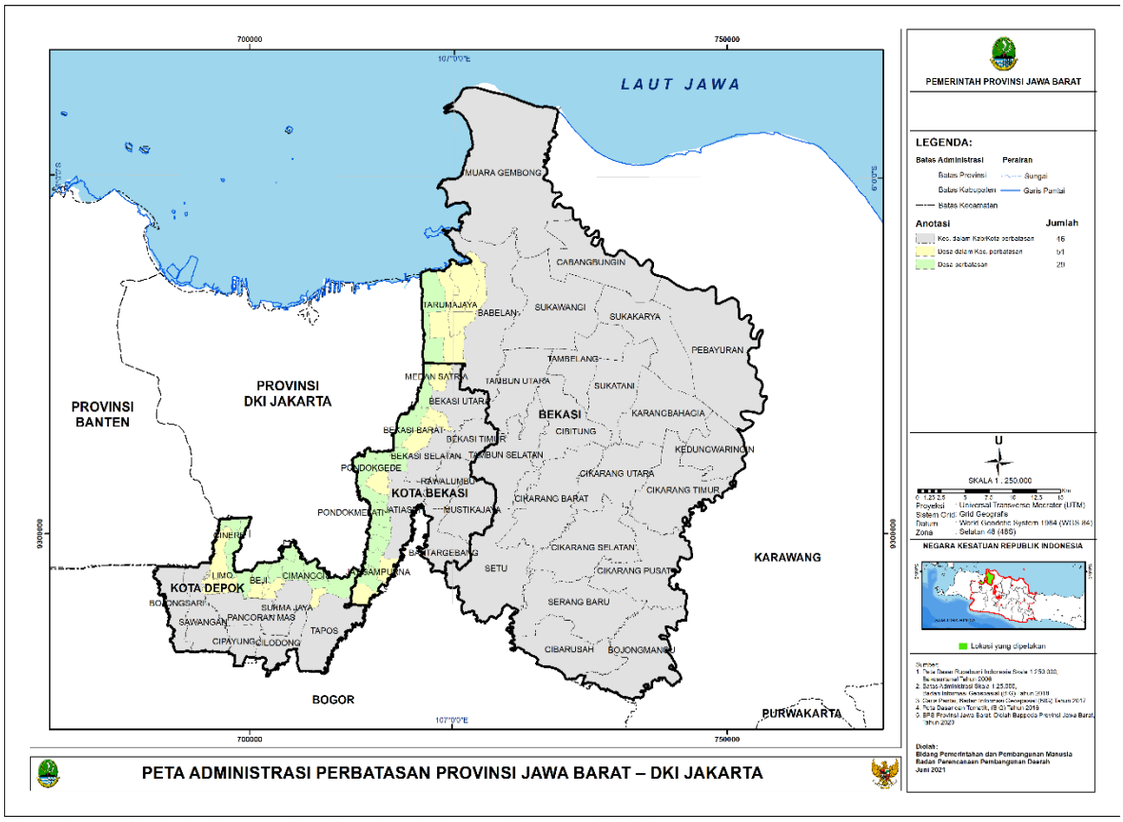
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Urusan Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta difokuskan pada pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan ruang lingkup meliputi urusan: Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Perumahan dan Permukiman; Pariwisata; Koperasi dan Usaha Kecil; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perencanaan; dan Kebudayaan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Peta wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Peruri atau dengan mengunjungi alamat berikut https://sidebanjabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.17
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Daerah Khusus Jakarta



Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

c. Perbatasan Jawa Barat dan Banten

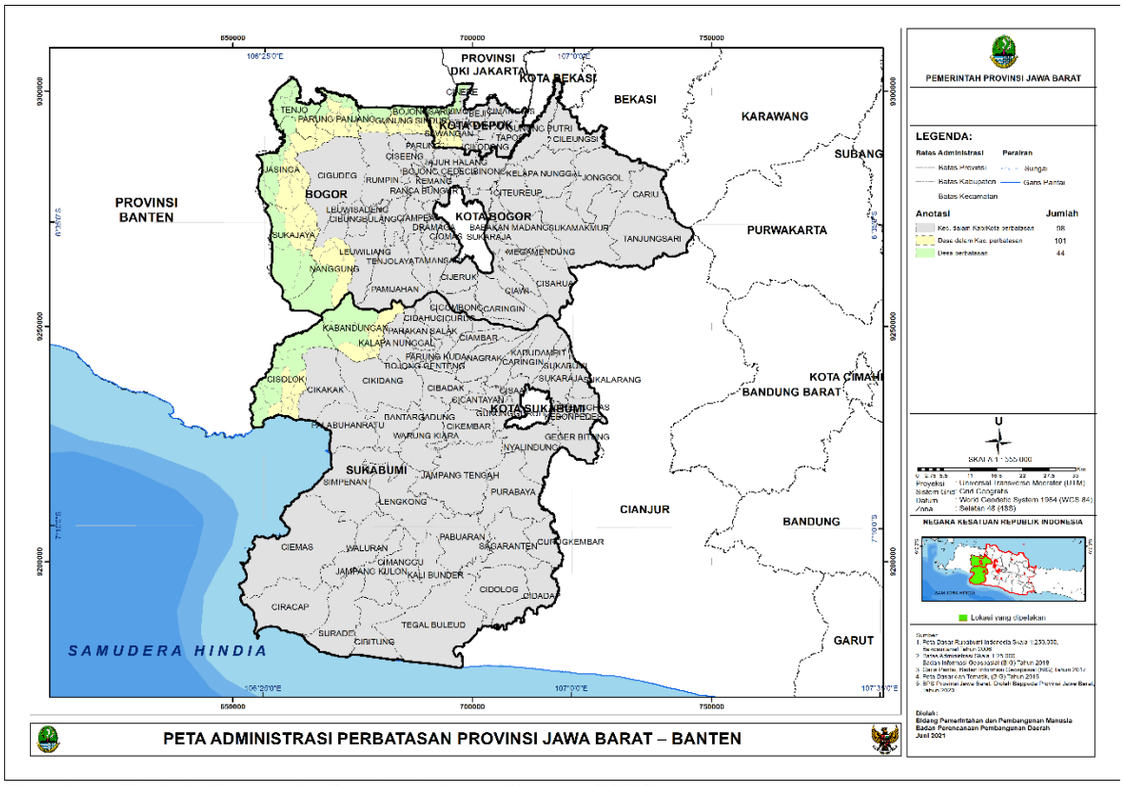
Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024. Dalam pelaksanaannya terdapat 18 (delapan belas) urusan kerja sama pembangunan antara Jawa Barat-Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2021-2024, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, perumahan dan permukiman, pariwisata, KUK, perdagangan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta perencanaan.

Lingkup kabupaten/kota yang berbatasan yaitu Kota Tangerang Selatan dengan Depok dan bogor, Kabupaten Tangerang dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDA Pemeriksa Dokumen Elektronik atau pada laman berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi. Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.18
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten



Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemeriksa Dokumen atau melalui tautan berikut https://sidebang.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85



BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 mencakup arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pencapaian indikator makro pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kewilayahan, dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam program-program prioritas.

5.1 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional dan pembangunan daerah pada tahun 2026, yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) PDRB per kapita (juta); 3) Kontribusi PDRB Provinsi; 4) Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6) Indeks Rasio Gini; 7) Indeks Modal Manusia; 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK; dan 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, serta target Prevalansi *Stunting*. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional dan pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing kabupaten/kota yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional dan Prevalensi *Stunting* Pembangunan Daerah masing-masing kabupaten/kota:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.1
Target Indikator Makro dan Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		PDRB per Kapita (Juta Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Gini (Poin)		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)		Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq/Miliar)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)		Prevalensi *Stunting* (%)	
		Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026
1	**KAB BOGOR**	5,21	5.3	54.85	62.70	10.99	10.94	7,05	6.40	7,34	6.92	0,398	0.377	73,63	74.56	N/A	0.75	59.39	59.36	27,63	22.53
2	**KAB SUKABUMI**	5,15	5.68	31.16	36.63	3.11	3.11	6,87	6.43	7,11	6.60	0,342	0.340	70,18	71.24	N/A	5.71	65.15	66.15	20,5	16.73
3	**KAB CIANJUR**	5,14	6.34	24.91	29.78	2.27	2.2	10,14	9.38	5,99	5.15	0,338	0.320	68,89	69.73	N/A	9.65	67.82	67.61	7,2	6.68
4	**KAB BANDUNG**	5,04	6.2	44.12	52.04	5.84	5.83	6,19	5.70	6,36	6.28	0,364	0.338	74,59	75.53	N/A	2.77	59.47	63.98	24,1	19.67
5	**KAB GARUT**	4,95	5.54	29.01	32.94	2.78	2.72	9,68	8.55	6,96	6.34	0,324	0.324	69,91	71.35	N/A	5.07	62.37	68.37	14,2	12.80
6	**KAB TASIKMALAYA**	4,64	4.63	25.91	27.00	1.76	1.73	10,23	10.10	3,74	3.56	0,363	0.357	69,98	70.93	N/A	6.14	45.77	67.85	17	13.96
7	**KAB CIAMIS**	4,97	5.3	34.33	38.31	1.52	1.5	7,39	6.69	3,37	3.19	0,326	0.324	73,64	74.20	N/A	5.92	72.51	69.74	25,64	20.73
8	**KAB KUNINGAN**	5,61	5.99	29.27	33.71	1.25	1.24	11,88	10.72	7,78	6.76	0,369	0.339	71,56	72.00	N/A	7.77	72.05	68.41	22,7	17.44
9	**KAB CIREBON**	5,83	6.37	28.14	32.37	2.37	2.33	11,00	10.10	6,74	5.74	0,374	0.354	72,3	73.29	N/A	5.8	54.55	63.33	22,86	18.69
10	**KAB MAJALENGKA**	6,38	6.95	34.23	38.94	1.63	1.59	10,82	9.63	4,01	3.59	0,354	0.345	71,37	72.44	N/A	12.91	60.74	62.16	18	16.47
11	**KAB SUMEDANG**	4,05	06.03	39.69	46.67	1.66	1.65	9,10	8.34	6,16	5.41	0,337	0.334	74,57	75.45	N/A	6.44	62.47	66.50	17	13.96
12	**KAB INDRAMAYU**	2,18	3	55.16	59.89	3.72	3.93	11,93	11.03	6,25	6.00	0,306	0.290	70,72	71.78	N/A	6.63	60.33	61.13	9,8	8.85
13	**KAB SUBANG**	4,81	6.32	33.03	38.35	1.94	1.89	9,49	8.76	6,73	6.00	0,320	0.315	72,05	73.77	N/A	14.09	61.39	62.28	12,4	10.12
14	**KAB PURWAKARTA**	4,64	6.27	84.02	96.58	3.11	3.12	8,41	7.11	7,34	6.43	0,398	0.339	73,99	74.95	N/A	1.96	61.15	64.48	14,5	11.92
15	**KAB KARAWANG**	4,20	6.14	121.29	137.75	10.92	11.01	7,86	7.22	8,04	7.06	0,376	0.342	73,82	74.65	N/A	3.53	50.34	44.82	17,6	14.37
16	**KAB BEKASI**	5,17	6.4	128.69	139.72	14.85	14.9	4,80	4.39	8,82	7.91	0,367	0.347	76,8	77.78	N/A	1.22	49.6	47.20	23,16	19.07
17	**KAB BANDUNG BARAT**	4,94	6.05	32.5	38.79	2.16	2.17	10,49	9.63	6,7	5.88	0,400	0.367	70,77	72.14	N/A	2.94	58.43	59.84	30,8	25.14
18	**KAB PANGANDARAN**	5,12	5.62	35.64	41.75	0.55	0.55	8,75	7.78	1,58	1.47	0,286	0.285	71,03	71.77	N/A	10.17	58.99	66.26	17,3	14.04

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses alamat berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		PDRB per Kapita (Juta Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Gini (Poin)		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)		Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq/Miliar)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)		Prevalensi *Stunting* (%)	
		Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026	Capaian 2024	Target 2026
19	**KOTA BOGOR**	5,15	5.35	56.61	64.90	2.15	2.16	6,53	5.95	8,13	7.99	0,477	0.460	79,03	80.21	N/A	0.71	59.34	58.09	21,1	17.31
20	**KOTA SUKABUMI**	5,11	5.43	44.76	51.02	0.58	0.58	7,20	6.40	8,34	8.00	0,436	0.420	77,69	78.31	N/A	0.45	62.53	61.79	26,86	21.96
21	**KOTA BANDUNG**	4,99	6.18	147.08	166.98	13.11	13.29	3,87	3.49	7,4	6.46	0,440	0.428	83,75	84.30	N/A	1.31	57.16	51.57	22,8	18.61
22	**KOTA CIREBON**	5,02	6.14	88.56	98.97	1.08	1.11	9,02	7.80	6,29	6.00	0,424	0.419	78,09	78.99	N/A	0.36	59.2	53.25	14,9	13.05
23	**KOTA BEKASI**	5,19	6.38	48.92	54.94	4.56	4.5	4,01	3.55	7,82	7.32	0,435	0.414	83,55	84.47	N/A	1.31	50.7	47.46	11,7	10.55
24	**KOTA DEPOK**	5,47	5.79	43.51	49.50	3.32	3.3	2,34	2.24	6,27	6.00	0,398	0.390	83,05	83.96	N/A	1.48	54.55	58.12	12,5	10.20
25	**KOTA CIMAHI**	5,26	6.22	72.52	82.05	1.53	1.54	4,39	3.89	8,97	7.82	0,402	0.379	80,3	81.01	N/A	0.35	40.99	50.60	22,3	19.17
26	**KOTA TASIKMALAYA**	5,22	5.45	39.44	43.00	1.04	1.03	11,10	9.47	6,49	6.34	0,359	0.350	76,03	76.99	N/A	2.36	58.52	61.79	19,6	17.02
27	**KOTA BANJAR**	5,48	5.25	26.45	28.34	0.2	0.2	5,85	5.14	5,44	5.17	0,318	0.318	75,01	75.82	N/A	3.73	62.6	61.62	18,8	15.43
28	**PROVINSI JAWA BARAT**	**4,95**	**5,15 - 6,20**	**56.08**	**63.65**		**12,8**	**7,46**	**5,51 – 6,02**	**6,75**	**6,31 - 6,66**	**0,421**	**0,381 - 0,420**	**74,94**	**Menggunakan IMM**	**N/A**	**6,97**	**66.02**	**64,31**	**15,9**	**14,39**

Sumber:
Realisasi : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
Target : bedasarkan berita acara hasil kesepakatan target indikator makro kab/kota thn 2026 (rakortekrenbang)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses alamat berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran, rencana program, dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota terdiri atas kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan kebijakan pembangunan kabupaten/kota berbasis prioritas pembangunan daerah provinsi.

5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Pengembangan Wilayah

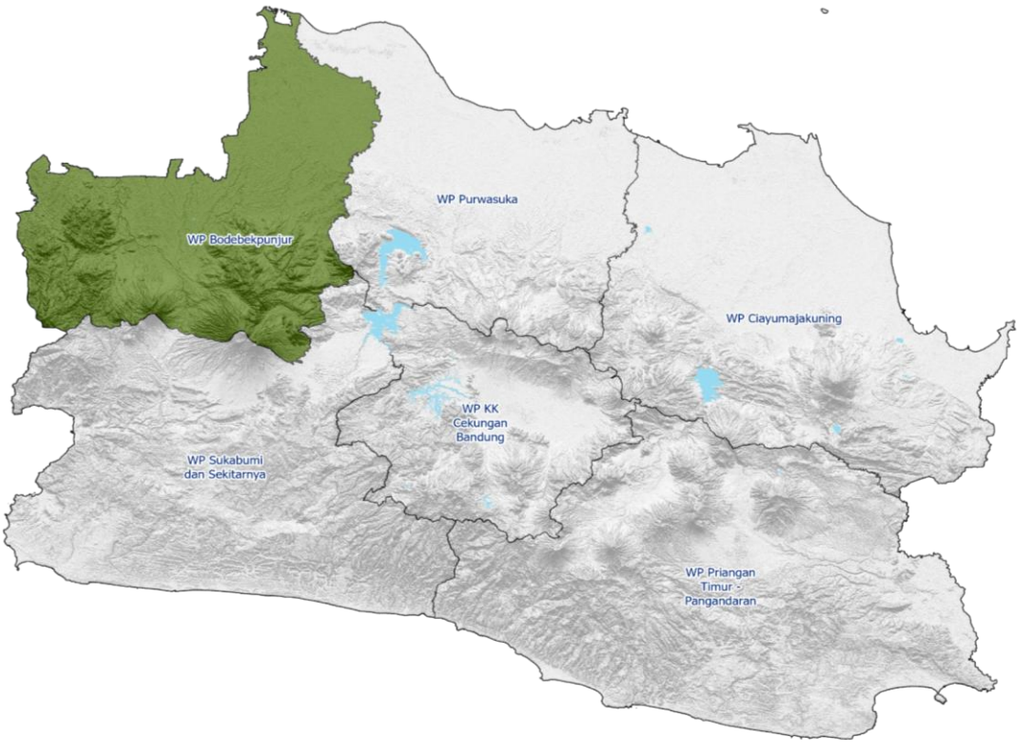
Dalam konteks pengembangan wilayah, pada dasarnya arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Jawa Barat masih menggunakan pendekatan pengembangan kewilayahan berbasis Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. RTRW Provinsi Jawa Barat membagi 27 kota/kabupaten ke dalam 6 (enam) WP yang terdiri atas WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya. Adapun kebijakan pembangunan untuk masing-masing WP yang harus diwujudkan dalam periode 2022-2042 (termasuk pada tahun 2026 ini) diuraikan sebagai berikut.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 5.1
Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur

WP BODEBEKPUNJUR



Lingkup Wilayah	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur.
Tema Pengembangan	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah.
Arah Pengembangan	1. Mengembangkan Infrastruktur Strategis. 2. Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan serta industri kreatif dan pariwisata. 3. Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, dan *non polutif*. 4. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta peningkatan SDM lokal. 5. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani). 6. Melengkapi fasilitas pendukung Pusat Kegiatan Lokal.
Fokus Pengembangan Kab/Kota	1. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibu kota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja;

2. Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan
3. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.

Sektor Unggulan	Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata.
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
Indikasi Program RTRW	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): • Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota. • Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha. • Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi tambak. • Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, dan IKK). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: • Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM. • Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota). Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional: • Pembangunan TPPAS Regional. • Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama kabupaten/kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- Penyediaan sistem pengelolaan.
- Air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

Program Penyelenggaraan Jalan:

- Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Pembangunan Jalan Kolektor.
- Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros.
- Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang.
- Rencana Pembangunan jalan tol baru.
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer.
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1(JKP-1).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2(JKP-2).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3(JKP-3).
- Pemeliharaan jalan tol.

Program Pengelolaan Perkeretaapian:

- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota.
- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan.
- Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api.
- Pengembangan Stasiun.
- *Commuter Line*.
- Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis *Transit Oriented Development* (TOD).

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):

- Pengembangan sistem angkutan umum massal.
- Pembangunan/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B.
- Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik.

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Pengembangan Kebudayaan:

- Pembangunan Pusat Kebudayaan.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya:

- Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:

- Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)

Program Pemasaran Pariwisata:

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

- Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat:

- Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya.
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.
- Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air.
- Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat.
- Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3:

- Pengembangan prasarana pengelolaan limbah B3.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P):
  - ✓ Pengembangan kawasan tanaman pangan
  - ✓ Pengembangan kawasan hortikultura
  - ✓ Pengembangan Potensi Lahan Kering
  - ✓ Pengembangan kawasan perkebunan
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.
- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:

- Pembangunan TPPAS Regional.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Kawasan Permukiman:

- Perwujudan Kawasan Permukiman: Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh.
- Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman.

Program Pengembangan Perumahan:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

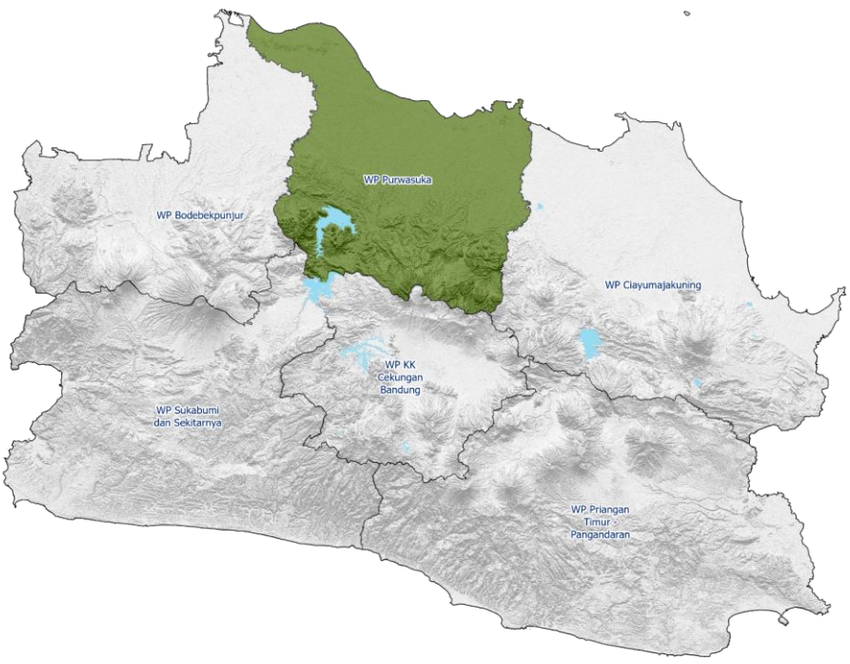
- Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 5.2
Wilayah Pengembangan Purwasuka

WP PURWASUKA



Lingkup Wilayah	Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
Tema Pengembangan	Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura.
Arah Pengembangan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL. 2. Mengembangkan infrastruktur strategis. 3. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.
Fokus Pengembangan Kab/Kota	1. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*); 2. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;

3. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan
4. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, serta kegiatan agroindustri.

Sektor Unggulan	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
Indikasi Program RTRW	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): ● Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi. ● Modernisasi irigasi. ● Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir. ● Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ. ● Penataan dan revitalisasi situ. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: ● Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM. ● Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P):
  - ✓ Pengembangan kawasan tanaman pangan
  - ✓ Pengembangan kawasan hortikultura
  - ✓ Pengembangan Potensi Lahan Kering
  - ✓ Pengembangan kawasan perkebunan
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya:

- Pembangunan Galangan kapal perikanan.

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Tempat Bertelur Penyu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Alur migrasi penyu.
- Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.
- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.
- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:

- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana
- Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

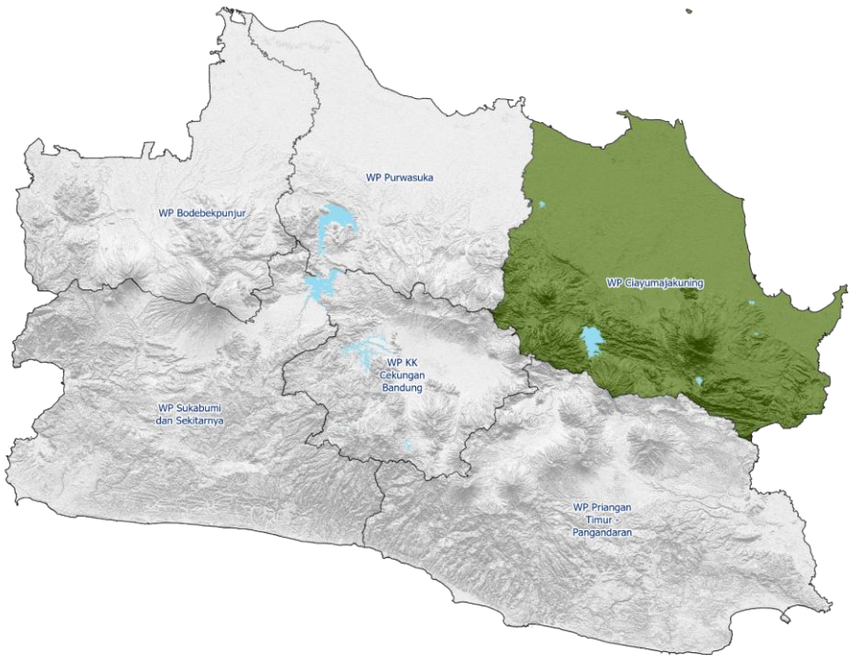
- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.

Program Pengembangan Perumahan:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Gambar 5.3
Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning

WP CIAYUMAJAKUNING



Lingkup Wilayah	Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
Tema Pengembangan	Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat.
Arah Pengembangan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; 2. Mengembangkan infrastruktur strategis; 3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam;
5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di Kawasan pinggiran;
6. Mendorong pengembangan hutan *mangrove*, rumput laut dan perikanan tambak;
7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir;
8. Mengembangkan infrastruktur strategis; dan
9. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi.

Fokus Pengembangan Kab/Kota

1. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di daerah bagian Timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi;
2. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, industri kreatif, bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral;
3. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan KP2B, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;
4. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;
5. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan
6. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

hortikultura, industri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta dan kegiatan pertambangan mineral.

Sektor Unggulan	Tanaman pangan dan hortikultura, Agroforestri, agribisnis, agroindustri, industri kreatif, perikanan, pertambangan, pariwisata.
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
Indikasi Program RTRW	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): ● Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi. ● Modernisasi irigasi. ● Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir. ● Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ. ● Penataan dan revitalisasi situ. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: ● Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM. ● Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota). Program Pengelolaan Ketenagalistrikan: ● Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah. ● Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). ● Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). ● Pengembangan Gardu Listrik. Program Pengelolaan Energi Terbarukan: ● Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan. ● Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). ● Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:

- Kawasan ekosistem esensial.
- Kawasan cagar biosfer.

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri:

- Pembangunan dan pengembangan industri hulu agro (garam) dan industri petrokimia hulu.
- Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/ pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya.

Program Pengelolaan Hasil Hutan:

- Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri.

Program Pengembangan Kebudayaan:

- Pembangunan Pusat Kebudayaan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:

- Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)

Program Pemasaran Pariwisata:

- Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura.
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P):
  - ✓ Pengembangan kawasan tanaman pangan
  - ✓ Pengembangan kawasan hortikultura
  - ✓ Pengembangan Potensi Lahan Kering

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- ✓ Pengembangan kawasan perkebunan
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap:

- Pengembangan Kawasan Perikanan:
  - ✓ Perikanan Tangkap Laut
  - ✓ Perikanan Tangkap Perairan Umum
  - ✓ Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
  - ✓ Perikanan Budidaya Laut
  - ✓ Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:

- Zona Pelabuhan Perikanan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.
- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.
- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:

- Perwujudan Kawasan Pariwisata (W).

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Tempat Bertelur Penyu.
- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Alur migrasi penyu.
- Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Program perencanaan dan Pembangunan Industri:

- Pusat Industri Kelautan dan Perikanan: Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya:

- Pembangunan Galangan Kapal Perikanan.
- Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan.
- Sentra kegiatan perikanan budidaya.

Program Pengembangan Ekspor:

- peningkatan ekspor hasil perikanan.

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:

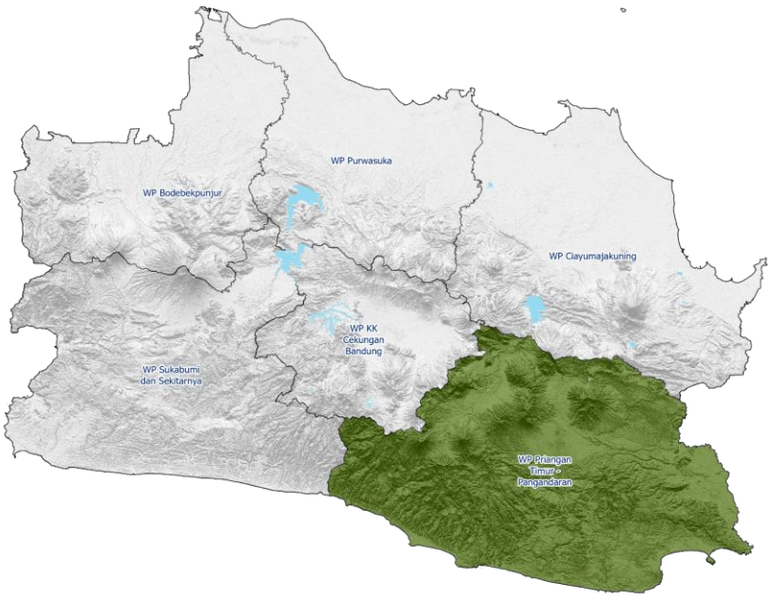
- Pembangunan TPPAS Regional.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama kabupaten/kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.
- Penyediaan sistem pengelolaan.
- Air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Gambar 5.4
Wilayah Pengembangan Priangan Timur – Pangandaran

WP PRIANGAN TIMUR - PANGANDARAN



Lingkup Wilayah	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Tema Pengembangan	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan daerah bagian Selatan.
Arah Pengembangan	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL.
Fokus Pengembangan Kab/Kota	1. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; 2. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya;

4. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam;
5. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.

Sektor Unggulan	Kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral.
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
Indikasi Program RTRW	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: ● Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM. ● Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota). Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional: ● Pembangunan TPPAS Regional. ● Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA). ● Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional. ● Pengembangan TPA bersama kabupaten/kota. ● Pengembangan TPST atau TPA Lokal. ● Pembangunan dan Pengembangan TPA. ● Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R). ● Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik.

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Pengembangan Perumahan:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura.
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P): Pengembangan kawasan tanaman pangan; Pengembangan kawasan hortikultura;

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Pengembangan Potensi Lahan Kering; Pengembangan kawasan perkebunan.

- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian.

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

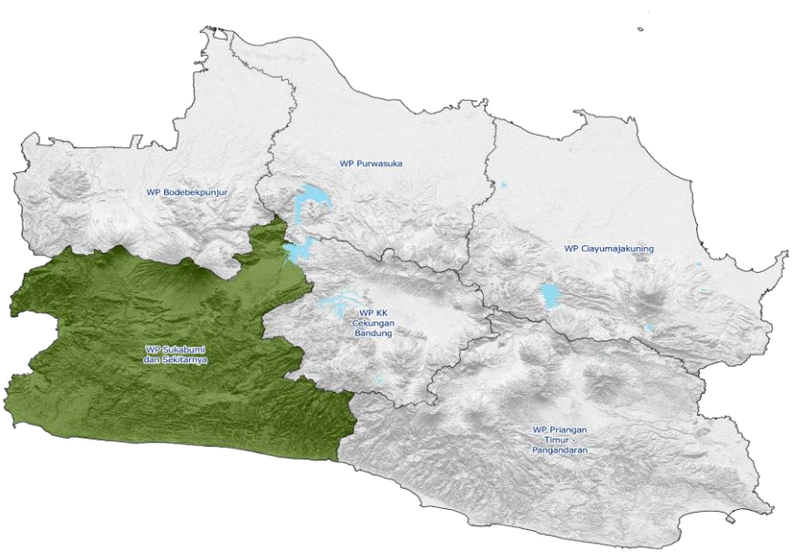
- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Tempat Bertelur Penyu.
- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Alur migrasi penyu.
- Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang.

Program Pengembangan Ekspor:

- Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan.
- Pusat Industri Kelautan dan Perikanan: Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- Pengembangan Kawasan Perikanan: Perikanan Tangkap Laut; Perikanan Tangkap Perairan Umum; Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap; Perikanan Budidaya Laut.
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut.

Gambar 5.5
Wilayah Pengembangan Sukabumi dan Sekitarnya

WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA



1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Lingkup Wilayah	Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur.
Tema Pengembangan	Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu serta membatasi perkembangan di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur.
Arah Pengembangan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL. 2. Mengembangkan infrastruktur strategis. 3. Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. 4. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global.
Fokus Pengembangan Kab/Kota	1. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi; 2. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, *agroforestry*, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan 3. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Sektor Unggulan	Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, budidaya perikanan laut (lobster), serta pertambangan mineral.
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
Indikasi Program RTRW	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: • Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM. • Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota). Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional: • Pembangunan TPPAS Regional. • Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA). • Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional. • Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota. • Pengembangan TPST atau TPA Lokal. • Pembangunan dan Pengembangan TPA. • Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R). • Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R). • Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah: • Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota. • Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri. • Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik.

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Pengembangan Perumahan:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura.
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P): Pengembangan kawasan tanaman pangan; Pengembangan kawasan hortikultura; Pengembangan Potensi Lahan Kering; Pengembangan kawasan perkebunan.
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan.
- Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian.

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Tempat Bertelur Penyu.
- Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Alur migrasi penyu.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

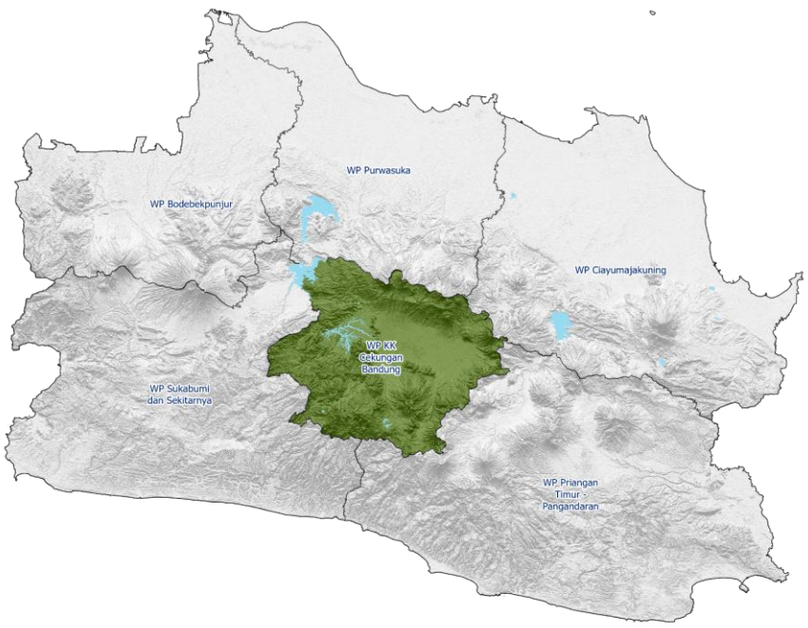
- Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang.

Program Pengembangan Ekspor:

- Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan.
- Pusat Industri Kelautan dan Perikanan: Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- Pengembangan Kawasan Perikanan: Perikanan Tangkap Laut; Perikanan Tangkap Perairan Umum; Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap; Perikanan Budidaya Laut.
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut.

Gambar 5.6
Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung

WP CEKUNGAN BANDUNG



Lingkup Wilayah	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
Tema Pengembangan	Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.
Arah Pengembangan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL. 2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di Kawasan perkotaan. 3. Mengembangkan Kawasan pinggiran PKN dengan tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

menjaga fungsi lindung kawasan.
4. Mengembangkan Pembangunan dan hunian vertikal.

Fokus Pengembangan Kab/Kota	1. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; 2. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan; 3. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi; 4. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan 5. Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimangung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan) diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
Sektor Unggulan	Pertanian hortikultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya
Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi 3:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.

Indikasi Program RTRW

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:

- Kawasan ekosistem esensial.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:

- Pengembangan kawasan tanaman pangan.
- Pengembangan kawasan hortikultura.
- Perwujudan Kawasan Pertanian (P): Pengembangan kawasan tanaman pangan; Pengembangan kawasan hortikultura; Pengembangan Potensi Lahan Kering; Pengembangan kawasan perkebunan.

Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan

Pengembangan *Agro Techno Park* dan *Science Technopark*.

Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU).
- Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.
- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:

- Pembangunan TPPAS Regional.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama kabupaten/kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:

- Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:

- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Program Pengelolaan Energi Terbarukan:

- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Program Pengembangan Perumahan:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Penyelenggaraan Jalan:

- Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Pembangunan Jalan Kolektor.
- Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros.
- Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang.
- Rencana Pembangunan jalan tol baru.
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer.
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3).
- Pemeliharaan jalan tol.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):

- Pengembangan sistem angkutan umum massal.
- Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.

Program Penyelenggaraan Perkeretaapian:

- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan.
- Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api.
- Pengembangan Stasiun *Commuter Line*.
- Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis *Transit Oriented Development* (TOD).

5.2.2 Arah Kebijakan Kawasan Strategis di Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan berbasis pengembangan kewilayahan di Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, selaras dan memperkuat program strategis berskala kewilayahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) peraturan presiden sebagai berikut:

1) Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

   Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Bandung dan Kota Cimahi, sedangkan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas:

   a. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
   b. Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
   c. Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
c. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
d. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
e. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

2) Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas:

a. Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor;
b. Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor;
c. Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok;
d. Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang;
e. Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan
f. Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang;
g. Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangeran Selatan;
h. Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan
i. Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
b. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
c. Rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
d. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan
e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

3) Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Adapun percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan, yang menjadi bagian dari peraturan presiden tersebut. Adapun pendanaan untuk melaksanakan percepatan pembangunan di kedua kawasan tersebut bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
d. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

a) Arah Pengembangan Kawasan Rebana

Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terdiri atas: 3 (tiga) titik di Kabupaten Subang; 6 (enam) titik di Kabupaten Indramayu; 2 (dua) titik di Kabupaten Majalengka; 1 (satu) titik di Kabupaten Sumedang; dan 1 (satu) titik di Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

b) Arah Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Rencana pembangunan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan berlokasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Isu - isu strategis di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan antara lain infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, serta pariwisata terpadu. Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan dengan wilayah lainnya juga menjadi isu strategis di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Keenam kabupaten di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2. Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3. Kabupaten Tasikmalaya diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4. Kabupaten Garut diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;
5. Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

6. Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan.

Kawasan pengembangan pada kabupaten-kabupaten tersebut didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya.

5.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hasil sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan terhadap kabupaten/kota untuk memenuhi harapan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten dan kota Tahun 2026 yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul; (2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; (3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; serta (4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut:

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	
		Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta dan penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan.	
		Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.	
		Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	
		Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan penuntasan dan pencegahan *stunting*.	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	
		Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	
	Terbentuknya Individu Beragama, Beretika, dan Berbudaya	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
		Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	
	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	
		Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas	
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital *literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	
		Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	
	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ *stockyard* yang *modern* terintegrasi).	
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		strategis industri Kertajati-Cirebon.	
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	
		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*)	
		Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumberdaya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
		Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*.	
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
		Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	
		Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai.	
		Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	
		Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	
	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja,	Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	
		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM.	
	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Penguatan pengendalian inflasi daerah	
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi	
		pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun	
		wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
Mengurangi Disparitas	Meningkatnya layanan	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan	1. Kab. Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi Wilayah Metropolitan Kawasan Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan) 7. Kota Cirebon
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi Wilayah Metropolitan Kawasan Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan) 7. Kota Cirebon
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi Wilayah Metropolitan Kawasan Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan) 7. Kota Cirebon
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	PMO Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok BP Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			BP Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan) 7. Kota Cirebon
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi Wilayah Metropolitan Kawasan Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			7. Kota Cirebon
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kabupaten Cirebon 4. Kabupaten Kuningan 5. Kabupaten Majalengka 6. Kabupaten Pangandaran 7. Kota Bandung
		Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di 27 Kabupaten/Kota terutama WPPI 1: 1. Kabupaten Bekasi 2. Kabupaten Bogor 3. Kabupaten Karawang 4. Kabupaten Purwakarta 5. Kabupaten Subang WPPI 2: 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Majalengka 4. Kab. Sumedang
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi
		Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1.Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 2. Akses Pelabuhan Patimban. 3. Bandung Intra Urban *Toll Road* (BIUTR) 4. Cibadak-Palabuhanratu;	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Ciamis 4. Kab. Cianjur 5. Kab. Cirebon 6. Kab. Garut 7. Kab. Indramayu 8. Kab. Kuningan 9. Kab. Pangandaran 10. Kab. Subang 11. Kab. Sumedang 12. Kab. Tasikmalaya 13. Kota Bandung 14. Kota Banjar 15. Kota Cirebon 16. Kota Sukabumi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		5. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 6. Ciranjang-Padalarang; 7. Garut-Pameungpeuk; 8. Kalipucang-Pangandaran; 9. Cirebon-Indramayu; 10. Cirebon-Kuningan; 11. Kertajati-Indramayu	17. Kota Tasikmalaya
		Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	Jalan Khusus Tambang: 1. Kab. Bogor
		Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang 7. Kota Cirebon
		Reaktivasi layanan perkeretaapian di Jawa Barat terutama pada: 1. Layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang; 2. Layanan perkeretaapian Banjar-Pangandaran-Cijulang. 3. Layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari; 4. Layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; serta 5. Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Cibatu-Garut-Cikajang.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Ciamis 4. Kab. Garut 5. Kab. Pangandaran 6. Kab. Sumedang 7. Kota Banjar
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	1. Kab. Bandung Barat 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kota Bogor 6. Kota Sukabumi
		Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung: 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.	Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung: 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Karawang 5. Kab. Purwakarta 6. Kab. Sumedang 7. Kota Bandung 8. Kota Bekasi Kereta Api Cepat Bandung – Kertajati/Cirebon (masih direncanakan)
		Penyiapan pembangunan multi-*infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab. Cianjur 7. Kab. Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Pangandaran 12. Kab. Purwakarta 13. Kab. Subang 14. Kab. Sukabumi 15. Kab. Sumedang 16. Kab. Tasikmalaya 17. Kota Bandung 18. Kota Banjar 19. Kota Bekasi 20. Kota Bogor 21. Kota Cimahi 22. Kota Cirebon 23. Kota Depok 24. Kota Sukabumi 25. Kota Tasikmalaya
		Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	Pelabuhan Palabuhanratu: 1. Kab. Sukabumi
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati): 1. Kab. Majalengka
		Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab. Cianjur 7. Kab. Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab. Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya
		Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya mencakup kawasan hutan lindung dan hutan lindung yang berupa ekosistem *mangrove* di: 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Cianjur 6. Kab. Garut 7. Kab. Indramayu 8. Kab. Karawang 9. Kab. Majalengka 10. Kab. Purwakarta 11. Kab. Subang 12. Kab. Sukabumi 13. Kab. Sumedang 14. Kab. Tasikmalaya
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Mencakup seluruh kabupaten/kota dengan upaya pengendalian melalui penyusunan dokumen RTRW dan RDTR serta secara khusus dilakukan upaya konservasi di: DAS Citarum: 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab.Bogor (sebagian kecil) 5. Kab. Cianjur (sebagian kecil) 6. Kab. Garut (sebagian kecil) 7. Kab. Karawang 8. Kab. Purwakarta 9. Kab. Subang (sebagian kecil) 10. Kab. Sukabumi (sebagian kecil)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			11. Kab. Sumedang (sebagian kecil) 12. Kota Bandung 13. Kota Cimahi DAS Cilamaya: 1. Kab. Karawang 2. Kab. Purwakarta 3. Kab. Subang DAS Kali Bekasi: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kota Bekasi 4. Kota Bogor (sebagian kecil) 5. Kota Depok
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Dukungan peningkatan pelayanan sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah regional	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Karawang 6. Kab. Kuningan 7. Kab. Majalengka 8. Kab. Purwakarta 9. Kab. Sukabumi 10. Kab. Sumedang 11. Kota Bandung 12. Kota Bekasi 13. Kota Bogor 14. Kota Cimahi 15. Kota Cirebon 16. Kota Depok 17. Kota Sukabumi
		Penyiapan dan penetapan instrumen *circular economy* dalam pengelolaan sampah.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Karawang 6. Kab. Kuningan 7. Kab. Majalengka 8. Kab. Purwakarta 9. Kab. Sukabumi 10. Kab. Sumedang 11. Kota Bandung 12. Kota Bekasi 13. Kota Bogor 14. Kota Cimahi 15. Kota Cirebon 16. Kota Depok 17. Kota Sukabumi
		Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalu pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis;	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bogor 4. Kab. Ciamis 5. Kab. Cirebon 6. Kab. Majalengka 7. Kab. Subang 8. Kab. Sumedang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.	
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur: 1. Kab. Bekasi 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur (4 Kecamatan) 4. Kota Bekasi 5. Kota Depok Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Sumedang (5 Kecamatan) 4. Kota Bandung 5. Kota Cimahi Wilayah Metropolitan Kawasan Rebana 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang (21 Kecamatan) 7. Kota Cirebon
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	1. Kab. Cirebon 2. Kota Cirebon
		Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/ micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kab. Ciamis 6. Kab.Cianjur 7. Kab.Cirebon 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Karawang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
			11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab.Pangandaran 14. Kab. Purwakarta 15. Kab. Subang 16. Kab. Sukabumi 17. Kab. Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	1. Kab. Cianjur 2. Kab. Ciamis 3. Kab. Garut 4. Kab. Pangandaran 5. Kab. Sukabumi 6. Kab. Tasikmalaya
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	1. Kab. Cianjur 2. Kab. Ciamis 3. Kab. Garut 4. Kab. Pangandaran 5. Kab. Sukabumi 6. Kab. Tasikmalaya
		Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah.	
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcer, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	
	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomial nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuasn SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.	
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) aspek di atas, terdapat beberapa arah kebijakan yang bersifat khusus, di antaranya:

1. Opsen PKB dan BBNKB

   Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), yang mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, -terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan adanya penetapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pajak daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini secara tegas mengubah skema Dana Bagi Hasil PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Secara definisi, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan PKB dan BBNKB terutang, dengan tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari besaran PKB dan BBNKB terutang. Saat terutang Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB, dengan wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB dan BBNKB yang didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 191 UU HKPD menyebutkan bahwa perubahan ketentuan mengenai PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD atau tanggal 5 Januari 2025. Sementara itu, dalam Pasal 112 PP KUPDRD dijelaskan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BBNKB atau bentuk sinergi lainnya, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan sinergi pengelolaan Opsen atas PKB dan BBNKB ditujukan dalam rangka meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kepastian atas penerimaan pajak, dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menjadi lebih baik. Kebijakan Opsen Pajak juga diharapkan dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan strategi kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu : 1) Sinergi peran dan pendanaan antara provinsi dengan kabupaten (*Role Sharing* dan *Cost Sharing*); 2) Sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB; dan 3) Sinergi pemanfaatan data dan informasi.

Pengelolaan kebijakan opsen PKB dan opsen BBKNB yang efektif dan efisien tentunya harus direncanakan dengan baik, sehingga prosesnya tidak akan terlepas dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi untuk menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran optimalisasi pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk forum perangkat daerah pelaksana fungsi penunjang pendapatan daerah dan forum lain yang terkait.

Penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran optimalisasi pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB diawali dengan penyusunan target pendapatan daerah pada dokumen RKPD Provinsi diikuti oleh penyusunan RKPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

kabupaten/kota. RKPD kabupaten/kota yang memuat program dan kegiatan optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai pelaksanaan pembagian peran (*role sharing*) dan pembiayaan bersama (*cost sharing*). Target PKB dan BBNKB kabupaten/kota mengacu pada rancangan RKPD Provinsi, yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Pasal 88 dan Pasal 89, sinergi pemungutan opsen diatur dengan ketentuan alokasi sebagai berikut :

a. Opsen PKB:
   1) 1,5 persen dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp200.000.000.000,-;
   2) 1,75 persen dari penerimaan Opsen PKB antara Rp100.000.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000.000,-; dan
   3) 2,0 persen dari penerimaan Opsen PKB kurang dari Rp100.000.000.000,-.
b. Opsen BBNKB:
   1) 1,5 persen dari penerimaan opsen BBNKB lebih dari Rp100.000.000.000,-;
   2) 1,75 persen dari penerimaan opsen BBNKB antara Rp60.000.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000.000,-; dan
   3) 2,0 persen dari penerimaan opsen BBNKB kurang dari Rp60.000.000.000,-.

Adapun sinergi peran (*role sharing*) antara Provinsi dan kabupaten/kota difokuskan kepada :

a. Pengadaan dan penyebaran Unit Layanan Samsat Digital Mandiri;
b. Penagihan dan sosialisasi (Layanan Pajak *digital Tax Center*) melalui penyebaran *WA Blast*;
c. Pendataan dan pemetaan kendaraan melalui bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik setempat;
d. Sosialisasi dan edukasi perpajakan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

e. Publikasi, Rapat Evaluasi, Bimtek Kesamsatan, Anugerah Pajak, dan lain sebagainya.

2. Kemiskinan Ekstrem

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat tahun 2023 tercatat sebanyak 403 ribu jiwa atau 0,79 persen, menurun sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan Maret 2022. Kebijakan mengenai penanganan kemiskinan ekstrem telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu melalui strategi (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (2) Peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Program-program yang menyasar ketiga strategi tersebut telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang di-*tagging* hingga nomenklatur sub kegiatan. Untuk melaksanakan program yang termasuk ke dalam 3 (tiga) strategi tersebut, pemerintah daerah diharuskan menggunakan data *by name by address* Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar lokus intervensi dapat tepat sasaran.

3. Renaksi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021

Rencana aksi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan. Program tersebut meliputi:

a) penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi;
b) pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan;
c) pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar,
d) pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air;
e) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
f) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata;
g) Pengembangan sektor kelautan dan perikanan; dan
h) pembangunan dan peningkatan infrastruktur lainnya.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan anak-anak dalam pendidikan formal di setiap jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Dalam konteks kewenangan kabupaten/kota,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

peningkatan angka partisipasi sekolah merupakan salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ada 3 (tiga) jenis APS yang menjadi Kewenanan kabupaten/kota yaitu anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C). Kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya, merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperhatikan karakteristik dan tantangan unik di setiap daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Pembangunan sekolah-sekolah baru, perbaikan gedung sekolah yang sudah ada, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi fokus utama. Dengan adanya fasilitas yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa. Selain itu, kabupaten/kota juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Guru yang kompeten dan terampil akan mampu memberikan pengajaran yang efektif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar.

Tantangan dalam meningkatkan APS di tingkat kabupaten/kota juga melibatkan faktor sosial dan ekonomi. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah seringkali menyediakan program bantuan pendidikan, seperti beasiswa, bantuan seragam sekolah, dan makanan gratis bagi siswa kurang mampu. Program-program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan finansial. Selain itu, kampanye kesadaran pentingnya pendidikan juga gencar dilakukan. Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, dan organisasi non-pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

depan anak-anak mereka. Kesadaran yang meningkat diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan APS. Kabupaten/kota yang mampu menciptakan sinergi dan kerjasama yang baik akan lebih mudah mencapai target partisipasi sekolah yang tinggi. Dengan demikian, setiap anak di wilayah tersebut dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Melalui berbagai upaya tersebut, kabupaten/kota berperan vital dalam menciptakan generasi muda yang terdidik, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan APS bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang memberikan harapan dan kesempatan bagi setiap anak untuk meraih impian mereka dan membangun masa depan yang lebih baik.

5. Peningkatan Kualitas SDM

Masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama perlu terus dijaga. Upaya peningkatan sumber daya, lembaga keagamaan, dan ekonomi umat, serta penguatan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap radikalisme dan komunisme terus dilakukan melalui pengembangan sistem kewaspadaan dini masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar tercipta sikap saling menghormati antar suku dan agama, sehingga dapat mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan komunisme serta menghindari terjadinya kerusuhan di tengah masyarakat.

Pendidikan dan sosialisasi terhadap munculnya paham-paham yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban terus dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara unsur di Pemerintah

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Daerah Provinsi Jawa Barat, TNI/POLRI serta masyarakat Jawa Barat.

6. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merujuk pada kemampuan suatu negara atau daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya secara berkelanjutan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut melibatkan beberapa aspek yaitu aspek ketersediaan seperti produksi pangan, aspek keterjangkauan seperti distribusi dan akses pangan serta aspek pemanfaatan seperti konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Selain itu, ketahanan pangan mencakup aspek keamanan pangan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi aman dan sehat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah produksi pangan yang cukup, akses terhadap pangan, stabilitas harga pangan, keamanan pangan, dan distribusi pangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah pengembangan pertanian dengan memperhatikan teknologi pertanian modern, diversifikasi pertanian untuk mengurangi risiko gagal panen, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan pedesaan, dan pusat penyimpanan pangan, peningkatan akses pangan dengan peningkatan akses pasar dan distribusi pangan, sera pemberdayaan petani dengan memberikan pelatihan, bantuan penyediaan alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

7. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemandirian Pesantren

Peningkatan sarana prasarana dan kemandirian pesantren diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kemiskinan masyarakat Jawa Barat. Pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) di lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan hal yang sangat penting. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara penguasaan ilmu keagamaan dan ilmu umum sehingga terbentuk santri yang mandiri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Penyelenggaraan Pesantren. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) fokus bantuan untuk pondok pesantren yaitu hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.

Unsur pemberdayaan memberikan jaminan bahwa pondok pesantren, para alumni, dan kiai untuk diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Jawa Barat. Pondok pesantren juga akan menerima penyuluhan dari pemerintah tanpa mengganggu atau mengubah kurikulum yang telah diterapkan masing-masing lembaga.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah program unggulan terkait pesantren maupun keumatan melalui kegiatan perbaikan ruang kelas keagamaan/pesantren hal ini dasari bagaimana peran pemerintah provinsi dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pesantren, Program Insentif Guru Diniyah dan penyuluh agama ini didasari bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan kesejahteraan bagi Guru Diniyah dan Guru Agama. Berbagai program di bidang tersebut bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Jawa Barat

8. Pengelolaan Air Baku dan Air Minum, Sanitasi (Air Limbah Domestik) dan Persampahan

Upaya peningkatan pengelolaan air baku dan air minum dilakukan melalui pengembangan jaringan perpipaan serta pembangunan waduk dan tempat penampungan air, baik yang bersifat alami maupun buatan.

Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi di wilayah perkotaan dilakukan secara terpadu. Untuk sanitasi, fokus diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sementara itu, pengelolaan persampahan dilakukan melalui percepatan operasionalisasi sistem pengelolaan sampah regional, serta penerapan pendekatan *waste to energy* dan *circular economy*.

Selain itu, pengendalian *food waste*, *food loss*, dan limbah ditingkatkan melalui optimalisasi sistem operasional. Untuk menjaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

kualitas air dan udara, dilakukan upaya peningkatan tutupan lahan dan perbaikan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

9. Pengembangan Sistem Transportasi Massal

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif salah satu upaya dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur transportasi massal perkotaan berbasis jalan maupun berbasis rel. Persiapan kaitannya dengan penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana prasarana sistem transportasi publik rendah karbon yang terintegrasi pada kawasan perkotaan.

10. Pengelolaan dan Peningkatan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan dan peningkatan pariwisata dilaksanakan dengan mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata tersebut adalah pembangunan atau pengembangan 175 Desa Wisata Berkembang, pembangunan 27 destinasi wisata, inisiasi pembangunan 6 (enam) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata meliputi, KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi, KEK Aeropolis Majalengka, KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Agrowisata Purwakarta, dan KEK Subang.

11. Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur Desa

Pembangunan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Pembangunan desa dilakukan dengan meningkatkan kemandiri desa melalui penyediaan layanan dasar, penguatan ketahanan sosial, peningkatan perekonomian desa, peningkatan kualitas lingkungan desa, peningkatan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

12. Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan

Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama kelompok rentan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjamin perlindungan hukum melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan mendorong peran

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

serta masyarakat. Kelompok rentan juga diberikan pendidikan dan pelatihan guna mencegah serta melindungi diri dari tindak kriminalitas dan pelecehan. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dini terhadap intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi Jawa Barat ditujukan agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15-6,20 persen pada tahun 2026 dapat sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ekonomi hijau akan menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau, dan pengembangan produk-produk hijau di wilayah ini. Implementasi ekonomi hijau merepresentasikan efektivitas transformasi ekonomi Jawa Barat menuju ekonomi hijau secara nyata, representatif, dan akurat, mencakup keterkaitan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari ekonomi hijau di Jawa Barat adalah mendorong kebijakan publik dalam menciptakan sistem perekonomian hijau yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, sambil memperhatikan daya dukung lingkungan setempat. Melalui transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas lingkungan hidup.

Ekonomi Biru merupakan pendekatan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya perairan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja, meliputi berbagai sektor penting, termasuk perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi Biru memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penerapan Ekonomi Biru diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Di Jawa Barat, dengan garis pantai yang luas dan sumber daya laut yang melimpah, penerapan Ekonomi Biru sangat relevan. Pemanfaatan potensi perairan Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan produksi hasil laut. Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti energi angin dan gelombang laut dapat menjadi sumber energi bersih yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pariwisata bahari juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal sekaligus melestarikan keindahan alam laut Jawa Barat. Pengelolaan limbah yang efektif dan upaya mitigasi perubahan iklim akan menjaga ekosistem laut tetap sehat, memastikan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Dengan strategi yang tepat, Ekonomi Biru di Jawa Barat tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional tetapi juga memperkuat daya saing global, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan Ekonomi Biru ini demi masa depan yang lebih berkelanjutan

5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah

Sinergi Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperlukan dalam mendukung pencapaian visi nasional dan visi Jawa Barat Istimewa. Arah kebijakan per bidang urusan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat serta Sasaran pencapaian *outcome* per bidang urusan merupakan salah satu upaya dalam penyelarasan perencanaan pembangunan dari seluruh tingkatan pemerintah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

5.3.1 Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Asta Cita

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan prioritas nasional tersebut.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 menjadi upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Berikut arah kebijakan bidang urusan dalam mendukung Asta Cita:

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Bidang Urusan dalam Mendukung Asta Cita

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
1	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk Mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
6.	Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.	Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10.	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11.	Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas Layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15.	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18.	Penanaman Modal	Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
20.	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
21.	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
22.	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
			yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
23.	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24.	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
25.	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26.	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27.	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28.	Kehutanan		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
30.	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31.	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
32.	Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
		Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

5.3.2 Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Sasaran Pembangunan Provinsi

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergi pembangunan daerah antarwilayah, antar sub sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain baik dari sisi sasaran, program, maupun kelembagaan dalam memberdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memberdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli, dan kesehatan.

Upaya untuk membangun sinergitas didasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sementara sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Berikut tabel Sinergi Pembangunan Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan urusan pemerintahan:

1. Pendidikan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan dapat digambarkan melalui terselesaikannya rencana tata ruang daerah dan terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang umum yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.4
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pendidikan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	86
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	83
		Iklim keamanan SMA	Nilai	74
		Iklim keamanan SMK	Nilai	71
		Iklim keamanan SDLB	Nilai	78
		Iklim keamanan SMPLB	Nilai	75
		Iklim keamanan SMALB	Nilai	74
		Iklim kebinekaan SMA	Nilai	74
		Iklim kebinekaan SMK	Nilai	71
		Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	74
		Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73
		Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	63
		Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	61
		Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	70
		Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	72
		Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	71

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

2. Kesehatan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan dapat digambarkan melalui terselesaikannya rencana tata ruang daerah dan terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang umum yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesehatan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	134
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	(%)	96
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	24
		Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	N/A (target belum ditetapkan Kemenkes)
		Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek)	Persentase	18
		Presentase lanjut usia yang mandiri	Persentase	80 (target 2024, target 2026 belum ditetapkan Kemenkes)
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	3,3 (capaian SKI 2023, target belum ditetapkan Kemenkes)
		Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	N/A (indikator baru, karena indikator yang ada hanya untuk usia 10-18 tahun pada SKI 2023, target belum ditetapkan Kemenkes)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	0
		Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	70 (target berdasarkan hasil koordinasi dengan bidang terkait melihat kondisi existing dan tantangan ke depan)
		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	90
		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	N/A (indikator baru, target belum ditetapkan Kemenkes)
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persentase	25.7 (capaian SKI 2023, target belum ditetapkan Kemenkes)
		Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/Kota	N/A (indikator baru, target belum ditetapkan Kemenkes)
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	55
		Insidensi Tuberkulosis	Kasus	264.1 (target belum ditetapkan Kemenkes)

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

3. Pekerjaan Umum

Bidang Pekerjaan Umum memiliki tujuh belas indikator dimana menggambar kinerja bidang pekerjaan umum yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pekerjaan Umum

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya ketahanan air untuk Mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	48
		Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	2.573.932

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
2	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	5
		Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	0
		Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	0
		Penetapan RTRW	Perda/Perkada	6
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	10
		Penetapan RDTR	Perda/Perkada	10

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penataan Ruang dapat digambarkan melalui terselesaikannya rencana tata ruang daerah dan terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang umum yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Penataan Ruang

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	58

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sejumlah target indikator pembangunan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota. Target ini dibagi berdasarkan masing-masing bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pemerintahan, berikut adalah sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 5.8
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

6. Sosial

Sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota Bidang Sosial memiliki sepuluh indikator dimana menggambar kinerja bidang sosial yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1.500
		SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	50
		Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	20
		Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

7. Tenaga Kerja

Sinergi pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang tenaga kerja sebagaimana berikut.

Tabel 5.10
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Tenaga Kerja

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	44
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	2.880.455
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	272
		Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	1

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan melalui meningkatnya kesetaraan gender, peran perempuan, dan perlindungan anak yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.11
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0
		Persentase ARG Daerah	%	5
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	901
		Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	100
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

9. Pangan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan melalui meningkatnya ketahanan pangan yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	96
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50
		Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	95
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

10. Pertanahan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan dapat digambarkan melalui terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pertanahan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	7.000
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	7.400

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

11. Lingkungan Hidup

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui lingkungan hidup berkualitas yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Lingkungan Hidup

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	68
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	N/A
		Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	86

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat digambarkan melalui meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital yang dijelaskan lebih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.15
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	97
		Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	Persentase	55
		Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	Persentase	65,5
		Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	63
		Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Persentase	63
		Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	20

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan melalui Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	65
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	63
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	13

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

14. Perhubungan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan dapat digambarkan melalui terwujudnya peningkatan konektivitas antar wilayah dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perhubungan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	1
		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	1
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	35
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

15. Komunikasi dan Informatika

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan dapat digambarkan melalui terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

berikut.

Tabel 5.18
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	4
		Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	4
		Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	4
		Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	52
		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	77

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat digambarkan melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1
		Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	10
		Proporsi Jumlah UKM	Persentase	3
		Rasio Kewirausahaan	Persentase	4
		Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	9
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

17. Penanaman Modal

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal dapat digambarkan melalui pencapaian target realisasi penanaman modal yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.20
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Penanaman Modal

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	269

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

18. Kepemudaan dan Olahraga

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.21
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	82,43
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	5,35
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	65,63
		Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	26,01
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	52,36
		Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	99
		Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	79

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

19. Kebudayaan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan dapat digambarkan melalui peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.22
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kebudayaan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	7.336
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	86
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	115
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	1.231
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	56
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	50
		Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	n/a

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

20. Statistik

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik dapat digambarkan melalui tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.23
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

21. Persandian

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian dapat digambarkan melalui peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.24
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	85

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

22. Perpustakaan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan dapat digambarkan melalui meningkatnya kegemaran membaca dan literasi masyarakat yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 5.25
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perpustakaan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	7.294
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	7.320

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

23. Kearsipan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan dapat digambarkan melalui meningkatnya tertib arsip dan mengembangkan memori kolektif bangsa yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.26
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

24. Kelautan dan Perikanan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digambarkan melalui terwujudnya tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kelautan dan Perikanan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	24
		Produksi Garam	Ton	68.000
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	282.707

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.309.150
		Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	86
		Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	97.242
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	1

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

25. Pariwisata

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata dapat digambarkan melalui meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pariwisata

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	N/A
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	175.492.357
		Rasio PDB Pariwisata	%	3
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	131.655
		Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	N/A
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	N/A

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

26. Pertanian

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian dapat digambarkan melalui meningkatnya produksi pertanian

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.29
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pertanian dan Pangan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Beras	Ton	5.562.999
		Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.070.148
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	36.109
		Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	168.688
		Jumlah Produksi Cabai Besar	Ton	309.809
		Jumlah Produksi Cabai Rawit	Ton	152.481
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	83.971
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	443
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	28.884
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	9.592
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Tebu	Ton	75.428
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	7.839
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	1.388
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	811
		Jumlah Produksi Susu	Ton	305.289
		Jumlah Produksi Telur	Ton	805.342
		Jumlah Produksi Daging Sapi	Ton	73.273
		Jumlah Produksi Daging Ayam	Ton	824.843

Sumber: DKPP, DTPH, Disbun, diolah

27. Kehutanan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan dapat digambarkan melalui meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.30
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kehutanan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	86554.84
		Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	614.250.000.000
		Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	12000
		Peningkatan sumbangan PDRB Subsektor Kehutanan	Persentase	0,07

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

28. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat digambarkan melalui pencapaian ketahanan energi yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Pencapaian Ketahanan Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	23,85
		Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1426
		Intensitas Enegri Primer	(SBM/Rp Milyar)	140,85
		Rasio elektrifikasi	%	99,99

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

29. Perdagangan

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan dapat digambarkan melalui kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor yang dijelaskan lebih lanjut pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

tabel berikut.

Tabel 5.32
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perdagangan

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	4,81
		Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	2,9

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

30. Perindustrian

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian dapat digambarkan melalui tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.33
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perindustrian

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Rp	164,5
		Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	98

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

31. Transmigrasi

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi dapat digambarkan melalui mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Tabel 5.34
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Transmigrasi

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	45

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

32. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan melalui meningkatnya kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	Target Provinsi 2026
1	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	0
		Indeks Kinerja Ormas	Nilai	0

Sumber: Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

Selain sinergi Pembangunan Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan urusan pemerintahan diatas, terdapat sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Beberapa indikator tersebut diturunkan ke tingkatan kabupaten/kota sebagai Indikator Utama Daerah sebagaimana tabel berikut.

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 5.36
Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan penyelarasan Indikator Sasaran Visi Tahun 2026

No	Sasaran Visi / Indikator Provinsi	Target	Sasaran Visi / Indikator Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan per Kapita Meningkat		Peningkatan Pendapatan Per Kapita	
	a. PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	63,65 - 66,0	a. PDRB per kapita (Rp. Juta)	
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,51 - 41,67	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	
2	Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun		Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,51 - 6,02	a. Tingkat Kemiskinan (%)	
	b. Rasio Gini (indeks)	0,381 - 0,420	b. Rasio Gini (indeks)	
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,62	c. Kontribusi PDRB kabupaten/kota (%)	
	d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15 - 6,20		
3	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
	a. Indeks Modal Manusia (Poin)	0,58	a. Indeks Pembangunan Manusia	
4	Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*		Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*	
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,97	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO_2eq/2010 IDR Milyar)	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,31		

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029

Selanjutnya sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diselaraskan melalui empat puluh lima Indikator Utama Pembangunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.37
Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2026

NO	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Provinsi	TARGET	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,56	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	134	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,39	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Provinsi	TARGET	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,40	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	
5	Hasil Pembelajaran:			
a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	- Literasi membaca	62,25		
	- Numerasi	54,13		
b)	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	- Literasi membaca	68,92		
	- Numerasi	69,44		
c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,43		
d)	Harapan Lama Sekolah	12,88	d) Harapan Lama Sekolah	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,84		
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	87,14		
8	Tingkat kemiskinan (%)	5,51 - 6,02	Tingkat kemiskinan (%)	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	41,19		
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	25,32		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian	
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,51 - 41,67	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,21 - 3,46	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	561,76		
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	22,58		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Provinsi	TARGET	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
	b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,23	b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	0,72		
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,31 - 6,66	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	46,92		
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	50,44		
17	Tingkat penguasaan IPTEK			
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	b) Indeks Ekonomi Hijau	61,73	b) Indeks Ekonomi Hijau	
	d) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,01		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,55		
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,7		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,84 - 25,12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,35 - 22,53		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	58,11	d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	
	f) Persentase Desa Mandiri (%)		f) Persentase Desa Mandiri (%)	
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	89,34		
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A		Pada tahun 2026 digantikan menjadi Indeks Pemerintahan Digital
26	Indeks Pelayanan Publik	4,78		
27	Indeks Integritas Nasional	73,84		
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:			
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah			
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	57,24		
30	Indeks Demokrasi Indonesia	87,52		
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,67		
32	Tingkat Inflasi (%)	1,5 - 3,5		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Provinsi	TARGET	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	d) Total Kredit/PDRB (%)	25,08		
34	Inklusi Keuangan (%)	94,70		
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:			
	Efektivitas Kerjasama Internasional	91,33		
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability)			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,24		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,05		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,61		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,456		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,57		
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,31	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	18,88	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	
	c) Pengelolaan Sampah		c) Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	26,11	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	
	- PrProporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	85,53	- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
	a) Ketahanan Energi			
	- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	1424		
	- Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)	142,56		
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,42	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	
	c) Ketahanan Air		c) Ketahanan Air	
	- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	120,12	- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	41,20	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
44	Indeks RIsiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)	108,3		
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	b) Kumulatif	3,31	b) Kumulatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Provinsi	TARGET	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) Tahunan	10,63	d) Tahunan	

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85



BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri atas pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota. Selain itu, penyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) meliputi KPBU, CSR, obligasi daerah, dana umat, dan hibah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/#/1D17AF9E85

6.1 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2026 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2026

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan salah satu acuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan uraian keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam dokumen RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) dalam dokumen (RKP).

Adapun program prioritas Nasional tersebut terdiri atas:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Sementara itu, Prioritas Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

Berikut merupakan keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah pada RKPD tahun 2026 beserta dukungan pendanaan Pemerintah Daerah.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/#/1D17AF9E85

Tabel 6.1
Rencana Program dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia					
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.978.000.000
		2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good* dan *Clean Governance*	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	12.677.400.290
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					
1	Swasembada pangan, energi, dan air	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good* dan *Clean Governance*	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.248.421.196
		Lanjutan Pembangunan pembangkit listrik tenaga air *Pumped Storage Upper* Cisokan	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	4.065.479.000
		Fasilitasi *business matchmaking startup* digital	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good* dan *Clean Governance*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500
		Fasilitasi digital *technopreneur*	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan UMKM	598.697.400
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good* dan *Clean Governance*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500
			P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	86.593.771.304
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Persampahan	82.834.281.536
		Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka di Kab. Bandung		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis		Program Pengelolaan Persampahan	82.834.281.536
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	80.018.206.707
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	86.593.771.304
		Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun pada sistem penyediaan air minum perkotaan Majalengka	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	350.000.000
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada sistem penyediaan air minum Kota Cimahi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Palabuhanratu		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	350.000.000
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada Bendung Cariang di Kabupaten Sumedang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	350.000.000
		Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Persampahan	82.834.281.536
		Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	80.018.206.707
		Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	86.593.771.304
		Pengembangan sentra cabai pada Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Bandung			
		Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Sukabumi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kertajati Aerocity	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	23.100.000.000
		Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban		Program Penyelenggaraan Jalan	2.374.465.488.415
		Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	862.619.720
		Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki			
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000.000
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500
		Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	350.000.000
		Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
		Modernisasi Daerah Irigasi Rentang			
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan Embung Ranca Hilir di Kabupaten Subang	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	296.346.242.042
		Layanan perencanaan dan pengawasan teknik berupa pembangunan *Fly Over* di Lemah Abang Kabupaten Bekasi		Program Penyelenggaraan Jalan	2.374.465.488.415
		Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan		Program Penyelenggaraan Jalan	2.374.465.488.415

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian pada Kereta Api Cipatat-Togog Apu-Padalarang di Kabupaten Bandung Barat		Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.800.000.000
		Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di Kota Bogor		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.700.000.000
		Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun berupa penanganan tanggul kritis Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	256.985.100
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	256.985.100
PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas					
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	787.982.235.091
		Pembangunan kualitas keluarga		Program Pengendalian Penduduk	123.465.340
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.542.525.401
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.077.316.994
2	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/*raudhatul athfal*/*bustanul athfal*) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat		Program Pengelolaan Pendidikan	4.936.142.888.616
		Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan			
		Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.261.498.630
				Program Perlindungan Perempuan	666.906.258
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	167.522.011
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	325.000.000
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	410.357.496
				Program Perlindungan Khusus Anak	567.930.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (*science*), teknologi (*technology*), teknik (*engineering*), seni (*art*), dan matematika (*mathematics*) unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor melalui proyek Pinjaman Luar Negeri *Asian Development Bank* (ADB) "*Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project*"(PRIME STeP)		Program Pengelolaan Pendidikan	4.936.142.888.616
		Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (*science*), teknologi (*technology*), teknik (*engineering*), seni (*art*), dan matematika (*mathematics*) unggulan di tingkat regional pada Universitas Singaperbangsa Karawang			
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	787.982.235.091
		Fasilitasi literasi digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500
		Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kota Depok		Program Pengelolaan Pendidikan	4.936.142.888.616
		Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi berupa pengembangan Kampus ITB Cirebon			
PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri					
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program perencanaan dan pembangunan industri	11.082.542.463
		Hilirisasi industri tembaga dan bauksit		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	862.619.720
		Hilirisasi industri kelapa dan karet			
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi		Program perencanaan dan pembangunan industri	11.082.542.463
		Pengembangan industri alat angkut termasuk *electric vehicle* dan kedirgantaraan		Program perencanaan dan pembangunan industri	11.082.542.463
		Pengembangan industri elektronik dan digital			
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
3	Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Pembangunan Pelabuhan Patimban		Program Pengelolaan Pelayaran	11.000.000.088
PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan					
1	Pemerataan ekonomi	Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengembangan Perumahan	11.164.793.970
		Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (Bus Rapid Transit Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung)		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	211.631.163.682
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.800.000.000
		Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola		Program Pengembangan Perumahan	11.164.793.970
		Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh		Program Kawasan Permukiman	38.050.800.000
		Pembangunan jalan bebas hambatan berupa pembebasan lahan untuk pembangunan *Fly Over* Kiaracondong-Buahbatu di Kota Bandung		Program Penyelenggaraan Jalan	2.374.465.488.415
		Pembangunan *Area Traffic Control System/ Intelligent Transportation System* berupa penyediaan angkutan umum massal perkotaan Bus Rapid Transit di Bandung Raya		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	211.631.163.682
		Pembangunan baru kawasan permukiman berupa rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta		Program Pengembangan Perumahan	11.164.793.970
		Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	23.100.000.000
PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					
1	Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan	Reviu dan penyusunan pengaturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	23.100.000.000
		Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis *online single submission* dan mal pelayanan publik digital	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good* dan *Clean Governance*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.772.189.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu				
PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					
1	Melestarikan budaya	Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	658.559.444
				Program pengelolaan permuseuman	3.252.480.000
				Program pengembangan kebudayaan	8.424.040.556
2	Penanganan bencana	Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota metropolitan Bandung	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	16.625.289.953
		Pengamanan Pantai Eretan dan Kabupaten Cirebon			
3	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan		Program Penanggulangan Bencana	7.846.665.939

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025 Diolah
* Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau mengakses laman berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

6.2 Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2026, didukung oleh berbagai sumber pendanaan sebagai upaya kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan *stakeholders* lainnya. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah percepatan dalam pencapaian visi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga membuka peluang sumber-sumber pendanaan lainnya untuk turut berperan dalam pembangunan di Jawa Barat seperti: 1) APBN; 2) Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; 3) Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah; 4) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR); serta 5) Dana Umat.

6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2026

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai oleh APBN, baik yang diusulkan sebagai Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L), maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rencana kerja yang menjadi program dan kegiatan keterkaitan Provinsi untuk mendukung prioritas nasional tahun 2026 yang merupakan *Highlight Indikasi Intervensi* untuk provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana Rencana Program dan Kegiatan Provinsi untuk mendukung prioritas nasional tahun 2026 diatas, maka terdapat Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi, disajikan pada (Tabel 6.2) sebagai berikut:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://bsre.bssn.go.id/verifikasi/1D17AF9E85

Tabel 6.2
Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Pembangunan Ruang Kelas Baru	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	▪ Pembangunan Unit Sekolah Baru; ▪ Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Pembangunan RSUD Kabupaten/Kota dengan layanan khusus	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Program Sanitasi Lingkungan	DAS Citarum, serta kabupaten/kota yang belum ODF *(Open Defecation Free)*
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	▪ Pendidikan berkarakter; ▪ 10.000 Manajer Putra Daerah; ▪ Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat	Kota Depok dan 27 Kab/kota di Jawa Barat
7	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	▪ Pengamanan Mata Air ▪ Reboisasi hutan dan lahan ▪ Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai	Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya
8	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	▪ Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ▪ Normalisasi Sungai dan Muara; ▪ Pengamanan Mata Air; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi);	Kabupaten/kota di WS Citarum,Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan-Cilaki
9	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	Kabupaten di wilayah REBANA, Cekungan Bandung (Kab. Bandung, Bandung Barat), Bodebek (Kabupaten Bogor)

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
				dan Kabupaten/kota Jawa Barat Bagian Selatan
10	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	▪ Pembangunan Kampung Adat Nelayan; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di Pesisir Utara dan Selatan jawa barat
11	*Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, **Jawa Barat**, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah	Dukungan untuk normalisasi Sungai dan Muara pada Wilayah Sungai kewenangan pusat dan Normalisasi Sungai dan muara di WS Provinsi	Kabupaten/kota di Pantura Jawa Barat
12	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan	Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan
13	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, **Jawa Barat (Bekasi)**, dan Sulawesi Tenggara (Palu)	▪ Program Energi ramah lingkungan; ▪ Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan;	Kabupaten/kota Bodebek (Kabupaten Bekasi), Cekungan Bandung
14	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	Papua, Sumatera, **Jawa**, dan Nusa Tenggara	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan
15	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, **Jawa Barat**, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
		Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat		
16	Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga	Banten, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Rieu, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat	Program pengelolaan tambang berwawasan lingkungan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran
17	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Optimalisasi BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat)	Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan, serta Kota Cirebon dan Kota Bandung
18	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Program Transformasi Birokrasi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
19	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Transformasi birokrasi	
20	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir); ▪ Program Sanitasi Lingkungan	Kabupaten Subang
21	Pembangunan Jakarta Metropolitan *Mass Rapid Transit* Koridor Timur-Barat	DKI Jakarta, **Jawa Barat**, dan Banten	▪ Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Massal - *Bus Rapid Transit* (Pengelolaan); - Kereta api perkotaan; - Reaktivasi rel kereta api; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (konektivitas menuju jalan simpul transportasi) ▪ Program Mitigasi Dampak Sosial dan lingkungan; ▪ Pembangunan kelembagaan Pengelola Transportasi	Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bandung Barat, Pangandaran, Ciamis serta Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Banjar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
22	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir);	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
23	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat;
24	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), **Jawa Barat (Bekasi, Bandung)**, Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado)	▪ Pembangunan TPPAS Regional o Pembangunan TPPASR Legok Nangka; o Pembangunan TPPASR Lulut Nambo ; o Pembangunan TPPASR Cirebon Raya; o Pembangunan TPPASR Bodebek ▪ Pengelolaan Sampah Mandiri	Kabupaten Bogor, Bekasi, Cirebon, Bandung, Bandung Barat dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi,

Sumber: RPJMN 2025-2029
Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Demikian pula dengan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di input dalam Aplikasi Krisna Selaras. Adapun pagu anggaran indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2026 untuk mendukung prioritas nasional tahun 2026 tersebut, disajikan pada (Tabel 6.3). berikut:

Tabel 6.3
Pagu Anggaran Indikatif
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2026 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu DAK Tahun 2025	
		Fisik (Rp.)	Non Fisik (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	127.831.750.000	4.802.152.304.000
2	Dinas Kesehatan	25.809.132.000	37.191.106.000
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	4.990.090.000
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	-	600.660.000
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	-	150.000.000
	TOTAL	**153.640.882.000**	**4.845.084.160.000**

Sumber : Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2025
Ket : Untuk data pagu 2026 akan tersedia pada bulan November T-1

Selanjutnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa daftar usulan program dan kegiatan tahun 2026 yang diusulkan didanai melalui DAK Bidang Fisik dan Non Fisik Tahun 2026 dan yang statusnya ter*input* dalam Aplikasi Krisna Selaras diusulkan melalui surat resmi kepada Gubernur Jawa Barat dengan disertai lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar".

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh Proyek Strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU telah ada 1 (satu) proyek strategis yang sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu TPPAS Regional Lulut Nambo.

TPPAS Regional Lulut Nambo merupakan salah satu sarana strategis milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan skema pembiayaan KPBU. TPPAS Lulut Nambo melayani pembuangan sampah bagi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang merupakan badan usaha dalam pengelolaan TPPAS Lulut Nambo untuk persampahan menggunakan teknologi MBT untuk mengubah sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF) dan kompos. Di areal seluas 55 hektar, produksi RDF diperkirakan 35 persen dari potensi limbah yang masuk ke pabrik, produknya langsung dimanfaatkan oleh PT. Indocement sebagai *offtaker*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

Perkembangan proyek TPPAS Lulut Nambo saat ini dalam tahap pemenuhan keuangan (*Financial Close*) oleh PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL). Rencana dan upaya percepatan pekerjaan konstruksi dan operasi masih dalam tahap pembahasan. Perkembangan proyek lainnya yang terdapat dalam skema pembiayaan KPBU adalah 1 (satu) proyek yang dalam proses transaksi, yaitu TPPAS Regional Legok Nangka, dan 3 (tiga) proyek dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, SPAM Sinumbra, serta LRT Bandung Raya dan 2 (dua) proyek dalam tahap perencanaan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran dan Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi. Selengkapnya dapat disajikan pada (Tabel 6.4), berikut:

Tabel 6.4
Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2026

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2024	Jadwal KPBU Tahun 2026
1	TPPAS Lulut Nambo	• Fase I Kapasitas 50 ton/hari • Pelayanan sampah mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan • Sampah terolah sebanyak 4.565,52 ton • RDF dikirimkan ke *Offtaker* ke PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebanyak 1.856,46 ton	• Kontruksi dan Operasionalisasi Fase *Ultimate* Kapasitas 1.800-2.300 ton/hari
2	TPPAS Legok Nangka	• Adendum AMDAL • Dokumen Penunjukan Lokasi dari PJPK kepada BUP • Kontrak EPC • Dokumen Pembiayaan *Due Diligence* (DD) • Jaminan Pelaksanaan I • Harmonisasi Perjanjian dengan PJBL • Harmonisasi Perjanjian Penjaminan dengan PT. PII • Pembayaran *Development Cost*	• Surat Penugasan dari Kementerian ESDM • Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PT. PLN Persero • Perjanjian Penjaminan antara BUP dan PT. PII • Surat Dukungan Kelayakan *Viability Gap Fund* (VGF) dari Kementerian Keuangan • Register Komponen 1 *Bluebook* dan Komponen 3 *Greenbook* dari Bappenas • Pemenuhan Pembiayaan *Financial Close*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2024	Jadwal KPBU Tahun 2026
		Reimbursement Account (DCRA) dari BUP kepada Penasehat PJPK • Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat	
3	SPAM Jatigede		
4	SPAM Metro Bandung Regional Wilayah Barat (Sinumbra)		
5	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung (LRT Bandung Raya)	Penyusunan *Financial Business Case (FBC)* oleh PT SMI	• Penyusunan Kajian Trase • Penyusunan Dokumen LARAP • Penyusunan Dokumen Lingkungan

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, 2025

Selanjutnya dari perkembangan proyek strategis tersebut, dapat diidentifikasi 19 (sembilan belas) proyek yang berpotensi untuk dikembangkan dengan skema KPBU, seperti terlihat pada (Tabel 6.5) sebelumnya. Selanjutnya proyek-proyek yang berpotensi untuk dikerjakan dengan skema KPBU ini dapat difilter dengan melakukan penapisan sehingga bisa teridentifkasi skema pembiayaan yang paling cocok untuk masing-masing proyek. Oleh karena itu, ditahun-tahun berikutnya diharapkan dapat terus diidentifikasi kembali proyek-proyek strategis yang berpotensi untuk dikerjakan dengan skema KPBU. Adapun prospek proyek KPBU, disajikan pada (Tabel 6.5), berikut:

Tabel 6.5
Prospek Proyek KPBU

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Perkiraan Nilai Investasi (dalam Rp)
1	Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan	300.000.000.000
2	TPPAS Bekarpur	Dinas Permukiman dan Perumahan	800.000.000.000
3	SPALD Cirebon Raya	Dinas Perumahan dan Permukiman	500.000.000.000
4	SPALD Bandung Raya	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.400.000.000.000
5	Pengembangan Kawasan Wisata dan MICE	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100.000.000.000
6	Pengembangan *Cable Car* di Metropolitan Bandung Raya	Dinas Perhubungan	150.000.000.000
7	Pembangunan PLT Surya Atap di Gedung-gedung Pemerintah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000.000

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Perkiraan Nilai Investasi (dalam Rp)
8	Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh – Pelabuhan Ratu	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.000.000.000
9	Kawasan Sains *Technopark* Jatinangor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	940.000.000.000
10	Pengembangan Pelabuhan Cirebon	Dinas Perhubungan	975.000.000.000
11	Hutan Bakau Sinar Laut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36.500.000.000
12	Pengembangan Pantai Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	226.000.000.000
13	*Shortcut* Cibungur - Tanjung Rasa	Dinas Perhubungan	1.900.000.000.000
14	Pengembangan Hotel di Batu Karas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	185.000.000.000
JUMLAH			**13.407.500.000.000**

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal karena Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 memiliki sejumlah aspek perbedaan dibanding Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Perbedaan itu misalnya pada aspek jenis dan mutu layanan. Pada aspek tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan tentang teknis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target, dan batas waktu capaian. Dalam aturan tersebut juga sudah tergambarkan soal mutu minimal layanan.

Sedangkan dalam aspek yang sama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian, serta batas waktu capaian yang hanya

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

mencakup penerima layanan dasar. Namun, pada regulasi tersebut belum tergambarkan mutu minimal layanan. Selain, aspek jenis dan mutu layanan, perbedaaan juga terdapat pada aspek lainnya seperti tahapan penerapan SPM, pencapaian SPM, pelaporan, tim penerapan SPM, koordinasi penerapan SPM, hingga lampiran.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah provinsi yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun Jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : 1) SPM Bidang Pendidikan, 2) SPM Bidang Kesehatan, 3) SPM Bidang Pekerjaan Umum, 4) SPM Bidang Perumahan Rakyat, 5) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) SPM Bidang Sosial. Adapun Jenis pelayanan dan alokasi anggaran rencana pendanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 pada setiap bidang disajikan pada (Tabel 6.6), berikut:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 6.6
Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.131.206.665.551	APBD, APBN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.556.837.653.412	APBD, APBN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	248.098.569.653	APBD, APBN
2	SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	486.852.605.576	APBD, APBN
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
3	SPM Pekerjaan Umum	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	350.000.000	APBD
		Penyediaan Pelayanan Pengelolahan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	200.000.000	APBD
4	SPM Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.764.793.970	APBD
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	225.000.000	APBD
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	175.000.000	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
				Relokasi Program Provinsi		
5	SPM Trantibumlinas	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.503.000.000	APBD
6	SPM Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.743.755.529	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	10.840.341.472	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	8.897.834.280	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	5.400.000.000	APBD
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.215.000.000	APBD
	JUMLAH TOTAL				**5.468.310.219.443**	

Sumber: diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Berkaitan dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan integrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

penerapan SPM ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, diantaranya, sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, meliputi jenis pelayanan dasar:
   a. Pendidikan menengah, dengan indikator:
      1) Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (Target 100%);
      2) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya).
   b. Pendidikan khusus, dengan indikator:
      1) Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (Target 100%);
      2) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya).

Berdasarkan Membebaskan biaya SPP bagi masyarakat Jawa Barat yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Target jumlah siswa yang mendapatkan fasilitas tersebut berjumlah 811.001 siswa, yang terdiri atas 484.181 siswa SMA, 321.230 siswa SMK dan 5.650 siswa SLB. Selain itu, diberikan pula bantuan untuk siswa yang bersekolah di SMA/SMK/SLB swasta dan Madrasah Aliyah (MA) melalui program yang disebut dengan Program BPMU atau Bantuan Pendidikan Menengah Universal kepada 1.303.257 siswa, yang terdiri atas 271.408 siswa SMA Swasta, 773.907 siswa SMK swasta, 18.708 siswa SLB swasta serta siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 239.234 orang. Adapun untuk Pencapaian SPM sub urusan Pendidikan di tahun 2025 adalah 100 persen.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

2. Bidang Kesehatan, meliputi jenis pelayanan dasar:
    a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100 persen);
    b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100 persen).

    Berdasarkan memberikan bantuan berupa anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 25 ayat (2) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah. Penerima PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Usulan jumlah masyarakat yang dibantu untuk Tahun Anggaran 2024 jumlah tersebut merupakan 40 persen peserta yang merupakan kewajiban Provinsi. Adapun untuk Pencapaian SPM sub urusan Kesehatan di tahun 2025 adalah 100 persen.

3. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi jenis layanan dasar:
    a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (Target 100 persen);

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Target 100 persen).

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi jenis layanan dan Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, untuk jenis pelayanan dasar berupa Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi (Target 100 persen);
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Target 100 persen);
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi, dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Target 100 persen).

Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, dilaksanakan dengan melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu: a) Keterbatasan penyediaan rumah; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; dan c) Permukiman kumuh yang semakin meluas. Target sasaran perbaikan Rutilahu pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 ribu unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dan target tahun 2024 adalah sebesar 21.500 unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota; Adapun untuk Pencapaian SPM sub urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman di tahun 2025 adalah 100 persen.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, untuk jenis pelayanan dasar berupa Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi (Target 100 persen); Berdasarkan Penyediaan mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibumlinmas merupakan bagian dari SPM Provinsi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sarana prasarana yang memadai dan dilaksanakan oleh SDM Satpol PP dibantu Satlinmas yang sesuai dengan standar; Mutu Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar Operasional Prosedur Satpol PP; Standar Sarana Prasarana Satpol PP; Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat serta Standar Pelayanan yang Terkena

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada. Target Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mencakup Mutu Standar Pelayanan Dasar penerima jenis pelayanan dasar yang terkena dampak Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi dengan target pencapaian 100 persen dalam kegiatan Penegakan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi (5 Perda). Dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan SPM, Satpol PP Jawa Barat melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum, Penegakan 5 (lima) Perda dan Pelaksanaan Satlinmas Juara dalam melakukan edukasi, sosialisasi serta dukungan operasional untuk menunjang tugas dan tanggungjawab Satlinmas di 14 (empat belas) Desa dalam 7 (tujuh) Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam mempermudah pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat untuk pencapaian target SPM trantibumlinas, Satpol PP menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Trantimbumlinmas dalam meningkatkan suksesnya Indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 persen setiap tahunnya. Adapun untuk Pencapaian SPM sub urusan Ketentramaan, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di tahun 2025 adalah 100 persen.

6. Bidang Sosial, meliputi jenis pelayanan dasar:
    a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti (Target 100 persen);
    b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

panti (Target 100 persen);

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti (Target 100 persen);
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (Target 100 persen);
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan (Target 100 persen).

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di dalam panti meliputi pengasuhan (untuk anak terlantar), pemberian permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari- hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal (untuk gelandangan dan pengemis). Rehabilitasi sosial dasar untuk korban bencana adalah pemberian permakanan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan psikososial. Adapun untuk Pencapaian SPM urusan Sosial di tahun 2025 adalah 100 persen. Selain itu, Penguatan kebencanaan juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024. Hal tersebut diimplementasikan melalui penguatan layanan logistik, mitigasi dan kelembagaan; penyiapan rumah korban bencana, *Buffer Stock* (Perlindungan Sosial Korban Bencana), rehabilitasi daerah irigasi kritis, serta

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Adapun untuk Pencapaian SPM penguatan urusan kebencanaan di Tahun 2025 adalah 100 persen;

Selanjutnya intervensi program dalam rangka pelaksanaan SPM dituangkan dalam program pada masing-masing perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah daerah sebagaimana nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-05889 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 6.7
Rencana Program/Kegiatan untuk Mendungkung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Bidang SPM	Perangkat Daerah	Program
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Bidang Sosial	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Program Penanganan Bencana

Sumber : RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

6.3.1 Pendanaan dari Obligasi Daerah/Sukuk Daerah

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Salah satu jenis obligasi daerah ada yang berbasis Syariah dinamakan Sukuk. Instrumen keuangan ini dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

yang ada. Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026, disajikan pada (Tabel 6.8) berikut:

Tabel 6.8
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang bersumber APBD Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	14.139.552.498.342
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	2.029.688.537.464
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	11.680.202.829.282
4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	2.864.884.027.335
	TOTAL	**30.714.327.892.423**

Sumber : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah per tanggal 18 Juli 2025

Demikian halnya rincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, disajikan pada (Tabel 6.9), berikut:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 6.9
Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Kode	Perangkat Daerah	Rancangan Alokasi Anggaran Tahun 2026
1	1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	11.128.332.440.007
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	2.611.045.820.664
3	1.03.0.00.0.00.01	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	2.625.762.064.355
4	1.03.0.00.0.00.02	Dinas Sumber Daya Air	412.371.092.766
5	1.04.1.03.2.10.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	136.887.827.878
6	1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	52.649.474.574
7	1.05.0.00.0.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.538.298.458
8	1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	156.699.154.883
9	2.07.3.32.0.00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	165.817.789.318
10	2.08.2.14.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	36.123.672.007
11	2.09.3.27.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	209.984.422.569
12	2.11.0.00.0.00.03	Dinas Lingkungan Hidup	178.482.646.484
13	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.685.932.887
14	2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.552.172.821
15	2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	355.838.919.749
16	2.16.2.21.2.20.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	170.807.317.020
17	2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	50.602.496.731
18	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.600.504.355
19	2.19.0.00.0.00.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.426.384.697
20	2.23.2.24.0.00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.470.080.968
21	3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	178.911.637.057
22	3.26.2.22.0.00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	107.508.704.734
23	3.27.0.00.0.00.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	382.629.364.594
24	3.27.0.00.0.00.02	Dinas Perkebunan	97.067.063.004
25	3.28.0.00.0.00.01	Dinas Kehutanan	245.575.410.488
26	3.29.0.00.0.00.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	203.893.645.814
27	3.31.3.30.0.00.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	138.985.702.516
28	4.01.0.00.0.00.01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9.555.094.854
29	4.01.0.00.0.00.01	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.434.085.364
30	4.01.0.00.0.00.01	Biro Kesejahteraan Rakyat	100.857.340.380
31	4.01.0.00.0.00.01	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan	7.407.565.399

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

No	Kode	Perangkat Daerah	Rancangan Alokasi Anggaran Tahun 2026
32	4.01.0.00.0.00.01	Biro Perekonomian	4.997.967.746
33	4.01.0.00.0.00.01	Biro Pengadaan Barang/Jasa	4.863.850.414
34	4.01.0.00.0.00.01	Biro Organisasi	2.468.080.925
35	4.01.0.00.0.00.01	Biro Administrasi Pimpinan	47.943.262.274
36	4.01.0.00.0.00.01	Biro Umum	378.038.628.144
37	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	645.511.030.923
38	5.01.0.00.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96.708.022.766
39	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.149.625.366.324
40	5.02.0.00.0.00.02	Badan Pendapatan Daerah	511.688.091.880
41	5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah	67.717.531.190
42	5.04.0.00.0.00.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.161.506.473
43	5.05.0.00.0.00.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.471.013.660
44	5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	12.499.030.081
45	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	102.110.300.930
46	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.020.081.298
TOTAL			**30.714.327.892.423**

Sumber: Hasil olahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Rancangan pagu sebagaimana tertuang pada (Tabel 6.9) diatas, telah memuat belanja pegawai, belanja *fixed cost*, prioritas perangkat daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja prioritas lainnya. Sedangkan untuk rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pagu pendanaannya di jabarkan pada lampiran RKPD tahun 2026 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya beberapa Proyek Strategis Provinsi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 beserta skema pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan disusun sebagai salah satu daftar proyek prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan provinsi untuk kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun beberapa proyek strategis provinsi tersebut, disajikan pada Tabel 6.10, berikut:

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

Tabel 6.10
Proyek Strategis/Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NO	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKASI ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Premi PBI-JK	429.487.659.720	Dinas Kesehatan
2	Premi PBPU-JK melalui Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	483.579.960.005	Dinas Kesehatan
3	Layanan kesehatan SKTM	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
4	BOPD SMA/SMK/SLB negeri pegawai	905.178.801.230	Dinas Pendidikan
5	BOPD SMA/SMK/SLB negeri Non Pegawai	92.711.174.086	Dinas Pendidikan
6	Guru Pamong	20.633.580.000	Dinas Pendidikan
7	Belanja Hibah BPMU SMA/SMK/SLB Swasta	61.472.880.000	Dinas Pendidikan
8	Belanja Hibah BPMU MAN/MAS	14.149.740.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
9	Belanja Hibah Partai Politik	242.856.550.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Belanja Subsidi BRT	121.341.421.779	Dinas Perhubungan
11	Belanja Subsidi Operasi Pasar	15.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Belanja Operasional TPA Sarimukti	40.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
13	Belanja Cadangan Pangan Pemerintah	10.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
14	Bantuan Keuangan Desa	929.425.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15	Belanja Pemeliharaan Irigasi, Situ, Embung	62.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air
16	Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan	347.439.417.049	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
17	Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan	366.303.997.903	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
18	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi (Rekonstruksi, Rehabilitasi, dll)	1.700.000.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
19	Pengadaan Satuan Sambungan Listrik	100.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Normalisasi Sungai, Embung, Situ dan Jaringan Irigasi	100.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air
21	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rumah Terdampak Bencana	50.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Pembangunan Gapura Perbatasan	20.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
23	Penerangan Jalan Umum dan Fasilitas Lalu Lintas	125.000.000.000	Dinas Perhubungan
24	Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana	50.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis	10.000.000.000	Dinas Kehutanan
26	Revitalisasi Lahan Perkebunan	2.000.000.000	Dinas Perkebunan
27	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Penataan Kawasan Destinasi Wisata	5.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
29	Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru	200.000.000.000	Dinas Pendidikan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKASI ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
30	Beasiswa Operasional Siswa Kurang Mampu P3KE (Konversi BPMU)	250.000.000.000	Dinas Pendidikan
31	Pendidikan Berkarakter	10.000.000.000	Dinas Pendidikan
32	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Daerah	150.000.000.000	Dinas Kesehatan
33	Pengadaan Alat Kesehatan	20.000.000.000	Dinas Kesehatan
34	Penataan Kantor Pemerintahan	10.000.000.000	Biro Umum
35	Pelatihan Calon Tenaga Kerja (Umum)	10.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36	Pengadaan Pupuk, Benih Dan Alsintan Pertanian	30.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
37	Pengembangan Anakan Sapi	20.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
38	Pengelolaan Sampah (TPPAS Lulut Nambo)	20.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
39	Pembangunan Media Reklame di Aset-Aset Provinsi	10.000.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
40	Subsidi Bunga	10.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
41	Peningkatan Investasi Daerah	15.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
42	Peningkatan Pendapatan Daerah	10.000.000.000	Badan Pendapatan Daerah
43	Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pegawai	10.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44	Kerjasama Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial	20.000.000.000	Dinas Sosial
45	Penurunan Kehamilan Tidak Diinginkan	5.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
46	Penanganan Daerah Rawan Pangan	5.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
47	Pertanian Modern	25.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
49	Persiapan Pemekaran Desa	5.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
50	Pembangunan IPAL Kawasan Industri	20.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
51	Pengembangan Ekspor Daerah	10.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
52	Pengembangan BUMD	5.000.000.000	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Daerah
53	Monetisasi Aset Daerah	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
54	Optimalisasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Daerah	1.000.000.000	Biro Organisasi
55	Penanganan Bencana	5.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
56	Beasiswa Pendidikan Doktor Umum/Spesialis	5.000.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
57	Pelayanan Dasar (Pemberian Permakanan, Pakan dan Obat-Obatan, dll)	17.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
58	Pelayanan Dasar (Pemberian Permakanan, Pakan dan Obat-Obatan, dll)	2.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
59	Pembangunan Transmisi Air Baku Legok Nangka	43.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air
	TOTAL	**7.294.580.181.772**	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

7.1 Penetapan Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. IUP disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan prinsip sinkronisasi-keselarasan. IUP Jawa Barat mengacu pada Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN yang terdiri dari 45 indikator. IUP dan target Jawa Barat tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok sebagai penjabaran visi dan misi RPJPD Jawa Barat.

Berdasarkan Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah terdapat Upaya transformatif super prioritas (*game changers*) yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, (Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia), (Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah), dan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi.

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

7.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2026 meliputi 9 (sembilan) indikator yang mewakili kinerja dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2026 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Makro Provinsi Jawa Barat

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2024	2025	2026
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,57	0,58
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,98 - 5,37	5,15 – 6,20
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Kapita	56,08	57,41 – 59,60	63,65 – 66,00
6	Gini Ratio	Poin	0,428	0,383 – 0,390	0,381 – 0,420
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6,61	6,97
8	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,72	12,62
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Poin	66,02	64,06	64,31

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

7.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Kinerja Makro ditunjukkan dengan Indikator Makro, sedangkan kinerja utama ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan Visi Misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome.* Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *cross cutting* beberapa urusan atau program. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7.2.

.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target RKPD			Ket
				2025	2026	2027	
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,55	0,56	0,57	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat Pendek) pada balita	Persen	15,90	15,14	14,39	13,65	
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	56,50	57,24	57,98	
4	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	N/A	3,02	3,08	3,14	
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	61,10	62,51	63,94	65,41	
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	N/A	4,58	4,42	4,23	
8	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	1,475	1,500	
9	Nilai Tukar Petani	Poin	112,17	112-117	114-119	115-121	
10	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	
11	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06 // 70,75	63,11	63,19	64,88	
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	58,11	59,26	
13	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif dan Tahunan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target RKPD			Ket
				2025	2026	2027	
	a. a, Kumulatif	Persen	N/A	2,66	3,31	4,02	
	b. b, Tahunan	Persen	N/A	9,27	10,63	12,46	
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	64,31	64,56	
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44	69,71	70,61	71,29	
16	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,51	71,95	73,12	73,87	
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,458	0,457	0,448	
18	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,40	6,55	6,70	
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	108,30	107,44	
20	Indeks Desa	Persen	77,11	77,46	79,00	80,00	
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	73,71	74,05	74,39	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	56,70	57,24	57,78	
23	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,90	3,96	4,04	
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A-	A	A	A	
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	81,29	81,30	
26	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	86,03	87,52	89,02	

Sumber: Bappeda 2025, diolah.

7.2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dan penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu **aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah**. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan disajikan telah meliputi 45 indikator utama pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN sebagai arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun kedepan sebagai alat ukur utama dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang. Adapun Penetapan target Indikator kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 7.3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,97	83,42	83,72	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	3,66	3,73	DSDA, Dishut, DESDM, DLH, BBWS, DIsperkim, DTPH, BPBD, Bappeda, Dinsos, BHLK, Badan Geologi
3	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	N/A	6,61	6,97	Dishut, Disbun, DTPH, DKP, DKPP, DLH, Disperkim, DESDM, Dishub, Bappeda
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	64,31	DLH, Dishut, Disbun, DKP, Dishub, DSDA
5	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Persen	N/A	3,02	3,08	Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	10,54	13,5	18,88	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	7,04	23,04	26,11	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	46,46	81,73	85,53	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/Kapita	1391,67	1.396,00	1.424,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	Persen	N/A	4,58	4,42	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
11	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	105,28	120,12	Dinas Sumber Daya Air

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Konsumsi Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	37,60	41,20	Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	108,30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					
15	a. Kumulatif	Persen	N/A	2,66	3,31	Dishut, Disbun, DTPH, DKP, DKPP, DLH, Disperkim, DESDM, Dishub, Bappeda
16	b. Tahunan	Persen	N/A	9,27	10,63	Dishut, Disbun, DTPH, DKP, DKPP, DLH, Disperkim, DESDM, Dishub, Bappeda
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37	5,15 - 6,20	
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	56,08	57,41 - 59,60	63,65 - 66,00	
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	
4	Rasio Gini	Poin	0,428	0,383 - 0,390	0,381 - 0,420	
5	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,55	0,56	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	75,56	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Ibu	Per 100,000 kelahiran hidup	98,6	122	109	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,90	15,14	14,39	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pada https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	N/A	95	95	Dinas Kesehatan
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	90	90	Dinas Kesehatan
12	Indeks Kesejahteraan Petani	poin	N/A	0,6522	0,6808	DTPH, DISBUN, DKPP, DKP, DISHUT
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,73	98,00	98,40	Dinas Kesehatan
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Persen				Dinas Pendidikan
	i) Literasi Membaca	Nilai	60,94	61,59	62,25	Dinas Pendidikan
	ii) Numerasi	Nilai	50,42	52,27	54,13	Dinas Pendidikan
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					Dinas Pendidikan
	i) Literasi Membaca	Nilai	67,19	68,05	68,92	Dinas Pendidikan
	ii) Numerasi	Nilai	69,01	69,22	69,44	Dinas Pendidikan
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,24	9,35	9,43	Dinas Pendidikan
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,84	12,88	Dinas Pendidikan
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	9,84	Biro Kesejahteraan Rakyat
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	84,31	86,42	87,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	34,1	39,77	41,19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Kesejahteraan Rakyat,
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	24	25,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	56,70	57,24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	73,71	74,05	Biro Kesejahteraan Rakyat
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44	69,71	70,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
25	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,458	0,458	0,457	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,51	71,95	73,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,23*	90,5	90,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61,10	62,51	63,94	Dinas Pemuda dan Olahraga
29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	72,76	72,77	72,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
30	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	45,61	46	46,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pada laman https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
						Perdagangan, DPMPTSP, DISKUK
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,72	12,62	
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	1,69	2,16	Disbun, DKP, DTPH, DKPP
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,85	3,99	4,57	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	41,39	41,87 - 42,00	41,51 - 41,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,07	3,10	3,21-3,46	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	536,60	561,76	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	22,58	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,05	3,11	3,23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,71	68,38	69,12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	N/A	49,88	50,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3AKB
11	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	81,29	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	N/A	61,30	61,73	Data dari tim PSDA, Disnakertrans, Disdik, Disbun, DTPH, Dishut, DLH, ESDM, Dishub, DKP, Disperindag,
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	45,29	48,19	51,38	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	24,36* (2023)	25,18	26,01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,40	6,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persen	N/A	7,88	7,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,70	24,72	24,84 - 25,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	N/A	21,90 - 21,94	22,35 - 22,53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	63,11	63,19	DBMPR, Dishub, DSDA, Disperkim, ESDM
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	58,11	Dinas Perumahan Dan Permukiman
21	Moda Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13	13,83	Dinas Perhubungan
22	Persentase Desa Mandiri	Point	39,09	40,07	41,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	1,58	1,67	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau melalui https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
24	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	Biro Perekonomian (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
25	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	23,70	25,08	
26	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94,22	94,70	Biro Perekonomian, Bapenda
27	Efektivitas Kerjasama Internasional	Persen	N/A	90,91	91,33	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
28	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Poin	N/A	0,557	0,570	Multi OPD, DLH, DTPH, DSDA, Dishut, Disbun, DSDA, DKP, Disperkim, DKPP
29	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	125,44 (2023)	145,15	142,56	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Return on Assets (RoA) BUMD Jabar	Persen	N/A	1,62	1,72	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,32	89,34	Biro Hukum dan HAM
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,73	4,74	N/A	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	1,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,77	4,78	Biro Organisasi
5	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,84	72,96	72,96	Inspektorat
6	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	56,50	57,24	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	86,03	87,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Indeks Kepatuhan Daerah	Poin	83,08*	83,50	84,00	Biro Hukum dan HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A-	A	A	Biro Organisasi, Inspektorat, Diskominfo, Dinas Perpusatakan dan Arsip Daerah, Bappeda, BKD, BPKAD, BP2D
10	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	100	91	95	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,90	3,96	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah
12	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Poin	N/A	49,51	50,01	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Persentase Penegakan Perda	Persen	N/A	60	80	Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
1	**PENDIDIKAN**					
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,24	9,35	9,43	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun	Persen	71,15	71,55	71,89	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	Persen	55,14	57,02	57,65	Dinas Pendidikan
4	Nilai Rapor Pendidikan	Nilai	69,79	70,60	71,41	Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**					
1	Nilai Standar Pelayanan Minimal Provinsi (KLB dan Bencana)	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,73	98,6	98,7	Dinas Kesehatan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah (rumah sakit, puskesmas, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan masyarakat)	Poin	N/A	77	78	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Ibu (per 100.000KH)	per 100.000 kelahiran hidup	98,6	122	109	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Balita (per 1000KH)	Per 1000 kelahiran hidup	N/A	12,38	11,67	Dinas Kesehatan
6	Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	Persen	83	90	90	Dinas Kesehatan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	86,44	90,11	97,75	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	59,80	61,23	62,40	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	105,28	120,12	Dinas Sumber Daya Air
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Poin	57,04	58,53	59,33	Dinas Sumber Daya Air
5	Pesentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persen	N/A	98,00	88,00	Dinas Sumber Daya Air
6	Persentase Pengurangan Panjang Garis Pantai yang Terkena Abrasi Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persen	N/A	100	91,67	Dinas Sumber Daya Air
7	Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	95	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	37,60	41,20	Dinas Perumahan Dan Permukiman
9	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	10,54	13,5	18,88	Dinas Perumahan Dan Permukiman
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang Memenuhi Syarat Ketahanan Bangunan	Persen	78,81	79,82	80,83	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2	Persentase Sisa Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Persen	67,05	60,14	48,17	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	**TRANTIBUMLINMAS**					
1	Indeks Trantibumlinmas	Poin	N/A	65	66	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,72	0,73	0,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**SOSIAL**					
1	Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS)	Poin	56.88	57,38	57,90	Dinas Sosial
7	**TENAGA KERJA**					
1	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	N/A	27,51	36,09	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Persen	N/A	74,62	75,35	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	816	816	819	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	62,02*	62,08	63,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
3	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	55,56	66,67	74,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9	**PANGAN**					
1	Tingkat konsumsi pangan (energi dan protein)					Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- energi	kkal/kap/hari	2069,90	2100	2100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- protein	gr/kap/hari	62,3	57	57	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	95,37	95,45	95,53	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10	**PERTANAHAN**					
1	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	113,8	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
11	**LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor persampahan kumulatif	Persen	N/A	1,42	2,4	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	46,86	64,61	64,81	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	88,34	85,14	85,2	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	83,68	59,52	59,92	Dinas Lingkungan Hidup
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Poin	N/A	0,557	0,570	Dinas Lingkungan Hidup
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	71,15	73,5	77	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	39,09	40,07	41,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	0,30	0,36	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal	Persen	0,02	0,04	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1	Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,03	2,10	2,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15	**PERHUBUNGAN**					
1	Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat	Persen	57,58	60,34	62,14	Dinas Perhubungan
2	Moda Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13,00	13,83	Dinas Perhubungan
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	77,75	78,14	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	2,66	2,85	3,04	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	0,23	0,25	0,27	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
18	**PENANAMAN MODAL**					
1	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	251,14	263,70 - 279	276,88 - 309	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	91,81	92,00	92,50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	46,16	47,45	48,78	Dinas Pemuda dan Olahrga
2	Indeks Partisipasi olahraga	Indeks	0,208	0,227	0,247	Dinas Pemuda dan Olahrga
3	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	1,00	3,00	3,00	Dinas Pemuda dan Olahrga
20	**STATISTIK**					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,07	3,07	3,1	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	**PERSANDIAN**					
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	642	716	718	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	**KEBUDAYAAN**					
1	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Poin	N/A	27,36	27,86	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Penetapan Warisan Budaya Jawa Barat	Poin	47	35,00	35,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	**PERPUSTAKAAN**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	72,76	72,77	72,84	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Poin	75,07	75,08	75,09	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
24	**KEARSIPAN**					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Poin	80,5	81,00	81,50	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	82,00	82,50	83,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	1.589.396,38	1.591.708,47	1.591.857,39	Dinas Kelautan Dan Perikanan

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
2	Tingkat keberlanjutan kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil yang dikelola (EVIKA)	Poin	58,5	58,6	58,7	Dinas Kelautan Dan Perikanan
26	**PARIWISATA**					
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Persen	69,10	5,73	5,75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Persen	3	0,89	0,95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pertumbuhan Investasi Industri Kreatif	Rupiah (Triliun)	44,09	44,83	50,12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	**PERTANIAN**					
1	Indeks harga yang diterima (IT) Peternak	Poin	125,54	126,10	127,22	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Jumlah Produksi Tanaman pangan dan hortikultura	Ton	16.490.893	16.575.500	16.741.255	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3	Nilai Tambah Produk Perkebunan secara Berkelanjutan	Persen	51,77	35	35	Dinas Perkebunan
4	Laju peningkatan produktivitas komoditas unggulan utama perkebunan	Persen	1,58	0,5	0,5	Dinas Perkebunan
28	**KEHUTANAN**					
1	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Persen	5	5	5	Dinas Kehutanan
2	Persentase Tutupan Hutan	Persen	42,15	42,15	42,16	Dinas Kehutanan
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	7,61	7,68	7,87	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	70.064	71.670	73.654	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pada https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
3	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek teknis dan aspek pengusahaan	Persen	56,67	59,17	61,67	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
4	Persentase peningkatan titik muka air tanah yang dimanfaatkan	Persen	31,45	32,45	33,45	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	**PERDAGANGAN**					
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,85	4,17	5,51	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai Tambah Perdagangan	Trilyun Rupiah	252,24	262,75	277,22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	Nilai Ekspor	Milyar USD	37,87	38,88	40,12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
31	**PERINDUSTRIAN**					
1	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persen	98,64	98,82	98,56	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Trilyun Rupiah	133,13	113,87	263,88	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32	**TRANSMIGRASI**					
1	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen	100	87	88	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
32	**SEKRETARIAT DAERAH**					
1	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	Sekretariat Daerah
2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	1,475	Sekretariat Daerah
3	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)	Persen	86,44	86,45	86,47	Sekretariat Daerah
4	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	9,75	Sekretariat Daerah
5	Persentase BUMD Sehat	Persen	N/A	78,37	81,08	Sekretariat Daerah

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
6	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,32	89,34	Sekretariat Daerah
7	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	80,22	80,72	81,22	Sekretariat Daerah
8	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Persen	63,04	63,28	63,51	Sekretariat Daerah
9	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,29	90,3	90,31	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,76	4,77	Sekretariat Daerah
11	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,45	68,45	73,09	Sekretariat Daerah
12	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	87	89	92	Sekretariat Daerah
13	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,55	13,58	13,61	Sekretariat Daerah
14	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	TINGGI	TINGGI	Sekretariat Daerah
33	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	4,77	4,78	4,79	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34	**PERENCANAAN**					
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	26,32	26,37	26,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	27,05	27,12	27,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	**KEUANGAN**					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Laju Pertumbuhan Pendapatan	Persen	N/A	1,99	2,76	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92,87	90	90,25	Badan Pendapatan Daerah
36	**KEPEGAWAIAN**					
1	Indeks Sistem Merit	Poin	400	400	402,50	Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	53,93	53,96	53,98	Badan Kepegawaian Daerah
37	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	Indeks Profesional ASN Dimensi Kompetensi	Poin	32,80	33,00	33,50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	Persentase rancangan kebijakan hasil riset berbasis isu strategis	Persen	N/A	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Skor Satuan Inovasi Daerah	Poin	149,17	149,20	149,23	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39	**PENGHUBUNG**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Badan Penghubung	Poin	96,75	96,90	97,00	Badan Penghubung
40	**PENGAWASAN**					
1	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,84	72,96	73,64	Inspektorat Daerah
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Nilai	N/A	21,43	21,70	Inspektorat Daerah
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Daerah
4	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level (Skor)	3 (3,377)	3 (3,323)	3 (3,237)	Inspektorat Daerah
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	95,10	72,50	73,00	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau pada laman https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET		PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	
41	**PEMERINTAHAN UMUM**					
1	Meningkatnya partisipasi dan aksesibilitas politik masyarakat dalam proses demokrasi	Persen	N/A	75	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Menurunnya persentase kasus kejadian konflik sosial yang terdata/ terdeteksi	Persen	N/A	75	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: Bappeda 2025, diolah.
*) Data Sementara
N/A** (Masih dalam Pembahasan dan Perhitungan)

1D17AF9E85
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85



BAB VIII
PENUTUP

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan jangka menengah provinsi dengan perencanaan menengah nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, telaahan RPJPD Tahun 2025-2045 dan penelaahan terhadap Program Strategis Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, maka dalam rangka mencapai Visi **Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata**, diusung oleh 4 (empat) misi pembangunan yang juga sekaligus menjadi Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yaitu, (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul; (2) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif; (3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; (4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Tetap menjaga kesinambungan pencapaian Visi Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata melalui 4 (empat) misi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85
1D17AF9E85

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan 5 (tujuan) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran pembangunan daerah;

2. Sinergi berbagai pihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
4. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2026; dan
5. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85

1D17AF9E85

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 287 Dago Bandung

1D17AF9E85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D17AF9E85